RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan politik luar negeri RI telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia, baik di tingkat bilateral, regional, dan global.

Pada tataran bilateral, sepanjang tahun 2011, mekanisme hubungan bilateral yang telah dilakukan dengan sejumlah negara sahabat berhasil meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang, khususnya dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia, antara lain: perundingan perbatasan, perlindungan WNI, dan peningkatan kerja sama ekonomi.

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra strategis/komprehensif sepanjang tahun 2011 menunjukkan perluasan dan pendalaman bidang kerja sama. Kemitraan ini merupakan suatu pendekatan yang mensinergikan potensi yang dimilki oleh negara-negara termaksud dengan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan setara. Dalam kaitan ini, maka kemitraan strategis Indonesia mencakup negara-negara: Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea (ROK), India, Viet Nam, Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat,Brazil,Perancis, Rusia, dan Turki,serta Uni Eropa.

Sebagai Ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia menunjukan kepemimpinan dalam mendorong dicapainya tiga prioritas keketuaan Indonesia tahun 2011, yaitu: pertama, kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015; kedua, dipeliharanya kondisi kawasan Asia-Pasifik yang aman dan stabil; dan ketiga, menggulirkan visi ASEAN untuk sepuluh tahun mendatang sesuai tema *"ASEAN Community in a Global Community of Nations".*

Ketiga prioritas termaksud terus menerus menjadi pegangan ASEAN sepanjang tahun 2011 dan mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-19, tanggal 17-19 November 2011. KTT ASEAN dan rangkaian KTT lainnya, termasuk *East Asia Summit,* menghasilkan tidak kurang dari 61 kesepakatan, baik pada tingkat kepala negara maupun menteri. Secara khusus, para Pemimpin ASEAN menyetujui dan menandatangani Deklarasi Bali mengenai Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa atau *Bali Concord III*. Selain itu, pada KTT ke-6 *East Asia Summit* (*EAS*) telah disepakati *the Principles of Mutually Beneficial Cooperation (Bali Principles). Bali Principles* ini memuat aturan dasar dan prinsip-prinsip bersama yang pada intinya mengatur pemeliharaan hubungan bersahabat antar negara sebagaimana tercermin pula pada Piagam PBB, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), dan beberapa perjanjian lain antar negara-negara EAS. Prinsip-prinsip tersebut mencakup antara lain: penghormatan atas kemerdekaan, kedaulatan, integrasi territorial; non-intervensi ancaman pengunaan kekerasan; peningkatan ketahanan kawasan, termasuk terkait guncangan ekonomi dan bencana alam; penyelesaian sengketa dengan cara damai. *Bali Principles* ini akan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota EAS (*code of conduct*) dalam menjaga dan mendukung perdamaian, stabilitas, kesejahteraan kawasan.

Indonesia juga telah memainkan peranan penting dalam proses pembentukan arsitektur kawasan di Asia Pasifik. Konsep Indonesia mengenai *dynamic equilibrium* di kawasan dan perluasan keanggotaan EAS yang mencakup AS dan Rusia telah diterima oleh negara-negara di kawasan. Indonesia terus berperan dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan antara lain dengan disepakatinya *Declaration of Conduct of Parties* in the *South China Sea*(DoC).

Disamping itu, Indonesia terus meningkatkan peran aktifnya di berbagai organisasi internasional intra-kawasan dan antar-kawasan, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Pacific Islands Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG), *South-West Pacific Dialogue* (SWPD), *Coral Triangle Initiative on Coral*

Reefs, *Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF), *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC), *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), *Forum for East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC), dan *Asia-Europe Meeting* (ASEM).

Di tingkat global, Indonesia juga terus mengambil prakarsa dan inisiatif di berbagai isu multilateral, antara lain: perlucutan senjata dan non-proliferasi, penanggulangan terorisme, penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, *Millennium Development Goals* (MDGs), ketahanan pangan dan energi, pandemi, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya hayati, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional, HAM,reformasi PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Palestina, dan Kerja sama Selatan-Selatan. Khusus mengenai bidang perlucutan senjata, telah tercapai perkembangan yang cukup signifikan yaitu dirampungkannya perundingan antara mitra negara-negara ASEAN dan negara-negara pemilik senjata nuklir tentang Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara serta dirampungkannya proses ratifikasi *Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT).*

Pada forum G20 di Cannes, sementara turut memberi perhatian terhadap kasus keuangan di *Euro Zone,* mengingat kemungkinan perluasan dampak krisis tersebut ke kawasan lain, Indonesia tetap konsisten dalam memastikan pembahasan kepentingan negara-negara berkembang di forum tersebut.

Sebagai negara yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip multilateralisme, sepanjang tahun 2011, Indonesia secara konsisten memberikan perhatian khusus dan memainkan peran aktif di PBB dalam menangani masalah keamanan dan perdamaian internasional, pembangunan dan lingkungan hidup, dan hak azasi manusia (HAM), demokrasi dan kemanusiaan. Indonesia juga berkontribusi bagi perjuangan Palestina melalui penggalangan masyarakat internasional untuk mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga telah berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat Palestina melalui program pembangunan kapasitas yang dilakukan di bawah payung *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP).

Sepanjang tahun 2011, politik luar negeri dan diplomasi RI juga diarahkan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan bantuan bencana alam, kerja sama teknik, peningkatan kerja sama ekonomi, pemberantasan korupsi, dan penanganan perbatasan. Di samping itu, guna memastikan terus meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas diplomasi RI, proses reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri juga terus didorong selama tahun ini.

Kementerian Luar Negeri juga senantiasa memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri melalui serangkaian sosialisasi di berbagai media guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Bentuk pelayanan publik ini penting mengingat semakin besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri, khususnya para TKI. Banyaknya jumlah WNI/TKI di luar negeri membawa konsekuensi logis pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan yang menimpa WNI di luar negeri, terutama WNI/TKI yang berpergian ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen identitas dan dokumen perjalanan resmi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan misi perlindungan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) khususnya melalui Pelayanan Warga.

DAFTAR ISI

I. RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **Error! Bookmark not defined.**

I. DAFTAR ISI iii

II. PENDAHULUAN 1

III. HUBUNGAN BILATERAL 4

III.1 HUBUNGAN BILATERAL DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA 18

Sasaran 18

Brunei Darussalam 18

Filipina 19

Kamboja 21

Laos 23

Malaysia 25

Myanmar 27

Singapura 29

Thailand 31

Timor-Leste 33

Viet Nam 36

III.2 HUBUNGAN BILATERAL DENGAN MITRA-MITRA STRATEGIS 41

Sasaran 41

III.2.1 KAWASAN ASIA-PASIFIK DAN AFRIKA 41

Australia 41

Jepang 45

Republik Korea 49

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 52

India 55

Afrika Selatan 58

III.2.2 KAWASAN AMERIKA DAN EROPA 59

Amerika Serikat 60

Brazil 63
Perancis 65
Rusia 68
Uni Eropa 70
Turki 72

III.3 HUBUNGAN BILATERAL DENGAN NEGARA MITRA DI BERBAGAI KAWASAN DUNIA 74
Sasaran 74
III.3.1 KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 74
III.3.1.1 Kawasan Asia Timur dan Pasifik 74
Fiji 74
Kepulauan Solomon 76
Kepulauan Marshall 76
Kerajaan Tonga 76
Mikronesia 76
Mongolia 76
Palau 77
Papua Nugini 78
Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) 78
Samoa 79
Selandia Baru 79
Vanuatu 81
III.3.1.2 Kawasan Asia Selatan dan Tengah 82
Afghanistan 82
Azerbaijan 84
Bangladesh 85
Iran 86
Kazakhstan 87
Kyrgyzstan 88
Maladewa 89
Nepal 90
Pakistan 90
Sri Lanka 92
Tajikistan 93

Turkmenistan 93
Uzbekistan 94
III.3.1.3 Kawasan Timur Tengah 94
Aljazair 94
Arab Saudi 95
Bahrain 96
Irak 96
Kuwait 97
Lebanon 97
Libya 98
Mauritania 99
Maroko 100
Oman 100
Palestina 101
Mesir 103
Persatuan Emirat Arab (PEA) 105
Qatar 105
Sudan 106
Suriah 107
Tunisia 108
Yaman 109
Yordania 110
III.3.1.4 Kawasan Sub-Sahara Afrika 111
Angola 112
Benin 112
Burkina Faso 112
Burundi 112
Cape Verde 112
Djibouti 113
Eritrea 113
Ethiopia 113
Gabon 114
Gambia 114
Ghana 114

Guinea 115
Guinea Bissau 115
Kamerun 115
Kenya 115
Komoro 116
Lesotho 116
Liberia 116
Madagaskar 116
Mali 117
Mauritius 117
Mozambik 117
Namibia 118
Niger 118
Nigeria 118
Pantai Gading 119
Republik Demokratik Kongo 119
Republik Kongo 119
Rwanda 120
Sao Tome dan Principe 120
Senegal 120
Seychelles 120
Sierra Leone 121
Somalia 121
Swaziland 121
Tanzania 122
Togo 122
Uganda 122
Zambia 122
Zimbabwe 123
III.3.2 KAWASAN AMERIKA DAN EROPA 123
III.3.2.1 Kawasan Amerika Utara dan Tengah 124
Kanada 124
Meksiko 126
Panama 127

El Salvador 127
Guatemala 128
Kosta Rika 128
Honduras 128
Nikaragua 128
III.3.2.2 Kawasan Amerika Selatan dan Karibia 129
Antigua dan Barbuda 129
Argentina 129
Bolivia 131
Chile 131
Dominika (Persemakmuran) 132
Ekuador 132
Grenada 133
Guyana 133
Jamaika 133
Kolombia 134
Kuba 134
Paraguay 135
Persemakmuran Bahamas 135
Peru 136
Republik Dominika 136
St. Lucia 137
St. Vincent and the Grenadines 137
Trinidad dan Tobago 137
Uruguay 138
Suriname 138
Venezuela 139
III.3.2.3 Kawasan Eropa Barat 140
Andorra 140
Austria 141
Belanda 141
Belgia 143
Denmark 143
Estonia 144

Finlandia 145
Inggris 146
Irlandia 148
Islandia 148
Italia 149
Jerman 149
Latvia 152
Liechtenstein 152
Lithuania 153
Luksemburg 153
Malta 153
Monako 154
Norwegia 154
Portugal 156
San Marino 158
Siprus 158
Slovenia 159
Spanyol 160
Swedia 161
Swiss 162
Vatikan 163
Yunani 164
III.3.2.4 Kawasan Eropa Tengah dan Timur 165
Albania 166
Armenia 166
Bosnia-Herzegovina 167
Bulgaria 167
Belarus 168
Ceko 168
Georgia 169
Hongaria 170
Kroasia 171
Makedonia 171
Moldova 171

Montenegro 172
Polandia 172
Romania 173
Serbia 174
Slovakia 174
Ukraina 176

IV. KERJA SAMA REGIONAL DAN ANTAR KAWASAN 176
Sasaran 177
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 178
KTT Asia Timur *(East Asia Summit)* 191
Kerja Sama Sub-Regional ASEAN: BIMP-EAGA dan IMT-GT 192
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 193
Pacific Islands Forum (PIF) 197
Melanesian Spearhead Group (MSG) 197
Southwest Pacific Dialogue (SWPD) 198
Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) 198
New Asian African Strategic Partnership (NAASP) 199
Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) 200
Asia Cooperation Dialogue (ACD) 201
Forum For East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) 201
Asia-Europe Meeting (ASEM) 202

V. KERJA SAMA MULTILATERAL 204
Sasaran 204
V.1 PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA 204
Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi 204
Peningkatan Peran Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia 207
Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir 209
V.2 PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP 212
Perdagangan Internasional 213
MDGs 213
Ketahanan Pangan 215
Ketahanan Energi 215

Pandemi 216
Perlindungan Warisan Dunia Takbenda 216
Pembangunan Berkelanjutan 216
Perubahan Iklim 217
Keanekaragaman Hayati 218
Isu Lingkungan Hidup Lainnya 219
Perlindungan Sumber Daya Hayati, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional 220
V.3 KERJA SAMA HAM INTERNASIONAL 221
V.4 PENANGANAN BENCANA ALAM GLOBAL 223
V.5 LAIN-LAIN 223
Reformasi PBB 224
G20 225
Forest-11 225
Gerakan Non Blok (GNB) 226
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 227
Palestina 229
D-8 230
G-77 dan China 230
Kerja Sama Selatan-Selatan 231
Colombo Plan 231
V.5.1 Pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional 232

VI. ISU-ISU KHUSUS 235
VI.1 Bantuan Bencana Alam 235
VI.2 Diplomasi Publik 236
Sasaran 236
Kegiatan Diplomasi 236
VI.3 Perlindungan WNI 242
Sasaran 242
VI.4 Diplomasi Ekonomi 249
VI.5 Kerja Sama Teknik 252
Sasaran 252
Kegiatan Diplomasi 252

VI.6 Kerja Sama Internasional Pemberantasan Korupsi 253
VI.7 Penanganan Perbatasan 254
Sasaran 254
Kegiatan Diplomasi 255
VI.8 Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT)/*Genetic Resources and Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) 258
Sasaran 258
Diplomasi Indonesia 258
VI.9 Benah Diri 259
Sasaran 259
VII. PENUTUP 263

PENDAHULUAN

Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia selama periode 2011 dilaksanakan dalam lingkungan global dan regional yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan kompleks.

Pada tingkat global, berbagai kawasan di dunia telah mengalami gejolak politik dan sosial terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Telah terjadi proses perubahan yang mendasar di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan Yemen. Di bidang ekonomi, kita juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dunia terus mengalami tantangan dengan situasi perekonomian di Zona Euro yang masih rapuh, perekonomian AS yang dihadapi oleh masalah hutang nasional yang semakin menumpuk, dan kondisi Jepang yang telah mengalami tekanan ekonomi akibat dari tsunami dan bocornya reaktor nuklir Fukushima. Dunia juga masih tetap dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat lintas batas seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, narkotika, terorisme dan pembalakan liar.

Di tingkat regional, Indonesia telah memanfaatkan posisinya sebagai Ketua ASEAN untuk menjadi pelopor dari upaya untuk mendorong kerja sama dan kemitraan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan. Berbagai isu yang menjadi perhatian bersama seperti penanganan batas maritim antar negara terus dilanjutkan untuk meredam konflik yang dapat dipicu oleh insiden di laut. Dalam pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting/ Post Ministerial Conference/ ASEAN Regional Forum* (AMM/PMC/ARF) pada bulan Juli di Bali telah disepakati *Guidelines for the Implementation of Declaration of Conductof Parties in the South China Sea*(DoC). Selain itu, dalam pertemuan yang sama pihak Korea Utara dan Korea Selatan, untuk pertama kalinya setelah insiden tenggelamnya kapal Korsel Cheonan dan penembakan rudal ke Pulau Yeonpyeong, telah bertemu di sela-sela pertemuan AMM/PMC/ARF di Bali.Terlaksananya kedua kejadian tersebut di atas di Bali merupakan upaya konkret untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Penanganan berbagai tantangan tersebut menuntut kerja sama dan kemitraan global yang lebih efektif dan pentingnya meningkatkan kerja sama antar institusi-institusi terkait.

Namun, meskipun telah terjadi perubahan-perubahan politik yang cukup signifikan di Timur Tengah dan Afrika Utara dan pemulihan ekonomi yang masih berlanjut di Amerika Serikat dan Zona Euro, Indonesia dan kawasan Asia Pasifik diharapkan dapat menjadi motor pemulihan ekonomi dunia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia diharapkan dapat tumbuh di atas 6,5%. Pertumbuhan ini bukan hanya didorong oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional tetapi juga didorong oleh peningkatan perdagangan internasional Indonesia dan investasi di dalam negeri yang didukung oleh politik luar negeri dan diplomasi Indonesia yang telah meraup manfaat dari berbagai peluang tersebut bagi kepentingan nasional.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di lingkungan global dan regional, seluruh upaya politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai. Diplomasi menjadi bagian dari upaya nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Politik luar negeri dan diplomasi menjadi bagian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, mengkonsolidasikan demokrasi dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tingkat bilateral, Indonesia senantiasa menjalin persahabatan dengan seluruh negara di belahan dunia saat ini. Indonesia senantiasa menjalankan politik bebas aktif yang semata didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Pada tahun ini Indonesia telah membuka hubungan

diplomatik dengan8 dari 21 negara yang selama ini belum memiliki hubungan diplomatik formal dengan Indonesia. Kedelapan negara tersebut terdiri dari Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Rep. Dominika, Niger, Sao Tome dan Principe, Antigua dan Barbuda.

Pada tingkat kawasan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan tuan rumah KTT ASEAN ke-18 pada bulan Mei 2011, terus mengupayakan agar target Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dapat tercapai dengan integrasi ketiga Komunitas ASEAN yang terdiri dari *ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community*. Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga mengupayakan agar diformulasikan arahan ASEAN pasca-2015 dengan konsep "*ASEAN Community in a Global Community of Nations*" yang mengedepankan *common platform*ASEAN mengenai isu-isu global. Disepakatinya pendirian institusi seperti *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (IPR*) akan membantu negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal.

Indonesia senantiasa memberikan kontribusi pemikiran yang konkret untuk kemajuan keamanan dan kesejahteraan di kawasan yang pada gilirannya memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik perbatasan Kamboja – Thailand melalui serangkaian kegiatan pertemuan trilateral seperti *Joint Boundary Commission* yang dilaksanakan pada April 2011 di Bogor.

Indonesia dan Australia telah menyelenggarakan *Bali Regional Ministerial Conference IV (BRMC*) di Bali pada Maret 2011. Pertemuan tingkat Menteri tersebut menghasilkan beberapa hal penting diantaranya penguatan komitmen peserta negara *Bali Process* terhadap penanggulangan permasalahan *irregular migration* di kawasan, disepakatinya 6 mekanisme *Ad HocGroup* untuk dilanjutkan dan, jika dipandang perlu, diperluas keanggotaannya.

Gagasan pembentukan arsitektur kawasan baru dengan menawarkan konsep *dynamic equilibrium* merupakan salah satu dari beberapa hal yang, sebagaimana digambarkan sejumlah pihak di kawasan, menunjukkan *intellectual leadership* Indonesia di kawasan. Posisi Indonesia yang menciptakan katalisatordalam mendorong posisi bersama negara-negara kawasan atas berbagai isu global seperti MDGs, ketahanan pangan, lingkungan dan perubahan iklim semakin mengukuhkan pendekatan tersebut.

Pada tingkat global, peran Indonesia juga senantiasa diarahkan untuk menjadi bagian dari solusi *(part of the solution)* bagi permasalahan global. Dalam konteks tersebut, polugri RI telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional, terutama dalam PBB, ASEAN, G-20, APEC, ARF, D-8,Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan *East Asia Summit* (EAS).

Pada 17 – 19 November 2011, Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT ke-19 ASEAN dan EAS di mana untuk pertama kalinya dihadiri oleh Presiden AS Barack Obama dan Menlu Rusia mewakili Presiden Rusia.

Indonesia juga telah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Gerakan Non Blok (GNB) di Bali pada tanggal 23-27 Mei 2011, yang sekaligusmemperingati 50 tahun pembentukan Gerakan Non-Blok. Sebagai salah satu negara perintis berdirinya GNB, Indonesia menyampaikan dorongan peran aktif negara anggota GNB untuk dapat menempatkan GNB secara strategis dalam konteks kekinian, dengan dukungan semangat inklusivitas dan kemitraan yang tinggi sebagai bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan global.

Perlindungan WNI di luar negeri juga merupakan prioritas diplomasi Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Seluruh mesin diplomasi senantiasa dijalankan untuk meningkatkan perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Kepedulian dan keberpihakan merupakan komitmen Kementerian Luar Negeri dalam memastikan perlindungan WNI di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri senantiasa membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan polugri dan diplomasi. Raihan

dan capaian diplomasi merupakan hasil kerja keras seluruh elemen bangsa.

Kementerian Luar Negeri juga tetap konsisten dalam melanjutkan proses benah diri melalui upaya reformasi birokrasi. Benah diri tersebut dilakukan guna menjawab tantangan, peluang, perubahan dan perkembangan yang berlangsung cepat dan dinamis dalam hubungan luar negeri. Melalui semangat benah diri, Kementerian Luar Negeri terus melakukan introspeksi terhadap kelemahan dan kekurangan, sekaligus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem.

HUBUNGAN BILATERAL

Selama periode 2011, sesuai dengan arah dan rencana strategis Kabinet Indonesia Bersatu II, kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia secara aktif dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara di seluruh dunia ke tataran yang lebih tinggi. Tujuan penguatan hubungan bilateral tersebut secara umum adalah:

- Menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia;
- Mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nasional;
- Melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia lainnya di luar negeri; serta
- Mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu-isu transnasional dan global.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, langkah yang diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerja sama bilateral dengan berbagai negara sahabat. Penguatan tersebut dilakukan dengan menggairahkan atau menghidupkan kembali mekanisme yang telah ada atau menciptakan mekanisme dialog baru, sehingga terbentuk suatu dialog dan konsultasi bilateral yang reguler. Dengan adanya mekanisme bilateral yang efektif, maka dapat terwujud hal-hal berikut, yaitu:

- Mengedepankan proses diplomasi dalam mengatasi dan menangani berbagai permasalahan bilateral;
- Memonitor kemajuan implementasi kesepakatan yang telah ada;
- Memanfaatkan peluang-peluang kerja sama yang ada dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama baru; serta
- Mengembangkan kemitraan dalam menghadapi tantangan-tantangan global.

Sesuai dengan slogan "*Amillion friends, zero enemies*", Indonesia telah senantiasa mengembangkan hubungan baik secara bilateral dengan seluruh negara di dunia, dipandu oleh prioritas kepentingan nasional Indonesia.

Dalam tahun 2011 tercatat beberapa pengembangan kemitraan strategis dan komprehensif. Kemitraan dengan negara-negara pemain kunci ini dinilai merupakan salah satu bukti pengakuan dunia terhadap perkembangan positif yang terus terjadi di Indonesia serta meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional. Beberapa negara pada tahun 2011 juga telah membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia, yaitu Belarus, Fiji, dan Kolombia. Selain itu juga, tahun ini Konsulat Jenderal RRT telah diresmikan di Medan, Sumatera Utara.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terpantau, terukur dan terencana dengan baik, maka dalam hubungan bilateral telah dikembangkan adanya mekanisme "*scorecard*".

Upaya peningkatan hubungan bilateral ini telah dilakukan pada semua tingkatan, baik pada tingkat Kepala Negara, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri maupun pejabat tinggi lainnya. Hal tersebut tercermin dalam intensitas pertemuan yang tinggi dengan negara sahabat baik pada tingkatan Kepala Negara, Wakil Presiden maupun tingkat Menteri Luar Negeri dan pejabat tinggi lainnya.

Pada tingkatan Menteri Luar Negeri misalnya, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tercatat Menlu RI telah mengadakan sejumlah konsultasi bilateral dan kunjungan ke negara-negara sahabat serta menerima kunjungan sejumlah Menteri Luar Negeri negara sahabat ke Indonesia. Menlu RI juga telah mengadakan setidaknya 366pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri sepanjang tahun 2011.

Selama tahun 2011, intensitas hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga antara lain tercermin dari frekuensi pertukaran kunjungan dan pertemuan bilateral pada tingkat

Kepala Negara/Pemerintahan. Tercatat selama periode Januari – November 2011, telah terlaksana kunjungan Presiden RI ke luar negeri, sebagai berikut:

1. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke India (24 – 26 Januari 2011) dan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Swiss dalam rangka menghadiri *World Economic Forum 2011* di Davos (26 – 29 Januari 2011)
2. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Brunei Darussalam (24 – 25 Februari 2011)
3. Kunjungan Kerja Presiden RI ke Swiss dalam rangka menghadiri *100th Session of ILC* (13 – 15 Juni 2011) dan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Jepang (16 – 18 Juni 2011)
4. Kunjungan Kerja Presiden RI ke UNESCO dan KTT G20, Paris dan Cannes (2-4 November 2011)
5. Kunjungan Kerja Presiden RI ke Honolulu, AS, dalam rangka menghadiri *19th APEC Summit* (13-14 November 2011).

Selama tahun 2011, telah terlaksana kunjungan Wakil Presiden RI ke luar negeri, sebagai berikut :

1. Kunjungan ke Singapura (1 - 3 Januari 2011)
2. Kunjungan ke Australia (9 - 13 Maret 2011)
3. Kunjungan ke Kazakhstan dan Arab Saudi (7 – 12 Juni 2011)
4. sKunjungan ke Singapura (30 – 31 Agustus 2011)

Selama periode Januari – Desember 2011, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah – langkah persiapan, pelayanan keprotokolan dan pendampingan pada kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan Negara sahabat sebanyak 48 tamu negara. Jumlah kunjungan tersebut meningkat pesat dibanding jumlah kunjungan tamu negara pada tahun 2010, sebanyak 8 kunjungan tamu negara. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011. Selama memegang keketuaan ASEAN, Indonesia telah menyelenggarakan KTT ke-18 ASEAN pada tanggal 7 – 8 Mei 2011 dan KTT ke-19 ASEAN beserta KTT Terkait lainnya pada tanggal 17 – 19 November 2011.

KUNJUNGAN TAMU NEGARA KE INDONESIA
2011

1. Kunjungan kenegaraan Presiden Filipina, H.E. Mr. Benigno Aquino III pada tanggal 7 – 9 Maret 2011
2. Kunjungan kerja Perdana Menteri Timor-Leste, H.E. Xanana Gusmao pada tanggal 21 – 26 Maret 2011 untuk menghadiri *Jakarta International Defence Dialogue*
3. Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Turki, H.E. Mr. Abdullah Gül beserta Mrs. Hayrünnisa Gül pada tanggal 4 – 6 April 2011
4. Kunjungan Perdana Menteri Republik Kepulauan Fiji, H.E. Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, pada tanggal 6 April 2011
5. Kunjungan UNDP Administrator, UN USG, Hon. Helen Clark, Jakarta, 28 April 2011
6. Kunjungan Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddien Waddaulah, pada tanggal 20 – 22 April 2011
7. Kunjungan resmi Perdana Menteri RRT, H.E. Wen Jiabao pada tanggal 28– 30 April 2011
8. Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Myanmar, H.E. U Thein Sein, pada tanggal 5 – 6 Mei 2011
9. Kunjungan kerja Kepala Negara/Pemerintahan dalam rangka menghadiri KTT ASEAN, tanggal 7-8 Mei 2011, yaitu:
    1) Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddien Waddaulah,
    2) Perdana Menteri Kamboja, H.E. Mr. Hun Sen
    3) Perdana Menteri Thailand, H.E. Mr. Abhisit Vejjajiva
    4) Perdana Menteri Malaysia, H.E. Mr. Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
    5) Presiden Republik Uni Myanmar, H.E. U Thein Sein
    6) Perdana Menteri Lao PDR, H.E. Mr. Thongsing Thammavong
    7) Perdana Menteri Viet Nam, H.E. Mr. Nguyen Tan Dung
    8) Presiden Filipina, H.E. Mr. Benigno Aquino III
10. Kunjungan resmi PM Lao PDR, H.E. Mr. Thongsing Thammavong, pada tanggal 9 – 10 Mei 2011
11. Kunjungan kerja PM Singapura, H.E Mr. Lee Hsien Loong dalam rangka *World Economic Forum on East Asia 2011*, 12 Juni 2011
12. Kunjungan kerjaPM Mongolia, H.E Mr. Sükhbaataryn Batbold dalam rangka *World Economic Forum on East Asia 2011*, 12 Juni 2011
13. Kunjungan kerjaPM Thailand, H.E Mr. Abhisit Vejjajiva dalam rangka *World Economic Forum on East Asia 2011*, 12 Juni 2011
14. Kunjungan resmi PM Republik Perancis, H.E. Mr. Francois Fillon pada tanggal 30 Juni – 2 Juli 2011
15. Kunjungan resmi PM Thailand, H.E. Ms. Yingluck Shinawatra, pada tanggal 12 September 2011
16. Kunjungan resmi PM Viet Nam, H.E Mr. Nguyen Tan Dung pada tanggal 13 - 14 September 2011
17. Kunjungan kenegaraan Presiden Slovakia, H.E. Mr. Ivan Gasparovic, 10 - 12 Oktober 2011
18. Kunjungan kerja Kepala Negara/Pemerintahan dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-19, tanggal 17 – 19 November 2011, yaitu:
    1) Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddien Waddaulah
    2) Perdana Menteri Kamboja, H.E. Mr. Hun Sen
    3) Perdana Menteri Thailand, H.E. Mrs. YingluckSinawatra
    4) Perdana Menteri Malaysia, H.E. Mr. Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
    5) Presiden Republik Uni Myanmar, H.E. U Thein Sein
    6) Perdana Menteri Lao PDR, H.E. Mr. Thongsing Thammavong
    7) Perdana Menteri Viet Nam, H.E. Mr. Nguyen Tan Dung

8) Presiden Filipina, H.E. Mr. Benigno Aquino III

19. Kunjungan kerja Kepala Negara/Pemerintahan dalam rangka menghadiri KTT EAS, tanggal 17 – 20 November 2011, yaitu:
    1) Presiden Amerika Serikat, H.E. Barack Obama
    2) Perdana Menteri Australia, H.E. Mrs. Julia Gillard
    3) Perdana Menteri RRT, H.E. Wen Jiabao
    4) Perdana Menteri India H.E. Mr. Manmohan Singh
    5) Perdana Menteri Jepang H.E. Mr. Yoshihiko Noda
    6) Presiden Korea Selatan, H.E. Mr. Lee Myung-bak
    7) Perdana Menteri Singapura, H.E. Lee Hsien Loong
    8) Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Mr. Ban Ki Moon
20. Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Christian Wulff ke Indonesia, 30 November – 2 Desember 2011
21. Kunjungan kerja Kepala Negara/Pemerintahan dalam rangka menghadiri Bali Democracy Forum IV, tanggal 8 – 9 Desember 2011, yaitu:
    1) Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh, H.E. Sheikh Hasina Wajed.
    2) Perdana Menteri Timor - Leste, H.E. Xanana Gusmao
    3) Perdana Menteri Qatar, H.E. Sheikh. Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani
    4) Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, H.E. Mahinda Rajapaksa
    5) Perdana Menteri Mongolia, H.E Sükhbaataryn Batbold
    6) Sultan Brunei Darussalam, H.E Hassanal Bolkiah
    7) Perdana MenteriSIngapura, Lee Hsien Loong
    8) Perdana MenteriThailland, H.E Yingluck Shinawatra

Kunjungan Presiden RI ke luar negeri
Januari – Desember 2011

1. Kunjungan Presiden RI dan Ibu Negara ke Indiaselaku tamu kehormatan *Republic Day,* New Delhi, India, 24 -26 Januari 2011, dan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Swiss dalam rangka menghadiri *World Economic Forum 2011* di Davos (26 – 29 Januari 2011):
   A. Dalam kunjungan ke India, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
      - Pertemuan bilateral RI – India;
      - Menerima kunjungan kehormatan Menlu India;
      - Menerima kunjungan kehormatan Wapres India;
      - Menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Oposisi India;
      - Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Koalisi India.
   B. Dalam kunjungan ke Swiss, telah dilakukan pertemuan bilateral, antara lain dengan:
      - Chairman WEF;
      - Presiden Perancis;
      - Presiden Swiss;
      - Co-Chairs of the 20th Anniversary of the World Economic Forum on East Asia 2011;
      - Mantan Presiden AS, Bill Clinton;
      - Perdana Menteri Belgia;
      - Perdana Menteri Inggris;
      - Mantan Perdana Menteri Inggris;
      - Presiden Kolombia;
      - PM Denmark;
      - Duke of York.

2. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Brunei Darussalam (24 – 25 Februari 2011).

3. Kunjungan Kerja Presiden RI ke Swiss dalam rangka menghadiri *100th Session of ILC* (13 – 15 Juni 2011)dan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Jepang (16 – 18 Juni 2011).

   A. Dalam kunjungan ke Swiss,telah dilakukan pertemuan bilateral, antara lain dengan:
      1) Dirjen ILO;
      2) Dirjen UNOG;
      3) Dirjen WHO;
      4) UN Special Representative of the Secretary-General.

   B. Dalam kunjungan ke Jepang, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
      1) Pertemuan Bilateral RI – Jepang;
      2) Menerima kunjungan kehormatan mantan PM Jepang / Ketua JAPINDA;
      3) Menerima kunjungan kehormatan Menlu Jepang.

4. Kunjungan Kerja Presiden RI ke UNESCO,Paris, (2-4 November 2011)dan KTT G20, Cannes, (3 -5 November 2011).
   A. Dalam kunjungan ke UNESCO, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
      1) Pertemuan dengan Direktur Jenderal UNESCO.
   B. Dalam kunjungan ke KTT G20, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
      1) Pertemuan Bilateral dengan Presiden Meksiko;

2) Pertemuan Trilateral dengan Presiden Komisi Eropadan Presiden Dewan Eropa.

5. Kunjungan Kerja Presiden RI ke Honolulu, AS, dalam rangka menghadiri *19th APEC Summit* (13-14 November 2011). Dalam kunjungan ini, Presiden juga mengadakan pertemuan dengan :
   1) Presiden Rusia, Dimitry Medvedev;
   2) PM Kanada, Stephen Harper.

Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Mitranya Tahun 2011

1. Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan mantan Wakil Presiden AS, Al Gore, Jakarta, 9 Januari 2011.
2. Pertemuan dengan Menlu Kamboja, H.E. Mr. Hor Namhong dalam rangka ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) *Retreat*, Lombok, 15 - 16 Januari 2011.
3. Pertemuan bilateral dalam rangka SKB RI-Laos, Yogyakarta, 17 Januari 2011.
4. Kunjungan Presiden RI dan Ibu Negara ke India selaku tamu kehormatan *Republic Day*, New Delhi, India, 24 -26 Januari 2011:
   1) Pertemuan bilateral RI – India;
   2) Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Menlu India;
   3) Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Wapres India;
   4) Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Oposisi India;
   5) Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Koalisi India.
5. Kunjungan Presiden RI dalam rangka *World Economic Forum*, Davos, Swiss, 27 -28 Januari 2011:
   1) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Chairman WEF;
   2) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Presiden Perancis;
   3) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Presiden Swiss;
   4) Mendampingi Presiden RI Pertemuan dengan *Co-Chairs ofthe 20th Anniversary of the World Economic Forum on East Asia* 2011;
   5) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan mantan Presiden AS, Bill Clinton;
   6) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Belgia;
   7) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris;
   8) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris;
   9) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Presiden Kolombia;
   10) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan PM Denmark;
   11) Mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Duke of York.
6. Pertemuan dalam rangka *World Economic Forum*, Davos, Swiss, 27 - 28 Januari 2011:
   1) Pertemuan dengan Menlu Swedia;
   2) Pertemuan dengan Menlu Austria;
   3) Pertemuan dengan Dirjen WHO.
7. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Kamboja dalam rangka Kunjungan Kerja Menlu RI, Phom Penh, 7 Februari 2011.
8. Pertemuan *tete-a-tete* dengan Menlu Thailand dalam rangka Kunjungan Kerja Menlu RI, Bangkok, 8 Februari 2011.
9. Pertemuan dalam rangka Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB mengenai Kamboja-Thailand, New York, US, 14 Februari 2011:
   1) Pertemuan dengan Presiden DK PBB;
   2) Pertemuan dengan Menlu Thailand;
   3) Pertemuan dengan Menlu Kamboja;
   4) Pertemuan dengan UNSG Political Affairs;
   5) Pertemuan dengan Executive Director UN ESCAP.
10. Kunjungan kehormatan kepada PM Jepang H.E. Mr. Naoto Kan dalam rangka Kunjungan Kerja Menlu RI, Tokyo, Jepang, 17 - 19 Februari 2011.
11. Rangkaian pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Menlu RI, Tokyo, Jepang, 17 - 19 Februari 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang;
    2) Pertemuan dengan H.E. Mr. Yukio Takasu;

3) Pertemuan dengan Mr. Yasuo Fukuda, mantan PM Jepang dan Ketua JAPINDO (*Japan Indonesia Association*).

12. Rangkaian pertemuan bilateral rangka *Informal ASEAN Foreign Ministers' Meeting*, Jakarta, 22 Februari 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kamboja;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Thailand.
13. Mendampingi Presiden RI menerima Kongres AS, Jakarta, 23 Februari 2011.
14. Pertemuan Bilateral RI - Brunei Darussalam dalam rangka Kunjungan Presiden RI, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 24 -25 Februari 2011.
15. Pertemuan bilateral dalam rangka Kunjungan Bilateral Menlu Serbia, H.E Mr. Vuk Jeremic, Jakarta, 28 Februari 2011.
16. Pertemuan bilateral dalam rangka Kunjungan Bilateral Menlu Siprus, H.E. Mr. Markos Kyprianou, Jakarta, 1 Maret 2011.
17. Mendampingi Presiden RI menerima Kunjungan Kehormatan Menlu Siprus, Jakarta, 2 Maret 2011.
18. Mendampingi Presiden RI menerima Kunjungan Kehormatan Menlu Timor-Leste, Jakarta, 3 Maret 2011.
19. Pertemuan bilateral dalam rangka SKB Indonesia - Timor-Leste dan kunjungan bilateral Menlu Timor-Leste, H.E. Mr. Zacarias da Costa, Jakarta, 3 - 4 Maret 2011.
20. Pertemuan Bilateral dalam rangka Kunjungan perkenalan Menlu Filipina, H.E. Mr. Albert del Rosario, Jakarta, 7 Maret 2011.
21. Pertemuan Bilateral dalam rangka kunjungan perkenalan Presiden Filipina kepada Presiden RI, Jakarta, 8 - 9 Maret 2011.
22. *Working meeting* dalam rangka Kunjungan kerja Mendagri Australia, Hon Brendan O'Connor, Jakarta, 16 Maret 2011.
23. Pertemuan Bilateral dalam rangka kunjungan kerja PM Timor-Leste pada Presiden RI, Jakarta, 22 Maret 2011.
24. Kunjungan kehormatan dalam rangka Kunjungan kerja Deputi Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Republik Arab Suriah, H.E. Mr. Abdullah Al-Dardari, Jakarta, 22 Maret 2011
25. Kunjungan kehormatan dalam rangka Kunjungan kehormatan His Royal Highness Prince Bandar bin Sultan bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi, Jakarta, 24 Maret 2011.
26. *Working meeting* dalam rangka Kunjungan kerja Menlu Australia, Jakarta, 29 Maret 2011.
27. Kunjungan Menlu Australia, Jakarta, 29 Maret 2011.
28. Rangkaian pertemuan dalam rangka *Bali Regional Ministerial Conference*, Bali, 29 - 30 Maret 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Bangladesh;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Imigrasi Selandia Baru;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu Thailand;
    4) Menerima *Assistant High Commissioner* UNHCR;
    5) Menerima DG IOM.
29. Pertemuan Bilateral RI - Turki dalam rangka Kunjungan kenegaraan Presiden Turki, Jakarta, 4 April 2011.
30. Pertemuan dengan Menlu Fiji, H.E. Ratu Inoke Kubuabola dalam rangka Kunjungan Kehormatan PM Fiji kepada Presiden RI, Jakarta, 6 April 2011.
31. Mendampingi Presiden RI menerima Kunjungan Kehormatan *His Royal Highness the Duke of York*, Prince Andrew, selaku *UK Special Representative for International Trade and Investment*, Jakarta, 6 April 2011.
32. *Working meeting* dalam rangka Kunjungan kerja Menlu Fiji, H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Jakarta, 6 April 2011.
33. Pertemuan bilateral dengan Menlu Kamboja dalam rangka JBC Kamboja-Thailand, Bogor, 7 - 8 April 2011.
34. Rangkaian pertemuan dan pembicaraan dalam rangka *Special ASEAN-Japan Ministers' Meeting*, Jakarta, 9 April 2011:
    1) Pertemuan bilateral Menlu Jepang;
    2) Pembicaraan bilateral dengan Menlu Malaysia;

3) Pertemuan trilateral dengan Menlu Thailand dan Menlu Kamboja.

35. Pertemuan dalam rangka *Special InformalASEAN Foreign Ministers' Meeting on EAS*, Bangkok, Thailand, 10 - 11 April 2011:
    1) Pertemuan dengan Menlu Myanmar;
    2) Pembicaraan dengan Menlu Thailand.
36. Rangkaian pertemuan dan pembicaraan dalam rangka *AMM Retreat on East Asia Summit*, Bangkok, 10 - 11 April 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Myanmar;
    2) Pembicaraan bilateral dengan Menlu Thailand.
37. Pertemuan dengan Menlu Mesir dalam rangka Kunjungan kerja Menlu RI, Kairo, Mesir, 14 April 2011.
38. Kunjungan kehormatan kepada Kepala Pemerintahan Mesir dalam rangka Kunjungan kerja Menlu RI, Kairo, Mesir, 14 April 2011.
39. Menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia Jepang, Jakarta, 14 April 2011.
40. Pertemuan dalam rangka *Dubai Piracy Conference*, Dubai, 18 April 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Persatuan Emirat Arab;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Somalia.
41. Pertemuan dengan Menlu RRT dalam rangka Kunjungan Bilateral Menlu RI, Beijing, RRT, 19 April 2011.
42. Kunjungan kehormatan kepada PM RRT dalam rangka Kunjungan Bilateral Menlu RI, Beijing, RRT, 19 April 2011.
43. Mendampingi Presiden RI dalam rangka Kunjungan Kehormatan Sultan Brunei Darussalam, Jakarta, 21 April 2011.
44. Kunjungan UNDP Administrator, UN USG, Hon Helen Clark, Jakarta, 28 April 2011.
45. *Working meeting* dalam rangka Menlu Thailand, Jakarta, 28 April 2011.
46. Pertemuan Bilateral dalam rangka Kunjungan kerja PM RRT, Jakarta, 29 April 2011.
47. Pertemuan Bilateral dalam rangka Kunjungan perkenalan Presiden Myanmar yang baru, Jakarta, 5 Mei 2011.
48. Rangkaian pertemuan bilateral dalam rangka 5th APSC, AMM, dan 8th ACC (menjelang KTT ASEAN), Jakarta, 6 Mei 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kamboja;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Thailand.
49. Pertemuan trilateral dengan Menlu Thailand dan Menlu Kamboja dalam rangka 5th APSC, AMM, dan 8th ACC (menjelang KTT ASEAN), Jakarta, 6 Mei 2011.
50. Pertemuan pada 18th *ASEAN Summit*, Jakarta, 7-8 Mei 2011;
    1) Mendampingi Pertemuan trilateral Presiden RI dengan PM Thailand dan PM Kamboja;
    2) Mendampingi Pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Thailand;
    3) Mendampingi Pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Viet Nam;
    4) Mendampingi Pertemuan *tete-a-tete* Presiden RI dengan PM Malaysia.
51. Mendampingi Pertemuan Bilateral dalam rangka Kunjungan perkenalan PM Laos yang baru, Jakarta, 9 Mei 2011.
52. Pertemuan trilateral dengan Menlu Thailand dan Menlu Kamboja, Jakarta, 9 Mei 2011.
53. *Working meeting* dalam rangka Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, Jakarta, 23 Mei 2011.
54. Membuka KTM GNB dan Peringatan 50 tahun GNB sekaligus melakukan serangkaian pertemuan bilateral, Bali, 23 - 27 Mei 2011, sebagai berikut:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Korea Utara;
    3) Pertemuan bilateral dengan Presiden SMU PBB;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menlu Mesir;
    5) Pertemuan bilateral dengan Menlu Tunisia;
    6) Pertemuan bilateral dengan Menlu Selandia Baru;

7) Pertemuan bilateral dengan Deputi PM dan Menlu Luxembourg;
8) Pertemuan bilateral dengan Menlu Afghanistan;
9) Pertemuan bilateral dengan Menlu Azerbaijan;
10) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kuwait;
11) Pertemuan bilateral dengan Menlu Slovenia;
12) Pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina;
13) Pertemuan bilateral Menlu Algeria;
14) Pertemuan bilateral Menlu Thailand;
15) Pertemuan bilateral dengan Menlu Serbia;
16) Pertemuan bilateral dengan Menlu Ecuador;
17) Pertemuan bilateral dengan Menlu Senegal;
18) Pertemuan bilateral dengan Menlu Afrika Selatan;
19) Pertemuan bilateral dengan Menlu Sudan;
20) Pertemuan bilateral dengan Menlu Sri Lanka;
21) Pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura;
22) Pertemuan bilateral dengan Menlu Iran;
23) Pertemuan bilateral dengan Menlu Fiji;
24) Pertemuan bilateral dengan Menlu Bosnia Herzegovina;
25) Pertemuan bilateral Menlu Guatemala.

55. Pertemuan dalam rangka KTM ASEM, Budapest, Hongaria, 6 - 7 Juni 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Thailand;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Belgia;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu Viet Nam;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menlu Uni Eropa;
    5) Pertemuan bilateral dengan Menlu Filipina;
    6) Pertemuan bilateral dengan Menlu Latvia;
    7) Pertemuan bilateral dengan Minister of State Inggris;
    8) Pertemuan bilateral dengan Menlu Korea Selatan;
    9) Pertemuan bilateral dengan Menlu Australia.
56. Pertemuan dalam rangka WEF East Asia, Jakarta, 12 Juni 2011;
    1) Mendampingi pertemuan Presiden RI dengan PM Mongolia;
    2) Mendampingi pertemuan Presiden RI dengan PM Singapura;
    3) Mendampingi pertemuan Presiden RI dengan PM Thailand.
57. Kunjungan kerja Presiden RI ke Jepang, 16 Juni 2011:
    1) Pertemuan Bilateral RI – Jepang;
    2) Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan mantan PM Jepang / Ketua JAPINDA;
    3) Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Menlu Jepang;
    4) Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Jepang.
58. Pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang dalam rangka Pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang, Tokyo, Jepang, 17 Juni 2011.
59. Pertemuan bilateral dalam rangka Menlu Singapura, H.E K. Shanmugam, Jakarta, 24 Juni 2011.
60. Kunjungan Menlu Singapura, Jakarta, 24 Juni 2011.
61. Pertemuan dalam rangka KTM OKI ke-38, Astana, Kazakhstan, 28 Juni 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Azrbaijan;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kyrgyzstan;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu Australia;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menteri Muda Inggris;
    5) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kazakhstan;
    6) Pertemuan bilateral dengan Presiden IPI.

62. Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Perancis dalam rangka Kunjungan kerja PM Perancis, Jakarta, 30 Juni - 2 Juli 2011.
63. Kunjungan Menlu Australia, Jakarta, 8 Juli 2011.
64. *Working meeting* dalam rangka Menlu Australia, H.E Kevin Rudd, Jakarta, 8 Juli 2011.
65. *Working meeting* dalam rangka Menteri Perencanaan dan pembangunan administratif Palestina, HE Dr Ali Jarbawi, Jakarta, 11 Juli 2011.
66. Pertemuan bilateral dalam rangka SKB Indonesia - Brunei Darussalam, Bali, 18 Juli 2011.
67. Rangkaian pertemuan bilateral dalam rangka 44th AMM, ASEAN+3, ASEAN PMC, *EAS Foreign Ministers' Consultation*, 18th ARF, Bali, 19 - 23 Juli 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Korea Selatan;
    2) Pertemuan Bilateral dengan Menlu Rusia;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu RRT;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menlu Selandia Baru;
    5) Pertemuan bilateral dengan Menlu Korut;
    6) Pertemuan bilateral dengan Menlu India;
    7) Pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia;
    8) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kanada;
    9) Pertemuan bilateral dengan Menlu Australia;
    10) Pertemuan bilateral dengan Menlu Pakistan;
    11) Pertemuan bilateral dengan Menlu Polandia;
    12) Pertemuan bilateral dengan Menlu Sri Lanka.
68. Pertemuan bilateral dalam rangka *Strategic Dialogue* ke-2 Indonesia - Jepang, Bali, 21 Juli 2011.
69. Pertemuan bilateral dalam rangka JCM RI - USA, Bali, 24 Juli 2011.
70. *Working meeting* dalamrangka Kunjungan kerja Menlu Filipina, Jakarta, 26 Juli 2011.
71. Pertemuan Menlu dengan Presiden DK PBB New York, US, 23 Agustus 2011.
72. Pertemuan dalam rangka KTM FEALAC, Buenos Aires, 25 - 26 Agustus 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Argentina;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Brazil;
    3) Pembicaraan dengan Menlu Uruguay;
    4) Pembicaraan dengan Menlu Paraguay;
    5) Pembicaraan dengan Menlu Kolombia;
    6) Pembicaraan dengan Menlu Suriname.
73. Pertemuan dalam rangka Peringatan 50 tahun GNB, Beograd, Serbia, 5 - 6 September 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Serbia;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menhan Serbia;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu Belarus;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menlu Meksiko;
    5) Kunjungan kehormatan kepada Presiden Serbia.
74. Pertemuan dalam rangka *PIF Post Forum Dialogue*, Auckland, Selandia Baru, 8 - 9 September 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Tuvalu;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Nauru.
75. SKB RI - Selandia Baru dalam rangka SKB RI - Selandia Baru, New York, 9 September 2011.
76. Kunjungan kehormatan kepada PM Selandia Baru dalam rangka SKB RI - Selandia Baru, New York, 9 September 2011.
77. Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Thailand dalam rangka Kunjungan perkenalan PM Thailand kepada Presiden RI, Jakarta, 12 September 2011.
78. Pertemuan bilateral dalam rangka Kunjungan perkenalan Menlu Viet Nam, Jakarta, 14 September 2011.
79. Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Viet Nam dalam rangka Kunjungan perkenalan PM Viet Nam kepada Presiden RI, Jakarta, 14 September 2011.

80. Pertemuan bilateral dengan Wamenlu Jepang dalam rangka *APEC High Level Policy Dalogue on Women and the Economy*, San Francisco, US, 16 September 2011.
81. Pertemuan dalam rangka SMU PBB ke-66 dan berbagai rangkaian pertemuan di sela SMU PBB, New York, US, 19 - 28 September 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Estonia;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Portugal;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kazakhstan;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menlu Latvia;
    5) Pertemuan bilateral dengan Menlu Republik Dominika;
    6) Pertemuan bilateral dengan Menlu Suriname;
    7) Pertemuan bilateral dengan Menlu Montenegro;
    8) Pertemuan bilateral dengan Menlu Niger;
    9) Pertemuan bilateral dengan Menlu Yunani;
    10) Pertemuan bilateral dengan Menteri LH dan Pembangunan Internasional Norwegia;
    11) Pertemuan bilateral dengan Menlu Inggris;
    12) Pertemuan bilateral dengan Menlu El Salvador;
    13) Pertemuan bilateral dengan Menlu Antigua & Barbuda;
    14) Pertemuan bilateral dengan Deputy PM / Menlu Malta;
    15) Pertemuan bilateral dengan Sekjen Liga Arab;
    16) Pertemuan bilateral dengan Menlu China;
    17) Pertemuan bilateral dengan Menlu San Marino;
    18) Pertemuan bilateral dengan Menlu Iran;
    19) Pertemuan bilateral dengan Menlu Tunisia;
    20) Pertemuan bilateral dengan Menlu Persatuan Emirat Arab;
    21) Pertemuan bilateral dengan Menlu Georgia;
    22) Pertemuan bilateral dengan Menlu Norwegia;
    23) Pertemuan bilateral dengan Menlu Pakistan;
    24) Pertemuan bilateral dengan Menlu Sri Lanka;
    25) Pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang;
    26) Pertemuan bilateral dengan Menlu Nepal;
    27) Pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina;
    28) Pertemuan bilateral dengan Menlu Swedia;
    29) Pertemuan bilateral dengan Menlu Kyrgyzstan;
    30) Pertemuan bilateral dengan Menlu Ethiopia;
    31) Pertemuan bilateral dengan Menlu Amerika Serikat;
    32) Pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania;
    33) Pertemuan bilateral dengan Menlu Irak;
    34) Pertemuan bilateral dengan Menlu Siprus;
    35) Pertemuan bilateral dengan Menlu Belarus;
    36) Pertemuan bilateral dengan *Executive Director* UNODC;
    37) Pertemuan bilateral dengan *UNHigh Rep for Alliance of Civilization*;
    38) Pertemuan bilateral dengan UN-USG/*Commisioner General* UNRWA;
    39) Pertemuan bilateral dengan *Executive Director* CTBTO;
    40) Pertemuan bilateral dengan UN-USG *for Humanitarian Affairs*.
82. Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan Presiden Slovakia dalam rangka Kunjungan kenegaraan Presiden Slovakia, Jakarta, 10 Oktober 2011.
83. Pertemuan dalam rangka JCBC Indonesia - Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Oktober 2011.
84. Pertemuan bilateral dalam rangka Kunjungan Menlu Jepang dalam rangka *Strategic Dialogue* RI - Jepang, Jakarta, 13 Oktober 2011.

85. Mendampingi Presiden RI dalam *tete-a-tete*dengan Yang Dipertuan Agong Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah dalam rangka Penganugerahan bintang Republik Indonesia kepada Yang Dipertuan Agong Malaysia, Jakarta, 16 Oktober 2011.
86. Bilateral dalam rangka *Annual Consultations RI - Malaysia*, Lombok, 20 Oktober 2011.
87. Mendampingi Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Menhan AS, Bali, 24 Oktober 2011.
88. Kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar dalam rangka Kunjungan kerja Menlu RI, Myanmar, 28 Oktober 2011.
89. Rangkaian pertemuan dalam rangka Kunjungan kerja Menlu RI, Myanmar, 28 Oktober 2011:
    1) Pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi;
    2) Pertemuan dengan Penasehat Presiden Myanmar;
    3) Pertemuan dengan Menlu Myanmar;
    4) Pertemuan dengan MenakerMyanmar;
    5) Pertemuan dengan Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan EkonomiMyanmar;
    6) Pertemuan dengan Ketua DPRMyanmar;
    7) Pertemuan dengan Ketua MPRMyanmar.
90. Mendampingi Presiden RI dalampertemuan dengan Dirjen UNESCO dalam rangka Sesi Khusus UNESCO di Paris, Paris, 30 Oktober -2 November 2011.
91. Kunjungan Presiden dalam rangka KTT G20, Cannes, 3 -5 November 2011:
    1) Mendampingi Presiden RI dalampertemuanbilateral dengan Presiden Meksiko;
    2) Mendampingi Presiden RI dalampertemuantrilateral Presiden komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa.
92. *Informal Working Dinner* dengan Menlu Timor-Leste, Jakarta, 7 November 2011.
93. Mendampingi Presiden RI menerima Utusan Khusus Raja Arab Saudi, Menteri Tenaga Kerja HR Mr. Adel bin Muhammad Faqeeh, Jakarta, 8 November 2011.
94. Pertemuan dengan Menlu Jepang dalam rangka Kunjungan kerja Menlu RI untuk pemberian tanda kehormatan RI kepada mantan PM Fukuda, Jepang, 10 November 2011.
95. Rangkaian pertemuan bilateral dalam rangka KTM APEC, Honolulu, 10 - 11 November 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu AS;
    2) Pertemuan bilateral dengan Menlu Chile;
    3) Pertemuan bilateral dengan Menlu Australia;
    4) Pertemuan bilateral dengan Menlu China.
96. Kunjungan Presiden dalam rangka KTT APEC, Honolulu, 12 November 2011:
    1) Mendampingi Presiden RI dalampertemuan dengan Perdana Menteri Kanada;
    2) Mendampingi Presiden RI dalampertemuan dengan Presiden Rusia dalam rangka KTT APEC.
97. Rangkaian pertemuan bilateral dalam rangka *ASEAN Summit and related Summits*, Bali, 15 - 16 November 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Brazil;
    2) Pertemuan bilateral dengan *Special Advisor* UNSG.
98. Mendampingi Presiden RI dalam rangka pertemuan bilateral Presiden RI - PM Malaysia, Bali, 16 November 2011.
99. Pertemuan *19th ASEAN Summit and Related Summits*, Bali, 17 - 19 November 2011:
    1) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM China;
    2) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan Presiden Korea Selatan;
    3) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan Sekjen PBB;
    4) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan dengan Presiden Amerika Serikat;
    5) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM India.
100. Mendampingi Presiden RI dalam rangka pertemuan bilateral Indonesia - Australia *Annual Leaders' Meeting*, Bali, 20 November 2011.
101. Mendampingi Presiden RI dalam rangka pertemuan Presiden RI - PM Kamboja, Bali, 20 November 2011.

102. Rangkaian pertemuan bilateral dalam rangka *Bonn Conference on Afghanistan*, Bonn, Jerman, 3 - 5 Desember 2011:
    1) Pertemuan bilateral dengan Menlu Jerman;
    2) Pembicaraan dengan Menlu Norwegia.
103. Pertemuan dalam rangka *Bali Democracy Forum* IV, Bali, 8 - 10 Desember 2011:
    1) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI – PM Bangladesh;
    2) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI – PM Qatar;
    3) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI – Presiden Sri Lanka;
    4) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI – PM Timor-Leste;
    5) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI – PM Mongolia;
    6) Mendampingi pertemuan bilateral Presiden RI – Wapres Filipina;
    7) Mendampingi Presiden RI dalam menerima kunjungan kehormatan Utusan khusus PM Jepang;
    8) Mendampingi Presiden RI dalam menerima kunjungan kehormatan Utusan khusus PM Papua Niugini;
    9) Kehadiran Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadien Waddaulah.
104. Bilateral dengan Menlu Filipina dalam rangka SKB RI - Filipina, Manila, 13 - 15 Desember 2011.
105. Bilateral dengan Menlu Myanmar dalam rangka SKB RI - Myanmar, Yangoon, 27 - 29 Desember 2011.

III.1 HUBUNGAN BILATERAL DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Sasaran

Penguatan hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya mutlak diperlukan untuk menciptakan kawasan yang damai, aman dan stabil dan memastikan kepentingan nasional Indonesia dapat terjamin. Negara-negara dimaksud adalah semua negara anggota ASEAN dan Timor-Leste.

Kepentingan-kepentingan nyata yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan antara lain adalah:

- Penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia;
- Penanganan masalah-masalah lintas batas;
- Perlindungan WNI, khususnya TKI;
- Peningkatan hubungan ekonomi, mencakup perdagangan, investasi, pariwisata dan tenaga kerja; serta
- Peningkatan hubungan sosial budaya.

Brunei Darussalam

Hubungan Indonesia – Brunei Darussalam pada tahun 2011 berjalan baik di semua bidang. Hubungan baik tersebut khususnya di bidang politik telah memberikan landasan kuat bagi peningkatan kerja sama di bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Peningkatan hubungan bilateral RI-Brunei Darussalam ditandai dengan dihidupkannya kembali pertemuan Komisi Bersama, yang terakhir bertemu pada tahun 2003 yang lalu.

Bidang Politik

Peningkatan kerja sama politik kedua negara tercermin antara lain dengan saling kunjungdan saling dukung. Sepanjang tahun 2011, tercatat saling kunjung kedua Kepala Negara/Pemerintah sebanyak 4 kali. Pada tataran Menteri Luar Negeri,saling kunjung antara kedua Menlu tercatat sebanyak 7 kali. Selain itu juga tercatat saling kunjung dari sejumlah Menteri lainnya, maupun pada tingkat pejabat tinggi kedua negara.

Foto 1. Jamuan santap malam kenegaraan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, 24 Februari 2011

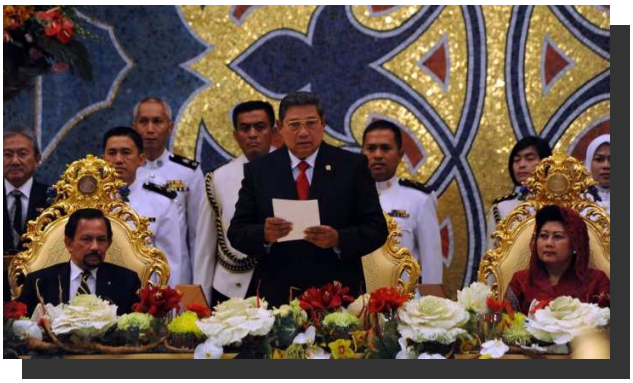

Pada tanggal 24-25 Februari 2011, Presiden RI telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Bandar Seri Begawan. Pada pertemuan tersebut, Presiden RI melakukan pertemuan *tete-a-tete* dan bilateral dengan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam kunjungan tersebut, beberapa isu telah dibahas, diantaranya adalah mengenai pengaktifan kembali pertemuan Komisi Bersama RI-Brunei Darussalam; tenaga kerja Indonesia dan penghargaan terhadap Sultan atas upaya perlindungan warga negara Indonesia di Brunei Darussalam; peningkatan nilai perdagangan dan investasi kedua negara; serta penandatanganan *Memorandum of Understanding* di bidang pertanian dan *Letter of Intent* kerja sama perikanan. Di bidang kerja sama pertahanan, Presiden RI telah menyampaikan pemberian beasiswa bagi perwira tentara Brunei Darussalam untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pertahanan di Jakarta.

Menindaklanjuti hasil kesepakatan kedua pemimpin negara di Brunei Darussalam tersebut, pertemuan ke-2 *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) RI-Brunei Darussalam telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Juli 2011 di Bali. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara telah menandatangani *Agreement* Kerja Sama Kekonsuleran, dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomat oleh kedua Menteri Luar Negeri.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Foto 2.JCBC ke-2 RI – Brunei Darussalam, Bali, 17-18 Juli 2011

Total nilai perdagangan kedua negara sampai dengan bulan Agustus 2011, mencapai USD 606,05 juta, atau naik sebesar 20,26% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Brunei merupakan pengimpor berbagai produk manufaktur Indonesia. Upaya-upaya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara terus dilakukan oleh KBRI di Bandar Seri Begawan melalui berbagai kegiatan promosi Indonesia. Ekspor Indonesia ke Brunei Darussalam mencakup produk makanan dan minuman ringan, obat-obatan, jamu, kosmetik, peralatan listrik dan elektronik, tekstil, furnitur, dan lain-lain. Sedangkan ekspor Brunei Darussalam ke Indonesia adalah minyak mentah, peralatan transportasi, dan permesinan.

Dalam upaya pemajuan *people-to-people links* kedua negara telah membentuk *Brunei Darussalam – Indonesia Friendship Association* (BRUDIFA) pada 6 Januari 2009. Dalam kaitan ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada *second track diplomacy* melalui BRUDIFA.

Pada 7-9 Desember 2011, Sultan Brunei Darussalam juga telah menghadiri *Bali Democracy Forum IV* yang diadakan di Bali.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Tugas-tugas kekonsuleran yang dijalankan oleh KBRI Bandar Seri Begawan meliputi (i) Ketenagakerjaan; (ii) Pembuatan dokumen RI; (iii) WNI terlantar; (iv) Perlindungan warga; (v) Pembinaan TKW/TKI di penampungan; (vi) Pengurusan dan pemulangan jenazah ke Indonesia; dan (vii) Deportasi.

Jumlah WNI di negara akreditasi KBRI Bandar Seri Begawan mencapai 52.945 orang, dimana sebagian besar bekerja di sektor informal.

Pelayanan jasa kekonsuleran per hari di KBRI rata-rata cukup tinggi, yaitu antara 80 – 100 jasa konsuler, belum termasuk pelayanan *job order*, pemulangan TKI/TKW bermasalah, deportasi, pelayanan perlindungan di penjara dan pengadilan, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan tempat tinggal/rumah perorangan. Dari bulan Januari – Juni 2011 pelayanan yang diberikan oleh Fungsi Konsuler tercatat mencapai 14.962 kasus, atau 82 pelayanan per hari.

Upaya perlindungan terhadap TKW/TKI bermasalah yang ditampung di KBRI Bandar Seri Begawan dari waktu ke waktu juga semakin meningkat. Rata-rata TKW/TKI bermasalah yang berada di penampungan KBRI Bandar Seri Begawan antara 45 – 50 orang setiap hari. Dari Januari s/d Desember 2010, KBRI Bandar Seri Begawan telah menampung 631 TKW/TKI bermasalah, dan dari bulan Januari – Oktober 2011 jumlah TKW/TKI yang ditampung mencapai 40 orang, sebagian diantaranya telah diselesaikan masalahnya dengan dipulangkan ke Indonesia, atau TKI/TKW yang bersangkutan bekerja kembali pada majikan.

Filipina

Sepanjang tahun 2011 hubungan bilateral RI – Filipinaterus berkembang. Kerja sama kedua negara terjalin di berbagai bidang antara lain

politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan *counter terrorism*.

Bidang Politik

Hubungan yang sangat baik antara RI-Filipina terlihat pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Benigno S. Aquino III ke Jakarta tanggal 8-9 Maret 2011 yang telah menghasilkan 4 kesepakatan kerja sama di berbagai bidang.

Kesepakatan Kerja Sama RI – Filipina 2011:

1. *MoU on Basic Education*
2. *MoU on Sports Cooperation*
3. *MoU on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building*
4. *Joint Declaration concerning Maritime Boundary Delimitation*.

Selain itu Presiden Filipina juga telah berkunjung ke Jakarta dalam rangka menghadiri rangkaian KTT ke-18 ASEAN tanggal 7-8 Mei 2011 dan KTT ke-19 ASEAN di Bali tanggal 17-19 November 2011. Presiden RI dan Wakil Presiden Filipina telah bertemu di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* tanggal 8 Desember 2011.

Ditingkat Menteri, pada tanggal 7 Maret 2011, Menlu Filipina Albert F. Del Rosario, mengadakan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perkenalan Menlu Filipina kepada Menlu RI. Selain itu, Menlu RI dan Menlu Filipina juga telah mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan Tingkat Tinggi Menteri Luar Negeri ASEM, pada tanggal 7 Juni 2011 di Godollo, Hongaria, dan pertemuan bilateral di Jakarta tanggal 25 Juli 2011 guna membahas isu-isu regional.

Pada tanggal 13-14 Desember 2011, telah diselenggarakan pertemuan ke-5 *Joint Commission on Bilateral Cooperation* RI-Filipina di Manila. Pertemuan membahas perkembangan kerja sama RI-Filipina di bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi, pariwisata, transportasi, kebudayaan, pemuda, olah raga dan pendidikan, ketenaga kerjaan, *sister city*, serta menjajaki kerja sama di sektor sektor baru seperti kesehatan, industri produk halal, dan kekonsuleran.

Foto 3. Upacara Penyambutan Presiden Filipina pada Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia, 8 Maret 2011

Pemerintah Filipina menghargai peranan Indonesia dalam memfasilitasi dialog antara Pemerintah Filipina dengan MNLF yang telah menghasilkan Perjanjian Damai 1996. Filipina juga mengharapkan Indonesia dapat terus memfasilitasi perundingan mengenai implementasi perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua Komite OKI untuk proses damai di Filipina Selatan. Saat kunjungan Presiden Filipina, Benigno Simeon C Aquino III ke Jakarta pada bulan Maret 2011, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan kesediaan Indonesia atas permintaan Filipina untuk mengirimkan *military observer*sebagai bagian dari*International Monitoring Team*, dalam kerangka proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Filipina Selatan.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Filipina dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan Indonesia selalu dalam posisi surplus. Nilai perdagangan bilateral tahun 2009 sebesar USD 2,94 milyar dengan surplus untuk Indonesia sebesar USD 1,8 milyar. Tahun 2010, total nilai perdagangan mencapai USD 3,88 milyar dengan surplus sebesar USD 2,47 milyar. Untuk periode Januari-Agustus

2011, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 2,99 milyar atau meningkat 15,57% dibanding periode yang sama tahun 2010, dengan surplus sebesar USD 1,89 milyar.

Foto 4.Menlu RI dan Menlu Filipina pada Pertemuan ke-5 JCBC RI-Filipina, Manila,13-14 Desember 2011

Kerja sama yang erat antara Indonesia dan Filipina di bidang sosial budaya ditandai dengan disepakatinya *MoU on Basic Education* dan *MoU on Sports Cooperation*, pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Aquino III ke Jakarta bulan Maret 2011.

Pada bulan Februari 2011, Pemerintah Filipina memberikan bantuan kemanusiaan sebesar USD 50,000 yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu korban bencana alam letusan Gunung Merapi dan tsunami di Kepulauan Mentawai.

Sejak bulan September 2011, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Filipina terkena imbas bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, sosial serta lingkungan.

Sebagai bentuk kepedulian dan simpati, bantuan dana sebesar USD 400.000,- diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Filipina.

Di bidang investasi, keinginan pengusaha Filipina untuk berinvestasi di Indonesia antara lain di bidang pengolahan rumput laut, pengolahan ikan, furnitur, kerja sama operator wisata, pertambangan, penyediaan air minum, pendidikan di Indonesia bagi pelajar/mahasiswa asing, pabrik pembuatan rambut palsu kualitas tinggi, usaha perawatan medis seperti perawatan mata dengan lasik.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Filipina pada periode Januari-September 2011 sebanyak 2.054 orang. Kegiatan terkait perlindungan WNI antara lain kunjungan kekonsuleran secara rutin kepada 15 WNI yang sedang menjalani hukuman dan tahanan di sejumlah penjara di Metro Manila, menghadiri proses persidangan WNI yang dilaksanakan di sejumlah pengadilan di Metro Manila, memfasilitasi kunjungan keluarga para WNI yang ditahan dan melakukan sosialisasi berbagai ketentuan/aturan kekonsuleran. Dalam periode pelaporan ini, Pemri telah memberi bantuan dan perlindungan kepada 119 orang WNI, 83 diantaranya berhasil kembali ke tanah air.

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja, Indonesia dan Filipina juga bekerja sama erat di berbagai forum pada tingkat global dan regional. Khususnya dalam kerangka kerja sama ASEAN, terkait dengan pembahasan *draft instrument on the protection and promotion of the rights of migrant workers.* Pada tingkat global, secara khusus Indonesia bersama-sama Filipina memprakarsai resolusi di Majelis Umum mengenai perlindungan tenaga kerja migran wanita.

Kamboja

Hubungan bilateral Indonesia - Kamboja sangat baik di berbagai bidang. Kamboja dalam berbagai hal menempatkan Indonesia sebagai contoh dalam pembangunan negaranya.

Bidang Politik

Hubungan baik kedua negara tercermin antara lain dari berbagai kunjungan bilateral pada tingkat

Kepala Negara maupun tingkat Menteri, diantaranya:

a) Kunjungan Perdana Menteri Kamboja pada KTT ASEAN Ke-18 di Jakarta, 7-8 Mei 2011
b) Kunjungan Perdana Menteri Kamboja pada KTT ASEAN Ke-19 di Bali, 17-19 November 2011
c) Kunjungan Menlu RI ke Phnom Penh, terkait konflik perbatasan Kamboja-Thailand, 7 Februari 2011
d) Kunjungan Menlu Kamboja pada *AMM Retreat*, di Lombok, 16-17 Januari 2011
e) Kunjungan Menlu Kamboja pada pertemuan informal menteri-menteri luar negeri ASEAN di Jakarta, 22 Februari 2011

Foto 5. Presiden RI bersama PM Kamboja Hun Sen pada penutupan KTT ke-16 ASEAN, Bali, 19 November 2011

f) Kunjungan Menlu Kamboja pada *Special ASEAN – Japan Ministerial Meeting,* Jakarta, 9 April 2011
g) Kunjungan Menlu Kamboja dalam rangka menghadiri, pertemuan *Joint Border Committee* antara Kamboja dan Thailand di Bogor, 7-8 April 2011
h) Kunjungan Menlu Kamboja pada KTT ASEAN Ke-18 di Jakarta, 7-8 Mei 2011
i) Kunjungan Menlu Kamboja pada KTT ASEAN Ke-19 di Bali, 17 – 19 November 2011
j) Kunjungan Wakil Ketua DPD RI, Dr. La Ode Ida dalam rangka pertemuan AIPA, 14-15 Maret 2011

Sepanjang tahun 2011 ini, hubungan kerja sama Indonesia – Kamboja di bidang politik ditandai oleh peran Indonesia untuk menengahi konflik perbatasan Kamboja dan Thailand di kawasan Candi Preah Vihear. Peran Indonesia tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN sangat dihargai oleh Kamboja. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Kamboja selalu menekankan perlunya keterlibatan Indonesia dalam menengahi konflik perbatasan dengan Thailand.

Pada pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Kamboja tanggal 20 November 2011 di sela-sela KTT ASEAN ke-19/EAS di Bali, kedua Pemimpin telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang dan lebih menguatkan koordinasi dan kerja sama di ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN tahun 2012, PM Hun Sen menegaskan komitmen Kamboja untuk meneruskan upaya-upaya yang telah dirintis Indonesia pada tahun 2011 dalam memajukan ASEAN. Sementara, Indonesia akan terus memberikan dukungan dan bantuan kepada Kamboja guna menyukseskan keketuaan Kamboja di ASEAN pada tahun 2012.

Pada sisi bilateral, kedua Pemimpin juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme dialog bilateral, baik di tingkat pejabat tinggi (SOM) maupun tingkat Menlu.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Volume perdagangan Indonesia – Kamboja terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, nilai perdagangan bilateral mencapai USD 222,46 juta, dan Indonesia mengalami surplus USD 213,01 juta. Nilai perdagangan sampai dengan bulan Agustus 2011 mencapai USD 179,15 juta, meningkat 11,6 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 160,48 juta.

Kerja sama ekonomi dan sosial budaya kedua negara mencakup kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, pendidikan, investasi, dll. Salah satu kegiatan promosi di bidang ekonomi diantaranya*Roadshow*Pengusaha ke Jakarta, Semarang dan Surabaya, 16-21 Mei 2011.

Foto 6. Menlu RI dan Menlu Kamboja pada *Joint Border Committee* Kamboja - Thailand, Bogor, 8 April 2011

Jumlah kunjungan wisata, pelajar ke Indonesia rata-rata perbulan sebanyak 30 orang, dengan klasifikasi sbb: kunjungan Sosbud 40%, wisata 40%, bisnis 15%, dan pendidikan/training 5%.

Kerja sama Indonesia – Kamboja di bidang kebudayaan antara lain didasarkan pada MOU *on Sister Temple Cooperation*. Melalui MOU ini, kedua negara telah sepakat untuk melaksanakan *joint promotion* yaitu upaya promosi bersama untuk mendorong turis yang berkunjung ke Candi Angkor Wat di Propinsi Siem Reap, Kamboja, untuk mengunjungi Candi Borobudur di Propinsi Jawa Tengah, dan sebaliknya.

Sejak bulan September 2011, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Kamboja, terkena imbas bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, sosial serta lingkungan.

Sebagai bentuk kepedulian dan simpati, bantuan dana sebesar USD 400.000,- diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Kamboja.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Kamboja (terdaftar) per Oktober 2011 sebanyak 589 orang yang tersebar di beberapa kota dan propinsi di Kamboja. Konsentrasi WNI terbanyak berada di Phnom Penh (sekitar 300 orang).

WNI di Kamboja pada umumnya adalah *skilled workers* yang bekerja di berbagai bidang, seperti di bidang organisasi internasional, LSM, perhotelan, perusahaan (*property*, telekomunikasi, obat), wiraswasta (restoran), Hotel dan Kasino, Missionaris, pengajar, dll.

Laos

Sepanjang tahun 2011, Indonesia dan Laos terus meningkatkan hubungan baik di berbagai bidang yang telah terjalin selama ini. Hubungan persahabatan kedua negara ditandai oleh kerja sama bilateral maupun kerja sama di tingkat regional, khususnya dalam kerangka ASEAN.

Bidang Politik

Hubungan baik Indonesia – Laos tercermin antara lain dengan kunjungan para pejabat tinggi kedua negara, yaitu:

- Kunjungan Perdana Menteri Laos, Y.M. Thongsing Thammavong, 9 Mei 2011 ke Indonesia.
- Kunjungan Menteri Luar Negeri Laos Y.M. Thongloun SISOULITH sebanyak 7 kali antara lain menghadiri pertemuan Komisi Bersama RI-Laos dan rangkaian pertemuan ASEAN lainnya sepanjang tahun 2011; dan Pertemuan Tingkat Menlu GNB.
- Kunjungan berbagai Menteri lainnya dan pada tingkat pejabat tinggi antara kedua negara.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Kedekatan hubungan RI - Laos membuka berbagai peluang kerja sama di bidang ekonomi yang dapat dikembangkan kedua negara di masa-masa mendatang. Nilai perdagangan kedua negara belum mencerminkan potensi ekonomi yang ada. Meskipun demikian, data perdagangan kedua negara menunjukkan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu.

Foto 7 Pertemuan Bilateral Presiden RI – PM Laos, Jakarta, 9 Mei 2011

Nilai perdagangan bilateral mencapai USD 6,12 juta, dan Indonesia mengalami surplus USD 4,8 juta. Pada tahun 2011, nilai perdagangan sampai dengan bulan Agustus 2011 mencapai USD 6,53 juta, meningkat 52,7 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya USD 4,27 juta.

Peluang peningkatan hubungan di bidang ekonomi masih sangat terbuka luas, antara lain di bidang perkebunan, kehutanan, energi, otomotif, pertambangan. Di bidang investasi, upaya-upaya terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi pasar kedua negara pada kalangan swasta. Sejumlah pengusaha Indonesia saat ini sedang menjajagi kemungkinan berinvestasi di Laos.

Guna mendorong peningkatan kerja sama ekonomi, kedua negara telah sepakat untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penggelapan fiskal yang dituangkan dalam '*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People's Democratic Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income'* pada tanggal 8 September 2011 di Vientiane.

Bidang kerja sama yang perkembangannya cukup menonjol adalah kerja sama sosial-budaya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Laos berusaha meningkatkan dan memperbaiki sistem pendidikannya dengan memanfaatkan berbagai program beasiswa dan pelatihan yang ditawarkan oleh negara-negara sahabat, termasuk tawaran beasiswa dari Pemerintah RI.

Pada periode Januari – September 2011 telah dilakukan serangkaian kegiatan antara lain:

- Perlombaan berbahasa Indonesia untuk masyarakat Laos.
- Pemutaran Film Indonesia kepada masyarakat Laos, khususnya *Friends of Indonesia.*
- Pertunjukan musik Kolintang di *Aliance Francaise Vientiane*.
- Pemberian beasiswa Dharmasiswa, Program S-2, Beasiswa di bidang pelatihan hukum di UNPAD, BSBI, dan pelatihan teknis di berbagai bidang dalam rangka KST.

Bidang Kekonsuleran

Pada tahun 2011, kedua negara telah menandatangani 2 buah persetujuan, yaitu:Persetujuan Bebas Visa Untuk Pemegang Paspor Biasa dan MoU tentang Kerja Sama di Bidang Olah Raga. Dengan adanya kesepakatan bebas visa untuk paspor biasa, diharapkan akan mendorong saling kunjung antar warga kedua negara dan memfasilitasi kegiatan di berbagai bidang lainnya terutama ekonomi dan pariwisata.

Foto 8. JCBC ke-3 RI – Laos, Yogyakarta, 17 Januari 2011

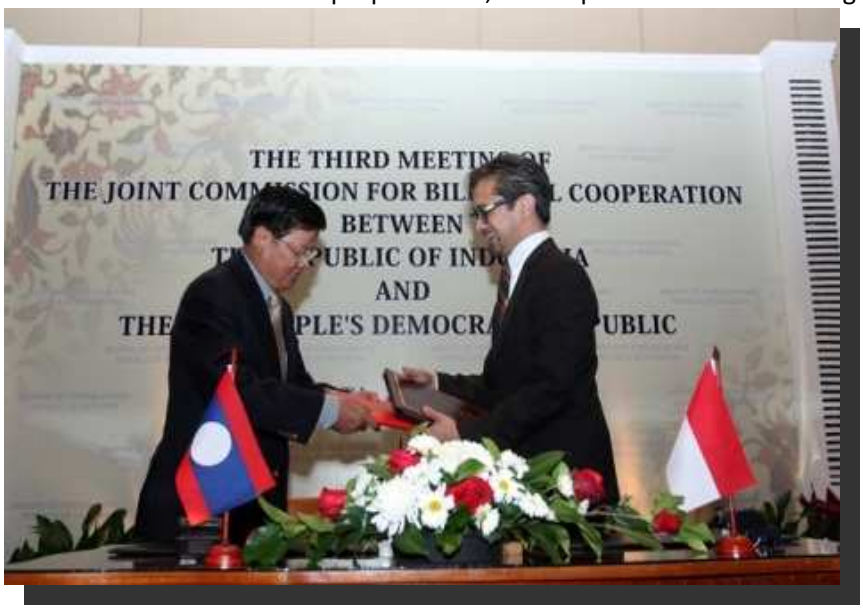

Malaysia

Hubungan Indonesia-Malaysia secara umum berjalan dengan baik dan mampu mengelola berbagai isu yang timbul sebagai negara tetangga, diantaranya penanganan perbatasan maritim dan darat dan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Sebagai cerminan hubungan baik tersebut, Pemerintah Indonesia telah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada tanggal 16 Oktober 2011 di Istana Merdeka, Jakarta.

Bidang Politik

Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan mekanisme dialog bilateral di berbagai tingkatan. Pada tingkat Kepala Negara, pada tahun 2011 telah diselenggarakan Pertemuan ke-8 *Annual Consultations RI – Malaysia* di Lombok pada tanggal 20 Oktober 2011. Di samping itu, disela-sela rangkaian pertemuan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 16 November 2011, telah dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan PM Malaysia.

Pada tingkat Menteri Luar Negeri, mekanisme dialog utama adalah pertemuan JCBC yang telah berlangsung tiga kali dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini. Pertemuan JCBC terakhir dilakukan pada 10-11 Oktober 2011 di Kuala Lumpur.

Pada pertemuan *Annual Leaders Meeting* di Lombok, kedua Kepala Pemerintahan telah membahas isu-isu pokok yang mewarnai hubungan kedua negara, antara lain perbatasan dan ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut, juga telah ditandatangani *the Second Amendment of the 1991 Double Taxation Agreement*dan *Protocol to Amend the MoU between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia on Bilateral Cooperation on Commodities.*

Pada pertemuan JCBC ke-11 di Kuala Lumpur, kedua Menteri Luar Negeri juga telah membahas status perkembangan kerja sama kedua negara di berbagai bidang dan berbagai isu *pending* lainnya menyangkut masalah perbatasan, ketenagakerjaan, dan kekonsuleran.

Terkait dengan isu perbatasan, kedua negara tetap berkomitmen untuk meningkatkan upaya-upaya penanganan perbatasan. Hal ini tercermin dari intensitas perundingan perbatasan maritim kedua negara sepanjang 2011 yang mencapai 4 putaran perundingan.

Perundingan ke-18 delimitasi maritim RI-Malaysia dilaksanakan di Kuala Lumpur, pada 8-10 Februari 2011. Perundingan ke-19 delimitasi maritim RI-Malaysia diselenggarakan di Bali, pada tanggal 25-27 April 2011. Perundingan ke-20 Tim Teknis delimitasi batas maritim telah dilaksanakan di Port Dickson, pada 17-18 Oktober 2011. Sedangkan perundingan ke-21 dilangsungkan pada 21-23 Desember 2011 di Bandung, Indonesia.

Foto: Presiden Kedah Ibu Ani Yudhoyono menyambut kedatangan PM Najib Razak dan Dr. Sri Rosmah Mansor, Lombok, 20 Oktober 2011

Kedua negara juga secara intensif sepanjang tahun 2011 membahas penyusunan *Standard Operation Procedures* dan *Rules of Engagement* untuk mengelola dan menangani kasus-kasus pelanggaran wilayah maritim khususnya di Selat Malaka.

Indonesia dan Malaysia juga terus melakukan pertemuan secara reguler untuk menyelesaikan penegasan batas-batas darat kedua negara di sejumlah segmen. Penyelesaian demarkasi batas darat kedua negara di Pulau Kalimantan dilakukan melalui mekanisme *Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary* (JIM).

Foto 11.Pertemuan ke-11 JCBC RI - Malaysia, Kuala Lumpur, 10 - 11 Oktober 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Volume perdagangan Indonesia-Malaysia terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, nilai perdagangan bilateral mencapai USD 18 miliar, dan Indonesia mengalami surplus USD 713 juta. Pada tahun 2011, nilai perdagangan sampai dengan bulan Agustus 2011 mencapai USD 13,89 miliar, meningkat 20,13% dibandingkan periode yang sama di tahun 2010 sebesar USD 11,56 miliar.

Investasi Malaysia di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari melonjaknya nilai investasi Malaysia di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, terutama di sektor perbankan, perkebunan dan telekomunikasi.

Investasi Indonesia yang telah terealisasi di Malaysia dalam bidang perdagangan, *fast moving consumer goods*(FMCG), Perbankan (syariah dan *remittance*), hotel dan restoran, properti, toko buku, jamu, pusat perawatan kesehatan dan kecantikan, jasa pengiriman kargo, konsultan keuangan, dll.

KBRI Kuala Lumpur terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara, diantaranya:

a. Seminar "Peluang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Malaysia: Menelaah Program Transformasi Ekonomi Malaysia" yang diselenggarakan KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 27 April 2011;
b. Pendampingan kunjungan grup Kahazanah yang berminat untuk berinvestasi di bidang infrastruktur jalan raya di Jakarta;
c. Fasilitasi kunjungan *Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia* (ACCCIM) dan *Chinese Chamber of Commerce and Industry of Kuala Lumpur and Selangor* (KLSCCCI) ke Jakarta.

Untuk lebih meningkatkan jumlah wisatawan Malaysia ke Indonesia, KBRI Kuala Lumpur terus melaksanakan promosi pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan *Visit Indonesia Tourism Organization* (VITO),

pemerintah daerah, kalangan swasta, serta *stakeholder* lainnya.

Adapun kegiatan promosi pariwisata diantaranya adalah pertunjukan kesenian dan budaya tradisional Indonesia dalam setiap kesempatan kegiatan KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, termasuk dalam pelaksanaan pameran, seminar, dll, *familiarization trip*bagi jurnalis dan *tour operator* Malaysia ke Indonesia untuk lebih memperkenalkan potensi wisata Indonesia, *food festival*untuk mempromosikan makanan khas Indonesia, mengikuti Pameran Promosi Wisata di Malaysia, mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia dalam kegiatan *table top*, kegiatan *direct selling*berupa promosi secara langsung kepada masyarakat di Malaysia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2011 telah dicapai kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia, antara lain ditandai dengan:

a. Pada tanggal 30 Mei 2011 kedua negara telah menyepakati *Protocol Amending the MOU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*. Protokol ini mencakup pengaturan mengenai:
   - Paspor dipegang oleh TKI
   - Cuti satu hari dalam seminggu
   - Pembayaran gaji melalui bank

   Pelaksanaan dari kesepakatan dimaksud akan terus dimonitor oleh *joint task force* yang dibentuk oleh kedua negara.

   Sejalan dengan rekomendasi *joint task force*,terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011, Pemerintah Indonesia mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja informal Indonesia ke Malaysia yang telah diberlakukan sejak Juni 2009.

b. Pada Mei 2011, Pemerintah Malaysia mengumumkan program untuk melegalisasikan para pekerja migran ilegal yang berada di Malaysia melalui program 6P yaitu pendaftaran (registrasi), pemutihan (legalisasi), pengampunan (amnesti), pemantauan (pengawasan), penguatkuasaan (penegakan hukum) dan pemulangan (deportasi). Pemerintah Indonesia menyambut baik langkah-langkah yang diambil Malaysia untuk melegalisasikan pekerja migran yang selama ini tidak memiliki izin kerja.

c. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap WNI di Malaysia yang menghadapi masalah hukuman berat diwujudkan melalui upaya-upaya konkrit dan pembahasan pada berbagai tingkatan, termasuk pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dan tingkat Menteri terkait. Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi WNI di Malaysia, terutama mereka yang menghadapi masalah hukum berat, KBRI Kuala Lumpur dan Satgas Penanganan Kasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati telah melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang dihadapi sejumlah WNI di Malaysia. Dalam kaitan ini telah disepakati untuk menunjuk *retainer lawyer* untuk menangani kasus-kasus WNI tersebut.

Myanmar

Hubungan Indonesia-Myanmar memiliki catatan sejarah tersendiri. Myanmar adalah salah satu negara Asia terdepan yang senantiasa memberikan dukungan kepada Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Persahabatan tradisional tersebut terjalin hingga kini.

Bidang Politik

Kedekatan Myanmar dengan Indonesia antara lain tercermin dari dipilihnya Indonesia sebagai negara tujuan kunjungan luar negeri pertama Presiden U Thein Sein sejak dilantik 30 Maret 2011. Pada kunjungan kenegaraan ke Indonesia tanggal 5 Mei 2011 tersebut, kedua Kepala Negara telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam memajukan demokrasi dan HAM

melalui berbagai pengalaman, *best practices* dan kerja sama *capacitybulding*.

Foto 12.Menlu RI dan Aung San Suu Kyi di Kediamannya di Yangon, 30 Oktober 2011

Terkait demokratisasi Myanmar, Indonesia senantiasa mendorong proses reformasi dan demokratisasi di Myanmar dengan tetap menghormati kedaulatan Myanmar.

Berkenaan dengan keinginan Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2014, atas instruksi Presiden RI dan hasil KTT ke-18 ASEAN di Jakarta serta mandat Pertemuan Menlu ASEAN ke-44 di Bali Juli 2011, Menlu RI pada tanggal 28 – 30

Foto 13.Pertemuan Bilateral Presiden RI – Presiden Myanmar Jakarta, 5 Mei 2011

Oktober 2011 telah berkunjung ke Myanmar. Kunjungan ini ditujukan untuk konsultasi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar, yakni pemerintah/parlemen, kelompok madani dan oposisi terkait perkembangan yang terjadi di Myanmar dan kesiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN tahun 2014. Kunjungan juga ditujukan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, termasuk memberikan dukungan terhadap proses demokratisasi yang berlangsung di Myanmar.

Pada kunjungan tersebut, Menlu RI telah bertemu dengan beberapa pejabat tinggi negara, diantaranya Presiden U Thein Sein dan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin. Dalam kunjungan ini, Menlu RI juga telah telah melakukan pertemuan empat mata dengan Aung San Suu Kyi di kediamannya.

Pada KTT ASEAN ke-19 di Bali, para Pemimpin ASEAN telah menyetujui keketuaan Myanmar untuk ASEAN pada tahun 2014. Para Pemimpin ASEAN juga berpandangan bahwa momentum perkembangan positif di Myanmar harus terus dipertahankan.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pada kesempatan kunjungan bilateral Presiden Thien Sien, kedua Kepala Negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan menetapkan target nilai perdagangan sebesar USD 500 juta hingga tahun 2015. Pada tahun 2010, nilai perdagangan bilateral mencapai USD 316,02 juta, Total perdagangan RI – Myanmar periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD 275 juta, meningkat

36,85% dibandingkan periode yang sama tahun 2010.

Di bidang investasi, terdapat peluang bagi para pelaku bisnis Indonesia untuk berinvestasi dan berpartisipasi pada proyek-proyek bidang infrastruktur, energi dan pertambangan di Myanmar.

Selain itu, juga tengah dijajaki kerja sama ketahanan pangan, dalam hal ini meningkatkan produksi dan kualitas beras. Beras Myanmar telah terpilih sebagai beras terbaik se-Asia Pasifik pada *World Rice Conference 2011.*

Dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

a. Penyelenggaraan seminar ekonomi di Hotel Traders, Yangon, 30 Juni 2011;
b. *Business matching*antara pengusaha Indonesia dan Myanmar di Gedung Kadin Federasi Republik Uni Myanmar, 1 Juli 2011.

Sementara itu, di bidang sosial dan budaya, telah diselenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya:

a. *Indonesian Batik Show* 2011, pada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Traders, Yangon, Myanmar;
b. Bazar dan Pagelaran Budaya Indonesia di Wilayah Barat Myanmar 2011 di Ngwesaung, pada bulan Februari 2011;
c. *The 6th Indonesian Culinary and Cultural Fair 2011* di Park Royal Hotel, Yangon, bulan Maret – April 2011.

Sejak bulan September 2011, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar terkena imbas bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, sosial serta lingkungan.

Sebagai bentuk kepedulian dan simpati, bantuan dana sebesar USD 400.000,- diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Myanmar.

Foto 14.Pertemuan Bilateral Menlu RI –Menlu Myanmar
Nay Pyi Daw, 29 Oktober 2011

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI yang berada di Myanmar sebanyak 215 orang. Sedangkan, jumlah kasus yang melibatkan WNI di Myamar tecatat sebanyak 28 kasus.

Dalam rangka memberikan bantuan dan upaya penyelesaian atas kasus yang menimpa WNI di Myanmar, KBRI Yangon telah memfasilitasi pemulangan nelayan-nelayan Indonesia yang terdampar di Myanmar, sebagai berikut: tahun 2009 (11 orang), tahun 2010 (116 orang). Pada tanggal 31 Mei 2011 telah difasilitasi pemulangan 25 orang nelayan Indonesia.

Singapura

Hubungan bilateral RI – Singapura sepanjang tahun 2011 terus berkembang di berbagai bidang.

Bidang Politik

Selama tahun 2011, intensitas saling kunjung pejabat kedua negara menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Di tingkat Kepala Pemerintahan, telah dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dengan PM Lee Hsien Loong di sela-sela *World Economic Forum on East Asia* (WEFEA), tanggal 12 Juni 2011. Di samping itu, juga telah dilakukan kunjungan oleh Wakil Presiden RI ke Singapura pada tanggal 30 – 31 Agustus 2011.

Pada tanggal 23-27 Mei 2011, Menlu RI telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura di sela-sela KTM GNB di Bali. Pada

pertemuan tersebut, telah dibahas beberapa isu, yaitu: penguatan dan peningkatan hubungan bilateral yang sudah berjalan dengan baik di berbagai bidang termasuk penguatan peran ASEAN; dukungan Singapura terhadap Keketuaan Indonesia dalam ASEAN dan hal-hal lain yang terkait dengan kerja sama ASEAN.

Pada tanggal 24 Juni 2011, Menlu Singapura, K. Shanmugam telah mengadakan kunjungan perkenalan ke Indonesia. Pada kesempatan tersebut, telah dilaksanakan pertemuan bilateral dan dibahas langkah-langkah peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Singapura, baik dalam konteks bilateral, regional maupun global.

Mengenai masalah perbatasan, Indonesia dan Singapura telah berhasil menyelesaikan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (antara Pulau Nipah di wilayah RI dan Tuas di bagian barat Singapura). Pada tanggal 13 -14 Juni 2011, kedua negara telah memulai putaran pertama perundingan delimitasi batas maritim Indonesia - Singapura yang masih tersisa, yakni di segmen Timur Selat Singapura (Batam-Changi).

Foto 15 Kunjungan Bilateral Menlu Singapura, Jakarta,24 Juni 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Singapura adalah salah satu negara mitra ekonomi utama Indonesia.Total perdagangan RI – Singapura periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD 29,8 milyar, meningkat 35,32% dibanding periode yang sama pada tahun 2010.

Di bidang investasi, Singapura merupakan sumber realisasi investasi asing terbesar bagi Indonesia. Hingga semester I tahun 2011, realisasi investasi Singapura di Indonesia telah mencapai lebih dari USD 1,9 milyar dalam 345 proyek.

Foto 16. Presiden RI dan PM Singapura, *World Economic Forum on East Asia,* Jakarta,12 Juni 2011

Menindaklanjuti arahan pemimpin kedua negara pada pertemuan *Leaders Retreat* tahun lalu, Indonesia dan Singapura telah membentuk enam *working group* di bidang kerja sama ekonomi, yaitu a) kerja sama pengembangan Batam Bintan dan Karimun dan kawasan ekonomi khusus lainnya; b) kerja sama investasi; c) kerja sama perhubungan udara; d) kerja sama agribisnis; e) kerja sama pariwisata; f) kerja sama tenaga kerja. Masing-masing *working group* diketuai oleh kementerian terkait dan sepanjang 2011 telah menjalankan program program kongkrit untuk semakin

memperlancar dan mengembangkan hubungan kerja sama ekonomi antara kedua negara.

Dalam rangka meningkatkan hubungan budaya,KBRI Singapura telah melakukan serangkaian kegiatan promosi antara lain:

a. Pagelaran Budaya Gaya 2011, tanggal 22 Februari 2011;
b. *Kebaya Peranakan Exhibition*, 31 Maret 2011; dan
c. *Performance*: Kemilau Sumatera *in Cooperation with Minang Association in Singapore*.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di Singapura tercatat sebanyak 199.508 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 1.189. Sedangkan jumlah WNI yang berada di penampungan KBRI sebanyak 180 orang.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi para TKI di Singapura, Tim terpadu perlindungan TKI di luar negeri telah merekomendasikan pembenahan dan penetapan *cost structure* untuk pengiriman TKI ke Singapura dan perlunya memberikan sanksi tegas bagi perusahaan pengirim yang bermasalah.

Thailand

Hubungan bilateral RI – Thailand sepanjang tahun 2011 terus berkembang. Kerja sama kedua negara terjalin di berbagai bidang antara lain bidang politik dan ekonomi. Disamping itu, hubungan RI – Thailand pada tahun ini juga diwarnai oleh kerja sama dalam mengelola konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar candi *Preah Vihear* di bawah kerangka ASEAN.

Bidang Politik

Di bidang politik, hubungan intensif kedua negara ditandai dengan saling kunjung dan pertemuan pejabat tinggi kedua negara, diantaranya:

a. Kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Jakarta, tanggal 12 September 2011;
b. Pertemuan bilateral Presiden RI – PM Thailand di sela-sela KTT ASEAN ke-19, 17 November 2011 di Bali;
c. Kunjungan Menlu Thailand ke Lombok dalam rangka AMM *Retreat*, 15 Januari 2011;
d. Kunjungan Menlu RI ke Thailand dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN, 8 Februari 2011;
e. Kehadiran Menlu Thailand dalam *Informal ASEAN Ministers' Meeting* mengenai Kamboja-Thailand, Jakarta, 22 Februari 2011;
f. Kehadiran Menlu Thailand dalam BRMC di Bali, 30 Maret 2011;
g. Kunjungan Kerja Menlu Thailand ke Jakarta, 28 April 2011;
h. Kehadiran Menlu Thailand dalam KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, 5-9 Mei 2011;
i. Pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Thailand di sela-sela pertemuan GNB, pada tanggal 23-27 Mei 2011 di Bali; dan

j. Kunjungan Bilateral Menhan RI kepada Menhan Thailand, Bangkok, 12 Januari 2011.

Foto 17.Kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Jakarta, tanggal 12 September 2011

Kegiatan di bidang politik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Januari-Oktober 2011, diantaranya adalah:

a. *Open Forum on Democracy and the Promotion of Peace and Stability*, Bangkok, 19 Mei 2011.
b. Diskusi mengenai *"Islam in Indonesia: Moderate, Tolerant and Peaceful",* Bangkok, 3 Oktober 2011.
c. Seminar *Challenges of Security Sector Governance and Reform*, 26-28 Juni 2011.
d. Paparan Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand dan Koordinator Fungsi Politik KBRI mengenai "Penanganan Konflik di Aceh", Bangkok 12 Oktober 2011.

Dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN sepanjang tahun 2011, Indonesia telah berupaya untuk menengahi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia bekerja sama dengan kedua negara tersebut telah berhasil meredakan ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi dan perdagangan RI – Thailand terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Total perdagangan RI – Thailand periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD 11,1 miliar, meningkat 36,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2010.

Dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi yang lebih erat antara kedua negara, sejumlah kegiatan telah diselenggarakan sebagai berikut:

a. Seminar *Opportunities of Trade and Investment in Indonesia*, 1 Juni 2011

Foto 18. Menlu RI dan Menlu Thailand, Jakarta, 9 Mei 2011

b. *The Third Meeting on Technical Cooperation RI-Thailand* di Jakarta, 21 Juni 2011. Pertemuan bertujuan untuk membahas perkembangan pelaksanaan program kerja sama teknis yang telah disepakati pada pertemuan kedua di Petchaburi, Thailand tahun 2008 dan merumuskan kembali program kerja sama teknik antara kedua negara untuk periode tahun 2011-2012. Pertemuan juga telah membahas berbagai upaya pengembangan kerja sama teknik di antara kedua negara; dan

c. Pertemuan ke-3 *Indonesia-Thailand Energy Forum* (ITEF), 12-13 Juli 2011

Ke depan, sesuai ketetapan yang dihasilkan pertemuan Presiden RI dan PM Thailand, kedua negara bertekad untuk memberikan perhatian khusus pada kerja sama yang saling menguntungkan di bidang perikanan dan beras sebagai bagian dari kerja sama ketahanan pangan.

Kerja sama di bidang sosial-budaya ditandai dengan keikutsertaan berbagai kelompok masyarakat/profesi/ahli dari Indonesia dalam berbagai program pertukaran budaya, eksibisi, festival maupun seminar/diskusi yang diselenggarakan di Thailand, yang cenderung meningkat. Saling kunjung antara kelompok masyarakat sipil dan kecenderungan makin meningkatnya wisatawan Indonesia ke Thailand (sekitar 240.000 wisman per tahun), akan meningkatkan hubungan baik antar warga kedua negara.

Sejak bulan September 2011, beberapa negara anggota ASEAN mengalami bencana banjir. Thailand merupakan negara yang terkena dampak bencana banjir terparah. Dampak bencana ini tidak saja menyebabkan korban jiwa, tapi juga kerugian ekonomi, sosial serta lingkungan.

Sebagai bentuk kepedulian dan simpati, bantuan dana sebesar USD 1 juta diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Thailand.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di Thailand tercatat sebanyak 2.287 orang. Dalam periode tersebut KBRI telah membantu penanganan 11 kasus yang melibatkan WNI di Thailand.

Di bidang kekonsuleran telah diselenggarakan sejumlah kegiatan, diantaranya:

a. Kunjungan kepada WNI yang berada di rumah tahanan di Thailand, 17 Maret 2011; dan
b. Sosialisasi mengenai masalah Kekonsuleran/Perlindungan WNI, bantuan hukum dan keimigrasian kepada WNI yang berada di Phuket dan sekitarnya, 27 Mei 2011.

Sehubungan dengan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Thailand termasuk ibukota Bangkok, KBRI telah memfasilitasi evakuasi 26 orang mahasiswa/i dari wilayah Thailand bagian tengah yang terkena banjir dan ditempatkan di rumah-rumah staf KBRI.

Timor-Leste

Foto 19.Sidang Komisi Bersama ke-5 RI - Timor-Leste, Jakarta, 3 Maret 2011

ubungan Bilateral RI-Timor-Leste pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di berbagai bidang. Hal ini semakin mempererat hubungan persahabatan kedua negara.

Bidang Politik

Hubungan di bidang politik yang erat antara kedua negara ditandai dengan meningkatnya saling kunjung pejabat tinggi RI – Timor-Leste. Di tingkat kepala negara/pemerintahan, pada tahun 2011 PM Xanana Gusmao telah berkunjung ke Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* di Bali, 8 Desember 2011. Sedangkan Presiden Ramos Horta juga telah melakukan kunjungan ke Bali pada tanggal 16 November 2011 menjelang KTT ASEAN ke-19.

Di tingkat Menteri Luar Negeri, pada tahun 2011 kedua Menteri Luar Negeri telah melakukan pertemuan bilateral sejumlah empat kali, yaitu:

a. Pertemuan bilateral Menlu Ri dengan Menlu Timor-Leste di sela-sela *Bali Democracy Forum IV,* Bali, 9 Desember 2011;
b. Kehadiran Menlu Timor-Leste pada *Joint Ministerial Commission* ke-5, Jakarta, 3-4 Maret 2011
c. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Timor-Leste di sela-sela KTM ke-16 GNB, 25 Mei 2011 di Bali;
d. Pertemuan trilateral Australia-Indonesia-Timor-Leste di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, New York, September 2011; dan
e. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Timor-Leste di Jakarta, tanggal 7 November 2011

Peningkatan hubungan bilateral RI – Timor-Leste diwujudkan melalui 16 dokumen yang telah disepakati kedua negara dan mencakup bidang-bidang pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, perikanan, transportasi, pekerjaan umum, administrasi negara, pendidikan diplomatik, penanganan narkotika/psikotropika, pengawasan pembangunan, lingkungan hidup, dan perumahan.

Dalam konteks ASEAN, Timor-Lestetelah menyampaikan secara resmi keinginan untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Indonesia mendukung keinginan Timor-Leste dimaksud. Aplikasi keanggotaan ASEAN dari Timor-Leste tersebut disambut baik oleh negara–negara ASEAN dan para pemimpin ASEAN telah menugaskan *ASEAN Coordinating Council* untuk membahas aplikasi tersebut

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Indonesia merupakan sumber utama penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan Timor-Leste, khususnya untuk kebutuhan rakyat sehari-hari dan pembangunan di berbagai bidang terutama di bidang infrastruktur antara lain untuk pembangunan jalan, penyediaan tenaga kerja terampil, pembangunan fasilitas gedung dan lainnya. Pemanfaatan jalur darat dan laut berbatasan dengan Provinsi di NTT merupakan jalur penting terhadap *supply* kebutuhan pokok rakyat Timor-Leste.

Nilai total perdaganganTimor-Leste danIndonesia untuk periode Januari – Agustus tahun 2011 tercatat sebesar USD 140,93 Juta, naik sebesar 35,9% dibanding periode yang sama tahun 2010.

Foto 20. Presiden RI dan PM Timor-Leste di Istana Negara, Jakarta, 22 Maret 2011

Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, KBRI Dili telah menyelenggarakan kegiatan promosi di tahun 2011, diantaranya:

a. Pertemuan Informal Kerja Sama Teknik RI – Timor-Leste, Tibar-Liquica, 13 Januari 2011;
b. Promosi ekonomi dan pertanian di Distrik Maliana, 1 – 2 April 2011;

c. Promosi ekonomi dan pertanian di Distrik Viqueque, 6 – 7 April 2011;
d. Pertemuan dengan KADIN Timor-Leste di Dili, 4 Mei 2011; dan
e. Promosi ekonomi dan pertanian di Distrik Baucau, 27 – 28 Juni 2011.

Kesepakatan dan MoU RI – Timor-Lestedi Tahun 2011

1. *Joint Statement of the Fifth Meeting of the Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste, Jakarta, 4 Maret 2011.*
2. *MOU between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste on Technical Cooperation on Trade, Jakarta, 22 Maret 2011.*
3. *Letter of Intent between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Democratic Republic of Timor-Leste on Marine and Fishery Cooperation, Jakarta, 22 Maret 2011.*
4. *MoU between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Education and Training in the field of Transportation, Jakarta, 22 Maret 2011.*
5. *MoU between the Ministry of Public Works Infrastructure of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperation on Public Works Infrastructure, Jakarta, 22 Maret 2011.*
6. *MoU between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of State Administration and Territorial Management of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Technical Cooperation on Decentralization and Local Government, Jakarta, 22 Maret 2011.*
7. *MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Diplomatic Education and Training Cooperation, Jakarta, 22 Maret 2011.*
8. *MoU between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Police of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Cooperation in Combatting Illicit*

Kesepakatan dan MoU RI – Timor-Lestedi Tahun 2011 (lanjutan)

9. *MoU between the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperation on Institutional Capacity Building and Human Resources Development for Controller, Jakarta, 25 Mei 2011.*
10. *MoU between the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste on Environmental Cooperation, Jakarta, 24 Mei 2011.*
11. *Agreement on Payment and List of Recipient of Old-Aged Savings for the Former Indonesian Military/Police Personnel and Civil Servants of the Department of Defence/Indonesian Police in the Former Province of East Timor between Directorate for Human Resources and General Affairs PT. ASABRI (Persero) of the Republic of Indonesia and Professional Technic for the Secretary of State for Vocational Training and Employment Democratic Republic of Timor-Leste, Makassar, 28 Juli 2011.*
12. *Agreement on the Disbursement of Cash Value of the Housing Savings of the Former Civil Servant of the Former Province of East Timor between Advisory Board of Civil Servants Housing Savings (BAPERTARUM-PNS) of the Republic of Indonesia and State Secretariat of Vocational Training and Employment Democratic Republic of Timor-Leste (SEFOPE DRTL), Makassar, 28 Juli 2011.*
13. *Agreement between PT. Jamsostek (PERSERO) Republic of Indonesia and State Secretariat of Vocational Training and Employment of the Democratic Republic of Timor-Leste (SEFOPE DRTL) on Old-age Benefit Payment, Makassar, 28 Juli 2011.*
14. *MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperative Activities in the field of Defence, Dili, 19 Agustus 2011.*
15. *LoI between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperative Activities on Border Trade in Regulated Market, Dili, 19 Agustus 2011.*
16. *Agreement on the Disbursement of Cash Value of the*

Indonesia merupakan tempat tujuan utama bagi rakyat Timor-Leste dan warga negara asing lainnya, khususnya yang bertugas sementara di Timor-Leste, untuk berwisata termasuk kunjungan keluarga. Daerah tujuan wisata dan keluarga terutama adalah

Jakarta, Denpasar, Surabaya, Malang dan Yogyakarta, termasuk Kupang dan Atambua. Jumlah pemberian Visa Kunjungan Singkat untuk periode Januari – Juni 2011 tahun 2011 di KBRI Dili adalah 6.440 pemohon.

Di bidang sosial budaya, secara tradisional dan historis, Indonesia dan Timor-Leste mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan erat tersebut terus mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya kunjungan keluarga, wisatawan maupun kunjungan lainnya ke berbagai kota di Indonesia.

Dalam rangka memajukan hubungan budaya kedua negara, KBRI telah menyelenggarakan kegiatan Promosi Seni Budaya di tahun 2011, antara lain:

a. *Charity Bazaar* dan Promosi Indonesia, Dili, 28 Mei 2011; dan
b. Pelatihan Bahasa Indonesia, Dili, Januari – Juli 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di Timor-Lestetercatat sebanyak 4.971 orang. Jumlah kasus yang dihadapi WNI di Timor-Leste sebanyak 8 kasus (4 kasus pidana dan 4 kasus perdata). Sedangkan, jumlah kasus yang telah diselesaikan 4 kasus (2 kasus pidana dan 2 kasus perdata).

Foto 21. Presiden RI dan Presiden Timor-LesteRamos Horta di sela-sela KTT ke-19 ASEAN, Bali, 16 November 2011

Perkembangan Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor-Leste sepanjang tahun 2011, tercatat berbagai kemajuan dalam rangka tindak lanjut implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI – Timor-Leste. Untuk kurun waktu tahun 2011, telah dilakukan SOM KKP ke-5 di Dili pada tanggal 24-25 Oktober 2011 yang membahas, antara lain, berbagai kemajuan dalam implementasi rekomendasi KKP.

Viet Nam

Hubungan Indonesia – Viet Nam terus meningkat, baik dalam kerangka bilateral, dan regional seperti ASEAN,maupun kerangka internasional. Indonesia dan Viet Nam memiliki hubungan kemitraan komprehensif berdasarkan *Declaration on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century*yang disepakati pada tahun 2003. Kemitraan komprehensif tersebut semakin diperkuat dengan disepakatinya *Plan of Action* dari Deklarasi Kemitraan Komprehensif pada 14 September 2011.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan Viet Nam difokuskan pada tiga bidang kerja sama, yaitu perdagangan, ketahanan pangan, dan kerja sama maritim.

Bidang Politik

Hubungan Indonesia-Viet Nam di bidang politik ditandai dengan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, diantaranya:

a. Kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Viet Nam, H.E Nguyen Tan Dung ke Jakarta, 14 September 2011;
b. Kehadiran Perdana Menteri dan Wakil Menlu Viet Nam dalam rangka KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, 7-8 Mei 2011;

c. Kehadiran Perdana Menteri dan Menlu Viet Nam dalam rangka KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17-19November 2011;
d. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Viet Nam pada tanggal 14 September 2011 di Jakarta;
e. Kehadiran Menlu Viet Nam dalam rangkaian AMM, bulan Januari 2011 di Lombok, dan bulan Juli 2011 di Bali;
f. Pertemuan Menlu Indonesia dan Menlu Viet Nam di sela-sela ASEM FMM ke-10 di Budapest 6 – 7 Juni 2011.
g. Kunjungan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas ke Viet Nam dalam rangka *44th Annual Meeting, Board of Governors*, ADB ke 14 di Hanoi, tanggal 3 - 6 Mei 2011.
h. Kehadiran Menteri Pertanian Viet Nam pada *World Economic Forum on East Asia* (WEFEA), Jakarta, 12-13 Mei 2011
i. Kehadiran Menteri Pertahanan Viet Nam, Jenderal Phung Quang Thanh pada sidang *ASEAN Defense Ministerial Meeting* (ADMM) ke-5 di Jakarta, 16 - 21 Mei 2011.

Foto 22. Kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Viet Nam, H.E Nguyen Tan Dung ke Jakarta, 14 September 2011

Pada pertemuan bilateral di saat kunjungan resmi PM Viet Nam ke Indonesia tanggal 14 September 2011, Pemimpin kedua negara telah sepakat untuk mendorong hubungan kedua negara ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Kedua Pemimpin juga telah menyaksikan penandatanganan Plan of Action dari Deklarasi Kemitraan Komprehensif dan *MoU on Joint Activities to Enhance Bilateral Communications and Consultations* antara Kemlu kedua negara.

Dalam perbatasan wilayah, Indonesia saat ini secara intensif tengah bersama Viet Nam membahas penetapan batas ZEE. Sebelumnya, Indonesia dan Viet Nam telah menetapkan batas landas kontinen (*continental shelf*) pada tahun 2003 dan Indonesia meratifikasinya pada tahun 2007.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Volume perdagangan bilateral di antara kedua negara mengalami tren pertumbuhan positif. Pada tahun 2009, volume perdagangan mencapai USD 2,84 milyar, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2010 menjadi USD 3,34 milyar. Sedangkan, total perdagangan RI – Viet Nam periode Januari – Agustus 2011 telah mencapai USD 2,8 milyar, meningkat 68,97% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Memperhatikan tren positif ini, Presiden RI dan PM Viet Nam sepakat untuk menetapkan target nilai perdagangan bilateral sebesar USD 5 milyar pada tahun 2015.

Investasi Indonesia di Viet Nam hingga saat ini diperkirakan mencapai USD 327,8 juta, sedangkan investasi Viet Nam ke Indonesia tercatat USD 21 juta.

Di bidang ketahanan pangan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang produksi beras melalui riset dan investasi. Selain itu kedua negara pada tanggal 16 November 2011 juga menandatangani perpanjangan *MoU on Rice*untuk meningkatkan pasokan beras Viet Nam ke Indonesia dari 1 juta ton menjadi 1,5 juta ton hingga 2012.

Di bidang energi, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor migas, termasuk kerja sama tiga negara antara Indonesia, Malaysia, dan Viet Nam dalam eksplorasi di wilayah Viet Nam untuk *offshore*. Kedua negara juga sepakat bekerja sama di bidang pertambangan.

Guna lebih mempromosikan komoditi perdagangan Indonesia, pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan promosi, utamanya partisipasi Indonesia pada *21st Viet Nam International Trade Fair 2011*, 6-

9 April 2011 di Hanoi. Peserta dari Indonesia berasal dari perusahaan daerah dan UKM dari Provinsi Jawa Timur, Kota Bandung, dan Kabupaten Bintan yang menampilkan aneka produk unggulan berorientasi ekspor dan investasi.

Di bidang sosial budaya telah diadakan *Media Informal Gathering* (MIG) di Ho Chi Minh City, *familiarization trip* bagi 4 wartawan Viet Nam ke Indonesia bulan Juni 2011, 2 kali promosi seni budaya Indonesia di *Fine Art Museum* dan Museum Etnologi, fasilitasi dan asistensi pada Festival Seni Suara bagi 9 kelompok seni suara Indonesia pada Festival Seni Suara di kota Nge An, dan promosi wisata Indonesia bekerja sama dengan Amway untuk kunjungan 600 distributor Amway ke Bali tahun 2012.

Sejak bulan September 2011, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Viet Nam terkena imbas bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, sosial serta lingkungan.

Sebagai bentuk simpati dan solidaritas kepada korban bencana banjir di Viet Nam, Indonesia juga telah memberikan bantuan dana sebesar USD 500.000 kepada Pemerintah Viet Nam pada tanggal 23 Oktober 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di Viet Nam tercatat sebanyak 617 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 5 kasus.

Foto 23. Menlu RI dan Menlu Viet Nam di KTT ke-19 ASEAN,Bali, 17 – 19 September 2011

Konflik Perbatasan Kamboja - Thailand

Pada tanggal 4 Februari 2011, terjadi konflik bersenjata di perbatasan Kamboja-Thailand di Candi Preah Vihear. Dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN, Pemerintah Indonesia telah mengambil prakarsa untuk meredakan ketegangan diantara kedua negara melalui *shuttle diplomacy* oleh Menlu RI ke Phnom Penh dan Bangkok pada tanggal 7-8 Februari 2011. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh komitmen dari kedua negara untuk menahan diri dari aksi militer dan menyelesaikan permasalahannya melalui cara-cara perundingan damai.

Atas permintaan Kamboja, isu konflik perbatasan tersebut telah dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 14 Februari 2011 telah diadakan sidang tertutup DK PBB untuk membahas insiden di perbatasan Kamboja-Thailand. Pertemuan tersebut telah dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Kamboja dan Thailand. Atas undangan Presiden DK PBB, Indonesia telah diminta secara khusus untuk memberikan penjelasan, selaku Ketua ASEAN, terkait upaya jasa baik yang telah dilakukan guna mengatasi sengketa Kamboja-Thailand. Dalam sidang tersebut, Menlu RI menyampaikan tiga kesimpulan pokok dari kunjungannya ke Kamboja dan Thailand, yaitu:

1. Adanya keinginan dan komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara damai sejalan dengan prinsip-prinsip TAC.
2. Kedua pihak menyetujui perlunya menstabilkan situasi di lapangan/wilayah perbatasan untuk menjamin kelanggengan gencatan senjata.
3. Kedua pihak sepakat perlunya menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses negosiasi damai.

Disamping itu, Indonesia juga mengumumkan akan diselenggarakannya *Special AMM* diJakarta, tanggal 22 Februari 2011.

Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Presiden DK telah menyampaikan sikap DK PBB antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan keprihatinan DK PBB terhadap konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand.
2. Menyampaikan himbauan DK PBB agar kedua pihak menahan diri, menegakan gencatan senjata, dan menyelesaikan permasalahan secara damai melalui dialog.
3. Menyampaikan dukungan DK PBB terhadap upaya-upaya ASEAN dan mendorong kedua pihak untuk terus bekerja sama dengan ASEAN. DK PBB juga menyambut baik akan diselenggarakannya Special AMM di Jakarta.

Indonesia telah menyelenggarkan *Special AMM* di Jakarta, tanggal 22 Februari 2011, untuk membahas konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Pada pertemuan *Special AMM* tersebut, telah disepakati hal-hal pokok antara lain sebagai berikut:

4. Menyambut baik dan mendukung penegasan Kamboja dan Thailand untuk menyesaikan permasalahannya secara damai sesuai prinsip-prinsip TAC dan Piagam PBB.
5. Menyambut baik undangan Kamboja dan Thailand untuk digelarnya peninjau dari Indonesia di wilayah perbatasan Kamboja-Thailand.
6. Menghimbau kedua negara untuk melanjutkan negosiasi bilateral, termasuk melalui mekanisme yang sudah ada, dengan appropriate engagement dari Indonesia.

Sebagai tindak lanjut pertemuan Special AMM tersebut, pada tanggal 7-8 April 2011 di Bogor telah diselenggarakan pertemuan *Joint Border Committee* antara Kamboja dan Thailand. Sementara itu, Indonesia juga telah mengajukan konsep *terms of reference* bagi tim peninjau Indonesia ke wilayah konflik di perbatasan Kamboja-Thailand.

Di sela-sela KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2011, telah diselenggarakan pertemuan informaldiantara kepala negara/pemerintahan Indonesia, Kamboja, dan Thailand atas prakarsa Presiden RI. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin Kamboja dan Thailand, menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan, menyelesaikan konflik melalui perundingan damai, dan menyambut baik peran Indonesia untuk meredakan ketegangan diantara kedua negara. Para pemimpin juga menugaskan ketiga Menteri Luar Negeri untuk melanjutkan pembahasan mengenai penggelaran tim peninjau Indonesia di wilayah konflik di perbatasan Kamboja-Thailand. Para Menteri Luar Negeri pada tanggal 10 Mei 2011, telah melakukan pertemuan di Jakarta untuk menindaklanjuti arahan para pemimpin tersebut.

Berbagai rangkaian perundingan yang diprakarsai Indonesia tersebut, telah berhasil menempatkan kembali proses negosiasi dan perundingan damai sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Dalam perkembangan selanjutnya, Kamboja telah meminta *International Court of Justice* (ICJ) untuk memberikan interpretasi terhadap keputusan ICJ sebelumnya pada tahun 1962 yang memutuskan bahwa Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja. Selain itu Kamboja juga meminta ICJ untuk mengambil *provisional measures* terkait Candi Preah Vihear.

Pada tanggal 18 Juli 2011, ICJ telah mengeluarkan putusan terhadap *provisionalmeasures* atas Kasus Candi Preah Vihear. Keputusan *provisional measures* ICJ terdiri dari elemen-elemen, antara lain sebagai berikut:

1. Kedua pihak harus menarik mundur personil militernya dari *provisionaldemilitarized zone* yang ditetapkan ICJ. Wilayah *demilitarized zone* tersebutmencakup wilayah konflik di perbatasan Kamboja-Thailand di sekitar Candi Preah Vihear.
2. Bahwa kedua pihak harus terus bekerja sama dalam ASEAN khususnya memberikan akses kepada peninjau yang ditunjuk oleh ASEAN ke wilayah *provisional demilitarized zone*
3. Kedua pihak harus menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperparah peselisihan.

Pada pertemuan KTT ke-19 ASEAN di Bali, bulan November 2011, kedua Perdana Menteri Kamboja dan Thailand, menegaskan kembali untuk mematuhi keputusan ICJ tersebut. Indonesia, Kamboja, dan Thailand terus melakukan pembahasan untuk menyesuaikan *draft terms of reference*penggelaran tim peninjau Indonesia dengan keputusan ICJ tersebut.

Upaya-upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk meredakan ketegangan diantara Kamboja dan Thailand mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Prakarsa Indonesia tersebut mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN termasuk kedua pihak yang bertikai. Dukungan juga diberikan oleh DK PBB dan oleh ICJ. Upaya damai Indonesia tersebut telah berhasil meredakan ketegangan diantara kedua negara, menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, dan memperkuat mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik di kawasan.

Foto 24. Pertemuan Trilateral Presiden RI – PM Kamboja – PM Thailand
Jakarta, 8 Mei 2011

Foto 25. Menlu Kamboja, Menlu RI, dan Menlu Thailand pada Pertemuan *Informal ASEAN Foreign Ministers' Meeting*, Jakarta, 22 Februari 2011

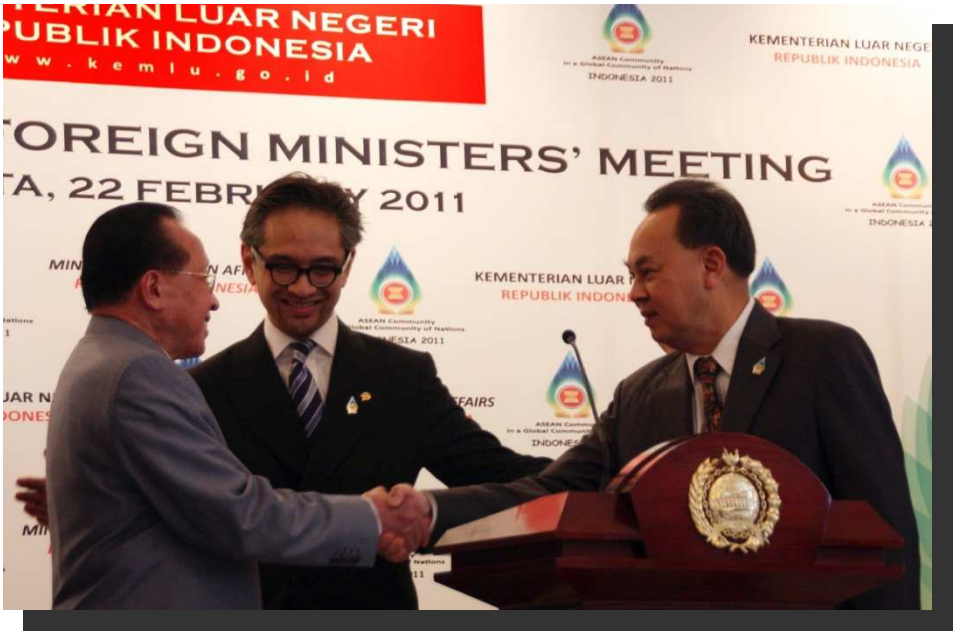

III.2 HUBUNGAN BILATERAL DENGAN MITRA-MITRA STRATEGIS

Di samping dengan negara-negara tetangga langsung, Indonesia juga memberikan prioritas dalam hubungan bilateralnya dengan sejumlah negara di mana Indonesia memiliki kepentingan strategis, baik dari kepentingan politik keamanan maupun ekonomi. Pada tahun 2011 ini, Indonesia telah meningkatkan hubungan bilateralnya ke tingkat kemitraan strategis dengan Perancis dan Turki. Dengan demikian, makaIndonesia memiliki kemitraan strategis/komprehensif dengan 12 negara dan 1 organisasi kawasan, yaitu RRT, Jepang, Korea Selatan, Viet Nam, India, Australia, Amerika Serikat,Perancis, Rusia, Brazil, Turki, Afrika Selatan, dan Uni Eropa.

Sasaran

Dalam mengembangkan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis tersebut,Indonesia senantiasa mengidentifikasi potensi yang dimiliki kedua belah pihak untuk selanjutnya dikembangkan berdasarkan azas saling menguntungkan dan kesetaraan.

Sehubungan dengan ini, negara–negara mitra strategis tersebut dipandang memiliki nilai penting tersendiri antara lain sebagai:

a. mitra dagang dan ekonomi utama Indonesia dan sumber modal asing;
b. sumber untuk peningkatan kapasitas Indonesia di berbagai bidang, termasuk bidang pertahanan, keamanan, *good governance*, institusi ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain;
c. mitra kerja sama dalam penanganan isu-isu global.

III.2.1 KAWASAN ASIA-PASIFIK DAN AFRIKA

Dalam kerja sama Indonesia di forum kawasan Asia-Pasifik, dan Afrika, beberapa capaian menonjol selama tahun 2011 antara lain ditandai dengan kunjungan/pertemuan pejabat tinggi RI maupun pejabat tinggi dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik, dan Afrika ke Indonesia, dan sebaliknya dari Indonesia ke wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, hal ini juga ditandai dengan penandatanganan beberapa dokumen kerja sama serta kegiatan promosi.

Di samping itu, dinamika hubungan RI dengan negara-negara di kawasan ini secara khusus juga diwarnai oleh pergolakan politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun demikian, perubahan yang terjadi sejauh ini tidak memberikan dampak secara fundamental terhadap hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Australia

Australia selain merupakan negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Indonesia, juga merupakan mitra strategis Indonesia. Kemitraan strategis Indonesia-Australia telah dirumuskan dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Partnership* yang disepakati tahun 2005.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan Australia difokuskan pada bidang-bidang kerja sama, yaitu pertahanan dan keamanan, pendidikan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, penanganan bencana alam, perdagangan, investasi, dan *people to people* contact.

Bidang Politik

Di bidang politik, hubungan kedua negara meningkat, ditandai dengan pertemuan dan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, diantaranya:

1. Kunjungan Resmi Wakil Presiden RI ke Australia, 9-13 Maret 2011
2. Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Jakarta, 16 Maret 2011
3. Kunjungan Menlu Australia dalam rangka menghadiri pertemuan ke-4 *Bali Regional Ministerial Conference,* 29 Maret 2011
4. Pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Australia di sela-sela 10th*Asia Europe Meeting Foreign Minister's Meeting*, Hongaria, 6-7 Juni 2011

5. Pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Australia di sela-sela KTM Organisasi Kerja Sama Islam ke-38, Astana, Kazakhstan, 28 Juni 2011
6. Kehadiran Menlu Australia pada rangkaian ASEAN *Post Ministerial Conference* (PMC) dan 19th *ASEAN Regional Forum* (ARF), 16-23 Juli di Bali
7. Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri Australia ke Indonesia, 24 Juni 2011
8. Pertemuan trilateral Australia-Indonesia-Timor-Leste di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, New York, September 2011
9. Kehadiran PM Australia pada *1st Annual Leaders' Meeting RI-Australia* 20 November 2011 di Bali.

Hubungan bilateral Indonesia-Australia didasarkan pada tiga mekanisme utama, yaitu: *Annual Leaders' Meeting, Foreign and Defence Ministerial Meeting* (Forum Menlu dan Menhan Kedua Negara/ Forum 2+2), dan *Indonesia-Australia Dialogue.*

Kunjungan Wakil Presiden RI ke Australia, Maret 2011, memastikan peningkatan hubungan kedua negara dalam berbagai bidang khususnya pendidikan, ekonomi dan masalah ketahanan pangan.

Annual Leaders' Meeting RI-Australia telah diselenggarakanpada kesempatan rangkaian pertemuan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 20 November 2011. Pada kesempatan tersebut telah dihasilkan *Joint Communiqué 1st Annual Leaders' Meeting RI-Australia* yang berisi capaian perkembangan kerja sama bilateral kedua negara dan pengembangan lebih lanjut kerja sama ke depan dalam bidang-bidang politik, hukum dan keamanan, kekonsuleran, ekonomi, penanganan bencana maupun hubungan antar masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga telah ditandatangani*Arrangement between the Indonesian National Police and the Australian Federal Police on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime* yang ditandantangi oleh Kapolri dan *Commissioner Australian Federal Police*.

Pertemuan tingkat menteri*Bali Process* (*Bali Regional Ministerial Conference*)ke-4diselenggarakan pada tanggal29-30 Maret 2011. Pertemuan *Bali Process* ini dihadiri oleh 32 negara anggota *Bali Process*, 6 negara peninjau, dan 6 organisasi internasional peninjau. Pertemuan diketuai bersama oleh Menlu RI dan Menlu Australia. Dalam pertemuan tingkat menteri ini telah dibahas secara komprehensif upaya kawasan untuk menangani masalah penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan lintas negara lainnya. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tingkat menteri tersebut, telah diselenggarakan pertemuan *Ad Hoc SOMBali Process*, pada tanggal 11-12 Oktober 2011, yang antara lain mencatat persetujuan prinsip atas konsep *Regional Cooperation Framework* dan perhatian lebih besar atas isu perdagangan orang dan peningkatan efektifitas penanganan *irregular migration*.

Di bidang penanganan terorisme, tahun 2011 ini Indonesia dan Australia lebih memperkuat kerja samanya melalui *Strengthening Legal Frameworks to Counter Terrorism Program* (SLF Program) yang merupakan hasil kesepakatan Pertemuan *Indonesia Australia Counter Terrorism Legal Dialogue (CT Dialogue)* yang diselenggarakan di Sydney, pada tanggal 24-25 Februari 2011. SLF Program tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan *Lombok Treaty* yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kedua

Foto 26. *Joint Press Conference* Menlu RI dan Menlu Australia
Jakarta, 8 Juli 2011

negara dalam membangun kerangka kerja samahukum yang lebih efektif dan komprehensif di bidang pemberantasan terorisme sesuai dengan aturan hukum dan kewajiban internasional. Dialog ini juga diharapkan menjadi forum yang efektif untuk melakukan tukar menukar pandangan dan informasi antara kedua negara.Adapun bidang kerja sama yang didanai oleh *Australia Indonesia Counter Terrorism Cooperation Fund* (CTCF) tersebut, mencakup penggunaan informasi intelejen dalam kasus-kasus terorisme, implementasi instrumen PBB mengenai pemberantasan terorisme dan perlindungan terhadap penuntut umum dan hakim pada persidangan kasus terorisme. Kemudian pada pertemuan Februari 2011, telah disepakati bahwa SLF Program 2011 mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan kerangka hukum untuk pencegahan terorisme (*preparatory acts of terrorism*);
- Pembahasan kerja sama*asset freezing* dan *asset* forfeiture.

Implementasi SLF Program Tahun 2011 yang telah dijalankan antara lain adalah program kunjungan kerja Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ke *Australian Attorney General's Department* (AGD).

Indonesia dan Australia juga telah melakukan pembicaraan untuk membentuk *Senior Legal Officers Consultative Group* (SLOCG), sebagai forum yang membahas semua aspek hukum dalam konteks kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Telah disepakati bahwa topik yang akan dibahas oleh SLOCG di masa mendatang adalah *transfer of sentenced persons, criminalization of people smuggling, parole of foreign prisoners, Perth Treaty, Indonesian submission to the continental shelves, the work of Legal Committee of IMO with related compensation, Western Pacific Commission, Rome Statute, cooperation in emergency situation* dan *implementation of Extradition Treaty and Treaty on Mutual Legal Assistance.*

Di samping itu, juga telah diselesaikan penyusunan *database* dan evaluasi semua perjanjian bilateral yang telah ada dan dalam proses antara Indonesia dan Australia sebagai bagian mekanisme *scorecard* dalam memantau perkembangan hubungan kedua negara.

Di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan September 2011, Menlu RI telah melakukan pertemuan trilateral dengan Menlu Australia dan Menlu Timor-Leste. Pertemuan dilaksanakan dan dipimpin oleh Menlu Australia dengan membahas beberapa isu penting, yakni (i) *Stock take of trilateral cooperation*, (ii) *Community Empowered Program*, (iii) *Maritime Cooperation,*dan (iv) Isu-isu kawasan, yakni EAS/ASEAN, EAS Disaster Relief dan Timor-Leste 2012 *elections*.

Di bidang pendidikan, telah dilakukan penandatanganan dua MoU antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM dengan *Division ofBusiness-University of South Australia* (UNISA) dalam bidang bisnis, *commerce and accounting* dan dengan *Institute of Certified of Management Accountants (ICMA*), pada tanggal 18-19 Juli 2011. *Joint Working Group (JWG) Meeting Indonesia-Australia* ke-9 di Canberra, 28-29 November 2011. Dalam JWG, Indonesia diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Australia diwakili oleh *The Department of Education, Employment and Work Place Relations* (DEEWR) dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pihak Australia mengundang CEO of *Australian University Union* dan *Indonesianist* dari ANU.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi RI-Australia terus meningkat sepanjang tahun 2011. Nilai perdagangan RI-Australia periode Januari-Agustus mencapai USD 6,7 milyar, naik 33,25% dari periode yang sama tahun 2010. Nilai perdagangan RI-Australia tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar USD 8,34 milyar dan USD 6,7 milyar.

Sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral, pada bulan April 2011 telah diselenggarakan putaran ke-2 konsultasi pra-negosiasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA).

Salah satu masalah yang dihadapi di bidang perdagangan kedua negara adalah isu impor sapi hidup dari Australia. Masalah ini telah berhasil

diselesaikan melalui proses konsultasi kedua negara. Pada tataran kerja sama kawasan, Indonesia telah meratifikasi perjanjian AAZFTA per tanggal 6 Mei 2011 melalui Perpres No. 26 Tahun 2011.

Pertemuan Trilateral Menlu Australia – Indonesia – Timor-Leste di sela-sela SMU PBB ke-66, 23 September 2011

Australia akan membantu Timor-Leste (RDTL) dalam kerja sama riset dan pengembangan produktifitas pertanian. Selain itu, Australia melalui AusAid akan memberikan bantuan teknis dalam proyek pengembangan prasarana fisik di RDTL dengan memanfaatkan *best practices* dari Indonesia.

Di bidang pengembangan kerja sama keamanan kelautan (*maritime security cooperation*), ketiga negara akan bekerja sama melalui *Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security* (CTI) yang diprakarsai oleh Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, akan dikembangkan program pertukaran pelajar dan mahasiswa dari ketiga negara (termasuk program beasiswa), salah satunya adalah peningkatan program beasiswa Australia bagi pelajar/mahasiswa Indonesia dan RDTL, serta pengaktifan kembali forum alumni Australia di Indonesia dan RDTL.

Kesepakatan kerja sama trilateral juga menyentuh program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang menekankan pada nilai strategis wanita.

Terkait isu kawasan, dibahas pula perkembangan EAS serta penanganan konflik Thailand-Kamboja, penghargaan Australia kepada Indonesia atas perkembangan penanganan isu *South China Sea* dan kerja sama dalam *disaster relief*.

***Indonesia-Australia Dialogue,* Jakarta, 5 – 6 Oktober 2011**

Dalam rangka kerja sama *people to people contact*, pada tanggal 5 – 6 Oktober 2011 di Jakarta telah diselenggarakan *Indonesia – Australia Dialogue* (IAD) bertempat di Jakarta. IAD terselenggara atas kerja sama*Center for Strategic and International Studies* (CSIS) dari pihak Indonesia dan *Australian Institute for International Affairs* (AIIA) yang didukung penuh oleh Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Dalam rangka mengisi *"Arrangement Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia on Consular Notification and Assistance*" yang telah disepakati pada Maret 2010, telah dilaksanakan pertemuan konsultasi kekonsuleran bilateral RI-Australia I pada tingkat SOM, 30 Juli 2011 di Perth. Pertemuan menyepakati beberapa komitmen, yaitu jaminan terhadap perlindungan kekonsuleran kepada WNI bermasalah di Australia; penanganan ABK di bawah umur; serta penyelenggaraan konsultasi kekonsuleran RI-Australia tingkat SOM secara reguler dan pertemuan *"Working Group"* tiga kali dalam setahun. Selanjutnya pemerintah Australia telah memutuskan untuk membebaskan sejumlah ABK yang terbukti di bawah umur.

Foto 27. Presiden RI dan PM Julia Gillard pada Pertemuan *Annual Leaders' Consultation* RI – Australia, Bali,21 November 2011

Kasus kekonsuleran utama di Australia adalah keberadaan hampir 500 ABK WNI tertuduh penyelundupan manusia yang ditahan di Australia, termasuk 44 diduga masih di bawah umur (data per November 2011).

Dalam rangka menjamin pemberian perlindungan optimal bagi WNI bermasalah di Australia, khususnya kasus ABK, Perwakilan RI telah

melakukan pendekatan dan koordinasi yang intensif dengan pengacara ABK untuk melakukan berbagai langkah upaya hukum yang inovatif bagi pembelaan ABK.

Dalam rangka menjamin adanya kesetaraan pemberian fasilitas diplomatik dari pemerintah Australia, telah dicapai kesepakatan untuk melakukan finalisasi pembahasan untuk disepakatinya peningkatan besaran "*privileges and immunities*" bagi Perwakilan RI di Australia melalui *upgrade* skema *Indirect Tax Concession Scheme (ITCS).*

Jepang

Indonesia dan Jepang adalah mitra strategis sebagai mana disepakati dalam *Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future*, 28 Desember 2006.

Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral RI-Jepang terus menguat dan meningkat di berbagai bidang.

Bidang Politik

Intensitas kerja sama politik RI – Jepang ditandai dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Kunjungan Presiden RI ke Jepang, 16-18 Juni 2011;
b. Pertemuan Presiden RI dengan *Special Envoy* Jepang, Mr. Katsuya Okada di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* di Bali, 8 Desember 2011;
c. Dialog Strategis Tingkat Menteri Luar Negeri yang Pertama di Tokyo, 17-18 Februari 2011;
d. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Jepang di Jakarta, 9 April 2011 (dalam kesempatan *Special ASEAN-Japan Ministrial Meeting*);

Foto 28. Presiden RI dan PM Jepang pada KTT ke-14 ASEAN-Jepang, Bali, 18 November 2011

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan Jepang difokuskan pada bidang-bidang kerja sama, perdagangan, investasi, infrastruktur, penanggulangan bencana alam, riset dan teknologi, dan *people-to-people*.

e. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Jepang di Tokyo, 17 Juni 2011;
f. Dialog Strategis Tingkat Menlu Ke-2 di Bali, 21 Juli 2011;
g. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Jepang di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, 21 September 2011;

h. Dialog Strategis Tingkat Menlu Ke-3 di Jakarta, 13-14 Oktober 2011; dan
i. Pertemuan informal Menlu RI dan Menlu Jepang di Tokyo, 10 November 2011.

Pemerintah dan rakyat Indonesia memberikan perhatian dan simpati yang besar terhadap bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang, 11 Maret 2011. Sebagai bentuk keprihatinan tersebut, Indonesia telah memprakarsai pertemuan *Special ASEAN-Japan Ministerial Meeting*, 9 April 2011 untuk menggalang solidaritas kawasan terhadap bencana yang melanda Jepang. Pada kesempatan kunjungan ke Jepang, 16-18 Juni 2011, Presiden RI melakukan peninjauan ke wilayah bencana di Kesennuma. Pada kesempatan tersebut secara simbolis juga diserahkan dana bantuan bagi pemulihan dan rekonstruksi Kota Kesennuma sebesar USD 2 juta kepada Walikota Kesennuma oleh Menlu RI, serta penandatanganan prasasti tanda persahabatan dan solidaritas rakyat Indonesia bagi masyarakat Jepang oleh Presiden RI.

Rincian Bantuan Indonesia untuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami Jepang

a. Bantuan Logistik berupa selimut, makanan kaleng, biskuit makanan bayi dan air bersih.
b. Uang sumbangan sebesar USD 2.000.000 dari Pemri kepada Pemerintah Kota Kesennuma yang telah ditransfer oleh BNPB pada tanggal 1 Juli 2011.
c. Pengiriman TSRC-PB (Tim Satuan Reaksi Cepat – Penanganan Bencana) sebanyak 15 orang yang dikirim ke Kesennuma dan Ishinomaki dari tanggal 18-27 Maret 2011.
d. Ungkapan Belasungkawa dari Presiden RI (surat ditujukan kepada PM Naoto Kan tertanggal 13 Maret), dan Menlu RI (pertemuan dengan Wakil Menlu Kikuta tanggal 16 Maret, pembicaraan telepon dengan Menlu Matsumoto, dan lain-lain).
e. Pengisian "*Condolence Book*" di perwakilan-perwakilan Jepang di Indonesia oleh 764 pejabat dan masyarakat Indonesia.
f. Penyelenggaraan pertemuan informal oleh Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto (Mantan Ketua BRR Aceh), Kemenlu, BNPB, UNOCHA, UNDP, UNHCR, ICRC, NGO (13 Maret 2011). Penyampaian usulan rehabilitasi strategis pada telekonferensi dengan kantor JICA di wilayah Tohoku (14 April 2011).
g. Bantuan masyarakat Indonesia, antara lain dari PMI, Komunitas Alumni Jepang Indonesia (KAJI), calon *nurse* dan *caregiver* yang berada di Jepang, dan berbagai pihak swasta Indonesia.
h. Indonesia sebagai Ketua ASEAN telah menyelenggarakan Pertemuan Khusus Menlu ASEAN-Jepang untuk menunjukkan rasa solidaritas ASEAN serta mengkoordinasikan penyaluran bantuan dari negara-negara ASEAN kepada Jepang (Jakarta, 9 April 2011).

Pada pertemuan Dialog Strategis Ke-3 tanggal 13-14 Oktober 2011 di Jakarta, Menlu RI dan Menlu Jepang membahas upaya-upaya untuk semakin memperkuat infrastruktur mekanisme kerja sama antara Indonesia dan Jepang, baik dalam konteks bilateral, regional, maupun global. Kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan intensitas dialog reguler antar Menlu, Menteri Perekonomian dan Menteri Pertahanan, memperdalam kerja sama ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur, energi, ketahanan pangan dan penanganan bencana.

Foto 29. Presiden RI bersama Ibu Ani Yudhoyono berdialog dengan Keluarga Korban Gempa dan Tsunami di Kesennuma Jepang, 16-18 Juni 2011

Sementara terkait isu-isu regional dan global, keduanya membahas peningkatan kerja sama dalam kerangka ASEAN-Jepang dan EAS, reformasi Dewan Keamanan PBB dan pemberian bantuan *capacity building* untuk Palestina.

Sebagai bentuk penghargaan Pemerintah RI kepada mantan PM Fukuda, yang saat ini mengetuai JAPINDA (*Japan Indonesia Association*), atas upaya-upayanya dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, maka Pemerintah RI menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Mahaputra Adipradana. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut dilakukan oleh Menlu RI, atas mandat Presiden RI, kepada mantan PM Jepang Yasuo Fukuda di Tokyo, 10 November 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi RI-Jepang semakin menguat yang ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan RI – Jepang selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 adalah sebesar USD 35,1 milyar, meningkat sebesar 29% dari periode yang sama tahun 2010. Total nilai perdagangan RI-Jepang tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar USD 42,7 milyar dan USD 28,4 milyar. Bagi Jepang, Indonesia masih merupakan sumber utama pasokan energi, yakni gas dan batu bara untuk industri serta sumber daya alam lainnya seperti timah dan nikel.

Investasi Jepang di Indonesia pada umumnya di sektor: (1) *transportation vehicle & other transportation industry*; (2) *metal, metal goods, machinery & electronic industry*, (3) *trading & repair industry, food industry* dan (5) *rubber & plastic goods industry*.

Foto 30. Menlu RI memberikan Cinderamata kepada Menlu Jepang, Jakarta, 13 Oktober 2011

Peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara tercermin pada beberapa kegiatan, antara lain:

a. Partisipasi pada *International Jewelry* di Tokyo, 26-29 Januari 2011, dan di Kobe, 11-13 Mei 2011.
b. Fasilitasi kunjungan Ketua Keidanren (Federasi Bisnis Seluruh Jepang) beserta rombongan ke Indonesia, 13-15 Februari 2011.
c. Fasilitasi kunjungan *Federation Exchange Council* ke Jakarta, 20-23 Februari 2011.
d. Partisipasi pada *Food Expo (Foodex)* 2011, 1 – 4 Maret 2011.
e. *Industrial Familiarization Mission* di Nagoya, 9-10 Maret 2011.
f. Seminar investasi "*Progressing Indonesian Economy and ASEAN*", 13-14 Mei 2011 di Osaka.
g. Penyelenggaraan *Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue* kedua di Bali, 31 Mei – 1 Juni 2011.
h. Penyelenggaraan *Indonesia-Japan Coal Policy Dialogue* ketiga di Bali, 30 Mei 2011.
i. Penyelenggaraan *The 12th Indonesia-Japan Energy Round Table (IJERT)* di Tokyo, 17 Oktober 2011.
j. Penyelenggaraan *Indonesia-Japan Joint Economic Forum* (*IJJEF*) Ke-3 di Bali, 18 November 2011.

Foto 31. Kunjungan Kerja Menlu RI ke Jepang, Tokyo, 18 Februari 2011

Terkait dengan kerja sama bantuan keuangan, Pemerintah RI dan Jepang pada tahun 2011 telah menandatangani 3 (tiga) kesepakatan antara lain:

1. *Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan for the Purpose of Contributing to the Implementation of the Project for Urgent Reconstruction of East Pump Station of Pluit in Jakarta* (Jakarta, 20 Januari 2011).
2. *Financial Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan regarding the Contribution of the Government of Japan as the Co-chair of the ARF Disaster Relief Exercise Year 2011 to be Held in Manado, Indonesia* (Manado, 13 Maret 2011).
3. *Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on the Loan of the Amount of 8,291,000,000 Yen* (Jakarta, 10 Maret 2011).

Pengiriman Tenaga Perawat dan Perawat Lansia dalam kerangka IJEPA

- Pada tanggal 19 Mei 2008, MoU implementasi pengiriman perawat dan perawat lanjut usia (lansia) telah ditandatangani oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan *Japan International Cooperation Welfare Society* (JICWELS).
- Dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), disepakati bahwa tenaga perawat dan perawat lansiaIndonesia sejumlah 1.000 orang, secara bertahap dalam 2 tahun akan diterima untuk bekerja di Jepang.
- Pada tanggal 5 Agustus 2008, telah dilakukan acara pelepasan para perawat (*nurse*) dan para perawat lansia (*caregivers*) yang berjumlah sebanyak 205 orang, yang terdiri dari 104 perawat dan 101 perawat lansia. Perawat Lansia dimaksud disebar ke 51 panti jompo di 24 perfektur Jepang. Mereka akan bekerja selama 3 tahun dan setelah itu akan mengikuti ujian kualifikasi perawat lansia pada tahun 2012.
- Pada tanggal 12 November 2009, sebanyak 361 orang yang terdiri dari 173 perawat dan 188 perawat lansia diberangkatkan ke Tokyo. Para perawat dan perawat lansia tersebut akan mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Jepang sebelum ditempatkan di berbagai rumah sakit dan rumah jompo di Jepang. Dari Agustus 2008 sampai dengan Juli 2011, sebanyak 791 perawat dan perawat lansia telah dikirim ke Jepang dalam kerangka IJEPA.
- Dalam rangka meningkatkan jumlah calon perawat Indonesia yang lulus tes sertifikasi, Jepang akan menambah pelatihan *pre-departure* di Indonesia pada tahun 2012 menjadi 6 bulan di Indonesia dan 6 bulan di Jepang dimana Jepang akan memberikan *allowance* dan bahan ajaran sementara Indonesia menyediakan tempat dan akomodasi. Selain itu, akan diberlakukan *matching system* untuk menentukan rumah sakit yang akan mempekerjakan perawat di Jepang.

Di bidang sosial budaya, peningkatan kerja sama kedua negara tercermin pada sejumlah kegiatan, antara lain:

a. Partisipasi pada Festival Internasional mengenai Promosi Budaya Kuliner, 22 Mei 2011 di Tomioka.
b. Kegiatan Promosi Indonesia pada *Kidzania Presidential Meeting*, 29 Mei 2011.
c. Program *Youth Ambassadors and Artists' Caravan* , 3-5 Juni 2011.
d. Penyelenggaraan Indonesia Festival di Tokyo, 9-10 Juli 2011.

Foto 32. Menlu RI dan Menlu Jepang Pada Pertemuan Khusus Menlu-Menlu ASEAN dan Jepang, Jakarta, 9 April 2011

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di Jepang tercatat sebanyak 26.703 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 271 kasus.

Peningkatan kerja sama di bidang kekonsuleran dan ketenagakerjaan kedua negara dapat dilihat pada beberapa kegiatan berikut, antara lain:

a. Penanganan WNI yang menjadi tersangka kasus Bank gelap, 15 Januari 2011.
b. Bantuan pengurusan pengiriman jenazah tenaga magang (*trainee)*, 21 Januari 2011.
c. Penyerahan bantuan kepada WNI korban gempa Tohoku, 11 Maret 2011.
d. Penyuluhan Hukum, 24 April 2011 di Ibaraki.

Bencana Gempa dan Tsunami Jepang, Maret 2011

Pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2011, pukul 14.46 waktu setempat, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter di Tokyo yang disusul dengan gelombang tsunami setinggi hingga 4 meter di wilayah utara Perfektur Miyagi. Arus tsunami bergerak dari arah utara ke selatan termasuk Bandara Sendai dan menyapu semua benda yang dilewatinya. Pusat gempa berada di dalam laut pada jarak 373 km dari Tokyo.

Terdapat 9 (sembilan) Perfektur yang terkena dampak bencana di Jepang. Jumlah WNI di ke-9 Perfektur tersebut sebanyak 1442 orang.

Upaya-upaya Pemberian Bantuan dan Evakuasi WNI

- KBRI Tokyo melakukan evakuasi dari wilayah bencana menuju ke posko pengungsian di Sekolah RI di Tokyo (SRIT).
- Evakuasi WNI gelombang pertama berhasil merelokasi sebanyak 112 WNI yang ditampung di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Evakuasi WNI gelombang kedua ke Tokyo telah merelokasi sebanyak 114 WNI.
- Selain itu juga diberikan pertolongan pertama dan bantuan logistik untuk WNI di wilayah bencana, antara lain berupa air minum botol, makanan instan, selimut dan obat-obatan.
- Kemlu RI mengirimkan *Relief Team* pada tanggal 12 Maret 2011 dan mendirikan posko di wilayah Sendai, yang menjadi posko ASEAN.
- Pemulangan WNI ke Indonesia dilakukan dalam 9 tahap yang dilakukan dari tanggal 15-26 Maret 2011 dengan total jumlah WNI sebanyak 263 orang. Pada tanggal 15 Maret 2011, 99 WNI yang dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Garuda GA 885 diterima oleh Menlu RI dan diserahterimakan kepada keluarga.
- Pada tanggal 17 Maret 2011, tim satuan reaksi cepat penanggulangan bencana yang berasal dari Kementerian Kesehatan, TNI, BNPB, dan Basarnas dilepas oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- Pada tanggal 18 Maret 2011 telah berhasil ditemukan 17 ABK asal Indonesia di kapal Yahata Maru 35.

Republik Korea

Perkembangan hubungan bilateral antara RI dan Republik Korea (ROK)memperoleh momentum dengan ditandatanganinya "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*"di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006. Deklarasi tersebut memuat 32 jenis kerja sama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi (perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, kelautan, kehutanan, pertanian dan lingkungan), ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya (pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, bencana alam, dan hukum).

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan ROK difokuskan pada bidang-bidang: perdagangan, investasi, infrastruktur, pertahanan keamanan, dan tenaga kerja.

Secara umum, selama tahun 2011, kerja sama bilateral kedua negara mengalami peningkatan di berbagai bidang baik Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan bilateral di bidang politik antar kedua negara tercermin dari intensitas pertemuan tingkat kepala negara maupun tingkat menteri, diantaranya disela-sela rangkaian pertemuan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17-18 November 2011, telah dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan Presiden ROK.

Di level Menteri, pada tahun 2011, pertemuan dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:

a. Pertemuan Menlu RI dan Menlu ROK di Budapest, 7 Juni 2011; dan
b. Kehadiran Menlu ROK pada pertemuan PMC dan ARF, 16-23 Juli 2011 di Bali dan Pertemuan Bilateral kedua Menlu pada 21 Juli 2011 di sela-sela konferensi tersebut.
c. Selain Menlu, Menhan kedua negara juga telah bertemu pada 9 September 2011 di Jakarta.

Foto 33. Menlu RI dan Menlu Republik Korea di sela-sela KTM ASEM, Hongaria, 7 Juni 2011

Industri Pertahanan

Pemerintah Republik Korea tengah giat melakukan kerja sama pertahanan dengan Indonesia, diantaranya melalui kesepakatan pengembangan bersama pesawat tempur generasi baru *Korean Future Fighter Xperiment (KF-X)*, yang ditandatangani pada 15 Juli 2010. Rencananya pada tahun 2020 akan terdapat 5 unit *prototype* pesawat yang memiliki kemampuan di atas pesawat jenis F-16. Kerja sama strategis industri pertahanan ini merupakan salah satu terobosan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian alutsista Tentara Nasional Indonesia.

Pada 2 Agustus 2011, telah dilaksanakan peresmian *Combine Research and Development Centre* (CRDC), di Daejon, ROK. Peresmian ini merupakan tanda dimulainya *Technical Development Phase (TD)* Program TD *phase* merupakan tahap pertama yang nantinya akan disusul dengan 2 tahap selanjutnya, yaitu *Engineering andManufacturing Development Phase* serta *Production and Deployment Phase*.

Selain itu, kedua negara telah menandatangani *MoU on the Establishment of Defense Industry Cooperation Committee (DICC)*ditandatangani dengan disaksikan oleh kedua Menhan. *Defense Industry Cooperation Committee* ini nantinya akan menjadi forum yang menaungi sejumlah perjanjian kerja sama di bidang industri pertahanan yang telah ada antara kedua Negara. MoU ini ditandatangani dengan disaksikan oleh Menhan kedua Negara seusai pertemuan bilateral kedua Menhan pada 9 September 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Sepanjang tahun 2011 terjadi peningkatan pesat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara Indonesia dan ROK. ROK juga berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan infrastruktur Indonesia di berbagai daerah.

Foto 34: Presiden RI dan Presiden Republik Korea di KTT ke-19 ASEAN, Bali, 17 November, 2011

Secara khusus Pemerintah Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah ROK dalam rangka merealisasikan *Master Plan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemerintah ROK telah menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung realiasasi MP3EI. Dalam kaitan ini kedua Negara telah membentuk *Joint Task Force* yang bertujuan untuk meningkatkan investasi ROK pada MP3EI.

Perdagangan dan Investasi

Hubungan perdagangan Indonesia-ROK menunjukkan peningkatan setidaknya 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2010 total perdagangan Indonesia-ROK tercatat senilai USD 20,27 miliar, meningkat sebesar 15,97% dibandingkan dengan total perdagangan tahun 2009 senilai USD 12,88 miliar. Nilai perdagangan RI – ROK selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 adalah sebesar USD 18,5 miliar, naik 44,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2010.

Meskipun demikian, kedua negara tetap bertekad untuk mencapai target volume perdagangan hingga USD 40 milyar pada tahun 2014 dan diharapkan dapat menjadi USD 100 milyar pada tahun 2020.

Di bidang investasi, total investasi Korea Selatan (Korsel) di Indonesia sejak UU PMA I/1968 bernilai lebih dari USD 20 milyar yang menempatkan Korsel pada peringkat pertama sebagai negara investor asing di Indonesia dari sisi jumlah perusahaan, dan peringkat ke-6 dari sisi jumlah nilai investasi.

Infrastruktur

ROK telah banyak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur diantaranya dalam proyek*Padang bypass*, *Manado bypass*, dan Gorontalo Djalaludin. Di samping itu, pihak Korea Selatan juga tertarik untuk membangun proyek infrastruktur lain di Indonesia termasuk Jembatan Selat Sunda dan mendukung implementasi Program Rencana Induk: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Adapun kerja sama proyek pembangunan infrastruktur yang tengah dan akan berjalan saat ini, sebagian besar didanai oleh pinjaman lunak dari kerja sama keuangan dalam *Framework Agreement-Economic Development*

*Cooperation Fund (EDCF)*yang telah berlangsung sejak tahun 2007.

Tenaga Kerja

Sejak tahun 2004, Indonesia telah menyepakati pengiriman tenaga kerja ke Korsel dengan mekanisme *Employment Permit System* (EPS) yakni sistem pengiriman tenaga kerja yang langsung ditangani oleh Pemerintah kedua negara (G to G). MoU tentang Penempatan TKI ke Republik Korea (*MoU on the Sending of Indonesian Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit System*) pertama kali ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2004, dan telah diperpanjang sebanyak 2 kali yakni pada September 2008 dan Oktober 2010. Kerja sama tenaga kerja RI-RepublikKorea melalui mekanime EPS terbukti lebih memberikan perlindungan bagi TKI sehingga dapat dijadikan contoh bagi kerja sama pengiriman TKI ke negara lain.

Pasar tenaga kerja asing di Korsel cukup menjanjikan, mengingat adanya kebutuhan negara tersebut akan tenaga kerja asing untuk mengisi lapangan kerja yang relatif tidak dapat dipenuhi dari angkatan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus-menerus secara intensif mendorong pengiriman TKI ke Korea Selatan.

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di ROK tercatat sebanyak 32.709 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 22 kasus.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Indonesia dan RRT adalah mitra strategis sebagai mana disepakati dalam Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI – RRT yang ditandatangani kedua Kepala Negara pada tanggal 25 April 2005.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan RRT difokuskan pada bidang-bidang kerja sama, yaitu ekonomi dan pembangunan, pertahanan, sosial budaya dan kerja sama regional dan internasional.

Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral RI-RRT terus menguat dan meningkat di berbagai bidang.

Bidang Politik

Intensitas hubungan bilateral kedua negara ditandai dengan berbagai kegiatan, diantaranya:

a. Kunjungan resmi PM Wen Jiabao ke Jakarta, 29-30 April 2011;
b. Kunjungan PM Wen Jiabao dalam rangka KTT ASEAN ke-19/EAS di Bali, 17-19 November 2011
c. Kunjungan Ketua DPR RI ke Beijing, 17-22 April 2011;
d. Kunjungan Utusan Khusus Presiden RI/ Menko Perekonomian RI dalam rangka memperkenalkan MP3EI kepada Pemerintah dan kalangan bisnis RRT, 22-23 Juni 2011;
e. Kunjungan Menlu RI ke Beijing, 19 April 2011;
f. Kunjungan Menlu RRT ke Jakarta, 28-30 April 2011;
g. Kunjungan Menlu RRT ke Bali dalam rangka KTT ASEAN ke-19/EAS, 17-19 November 2011;
h. Kunjungan Menhan RRT ke Jakarta, 19 Mei 2011

Disela-sela rangkaian pertemuan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17-18 November 2011, telah dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan PM RRT. Pada pertemuan tersebut, Presiden RI telah menyampaikan rencananya melakukan kunjungan ke RRT pada paruh pertama tahun 2012.

Foto 35. Kunjungan PM RRT ke Indonesia
28 – 30 April 2011

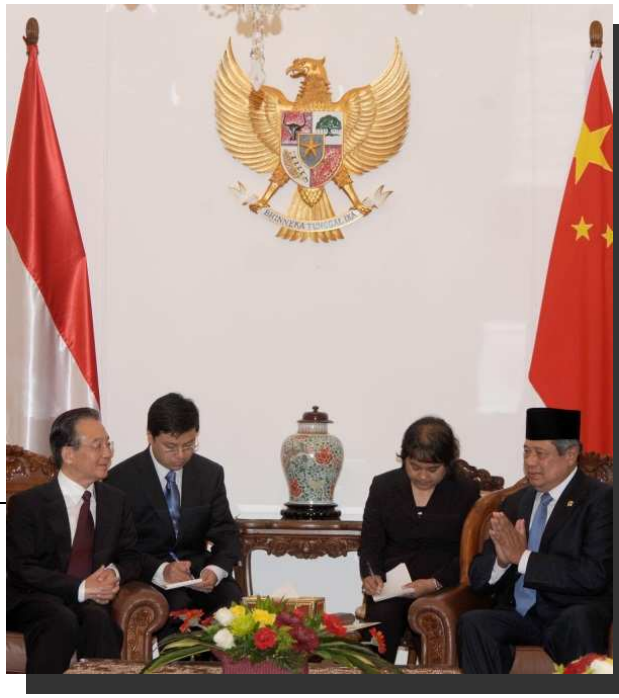

Di bidang politik dan keamanan, dialog dan konsultasi bilateral di antara kedua negara telah terjalin di tingkat Menko Polhukam/*State Councillor* yang diselenggarakan 2 tahun sekali, forum Joint *Commission for Bilateral Consultation* (JCBC) tingkat Menlu dan forum konsultasi bilateral bidang pertahanan tingkat Menhan.

Khusus tentang kerja sama antar Kemlu kedua negara, ditunjukan untuk lebih mengintensifkan kerja sama dan koordinasi antar Kemlu kedua Negara. Menlu kedua negara pada tanggal 29 April 2011 telah menandatangani MoU *on Joint Activities*yang mencakup pembentukan *hotline*, kerja sama antar unit *think tank* dan lembaga pelatihan diplomatik.

Sementara, dalam rangka memfasilitasi intensifikasi hubungan dan kerja sama bilateral di antara kedua negara, RRT telah membuka Konsulat Jenderal di Medan pada 8 September 2011. Sementara, Indonesia akan membuka KJRI di Shanghai pada paruh pertama 2012.

Di bidang kerja sama pertahanan, dengan payung *Defense Cooperation Agreement* (DCA) yang ditandatangani tahun 2007, Menhan kedua negara pada tanggal 22 Maret 2011telah menandatangani MoU kerja sama industri pertahanan dan LoI kerja sama pengembangan rudal C-802. Kerja sama tersebut utamanya mencakup transfer teknologi, produksi, pengembangan dan pemasaran bersama.

Di bidang kerja sama maritim, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan dan memperluas kerja sama maritim dengan mengoptimalkan forum *Technical Committee Meeting (TCM) on Maritime Cooperation* dan menjajaki pembentukan *Maritime Cooperation Committee* (MCC).

Dalam kerangka kerja sama regional, Indonesia dan RRT sepanjang tahun 2011 telah melakukan konsultasi intensif dalam rangka pembahasan isu-isu kawasan seperti masalah Laut China Selatan dan *East Asia Summit* serta hal-hal lainnya yang terkait dengan kerja sama ASEAN-China dan *ASEAN Plus Three*.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi RI-RRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2011, hubungan ekonomi RI – RRT diwarnai utamanya dengan upaya Pemri mendorong investasi RRT pada proyek MP3EI di Indonesia dan upaya kedua negara mengelola isu ketidakseimbangan neraca perdagangan.

Di bidang perdagangan, nilai perdagangan RI – RRT periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD 30,6 milyar, meningkat 36% dibanding periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 22 milyar.

Pada kunjungan resmi PM RRT ke Indonesia tanggal 29 April 2011, Pemimpin kedua negara telah menetapkan target perdagangan bilateral sebesar USD 80 milyar pada tahun 2015. Kedua Pemimpin juga telah menyaksikan penandatanganan kerja sama di bidang ekonomi antar pemerintah sebagai berikut:

a. *Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Indonesia on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation;*
b. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Industry and Information Technology of People's Republic of China and the Ministry of Industry of The Republic of Indonesia on Industry and Technology Cooperation;*
c. *Protocol Amending The Memorandum of Understanding on Marine Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the State Oceanic Administration of People's Republic of China.*

Selain perjanjian kerja sama antara pemerintah, telah ditandatangani juga sejumlah perjanjian kerja sama bidang ekonomi antara Pemerintah dengan dunia usaha (G-to-B) dan antar dunia usaha (B-to-B) yang mencakup antara lain bidang kerja sama

industri, proyek infrastruktur dan kelapa sawit dengan nilai mencapai sekitar USD 10,6 milyar.

Foto 36.Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menlu RRT di sela-sela Pertemuan ARF, Bali, 23 Juli 2011

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan bilateral Presiden RI – PM RRT tanggal 29 Apri 2011, Menko Perekonomian pada tanggal 22 – 23 Juni 2011 telah berkunjung ke RRT sebagai utusan khusus Presiden RI untuk mendorong investasi RRT pada proyek MP3EI melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) dan membahas isuketidakseimbangan neraca perdagangan bilateral.

Di bidang perbankan, kerja sama RI – RRT pada tahun 2011 memasuki babak baru dengan telah disetujuinya oleh Pemerintah RRT pembukaan Bank Mandiri di Shanghai.

Di bidang ketahanan pangan dan energi, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ini melalui riset dan investasi. Kerja sama ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produksi beras (padi hibrida), sedangkan energi akan diutamakan pada bidang industri pertambangan, pembangkit listrik dan energi ramah lingkungan.

Dalam rangka terus mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan RI – RRT, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Perwakilan RI di RRT (KBRI Beijing, KJRI Guangzhou dan KJRI Hong Kong) secara terintegrasi telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan promosi *Trade, Tourism, and Investment* (TTI) dan klinik investasi di RRT di Beijing, Xiamen, Hong Kong, Shanghai dan Qingdao yang melibatkan instansi pemerintah dan kalangan usaha kedua negara.

Sementara itu, kerja sama sosial dan budaya RI – RRT pada tahun 2011 juga mengalami intensifikasi yang signifikan.

Di bidang pendidikan, Pemerintah RRT berkomitmen untuk memberikan beasiswa kepada 1.000 siswa Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Indonesia juga akan terus memberikan program beasiswa di bidang bahasa dan budaya kepada pelajar RRT. Berkenaan dengan ini, Mendiknas RI dan Kepala Lembaga Bahasa Mandarin RRT (Hanban) telah menandatangani*"Agreement between Hanban and the Ministry of Education of the Republic of Indonesia on Cooperation of Chinese Teaching"* pada tanggal 29 April 2011.

Di bidang kebudayaan, kerja sama RI – RRT pada tahun 2011 diramaikan dengan sejumlah pameran dan pertunjukan seni dan budaya kedua negara di sejumlah kota di Indonesia dan Tiongkok.

Di bidang pariwisata, jumlah wisatawan RRT ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni tahun 2009 sekitar 350 ribu, 2010 sekitar 421 ribu dan 2011 yang diprediksi mencapai lebih dari 500 ribu. Sementara, jumlah wisatawan Indonesia ke RRT setiap tahunnya rata-rata mencapai 900 ribu.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di RRT tercatat sebanyak173.762 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 552 kasus.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan bantuan perlindungan bagi WNI yang terancam hukuman mati di RRT. Hingga saat ini KBRI Beijing dan KJRI Guangzhou telah berhasil mengupayakan perubahan/pengurangan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 15 – 20 tahun penjara bagi 12 WNI di RRT.

Hong Kong SAR, RRT

Hubungan dan kerja sama Indonesia – Hong Kong SAR, RRT mengalami intensifikasi dari tahun ke

tahun. Hubungan dan kerja sama RI – Hong Kong terfokus pada kerja sama ekonomi, sosial budaya, kekonsuleran dan ketenagakerjaan.

Di bidang perdagangan, nilai perdagangan RI – Hong Kong mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011. Nilai perdagangan RI – Hong Kong periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD 3,73 milyar, naik 31,99% dari periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 2,83 milyar. Sementara, total nilai perdagangan dua arah RI – Hong Kong RRT pada tahun 2010 sebesar USD 4,36 milyar, dan tahun 2009 sebesar USD 3,8 milyar.

Di bidang investasi, nilai aktualisasi FDI Hong Kong di Indonesia pada kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 tahun 2011 masing-masing sebesar USD 6,1 juta, USD 8,7 juta dan USD 69,9 juta. Sedangkan total aktualisasi investasi Hong Kong di Indonesia tahun 2010 mencapai USD 566,1 juta.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di Hong Kong dan lebih mendorong investasi Hong Kong di Indonesia, Pemerintah Hong Kong pada tahun 2011 telah menyetujui untuk menghapuskan keharusan bagi perbankan Indonesia di Hong Kong untuk mengenakan biaya provisi 5% terhadap setiap *project financing proposal* di Indonesia oleh perusahaan Hong Kong. Pengenaan biaya provisi 5% dengan pertimbangan *country risk* menurunkan daya saing perbankan Indonesia di Hong Kong. Adanya pencabutan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di Hong Kong dalam mendukung masuknya investasi ke Indonesia.

Foto 37.Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menlu RRT di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 23 September 2011

Di bidang sosial budaya, fokus kerja sama Indonesia dengan Hong Kong adalah pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.

Di bidang pariwisata, jumlah wisatawan Hong Kong periode Januari – Septemer 2011 mencapai 52.147 orang, naik 14,7% dibanding periode sama tahun 2010 sebesar 44.463 orang.

Macau SAR, RRT

Tidak berbeda dengan Hong Kong SAR, RRT hubungan Indonesia dengan Macau SAR, RRT terfokus pada kerja sama ekonomi sosial budaya, konsuler dan ketenagakerjaan, namun dengan skala yang jauh lebih kecil.

Di bidang perdagangan, nilai perdagangan Indonesia – Macau hingga kuartal ketiga tahun 2011 mengalami penurunan. Nilai perdagangan RI-Macau periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD 5,633 juta, turun 28,65% dari periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 7,895 juta. Total nilai perdagangan 2010 USD 12,824 juta, 2009 USD 9,78 juta.

Di bidang sosial budaya, kerja sama kedua pihak lebih ditekankan pada sektor pariwisata, termasuk untuk menarik wisatawan negara ketiga dari Macau ke Indonesia, khususnya Bali, dan sebaliknya dari Indonesia ke Macau.

India

Hubungan bilateral antara RI dan India selama tahun 2011 telah mengalami peningkatan.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan bilateral kedua negara ditandai dengan kegiatan saling kunjung, diantaranya adalah kunjungan kenegaraan Presiden RI ke India tanggal 24-26 Januari 2011 atas undangan Presiden India. Pada kesempatan tersebut, Presiden RI menjadi tamu utama (*Chief Guest*) Hari Republik India 2011. Kunjungan Presiden RI ke India ini semakin memperkuat *New Strategic Partnership* yang dicanangkan oleh

Foto 38.Presiden RI sebagai *Chief Guest* pada Upacara Hari Republik India, New Delhi, 26 Januari 2011

Presiden RI dan Perdana Menteri India, Manmohan Singh, pada bulan November 2005.

Hasil kunjungan Presiden RI ke India tersebut dituangkan dalam *Joint Statement: Vision For The India-Indonesia New Strategic Partnership Over The Coming Decade*, antara lain:

a. Indonesia-India sepakat menargetkan total nilai perdagangan pada tahun 2015 sebesar USD 25 miliar.
b. Indonesia dan India sepakat memulai perundingan *Indonesia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (II-CECA).
c. Pembentukan Forum Dua Tahunan Menteri Perdagangan (*Biennial Trade Ministers' Forum*) dan Forum Perdagangan dan Investasi (*Trade and Investment Forum*) yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.
d. Pembentukan Energi Forum, diketuai oleh Menteri ESDM RI dan Menteri Batubara India, untuk meningkatkan kerja sama pengembangan dan investasi energi RI-India.
e. Sepakat membentuk *Indonesia-India Eminent Persons Group* (IIEPG) untuk memberikan arahan dan rekomendasi hubungan bilateral RI-India selama 15 tahun ke depan.
f. Pemberlakuan Kebijakan *Visa on Arrival* bagi WNI (pemegang paspor biasa) yang berkunjung ke India sejak tanggal 25 Januari 2011.
g. Persetujuan pendirian Konsulat Jenderal India di Bali.Pada saat kunjungan ini, kedua negara menandatangani 32 perjanjian/MoU yang terdiri dari 14 perjanjian/MoU *G-to-G*, dan 18 Perjanjian/MoU *G-to-B* dan *B-to-B* umumnya terkait komitmen investasi India di bidang infrastruktur dengan total nilai USD 15 miliar.

Disela-sela rangkaian pertemuan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17-18 November 2011, telah dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan PM India.

Bidang Ekonomi

Berdasarkan data statistik, nilai perdagangan bilateral tahun 2010 mencapai USD 13,2 miliar. Ekspor Indonesia ke India pada periode Januari-Agustus 2011 tercatat USD 9,07 miliar, atau naik 48,4% dari periode yang sama tahun 2010. Sedangkan impor Indonesia pada periode Januari-Agustus 2011 tercatat USD 3 miliar atau meningkat 42.62% dari USD 2,1 miliar pada tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Indonesia terhadap India selalu surplus selama periode 2006-2010, dengan trend sebesar 33,10%.

Foto 39. Menlu RI dan Menlu India Seusai Penandatanganan MoU, New Delhi, 26 Januari 2011

Kesepakatan Bilateral RI – India Tahun 2011:

1. MoU antara Kementerian Perdagangan RI dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik India tentang Pembentukan Forum Pertemuan 2 (dua) Tahunan Menteri Perdagangan
2. Perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik India mengenai Perhubungan Udara
3. MoU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Minyak dan Gas Alam India tentang Kerjasama dalam Bidang Minyak dan Gas
4. MoU antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik India tentang Kerjasama dalam bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Perpanjangan protokol MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik India mengenai Kerja Sama Kelautan dan Perikanan (diperpanjang hingga 2015)
6. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk Republik India tentang Kerja Sama dalam Bidang Pembuatan Pupuk Urea
7. MoU antara Batam *Indonesia Free Zone Authority of the Republic of Indonesia* dan *Santacruz Electronics Export Processing Zone Special Economic Zone of Republic of India*
8. MoU antara Pemerintah RI dan Pemerintah India tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan.
9. Pengaturan antara Kementerian Kebudayaan & Pariwisata RI dan Kementerian Kebudayaan Republik India tentang Program Pertukaran Kebudayaan Tahun 2011-2014.
10. MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India mengenai Kerjasama Ilmiah & Teknologi.
11. MoU Kerja Sama antara Dewan Pers Indonesia dan Dewan Pers India.
12. MoU antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika RI, & Kementerian Ilmu Bumi Republik India tentang Kerjasama dalam Bidang Layanan Cuaca, Iklim dan Geofisika, dan Peringatan Dini Bahaya Pesisir.
13. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India
14. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLAT) RI-India
15. MoU antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Unit Intelijen Keuangan India tentang Kerjasama Pertukaran Intelijen Keuangan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
16. MoU antara KPU RI dengan *The Election Commission of India* tentang Kerja Sama di bidang Pengelolaan dan Administrasi Pemilihan Umum
17. *MoU between Ministry of Industry of Indonesia and TRIMEX Sansd Pvt. Ltd. On Cooperation for Development of Industrial Complex based on Heavy Minerals Resources Utilisation in the Republic of Indonesia;*
18. *Head of Agreement (HoA) between PT. Adani Global and Adani Group; PT. Bukit Asam and the Regional Government of South Sumatera for construction of transportation facility for coal and coal assets;*
19. *MoU between Government of South Sumatra Province of Indonesia and Reliance Coal Resources Private Limited for coal assets/rail line and port project;*
20. *MoU between Government of Jambi Province of Indonesia and Reliance Coal Resources Private Limited for coal assets/rail line and port project;*
21. *MoU between Government of Jambi Province-Indonesia and Archean Energy and Infrastructure Private Limited-India;*
22. *MoU between PT Adani Global; Government of Kendal Regency, Central Jawa; and PT Mega Urip Pesona on Cooperation Coal Fired Power Plant of 2x1100 MW or 3x660 MW in the Regency of Kendal;*
23. *MoU between the Regional Government of Central Kalimantan and International Coal Ventures Ltd. For Cooperation on Coal Assets/Steel Plant;*
24. MoU *between the Government of East Kalimantan and National Alumunium Company Limited* mengenai *Technical Cooperation on Alumunium Smelter Industry*
25. *MoU between PT Angkasa Pura I and GVK for Construction of Airport at Yogyakarta;*
26. *Terms of Agreement between National Fertilisers Limited and PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) for Offtake of Fertilizers from Indonesia;*
27. *MoU between the Bharat Heavy Electricals Limited and PT Eastern Infrastructure International for Development of 2x200/2x250 MW Coal Fired Power Plant in Indonesia;*
28. *MoU between PT. Multi Polar Technology (Lippo Group) and HCL Technologies on Cooperation to work together in partnership in pursuing any business opportunities for IT Services;*
29. *MoU between PT Pembangunan Bali Mandiri and GVK for Construction of Airport, in Buleleng, Bali;*
30. *Framework Agreement between Pipavav Shipyard Limited, PT. Pal Indonesia and SKIL Infrastructure Limited for Fast Patrol Boats, Corvettes, LSTs and or LPDs, Light Frigates, Vessels Operating on Underwater Technology, Product Tankers and Gas Tankers, Offshore platforms and rigs, Ship Repairs and mid life updates of ships;*
31. *MoU between PT. Surya Kepanjen and SEW Trident Global Pte Ltd. For development of Toll Road on the Build Transfer and Operate Basis;*
32. *MoU between PT Walden Global Services and Secure Matrix India Pvt Limited for Information Technology-Security Transfer of Technology;*
33. *MoU between Batam Indonesia Free Zone Authority of the Republic of Indonesia and Santacruz Electronics Export Processing Zone Special Economic Zone of the Republic of India;*
34. *MoU between Indorama Group and DAV College Trust & Management Society;*

Menindaklanjuti persetujuan yang disepakati di New Delhi pada tanggal 25 Januari 2011, Indonesia dan India telah melaksanakan Pertemuan Pertama *Biennial Trade Ministers' Forum* di Jakarta pada tanggal 3-4 Oktober 2011. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Tekstil India Shri Anand Sharma. Dalam pertemuan ini dibicarakan juga mengenai pembentukan dua *working group*, yaitu *Working Group on Trade and Investment* yang melibatkan pemerintah serta pengusaha dan *Working Group on Trade Facilitation and Resolution* yang melibatkan unsur pemerintah. Kedua *Working Group* ini bertujuan untuk lebih mempererat hubungan perdagangan yang membahas secara konkrit isu-isu terkait perdagangan antara kedua negara. Kunjungan kerja Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Tekstil India ke Indonesia kali ini diharapkan dapat menjadi *stepping stone* atas hubungan kedua negara untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.

Di bidang kebudayaan, Indonesia dan India telah menggelar Pertunjukan Kolaborasi Tari Ramayana Indonesia-India pada tanggal 9-10 November 2011 di Candi Prambanan, Yogyakarta. Pertunjukan kolaborasi ini juga dalam rangka merayakan enam dasawarsa hubungan diplomatik Indonesia-India. Pertunjukan yang sama direncanakan akan dilaksanakan juga di India pada tahun 2012.

Afrika Selatan

Indonesia dan Afrika Selatan merupakan mitra strategis sebagaimana telah disepakati dalam *Joint Declaration on a Strategic Partnership for a peaceful and Prosperous Future Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa,* 17 Maret 2008.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan Afrika Selatan adalah di bidang perdagangan, energi dan mineral, dan politik khususnya dalam konteks kemitraan Asia Afrika (NAASP/*New Asia-Africa Strategic Partnership).*

Hubungan bilateral RI-Afrika Selatan pada 2011 mengalami perkembangan yang positif terutama kerja sama dalam bidang ekonomi.

Bidang Politik

Hubungan politik antara kedua negara semakin kokoh.

Berbagai kegiatan dalam meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara, antara lain :

a. Kunjungan delegasi Pansus DPD RI ke Parlemen Afrika Selatan, 3-8 Februari 2011.
b. Kunjungan pejabat tinggi *Department of Performance, Monitoring and Evaluation of the Presidency Afrika Selatan* ke Jakarta, 5-8 Oktober 2011, guna mempelajari lebih dalam mekanisme dan tata kerja unit UKP4, serta menjajaki kerja sama kedua negara di bidang pertukaran informasi dan pengalaman bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.

Foto 40. Pertemuan Bilateral RI – Afrika Selatan di sela-sela KTM GNB, Bali 26 Mei 2011

Pada kesempatan Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non Blok ke-16 di Bali, 23-27 Mei 2011, telah dilakukan pertemuan bilateral antara Menlu RI dengan Menlu Afrika Selatan membahas upaya peningkatan hubungan bilateral dan rencana penyelenggaraan KTT NAASP di Afrika Selatan tahun 2012 mendatang. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang pentingnya meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Afrika Selatan, terutama di bidang investasi dan perdagangan, dan peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional.

Dalam kerangka kerja sama NAASP, kedua negara saat ini merupakan *Co-Chairs* NAASP sehingga kedua negara memiliki tugas dan tanggung jawab bersama untuk lebih mendorong implementasi kerja sama dalam kerangka NAASP. Kedua negara merupakan sesama negara berkembang yang dalam forum multilateral sama-sama konsisten dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Berdasarkan data statistik, nilai total perdagangan RI-Afsel telah mengalami kenaikan dari USD 884,6 juta pada September 2010 menjadi USD 1,5 miliar pada periode yang sama tahun 2011.

Hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Afrika Selatan selama periode Januari-Oktober 2011 mengalami kemajuan yang ditandai antara lain dengan pengiriman misi ekonomi dari sejumlah provinsi di Afrika Selatan ke Indonesia, yaitu :

a. Pengiriman misi ekonomi Provinsi Limpopo ke Indonesia, tanggal 5-11 Maret 2011
b. Pengiriman tim pendahulu misi ekonomi Provinsi Free State ke Indonesia, 26 Februari 2011
c. Pengiriman misi ekonomi Provinsi Free State ke Indonesia, 5-20 April 2011
d. Pengiriman misi ekonomi Provinsi Mpumalanga ke Indonesia, 13 Juni dan 9 – 15 Juli 2011.
e. Pengiriman misi ekonomi dan bisnis Provinsi Free State ke Indonesia, 15-17 Oktober 2011.

Kemajuan hubungan dan kerja sama di bidang sosial budaya antara Indonesia dan Afrika Selatan ditandai dengan penandatanganan *arrangement* kerja sama penerbitan perangko bersama untuk menandai 300 tahun hubungan masyarakat Indonesia-Afrika Selatan pada 12 September 2011 di Jakarta. Dalam kaitan ini, peluncuran perangko bersama RI-Afrika Selatan telah dilakukan di Cape Town, 15 Oktober 2011.

Kegiatan-kegiatan promosi budaya Indonesia di Afrika Selatan yang telah diselenggarakan selama periode Januari-Oktober 2011, antara lain sebagai berikut :

a. Pameran Indonesia di Perpustakaan Umum Mbombela, akhir November 2011 – awal Januari 2011.
b. Pemutaran film-film Indonesia di Pierneff Theatre, Pretoria, 11-12 Februari 2011
c. Kegiatan promosi terpadu bidang perdagangan dan budaya "*In Store Promotion*" berupa pameran kerajinan, batik dan furniture serta promosi budaya Indonesia di Water Front Mall, Bloemfoentein, 18-20 Februari 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI yang sampai bulan Oktober 2011 menetap di wilayah akreditasi Pretoria, yaitu di lima Provinsi Afrika Selatan, Swaziland, Lesotho, serta Bostwana tercatat mencapai 220 orang.

Foto 41. Promosi Terpadu KBRI Pretoria, 18-20 Februari 2011

III.2.2 KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

Dalam kerja samadengan mitra strategis di kawasan Amerika dan Eropa selama tahun 2011, Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting, yang antara lain ditandai dengan kunjungan/pertemuan pejabat tinggi RI maupun Amerika dan Eropa ke Indonesia dan sebaliknya; penandatanganan dokumen kerja sama; maupun peningkatan volume investasi dan perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra.

Amerika Serikat

Kemitraan Komprehensif (*Comprehensive Partnership-CP*) yang diluncurkan oleh Presiden RI-Presiden AS di Jakarta, pada kesempatan kunjungan resmi Presiden Obama ke Indonesia, tanggal 9-10 November 2010, telah memberikan dasar pijakan yang kuat bagi peningkatan hubungan kedua negara.

Prioritas Kemitraan Komprehensif RI-AS difokuskan pada bidang-bidang: perdagangan dan investasi, pendidikan, pertahanan, energi perubahan iklim dan lingkungan hidup, serta demokrasi dan masyarakat madani.

Sesuai dengan kerangka CP, kedua negara telah membentuk *Joint Commission Meeting* (JCM) RI-AS pada tingkat Menteri Luar Negeri yang merupakan mekanisme utama dan reguler dialog kemitraan komprehensif RI-AS. Forum ini berfungsi selain untuk memantau kegiatan kerja sama yang telah ada, juga untuk membahas upaya peningkatan kerja sama antara kedua negara di segala bidang.

Untuk menindaklanjuti hasil yang disepakati dalam JCM di berbagai bidang, telah dibentuk 6 *Working Groups* (*WG*) yang meliputi *WG on Democracy and Civil Society, WG on Education, WG on Climate and Environment, WG on Security, WG on Trade and Investment,* dan *WG onEnergy*.

JCM I telah dilaksanakan di Washington DC, 17 September 2010 dan JCM II dilaksanakan di Bali, 23-24 Juli 2011.

Bidang Politik dan Keamanan

Pada pertemuan JCM II di Bali tanggal 24 Juli 2011, Menteri Luar Negeri RI dan Menlu AS telah membahas antara lain tiga isu penting, yaitu hibah pesawat tempur F-16, hibah dalam rangka program *Millennium Challenge Cooperation* (MCC) dan usulan Amerika mengenai *Strategic Dialogue* pada tingkat pejabat tinggi. Selain itu, pertemuan JCM II juga telah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai enam WG sejak pertemuan JCM I di Washington pada tahun 2010. Kedua pihak mencatat adanya kemajuan yang signifikan di berbagai bidang kerja sama yang ditangani masing-masing WG.

Selain itu, Menlu RI dan Menlu AS juga telah mengadakan pertemuan bilateral disela-sela KTT APEC 2011 tanggal 11 November 2011 di Honolulu, Hawaii, AS. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu bilateral, regional dan global terkait kepentingan hubungan kedua negara, termasuk

Foto 42 Presiden AS bersama Presiden RI beserta Ibu Ani Yudhoyono pada *Gala Dinner* KTT *APEC Summit*, Bali, 18 November 2011

persiapan rencana kunjungan Presiden Obama ke Bali dalam rangka KTT *East Asia Summit* (EAS).

Pencapaian Pokok Kerja sama RI-AS

- Penegasan Kembali oleh Presiden Obama tentang dukungan AS terhadap integritas RI
- Intensitas pertemuan Menlu kedua negara
- Penunjukan Indonesia sebagai Tuan Rumah Konferensi OPIC dan RES
- Kerja sama pembentukan *Climate Change Center*
- Kerja sama Pembentukan *Peace Keeping Center*
- Perpanjangan fasilitas GSP untuk Indonesia, terhadap 2.114 jenis komoditi
- Komitmen kedua pihak meningkatkan kerja sama pendidikan termasuk pemberian beasiswa
- Peningkatan signifikan nilai perdagangan dan investasi setahun pasca peluncuran CP
- Rencana Hibah pesawat F-16
- Penandatanganan Hibah MCC *Compact Program* sebesar (USD 600 Juta)
- Kelanjutan program *Peace Corps* untuk pendidikan bahasa Inggris
- Pembentukkan *Commercial Dialogue*
- Rencana pembentukan *Food Community Center*
- Konsultasi intensif dalam negosiasi resolusi Dewan HAM

Pertemuan bilateral Presiden RI dengan Presiden AS, dilakukan di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur/*East Asia Summit* (EAS) dan Pertemuan Pemimpin ASEAN–AS ke-3 /ASEAN-U.S. *Leaders Meeting* (AULM) di Bali, Indonesia. Presiden AS pada kesempatan tersebut kembali menekankan dukungan AS terhadap keamanan dan integritas wilayah RI (NKRI). Pertemuan juga menyinggung kemajuan hubungan bilateral RI-AS dalam kurun waktu satu tahun setelah diluncurkannya CP yang dinilai sangat pesat. Dalam kaitan ini, disepakati untuk menyelenggarakan JCM III tahun 2012.

Dalam rangka *Working Group on Defense and Security*, RI–AS terus melanjutkan dialog tahunan *United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion*(USIBDD). USIBDD XI telah dilaksanakan tanggal 7-11 Februari 2011 di Honolulu, Hawaii.

Foto 43.Menlu RI dan Menlu AS pada Pertemuan ke-2 JCM RI-AS, Bali, 24 Juli 2011

Pada tanggal 22-23 September 2011 telah dilaksanakan *Indonesia – United States Security Dialogue* (IUSSD) IX di Jakarta. Pada pertemuan tersebut kedua pihak sepakat meningkatkan kerja sama di 5 bidang utama yaitu: *Maritime Securities*, *Peacekeeping*, *Humanitarian Assistance* dan *Disaster Relief*, modernisasi reformasi TNIserta penanggulangan ancaman keamanan di kawasan.

Selain itu, di tingkat pejabat tinggi juga telah dilaksanakan pertemuan bilateral Menlu RI dengan *US Undersecretary for International Commerce* di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum* IV di Bali, tanggal 8 Desember 2011.

Terkait rencana hibah 24 pesawat F-16, Kongres AS pada Agustus 2011 telah meloloskan rencana tersebut tanpa penentangan.

Kerja sama di bidang kontra terorisme dan kejahatan transnasional juga berkembang. *LoI between INP and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes* ditandatangani 2 Maret 2011 di Jakarta.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pada periode Januari-Agustus 2011, total perdagangan RI-AS sebesar USD 18,1 miliar atau meningkat 16,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Bagi Indonesia surplus sebesar USD 4,2 miliar atau meningkat 52,8% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Di bidang investasi, pada semester pertama tahun 2011 (Januari-Juni), investasi AS di Indonesia telah mencapai USD 577 juta atau sebesar 12,1 % dari seluruh investasi asing di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, AS adalah investor terbesar ketiga setelah Singapura dan Belanda.

Dalam rangka meningkatkan investasi AS di Indonesia dan wilayah ASEAN, AS telah meminta kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) di Jakarta tanggal 3-5 Mei 2011 yang diikuti juga oleh pengusaha-pengusaha negara Asia Tenggara.

Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) di Bali tanggal 23-24 Juli 2011. RES diikuti oleh kalangan pengusaha dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilakukan untuk mendukung peran kewirausahaan, memajukan pembangunan ekonomi dan masyarakat, mengidentifikasi cara untuk memperkuat hubungan antara pemimpin bisnis, organisasi sosial dan pengusaha dalam komunitas internasional serta menyediakan kesempatan untuk menjalin kemitraan lintas batas dalam memajukan kewirausahaan.

Selain itu, misi dagang dan investasi kedua negara banyak dilakukan pada tahun 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 dilaksanakan pertemuan *Trade Investment Council* (TIC) XI di Washington, D.C. dipimpin Mendag RI dan *US Trade Representative*. Pertemuan ini telah membahas hambatan dalam beberapa perdagangan seperti *New Film Import Regime and Negative List Change, Food and Beverage Labeling, Pharmaceutical Issues, GSP Program/GSP Plastic Tape Petition and Aluminium Foil Issue, Agricaltural Trade Issues, US Food Safety Modernization Act* serta *Onshore Data Centers.*

Tanggal 21 Oktober 2011, Pemerintah AS telah memperpanjang fasilitas *Generelized System of Preferences* (GSP) untuk Indonesia. Indonesia diuntungkan dalam fasilitas GSP AS yang meliputi 2.144 jenis komoditi nasional RI.

Sebagai tindak lanjut pembentukan *Commercial Dialogue* (CD) pada tanggal 11 November 2011 di Honolulu, yang ditujukan sebagai mekanisme mencari solusi terhadap hambatan-hambatan perdagangan selama ini, maka diselenggarakan kegiatan perdana berupa simposium dengan tema *Ease of Doing Business in Indonesia*, tanggal 12 Desember 2011 di Bali.

Di bidang energi, RI – AS telah mengadakan pertemuan *Indonesia-United States Investment Roundtable* di Jakarta, tanggal 9-10 Mei 2011. Pertemuan ini dibagi menjadi 3 (tiga) panel, yang masing-masing membahas masalah minyak dan gas; energi terbarukan; dan perkembangan tenaga kerja serta peningkatan kapasitas lokal. Pada pertemuan *roundtable* ini, juga diadakan pertemuan *G-to-G* yang hasilnya dijadikan bahan pembahasan *WG on Energy* dalam JCM II RI-AS pada bulan Juli 2011 dan akan dilaporkan dalam *The US-Indonesia Energy Policy Dialogue*ke-4 tahun 2012.

Foto 44.Menlu RI dan Menlu AS pada Pertemuan ke-2 JCM RI – AS Bali, 24 Juli 2011

Di bidang pendidikan, telah terjadi peningkatan jumlah penerima beasiswa Dikti-Fulbright, dari 13 beasiswa Ph.D di tahun 2010, menjadi 22 beasiswa untuk tingkat Ph.D dan 10 beasiswa untuk tingkat Master di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Oktober 2011 telah dilaksanakan *Higher Education Summit* (HES) di Washington, D.C. Kegiatan ini dipimpin oleh Mendikbud RI dan Mendik AS serta diikuiti oleh sekitar 30 institusi Pendidikan Tinggi dari Indonesia dan 40 dari AS. AS juga telah memberikan komitmen dana sebesar USD 165 juta untuk mendorong pertukaran akademik selama lima tahun kedepan. Selain itu, Pemerintah AS telah meningkatkan pendanaan

Fulbright-Dikti sebesar USD 8,5 juta per tahun serta USD 15 juta untuk Fulbright Indonesia *Research, Science and Technology Program* dalam rangka meningkatkan pertukaran jumlah peneliti.

Kemajuan hubungan bilateral kedua negara juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan perjanjian sebagai berikut:

a. Tanggal 27 Juni 2011 ditandatangani *MoU on Environmental Cooperation* antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan *Environmental Protection Agency of the United States* (EPA).

b. Tanggal 15 Juni 2011, ditandatangani *Implementing Arrangement* antara Kemdiknas, Kemenag dan *Peace Corps* mengenai Program *Peace Corps* dalam Bidang pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris.

c. Tanggal 29 September 2011, ditandatangani *Debt for Nature Swap-Tropical Forest Conservation Act* (DNS-TFCA) tahap II yang mencakup kegiatan *conservation, biodiversity* dan *climate change.*

d. Tanggal 11 November 2011, ditandatangani *Term of Reference Commercial Dialogue* (ToR CD), dalam rangka mencari solusi menghilangkan *trade barriers* demi peningkatan perdagangan kedua negara .

e. Tanggal 19 November 2011, ditandatangani *Grant Agreement Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact Program*, yang mencakup *green prosperity*, *community based nutrition project* dan *procurement modernization project* dengan bantuan dana sebesar USD 600 juta.

Di samping itu, telah dilakukan pula promosi budaya dan pembinaan masyarakat Indonesia di AS, antara lain melalui kegiatan: *Generation21*: *Indonesia Ideas Forum*, 27-29 Mei 2011; *American Batik Design Competition*, Maret-November 2011; dan *Indonesia Festival* 2011, 9 Juli 2011.

Foto 45. Pemecahan Rekor Dunia (5.182 orang) memainkan angklung pada Indonesian Festival, 9 Juli 2011, Washington, DC

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Amerika Serikat saat ini sebanyak 119.354 orang yang tercatat di perwakilan RI yang ada di AS,terdiri dari wilayah KBRI Washington D.C sebanyak 3.239 orang, wilayah KJRI San Francisco sebanyak 14.743 orang, wilayah KJRI New York 23.675 orang, wilayah KJRI LA sebanyak 52.606 Orang, wilayah KJRI Chicago sebanyak 8.688, dan wilayah KJRI Houston sebanyak 16.403 orang. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, perawat, pilot dan lain-lain. Jumlah kasus WNI yang tercatat adalah sebanyak 56 kasus.

Brazil

Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) yang disepakati pada 18 November 2008 dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kemitraan Strategis yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 menjadi dasar pijakan yang kuat bagi peningkatan hubungan antara Indonesia dan Brazil.

Prioritas kemitraan strategisRI-Brazil terletak pada bidang-bidang: perdagangan dan investasi, pertanian, dan energi.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan politik Indonesia-Brazil tercermin dari intensitas pertemuan dan kunjungan pejabat tinggi antara kedua negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pada tingkat Menteri Luar Negeri telah diadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara. Pertemuan kedua Menteri Luar Negeri dilakukan disela-sela KTM FEALAC ke-5 di Buenos

Aires, Argentina tanggal 25 Agustus 2011 dan disela-sela KTT ASEAN ke-19 di Bali tanggal 16 November 2011.

Pada pertemuan-pertemuan tersebut disepakati bahwa kedua Menteri Luar Negeri akan melakukan dialog strategis secara berkala. Dialog strategis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perkembangan dan status hubungan kerja sama kedua negara serta berbagai inisiatif/ bentuk kerja sama baru. Dialog ini juga ditujukan untuk membahas isu-isu tematik yang menjadi kepentingan kedua negara seperti ketahanan pangan, perubahan iklim dan energi terbarukan.

Pertemuan pada tingkat Menteri juga dilakukan antara Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Brazil dan antara Menteri Pertanian RI dan Menteri Luar Negeri Brazil disela-sela KTT ASEAN ke-19 di Bali pada tanggal 16 November 2011.

Beberapa kunjungan penting pejabat Indonesia ke Brazil adalah: Ketua Mahkamah Konstitusi (Januari), Gubernur Kalimantan Tengah dan wakil UKP4 (Maret), Grup Kerja Sama Bilateral DPR-RI (April), Komisi IV DPR-RI (April) dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPD-RI (November). Sementara dari pihak Brazil dapat dicatat kunjungan KSAU dan KSAD Brazil (Maret) dan Menteri Luar Negeri Brazil (November).

Pada tingkat regional dan global Brazil menjadi salah satu mitra penting Indonesia dalam kerangka G-20 dan FEALAC. Hubungan antara Brazil dengan Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga telah diperkuat dengan penandatanganan Deklarasi Aksesi Brazil pada *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* di Bali pada tanggal 16 November 2011. Hubungan baik antara Indonesia dan Brazil juga tercermin dalam penggalangan dukungan atas pencalonan masing-masing pada berbagai organisasi internasional.

Foto 46. Penandatanganan TAC oleh Menlu Brazil
Bali, 16 November 2011

Di bidang pertahanan, menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* pembelian pesawat Super Tucano oleh Kementerian Pertahanan RI dan EMBRAER pada bulan November 2010 di Jakarta, telah dilaksanakan penandatanganan *Certificate of Design Review Meeting Acceptance* di Sao Paulo, Brazil tanggal 28 Juni- 6 Juli 2011. Sesuai jadwal dalam kontrak maka dijadwalkan penyerahan tahap pertama 4 buah pesawat Super Tucano pada bulan Desember 2012.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Salah satu indikator penting mengenai capaian hubungan bilateral Indonesia dan Brazil adalah di bidang perdagangan dan investasi. Dalam 5 tahun terakhir, nilai perdagangan Indonesia-Brazil meningkat dari USD 1,14 miliar pada tahun 2006 menjadi USD 3,24 miliar pada tahun 2010. Pada periode Januari-Agustus 2011 nilai perdagangan telah mencapai USD2,20 miliar (ekspor sebesar USD 1,18 miliar dan impor sebesar USD 1,02 milyar) atau meningkat 24,28% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 1,77 miliar. Surplus untuk Indonesia sebesar USD 153,35 juta (2011).

Brazil merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Nilai perdagangan bilateral meningkat dari USD 1,14 miliar pada tahun 2006 menjadi USD 3,24 miliar pada tahun 2010. Pada periode Januari-Agustus 2011 nilai perdagangan telah mencapai USD2,20 miliar atau meningkat 24,28% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 1,77 miliar.

Sebagai tindak lanjut pembahasan yang dilakukan pada Sidang ke-2 Komisi Bersama tingkat pejabat tinggi di Jakarta tanggal 3-4 Oktober 2011, kedua negara telah menandatangani *Memorandum of Understandingbetween The Ministry of Trade of The*

Republic of Indonesia and The Ministry of External Relations of The Federative Republic of Brazil on Enhancing the Promotion of Trade and Investment.

Foto 47. Pertemuan Bilateral Menlu RI – Menlu Brazil
Bali, 16 November 2011

Melalui MoU ini diharapkan hubungan perdagangan kedua negara dapat meningkat menjadi USD 4 miliar pada tahun 2012. Demikian pula halnya investasi Brazil di Indonesia di bidang pertambangan, energi, konstruksi, industri pesawat terbang, peternakan dan pertanian, yaitu kelapa sawit, kedelai dan tebu. Sidang Komisi Bersama juga mengedepankan kerja sama kedua negara mengenai kerja sama teknik dan pengentasan kemiskinan.

Upaya peningkatan kontak dagang secara langsung antara pengusaha kedua negara juga dilaksanakan antara lain melalui fasilitasi KBRI Brazilia dan ITPC Sao Paulo kepada pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi pada "*Francal 2011: The 43rd International Shoes and Accessories Fashion Fair*" di Sao Paulo, 27-30 Juni 2011. Dalam kegiatan tersebut tercatat nilai kontrak dagang sebesar USD 450 ribu antara perusahaan dari Indonesia dengan berbagai *buyers* di kawasan Amerika Latin. Selain itu telah juga dilaksanakan fasilitasi kunjungan usaha Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan KADIN Indonesia ke Brazil tanggal 30 April- 6 Mei 2011.

Di bidang lingkungan hidup, yang menjadi perhatian kedua negara, telah dilakukan kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah dan UKP4 ke Brazil untuk mempelajari sektor peternakan, perkebunan, pengelolaan pembangkit listrik tenaga air serta pengelolaan lingkungan hidup dan REDD+.

Sebagai bagian dari promosi budaya, KBRI Brazilia juga telah menyelenggarakan berbagai pameran antara lain *Conhecer a Indonesia Atraves da Culinaria* (mengenal Indonesia lewat kulinernya) pada bulan April, dan *Conhecer a Indonesia Atraves da Cultura e Culinaria* di Brazilia dan Rio de Janeiro (September) untuk mempromosikan batik dan musik tradisional Indonesia dengan mendatangkan seniman batik dan kelompok musik dari Indonesia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah warga negara Indonesia di Brazil sampai dengan bulan September 2011 sebanyak 307 orang, yang terdiri dari misionaris, pengusaha maupun pekerja. Mayoritas WNI tinggal di kota Sao Paulo.

Perancis

Tahun 2011 merupakan momentum baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Perancis. Pada tahun ini telah disepakati hubungan kemitraan strategis Indonesia-Perancis dengan diluncurkannya *Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis Indonesia-Perancis*di Jakarta, tanggal 1 Juli 2011 oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Perancis.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategisnya dengan Perancis terletak pada bidang-bidang: perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pertahanan, dan perubahan iklim.

Bidang Politik

Pada tahun 2011, terdapat beberapa pertemuan dan saling kunjungan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan maupun pejabat pemerintah kedua negara, antara lain:

a. Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, di sela-sela *World Economic Forum* (WEF), Davos, 27 Januari 2011;
b. Kunjungan PM Perancis, Francois Fillon, ke Indonesia, 31 Juni - 2 Juli 2011;

Pada kunjungan PM Perancis ke Indonesia, kedua kepala pemerintahan telah sepakat meluncurkan Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis. Untuk

melaksanakan Deklarasi ini, kedua negara telah menyepakati akan menggunakan panduan yang disepakati dalam setiap pertemuan bilateral reguler kedua Menteri Luar Negeri yang akan dimulai pada musim semi tahun 2012.

Foto 48. Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan Presiden Perancis, di sela-sela World Economic Forum (WEF) Davos, 27 Januari 2011

Pada kesempatan tersebut juga telah ditandatangani empat Persetujuan Kerja sama, yaitu (i) Pendidikan Tinggi, (ii) Energi dan Sumber Daya Mineral, (iii) Pariwisata dan (iv) Permuseuman.

Dalam rangka penguatan hubungan kerja sama kedua negara juga telah dilakukan beberapa kunjungan pada tataran Parlemen ke Perancis melalui kunjungan Wakil Ketua DPR RI pada Januari 2011, Komisi I pada April 2011 dan Komisi VII pada Mei 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang kerja sama ekonomi, kedua negara secara intensif melakukan upaya-upaya peningkatan kerja sama baik di bidang perdagangan, investasi, industri dan kerja sama pembangunan.

Volume Perdagangan Indonesia-Perancis selama tiga tahun terakhir (2009 – 2011) menunjukkan peningkatan rata-rata 9%. Neraca perdagangan kedua negara masih menunjukkan defisit bagi Indonesia, walaupun kecenderungannya terus menurun. Berikut ini adalah neraca perdagangan Indonesia-Perancis selama tiga tahun terakhir:

Di bidang investasi, pada periode Januari – Desember 2010 tercatat 58 proyek dengan nilai investasi sebesar US 3,3 juta dan pada periode Januari-Juni 2011 tercatat 42 proyek baru Perancis dengan nilai investasi sebesar US 77,7 juta.

Total Perdagangan RI – Perancis (miliar USD)

Tahun	Ekspor	Impor	Total
2009	0,87	1,62	2,49
2010	1.12	1.35	2.47
2011 (s/d Agustus)	0,89	1.10	2,00

Sumber: Kemdag

Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKI) Perancis, disertai dengan delegasi pimpinan perusahaan terkemuka Perancis yang tergabung dalam MEDEF (Asosiasi CEO Perusahaan Perancis) telah berkunjung ke Indonesia pada tanggal 24-25 Februari 2011 dan melakukan sejumlah pertemuan penting dengan Wakil Presiden RI, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Pertemuan membahas upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara dan mendorong lebih banyak lagi masuknya investor Perancis ke Indonesia khususnya di sektor industri dirgantara, tenaga listrik, pertambangan, perkeretapian dengan nilai sebesar USD 10 milyar.

Selain itu, pada pertemuan Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian Perancis di Paris pada April 2011 telah dihasilkan Komunike Bersama RI-Perancis untuk memperkuat hubungan bilateral di sektor pertanian dalam kerangka G-20 yang diketuai Perancis saat ini.

Pada tanggal 3-4 November 2011, Presiden RI memimpin langsung Delegasi RI untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, di Cannes, Perancis, dengan didahului oleh *pre-summit meeting*, yaitu Pertemuan *Sherpa*, *Finance Deputies* serta *Joint Meeting Sherpa-Finance Deputies* pada tanggal 1-2 November 2011. Dalam KTT G-20 tersebut, Delegasi RI menyampaikan beberapa hal

antara lain terkait dengan masalah ketahanan pangan dan pertanian, serta peran ASEAN dalam menjawab tantangan global dan pertumbuhan ekonomi global.

Dalam bidang sosial dan budaya, Perwakilan RI di Paris secara aktif telah mengadakan berbagai kegiatan promosi, antara lain:

a. Partisipasi Indonesia dalam *Sourire Café* di kota Pérenchies yang diselenggarakan oleh asosiasi *Sourire d'Indonésie,* yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak di desa Apuan, Banjar, dan Babakan di Bali, 12 Februari 2011;
b. KBRI Paris bekerja sama dengan Asosiasi Pasar Malam telah mengadakan malam budaya bertajuk "Pasar Seni Indonesia" pada tanggal 28 Mei 2011 bertempat di taman dan Balai Budaya Kedutaan. Dalam kegiatan ini ditampilkan berbagai tari-tarian tradisional berbagai daerah di Indonesia, *workshop* membatik, gamelan dan disajikan berbagai jajanan khas Indonesia.
c. Pada tanggal 25-26 Juni 2011, KBRI ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya "*Chatel Fest*" di kota Chatelaillon di mana KBRI Paris menjadi tamu kehormatan dalam acara ini, dengan menampilkan pertunjukan seni tarian Indonesia dari berbagai daerah selama dua hari.

UNESCO

Perancis merupakan tuan rumah organisasi internasional *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Pemerintah Indonesia senantiasa aktif dalam kegiatan-kegiatan UNESCO. Pada tahun 2011 Presiden RI telah menjadi salah satu pembicara utama dalamacara *Thematic Debate/Leaders' Forum UNESCO on 10th Years of Commemoration of the Declaration of Cultural Diversity* pada tanggal 2 November 2011.

Foto 49.Kunjungan PM Perancis ke Jakarta, 2 November 2011

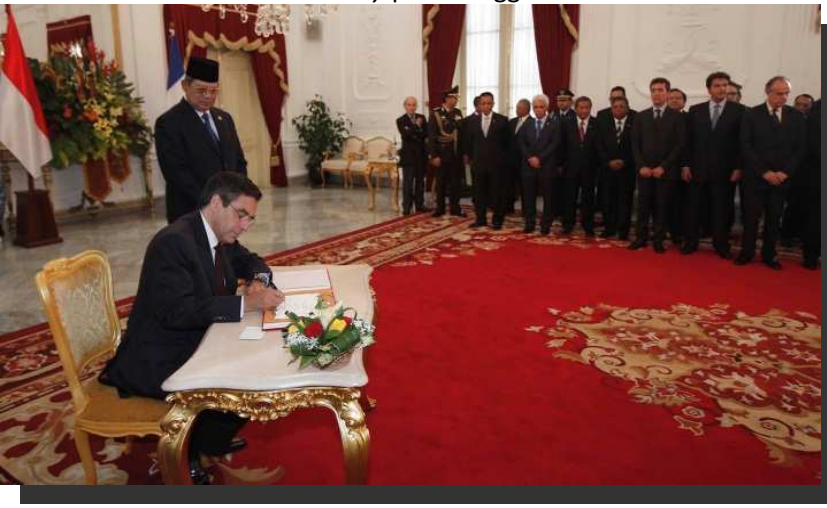

Partisipasi Indonesia di organisasi UNESCO pada tahun 2011 diantaranya adalah:

a. Pertemuan Sidang ke-60 Dewan *International Bureau of Education* (IBE) UNESCO di Jenewa, Swiss pada tanggal 26-28 Januari 2011; dan
b. *UNESCO Global Forum entitled "Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses*", tanggal 16 – 17 Mei 2011;
c. 36th Session of the UNESCO *General Conference*, Paris, Perancis, 25 Oktober-10 November 2011.

Foto 50.Presiden RI menyampaikan r*emarks* pada 36th*Session of the UNESCO General Conference*, 2 November 2011

Dalam hal ini, Indonesia berhasil mendaftarkan sejumlah warisan budaya nasional untuk mendapatkan pengakuan, seperti keris dan wayang di tahun 2008, batik di tahun 2009, dan angklung di tahun 2010. Selanjutnya pada pertemuan ICH di Bali pada tanggal 22-29 November 2011, Indonesia berhasil mendaftarkan tari saman sebagai salah satu warisan budaya dunia takbenda.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, tercatat WNI di wilayah kerja KBRI Paris berjumlah 3.807 orang. KBRI Paris telah menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada 40 WNI yang mengalami kehilangan paspor.

Rusia

Sejalan dengan *"Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara RI dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21"* yang ditandatangani di Moskow, 21 April 2003 yang diikuti dengan kunjungan Presiden RI ke Rusia pada 2006 dan Presiden Rusia ke Indonesia pada 2007, hubungan bilateral Indonesia - Rusia sepanjang tahun 2011 semakin meningkat dan bersifat multidimensional.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategisnya dengan Rusia terletak pada bidang-bidang: pertahanan dan keamanan, energi dan pertambangan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bidang Politik

Di bidang politik, Presiden RI dan Presiden Rusia telah mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela *19thAPEC Economic Leader's Meeting* di Honolulu, Amerika Serikat, 13 November 2011.

Dalam pertemuan dibahas upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral di berbagai bidang.

Selama 2011 tercatat kunjungan/pertemuan pejabat tinggi kedua negara, yakni: Menlu Rusia Sergey Lavrov yang mewakili Presiden Rusia pada 6th*East Asia Summit* (EAS) di Bali (18-19 November 2011); pertemuan Menlu RI dan Menlu Rusia di sela-sela the *44th AMM Meeting* di Bali (Juli 2011); kunjungan Ketua Dewan Keamanan Rusia di Jakarta (17-19 Oktober 2011); kunjungan Deputi PM Rusia (27 – 28 Oktober 2011); kunjungan beberapa delegasi DPR RI termasuk Ketua DPR RI (Juli 2011) dan Komisi I DPR RI (April 2011); Ketua Mahkamah Konstitusi RI (Oktober 2011); Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (21 Juni 2011); Menko Perekonomian RI (16-18 Juni 2011); serta Menko Polhukam RI (21-22 September 2011).

- Penandatanganan perjanjian *Air Service Agreement (ASA)* pada 25 Maret 2011 memiliki arti strategis guna memfasilitasi penerbangan regular Rusia - Indonesia.
- Pemberlakuan *Agreement on Peaceful Uses of Atomic Energy* mulai 5 Agustus 2011 menjadi landasan penting bagi pengembangan kerja sama

Foto 51.Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menlu Rusia Bali,23Juli 2011

Kunjungan Ketua Dewan Keamanan Rusia, Nikolay Patrushev ke Indonesia menunjukan perhatian Rusia pada kerja sama di bidang keamanan dengan Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menkom Polhukam, antara lain dibahas kerja sama dalam memerangi terorisme, *cyber crime*, maupun kerja sama keamanan regional.

Di bidang keamanan, salah satu hasil penting dalam hubungan kedua negara adalah pemberlakuan *Agreement on Peaceful Uses of Atomic Energy* mulai 5 Agustus 2011 yang menjadi landasan penting bagi pengembangan kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai.

Dalam bidang HAM, kedua negara telah mengadakan Konsultasi Bilateral HAM keempat di Moskow pada 30 Juni 2011 pada tingkat direktur Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Rusia. Kedua belah pihak saling bertukar pandangan tentang berbagai isu terkait upaya perlindungan dan pemajuan HAM global, termasuk dalam kerangka kerja sama di Dewan HAM PBB. Secara umum konsultasi tersebut menggarisbawahi kesamaan pandangan antara pendekatan yang ditempuh Rusia dan Indonesia terhadap isu-isu utama di bidang HAM.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang ekonomi, pada 24 – 25 Maret 2011 telah berlangsung Sidang ke-7 Komisi Bersama RI – Rusia di Moskow, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian *Air Service Agreement* (ASA) oleh Wakil Menteri Perhubungan kedua negara. Perjanjian ASA ini memiliki arti strategis guna memfasilitasi penerbangan regular Rusia – Indonesia, khususnya untuk peningkatan arus penumpang, barang, kargo dan jasa kedua negara. Selain itu pada 21 Juni 2011 di Moskow juga telah ditandatangani MoU Kerja sama Komisi Pemilihan Umum.

Untukmempromosikan investasi di Indonesia, pada 12-13 September 2011 delegasi RI yang dipimpin Ketua BKPM telah berkunjung ke Moskow, Rusia dalam rangka kegiatan "M*arketing Investasi Indonesia"*(MII). Melalui kegiatan MII 2011 diharapkan realisasi investasi Rusia di Indonesia yang pada semester I tahun 2011 sebesar USD 1,15 juta, dapat meningkat.

Peningkatan hubungan di bidang ekonomi juga nampak dengan diselenggarakannya pertemuan "*High Level Meeting on Bilateral Economic Cooperation"* di Jakarta, 27-28 Oktober 2011. Delegasi RI dipimpin Menko Perekonomian dan delegasi Rusia dipimpin Deputi PM Rusia bidang Perekonomian. Sebagai hasil pertemuan antara lain disepakati peningkatan level Sidang Komisi Bersama menjadi tingkat Menteri, percepatan finalisasi berbagai perjanjian *pending* dan perjanjian yang memerlukan ratifikasi, *road map*kerja sama perekonomian hingga tahun 2013, serta kerja sama dalam kerangka APEC khususnya dalam kepemimpinan Rusia tahun 2012 dan Indonesia tahun 2013. Dalam kesempatan tersebut diselenggarakan pula *Indonesia-Russia Business Forum* yang diikuti oleh sekitar 50 pengusaha kedua negara.

Perdagangan RI-Rusia periode Januari-Agustus tahun 2011 meningkat sebesar 41,94% (USD 1,615 miliar) dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (USD 1,138 milyar). Hingga Agustus ekspor Indonesia senilai US 0.57 milyar dan impor Indonesia lebih USD 1 miliar.

Di bidang pariwisata, berkat kebijakan *Visa on Arrival* yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga Rusia sejak Agustus 2005 serta pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya yang intensif, angka kunjungan wisatawan Rusia ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2010 jumlah wisatawan Rusia ke Indonesia mencapai 79.100 orang dan hingga Juni 2011 jumlah wisatawan Rusia telah mencapai 46.181 orang. Pada akhir 2011 ditargetkan jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia mencapai 94.000 orang.

Dalam rangka promosi citra Indonesia dan peningkatan arus wisatawan Rusia ke Indonesia selama tahun 2011 KBRI Moskow telah menyelenggarakan kegiatan *Interfaith Dialogue* maupun program *Familiarization Trip* serta berpartisipasi dalam berbagai pameran internasional di Rusia, seperti *Moscow International Tour and Travel* (MITT), *Inter Market, Otdykh Leisure, Food Expo & Culinary*, dan *Gift Expo*.

Foto 52.*Indonesian-Russian Students' Friendship and Dialogue on Islam and Culture di Universitas Islam*, Kazan, 16-22 Mei 2011

Di bidang pendidikan, pada tahun akademis 2011/2012 pemerintah Rusia telah meningkatkan

alokasi beasiswa kepada Indonesia dari 35 menjadi 45 orang. Hingga November 2011 sebanyak 33 mahasiswa Indonesia telah memanfaatkan beasiswa tersebut. Sebaliknya Indonesia juga memberikan 45 beasiswa untuk belajar di Indonesia (18 mahasiswa melalui program darmasiswa dan 27 untuk program gelar di perguruan tinggi Islam). Hingga kini tercatat 79 mahasiswa Rusia merupakan alumnus program Dharmasiswa.

Bidang Kekonsuleran

Hingga 1 November 2011 jumlah WNI di Rusia berjumlah 458 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122 adalah pelajar dan mahasiswa serta 196 TKI formal. Banyak dari TKI formal di Rusia berasal dari Bali (sekitar 70 orang) dan bekerja di *Spa Saloon* "7 Krasok" yang populer di Moskow, St. Petersburg dan Kazan. Perlakuan terhadap TKI relatif baik karena mereka diberikan asrama serta penghasilan bersih antara USD 400 – USD 600 perbulan.

Uni Eropa

Hubungan bilateral RI – UE meningkat cukup signifikan dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on RI-EU Comprehensive Partnership and Cooperation* (PCA RI-UE) pada 9 November 2009 di Jakarta. Total perdagangan bilateral RI – UE sampai dengan Agustus 2011 tercatat sebesar 22,233 miliar USD meningkat sebanyak 5, 138 miliar EUR dibandingkan dengan perdagangan tahun 2010 yaitu sebesar 17,095 milyar USD. Sedangkan investasi UE di Indonesia pada triwulan ke-3 tahun 2011 tercatat sebesar 825 juta USD dengan proyek sebanyak 169 buah.

Indonesia dan UE saat ini sedang dalam tahap final proses ratifikasi PCA. Mengingat UE memerlukanwaktukuranglebih 2 tahununtukmeratifikasi PCA (termasukratifikasidariParlemenEropa yang barudapatdilakukanapabilaseluruhanggota UE telahmeratifikasi),kedua pihak tengah menjajaki kemungkinan PCA dapat diimplementasi secara *de facto*, melalui rencana pembentukan *joint commitee* dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi prioritas yaitu: perdagangan dan investasi, perubahan iklim, penanggulangan terorisme, energi, pendidikan dan budaya, serta pelaksanaan *policy dialogue*.

Padatahun 2011, telahdilakukanpertemuan *tripartite* Presiden RI denganPresidenKomisiEropadanPresidenDewanEropa (4 November 2011) di sela-sela KTT G-20 di Cannes, Perancis, dan pertemuan Menlu RI dengan *High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy* di sela-sela ASEM FMM, Godollo, Hongaria (7 Juni 2011).

RI – UE jugatelahmenyelesaikan*draft* perjanjian*Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT – VPA), sertamenandatanganiperjanjian*Horizontal Aviation Agreement (HAA)*, serta selesainya kajian *Vision Group* mengenai pembentukan *Comprehensive Economic*

Data Perdagangan dan Investasi RI-UE
2009 - 2011

No	URAIAN	Dalam EUR (miliar)			Tren (%)
		2009	2010	2011 (estimasi)	
I.	Ekspor Indonesia ke UE	11,676	13,727	16,379	18,44
	Impor Indonesia dari UE	5,273	6,372	6,968	14,95
	Total Perdagangan	16,949	20,099	23,347	17,37
	Neraca	6,404	7,355	9,412	21,23
II.	Investasi UE di Indonesia	1,490	2,096	2,148	20,10

Selama tahun2011, telah dilakukan pertemuanantara pejabat tinggi Indonesia dan Uni Eropa, diantaranya:

- PertemuanTripartite Presiden RI dengan Presiden KomisiEropa dan Presiden DewanEropa di sela-sela KTT G20 di Cannes, Perancis, 4 November 2011. Ketiga Presiden mengharapkan kemitraan komprehensif Indonesia – UE dapat terjaga dan ditingkatkan menjadi kemitraan strategis.
- Pertemuan *EU Commisioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response*, Mrs. Kristalina Georgieva dengan Menkokesra dan pejabat terkait di Jakarta pada 12 September 2011. Dalam kunjungan tersebut, Komisioner Georgieva menawarkan 4 jenis kerja sama yaitu *preparedness*, *strong institutions and community engagements, disaster management* serta *staff exchanges and visits*.
- Pertemuan Menlu RI dengan *High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy* di sela-sela ASEM FMM di Godollo, Hongaria, 7 Juni 2011. Kedua pihak mencatat kemajuan yang cukup berarti dalam hubungan bilateral RI-UE pasca penandatanganan PCA. Dalam pertemuan dibahas pula isu regional serta peningkatan kerja sama bilateral dalam rangka mengatasi masalah global, seperti energi, perubahan iklim, dan penanganan bencana.
- Pertemuan *EU Commissioner for Trade* dan Menteri Perdagangan RI di sela-sela *The 1st ASEAN–EU Business Summit* (AEBS) di Jakarta, 4-6 Mei 2011. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua pihak mengadopsi rekomendasi *Vision Group* RI – UE untuk meningkatkan kerja sama perdagangan.
- Pertemuan *EU Commissioner for Trade* dengan Menteri Kehutanan RI pada 4 Mei 2011 yang menghasilkan *Joint Statement* mengenai *draft Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade* (VPA-FLEGT).
- Pertemuan antara *Delegation for Relations with the Countries of South East Asia and ASEAN* Parlemen Eropa dengan Menlu RI pada 22 Februari 2011 di Jakarta selama kunjungan mereka di Indonesia pada 21-25 Februari 2011. Pada pertemuan tersebut, Parlemen Eropa memberikan dukungan penuh terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN.

Foto 53.Presiden RI melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa di sela-sela KTT G20, Cannes, 4 November 2011.

Beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, antara lain:

- Dialog HAM RI-UE ke-2, di Brussel, Belgia, 9 Maret 2011. Pada pertemuan tersebut mengemuka apresiasi UE atas perkembangan demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia serta atas peran Indonesia mempromosikan nilai-nilai HAM di ASEAN.
- Penyelesaian proses *negosiasi Voluntary Partnership Agreement on Forest, Law Enforcement, Governance and Trade*(VPA-FLEGT) yang ditandai dengan penandatanganan *Joint Statement* Menteri Kehutanan RI dan Komisioner Perdagangan UE di Jakarta, 4 Mei 2011.
- Penyelesaian *Horizontal Aviation Agreement* (HAA) RI-UE yang ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan tersebut oleh Menteri Perhubungan RI dan Wakil Presiden Komisi UE bidang Transportasi di Brussell, Belgia, 29 Juni 2011. HAA merupakan pelengkap Perjanjian Bilateral Hubungan Udara (PHU) Indonesia dengan negara-negara anggota UE yang telah ada dan memberi peluang bagi Indonesia untuk melakukan kerja sama teknis dengan Uni Eropa khususnya dalam rangka memenuhi standar UE di bidang keselamatan penerbangan;
- Sosialisasi rekomendasi *Vision Group* RI – UE di Jakarta dan Brussel guna mendapatkan masukan dalam rangka persiapan negosiasi*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) pada akhir tahun 2011, sesuai rekomendasi Vision Group RI-UE.
- Pelaksanaan Forum Komunikasi Bilateral (FKB) RI – UE ke-10 di Bogor pada 10 – 11 November 2011. Pada pertemuan kedua pihak menyepakati rencana mekanisme kerja *Joint Committee* RI-UE yang akan menjadi instrumen konsultasi bilateral tertinggi antara kedua pihak. Pertemuan *Joint Committee* akan dilakukan pada tingkat menteri dan dijadwalkan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.

Turki

Hubungan Indonesia dengan Turki menjadi semakin kuat pada tahun 2011, terutama sejak diluncurkannya *Joint Declaration on Indonesia-Turkey: an Enhanced Partnership toward a New World Setting* oleh Presiden RI dan Presiden Turki di Jakarta, 5 April 2011. Deklarasi bersama ini merupakan langkah nyata kedua presiden untuk mewujudkan kemitraan yang lebih kokoh untuk memanfaatkan berbagai peluang dan menjawab tantangan global saat ini da di masa mendatang.

Prioritas Indonesia dalam kemitraan komprehensifnya dengan Turki terletak pada bidang-bidang: perdagangan, investasi, kebudayaan, dan pendidikan.

Eratnya hubungan kedua negara juga tercermin pada saat terjadinya bencana alam baik di Indonesia maupun di Turki. Sama halnya ketika Turki memberikan bantuan saat Indonesia dilanda bencana alam, pada tanggal 2 November 2011 Pemerintah RI juga menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Turki sebesar USD 1 juta bagi para korban gempa bumi yang terjadi di Provinsi Van, Turki, tanggal 23 Oktober 2011.

Dalam upaya untuk lebih memperkuat hubungan dan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan *people-to-people contacts*, Pemerintah RI akan membuka Konsulat Jenderal RI yang berkedudukan di Istanbul. Proses persiapan pembukaan Konsulat Jenderal RI di Istanbul saat ini telah memasuki tahap-tahap akhir. Diharapkan pembukaan Konsulat Jenderal RI di Istanbul dapat dilaksanakan pada Kwartal I pada tahun 2012 .

Bidang Politik

Peningkatan hubungan bidang politik Indonesia-Turki ditunjukkan oleh kunjungan Kepala Negara dan pejabat pemerintahan kedua negara. Pada tanggal 4-6 April 2011, Presiden Turki, Abdullah Gul, telah melakukan kunjungan ke Indonesia, sebagai bentuk balasan atas kunjungan Presiden RI ke Turki bulan Juni 2010. Dalam kesempatan tersebut, kedua kepala negara telah menyaksikan penandatanganan tiga perjanjian bilateral, yaitu:

Foto 54. Penandatangan Persetujuan antara Menlu RI dan *Minister of State*Turki, Jakarta, 5 April 2011

a. *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passport* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, R.M. Marty M. Natalegawa dan *Minister of State* Turki, Mehmet Aydin.

b. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey on Bilateral Consultative Forum* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, R.M. Marty M. Natalegawa dan *Minister of State* Turki, Mehmet Aydin. Dalam hal ini, akan dibentuk FKB tingkat Menteri yang akan memantau perkembangan pelaksanaan Kemitraan Indonesia-Turki

c. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey on Disaster Management* yang ditandatangani oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dr. Syamsul Ma'arif dan *Minister of State* Turki, Mehmet Aydin.

Presiden RI juga telah menerima*Deputy Prime Minister* Turki di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* tanggal 8 Desember 2011.

Pada tanggal 5 April 2011 secara terpisah juga telah dilakukan pertemuan antara *Undersecretary* Kemhan Turki dengan Wamenhan RI dimana dalam pertemuan tersebut ditandatangani *Protocol on Defense Industry Cooperation between Indonesia and Turkey*.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Kunjungan Presiden Turki tanggal 4 – 6 April 2011 memberikan dorongan semangat untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Turki di bidang perdagangan, antara lain:

a. Menetapkan target perdagangan bilateral sebesar USD 5 miliar pada tahun 2014.
b. Komitmen penyelesaian hambatan perdagangan demi tercapainya target perdagangan tersebut.
c. Peningkatan kerja sama di bidang industri pertahanan, pendidikan tinggi dan pertanian.

Selama bulan Januari-Agustus 2011, total perdagangan antara RI dan Turki mencapai USD 1,31 milyar atau meningkat sebesar 50,91% dibanding periode Januari-Agustus 2010 sebesar USD 870,78 juta. Indonesia mengalami surplus dengan ekspor sebesar USD 600.416,8 ribu dan impor sebesar USD 230.335,1. Sepanjang tahun 2006-2010, volume perdagangan kedua negara mengalami *trend* peningkatan sebesar 7,68%.

Kedua negara juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi, antara lain Forum Perdagangan dan Investasi (Forum Bisnis) Indonesia-Turki di Jakarta, April 2011, yang dihadiri

oleh sekitar 750 pengusaha dari kedua negara. Pada kesempatan tersebut telah ditandatangani (i) MoU antara KADIN dengan Tuskon, (ii) MoU Propinsi Sumsel dengan Hitay Investment Holding mengenai *Geothermal Studies*, (iii) MoU Kerja Sama antara KADIN dan MUSIAD dan (iv) MoU MUSIAD Indonesia-MUSIAD Turki.Penandatanganan kesepakatan-kesepakatan tersebut disaksikan oleh Presiden kedua negara.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Kedua negara memberlakukan *visa on arrival*untuk meningkatkan *people-to-people contact*. Dengan ditandatanganinya *agreement* bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, diharapkan akan dapat mempererat hubungan antar kedua bangsa.

Hingga akhir bulan Juni 2011 jumlah WNI di wilayah kerja : 535 orang. Di bidang perlindungan WNI, terdapat 1 orang tenaga kerja wanita Indonesia berinisial FAM yang dibantu oleh IOM dipulangkan ke Indonesia. FAM telah melanggar ketentuan izin tinggal di Turki (*overstay*).

III.3 HUBUNGAN BILATERAL DENGAN NEGARA MITRA DI BERBAGAI KAWASAN DUNIA

Sasaran

Kegiatan diplomasi Indonesia di berbagai kawasan di dunia lainnya ditujukan untuk:

a. Membuka peluang kerja sama baru, khususnya di bidang ekonomi untuk memperluas pasar dan mitra dagang tradisional dan nontradisional Indonesia;
b. Menjalin kemitraan dalam isu-isu khusus yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan negara-negara terkait, misalnya dalam isu perubahan iklim, HAM, demokrasi, energi dan lain-lain;
c. Menjalin kemitraan di forum-forum multilateral khususnya di antara negara-negara berkembang seperti dalam forum OKI, G-77 dan RRT, FEALAC serta GNB; dan
d. Menjalin kerja sama saling dukung untuk pencalonan di berbagai organisasi internasional.

Hubungan kerja sama Indonesia dengan berbagai negara diarahkan kepada pengembangan hubungan yang positif dan konstruktif yang diperkuat dengan kerja sama intra regional.

Di bidang politik dan keamanan, sasaran yang diharapkan adalah adanya hubungan kesetaraan terhadap isu-isu yang menjadi kepentingan bersama yaitu antara lain *good governance*, demokratisasi, serta pemberantasan terorisme.

Di bidang ekonomi, sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah tetap mempertahankan tujuan pasar tradisional dan non-tradisional produk Indonesia, serta sumber alternatif baru dalam pengembangan kerja sama lainnya di bidang energi dan pangan, kehutanan, ilmu pengetahuan, teknologi serta industri pertahanan.

Indonesia juga terus berusaha mendorong kerja sama ekonomi khususnya, bagi perluasan pasar non-tradisional serta peningkatan kerja sama teknik dalam bentuk peningkatan kapasitas.

Kegiatan Diplomasi

III.3.1 KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

III.3.1.1 Kawasan Asia Timur dan Pasifik

Fiji

Hubungan dan kerja sama Indonesia dengan Fijiterus mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik. Fiji adalah negara yang berperan penting di Pasifik Selatan, khususnya di bidang konektivitas dan perdagangan.

Bidang Politik

Hubungan bilateral kedua negara di bidang politik telah mengalami peningkatan dengan dibukanya Perwakilan Fiji di Jakarta dan kunjungan Perdana Menteri Fiji ke Jakarta, April 2011 dan penandatanganan *Development Cooperation Agreement RI-Fiji*, Mei 2011. Pembukaan

perwakilan ini merupakan implementasi peningkatan hubungan diplomatik RI-Fiji yang telah terjalin sejak tahun 1974.

Kegiatan saling kunjung kedua negara di tahun 2011, diantaranya:

a. Kunjungan Perdana Menteri Fiji, H.E. Commodore Josaia Voreqe Bainimarama ke Indonesia dalam rangka pembukaan perwakilan Fiji di Indonesia pada tanggal 5-8 April 2011; dan
b. Kunjungan Menlu Fiji, Y.M. Ratu Inoke Kubuabola ke Bali dalam rangka KTM ke-16 GNB

Peningkatan hubungan di bidang politik antara kedua negara juga ditandai dengan kesediaan Indonesia untuk berbagi pengalaman dan informasi mengenai demokrasi dengan Fiji menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum di Fiji pada tahun 2014. Indonesia mendukung penuh penerapan Peta Kebijakan Fiji Menuju Pemilihan Parlementer 2014 guna membawa Fiji menuju demokrasi.

Foto 55. Kunjungan Perdana Menteri Fiji ke Indonesia, 5 – 8April 2011

Selain itu, hubungan yang baik di bidang politik antara kedua negara juga tercermin dari upaya saling dukung kedua negara di berbagai fora internasional. Salah satunya adalah dukungan dan penerimaan Indonesia sebagai Pengamat dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG), yang statusnya diberikan pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 MSG di Suva pada 31 Maret 2011.

Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara salah satunya adalah *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation/Development Cooperation Agreement* (DCA) RI-Fiji oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, yang mencakup kerja sama di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pendidikan, seni budaya, perdagangan dan investasi, kerja sama teknis, pariwisata, transportasi, kepolisian, hukum, kerja sama di berbagai organisasi internasional dan forum multilateral serta kerja sama antar masyarakat. Penandatanganan DCA ini diharapkan dapat membuka jalan bagi dibentuknya Sidang Komisi Bersama RI-Fiji yang akan membahas kerja sama di berbagai bidang. Selain itu, melalui DCA RI-Fiji, Indonesia dapat pula memberikan kontribusi signifikan bagi implementasi Fiji dalam rangka *Roadmap to Election* 2014, khususnya kerja sama peningkatan kapasitas di bidang hukum dan yudisial guna turut membantu upaya Fiji dalam proses demokratisasi.

Fiji adalah tuan rumah bagi Sekretariat *Pacific Island Forum* (PIF) dan berbagai institusi kawasan Pasifik Selatan lainnya.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Nilai perdagangan RI – Fiji selama bulan Januari sampai dengan Mei 2011 adalah sebesar USD 8,6juta. Nilai ini menurun sebesar28,68% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2010.

Bidang-bidang yang menjadi prioritas kerja sama Indonesia-Fiji antara lain perikanan, pertanian dan pariwisata.

Foto 56. Menlu RI dan PM Fiji pada Acara Pembukaan Perwakilan Fiji, Jakarta, 6 April 2011

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari Fiji, antara lain *International Training Program on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables, International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries, International Workshop on Multi Disaster Risk Management, International Training Program on Public Administrative Reform for Good Governance,* dan *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*.

Kepulauan Solomon

Hubungan bilateral Indonesia dengan Kepulauan Solomon terjalin dengan baik dan hubungan diplomatik ditangani melalui KBRI Port Moresby.

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari Kepulauan Solomon, antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries*.

Kepulauan Marshall

Hubungan diplomatik RI-Kepulauan Marshall dilaksanakan melalui KBRI Manila. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik. Indonesia dan Kepulauan Marshall juga bekerja sama di berbagai forum internasional seperti di PBB.

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari Kepulauan Marshall, yaitu *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries*.

Kerajaan Tonga

Hubungan diplomatik RI dengan Kerajaan Tonga dilaksanakan melalui KBRI Wellington. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik.

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari Tonga, antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries* dan *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*.

Mikronesia

Hubungan diplomatik RI – Mikronesia dilaksanakan melalui KBRI Tokyo. Hubungan bilateral kedua negara berjalan positif.

Mongolia

Hubungan bilateral Indonesia – Mongolia berjalan baik dan cenderung meningkat walaupun kedua negara tidak memiliki kantor perwakilan (kedubes) di masing-masing negara. Saat ini, untuk urusan Mongolia dirangkap oleh KBRI di Beijing sedangkan Kedubes Mongolia di Bangkok merangkap untuk urusan Indonesia.

Foto 57.Pertemuan Presiden RI dengan PM Mongolia di sela-sela*Bali Democracy Forum IV*, Bali, 8 Desember 2011

Bidang politik

Hubungan kerja sama politik Indonesia dan Mongolia pada tahun 2011 mengalami intensifikasi antara lain ditandai dengan partisipasi aktif Mongolia pada serangkaian *event* internasional di Indonesia seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) di Bali, *World Economic Forum* (WEF) di Jakarta dan *Bali Democracy Forum* di Bali.

Kunjungan pejabat tinggi Mongolia ke Indonesia:

a. Kunjungan PM Sükhbaataryn Batbold ke Jakarta tanggal 12 Juni 2011 menghadiri *World Economic Forum on East Asia* 2011;

b. Kunjungan PM Sükhbaataryn Batbold ke Bali Desember 2011 menghadiri *Bali Democracy Forum;*

c. Kunjungan Menludag Gombojav Zandanshatar ke Bali dalam rangka ARF, 23 Juli 2011.

Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi dan sosial budaya Indonesia – Mongolia telah terjalin baik dengan tren pertumbuhan positif.

Di bidang perdagangan, nilai perdagangan bilateral RI – Mongolia dalam 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Periode Januari – Agustus 2011 sebesar USD 4,45 juta, menurun 33,4% dibanding periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 6,69 juta. Total nilai perdagangan RI- Mongolia tahun 2010 sebesar USD 7,7 juta, tahun 2009 USD 3,7 juta dan tahun 2008 sebesar USD 3,35 juta.

Belum optimalnya kerja sama perdagangan dan investasi RI – Mongolia utamanya dikarenakan faktor geografis sehingga *cost* relatif tinggi dan juga minimnya animo kalangan usaha Indonesia untuk menggali potensi ekonomi Mongolia. Secara khusus Indonesia melihat potensi kerja sama pada bidang energi dan pangan.

Berkenaan dengan ini, pada tahun 2011, KBRI Beijing telah menyelenggarakan kegiatan promosi TTI di Ulaanbataar bulan Oktober 2011 dengan melibatkan instansi pemerintah dan kalangan swasta kedua negara. Beberapa sektor yang dijajaki adalah pertambangan, peternakan, *daily household products* dan minyak kelapa sawit.

Di bidang sosial budaya, kerja sama Indonesia – Mongolia lebih banyak tertuju pada *capacity buiding.*

Foto 58.Pertemuan Presiden RI dengan PM Mongolia di sela-sela*World Economic Forum on East Asia* 2011, Jakarta, 12 Juni 2011

Palau

Hubungan diplomatik dilakukan melalui KBRI Manila. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik. Sampai saat ini, telah dilaksanakan dua putaran perundingan perbatasan, yaitu pada bulan April dan Desember 2010.

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari Palau, yaitu *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*.

Papua Nugini

Hubungan bilateral antara Indonesia dan PNG terus meningkat di tahun 2011, khususnya di bidang ekonomi dan sosial dan budaya.

Bidang Politik

Pertemuan bilateral tingkat tinggi kedua negara dilaksanakan di Bali pada bulan Desember 2011. Presiden RI dan *Special Envoy* Papua Nugini telah bertemu di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* tanggal 8 Desember 2011.

Indonesia dan PNG senantiasa mengelola masalah perbatasan yang timbul sebagai negara yang bertetangga langsung. Masalah lintas batas (*border crossing*) menuntut pelaksanaan kerangka kerja sama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat perbatasan. Dalam hal ini, masalah kejahatan lintas batas seperti *illicit trade, illicit drug, human trafficking* atau *people smuggling* merupakan tantangan bagi kedua negara.

Di bidang perbatasan, telah dilaksanakan pertemuan ke-8 *Border Liaison Meeting* (BLM) di Jayapura, 18-20 April 2011. Sementara itu, pada tanggal 21-25 Juni 2011 telah diselenggarakan pertemuan ke-28 *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG di Batam, Kepulauan Riau. Kedua pihak sepakat untuk melakukan tinjau ulang *Basic Agreement on Border Arrangements between RI and PNG* yang telah ditandatangani pada tahun 2003, dan akan berakhir tahun 2013.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Kegiatan promosi (budaya, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pendidikan) untuk tahun 2011 tidak dilakukan secara khusus dan mandiri, namun dilakukan dengan kerja sama dalam berbagai kegiatan pihak-pihak lain (organisasi-organisasi sosial dan pendidikan).

Khusus di bidang pariwisata, Indonesia belum merupakan tujuan wisata masyarakat setempat. Menurut catatan, visa kunjungan yang dikeluarkan selama tahun 2010 berjumlah 327 lembar dan untuk tahun 2011 baru berjumlah 165 lembar.

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari PNG, antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific* Countriesdan *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di PNG tercatat sebanyak 1.010 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus, diantaranya: kasus satu orang repatrian sukarela dan mandiri asal Papua; WNI terdampar/terlantar; dan WNI yang mengalami masalah keimigrasian sebanyak dua orang.

Selain itu, mengingat berkembangnya kebutuhan terhadap tenaga asing secara cepat, sejalan dengan proyek-proyek yang sedang marak di PNG, maka Kemlu akan memberi perhatian yang semakin besar terhadap masalah-masalah yang terkait dengan legalitas dokumen para calon TKI yang akan masuk wilayah PNG.

Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK)

Hubungan bilateral antara RI dan RDRK selama tahun 2011 berjalan dengan baik.

Bidang Politik

Intensitas kerja sama politik RI – RDRK ditandai dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) di sela-sela penyelenggaraan perayaan 50 tahun Gerakan Non-Blok pada bulan Mei 2011 di Bali; dan
b. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) di sela-sela *18th ASEAN Regional Forum* pada bulan Juli 2011.

Pada kesempatan pertemuan Menlu RI dan Menlu RDRK di sela-sela penyelenggaraan perayaan 50 tahun Gerakan Non-Blok pada bulan Mei 2011 di Bali, kedua negara sepakat untuk terus berupaya mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam

Foto 59. Menlu RI dan Menlu RDRK, Bali, 23 Juli 2011

bidang perdagangan, investasi dan *people-to-people contact*. Khusus untuk kerja sama investasi, Korea Utara berkeinginan untuk mempelajari lebih jauh tentang pengembangan penanaman modal asing.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Volume perdagangan Indonesia-Korea Utara dari tahun ke tahun dan setiap tahun sejak 2006 mencapai nilai kurang dari USD 20 juta. Untuk bulan Januari-Agustus 2011, volume perdagangan bilateral mencapai USD 12,94 juta.

Di bidang perdagangan, produk Indonesia yang masuk ke RDRK masih berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang pameran yang dibawa oleh pengusaha Indonesia yang berpartisipasi dalam *Pyongyang International Trade Fair* yang diselenggarakan dua kali setahun, yakni pada saat musim semi dan musim gugur.

Penjajakan perdagangan dan investasi dilakukan oleh beberapa pengusaha Indonesia yang datang ke RDRK antara lain dalam pembuatan beberapa suku cadang motor, mesin pembuat peralatan, pembelian pupuk, penyedap rasa, pembelian batu marmer dan tawaran pembelian kapal berbagai jenis oleh RDRK.

Atas permintaan Korea Utara, Presiden RI telah memberikan arahan agar Indonesia sebagai negara sahabat dapat memberikan bantuan kepada Korea Utara yang mengalami kerawanan pangan. Maksud Indonesia untuk memberikan bantuan pangan kepada Korea Utara tengah dalam proses.

Samoa

Hubungan diplomatik RI dengan Samoa dilaksanakan melalui KBRI Wellington. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik.

Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh peserta dari Samoa, antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries*, *International Workshop on Multi Disaster Risk Management*,dan *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*.

Selandia Baru

Hubungan bilateral RI – Selandia Baru sepanjang tahun 2011 menunjukkan peningkatan.

Bidang Politik

Intensitas kerja sama politik RI – Selandia Baru ditandai dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menteri Imigrasi Selandia Baru di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process*, Bali, 30 Maret 2011;
b. Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menlu Selandia Baru di sela-sela KTM ke-16 GNB, Bali, 25 Mei 2011;
c. Kunjungan *Chief of NZ Police*, Commissioner Howard Broad dan Panglima Pertahanan Selandia Baru Major General Rhys Jones ke Indonesia;
d. Upaya penggalangan dukungan bagi keanggotaan RI pada organisasi/forum internasional;
e. Keketuaan Indonesia pada *ASEAN Committee in Wellington* (ACW);
f. Pada tanggal 9 September 2011 di Auckland, New Zealand, telah dilaksanakan pertemuan ke-4 *Joint Ministerial Commission* (JMC) RI-New Zealand.
g. Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menteri Imigrasi Selandia Baru di sela-sela

Pertemuan Bali Democracy Forum IV, Bali, 9 Desember 2011;

Foto 60.Menlu RI dan Menteri Imigrasi Selandia Baru di sela-sela Pertemuan *Bali Democracy Forum* IV, Bali, 9 Desember 2011

Selain itu, capaian di bidang politik dan pertahanan keamanan antara lain dapat dilihat melalui:

a. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemberantasan Penyelundupan Manusia dan Terorisme pada 7 Januari 2011 oleh Kepolisian RI dan Selandia Baru;
b. Konsistensi komitmen Selandia Baru melalui JMC III 2010 untuk terus menghormati dan menjamin dukungan atas integritas teritorial RI dan memandang isu Papua sebagai isu domestik RI;
c. Penggalangan dukungan atas pencalonan RI di berbagai organisasi/forum internasional juga telah membuahkan hasil, dimana semua dukungan tersebut bersifat non-resiprokal;
d. Pembentukan Indonesia-New Zealand *Friendship Council* dan *Parliamentary Friends of Indonesia*;
e. Selama tahun 2011 telah ditandatangani 2 (dua) kesepakatan antara RI dan Selandia Baru, yakni *Arrangement on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes*, Januari 2011; dan *Arrangement on Educational Cooperation*, Juli 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Perkembangan perdagangan bilateral kedua negara sampai dengan akhir Agustus 2011 mencapai USD721 juta. Neraca perdagangan menunjukkan Selandia Baru surplus sebesar USD267 juta. Dilain pihak ekspor Selandia Baru mengalami penurunan sekitar 5%.

Produk-produk utama Selandia Baru yang diekspor ke Indonesia adalah *dairy products* sementara ekspor Indonesia utamanya adalah produk oli padat, minyak mentah, karet, ban, batubara, *furniture* dan makanan olahan.

Terkait isu *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA), Indonesia telah meratifikasi perjanjian AAZFTA per tanggal 6 Mei 2011 melalui Perpres No. 26 Tahun 2011. Pada tanggal 14 November 2011, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan secara resmi Nota Diplomatik mengenai Notifikasi penyampaian Piagam Pengesahan dari Menteri Luar Negeri RI kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan negara-negara anggota ASEAN, Kedutaan Besar Australia dan Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta yang menjelaskan bahwa Indonesia telah memenuhi prosedur internal Pengesahan bagi berlakunya Persetujuan AANZFTA dimaksud. Perjanjian AANZFTA akan mulai berlaku efektif bagi Indonesia pada tanggal 10 Januari 2012.

Terkait akreditasi halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melakukan proses re-verifikasi bagi badan akreditasi halal Selandia Baru.

Foto 61.Pertemuan ke-4 JMC RI-New Zealand, Auckland, 9 September 2011

Mengingat pentingnya konektivitas di kawasan, kedua Menlu mengharapkan agar Garuda Indonesia dapat kembali menjalani rute penerbangan langsung Indonesia-Selandia Baru.

Kegiatan di bidang sosial budaya ditandai dengan kunjungan Menteri Pendidikan Selandia Baru, Hon. Anne Toley pada Pertemuan para Menteri Pendidikan EAS di Bali tanggal 12-19 Juli 2011; partisipasi Indonesia di berbagai acara budaya dan festival; penyerahan sumbangan kepada korban tsunami di Mentawai dan Gunung Merapi sebagai hasil dari *Charity Bazaar* yang dilakukan di KBRI Wellington dan sumbangan masyarakat ASEAN dan Indonesia.

Capaian di bidang sosial budaya antara lain: penandatanganan kerja sama pendidikan "*Arrangement between the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Education of New Zealand on Educational Cooperation*"; keikutsertaan 1 orang jurnalis untuk FEALAC *Fam Trip* 2011 di Indonesia; pemberian sumbangan untuk korban Merapi melalui PMI sebesar NZ 6,541.31 dan korban Mentawai melalui SurfAid sebesar USD 4,952.40.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, jumlah WNI di Selandia Baru tercatat sebanyak 3.425 orang, dengan jumlah kasus sebanyak 42kasus.

Kegiatan dan capaian di bidang kekonsuleran antara lain:

a. Penyuluhan penanganan bencana gempa;
b. Pelaksanaan "Warung Konsuler" di kota Christchurch dan Auckland;
c. Penanganan kecelakaan kerja ABK WNI di Christchurch;
d. Penanganan sekitar 300 WNI korban gempa bumi di Christchurch khususnya 4 orang yang mengalami luka dan kerugian akibat rumah rusak;
e. Penanganan kecelakaan kerja ABK WNI di Tauranga melalui kerja sama dengan KBRI Madrid sehingga asuransi keselakaan dan transportasi pemulangan ke Indonesia dapat dibayarkan oleh Perusahaan di Spanyol;
f. Penanganan kecelakaan kerja ABK "Oyang 77" dan penanganan kasus pemogokan kerja 32 ABK "Oyang 75' di Christchurch.

Vanuatu

Hubungan diplomatik Indonesia – Vanuatu dilakukan melalui KBRI Canberra.

Bidang Politik

Hubungan bilateral kedua negara di bidang politik semakin konstruktif yang ditandai dengan sikap Vanuatu yang semakin positif terhadap integritas teritorial Indonesia serta dukungan Vanuatu bagi diterimanya Indonesia sebagai peninjau dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)*, Maret 2011.

Vanuatu merupakan tuan rumah dari Sekretariat MSG.

Peningkatan kerja sama politik RI – Vanuatujuga ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri dan Menlu Vanuatu ke Jakarta tanggal 18-22 Desember 2011.

Foto 62. Presiden RI dan PM Vanuatu
Jakarta, 21 Desember 2011

Peningkatan kerja sama politik RI – Vanuatu juga ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Vanuatu dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Vanuatu ke Jakarta pada tanggal 18 – 22 Desember 2011. Dalam kunjungan ini, PM Vanuatu telah bertemu dengan Presiden RI. Menlu RI dan Menlu Vanuatu juga melakukan pertemuan bilateral.

Dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu telah melakukan penandatanganan *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation/Development Cooperation Agreement* (DCA). DCA merupakan landasan utama bagi kemitraan yang lebih stabil antara kedua negara berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing, persatuan, integritas teritorial dan prinsip non-intervensi terhadap urusan internal masing-masing.

Dalam kunjungan tersebut, Menlu Vanuatu memberikan penegasan bahwa Vanuatu sepenuhnya menghormati kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan selalu menganggap Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia. Vanutu juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait persoalan Papua dengan pemberian otonomi khusus bagi daerah tersebut.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam rangka peningkatan *people-to-people contact* telah dilakukan *workshop* angklung di ibukota Port Villa, pada Mei 2011. Indonesia merencanakan pengiriman ahli/pengajar keterampilan maupun kerajinan untuk kelompok masyarakat tertentu di Vanuatu.

Beberapa *training* dan peningkatan kapasitas telah dilaksanakan seperti keikutsertaan diplomat Vanuatu di Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Kemlu, *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries* dan *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*.

Foto 63. Penandatanganan *Development Cooperation Agreement* oleh Menlu RI dan Menlu Vanuatu
Jakarta, 21 Desember 2011

III.3.1.2 Kawasan Asia Selatan dan Tengah

Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang mencakup 15 negara (Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgystan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) memiliki arti penting dan menjadi lingkaran kedua kebijakan geostrategis politik luar negeri RI setelah kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kawasan ini dihuni sekitar 1,7 miliar orang mulai dari Maladewa yang berpenduduk sekitar 300.000 jiwa hingga India yang populasinya mencapai 1,2 miliar. Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan semua negara di kawasan ini kecuali Bhutan.

Upaya peningkatan hubungan ekonomi telah dilakukan melalui berbagai langkah seperti Sidang Komisi Bersama dan *Trade Negotiating Committee* dengan negara-negara mitra. Pentingnya kawasan ini juga tercermin dari keputusan Pemerintah RI untuk membuka Perwakilan RI di Azerbaijan (KBRI Baku) dan Kazakhstan (KBRI Astana).

Afghanistan

Sepanjang tahun 2011 hubungan bilateral RI-Afghanistan menunjukkan peningkatan.

Bidang Politik

Hubungan kedua negara di bidang politik diwarnai oleh upaya Indonesia untuk mendukung upaya bagi rekonstruksi dan rekonsiliasi di Afghanistan. Hal ini ditandai antara lain dengan partisipasi aktif

Foto 64 Menlu RI dan Menlu Afghanistan,
Bali, 25 Mei 2011

Indonesia di konferensi internasional mengenai Afghanistan, seperti *London Conference* (Januari 2010), *Kabul Conference* (Juli 2010), dan *International Afghanistan Conference*, 5 Desember 2011, di Bonn Jerman. Dalam setiap konferensi tersebut, Indonesia senantiasa menggarisbawahi komitmennya untuk upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi di Afghanistan, khususnya melalui bantuan *capacity building*.

Pada pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Afghanistan, H.E. Dr. Zalmai Rassoul, di sela-sela KTM GNB XVI di Bali, tanggal 25 Mei 2011, kedua Menlu menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang politik, Indonesia telah menginisiasi pembentukan Forum Konsultasi Bilateral RI-Afghanistan, dimana *draft* MoU sebagai payung pembentukan forum ini telah siap untuk ditandatangani.

Pada tanggal 5 Desember 2011, Menlu RI telah menghadiri Konferensi Internasional mengenai Afghanistan di Bonn, 5 Desember 2011. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang kedua kalinya diselenggarakan di Bonn, Jerman (sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2001). Pada pidatonya di konferensi tersebut, Menlu RI menyumbang 5 pemikiran Indonesia dalam membantu Afghanistan untuk mengembangkan potensinya secara penuh, yaitu:

1. Meningkatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan aktual rakyat Afghanistan dan ditujukan untuk mendukung mereka dalam upaya mereka untuk membangun kembali negaranya, bergerak maju dan mencapai kesejahteraan;
2. Penguatan proses politik yang berbasis masyarakat luas secara terus-menerus di Afghanistan perlu didorong agar rekonsiliasi dapat dicapai dan dipertahankan melalui pembentukan lembaga-lembaga demokratis dan supremasi hukum;
3. Komunitas internasional perlu terus mendukung upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh Afghanistan, khususnya upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang berkesinambungan bagi rakyatnya.
4. Pentingnya kerja sama regional untuk perdamaian dan stabilitas tidak dapat diabaikan. Komunitas internasional harus berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kerja sama regional yang berkesinambungan.
5. Agar proses rekonsiliasi, pembangunan kembali dan transisi di Afghanistan dapat berkesinambungan, keempat pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Sampai dengan bulan Agustus 2011, perdagangan Indonesia-Afghanistan mengalami surplus di pihak Indonesia berjumlah lebih kurang USD 24,5 juta.Produk Indonesia yang diekspor ke Afghanistan antara lain adalah *furniture,* pecah belah, obat-obatan, peralatan elektronik, produk logam, mesin, tekstil, suku cadang kendaraan dan produk kayu.

Ketertarikan pengusaha Afghanistan terhadap produk Indonesia dapat dilihat dari kunjungan 49 (empat puluh sembilan) delegasi pengusaha Afghanistan, tanggal 19-23 Oktober 2011, untuk menghadiri *Trade Expo Indonesia* (TEI) ke-26 di

Jakarta. Antusiasme pengusaha Afghanistan untuk berkunjung dan melakukan kunjungan bisnis dengan Indonesia tidak terlepas dari semakin dikenalnya nama dan produk Indonesia serta kedekatan sosial budaya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Foto 65. Menlu RI dan Ketua Parlemen Afghanistan, Jakarta, 16 Desember 2011

Ind ntu Afghanistan dalam upaya rekonstruksi di Afghanistan. Selama tahun 2011, berbagai program bantuan *capacity buliding* telah diberikan Indonesia kepada Afghanistan, antara lain:

a) Studi *banding* pemilihan umum;
b) *Training Program on Public Administrative Reform for Good Governance;*
c) *International Training Program on Appropriate Waste Management Technologies;*
d) *Workshop on Disaster Risk Management;*
e) *Training Program on Integrated Maternal, Neonatal, and Child Health Services;*
f) *Third Country Training Program on Public Health ;*
g) *Third Country Training Program on Empowering Women through Social Economic and Culture;*
h) *Training on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables;* dan
i) *Third Country Training Program of Artificial Insemination on Dairy Cattle.*

Bidang Kekonsuleran dan Tenaga Kerja

Sampai dengan bulan November 2011, tercatat 53 WNI bermukim di Afghanistan.

Azerbaijan

Hubungan diplomatik RI-Azerbaijan mengalami peningkatan ditandai dengan dibukanya perwakilan RI di Baku.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan kedua negara di bidang politik ditandai dengan pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri, di sela-sela KTM GNB XVI, tanggal 25 Mei 2011 di Bali dan Pertemuan ke-38 Dewan Menlu OKI, tanggal 28-30 Juni 2011, di Astana, Kazakhstan. Pada kedua pertemuan tersebut, kedua Menteri Luar Negeri menyepakati untuk meningkatkan kerja sama bilateral, terutama di bidang perdagangan.

Disamping itu, tercatat pada tahun 2011 terdapat kunjungan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke Azerbaijan tanggal 19-23 Oktober 2011. Selama di Azerbaijan, delegasi MK RI didampingi oleh KUAI RI Baku telah melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi Azerbaijan. Dari kunjungan tersebut telah disepakati untuk melakukan upaya peningkatan kerja sama di berbagai bidang antar MK kedua negara, khususnya melalui upaya pembentukan MoU antar kedua MK yang akan menjadi payung kerja sama lebih lanjut.

Foto 66. Pertemuan bilateral Menlu RI –Menlu Azerbaijan, Bali, 25 Mei 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Salah satu indikator peningkatan kerja sama bilateral bidang ekonomi dan perdagangan yaitu peningkatan nilai perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 yang mencapai USD

1,534 milyar. Nilai ini naik sebesar 167% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,532 milyar.

Kegiatan KBRI Baku di bidang promosi pada periode Januari – Juni 2011, antara lain:

- Promosi kebudayaan (penampilan tarian) dan barang-barang kerajinan Indonesia (pameran Batik Klasik) pada resepsi pembukaan KBRI Baku, tanggal 4 Maret 2011; dan
- Keikutsertaan pada *1st International Festival* yang diselenggarakan oleh Azerbaijan *Diplomatic Academy*.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai akhir Juni 2011, WNI di Azerbaijan berjumlah 35 orang.

Bangladesh

Bangladesh merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah yang cukup aktif melakukan kunjungan ke Indonesia selama semester I tahun 2011 dan memiliki perdagangan yang aktif dengan Indonesia.

Bidang Politik

Pada tahun 2011 ini, Presiden RI telah bertemu dengan PM Bangladesh PM Bangladesh Sheikh Hasina Wajed, di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum* IV, di Bali, 7 Desember 2011. Pada kesempatan tersebut, Bangladesh bersama dengan Indonesia menjadi *co-chair*pertemuan BDF IV. Sedangkan di tingkat Menlu, Menlu Bangladesh tercatat telah melakukan pertemuan dengan Menlu RI di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* (BRMC IV), di Bali, pada tanggal 30 Maret 2011.

Selain itu, tercatat juga kunjungan Delegasi Parlemen dan *Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs* (MoLJPA) Bangladesh ke Indonesia, pada tanggal 16-20 September 2011. Delegasi Parlemen Banglades tersebut dipimpin oleh Suranjit Sengupta, *Chairman of Parliamentary Standing Committee for MoLJPA*. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi banding sekaligus mendapatkan masukan untuk penguatan *Anti Corruption Commission of Bangladesh* (ACC).

Foto 67. Pertemuan bilateral Presiden RI – PM Bangladesh di sela-sela *Bali Democracy Forum* IV di, Bali, 7 Desember 2011

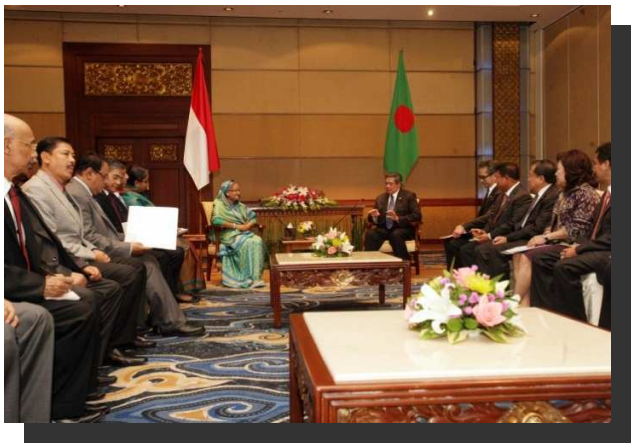

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan antara Bangladesh dan Indonesia difasilitasi dengan adanya Sidang Komisi Bersama (SKB) yang telah dilakukan 2 kali, yang masing-masing berlangsung di Dhaka, 24-25 Juli 2007 dan di Bukittinggi, 8-9 Agustus 2011.

Salah satu indikator peningkatan kerja sama bilateral bidang ekonomi dan perdagangan yaitu peningkatan nilai perdagangan kedua negara periode Januari-Juni 2011, yang mencapai USD 705 juta. Naik dari periode yang sama pada tahun 2010 yang mencapai USD 468 juta, dengan surplus di pihak Indonesia sebanyak USD 656,5 juta.

Foto 68. Menlu RI – Menlu Bangladesh, Bali, 23 Juli 2011

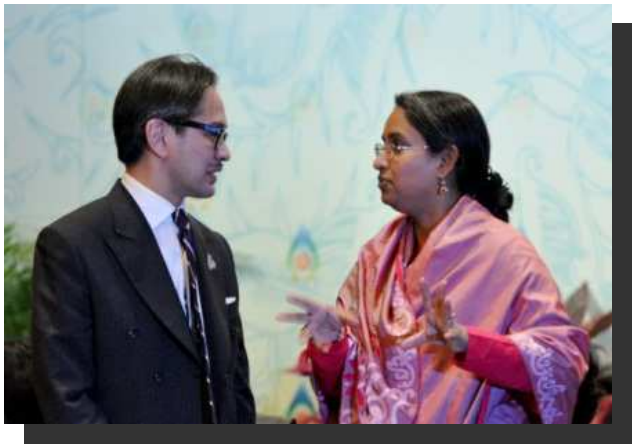

Menteri Kesehatan RI telah melakukan kunjungan ke Bangladesh pada bulan April 2011 guna menghadiri Konferensi Autisme Internasional di Dhaka. Konferensi tersebut telah dimanfaatkan oleh para ahli autisme Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai penanganan kesehatan khususnya bagi penderita autisme.

Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga telah berkunjung ke Dhaka pada bulan April 2011 untuk menghadiri Pertemuan tahunan Tingkat Menteri *Dhaka Consultation* dari *Regional Consultative Process on the Management of Overseas Employment and Contractual Labour for Countries of Origins in Asia* atau yang lebih dikenal sebagai '*The Colombo Process*'. Pertemuan tersebut telah menghasilkan berbagai kesepakatan dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja migran serta keberadaan mereka.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Guna mendukung semakin meningkatnya *people-to-people contacts* dan kerja sama bilateral RI-Bangladesh, pemerintah RI saat ini tengah memfinalisasi pencabutan status *calling visa* bagi WN Bangladesh, mengingat situasi dan kondisi di negara tersebut yang semakin kondusif.

Iran

Di tahun 2011, kedua negara telah melaksanakan berbagai kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan guna meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Iran.

Bidang Politik

Sampai pertengahan tahun 2011, jumlah kunjungan delegasi dan tamu dinas baik pemerintah maupun swasta dari Indonesia ke Iran dan sebaliknya telah menunjukan peningkatan. Kunjungan setingkat menteri antara lain kunjungan Menteri Pertanian Iran ke Indonesia pada tanggal 23 Februari 2011, kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Indonesia pada bulan Mei 2011, dan kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia ke Iran pada tanggal 17-18 Mei 2011, dalam kerangka menghadiri 2nd D-8 *Agricultural Meeting on Food Security*.

Pada tanggal 1-2 Oktober 2011, Delegasi RI menghadiri undangan Pemimpin Tertinggi Iran untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif pada the *5th Conference on Support for the Palestine* di Tehran, Iran. Delegasi RI dalam konferensi ini dipimpin oleh Ketua MPR RI. Di sela-sela konferensi, Ketua MPR RI melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Iran dan Ketua Parlemen Iran (*Islamic Consultative Assembly*). Adapun isu yang dibahas dalam kedua pertemuan tersebut diantaranya mengenai upaya meningkatkan kerja sama bilateral.

Foto 69.Menlu RI dan Menlu Iran di sela-sela SMU PBB ke-66, New York, 26 September 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Berbagai upaya untuk memfasilitasi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengadakan *business forum* dan kegiatan promosi investasi, perdagangan diantaranya:

a) *Indonesia-Iran Business Forum*, di Jakarta tanggal 14 Februari 2011;
b) *Indonesia-Iran Business Forum*, di Jakarta tanggal 30 Mei 2011;

Volume perdagangan Indonesia-Iran pada kurun waktu Januari-Agustus 2011 sebesar USD 1,3 milyar, meningkat tajam dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 92,2%.

Sementara itu, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata diantaranya adalah:

a) Partisipasi dalam *The 2nd PersianTravel Market Exhibition* yang dilaksanakan di Tehran, Iran pada tanggal 8 – 10 Juni 2011;
b) Pameran Promosi Indonesia di Universitas Tehran, tanggal 10 Mei 2011.

Pada tanggal 28 April 2011 berlangsung the 3rd *Working Group Meeting on Tourism* RI-Iran di Banda Aceh. Delegasi RI dipimpin oleh Staf Ahli Menbudpar Bidang Hubungan Antar Lembaga. Sementara Delegasi Iran dipimpin oleh Dubes Iran untuk Indonesia dengan didampingi oleh pejabat dari *Iranian Cultural Heritage*, *Handicrafts and Tourism Organization* (ICHTO) dan*Iranian Tour Operators Association* (ITOA), serta dua orang staf Kedubes Iran di Jakarta.

Kedua pihak menyepakati untuk memperbaharui *Arrangement on Tourism Cooperation Years 2006-2009* yang telah habis masa berlakunya. Adapun bidang kerja sama yang disepakati meliputi *research and development, education and training, tourism marketing, tourism investment, dan private sectors.*

Disamping itu, di bidang kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, pada tanggal 12-13 Maret 2011 telah diselenggarakan *3rd Meeting of the Joint Committee for Research and Technology* RI-Iran di Tehran, Iran.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga bulan Oktober 2011, jumlah WNI yang berada di Iran sebanyak 483 orang, dengan jumlah terbesar sebanyak 164 orang sebagai pelajar/mahasiswa. Sebanyak 3 orang WNI tersangkut kasus narkotika di Iran.

Sementara itu, dalam hal perlindungan WNI, selain pelayanan dan pendampingan ditujukan pada penyelesaian masalah TKI ilegal yang mengalami *overstay*, fasilitasi penyelesaian masalah gaji pada TKI profesional yang bekerja di sektor minyak dan angkutan penerbangan, pendampingan terhadap WNI yang memiliki permasalahan dengan aparat keamanan juga menjadi perhatian dan fokus utama Pemri.

Selama tahun 2011, KBRI Tehran telah dua kali melakukan Pelayanan Konsuler "*one day service*" (9-10 Agustus dan 26-27 Oktober 2011). Disamping itu, pada tanggal 13-17 Oktober 2011, Satgas Perlindungan WNI yang terdiri dari sejumlah kementerian Indonesia terkait juga telah berkunjung ke Tehran, untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Iran dan KBRI Tehran dalam upaya perlindungan WNI di Iran.

Kazakhstan

Hubungan RI-Kazakhstan terus berkembang dengan baik dan tercermin, antara laindengan telah dibukanya KBRI Astana secara resmi oleh Menlu RI pada tanggal 29 Desember 2010 di Jakarta.

Bidang Politik

Semenjak dibukanya KBRI Astana,intensitas saling kunjung pejabat tinggi antara kedua negara semakin meningkat, antara lain ditandai kunjungan Wakil Menlu Kazakhstan, H.E. Yerzhan Kazykhanov, ke Indonesia pada tanggal 4-5 April 2011, kunjungan Wakil Menlu Kazakhstan Kairat Sarubay menghadiri KTM GNB ke-16 pada 25-26 Mei 2011, serta kunjungan Ketua Dewan Konstitusi Kazakhstan Igor Rogov pada bulan Mei 2011.

Kunjungan Ketua Dewan Konstitusi Kazakhstan ini dibalas dengan kunjungan delegasi Mahkamah Konstitusi RI ke Astana pada tanggal 23-25 Oktober 2011, yang diikuti pula oleh Ketua MK, Mahfud M.D. Selama kunjungan tersebut, delegasi MKRI telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung dan berbagai pihak terkait lainnya di Kazakhstan guna bertukar pikiran dan berbagi pengalaman mengenai perkembangan demokrasi, serta rencana untuk mengadakan MoU Kerja Sama Konstitusi RI-Kazakhstan yang rencananya akan ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2012.

Foto 70.Menlu RI dan Menlu Kazakhstan di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 19 September 2011

Wakil Presiden RI juga telah berkunjung ke Kazakhstan, dan berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Kazakhstan, H.E. Nursultan Nazarbayev di sela-sela *World Islamic Economic Forum* (WIEF) di Astana, 7-9 Juni 2011. Menlu RI juga berkesempatan berkunjung ke Kazakhstan dalam rangka menghadiri KTM OKI ke-38 di Astana, 28-30 Juni 2011, dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Kazakhstan.

Foto 71.Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI dalam rangka menghadiri *7th World Islamic Economic Forum*, Astana, 7-9 Juni 2011

Selain itu, di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, September 2011, Menlu RI telah bertemu dengan Menlu Kazakhstan, H.E Mr. Yerhan Kazykhanov. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang baik dari Pemerintah Kazakhstan kepada delegasi Indonesia pada sesi ke-38 KTM OIC di Astana dan kepada Wapres RI pada pertemuan ke-7 *World Islamic Economic Forum* di Astana bulan Juni 2011 lalu. Kedua pihak telah membahas berbagai kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Bidang Ekonomi dan Perdagangan

Pada periode Januari-Agustus 2011, total perdagangan RI-Kazakhstan mencapai USD 24,7 juta, meningkat 39,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 yang hanya sebesar USD 17,7 juta.

Selain itu, Indonesia dan Kazakhstan tengah menjajaki peluang kerja sama di bidang energi. PT Pertamina telah mengadakan kunjungan ke Kazakhstan dalam rangka menghadiri *Forum Energy* ke-4 di Astana pada 3-5 Oktober 2011. PT. Pertamina juga akan membuka kantor perwakilan di Astana dan direncanakan beroperasi mulai awal tahun 2012.

Kyrgyzstan

Hubungan bilateral RI dengan Kyrgyzstan memasuki babak baru di tahun 2011 ini, yang ditandai dengan penandatanganan dua kesepakatan oleh Menlu RI dan Menlu Kyrgyzstan pada 23 September 2011 di New York di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-66.Kedua kesepakatan tersebut adalah Nota Kesepahaman Pembentukan Kerja Sama Konsultasi Bilateral RI-Kyrgyzstan dan Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Kyrgyzstan.

Bidang Politik

Saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara juga makin intensif, diantaranya kunjungan Ketua Parlemen Kyrgyzstan, H.E. Akhmatbek Keldibekov yang didampingi oleh Deputi Menteri Luar Negeri Kyrgyztan, H.E. Nurlan Aitmurzaev ke Indonesia pada tanggal 12-15 Juli 2011. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Parlemen Kyrgyzstan beserta rombongan berkesempatan untuk melakukan *courtesy call* kepada Ketua DPR RI, Wakil Presiden RI, dan Menlu RI.

Di sela-sela pertemuan dengan Ketua DPR RI diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja sama diantara *Jogorku Kenesh* dan DPR-RI. Nota Kesepahaman ini kiranya dapat menjadi titik tolak peningkatan kerja sama dan hubungan diantara kedua Parlemen, yang pada gilirannya dapat mendukung berbagai hubungan dan kerja sama bilateral yang dilaksanakan oleh kedua pemerintah.

Foto 72.Menlu RI dan Ketua Parlemen Kyrgyzstan (tengah) yang didampingi oleh Deputi Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan, Jakarta, 13 Juli 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam hubungan perdagangan RI-Kyrgzstan, total perdagangan bilateral periode Januari-Agustus 2011 adalah sebesar USD 2,74 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar 25,6% jika dibandingkan peride yang sama pada tahun sebelumnya USD 3,68 juta.

Foto 73. Menlu RI dan Menlu Kyrgyzstan pada Peresmian Pembukaan Hubungan DIplomatik RI dan Kyrgztan, New York, 23 September 2011

Pertemuan bilateral antara pejabat tinggi RI dengan Pejabat tinggi Kyrgyzstan juga terus dilakukan, diantaranya pertemuan Direktur Jenderal Aspasaf dengan Wamenlu Kyrgyzstan di sela-sela KTM GNB di Bali pada ke-16 di Bali, 25-27 Mei 2011 dan pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Kyrgyzstan di sela-sela KTM OKI ke-38, di Astana, Kazakhstan pada 28-30 Juni 2011.

Dalam hubungan perdagangan RI-Kyrgzstan, total perdagangan bilateral periode Januari-Agustus 2011 adalah sebesar USD 2,74 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar 25,6% jika dibandingkan peride yang sama pada tahun sebelumnya USD 3,68 juta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga bulan Oktober 2011, tercatat sejumlah 16 WNI di Kyrgyzstan.

Maladewa

Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral Indonesia-Maladewa terus berkembang dan berpotensi diperkuat menjadi lebih erat dan saling menguntungkan.

Pada tanggal 28-29 Januari 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan RI melakukan kunjungan ke Maladewa guna memperkuat kerja sama di bidang perikanan dan kelautan. Kedua negara juga memiliki posisi yang sama di bidang perubahan iklim, mengingat Indonesia dan Maladewa merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi bilateral RI-Maladewa cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, dan belum mencapai taraf yang diharapkan. Hal ini terjadi karena letak Maladewa yang cukup terpencil serta tidak adanya transportasi langsung antara kedua negara. Produk-produk Indonesia yang diimpor Maladewa antara lain pecah belah, produk olah raga, parfum, barang kerajinan, dan perlengkapan kantor. Selama kurun waktu Januari-Agustus 2011, volume perdagangan kedua negara mencapai USD 14 juta, atau turun sekitar 5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah melakukan kunjungan ke Maladewa tanggal 28-29 Januari 2011 dan telah menandatangani *Letter of Intent* antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Kementerian Pertanian Republik Maladewa

mengenai kerja sama perikanan, perikanan budidaya dan manajemen pulau-pulau kecil.

Sementara itu, Menteri Pembangunan Ekonomi Maladewa, Mahmood Razee, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Privatisasi Maladewa, telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 13-16 September 2011 guna mendiskusikan peningkatan kerja sama dengan Pemerintah RI dan pihak swasta di Indonesia di bidang perdagangan, konstruksi, pengembangan usaha kecil menengah, dan pengembangan budidaya perikanan.

Sepanjang tahun 2011, pejabat-pejabat Maladewatelah mengikuti pelatihan *International Training Program on Public Administration Reform for Good Governance* dan *International Workshop on Multi Disaster Risk Management* di Indonesia.

Bidang Kekosuleran dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan catatan KBRI Colombo, saat ini terdapat kurang lebih 600WNI yang pada umumnya bekerja di berbagai *resort* di Maladewa sebagai*spa therapist*.

Nepal

Hubungan diplomatik RI dengan Nepal dilaksanakan melalui KBRI Dhaka, dan berlangsung dengan baik, yang ditandai dengan meningkatnya kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya, dan pariwisata.

Foto 74.Menlu RI dan Menlu Nepal di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 20 September 2011

Pada bulan September 2011, di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Menlu RI telah bertemu dengan Menlu Nepal, Narayan Kaji Shrestha. Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan hubungan bilateral kedua negara saat ini berjalan dengan baik dan kuat, serta tantangan dalam peningkatan hubungan yang lebih tinggi antar kedua negara, diantaranyaadalah terjalinnya *people-to-people contact* antar kedua negara, peningkatan investasi dan perdagangan, serta kerja sama di forum multilateral yang lebih erat. Indonesia dan Nepal memiliki pandangan dan pendekatan yang sama dalam forum multilateral.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Nepal mencapai USD 19,1 juta pada periode Januari-Agustus 2011 mengalami kenaikan sebesar 108% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana Indonesia mengalami surplus perdagangan sekitar USD 19 juta. Produk-produk andalan ekspor Indonesia ke Nepal antara lain CPO, kertas, ban mobil, alas kaki, pelumas, dan rokok kretek. Selain itu, terdapat 77 jumlah kunjungan wisata dari Nepal, yaitu mengalami peningkatan sebesar 300% dari tahun-tahun sebelumnya.

Pakistan

Selama tahun 2011, hubungan diplomatik RI dengan Pakistan berlangsung dengan baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Bidang Politik

selama tahun 2011, Menteri Luar Negeri kedua negara telah bertemu sebanyak dua kali. Di sela-sela Pertemuan Menteri-menteri ARF, 23 Juli 2011, di Bali, Menlu RI telah bertemu dengan Menlu Pakistan, H.E. Ms. Hina Rabbani Khar. Pada pertemuan tersebut, telah dibahas beberapa isu, diantaranya: penguatan dan peningkatan hubungan bilateral yang sudah berjalan dengan baik di berbagai bidang, khususnya di bidang perdagangan. Di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis

Umum PBB di New York, September 2011, kedua Menlu telah mengadakan pertemuan bilateral. Dalam kesempatan tersebut Menlu RI antara lain menyampaikan kembali keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di Pakistan, dan Indonesia dalam hal ini telah mengirim bantuan obat-obatan dan tim kesehatan ke Pakistan sejumlah 19 orang dokter, paramedik, dan ahli demam berdarah guna membantu penanganan wabah demam berdarah di Lahore, Prov. Punjab, pada tanggal 1-12 Oktober 2011.

Selain itu, pejabat tinggi Indonesia lain yang telah melakukan kunjungan ke Pakistan adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi RI yaitu ke Islamabad pada bulan Januari 2011, guna menghadiri Konferensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diselenggarakan oleh COMSTECH dalam kerangka kerja sama negara-negara anggota OKI.

Di bidang keamanan, Kelompok Kerja Pemberantasan Terorisme (*Joint Working Group on Combating International Terrorism*/JWG-CIT) dalam rangka pencegahan terorisme dan radikalisme antara kedua negara telah bersidang pada bulan Juli tahun 2007. Pertemuan Kedua (JWG-CIT 2) telah dilaksanakan di Indonesia pada bulan Desember 2010 dan Pertemuan Ketiga (JWG-CIT 3) dilaksanakan di Pakistan pada bulan September 2011. Hasil-hasil dari pertemuan tersebut diantaranya saling kunjung dan penjajakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan saling kunjung para penegak hukum, tukar menukar informasi intelijen antara kedua negara. Terkait dengan kerja sama anti terorisme ini, KBRI Islamabad telah berhasil memfasilitasi pemulangan tersangka pelaku Bom Bali I, Umar Patek ke Indonesia pada bulan Agustus 2011.

Foto 75.Menlu RI dan Menlu Pakistan di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 20 September 2011

Indonesia juga telah mengirimkan KRI Sultan Iskandar Muda guna berpartisipasi pada *Naval Exercises Aman 2011* yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut Pakistan di Karachi pada bulan Maret 2011.

Pakistan mendukung Keketuaan Indonesia dalam ASEAN dan meminta dukungan Indonesia untuk dapat meningkatkan peran Pakistan dari Mitra Wicara Sektoral menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Indonesia dan Pakistan telah menyelenggarakan *The 8th Trade Negotiating Committee (TNC) Indonesia – Pakistan* pada tanggal 15 – 16 September 2011 di Jakarta. Hasil penting dari pertemuan tersebut adalah disepakatinya permintaan Indonesia atas tarif bea masuk *palm oil* Indonesia menjadi setara dengan bea masuk *palm oil* asal Malaysia (yang telah mempunyai FTA dengan Pakistan), yaitu 0%. Sementara itu, Indonesia telah menyetujui bea masuk 0% untuk komoditi jeruk Kinnow Pakistan dan beberapa pemotongan tarif atas berbagai produk Pakistan. Penandatanganan *Preferrential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan Pakistan direncanakan akan dilaksanakan pada semester pertama tahun 2012.

Total nilai perdagangan Indonesia-Pakistan dari Januari-Agustus 2011 mencapai USD 711 juta. Surplus Indonesia sebesar USD 439 juta.

Selain itu, Indonesia dan Pakistan telah menyepakati suatu *Pakistan-Indonesia Business Forum* dengan ditandatanganinya *Memorandum of Association* oleh Dubes RI Islamabad, H.E. Ishak Latuconsina pada tanggal 16 Oktober 2011 di Islamabad. Pembentukan PIBF ini diharapkan pada saatnya dapat mendukung pelaksanaan PTA Indonesia dan Pakistan.

Sebanyak 60 orang pengusaha asal Pakistan juga telah menghadiri pelaksanaan *Trade Expo Indonesia* di Jakarta pada tanggal 19-23 Oktober 2011, dan sebanyak 7 pengusaha Indonesia telah

berpartisipasi pada ekspo perdagangan *My Karachi* pada bulan Juli 2011.

KJRI Karachi juga telah menyelenggarakan *Indonesia Solo Expo* di Karachi pada tanggal 18-20 November 2011 dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan pariwisata antara Indonesia-Pakistan melalui kegiatan promosi produk, obyek wisata, dan temu bisnis.

Menteri Negara Riset dan Teknologi RI telah melakukan kunjungan ke Islamabad pada bulan Januari 2011, guna menghadiri Konferensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diselenggarakan oleh COMSTECH dalam kerangka kerja sama negara-negara anggota OKI.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga saat ini tercatat 620 WNI yang menetap di Pakistan.

Sri Lanka

Selama tahun 2011, Indonesia telah melaksanakan kegiatan – kegiatan di berbagai bidang dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara yang semakin dinamis dari tahun ke tahun.

Bidang Politik

Pertemuan tingkat pejabat tinggi kedua negara pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa kali. Salah satunya adalah kunjungan Menlu Sri Lanka, Prof. G.L. Peiris, ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTM ke-16 GNB di Bali bulan Mei 2011 dan Pertemuan ke-18 ASEAN Regional Forum di Bali bulan Juli 2011.

Pada kedua kunjungan tersebut telah dilakukan pertemuan bilateral antara Menlu RI dengan Menlu Sri Lanka. Pada pertemuan bilateral tersebut, dibahas antara lain: kerja sama dalam rangka perlindungan tenaga kerja di luar negeri, kerja sama dalam konteks GNB, dan penyelesaian para pencari suaka asal Sri Lanka di Indonesia.

Menlu RI juga telah bertemu dengan Menlu Sri Lanka di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB di New York, September 2011. Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu sepakat mengenai adanya kerja sama yang erat saling dukung pencalonan kedua negara menjadi anggota di badan-badan internasional PBB.

Selain itu, Sri Lanka juga aktif di forum *Bali Regional Ministerial Conference.* Pada BRMC ke-4 bulan Maret 2011, Sri Lanka mengirimkan delegasi yang diketuai Menteri Kehakiman Rauff Hakeem.

Presiden Sri Lanka, H.E. Mahinda Rajapaksa juga telah menghadiri *Bali Democracy Forum IV* di Bali, 8-9 Desember 2011. Di sela-sela pertemuan tersebut, Presiden Sri Lanka telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI dan membicarakan penyelenggaraan *Bali Democracy Forum*, perkembangan dalam negeri Sri Lanka, dan peningkatan hubungan bilateral RI-Sri Lanka. Indonesia dan Sri Lanka juga bekerja sama dalam hal pencalonan di badan-badan internasional.

Foto 76.Pertemuan Bilateral Presiden RI dan Presiden Sri Lanka di sela-sela Pertemuan *Bali Democracy Forum IV* Bali, 8 Desember 2011

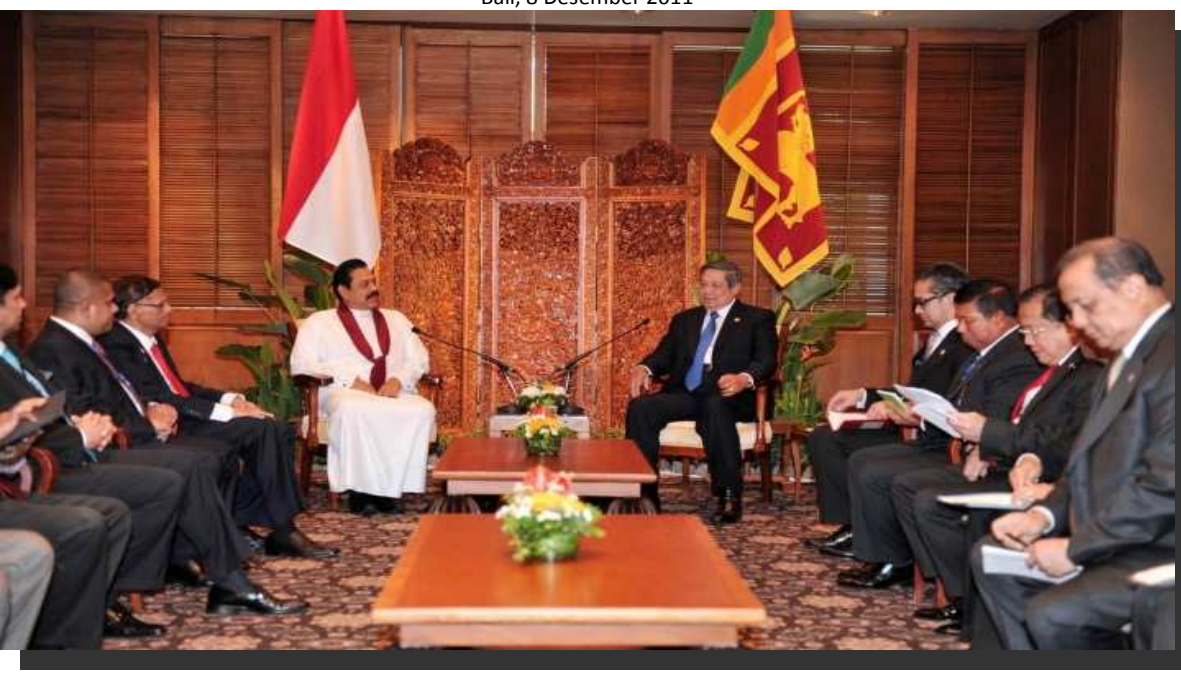

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pada kurun waktu Januari-Agustus 2011, nilai perdagangan Indonesia dan Sri Lanka mencapai USD 314,8 juta, meningkat 29,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Dalam perdagangan dengan Sri Lanka di tahun 2011, Indonesia mengalami surplus sebesar USD 146,8 juta. Produk Indonesia yang paling banyak diekspor ke Sri Lanka antara lain adalah aneka produk kertas, aneka macam bahan baku tekstil seperti *yarn, denim* dan *fabric*, produk ban kendaraan bermotor, dan semen.

Menteri Pertanian RI juga berkunjung ke Sri Lanka pada tanggal 4-5 Desember 2011, dan menandatangani MoU dengan Kementerian Pertanian Sri Lanka mengenai Kerja Sama Pertanian untuk komoditas Kelapa Sawit dan teh RI-Sri Lanka.

Pada periode tahun 2006-2011, partisipasi Sri Lanka dalam program *capacity building* yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri tercatat sejumlah 24 (dua puluh empat) orang dari 16 (enam belas) kegiatan *capacity building* di bidang ekonomi dan keuangan, energi terbarukan,pertanian, perikanan,*disaster risk management*, pemberdayaan perempuan, dan produksi program televisi.

Foto 77.Pertemuan Bilateral Menlu RI dan Menlu Sri Lanka di sela-selaKTM GNB di Bali, 26 Mei 2011

Dalam rangka mempererat *people-to-people contact,* KBRI Colombo bekerja sama dengan *Sri Lanka-Indonesia Friendship Association* (SLIFA) mengadakan berbagai kegiatan antara lain: kegiatan olahraga, kegiatan agama, promosi ciri khas masakan Indonesia dan penyelenggaraan kursus Bahasa Indonesia. Selain itu, KBRI Colombo juga mempererat hubungan persahabatan dengan *The All Ceylon YMMA (Young Men's Muslim Association)* melalui kegiatan agama khususnya agama Islam.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Sri Lanka sampai dengan bulan Oktober 2011 tercatat sebanyak 247 orang.Jumlah WNI di Sri Lanka fluktuatif dan dapat meningkat maupun berkurang sewaktu-waktu, mengingat banyaknya ABK WNI yang menjadikan Sri Lanka sebagai tempat transit dalam waktu yang cukup lama.

Tajikistan

Tajikistan merupakan salah satu negara makmur di kawasan Asia Tengah dan memiliki sumber daya alam berlimpah khususnya migas dan uranium.

Dalam hubungan perdagangan RI-Tajikistan, total Perdagangan Bilateral periode Januari-Agustus 2011 adalah sebesar USD 3,92 juta. Angka ini meningkat 3,5% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Tajikistan sebesar USD 128,4 ribu. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Tajikistan antara lain meliputi tekstil dan produk tekstil, furniture, produk-produk plastik, teh, elektronik, sepatu dan sabun, sementara Indonesia mengimpor kapas dan zinc dari Tajikistan.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan Oktober 2011, hanya terdapat 1 orang WNI yang berada di Tajikistan.

Turkmenistan

Hubungan bilateral RI – Turkmenistan terjalin baik. Indonesia dan Turkmenistan memiliki kesamaan dalam hal kekayaan sumberdaya alam yakni minyak bumi dan gas alam, sehingga merupakan bidang kerja sama yang potensial untuk dikembangkan.

Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya

Selama kurun waktu Januari-Agustus 2011, volume perdagangan Indonesia dan Turkmenistan mencapai USD 756 ribu, atau mengalami penurunan sebesar

23,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Indonesia mengalami defisit sebesar USD 173,8 ribu.

Dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang energi, pihak Turkmenistan telah menyampaikan undangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menghadiri *Turkmenistan Oil and Gas Road Show* yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 3-4 Maret 2011. Disamping itu, sebuah delegasi dari Kementerian Perekonomian RI telah berpartisipasi pada acara *Turkmenistan International Oil and Gas Conference* tanggal 15-17 November 2011, di Asghabat, Turkmenistan.

Hubungan Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Menurut catatan KBRI Tehran, sampai dengan bulan Oktober 2011, terdapat 21 orang WNI di Turkmenistan, yang sebagian besar bekerja sebagai TKI informal (non PLRT) dan 3 orang yang bekerja di perusahaan minyak di Turkmenistan.

Uzbekistan

Uzbekistan tetap menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan menghargai peran Indonesia di kancah internasional serta ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia di segala bidang.

Bidang Politik

Pada tanggal 11-13 Juli 2011, delegasi DPD RI telah berkunjung ke Tashkent dan bertemu dengan Komite Hubungan Luar Negeri dan Komite Anggaran dan Reformasi Ekonomi parlemen Uzbekistan.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Selama periode Januari – Juni 2011, total perdagangan RI – Uzbekistan adalah USD 5,32 juta. Angka ini meningkat sebesar 72% dibandingkan peride yang sama pada tahun sebelumnya USD 3,88 juta.

Pada tanggal 31 Mei 2011 di Banda Aceh, Kota Banda Aceh dan Kota Samarqand, Uzbekistan telah menyepakati kerja sama *sister city* dan telah menandatangani MoU Kerja Sama Kota dan Kemitraan.

Guna mempererat *people-to-people contact,* KBRI Tashkent juga telah memberikan pelajaran Bahasa Indonesia di Universitas *Oriental Study* dan *University of World Languages,* dimana Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing kedua yang paling diminati setelah bahasa Inggris.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga bulan Oktober 2011, jumlah WNI yang berada di Uzbekistan sebanyak 41 orang.

III.3.1.3 Kawasan Timur Tengah

Aljazair

Hubungan Indonesia dengan Aljazair berkembang baik.

Foto 78.Pertemuan Bilateral Menlu RI - Menlu Aljazair, Bali, 26 Mei 2011

Bidang Politik

Hubungan baik RI-Aljazair di bidang politik terlihat dari terlaksananya Konsultasi Bilateral RI-Aljazair pada tanggal 10 Mei 2011 yang antara lain membahas upaya peningkatan hubungan kerja sama bilateral kedua negara. Pada saat ini, 6 buah rancangan MoU sedang dibahas oleh kedua belah pihak, yang direncanakan dapat ditandatangani pada saat pelaksanaan SKB II di Alger, semester pertama tahun 2012.

Di sela-sela pelaksanaan KTM Ke-16 GNB di Bali, Menlu RI telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Aljazair, Mourad Medelci pada tanggal 26 Mei 2011.Kedua Menlu mencatat bahwa hubungan bilateral kedua negara dapat semakin meningkat

dan sepakat perlunya peningkatan hubungan dan kerja sama di segala bidang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh kedua negara.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI – Aljazair selama periode Januari-Agustus 2011mencapai USD 370,2 juta, dimana ekspor Indonesia mencapai USD 113,4 juta, dan impor dari Aljazair mencapai USD 256,7 juta.

Foto 79.Festival Internasional Tari Tradisional, di Sidi Bel Abbes dan Tlemcen, Al Jazair, 10 – 18 Juli 2011

Di bidang pariwisata dan budaya Indonesia, Indonesia telah ikut serta dan menampilkan seni musik angklung pada Festival Budaya Tlemcen: Ibukota Kebudayaan Islam 2011, 14 – 16 April 2011; dan pada Festival Internasional Tari Tradisional, di Sidi Bel Abbes dan tlemcen, 10 – 18 Juli 2011.

Arab Saudi

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini berjalan dengan baik secara khusus, Pemerintah Indonesia telah memusatkan upayanya pada perlindungan warga negara Indonesia.

Bidang Politik

Secara umum Indonesia dan Arab Saudi mempunyai kerja sama dan hubungan politik yang baik. Kedua negara juga bekerja sama dalam isu-isu terkait dengan perdamaian di Timur Tengah, khususnya melalui forum OKI.

Namun demikian, sepanjang tahun 2011 ini tantangan yang dihadapi dalam hubungan kedua negara adalah kasus-kasus hukum yang menyangkut WNI di Arab Saudi utamanya yang dieksekusi maupun yang terancam hukuman mati.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Nilai total perdagangan RI – Saudi Arabia pada periode Januari – Agustus 2010 mencapai nilai USD3,56miliar, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 4,92 miliar, mengalami peningkatan sebesar 21,45%.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah TKI yang terdata hingga bulan September 2011 adalah sebanyak 559.235 orang. Sedangkan, jumlah kasus yang melibatkan WNI di Arab Saudi adalah sebanyak 14.217 orang, dimana sebagian besarnya merupakan kasus ketenagakerjaan. Jenis kasus yang menimpa WNI di Arab Saudi antara lain gaji tidak dibayar (26,82%), pekerjaan tidak sesuai (22,15%), penganiayaan (9,55%), TKI tidak mampu/siap bekerja (11,41%), pelecehan seksual, pemerkosaan (10,44%), sakit/stress (7,06%) dan lain-lain (12,57%).

Foto 80. Pertemuan Menlu RI dengan *His Royal Highness Prince* Bandar bin Sultan bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi Jakarta 24 Maret 2011

Pada tanggal 18 Juni 2011, seorang WNI bernama Ruyati telah dieksekusi mati atas kasus pembunuhan yang dilakukannya. Pemerintah Indonesia menyayangkan proses eksekusi tersebut

yang dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan kepada perwakilan RI di Arab Saudi.

Dalam rangka lebih jauh lagi memberikan perlindungan kepada WNI khususnya TKI di Arab Saudi, Pemri telah mengambil beberapa langkah-langkah diantaranya:

a) Mulai tanggal 1 Agustus 2011 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI informal ke Arab Saudi; dan
b) Untuk menangani penyelesaian beberapa kasus hukuman mati WNI di Arab Saudi, Kemlu mengirimkan Satgas Perlindungan WNI ke Arab Saudi sejak awal Agustus 2011.

Indonesia dan Arab Saudi saat ini sedang melakukan proses perundingan MoU penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, perundingan pertama dilakukan pada 28 – 29 Mei 2011 dan perundingan kedua pada tanggal 25 Juni 2011.

Pada tanggal 6-8 November 2011, Menteri Perburuhan Arab Saudi, Adel Faqieh telah melakukan kunjungan ke Indonesia dan melakukan *Courtesy Call* dengan Presiden RI untuk menyampaikan surat balasan Raja Abdullah bin Abdul Aziz terkait permasalahan TKI yang mendapatkan vonis hukuman mati di Arab Saudi.

Bahrain

Hubungan Indonesia – Bahrain selama tahun 2011 berjalan dengan baik dan ditandai dengan diaktifkan kembali KBRI di Baghdad.

Bidang Politik

Hubungan baik politik Indonesia – Bahrain selama tahun 2011 terlihat dari kunjungan terakhir pejabat Bahrain ke Indonesia dalam rangka mengikuti KTM Non-Blok di Bali, 23 – 27 Mei 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Nilai total perdagangan RI – Bahrain pada tahun 2010 mencapai nilai USD 167,5 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 102,7 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 5,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Pada periode Januari – September 2011, di Bahrain terdapat WNI sejumlah 7.280 orang, dengan kasus yang melibatkan WNI sebanyak 48 kasus dimana pada umumnya jenis kasus tersebut adalah perlakuan sponsor tidak baik dan kasus gaji tidak dibayar.

Irak

Sepanjang tahun 2011, hubungan Indonesia – Irak berjalan dengan baik dan ditandai oleh diaktifkannya kembali KBRI di Baghdad.

Bidang Politik

Pada tanggal 4-10 April 2011, Pemerintah RI telah mengirimkan tim pendahulu dalam rangka persiapan reaktivasi KBRI Baghdad. Kunjungan tersebut merupakan persiapan akhir Pemri dalam rangka mereaktivasi KBRI Bahgdad.

Foto 81.Menlu RI dan Menlu Irak di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 27 September 2011

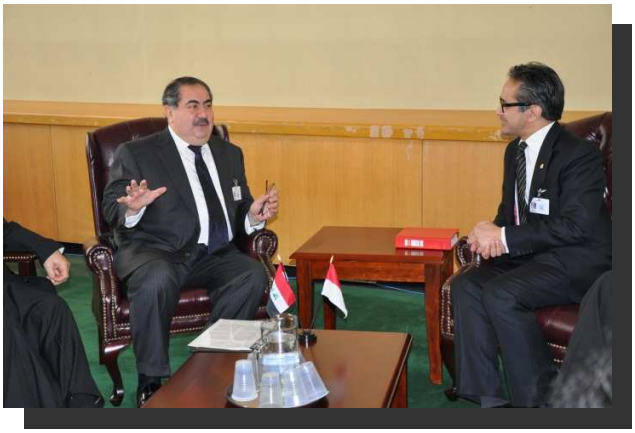

Pemerintah RI telah secara resmi mengaktifkan kembali KBRI Baghdad.Pada tanggal 29 Juni 2011, telah disampaikan *Letter of Introduction (LoI)* kepada Wakil Menteri Luar Negeri Irak, H.E. Mr. Labib Abbawi, dan telah ditunjuk Pejabat Kemlu RI sebagai Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Baghad. Duta Besar RI akan segera ditempatkan di Baghdad.

Di sela-sela pelaksanaan KTM Ke-16 GNB di Bali, Menlu RI telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Irak, Hoshyar Zebari pada tanggal 26 Mei 2011.Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu

menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sudah berlangsung sangat lama dan tidak lagi hanya bersifat formal. Hubungan tersebut semakin meningkat sehingga memerlukan keseriusan dalam mendorong lebih banyak kerja sama di semua bidang antara kedua negara.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia – Irak tahun 2010 sebesar USD 22,2 juta dengan surplus perdagangan Indonesia senilai USD 20,5 juta, sedangkan hingga Agustus 2011, total nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 139,9 juta, dengan surplus Indonesia senilai USD 138,6 juta. Total perdagangan meningkat sebesar 529,6%.

Kuwait

Hubungan Indonesia – Kuwait pada tahun 2011 terus berkembang.

Bidang Politik

Di sela-sela pelaksanaan KTM Ke-16 GNB di Bali, Menlu RI telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Kuwait, Dr. Mohammad Sabah Al Salem Al Sabah pada tanggal 25 Mei 2011.Dalam pertemuan tersebut, Menlu antara lain menyampaikan bahwa Indonesia terus mengikuti peran konstruktif Kuwait dalam *Gulf Countries Cooperation (GCC)* khususnya terkait dengan perkembangan yang sangat dinamis di Timur Tengah dalam mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut. Selain itu, Menlu juga mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan Pemerintah dan rakyat Kuwait kepada WNI untuk bekerja dan berkontribusi bagi proses pembangunan di Kuwait, dan berharap agar Pemerintah Kuwait dapat memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

Foto 82.Menlu RI dan Menlu Kuwait, Bali, 25 Mei 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang ekonomi, Pemri telah mendorong *Kuwait Finance House* (KFH) agar berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang produk perbankan Islam.

Nilai total perdagangan RI – Kuwait pada tahun 2010 mencapai nilai USD 1,5 miliar, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 919,3 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 19,3% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Di bidang promosi kebudayaan, telah dilakukan *Program Press Trip* ke Indonesia pada tanggal 3 – 11 April 2011yang diikuti oleh jurnalis dari Al Watan TV dan Kantor Berita Nasional Kuwait (KUNA) mengunjungi Kota Jakarta, Bandung, P. Komodo, dan Bali.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Selama periode Januari –September 2011, telah tercatat jumlah WNI sebanyak 28.829 WNI dengan 8.232 kasus, yang pada umumnya adalah kasus keimigrasian/ijin tinggal di Kuwait.

Lebanon

Hubungan Indonesia – Lebanon pada tahun 2011 terjalin sangat baik.

Bidang Politik

Lebanon sangat menghargai kontribusi pasukan Indonesia (Kontingen Garuda) dalam UNIFIL. Jumlah keseluruhan personel kontingen Garuda (KONGA)/UNIFIL di Lebanon hingga November 2011 adalah 1450 personel. Jumlah tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara penyumbang terbesar pasukan di UNIFIL. Tahun 2011 tercatat kunjungan Menteri Negara BUMN ke Lebanon dan keikutsertaan delegasi Lebanon dalam KTM GNB ke-16 di Bali pada tanggal 23-27 Mei 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Selama periode Januari – Juni 2011, berbagai kegiatan telah dilakukan Pemri dalam mempromosikan perdagangan, investasi, dan pariwisata, antara lain:

a) Penyelenggaraan *Business Dinner*, 20 April 2011;
b) Partisipasi pada Pameran Dagang dan Pariwisata di Baalbeck, 26 Juni – 10 Juli 2011; dan
c) Penandatangan MoU Kerja Sama Kebudayaan antara Pemri dan Sekolah Musik, Seni, dan Desain St. Mitchell Lebanon , Juli 2011.

Total perdagangan Indonesia – Lebanon tahun 2010 sebesar USD95 juta, sedangkan hingga Agustus 2011 tercatat sebesar USD45,4juta dengan surplus sebesar USD 36,9 juta.

Libya

Pemerintah Indonesia mencermati perkembangan yang terjadi di Libya.

Perkembangan Politik

Konflik horisontal di Libya antara pasukan loyalis rezim Khadafi dan kelompok revolusioner dimulai sejak 15 Februari 2011. Serangkaian protes damai di beberapa kota di timur Libya berhadapan dengan kekuatan militer Pemerintah Libya dan dalam perkembangannya bermutasi menjadi konflik bersenjata yang menyebar di seluruh negeri. Kelompok ini membentuk pemerintahan tandingan yang berbasis di kota Benghazi dengan nama *National Transitional Council* (NTC) yang memiliki tujuan utama menggulingkan pemerintah Khadafi dan membentuk pemerintahan baru melalui pemilu yang demokratis.

Upaya Pemerintah Libya untuk memulihkan ketertiban dan keamanan sejak awal kerusuhan menuai kecaman dan perhatian serius dari PBB, Liga Arab, dan Uni Eropa yang menilai sebagai aksi kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar HAM. Konflik antara Pemerintah dan pihak NTC terus menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materil yang besar.

Menyikapi perkembangan di Libya, DK PBB mensahkan resolusi 1970/2011 pada 26 Februari 2011 yang meminta Pemerintah Libya untuk melindungi warga sipil dan warga negara asing; memberlakukan embargo senjata dan *travel ban* serta membekukan aset keuangan dan ekonomi milik rezim Khadafi. Pada 1 Maret 2011, Liga Arab membekukan keanggotaan Libya disusul pembekuan keanggotaan Libya pada Dewan HAM PBB. Setelah itu, pada 17 Maret 2011, DK PBB mensahkan resolusi 1973/2011 tentang pemberlakuan *no fly zone*, ketentuan "*to take any necessary measures*", seruan untuk gencatan senjata dan pencarian solusi politik damai untuk Libya dengan tujuan utama untuk melindungi warga sipil dan daerah-daerah berpenduduk sipil. Resolusi 1973 tersebut diimplementasikan oleh koalisi internasional/NATO dengan melakukan serangkaian serangan laut dan udara yang intensif dan masif ke wilayah Libya. Resolusi ini dijadikan legitimasi oleh koalisi internasional/NATO untuk melakukan operasi militer "*Odyssey Dawn*" atas Libya sejak 19 Maret 2011 dan menjadi operasi "*Unified Protector*" sejak 24 Maret 2011. Hingga September 2011, sekitar 140-an negara mendukung NTC sebagai *legitimate body* yang mewakili rakyat dan negara Libya.Sehingga pada akhirnya, pada tanggal 22 November 2011, NTC mengumumkan pemerintahan interim yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdurrahim El-Keib.

Sikap RI

Berkenaan dengan telah dikuasainya secara penuh wilayah Libya oleh NTC dan terkait dengan tewasnya Khadafi, pada tanggal 21 Oktober 2011 sesuai instruksi Presiden RI, Menlu RI menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menanti suatu titik dimana kekerasan dapat dihentikan, perdamaian dapat dimajukan dan rekonsilasi dapat dimulai. Pemerintah Indonesia mengharapkan agar berbagai kalangan di Libya dapat memulai tahapan baru dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan damai dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi ke depan dan dengan menghormati nilai-nilai yang menjadi kehendak dan pilihan rakyat Libya. Bagi Indonesia, perkembangan

yang terjadi di Libya termasuk perubahan pemerintahan dan sistem pemerintahan tidak mengubah hubungan diplomatik dan tali persaudaraan yang selama ini telah lama terjalin.

Pada kesempatan di sela-sela SMU PBB Ke-66/2011 di New York, Menlu RI telah bertemu dengan pimpinan NTC dan kedua pihak mengharapkan adanya peningkatan hubungan bilateral di berbagai bidang termasuk permintaan agar Indonesia dapat berbagi di bidang demokratisasi dan pemapanan/peningkatan kapasitas institusi-institusi demokrasi.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia – Libya tahun 2010 sebesar USD 33,6 juta dengan surplus perdagangan Indonesia senilai USD 33 juta, sedangkan hingga Agustus 2011, total nilai perdagangan kedua negara senilai tercatat sebesar USD 10,8juta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Dengan semakin memburuknya situasi keamanan di Libya, Pemerintah RI telah melakukan evakuasi WNI dari Libya secara bertahap. Evakuasi jalur darat dilakukan melalui pintu-pintu perbatasan Libya dengan Tunis, Mesir dan Aljazair. Evakuasi jalur laut melalui pelabuhan laut di Libya sedangkan evakuasi jalur udara dilakukan melalui bandara Tripoli.

KBRI Tripoli secara bertahap telah mengevakuasi 880-an WNI termasuk Dubes, staf dan keluarga KBRI mulai tanggal 24 Februari 2011 baik melalui jalur udara maupun darat. Dubes RI untuk Libya meninggalkan Libya pada tanggal 21 Maret 2011 bersama rombongan evakuasi terakhir. Sedangkan sisa homestaf dan lokal staf KBRI Tripoli dievakuasi pada tanggal 27 Maret 2011 ke Tunisia. Berkat koordinasi yang baik antara KBRI Tunis dan KBRI Kairo dengan pihak-pihak berwenang di Tunisia dan Mesir, proses evakuasi WNI eks-Libya berjalan lancar.

Sejak tanggal 27 Maret 2011, operasional KBRI Tripoli dihentikan sementara operasionalnya dan fungsinya dirangkap dari KBRI Tunisia. Mulai awal Desember 2011, Pemri telah mengaktifkan kembali KBRI Tripoli. Kemlu akan segera mengirimkan diplomat-diplomat Indonesia lainnya untuk ditugaskan di Tripoli.

Mauritania

Hubungan Indonesia – Mauritania memasuki babak baru pada tahun 2011 ini dengan disepakatinya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. Hubungan diplomatik kedua negara diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Mauritania pada Sidang Umum PBB ke 66 bulan September 2011.
Pelaksanaan hubungan diplomatik Indonesia – Mauritania ditangani oleh KBRI Maroko. Dengan dibukanya hubungan diplomatik tersebut diharapkan terjadi peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya di masa mendatang.

Foto 83.Menlu RI dan Menlu Mauritania pada Peresmian Pembukaan Hubuangan Diplomatik RI dan Mauritania, New York, 27 September 2011

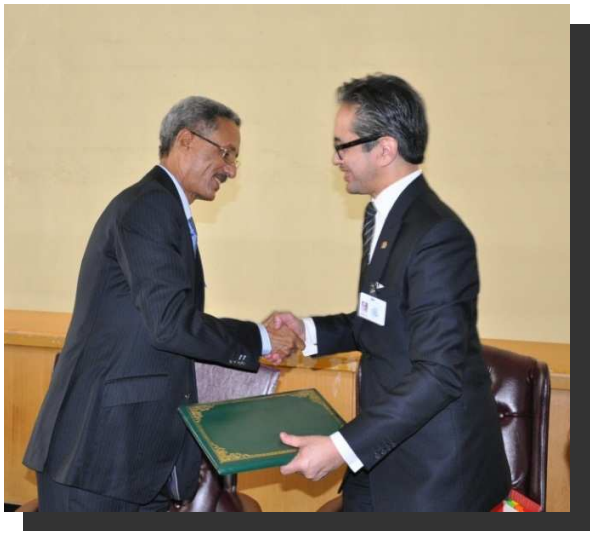

Bidang Ekonomi

Nilai total perdagangan RI – Mauritania pada tahun 2010 mencapai nilai USD 13,3 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 14,5 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 20,5% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010.

Saat ini sebuah perusahaan Indonesia sedang mengerjakan proyek pembangunan kembali tambang emas di Mauritania. Tenaga kerja

Indonesia dalam proyek tersebut berjumlah 53 orang dan material berupa tangki dan baja yang diekspor dari Indonesia berjumlah 550 ton.

Selain itu juga terdapat perusahaan Indonesia yang memiliki proyek tambang bijih besi di Mauritania, yang akan beroperasi mulai Desember 2010 dengan target produksi 600.000 ton per tahun.

Maroko

Hubungan Indonesia-Maroko pada tahun 2011 berjalan dengan baik. Kedua negara saling bekerjasama dalam berbagai isu yang relevan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Bidang Politik

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kerja sama nyata di bidang politik, pihak Maroko pada awal 2011 telah mengajukan *Draft Protocol of Agreement on Judicial Cooperation* antara Maroko-Indonesia. Draf tersebut sedang dipelajari oleh instansi terkait Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Data perdagangan Indonesia-Maroko selama 2011 menunjukkan kenaikan, baik pada volume perdagangan maupun ekspor Indonesia ke Maroko. Meskipun demikian, surplus Indonesia pada neraca perdagangan mengalami penurunan akibat peningkatan impor Indonesia dari Maroko pada saat yang bersamaan. Secara umum, aktivitas perdagangan kedua negara selama periode 2010 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Saat ini kedua negara sedang mempersiapkan pertemuan kedua Sidang Komisi Bersama (SKB) setelah pertemuan pertama berlangsung pada 2008. SKB II diharapkan dapat diadakan pada kuartal I 2012.

Dalam rangka persiapan SKB II dimaksud, pemerintah kedua negara sedang melakukan finalisasi sejumlah *draft* perjanjian kerja sama bilateral di bidang ekonomi, a.l. mengenai penghindaran pajak berganda (revisi), industri, kelautan dan perikanan, dan pengembangan ekspor.

Adapun di bidang sosial-budaya, kedua negara sedang merampungkan rancangan perjanjian kerja sama bidang-bidang keagamaan, informasi, dan pariwisata.

Neraca perdagangan Indonesia-Maroko (2010-2011)
dalam ribu USD

Uraian	Neraca perdagangan Indonesia-maroko Januari-Agustus		Perubahan (%) 2011/2010
	2010	2011	
Total perdagangan	64.140.4	91.617.7	42.84
Ekspor	35.073.8	54.5480	55.52
Impor	29.006.6	37.069.7	27.53

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Pemerintah Maroko meminta pembahasan kembali rancangan persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus (*special passport*) antara Maroko-Indonesia. Rancangan dimaksud juga diharapkan dapat ditandatangani pada kesempatan SKB II mendatang.

Oman

Hubungan bilateral Indonesia - Oman tetap terjalin baik dan masih terbuka untuk ditingkatkan khususnya di bidang perdagangan dan investasi.

Bidang Politik

Hubungan bilateral Indonesia - Oman tetap terjalin baik dan masih terbuka untuk ditingkatkan. Oman juga menyambut baik semakin banyaknya WNI yang bekerja di Oman dan melihat masih banyak peluang bagi peningkatan kerja sama kedua negara, antara lain di bidang perdagangan dan investasi.

Kerja sama yang baik antara kedua negara juga tercermin pada koordinasi yang dilakukan di fora internasional, seperti saling dukung dalam

pencalonan di Dewan *International Maritime Organization* (IMO), Dewan *Intenational CivilAviation Organization* (ICAO), ECOSOC, WHO, WMO, Dewan ILO, *Executive Board World Food Program* (EB-WFP), FAO dan UNESCO.

Indonesia membuka kantor perwakilannya setingkat KBRI di Muscat, Oman pada tanggal 29 Desember 2010 bersama dengan peresmian 11 perwakilan lainnya yang dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa.

Kesultanan Oman juga telah menempatkan seorang pejabat konsuler di Jakarta yang di-*attach* di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Pemerintah Oman dalam waktu dekat meningkatkan status perwakilan di Jakarta menjadi setingkat Kedutaan Besar.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Secara umum hubungan ekonomi antara kedua negara selama ini berjalan dengan positif, walaupun disadari masih relatif kecil dan belum sesuai dengan potensi yang ada. Kendatipun demikian, Oman memiliki potensi besar bagi peningkatan ekspor produk Indonesia.

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Oman antara lain, *wood and wood products, electrical appliance, paper and paperboard, article or iron, man-made staple fibres dan rubber, furniture, plastics* serta karpet.

Sedangkan komoditi impor utama Indonesia dari Oman antara lain, *product of milling industry, mineral fuels, in organic chemicals* dan komoditi lainnya.

Nilai total perdagangan RI – Oman pada tahun 2010 mencapai nilai USD 319.1 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 369.8 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 84.8% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Saat ini di Oman terdapat kurang lebih 20.000 warga negara Indonesia yang bekerja di sektor formal dan non-formal. Dari jumlah tersebut, 90% adalah tenaga kerja informal (penata laksana rumah tangga, buruh, dll). Selain itu, perkembangan tenaga kerja di sektor formal utamanya perminyakan dan gas bumi dari Indonesia juga meningkat tajam, baik yang bekerja di perminyakan pemerintah ataupun swasta.

Dengan telah dibukanya perwakilan RI di Muscat akhir tahun 2010, maka Pemerintah Indonesia dalam posisi yang lebih baik untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di Oman.

Palestina

Tahun 2011, hubungan Indonesia dengan Palestina ditandai dengan komitmen dan dukungan Indonesia yang semakin kuat bagi kemerdekaan Palestina baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral serta melalui upaya pengembangan kapasitas.

Bidang Politik

Kontribusi utama diplomatik Indonesia bagi perjuangan Palestina adalah melalui penggalangan masyarakat internasional untuk mendukung pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina tahun ini.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non - Blok (GNB) di Bali, pada tanggal 23 – 27 Mei 2011, negara-negara anggota GNB memperkuat komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan menyambut rekonsiliasi faksi-faksi Palestina sebagai langkah maju yang sangat diperlukan dalam penuntasan isu Palestina secara menyeluruh dan adil melalui pembahasan dan pengesahan Deklarasi mengenai Palestina dan Deklarasi mengenai Tahanan Politik Palestina. GNB mendukung gagasan Indonesia bagi suatu rencana aksi melalui *NAM Ministerial Committee* untuk penggalangan suara terhadap pengakuan Palestina sebagai anggota PBB.

Di sela-sela pelaksanaan KTM Ke-16 GNB di Bali, Menlu RI telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Palestina, Riad Malki pada tanggal 26 Mei 2011.Dalam pertemuan tersebut, Menlu Palestina antara lain mengharapkan dukungan penuh dan bantuan dari Indonesia agar bangsa Palestina dapat mengatasi berbagai hambatan dan menggalang

dukungan untuk pengakuan negara Palestina yang saat itu telah mencapai 112 negara. Dalam tanggapannya, Menlu RI antara lain menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan berbagai upaya yang dilakukan Otoritas Nasional Palestina dalam mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut.

Dalam sesi debat umum pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 di New York, terkait dengan penyelesaian isu Palestina – Israel, pernyataan para Kepala Negara/Pemerintahan pada umumnya menawarkan solusi pendirian dua negara (*two states solution)* guna menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dapat dicatat secara khusus, bahwa sejumlah Kepala Negara/Pemerintahan telah menegaskan dukungan negara mereka atas upaya Palestina menempuh jalur PBB untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka.

Foto 84. Menlu RI dan Menlu Palestina pada Peringatan 50 tahun GNB, Bali, 23 – 27 Mei 2011

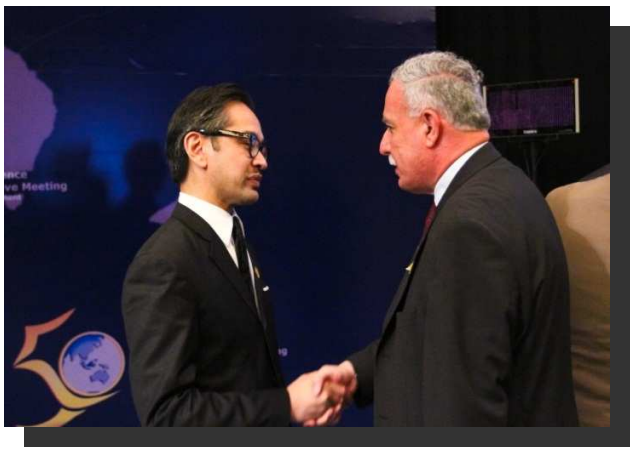

Selain itu, dalam pertemuan OKI yang diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang PBB di New York, 24 September 2011, Indonesia juga mengajak negara-negara OKI dan masyarakat internasional untuk menjadikan Palestina masuk sebagai anggota PBB ke-194. Menlu RI kembali adakan pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina disela-sela SMU PBB ke-66.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Indonesia telah berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat Palestina melalui proyek pembangunan kapasitas yang dilakukan di bawah payung *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP).

Foto 85. Pertemuan Menlu RI dan Menteri Perencanaan dan Administrasi Palestina (tengah) serta Dubes Palestina untuk Indonesia, Jakarta, 7 November 2011

Selama Januari-Oktober 2011, telah terlaksana implementasi komitmen pembangunan kapasitas bagi Palestina oleh Kementerian dan Lembaga sebanyak 16 program bagi 104 peserta Palestina. Dengan demikian, sejak 2008, Pemri telah melaksanakan 47 pelatihan yang diikuti oleh 235 peserta. Program tersebut akan terus dilanjutkan sesuai dengan komitmen Pemri hingga mencapai total 1.000 orang peserta, dalam durasi program yang akan berlangsung antara tahun 2008 - 2013.

Indonesia juga telah menyampaikan bantuan finansial terhadap Palestina, termasuk dalam bentuk *pledge* pada *Paris Donor Conference* di 2007 dan selama Krisis Gaza 2008-2009, yang masing-masing berjumlah USD 1 Juta. Di samping itu, Indonesia saat ini juga telah mengalokasikan dana sejumlah Rp 20 Miliar untuk membangun *Indonesia Cardiac Center* di Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, Palestina.

Selain itu,KBRI Kairo telah menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza, 2 Januari 2011, melalui Bulan Sabit Merah Palestina. Bantuan kemanusiaan berupa peralatan medis senilai USD 83.325,21 yang berasal dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan, sisa bantuan kemanusiaan dari Kementerian Kesehatan

RI pada Januari 2009, dan sumbangan masyarakat Indonesia di Mesir.

Mesir

Hubungan bilateral RI-Mesir terus berkembang dengan landasan yang sangat kuat, terutama karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI. Hingga saat ini, kedua negara telah menandatangani lebih dari 60 perjanjian dan persetujuan bilateral, baik antarpemerintah maupun antarswasta, serta adanya Forum Konsultasi Bilateral di bidang Politik maupun Komisi Bersama.

Bidang Politik

Tahun ini, hubungan antara kedua bangsa dan negara diwarnai oleh perkembangan politik dalam negeri Mesir yang sedang dalam proses menjadi negara demokrasi menyusul pecahnya revolusi pada 25 Januari 2011.

Segera setelah pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011, Pemerintah RI langsung menyampaikan pernyataan sikap, menyambut baik perkembangan positif yang terjadi dengan harapan Mesir ke depan akan lebih baik serta tetap konsisten mendukung peran regional Mesir. Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman di bidang reformasi politik dan komitmen untuk tetap bersama Mesir dalam proses transisi.

Secara khusus, Menlu RI berkunjung ke Cairo pada 14 April 2011 guna menunjukkan solidaritas sekaligus membahas upaya peningkatan kerja sama, baik pada tingkat bilateral maupun pada tataran multilateral, termasuk pelaksanaan KTM ke-16 GNB di Bali, 25-27 Mei 2011 dan upaya menggalang dukungan bagi Palestina yang berjuang mencari pengakuan dan menjadi anggota PBB.

Pasca revolusi, hubungan RI-Mesir semakin diperkuat dengan komitmen RI untuk mendukung proses demokratisasi di Mesir yang diimplementasikan melalui kegiatan *sharing of experience dan lessons learned*. Untuk kegiatan tersebut, sejumlah tokoh nasional seperti mantan Presiden BJ Habibie, mantan Ketua DPR Amien Rais, Letjen (Purn.) Agus Widjojo, dan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar diundang ke Mesir. Selain itu, dalam kurun waktu Mei-Oktober, *Institute for Peace and Democracy* yang berkedudukan di Bali menyelenggarkan tiga kali Workshop on *Egypt-Indonesia Dialogue on Democratic Transition* di Jakarta dan Cairo.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Mesir didominasi oleh kerja sama perdagangan. Indonesia selalu mencatat surplus dalam beberapa tahun terakhir. Total perdagangan non-migas Indonesia dengan Mesir pada tahun 2010 tercatat USD 1,07 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 33,3% dibanding dengan periode tahun 2009, yang nilainya mencapai USD 802,56 juta. Pada periode Januari-Juni 2011, meskipun terjadi revolusi di Mesir, volume perdagangan Indonesia-Mesir tetap mengalami kenaikan (66,8%) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mencapai USD 725,59 juta, surplus lebih dari USD 516 juta bagi Indonesia.

Di bidang investasi, Indonesia juga tercatat lebih banyak menanam di Mesir dari pada sebaliknya. Sampai tahun 2011 ini, realisasi investasi Indonesia di Mesir mencapai sekitar USD 250 juta melalui perluasan usaha Kedaung Group; pendirian pabrik Indomie oleh investasi Indofood (Indonesia) bekerja sama dengan Wazaran (Arab Saudi) dan Abu Alata (Mesir); serta privatisasi BUMN Mesir di bidang tekstil oleh PT. Indorama Group.

Dalam upaya meningkatkan promosi kebudayaan, Indonesia secara gencar melakukan kegiatan promosi di Mesir, baik dengan mendatangkan berbagai misi kebudayaan dari Indonesia, maupun dengan memanfaatkan kelompok-kelompok seni budaya mahasiswa Indonesia dan Sekolah Indonesia Cairo.

Sementara itu, untuk menghidupkan kembali hubungan emosional dengan rakyat Mesir, KBRI Cairo terus memaksimalkan peran Pusat Kebudayaan dan Informasi Indonesia (PUSKIN) dan berhasil mengundang minat banyak generasi muda Mesir untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia, bahkan di luar Cairo seperti di Universitas Suez Canal. Tidak kurang dari 200 peserta mengikuti kursus tersebut secara intensif. Peserta yang berprestasi bahkan diberi kesempatan untuk

mengikuti program Dharmasiswa satu tahun di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di UGM.

Selain itu, buku terbitan KBRI Cairo berjudul "Jauh di Mata, Dekat di Hati: Potret Hubungan Indonesia-Mesir dalam bahasa Arab juga sangat efektif untuk semakin mendekatkan hubungan dan saling pengertian antara kedua bangsa.

Foto 87. Menlu RI bersama dengan Ketua Satgas Evakusasi WNI, Dr. N. Hassan Wirajuda menyambut WNI yang dievakuasi dari Mesir, Jakarta, 2 Februari 2011

Di bidang pendidikan, kerja sama pendidikan tinggi terus meningkat antara lain ditandai dengan bertambahnya MOU antara perguruan tinggi Mesir seperti Cairo University, Ain Shams dan Suez Canal dengan perguruan tinggi Indonesia seperti UGM dan UNS dalam bentuk studi banding, *short course, sandwich program*, seminar ilmiah dalam berbagai bidang ilmu, pameran pendidikan, konferensi, riset, pertukaran dosen, dan pertukaran mahasiswa.

Mesir mengalokasikan 90 beasiswa untuk S-1 dan 20 beasiswa untuk S-2 di Universitas Al-Azhar, 5 beasiswa untuk SMA A!-Azhar dan 5 beasiswa untuk universitas lainnya di Mesir. Saat ini, terdapat lebih dari 4.200 mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang semuanya mendapat beasiswa standar, yaitu tidak perlu membayar uang kuliah

Dalam pada itu, KBRI Cairo terus menindaklanjuti rencana menjadikan Sekolah Indonesia Cairo sebagai sekolah bertaraf internasional.

Dalam rangka mendorong peningkatan prestasi mahasiswa Indonesia sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang menghambat study mereka, KBRI Cairo berhasil memperoleh dukungan dan fasilitasi dari Pimpinan Universitas al-Azhar untuk membangun asrama di dalam kampus.

Foto 86. Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Mesir 14 April 2011

Gagasan ini mendapat restu Presiden RI yang oleh Kementerian Agama RI ditindaklanjuti dengan penyerahan dana kepada al-Azhar sebesar Rp 14 miliar sebagai kontribusi awal bagi pembangunan 18 gedung. Masih diperlukan dukungan dan kontribusi dari stake holders dan donatur di Indonesia untuk merealisasikan pembangunan keseluruhan 18 gedung tersebut.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Guna memberikan pelayanan dan perlindungan secara optimal, KBRI Cairo terus memantapkan sistem informasi terpadu (SIMADU) WNI yang terdata sekitar 6.000 orang, dengan jumlah terbesar mahasiswa, disusul TKW/PLRT, dan pejabat dan staf KBRI beserta keluarga serta TKI.

Terkait dengan ketenagakerjaan, ketentuan hukum Mesir jelas melarang masuknya pekerja asing pada sektor rumah tangga (*domestic workers*). Dengan demikian, posisi mereka sangat lemah di depan

hukum, apalagi tidak memiliki kontrak yang jelas. Akibatnya, KBRI Cairo seringkali kesulitan membantu penyelesaian kasus-kasus yang timbul antara mereka dan majikan. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Mesir saat ini sedang menjajaki pembuatan draft MoU tentang *Migrant Workers* di Mesir.

Pada tahun 2011 ini tercatat 1.002 tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Mesir, sebagian besar adalah PLRT. Data ini diperoleh dari hasil pencatatan terhadap mereka yang datang ke KBRI untuk mengurus izin tinggal di Mesir maupun perpanjangan paspornya. Meskipun demikian, diperkirakan jumlah mereka jauh lebih besar, yang menurut pihak intelijen Mesir mendekati 5.000.

Selama terjadinya gejolak politik di Mesir, Pemerintah Indonesia telah melakukan evakuasi WNI ke tanah air. Untuk keperluan tersebut, telah dibentuk Satgas Pananganan WNI melalui Inpres No. 3 Tahun 2011 (31 Januari 2011) diketuai Bapak N. Hassan Wirajuda (Menlu RI periode 2001-2009). Dalam kurun waktu 1 – 10 Januari 2011, berhasil dievakuasi sebanyak 2,432 WNI dengan 6 penerbangan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400. Hampir semua pengungsi, khususnya mahasiswa, telah kembali ke Mesir.

Bagi para mahasiswa yang tidak dievakuasi dan masih berada di Mesir, Pemerintah RI memberikan beasiswa khusus sebesar EGP 350/bulan (± Rp 530.000,-) selama tiga bulan.

Persatuan Emirat Arab (PEA)

Hubungan RI-PEA berjalan dengan baik dan bersahabat sepanjang tahun 2011 sebagaimana telah berlangsung selama ini.

Bidang Politik

Dalam rangka merealisasikan kedekatan hubungan bilateral RI-PEA, telah dibentuk *Joint Committee for Cooperation* yang telah ditandatangani pada 19 Oktober 2010. Mekanisme dialog pada tingkat pejabat tinggi ini diharapkan menjadi lokomotif pendorong hubungan bilateral kedua negara.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan PEA belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi yang ada di kedua negara. Nilai total perdagangan RI – PEA pada tahun 2010 mencapai nilai USD 1,95 miliar, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 1,8 miliar, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 38,7% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Upaya peningkatan promosi potensi Indonesia dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta investasi terus digalakkan,diantaranya dengan penyebaran data dan informasi terkini tentang potensi daerah-daerah pasca diterapkannya UU Otonomi sebagai obyek investasi dalam berbagai forum. Saat ini, investasi PEA dalam bentuk *portfolio*melalui perusahaan multinasional cukup signifikan jumlahnya. Dalam bidang energi sedang diupayakan kerja sama investasi dengan *International Petroleum Investment Company* (IPIC).

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan September 2011, terdapat sekitar 70 ribu WNI/TKI di PEA. Sekitar 20 ribu berprofesi sebagai TKI formal dan selebihnya sebagai TK Informal. 20 ribu jiwa berdomisili di wilayah Abu Dhabi dan selebihnya di wilayah utara PEA.

Masalah TKI yang dihadapi sebagian besar dari kelompok TKI Informal. Hal ini dikarenakan, tidak adanya aturan yang pasti di PEA mengenai penempatan dan perlindungan TKI di sektor ini.

Qatar

Selama periode 2011, secara umum hubungan bilateral kedua negara berjalan dengan baik. Upaya-upaya ke arah peningkatan hubungan kedua negara terus dilakukan di berbagai bidang.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan baik kedua negara tercermin melalui serangkaian kunjungan pejabat tinggi kedua negara, antara lain:

a) Pertemuan Presiden RI dengan PM Qatar Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani di sela-sela Pertemuan *Bali Democracy Forum IV,* Bali, 8 Desber 2011;
b) Kunjungan Jaksa Agung Qatar ke Indonesia dalam rangka menghadiri konferensi regional ke-tujuh untuk Asosiasi Jaksa Agung Asia Pasifik dan Timur Tengah, 16 – 19 Maret 2011;
c) Kunjungan Menteri Sosial RI, Salim Assegaf ke Qatar, 30 April – 1 Mei 2011;
d) Kunjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, H.E Mr. Ahmad bin Abdullah Al-Mahmud, untuk menghadiri KTM ke-16 GNB dan Pertemuan Peringatan 50 tahun GNB di Bali, 23-27 Mei 2011; dan
e) Kunjungan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab dan para pengusaha ke Qatar untuk mengadakan pertemuan dengan Penasehat Menteri Energi dan Industri, serta pengusaha *Qatar Mining*, 13 – 14 Juni 2011.
f) Kunjungan Perdana Menteri Qatar, Y.M. Mr. Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani dalam rangka menghadiri *Bali Democracy Forum* di Bali, pada 8 – 9 Desember 2011.
g) Kunjungan Menlu RI menghadiri 4th UN Alliance of Civilization, 11-12 Desember 2011.

Foto 88. Presiden RI dan PM Qatar di sela-sela Pertemuan *Bali Democracy Forum IV,* Bali, 8 Desember 2011

Bidan

Hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Qatar terus berkembang. Nilai total perdagangan RI – Qatar pada tahun 2010 mencapai nilai USD 649,3 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 465,2 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 66.5% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Di bidang sosial budaya, Indonesia terus mengupayakan peningkatan pengiriman tenaga kerja ahli Indonesia (perawat dan pertambangan) ke Qatar. Di tahun 2011 ini, kedua negara sepakat membahas *draft* MoU penempatan tenaga kerja ahli Indonesia ke Qatar.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Selama paruh pertama tahun 2011, terdapat 552 kasus yang menimpa TKI Indonesia yang bekerja di Qatar. Selama tahun 2011, Pemri telah berhasil memenangkan tuntutan utang darah (diyat) dari keluarga pembunuhan dua orang WNI (PLRT) yaitu Alm. Yayah Salsiah bt Zunaedi dan Alm. Oom Komariah bt Kamid Casem.

Sudan

Hubungan Indonesia–Sudan telah terjalin dengan baik khususnya di bidang politik melalui kerja sama di berbagai forum internasional. Perkembangan penting yang terjadi di Sudan pada tahun 2011 adalah berdirinya negara baru Sudan Selatan yang melepaskan diri dari Sudan, sebagai hasil dari referendum dan proses perdamaian di Sudan.

Bidang Politik

Indonesia menjadi salah satu negara pengamat referendum Sudan Selatan yang berlangsung pada tanggal 9–15 Januari 2011. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia menunjuk perwakilannya di Khartoum untuk mengemban misi tersebut. Keikutsertaan Indonesia sebagai pengamat ini mendapat sambutan positif dan apresiasi dari Pemerintah Sudan, mengingat Indonesia juga memiliki pengalaman serupa di masa lalu. Referendum berjalan aman, damai, transparan dan demokratis serta mendapat legitimasi masyarakat internasional dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Pada kesempatan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011, Dubes RI mewakili

Pemri telah menghadiri acara tersebut dan menyampaikan surat Presiden RI kepada Presiden Sudan Selatan. Sehubungan dengan berdirinya negara Sudan Selatan, KBRI Khartoum telah menjajaki kemungkinan dijalinnya hubungan bilateral dan kerja sama RI – Sudan Selatan di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bagi kedua negara.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi RI–Sudan dengan berbagai keterbatasan teknis yang ada, berjalan cukup baik. Indonesia mengimpor minyak dalam jumlah yang cukup besar dari Sudan. Kendala dalam bidang perdagangan antara lain: belum adanya bank korespondensi antara kedua negara; tarif/bea masuk produk eks Indonesia relatif tinggi; beberapa jenis produk perlu diregistrasi secara khusus dan memerlukan biaya yang cukup besar; masih terdapat *technical barrier* termasuk non-tarif; masih diperlukan legalisasi dokumen ekspor; dan biaya kargo cukup tinggi karena jarak kedua negara yang cukup jauh.

Sedangkan di bidang investasi antara lain perlu: ditingkatkan promosi potensi investasi masing-masing, iklim investasi di kedua negara perlu dibenahi khususnya terkait masalah keamanan, peraturan hukum dan perundang-undangan, pungutan liar, birokrasi dan waktu pengurusan pendaftaran investasi, pajak dan adanya kebijakan otonomi daerah; dan perbaikan infrastruktur penunjang proyek-proyek investasi.

Ekspor Indonesia ke Sudan adalah teh, bahan makanan, aneka jenis minuman, tembakau, produk perminyakan, bahan-bahan mentah, bahan-bahan kimia, barang-barang produksi, peralatan permesinan, perlengkapan transportasi dan tekstil. Impor Indonesia dari Sudan terbesar pada komoditas migas dan katun. Investasi Indonesia di Sudan adalah pada bidang perminyakan (PT. Pertamina, PT. Pan Oil & Gas Indonesia) dan industri mie instan. Investasi Sudan di Indonesia yaitu pada bidang pertambangan batubara di Kalimantan Tengah.

Total perdagangan Indonesia – Sudan hingga akhir Agustus 2011 tercatat sebesar USD 161,9 juta dan diperkirakan akan dapat mencapai USD 176,6 juta pada akhir tahun 2011 atau turun sekitar USD 23,9 juta (-11.95%) bila dibandingkan dengan capaian perdagangan tahun 2010 (USD 200,6 juta).

Suriah

Hubungan Indonesia – Suriah pada tahun ini pada umumnya berlangsung cukup baik. Terkait dengan perkembangan gejolak politik di Suriah pada paruh kedua 2011 ini, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya terhadap jatuhnya korban masyarakat sipil di Suriah.

Bidang Politik

Hubungan baik kedua negara sepanjang tahun 2011 ini tercermin pada kunjungan pejabat tinggi kedua negara, antara lain:

a) Kunjungan Deputi PM Suriah Abdullah Dardari di awal bulan Maret 2011;
b) Kunjungan Wakil Menlu Faisal al-Mikdad ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTM ke-16 GNB dan pertemuan peringatan 50 tahun GNB di Bali, 23-27 Mei 2011;
c) Kunjungan Dr. Bouthaina Shaaban, utusan khusus Presiden Suriah ke Indonesia pada tanggal 12 -14 Oktober 2011 terkait situasi politik di Suriah.

Terkait dengan perkembangan politik dan jatuhnya sejumlah korban sipil dalam gejolak politik di Suriah,Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinannya atas perkembangan tersebut. Indonesia menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dimanapun, termasuk di Suriah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, Indonesia memandang pentingnya penghentian konfrontasi yang menggunakan kekuatan militer. Indonesia meyakini bahwa satu-satunya solusi atas krisis di Suriah adalah melalui proses politik yang inklusif, melanjutkan proses dialog dan melaksanakan reformasi yang memenuhi semata-mata kepentingan rakyat Suriahsecara keseluruhan.

Berkaitan dengan perkembangan di Suriah tersebut di atas, Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar RI untuk Suriah ke Jakartapada tanggal 11 Agustus 2011 dan kembali ke Damaskus pada

tanggal 31 Oktober 2011. Menyusul perkembangan dinamika politik di Suriah dan kawasan Timur Tengah, Dubes RI Damaskus kembali dipanggil ke Jakarta untuk konsultasi pada awal bulan Desember 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang kerja sama ekonomi, pada bulan Maret 2011 telah ditandatangani *Agreement on the Establishment of a Syrian-Indonesian Business Council* di Jakarta diantara kalangan pengusaha kedua negara. Pada saat yang sama juga telah dilakukan pembicaraan dalam bidang investasi *joint venture* di sektor *fishing farm, oil drilling,* dan *water treatment* di Suriah.

Total perdagangan Indonesia – Suriah tahun 2010 sebesar USD 75,9 juta dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 61,3 juta sedangkan Januari-Agustus 2011 tercatat sebesar USD 51,1 juta dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 42,3 juta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan Oktober 2011, di Suriah tercatat di KBRI sejumlah 12.572WNI.

Selama periode Januari – Oktober 2011, tercatat 582 kasus yang melibatkan WNI dan umumnya menyangkut gaji yang tidak dibayarkan.

Tunisia

Hubungan Indonesia-Tunisia sepanjang tahun 2011 berlangsung baik. Situasi politik di Tunisia pada tahun 2011 ini diwarnai oleh pergolakan politik yang berhasil menurunkan pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang telah berkuasa sejak 7 November 1987 dan diselenggarakannya pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan baru.

Bidang Politik

Hubungan bilateral di bidang politik antara RI dan Tunisia telah terjalin baik sejak lama. Atas dasar kedekatan dan kesetaraan antara Indonesia – Tunisia, kedua negara pada umumnya saling mendukung dalam pencalonan masing-masing pada keanggotaan di berbagai organisasi internasional a.l. dukungan Tunisia atas pencalonan kandidat Indonesia dalam *Council of the International Maritime Organization* (IMO) Kategori C pada periode 2009-2011, dukungan Tunisia atas pencalonan Pemri sebagai Anggota Dewan *International Telecommunication Union* (ITU) periode 2010-2014, dukungan Tunisia pada Indonesia dalam *World Heritage Committee* serta dukungan Tunisia pada Indonesia sebagai anggota *Executive Board* UNESCO tahun 2012-2015.

Di sela-sela pelaksanaan KTM Ke-16 GNB di Bali, Menlu RI telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Tunisia, Mohamed Mouldi Kefi pada tanggal 25 Mei 2011. Terkait dengan proses transisi demokrasi di Tunisia, Menlu RI antara lain menyampaikan dukungan terhadap proses reformasi dan transisi demokrasi di Tunisia dan mengharapkan hal tersebut akan mendorong hubungan bilateral kedua negara semakin erat. Dalam kaitan ini, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berbagai pengalaman terkait dengan transisi demokrasi dan reformasi yang hingga kini masih terus berlangung di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi bantuan yang diberikan Pemerintah Tunisia kepada WNI yang berdomisili dan bekerja di Tunisia baik dalam aspek kekonsuleran maupun keimigrasian serta atas dukungan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Tunisia pada proses evakuasi WNI di Libya melalui Tunisia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang ekonomi, total perdagangan Indonesia-Tunisia menunjukkan peningkatan sebesar 58,71 % dari total perdagangan sebesar USD 50, 7 juta pada bulan Januari-Agustus 2010 menjadi USD 80,49 juta di periode yang sama pada tahun 2011 dengan posisi surplus untuk Indonesia. Di bidang sosial budaya, Indonesia dan Tunisia juga telah mewujudkan kerja sama berdasarkan MoU di bidang kebudayaan, pariwisata, keagamaan, kepemudaan dan olahraga. Peningkatan hubungan kedua negara terus diupayakan dengan direncanakannya pelaksanaan SKB ke-10 Indonesia-Tunisia, namun hingga saat ini belum terealisasi mengingat dengan kondisi dalam negeri Tunisia yang belum sepenuhnya stabil setelah mengalami

pergolakan dan pergantian pemerintahan. SKB dimaksud direncanakan akan dijadwalkan kembali pada kwartal pertama tahun 2012.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Terkait dengan gejolak politik yang terjadi di Tunisia, KBRI di Tunisia pada bulan Januari 2011 telah melakukan evakuasi terhadap seluruh WNI di Tunisia. Dalam proses evakuasi tersebut KBRI juga telah menampung sebagian WNI di Wisma Dubes RI dan kantor KBRI Tunis. Jumlah WNI di Tunisia yang dievakuasi ke Tunis selama Januari 2011 tercatat sebanyak 120 orang, dimana 32 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia sektor informal.

Selain melakukan evakuasi WNI terkait gejolak di Tunisia, KBRI Tunis juga membantu proses evakuasi WNI dari Libya yang berbatasan darat dengan Tunisia. Sejak pergolakan yang melanda Libyapada akhir Maret 2011, KBRI Tunis telah membentuk Tim Evakuasi dan membuka posko evakuasi dekat perbatasan Tunisia dan Libya serta melakukan koordinasi dengan *International Organization for Migration* (IOM), imigrasi Tunisia dan Komando Militer Tunisia di daerah Rasjedir guna membantu TKI yang melintasi perbatasan Tunisia-Libya.

Meskipun terjadi penumpukan orang di perbatasan Tunisia-Libya yang mencapai ribuan orang dari berbagai negara, dan kendala dimana beberapa WNI tidak memiliki dokumen lengkap namun proses evakuasi WNI dari Libya yang dibantu oleh KBRI Tunis dan KBRI Tripoli berjalan lancar meskipun mengalami sejumlah hambatan.

Per tanggal 4 Mei 2011, pada proses evakuasi tahap ke-16 melalui perjalanan darat, jumlah WNI eks Libya yang telah dievakuasi melalui Tunisia mencapai 583 orang.

Yaman

Secara bilateral hubungan Indonesia – Yaman tidak mengalami hambatan yang berarti dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kekonsuleran. Proses demokratisasi, perlindungan HAM, dan kerja sama teknologi dapat dijadikan dasar peningkatan hubungan bilateral di masa mendatang.

Bidang Politik

Hubungan bilateral Indonesia-Yaman berjalan baik, meskipun selama tahun 2011 ini ditandai dengan gejolak politik dalam negeri di Yaman. Hubungan kerja sama kedua negara di bidang politik ditandai dengan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, diantaranya partisipasi Wakil Menlu Yaman pada KTM ke-16 GNB dan pertemuan peringatan 50 tahun GNB di Bali, 23-27 Mei 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan ekonomi kedua negara perlu terus ditingkatkan. Produk-produk unggulan ekpor Indonesia antara lain ban, baterai, suku cadang, kertas, tekstil, *furniture* dan alat – alat listrik.

Nilai total perdagangan RI – Yaman pada tahun 2010 mencapai nilai USD 118,3 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 62,2 juta, atau yang berarti mengalami penurunan sebesar 15,34% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Pada tahun 2011, PT. Medco Energy International telah berinvestasi senilai USD 40 juta untuk pengembangan dua daerah konsesi minyaknya di Yaman.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan gejolak politik yang terjadi di Yaman, Pemri melalui KBRI di Sanaa memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan WNI yang bermukim di Yaman. Dalam kaitan ini, Pemri telah melakukan evakuasi WNI/Mahasiswa/Pelajar sebanyak 405 orang dari wilayah-wilayah yang bergejolak di Yaman, dan memulangkan 270 orang diantaranya ke Indonesia.

Foto 89 Suasana di Penampungan KBRI Sana'a selama proses evakuasi WNI di Yaman

Yordania

Hubungan kedua negara terpelihara dengan baik di berbagai bidang khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan kekonsuleran.

Bidang Politik

Di fora internasional, kedua negara selalu menunjukkan kerja sama yang erat seperti saling dukung dalam pencalonan wakil kedua negara di berbagai badan internasional.

Indonesia dan Yordania juga bekerja sama melalui berbagai organisasi internasional seperti: PBB, OKI, dan GNB dalam upaya bersama untuk mencapai penyelesaian damai terhadap masalah Palestina khususnya dan Timur Tengah pada umumnya.

Pada pertemuan kedua Menlu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-66 September 2011, kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan kerja sama ke tingkat yang lebih tinggi termasuk melalui upaya peningkatan *people-to-people contacts* dan kerja sama di tingkat global melalui GNB.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Peluang peningkatan kerja sama di bidang perdagangan masih cukup luas. Komoditi ekspor Indonesia ke Yordania diantaranya adalah kayu dan produk olahannya, *textile* and *garment*. Adapun produk unggulan yang mempunyai peluang memasuki pasar Yordania antara lain: makanan dan produk olahan dalam kaleng, produk elektronik, kertas. Sementara itu, impor Indonesia adalah *potash,*fosfat, garam dan produk-produk dari Laut Mati.

Hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Yordania terus meningkat. Nilai total perdagangan RI – Yordania pada tahun 2010 mencapai nilai USD 262,8 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 245,1 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 72,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sejak 29 Juli 2010, Pemri telah menerapkan kebijaksanaan moratorium pengiriman TKI ke Yordania untuk pekerja di sektor domestik. Indonesia dan Yordania telah 2 kali bertemu dalam pertemuan *Joint Working Group* pada tanggal 15 Mei 2011 di Amman dan pada tanggal 29 – 30 September 2011 di Yogyakarta untuk membahas tindak lanjut dan penyelesaian persoalan pengiriman TKI. Isu-isu yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan pihak Yordania agar Pemerintah Indonesia segera mencabut moratorium pengiriman TKI ke Yordania, sedangkan pihak Indonesia mensyaratkan perbaikan mekanisme penempatan bagi TKI asal Indonesia sebagai syarat mutlak pencabutan moratorium.

Saat ini walaupun moratorium diberlakukan, TKI (ilegal) masih banyak berdatangan ke Yordania. Hal ini antara lain disebabkan pemberlakuan *visa on arrival* bagi orang asing termasuk asal Indonesia yang ingin ke Yordania.

III.3.1.4 Kawasan Sub-Sahara Afrika

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika menjadi semakin penting mengingatperkembangan positif di bidang politik, keamanan dan ekonomi di kawasan Sub-Sahara Afrika yang memunculkan berbagai peluang peningkatan kerja sama serta peningkatan ekspor ke kawasan sebagai pasar non-tradisional.

Dari 47 negara yang ada di kawasan, Indonesia saat ini mempunyai hubungan diplomatik dengan 40 negara. Pemerintah RI telah membuka hubungan diplomatik terbaru dengan Niger dan Sao Tome dan Principe di sela-sela SMU PBB pada September 2011 di New York. Dengan demikian, masih terdapat 5 negara di kawasan yang masih belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, yaitu: Botswana, Malawi, Republik Afrika Tengah, Guinea Equatorial, dan Chad.

Perwakilan-perwakilan RI di kawasan Sub-Sahara Afrika telah secara aktif melakukan kegiatan promosi ekonomi dan pariwisata sekaligus pencitraan Indonesia di kawasan. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dalam bentuk penyelenggaraan pameran di KBRI, fasilitasi partisipasi pengusaha Indonesia pada pameran-pameran internasional yang diselenggarakan di negara akreditasi, malam kesenian Indonesia, *gala dinner, familiarization trip* ke Indonesia dan fasilitasi kunjungan pengusaha negara akreditasi ke Indonesia.

Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya promosi potensi ekonomi Indonesia antara lain dalam bentuk familiarisasi kepada para Duta Besar negara-negara sahabat dari Kawasan Sub-Sahara Afrika yang terakreditasi untuk Indonesia, fasilitasi kunjungan bisnis para pengusaha Indonesia ke negara-negara kawasan tersebut, seminar di daerah, fasilitasi kegiatan *business forum* dan temu usaha antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari negara akreditasi.

Khusus pada tahun 2011 juga telah dilakukan kegiatan *New Initiative 2011* sebagai terobosan peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Sub-Sahara Afrika. *New Initiatives* 2011 yang dilaksanakan oleh Direktorat Afrika ditujukan untuk mendorong promosi investasi dan perdagangan di

kawasan Sub-Sahara Afrika yang terdiri atas 4 (empat) program yaitu:

- Forum Bisnis Pengusaha Indonesia dan Sub-Sahara Afrika
- Mendorong Penjaminan dan Pembiayaan Ekspor-Impor Indonesia dengan negara-negara Sub-Sahara Afrika
- Promosi Pengembangan Kerja Sama Pertanian dan Pemasaran Produk Industri Pertanian Indonesia ke Pasar Sub-Sahara Afrika
- Peningkatan Kerja Sama Investasi Indonesia dan negara-negara Sub-Sahara Afrika di Bidang Produksi Pengolahan dan Industri Manufaktur untuk Mendorong Perluasan Pasar Produk Indonesia.

Angola

Hubungan bilateral RI-Angola dilaksanakan melalui KBRI-Pretoria. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik. Meskipun angka perdagangan pada tahun 2011 mengalami penurunan,kedua pemerintah terus mencari terobosan upaya peningkatan hubungan bilateral.

Nilai total perdagangan Indonesia-Angola pada periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 63,30 juta atau mengalami penurunan sebesar 46,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari KBRI Pretoria, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 114 WNI yang berdomisili di Angola, yang berprofesi sebagai mahasiswa dan bekerja di sektor perminyakan serta konstruksi.

Benin

Hubungan bilateral RI-Benin dilaksanakan melalui KBRI-Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik, terutama di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Benin pada periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 199,67 juta atau mengalami kenaikan sebesar 74,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, tidak terdapat WNI yang berdomisili di Benin.

BurkinaFaso

Hubungan bilateral RI-Burkina Faso dilaksanakan melalui KBRI-Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik, terutama di bidang ekonomi.

Beberapa rancangan penjanjian bilateral yang masih dibahas oleh kedua negara adalah MoU Pembentukan Komisi Bersama, Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Perjanjian Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Dinas/Diplomatik.

Nilai total perdagangan Indonesia-Burkina Faso pada periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 51,63 juta atau mengalami kenaikan sebesar 0,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, tidak terdapat warga negara Indonesia yang berdomisili di Burkina Faso.

Burundi

Hubungan bilateral RI-Burundi dilaksanakan melalui KBRIDaar Es-Salam.Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik.

Nilai total perdagangan Indonesia-Burundi pada periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 0,35 juta atau mengalami penurunan sebesar 50,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Cape Verde

Hubungan bilateral RI-Cape Verde dilaksanakan melalui KBRI-Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cape Verde berjalan baik dan Cape Verde merupakan salah satu negara yang mendukung pencalonan

Indonesia pada Dewan HAM PBB 2011-2014 secara unilateral yang pemilihannya diselenggarakan pada *resumed session* Sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York, tanggal 20 Mei 2011.

Nilai total perdagangan Indonesia-Cape Verde pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD 0,46 juta atau mengalami kenaikan 233,1 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Djibouti

Hubungan bilateral Indonesia-Djibouti dilaksanaan oleh KBRI Addis Ababa, sementara itu Perwakilan Djibouti untuk Indonesia dirangkap oleh Perwakilan Djibouti di Tokyo. Indonesia telah memiliki Konsul Kehormatan RI untuk Djibouti yaitu Liban Houssein Farah.

Sebagai sesama negara anggota OKI dan GNB, Djibouti memandang hubungan dengan Indonesia adalah penting karena Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan negara berkembang (Selatan-Selatan). Kedua negara memiliki sejumlah pandangan yang sama pada masalah-masalah global.

Di bidang ekonomi, perkembangan perdagangan kedua negara mengalami peningkatan dan neracanya surplus di pihak Indonesia. Tahun 2010, nilai total perdagangan Indonesia – Djibouti sebesar USD 71,4 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 71,1 juta dan impor sebesar USD 0,3 juta. Dari Januari sampai Agustus 2011, nilai total perdagangan RI-Djibouti sebesar USD 109,3 juta sehingga nilai total perdagangan tahun ke tahun naik sebesar 119%.

Eritrea

Hubungan bilateral Indonesia-Eritrea dilaksanakan oleh KBRI – Addis Ababa, sementara itu Indonesia diakreditasi oleh Kedutaan Eritrea di New Delhi, India. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berlangsung dengan baik.

Hubungan perdagangan Indonesia dan Eritrea masih melalui pihak ketiga, umumnya dari negara-negara Arab seperti Saudi Arabia dan Persatuan Emirat Arab. Sejumlah produk Indonesia seperti kertas dan alat-alat tulis dapat diperoleh di pasaran Eritrea, yang diambil dari Saudi Arabia dan PEA. Nilai total nilai perdagangan RI-Eritrea sebesar USD 3,6 juta pada tahun 2010, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 3,5 juta dan impor sebesar USD 0,1 juta. Dari Januari - Agustus 2011, nilai total perdagangan RI-Eritrea sebesar 3,1 juta sehingga nilai perdagangan tahun ke tahun naik sebesar 34,2%

Ethiopia

Hubungan bilateral Indonesia-Ethiopia dilaksanakan oleh KBRI – Addis Ababa. Sepanjang tahun 2011 hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik, terutama di bidang politik dan ekonomi.

Hubungan politik, ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia dan Ethiopia dalam tahun 2011 terus mengalami kemajuan. Ethiopia berpeluang untuk menjadi *hub* kerja sama Indonesia di kawasan Afrika, karena markas besar Uni Afrika dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika berada di ibukota Ethiopia, Addis Ababa. Saat ini, Ethiopia merupakan ketua *New Economic Partnership for Africa Development* (NEPAD), yang beranggotakan para pemimpin Afrika untuk menangani berbagai tantangan yang dihadapi oleh Afrika seperti kemiskinan, pembangunan, dan marjinalisasi Afrika di fora internasional.

Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia tentang Kerja sama Ekonomi dan Teknik, telah ditandatangani di New York pada tanggal 20 September 2011. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik antara RI dan Ethiopia di bidang pertanian, sektor minyak dan mineral, investasi dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, keluarga berencana dan pemberantasan kemiskinan, usaha kecil menengah, dan bidang lainnya yang disepakati para pihak. Dengan adanya perjanjian ini, sekarang kedua negara memiliki perjanjian payung untuk kerja sama di bidang-bidang lain yang lebih konkrit.

Nilai total perdagangan RI-Ethiopia pada tahun 2010 adalah USD 19,1 juta, terdiri dari ekspor Indonesia

sebesar USD 14 juta dan impor sebesar USD 5,1 juta. Dari Januari hingga Agustus 2011, nilai total perdagangan Indonesia-Ethiopia sebesar USD 14,7 juta. Jika dihitung tahun ke tahun, maka nilai total perdagangan kedua negara mengalami peningkatan sebesar 12%. Pada saat berlangsungnya 26th *Trade Expo Indonesia* (TEI), di Jakarta tanggal 19-23 Oktober 2011, terdapat 32 pengusaha Ethiopia yang menghadiri kegiatan TEI, dimana 12 orang diantaranya mengikuti kegiatan *one on one business meeting* dan *company visit* selama penyelenggaraan TEI.

Di bidang sosial budaya, Indonesia telah memberikan bantuan beasiswa gelar maupun non gelar kepada beberapa warga negara Ethiopia. Beasiswa tersebut antara lain di bidang keluarga berencana, manajemen mikro, ilmu astronomi, perbankan syariah, dan pelatihan untuk diplomat Ethiopia. KBRI Addis Ababa juga telah menyelenggarakan *Indonesia-Ethiopia Interfaith Dialogue* di Jakarta dan Bandung tanggal 19-21 April 2011 dengan mengundang 3 tokoh agama dari Ethiopia dalam kegiatan tersebut, masing-masing dari Gereja Ortodoks Ethiopia, Ethiopian Islamic Supreme Council, dan Gereja Katolik Ethiopia.

Berdasarkan data dari KBRI Addis Ababa, terdapat 76 warga negara Indonesia yang berdomisili di Ethiopia.

Foto 90Menlu RI dan Menlu Ethiopia Menandatanganani Persetujuan Kerja sama Ekonomi Tenik antara RI dan EthiopiaNew Yok, 20 September 2011

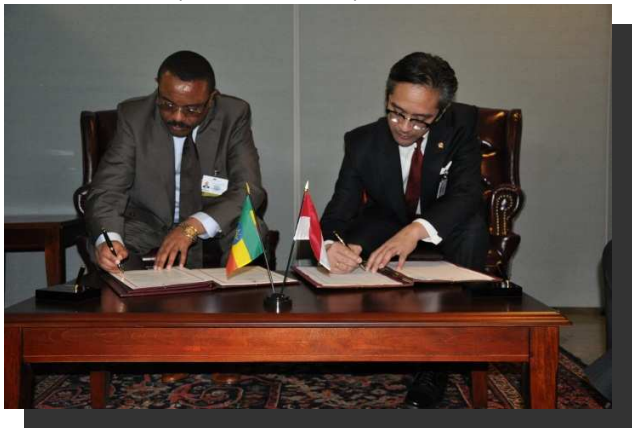

Gabon

Hubungan bilateral RI-Gabon dilaksanakan oleh KBRI Dakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan terutama di bidang politik dan ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Gabon pada periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 11,06 juta atau mengalami kenaikan sebesar 74,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari KBRI Dakar, hingga bulan Oktober 2011 terdapat 267 warga negara Indonesia yang berdomisili di Gabon, yang pada umumnya bekerja di sektor perminyakan dan perkebunan.

Gambia

Hubungan bilateral Indonesia-Gambia dilaksanakan oleh KBRI-Dakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan baik dan mengalami peningkatan terutama di bidang ekonomi.

Dalam kerangka Kerja Sama Selatan – Selatan, Indonesia telah merevitalisasi Pusat Pertanian ARFTC (*Agricultural and Rural Farmers Training Center*) di Jenoi, Gambia dengan mengirimkan 3 (tiga) orang penyuluh pertanian Indonesia ke pusat penilitian pertanian tersebut untuk periode September-November 2011. Nilai total perdagangan Indonesia-Gambia pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat sebesar USD22,23 juta atau mengalami kenaikan 37,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Dalam catatan KBRI Dakar, terdapat 8 orang WNI di Gambia.

Ghana

Hubungan bilateral Indonesia-Ghana dilaksanakan oleh KBRIAbuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Ghana pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD 113,82

juta atau mengalami kenaikan 10,01% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Berdasarkan data KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, terdapat 7 orang warga negara Indonesia yang berdomisili di Ghana.

Guinea

Hubungan bilateral Indonesia-Guinea dilaksanakan oleh KBRIDakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Guineapada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD 11,75 juta atau mengalami penurunan sebesar51,22% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Berdasarkan data dari KBRI Dakar, hingga bulan Oktober 2011 terdapat 3 WNI yang berdomisili di Guinea yang bekerja sebagai rohaniwan.

Guinea Bissau

Hubungan bilateral Indonesia-Guinea Bissau dilaksanakan oleh KBRIDakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Guinea Bissau pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD1,00 juta atau mengalami kenaikan sebesar 48,43% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Berdasarkan data KBRI Dakar, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 3 orang warga negara Indonesia yang berdomisili di Guinea Bissau.

Kamerun

Hubungan bilateral Indonesia-Kamerun dilaksanakan oleh KBRI-Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Kamerun pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD36,02 juta atau mengalami kenaikan sebesar32,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Berdasarkan data KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, terdapat 13 orang WNI yang berdomisili di Kamerun.

Kenya

Hubungan bilateral Indonesia-Kenya dilaksanakan oleh KBRI-Nairobi. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Hubungan bilateral RI-Kenya telah berjalan baik dan tercatat kunjungan Menteri Pengembangan Perumahan Kenya ke Indonesia pada bulan Mei 2011 serta kunjungan Menteri Perumahan Rakyat RI ke Kenya pada bulan Juli 2011.

Di bidang ekonomi selama ini telah berjalan dengan baik namun belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki oleh kedua negara. Perusahaan Indonesia yang telah menanamkan investasinya di Kenya yakni Atelier Enam International, perusahaan *engineering, procurement and construction* yang telah menandatangani kontrak pembangunan perumahan dan Shopping Mall senilai USD 45 juta.Indonesia dan Kenya telah menjalin kerja sama teknik pengembangan kapasitas di bidang perikanan.

Pada tahun 2010, nilai total perdagangan kedua negara mencapai USD 267 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 246,2 juta dan impor Indonesia sebesar USD 22,8 juta. Sedangkan untuk Januari – Agustus 2011, nilai total ekspor Indonesia mencapai USD 183,1 juta dan impor Indonesia mencapai USD 15,9 juta.

Berdasarkan data KBRI Nairobi, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 123 WNI yang berdomisili di Kenya, yang pada umumnya berprofesi sebagai mahasiswa, rohaniwan, dan pekerja profesional lainnya.

Komoro

Hubungan bilateral Indonesia-Komoro dilaksanakan oleh KBRI Nairobi. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berlangsung baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Komoropada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD1,19 juta atau mengalami sedikit penurunan sebesar 1,25% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Peserta dari Komoro (6 orang) telah berpartisipasi pada pelatihan pertanian 3 April-27 Mei 2011 di Kuningan dan Lembang, Jawa Barat.

Lesotho

Hubungan bilateral Indonesia-Lesotho dilaksanakan oleh KBRI Pretoria. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berlangsung baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang politik. Dalam kaitan ini Lesotho telah menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota *Executive Board* UNESCO periode 2011-2015.

Total nilai perdagangan Indonesia-Lesotho pada periode Januari – Agustus 2011 adalah sebesar USD 0,48 juta atau mengalami penurunan sebesar 45,51% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada tanggal 12-15 Juni 2011, delegasi bisnis asal Lesotho telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka menjajaki peluang kerja sama perdagangan dengan mitra dunia usaha di Indonesia.

Liberia

Hubungan bilateral Indonesia-Liberia dilaksanakan oleh KBRI Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut mengalami peningkatan terutama di bidang politik dan ekonomi.

Kedekatan hubungan Indonesia –Liberia tercermin dari dukungan Liberia terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 yang pemilihannya diselenggarakan pada *resumed session* Sidang Majelis Umum PBB ke-65 pada tanggal 20 Mei 2011 di New York.

Nilai total perdagangan Indonesia-Liberia pada periode Januari – Agustus (2011) tercatat USD 12,32 juta atau mengalami penurunan 9,86% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010. Berdasarkan data KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, terdapat 10 orang warga negara Indonesia yang berdomisili di Liberia yang bekerja di sektor pariwisata.

Madagaskar

Hubungan bilateral Indonesia-Madagaskar dilaksanakan oleh KBRI Antananarivo. Selama tahun 2011 terjalin baik khususnya di bidang perdagangan dan investasi.

Pergantian pemerintahan secara kudeta di Madagaskar pada Maret 2009 dan belum diakuinya pemerintahan saat ini oleh dunia internasional dan Uni Afrika sebagai organisasi kawasan di Afrika, telah memberikan dampak terhadap hubungan politik Indonesia-Madagaskar sepanjang tahun 2011.

Kerja sama ekonomi terutama antara usahawan kedua negara tetap berjalan. Kunjungan pengusaha ataupun masyarakat Madagaskar ke Indonesia cukup baik, terutama pengusaha tradisional yang dikenal dengan pedagang “inang-inang”. Selain itu, kunjungan pengusaha tingkat menengah telah dilakukan baik pengusaha Madagaskar ke Indonesia maupun sebaliknya. Mereka bergerak antara lain dalam hal penawaran produk sabun, pembelian cengkeh, dan penawaran produk makanan. Produk RI telah cukup banyak ditemui di berbagai daerah di Madagaskar, antara lain sabun mandi, produk perawatan kulit, produk kecantikan, produk makanan, dan produk pecah belah. Produk tersebut selain dibawa oleh pedagang “inang-inang” yang sering berkunjung ke Indonesia, juga diantaranya masuk melalui agen setempat yang menjadi mitra bisnis perusahaan Indonesia.

Indonesia memberikan beberapa skema beasiswa kepada para mahasiswa Madagaskar untuk belajar

di Indonesia,yaitu program Dharmasiswa dan program S-2 KNB sejak tahun 2007.

Berdasarkan data dari KBRI Antananarivo, hingga bulan Oktober 2010, terdapat 52 orang WNI di Madagaskar, yang pada umumnya bekerja sebagai rohaniwan dan di sektor perikanan.

Mali

Hubungan bilateral Indonesia – Mali dilaksanakan oleh KBRI Dakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Kedekatan hubungan Indonesia–Mali tercermin dari dukungan Mali terhadap pencalonan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB periode 2011-2014 yang pemilihannya diselenggarakan pada *resumed session* Sidang Majelis Umum PBB ke-65 pada tanggal 20 Mei 2011 di New York.

Nilai total perdagangan Indonesia-Mali pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD 58,03 juta atau mengalami kenaikan 184,31 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Mauritius

Hubungan bilateral Indonesia-Mauritius dilaksanakan oleh KBRI Nairobi. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik dan ekonomi.
Pada tahun 2010, nilai total perdagangan sebesar USD 85 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 83,6 juta dan impor Indonesia sebesar USD 1,4 juta. Sedangkan untuk periode Januari – Agustus 2011, nilai ekspor Indonesia sebesar USD 55,3 juta dan impor Indonesia sebesar USD 4,9 juta.

Berdasarkan data KBRI Nairobi, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 51 orang WNI yang berdomisili di Mauritius, yang pada umumnya berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa, perusahaan industri, dan profesi profesional lainnya.

Mozambik

Hubungan bilateral Indonesia – Mozambik dilaksanakan oleh KBRI Maputo, yang dibuka pada tanggal 29 Desember 2010. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan dengan baik dengan mengalami peningkatan, terutama di bidang politik dan ekonomi.

Mekanisme hubungan bilateral kedua negara dilakukan melalui Sidang Komisi Bersama pada tingkat pejabat tinggi. Pada KTM GNB ke-16 di Bali pada bulan Mei 2011, delegasi Mozambik hadir dan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Eduardo Koloma.

Di bidang perdagangan, Indonesia telah mengirimkan Tim Teknis ke Mozambik pada Maret 2011 dalam rangka pembahasan skema *forward processing scheme* impor komoditas kapas dari Mozambik. Nilai total perdagangan kedua negara tahun 2011 sebesar USD 85,9 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD68,8 juta dan impor Indonesia sebesar USD17 juta. Delegasi pengusaha Mozambik turut berpartisipasi dalam *Trade Expo Indonesia* (TEI) 2011.

Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2011 yakni:

1. *MoU between the Governmnet of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozabique on Scientific and Technological Cooperation*, 14 September 2011.
2. *MoU between the Indonesian National Police and the Ministry of Interior of the Republic of Mozambique on Preventing and Combating Transnational Crimes And Capacity Building*, 22 September 2011.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 juga telah memberikan pelatihan teknis pengembangan kapasitas di bidang agro-industri kepada Mozambik.

Berdasarkan data dari KBRI Maputo, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 112 warga negara Indonesia yang berdomisili di Mozambik, yang berprofesi sebagai rohaniwan dan bekerja di sektor perminyakan serta pertambangan.

Namibia

Hubungan bilateral Indonesia-Namibia dilaksanakan oleh KBRI Windhoek. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berlangsung dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Hubungan antara Indonesia dengan Namibia terus mengalami peningkatan, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Kerja Sama Pertanian RI-Namibiapada bulan Maret 2011 dan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU tersebut, delegasi Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Pertanian telah melakukan kunjungan ke Namibia pada tanggal 2-3 November 2011. Pada kesempatan tersebut, disepakati peningkatan program *capacity building* dan pelatihan di bidang karantina dan penanaman padi. Selain itu, pada tanggal 26 April 2011, telah ditandatangani MoU Kerja Sama Kepolisian RI-Namibia. MoU tersebut mencakup kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama dalam pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan kejahatan lintas negara.

Wakil Menteri Perdagangan Namibia beserta 18 (delapan belas) orang anggota delegasi dari kalangan pemerintah dan swasta telah mengadiri *Trade Expo Indonesia* (TEI) 2011. Dalam kesempatan kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Namibia juga diselenggarakan *Business Forum* dan *One on One Meeting* dengan menghadirkan wakil-wakil dari instansi pemerintah dan kalangan dunia usaha Indonesia dalam rangka menjajaki peluang bisnis antara Indonesia dan Namibia.

Berdasarkan data dari KBRI Windhoek, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 101 warga negara Indonesia yang berdomisili di Windhoek, yang berprofesi sebagai mahasiswa dan pengusaha serta bekerja di sektor perikanan (ABK).

Niger

Hubungan bilateral Indonesia – Nigermemasuki babak baru pada tahun 2011 ini dengan disepakatinya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara dalam bentuk penandatangan *joint communique* oleh kedua Menteri Luar Negeri di New York, pada tanggal 21 September 2011.

Foto 91.Menlu RI dan Menlu Niger Menandatangani *Joint Communique*Pembukaan Hubungan Diplomatik Kedua Negara, New Yok, 21 September 2011

Nilai total perdagangan bilateral RI-Niger pada periode Januari – Agustus 2011 adalah sebesar USD 2,30 juta. Angka ini mengalami peningkatan 37,71% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya mencapai USD 1,67 juta.

Nigeria

Hubungan bilateral RI-Nigeria padatahun 2011 terus mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, terutama bidang perdagangan dan pertanian.

Perkembangan dalam negeri Nigeria pada tahun 2011 yang menonjol adalah Pemilu 16 April 2011. Pada 18 April 2011, ketua INEC (*Independent National Electoral Commission)* mengumumkan pemenang pemilu Presiden dalam satu putaran yaitu Goodluck Jonathan yang memperoleh dukungan sebesar 57,64% dari 38.209.978 suara yang sah, diikuti Muhammadu Buhari sebesar 31,38%, Nuhu Ribadu 5,54% dan Ibrahim Shekaru 2,43%.

Di bidang perdagangan, pada tahun 2010 nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Nigeria mencapai USD 1,23 miliar. Kemudian pada periode Januari-Juni 2011, nilai total perdagangan bilateral kedua negara sebesar USD 729 juta. Komoditi non-migas Indonesia yang telah dipasarkan di Nigeria, antara

lain: pakaian dan bahan pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, elektronik, dll.

Kegiatan promosi ekonomi dan investasi yang telah dilakukan selama tahun 2011 diantaranya adalah:

a. Semiloka "Peningkatan Investasi Indonesia di Bidang Industri Pengolahan dan Manufaktur di Afrika Barat" di Jakarta, 7 April 2011; dan
b. *Safari Business Trip* dalam rangka peningkatan volume ekspor produk-produk Indonesia ke pasar non-tradisional di Nigeria, Togo, Benin, dan Ghana 2011 pada tanggal 5-11 Juni 2011. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perusahaan-persuahaan Indonesia di bidang peralatan kendaraan, lem/perekat, rempah-rempah, peralatan medisdan mesin pertanian.

Dalam bidang pertanian, Menteri Pertanian kedua negara telah menandatangani MoU Kerja Sama Pertanian di Bali pada tanggal 11 Maret 2011 dalam. Kemudian, telah dilakukan beberapa kunjungan studi banding dari Nigeria ke Indonesia, antara lain: kunjungan delegasi *PresidentialTechnical Committee on Land Reform Nigeria* dan delegasi *National Institute for Policy and Strategic Studies* (NIPSS) Kuru-Nigeria, yang merupakan lembaga pengkajian dan studi strategis di Nigeria.
Berdasarkan data dari KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, terdapat 361 warga negara Indonesia yang berdomisili di Nigeria. Pada umumnya para WNI tersebut bekerja di sektor perminyakan (50 orang), industri kesehatan/kecantikan (43), konstruksi (13), dan lain-lain.

Di bidang perlindungan WNI tahun 2011 ini ditandai oleh keberhasilan KBRI Abuja dan Kepolisian Nigeria untuk membebaskan seorang WNI dari penculikan.

Pantai Gading

Hubungan bilateral Indonesia-Pantai Gading (*Ivory Coast*) dilaksanakan oleh KBRI Dakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berjalan baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang ekonomi.
Meskipun terjadi krisis politik di Pantai Gading sejak bulan Oktober 2010 – April 2011, hubungan bilateral di bidang politik antara kedua negara tidak mengalami gangguan, terutama dalam hal memberikan dukungan atas pencalonan masing-masing pihak pada fora internasional.

Nilai total perdagangan Indonesia-Pantai Gading pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD63,38 juta atau mengalami penurunan 10,38% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010. Penurunan kegiatan perdagangan bilateral dengan Pantai Gading antara lain disebabkan oleh faktor kondisi dalam negeri Pantai Gading yang mengalami ketidakstabilan pasca pemilu tahun 2010.

Berdasarkan data dari KBRI Dakar, hingga bulan Oktober 2011 terdapat 14 warga negara Indonesia yang berdomisili di Pantai Gading, termasuk 3 orang yang bekerja di sektor perkebunan.

Republik Demokratik Kongo

Hubungan bilateral Indonesia – Republik Demokratik Kongo (RDK) dilaksanakan oleh KBRI Dakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik.

Berdasarkan data dari KBRI Dakar, hingga bulan Oktober 2011 terdapat 239 warga negara Indonesia yang berdomisili di Republik Demokratik Kongo yang pada umumnya bekerja sebagai rohaniwan, di sektor pertambangan dan sebagai profesional lainnya.

Republik Kongo

Hubungan bilateral Indonesia-Republik Kongo dilaksanakan oleh KBRI Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut berlangsung baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Republik Kongo pada periode bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD21,81 juta atau mengalami kenaikan sebesar112,96% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Berdasarkan data KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, terdapat 41 orang WNI yang berdomisili di Republik Kongo, yang bergerak di sektor informal.

Rwanda

Hubungan diplomatik antara Indonesia-Rwanda berjalan baik dan kepentingan Indonesia di Rwanda diwakili oleh KBRI Dar es Salaam, Tanzania sedangkan kepentingan Rwanda di Indonesia dilakukan oleh perwakilannya di Singapura.

Nilai total perdagangan Indonesia-Rwanda Januari-Agustus 2011 mencapai USD 0,84 juta atau naik 46,51 % dibandingkan tahun yang sama periode sebelumnya.

Sao Tome dan Principe

Hubungan Indonesia – Sao Tome dan Principe memasuki babak era baru pada tahun 2011 ini dengan disepakatinya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara melalui penandatangan *Joint Communique* oleh kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 27 September 2011 di New York, AS.

Foto 92.Peresmian Pembukaan Hubungan Diplomatik RI dan Sao Tome dan Principe, New York, 27 September 201

tahun 2011, hubungan bilateral antara kedua negara berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Hal ini terlihat dari kunjungan Menlu Senegal, Menlu Mali, Menlu Gambia, dan Menlu Guinea ke Indonesia pada 24-27 Mei 2011 dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok sekaligus perayaan 50 tahun GNB yang diselenggarakan di Bali.Pada kesempatan tersebut, Menlu Senegal, H.E. Mr. Madicke Niang telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI, yang antara lain membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara melalui pembentukan Komisi Bersama.

Foto 93Pertemuan Bilateral RI - Senegal, Bali, 26 Mei 201

Nilai total perdagangan Indonesia-Senegal pada periode Januari – Agustus 2011 adalah sebesar USD 41,14 juta atau mengalami peningkatan sebesar 165,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari KBRI Dakar, hingga bulan Oktober 2011 terdapat 35 warga negara Indonesia yang berdomisili di Senegal.

Seychelles

Hubungan bilateral Indonesia-Seychelles dilaksanakan oleh KBRI Nairobi. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang ekonomi.

Perdagangan Indonesia dan Seychelles masih melalui pihak ketiga yaitu Dubai dan Singapura. Dikarenakan Seychelles merupakan daerah tujuan wisata, maka produk kerajinan seperti dari Bali atau daerah lain di Indonesia mempunyai pasar yang besar di Seychelles sebagai barang cindera mata bagi turis asing. Pada tahun 2010, nilai total perdagangan sebesar USD 6,7 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 6,1 juta dan impor Indonesia sebesar USD 0,6 juta.

Berdasarkan data dari KBRI Nairobi, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 146 warga negara Indonesia yang berdomisili di Seychelles, yang pada umumnya bekerja pada sektor pariwisata, salon kecantikan, perkebunan dan profesi profesional lainnya.

Sierra Leone

Hubungan bilateral Indonesia-Sierra Leone dilaksanakan oleh KBRI Dakar. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berlangsung baik dan mengalami peningkatan, khususnya di bidang ekonomi.

Nilai total perdagangan Indonesia-Sierra Leone pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD18,46 juta atau mengalami kenaikan 197,98% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Somalia

Hubungan bilateral Indonesia-Somalia dilaksanakan oleh KBRI Addis Ababa. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral tersebut ditandai oleh sejumlah kasus pembajakan kapal Indonesia maupun penyanderaan ABK Indonesia di kapal asing lainnya oleh para pembajak Somalia.

Pada saat berlangsungnya KTM ke-16 GNB di Bali tanggal 23-27 Mei 2011, Menlu RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Somalia, Mohamed Ali Hamud. Dalam pertemuan bilateral ini, Menlu Somalia mengharapkan agar Indonesia selaku Ketua ASEAN dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah perompakan. Dalam mengatasi masalah keuangan Kedubes Somalia di Jakarta, Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan pemberian bantuan sebesar Rp 522 juta.

Nilai total perdagangan RI-Somalia sebesar USD 4,2 juta pada tahun 2010, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 4,2 juta dan impor sebesar USD 0,08 juta. Sementara dari Januari-Agustus 2011, nilai total perdagangan RI-Somalia adalah USD 4,3 juta, sehingga dari tahun ke tahun, nilai total perdagangan naik sebesar 40%.

Dalam kasus perompakan kapal di Somalia, beberapa ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing telah menjadi korban penyanderaan oleh perompak/bajak laut Somalia. Perompakan terakhir yang dialami oleh 6 (enam) ABK Indonesia adalah terhadap Kapal Taiwan FV Chin I Wen yang berhasil digagalkan oleh para ABK kapal tersebut pada tanggal 6 November 2011.

Foto 94.Menlu RI dan Menlu Somalia, Bali, 26 Mei 2011

Sebelumnya, terjadi perompakan terhadap kapal MV Sinar Kudus (milik PT. Samudera Indonesia, berawak 20 WNI dan dibebaskan pada tanggal 1 Mei 2011. Kasus lainnya adalah kapal MT Gemini milik perusahaan Singapura yang dibajak di perairan Tanzania dalam perjalanan dari Indonesia ke Mombasa, Kenya, pada tanggal 30 April 2011. Seluruh ABK WNI yang berjumlah 13 orang telah dibebaskan oleh para pembajak. Dalam upaya membebaskan seluruh ABK WNI di kapal MV Sinar Kudus, Menlu RI telah melakukan pertemuan dengan Menlu Somalia di sela-sela pertemuan *Public-Private Counter Piracy Conference*, Dubai, tanggal 18-19 April 2011.

Swaziland

Hubungan bilateral Indonesia–Swaziland dilaksanakan melalui KBRI Pretoria. Sepanjang tahun 2001, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang ekonomi.

Tanzania

Hubungan bilateral Indonesia – Tanzania dilaksanakan oleh KBRI DaarEs-Salam. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Wamenlu Tanzania telah menghadiri KTM ke-16 GNB tanggal 23-27 Mei 2011 di Bali.

Beberapa program kerja sama teknik yang diberikan oleh Indonesia kepada Tanzania selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Program revitalisasi *Farmer Agriculture Rural Training Center* (FARTC) di Mkindo, Morogoro Region, di mana Indonesia telah mengirim 2 orang tenaga ahli pertanian dari Indonesia untuk memberikan pelatihan di FARTC Morogoro dan Zanzibar, April-Juni 2011.
b. Pengiriman 1 orang peserta Tanzania mengikuti pelatihan di bidang perikanan, 9-14 Mei 2011 di Situbondo, Jawa Timur.
c. Pengiriman 1 orang peserta Tanzania mengikuti pelatihan di bidang perikanan, 9-14 Mei 2011 di Sukabumi, Jawa Barat.

Berdasarkan data dari KBRI Dar Es Salam, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 96 warga negara Indonesia yang berdomisili di Tanzania, yang bekerja di sektor industri, pariwisata dan konstruksi dan pertambangan.

Togo

Hubungan bilateral Indonesia-Togo dilaksanakan oleh KBRI Abuja. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral antara kedua negara berjalan dengan baik dan meningkat, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Kedekatan hubungan Indonesia-Togo tercermin dari dukungan Togo terhadap pencalonan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB periode 2011-2014 yang pemilihannya diselenggarakan pada *resumed session* Sidang Majelis Umum PBB ke-65 pada tanggal 20 Mei 2011 di New York.

Kementerian Luar Negeri telah menfasilitasi kegiatan *Safari Business Trip* ke Togo pada tanggal 5-11 Juni 2011, yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang peralatan kendaraan, lem/perekat, rempah-rempah, peralatan medis dan mesin pertanian. Nilai total perdagangan Indonesia-Togo pada bulan Januari – Agustus (2011) tercatat USD 57,74 juta atau mengalami kenaikan 37,63 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.

Berdasarkan data dari KBRI Abuja hingga bulan Oktober 2011, terdapat 16 orang warga negara Indonesia yang berdomisili di Togo yang pada umumnya adalah rohaniwan.

Uganda

Hubungan bilateral Indonesia-Uganda dilaksanakan oleh KBRI Nairobi. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik dan meningkat khususnya di bidang ekonomi.

Indonesia dan Uganda telah mempunyai forum Komisi Bersama untuk peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, kedua negara. Nilai total perdagangan kedua negara untuk periode Januari – Agustus 2011 sebesar USD 21,2 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD 6,8 juta dan impor Indonesia sebesar USD 14,5 juta.

Berdasarkan data dari KBRI Nairobi, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 32 orang warga negara Indonesia yang berdomisili di Uganda yang pada umumnya berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa, Lembaga Non-Pemerintah (NGO)) dan profesional lainnya.

Zambia

Hubungan bilateral RI-Zambia dilakukan oleh KBRI Dar Es-Salam. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik.

Pada penyelenggaraan KTM GNB ke-16 di Bali, Hon. Prof. Fashion Phiri, MP, Wakil Menlu memimpin delegasi Zambia.

Hubungan perekonomian kedua negara berjalan baik. Delegasi pengusaha Zambia menghadiri penyelenggaran Trade Expo Indonesia 2011. Nilai total perdagangan Indonesia-Zambia untuk periode Januari – Agustus 2011 mencapai USD1,8 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD1,4 juta dan impor Indonesia sebesar USD357,5 ribu.

Zimbabwe

Hubungan bilateral Indonesia–Zimbabwe dilakukan oleh KBRIHarare. Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral antara kedua negara terus meningkat, baik pada tataran bilateral maupun multilateral.

Pemerintah kedua negara selalu berupaya untuk terus mencari terobosan upaya peningkatan hubungan bilateral. Disamping itu, kedua negara juga melakukan saling dukung dalam berbagai pencalonan kedua negara di fora internasional.

Dalam bidang ekonomi, terdapat pengusaha Indonesia yang berinvestasi di Zimbabwe, di bidang peternakan burung unta dan penyamakan kulit untuk keperluan ekspor. Nilai total perdagangan antara kedua negara pada tahun 2011 (Januari-Agustus) mencapai USD 13,95 juta, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar USD6,5 juta dan impor Indonesia sebesar USD7,5 juta. Pengusaha Zimbabwe cukup aktif berpartisipasi dalam *Trade Expo Indonesia* 2011 yang dikordinir oleh KBRI Harare. Pada tahun 2011, kedua negara juga telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai kerja sama bidang pertanian.

Berdasarkan data KBRI Harare, hingga bulan Oktober 2011, terdapat 140 warga negara Indonesia yang berdomisi di Zimbabwe yang pada umumnya bekerja pada sektor pertambangan dan profesi lainnya.

Uni Afrika

Pemerintah, dalam hal ini, Menteri Luar Negeri RI telah menyampaikan kepada Ketua Komisi Uni Afrika mengenai keinginan Indonesia untuk menjadi peninjau pada Uni Afrika. Status sebagai peninjau pada Uni Afrika akan memberikan manfaat bagi Indonesia terutama kesempatan yang lebih luas untuk bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk peningkatan kerja sama Selatan Selatan. Uni Afrika merupakan organisasi regional di kawasan yang memainkan peran penting dalam pemecahan tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan pangan,

III.3.2 KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

Kerja sama Indonesia di kawasan Amerika dan Eropaditandai dengan beberapa capaian menonjol selama tahun 2011, antara lain meningkatnya kunjungan/pertemuan pejabat tinggi RI maupun negara mitra ke Indonesia dan sebaliknya; penandatanganan dokumen kerja sama; maupun pelaksanaan promosi ekonomi, perdagangan dan pariwisata di kawasan Amerika dan Eropa.

Pada periode Januari-Desember 2011, Presiden RI telah mengadakan pertemuan dengan beberapa Presiden/Perdana Menteri, Raja/Putra Mahkota, serta Menteri Luar Negeri dari negara AS, Jerman, Inggris, Kanada, Meksiko, Perancis, Siprus, Swiss, dan Turki. Sementara itu, pada tahun 2011 Menteri Luar Negeri RI telah mengadakan pertemuan bilateral dengan 25 Menteri Luar Negeri dari negara-negara Amerika dan Eropa termasuk dengan Uni Eropa, baik pada kunjungan bilateral maupun di sela pertemuan-pertemuan internasional.

Selain tingkat pemerintah, kerja sama antar Parlemen RI dengan negara-negara Amerika dan Eropa juga terus meningkat dan berkembang. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah saling kunjung anggota Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan.

Pada periode tersebut, telah pula ditandatangani lebih dari 50kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan negara-negara AS, Argentina, Antigua dan Barbuda, Belarus, Bosnia, Colombia, Meksiko, Perancis, Turki, Inggris, Republik Dominika, Rusia, Siprus, Serbia, Slovakia, dan Suriname. Bidang-bidang kerja samanya yaitu di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan kerja sama teknik pembangunan, kehutanan, perhubungan udara, perjanjian bebas visa untuk paspor

diplomatik dan dinas maupun penandatanganan *Joint Communique* dalam rangka pembukaan hubungan diplomatik dengan beberapa negara di kawasan.

Saat ini terdapat beberapa perjanjian/kesepakatan bilateral yang sedang disiapkan dan dirundingkan oleh Indonesia dengan negara-negara di Amerika dan Eropa. Perjanjian tersebut adalah di bidang ekonomi (perdagangan, investasi/P4M, pajak/P3B), perjanjian bebas visa, dan pertanian. Sebagian besar diantaranya akan ditandatangani pada akhir tahun 2011.

Dalam upaya penguatan kegiatan diplomasi ekonomi, pada tahun 2011 telah dilakukan beberapa kegiatan penting di dalam negeri maupun di kawasan Amerika dan Eropa di bidang promosi *trade, tourism, and investment* (TTI). Untuk memberikan layanan publik mengenai potensi bisnis di Indonesia dan peluang bisnis di wilayah Amerika dan Eropa, secara periodik telah diterbitkan dua majalah, yaitu Market Info dan Info Pasar.Kegiatan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, komunitas diplomatik negara-negara Amerika dan Eropa di Jakarta, dan komunitas bisnis tersebut antara lain pengiriman *trade mission*, *diplomatic gathering* dan*diplomatic field trip*. Untuk memberikan layanan publik mengenai potensi bisnis di Indonesia dan peluang bisnis di wilayah Amerika dan Eropa, secara periodik telah diterbitkan dua majalah, yaitu *Market Info* dan Info Pasar.

Untuk menerjemahkan fungsi kuliner dari produk budaya nusantara menjadi salah satu produk ekonomi andalan Indonesia di luar negeri, juga telah dilakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia untuk menyusun sebuah *grand design*promosi dan pengembangan kuliner Indonesia di luar negeri berikut *plan of action*-nya.Selain itu, secara periodik Indonesia juga telah melakukan kegiatan promosi kuliner di kawasan Amerika dan Eropa.

III.3.2.1 Kawasan Amerika Utara dan Tengah

Indonesia memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar terhadap negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah. Hubungan RI dengan AS berkembang pesat sejak diluncurkannya *Comprehensive Partnership* RI-AS pada bulan November 2010. Hubungan dengan Kanada dan Meksiko juga mengalami kemajuan. Hubungan dengan Panama mulai meningkat terutama sejak dibukanya Perwakilan RI di negara tersebut pada akhir tahun 2010. Sementara itu, hubungan dengan negara lainnya di kawasan Amerika Tengah seperti Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, dan Honduras terus meningkat termasuk dengan El Salvador yang baru saja dibuka hubungan diplomatiknya.

Kanada

Hubungan bilateral antara kedua negara di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan meningkat.

Bidang Politik dan Keamanan

Dalam bidang politik, hubungan bilateral RI-Kanada mulai menunjukkan kemajuan. Hal ini antara lain ditandai dengan diadakannya Forum Konsultasi Bilateral (FKB) pada 6 Mei 2011 di Kanada. Dalam FKB tersebut beberapa isu yang dibahas antara lain: bidang politik dan keamanan yang membahas *Democracy, Human Rights Dialogue, Counter Terrorism, Migrant Smuggling, Natural Disaster and Humanitarian Response, Civilian Deployment, Peacekeeping, Defense Cooperation* dan *Regional , Security Architecture and East Asia Summit*; bidang Ekonomi membahas *Trade, Foreign Investment Promotion and Protection Agreement*(FIPPA) dan *Development*; serta bidang sosial budayayang membahas *Interfaith Dialogue, Education Cooperation* dan *60th Bilateral Anniversary. Educational Cooperation* dan *People-to-People Contact.*

Kesepakatan dalam FKB tersebut diantaranya:

a. Pelaksanaan FKB akan dilaksanakan secara reguler setiap tahun;

b. Menghidupkan kembali Dialog HAM dan *Interfaith Dialogue*; dan
c. Setiap pelaksanaan FKB akan didahului dengan pertemuan tim ekonomi

Selain itu, kemajuan dalam hubungan kedua negara, ditandai dengan kunjungan Menlu Kanada ke Indonesia, tanggal 22 Juli 2011 dan pertemuan Presiden RI dengan PM Kanada di sela-sela KTT APEC, Hawaii, tanggal 12 November 2011. Dalam Pertemuan bilateral antara Menlu RI-Menlu Kanada, John Baird di sela-sela A*SEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (PMC)/18th ASEAN Regional Forum (ARF*) di Bali,tanggal 22 juli 2011 tersebut telah dibahas hubungan bilateral dan isu regional.

Sementara itu, dalam pertemuan antara Presiden RI dengan PM Kanada, Stephen Harper di sela-sela KTT APEC di Hawaii, AS, telah dibahas hubungan bilateral kedua negara (perdagangan dan investasi, kerja sama sosial budaya dan pembangunan, keketuaan Indonesia pada ASEAN; serta kerja samapenanggulangan penyelundupan manusia) serta isu-isu internasional. Pada kesempatan tersebut Presiden RI mengundang PM Kanada untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2012. Kunjungan tersebut diharapkan dapat menandai 60 tahun hubungan diplomatik RI-Kanada.

Pemerintah Kanada dalam tahun terakhir ini nampak semakin tertarik untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia dan ASEAN mengingat peran Indonesia dan ASEAN semakin menonjol. Selain itu, upaya tersebut dikarenakan Kanada ingin mendapat dukungan Indonesia dan Negara ASEAN lainnya untuk menjadi anggota EAS.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang ekonomi, kerja sama kedua negara juga semakin penting. Dalam rangka untuk lebih memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia kepada berbagai kalangan di Kanada, pada tanggal 5-7 April 2011 telah diadakan promosi terpadu perdagangan, investasi, pariwisata dan ketenagakerjaan Indonesia di Vancouver dan Toronto. Hasil promosi terpadu tersebut diantaranya adanya penjajakan pihak media dan tour operator yang berminat terhadap pariwisata di Indonesia melalui *familirization trip (Fam Trip)* dan tindak lanjut beberapa pengusaha Kanada yang berminat melakukan kerja sama di bidang tenaga kerja di sektor infrastruktur, *nursing, butcher*, perminyakan, dan *hospitality* di Kanada.

Nilai perdagangan kedua negara pada periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 2,01 miliar (ekspor USD 0,69 miliar, impor USD 1,24 miliar) naik 66,76% dibanding periode yang sama tahun 2010.

Foto 95.Pertemuan Bilateral Presiden RI – PM Kanada, Honolulu, 13 November 2011

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Di bidang kekonsuleran jumlah WNI yang terdaftar di wilayah Kanada hingga akhir November 2011 sebanyak 11.367 orang. TKI yang bekerja di Kanada

hingga November 2011 mencapai 1.033 orang antara lain tenaga profesional, TKI formal, informal dan sektor jasa.

Meksiko

Pada tahun 2011, hubungan Indonesia-Meksiko terus meningkat yang ditandai dengan serangkaian pertemuan tingkat kepala pemerintahan maupun tingkat menteri serta Forum Konsultasi Bilateral RI-Meksiko ke-4 di Mexico City tanggal 2 Agustus 2011. Hubungan ekonomi kedua negara juga meningkat terutama di bidang perdagangan serta beberapa bidang lainnya seperti pertanian, lingkungan hidup, dan keamanan.

Bidang Politik

Di bidang politik, perkembangan hubungan bilateral RI-Meksiko semakin kokoh dan kuat.Pada tingkat kepala negara Presiden RI dan Presiden Meksiko telah bertemu di sela-sela pertemuan G-20 di Cannes, Perancis, tanggal 6 November 2011. Pada tingkat menteri, Menlu RI telah melakukan pertemuan dengan Menlu Meksiko di sela-sela perayaan 50 tahun Gerakan Non-Blok di Beograd, Serbia, tanggal 5-6 September 2011.

Forum Konsultasi Bilateral (FKB) yang ke-4 telah dilaksanakan pada 2 Agustus 2011 di Mexico City.Isu-isu yang dibahas dalam FKB tersebut meliputi kerja sama bilateral (*high level political dialogue, economic and commercial dialogue, culture and education cooperation, technical and scientific cooperation, MoUs and agreements)*, regional dan multilateral (saling dukung di fora internasional). Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan beberapa perjanjian kerja sama yang belum terselesaikan dan tindak lanjut kerja sama yang sudah disepakati pada FKB sebelumnya. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 3 November 2011 di Mexico City telah dilakukan Penandatanganan 2 (dua) MoU yaitu antara Polri dan Kejaksaan Agung Meksiko (MoU *on Combating Trans National Crime and Capacity Building*); serta antara BNN dengan Kejaksaan Agung Meksiko (MoU *on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and its Precursors*).

Di sela-sela pertemuan G-20 di Cannes, 3-4 November 2011, Presiden RI telah bertemu dengan Presiden Meksiko untuk membahas berbagai isu bilateral, regional maupun multilateral yang menjadi kepentingan kedua negara. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang hingga saat ini belum mencerminkan potensi sesungguhnya. Presiden RI mengulang kembali undangannya kepada Presiden Meksiko untuk berkunjung ke Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam bidang perdagangan, periode semester pertama ditandai dengan perkembangan positif bagi Indonesia. Selama Januari-Agustus 2011, total perdagangan kedua negara mencapai USD 676,5 juta atau meningkat 52,1% dibanding periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 444,7 juta. Hingga November 2011, Indonesia mengalami surplus sebesar USD 181,3 juta.

Untuk meningkatkan hubungan perdagangan, tanggal 20-21 September 2011, KBRI Meksiko City bersama dengan Kemlu mengadakan *business*

Foto 96.Presiden RI dan Presiden Meksiko, Cannes, 3 November 2011

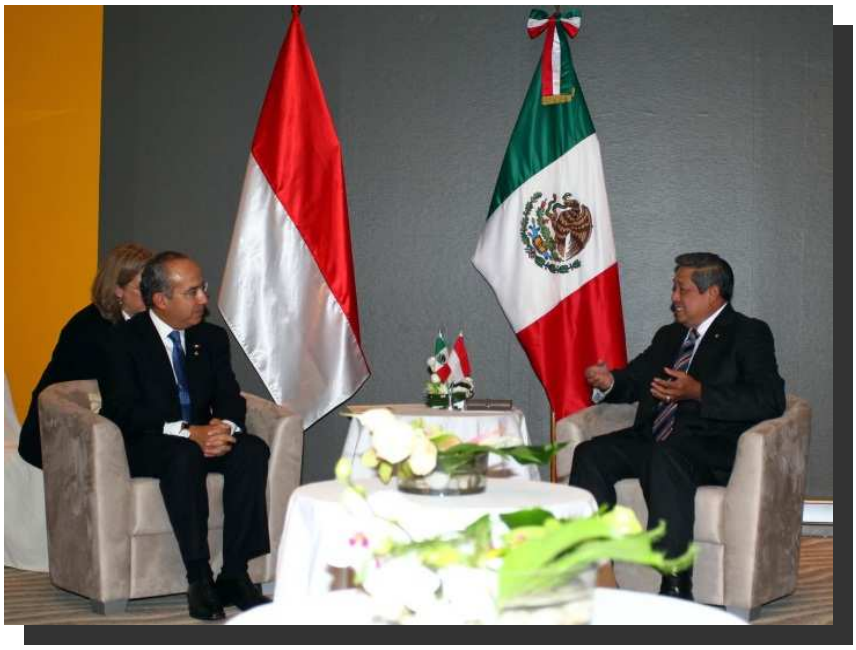

meeting antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Meksiko.Sebagai hasilnya, terdapat komitmen dan *pledge* dari *potential buyers* di Meksiko untuk membeli produk garmen dan *traditional herbs*. Kadin Meksiko memiliki keinginan kuat untuk melihat Indonesia sebagai pasar alternatif. Sedangkan pengusaha Indonesia berkeinginan untuk menjual batubara ke Meksiko.

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang kehutanan, Indonesia dan Meksiko telah menandatangani *MoU on Forestry Cooperation* pada tanggal 28 Juli 2011 di Jakarta oleh Menteri Kehutanan RI dan tanggal 3 Agustus 2011 di Mexico City oleh Menteri Pertanian Meksiko.

Di bidang sosial budaya, terkait pemberian beasiswa Dharmasiswa, pada tahun 2011/2012 ini Pemerintah RI mengundang 12 mahasiswa asal Meksiko untuk belajar seni dan budaya di berbagai perguruan tinggi seni di berbagai kota di Indonesia, seperti: ISI Yogyakarta, STSI Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Udayana dan IKIP Saraswati Tabanan.

Sejauh ini terdapat 40 pelajar Meksiko yang telah menerima beasiswa Dharmasiswa. Dalam FKB ke-4, Indonesia juga telah menawarkan beasiswa program gelar S2 dalam kerangka kemitraan negara berkembang.

Bidang Konsuler dan Ketenagakerjaan

Di bidang kekonsuleran jumlah WNI yang terdaftar di wilayah Meksiko hingga akhir November 2011 sebanyak 366 orang.

Panama

Sejak dibukanya KBRI Panama City pada 29 Desember 2010, hubungan kerja sama antara RI dan Panama terus meningkat.

Bidang Politik

Secara umum hubungan politik kedua negara dituangkan dalam hal dukung mendukung yang dilakukan di fora internasional PBB atau multilateral serta sebagian melalui perwakilannya masing-masing.

Bidang Ekonomi

Perdagangan bilateral Indonesia-Panama periode Januari-Agustus 2011 tercatat USD 118,4 juta naik 10,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Indonesia mengalami surplus sebesar USD 81,71 juta, meningkat lebih dari 144% dibanding periode yang sama tahun 2010.

Tanggal 23September 2011 telah dilaksanakan *business meeting* antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Panama menghasilkan *pledge* dari pengusaha Panama untuk membeli lebih banyak produk-produk Indonesia.Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses pasar tersebut berhasil meningkatkan saling pengertian antara pejabat dan pengusaha Panama dan Indonesia.

KBRI Panama City selama periode Juli-Oktober 2011 telah memberikan dukungan, fasilitasi dan memprakarsai pertemuan bisnis kepada perusahaan Indonesia yang berpartisipasi pada Latin America & Caribbean Tyre Expo 2011 di Panama City yang diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan ban internasional.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI yang terdaftar di wilayah Panama, hingga akhir Juni 2011 sebanyak 31 orang. Di samping itu, juga tercatat 7.552 WNI yang memiliki lisensi sebagai ABK pada kapal-kapal laut berbendera Panama.

El Salvador

Hubungan diplomatik Indonesia – El Salvador diresmikan dengan penandatangangan *Joint Communique* pembukaan hubungan diplomatik kedua Negara yang ditandatangani oleh kedua Menlu tanggal 23 September 2011 di sela-sela pelaksanaan Sesi ke-66 SMU PBB. Hubungan diplomatik dengan El Salvador dirangkap oleh KBRI Mexico City.

Foto 97.Menlu RI dan Menlu Elsalvador Menandatangani *Joint Communique*Pembukaan Hubungan Diplomatik Kedua Negara, New York, 23 September 2011

Hubungan perdagangan kedua negara pada periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 8,4 juta, naik 54,5% dibanding periode yang sama tahun 2010, dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 6,8 juta.

Guatemala

Kerja sama RI-Guatemala ditunjukkan dengan saling dukung pada forum-forum multilateral yang juga mencerminkan hubungan baik kedua negara. Hubungan diplomatik RI-Guatemala ditangani oleh KBRI Mexico City.

Pada 19-20 Mei 2011 telah dilaksanakan promosi terpadu Indonesia di Guatemala. Pengusaha Guatemala menyambut baik tawaran dari pengusaha Indonesia untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan diharapkan dapat segera direalisasikan kontak bisnis. Selain itu, saat ini kedua negara juga sedang menegosiasikan *Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation*.

Nilai perdagangan RI-Guatemala pada periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 56,4 juta atau naik 244% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia mencapai USD 15,3 juta, sedangkan impor senilai USD 41,1 juta.

Untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi dan teknik kedua negara, saat ini sedang dibahas draft Perjanjian Kerja Sama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknik RI-Guatemala yang diusulkan oleh pemerintah Guatemala.

Kosta Rika

Hubungan bilateral RI-Kosta Rika dalam bidang politik dan ekonomi juga terus meningkat. Hal ini ditandai dengan saling dukung calon masing-masing di forum multilateral dan saling kunjung pejabat kedua negara. Hubungan diplomatik RI-Kosta Rika dilaksanakan oleh KBRI Mexico City.

Untuklebih meningkatkan hubungan kedua negara, Pemerintah Kosta Rika pada November 2011 telah menyampaikan *draft* usulan pembentukan Mekanisme Konsultasi Bilateral RI-Kosta Rika. Pemri sedang mempertimbangkan usulan pihak Kosta Rika tersebut.

Dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata (TTI), pada tanggal 15-16 November 2011, KBRI Mexico City telah melaksanakan promosi TTI dan pertunjukan budaya di San Jose, Kosta Rika. Dalam kegiatan temu usaha, sejumlah pengusaha Kosta Rika telah menyampaikan *trial order* yang cukup signifikan. Selain itu, Institut Teknologi Kosta Rika berkeinginan mengembangkan kerja sama*U-to-U* dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 23,9 juta, meningkat 38,9% dibanding periode yang sama tahun 2010 dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 10,99 juta.

Honduras

Hubungan Indonesia-Honduras dirangkap oleh KBRI Mexico City. Kerja sama kedua negara selama ini cukup aktif untuk saling dukung pada pencalonan di fora internasional.

Di bidang perdagangan, terdapat sejumlah barang produksi Indonesia diantaranya sepatu olahraga dan garmen yang masuk ke Honduras melalui pihak ketiga.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 12,8 juta, meningkat 164,5% dibanding periode yang sama tahun 2010 dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 11,96 juta.

Nikaragua

Pelaksanaan hubungan bilateral RI – Nikaragua disamping untuk meningkatkan kehadiran Indonesia di kawasan Amerika Tengah, juga

untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara.Pemerintah Nikaragua sangat tertarik untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan. Kedua negara juga mengembangkan kerja sama saling dukung atas pencalonan masing-masing pada berbagai organisasi internasional. Hubungan diplomatik RI-Nikaragua dirangkap dari KBRI Mexico City.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 5,6 juta, meningkat 16% dibanding periode yang sama tahun 2010 dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 5,4 juta.

III.3.2.2 Kawasan Amerika Selatan dan Karibia

Sebagai salah satu kawasan yang sebagian besar negaranya merupakan *middle income countries*, sasaran yang ingin dicapai di bidang ekonomi adalah menjadikan negara-negara di kawasan ini sebagai pasar non tradisional dan pasar alternatif bagi produk Indonesia.

Hal ini seiring dengan semakin besarnya perhatian dan ketertarikan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia terhadap kemajuan ekonomi yang dicapai negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia. Beberapa kerja sama yang sedang dikembangkan dengan negara-negara di kawasan tersebut adalah di bidang energi, kehutanan, SMEs, pertanian dan perikanan. Di

samping itu, juga dilakukan upaya peningkatan *people-to-people contact*, kerja sama di bidang pendidikan, seni budaya dan olah raga.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia, pada tanggal 16-17 Maret 2011 telah diselenggarakan *4th FEALAC Outreach Program* bertema "*Promoting Trade, Tourism, Investment and Education Relations between East Kalimantan Province and FEALAC Member Countries,* bertempat di Balikpapan."

Antigua dan Barbuda

Hubungan Indonesia dengan Antigua dan Barbuda pada umumnya berupa pemberian dukungan timbal balik terhadap pencalonan maupun kepentingan satu sama lain di berbagai fora internasional.

Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Antigua dan Barbuda ditandai dengan penandatanganan komunike bersama oleh Menlu RI dan Perdana Menteri/Menlu Antigua dan Barbuda pada tanggal 23 September 2011 di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB. Kedua Menlu menyambut baik pembukaan hubungan diplomatik ini dan mengharapkan agar momentum ini dapat memperkuat hubungan baik RI-Antigua dan Barbuda antara lain dengan mengembangkan kerja sama terutama di bidang perdagangan, pariwisata dan peningkatan *people-to-people contacts.*

Foto 98.Menlu RI dan Menlu Antigua Barbuda pada Peresmian Pembukaan Hubungan Diplomatik Kedua Negara di New York, 23 September 2011

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 843,8 ribu (Ekspor sebesar USD 236,2 ribu dan Impor sebesar USD 607,6 ribu), meningkat 144% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 344,80 ribu.

Argentina

Tahun 2011 merupakan tahun ke-55 hubungan diplomatik Indonesia dengan Argentina. Hubungan bilateral antara kedua negara di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan meningkat.

Bidang Politik

Meningkatnya hubungan politik antara Indonesia dan Argentina dapat dilihat pada intensitas saling kunjung pejabat tinggi kedua negara.

Pada 24-25 Agustus 2011, Menlu RI telah berkunjung ke Buenos Aires dalam rangka menghadiri pertemuan tingkat Menteri ke-5 FEALAC. Pada kesempatan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan tingkat Menteri ke-5 FEALAC, Menteri Luar Negeri kedua negara telah membicarakan mengenai upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, olah raga dan *people-to-people contact*.

Selain itu tercatat pula kunjungan pejabat negara/pemerintah Indonesia ke Argentina, diantaranyaanggota DPRRI, BPK RI dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York. Sebaliknya, tercatat kunjungan pejabat tinggi Argentina ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTM GNB ke-16 di Balipada bulan Mei 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Salah satu indikator penting mengenai capaian hubungan bilateral Indonesia dan Argentina adalah di bidang perdagangan.

Neraca perdagangan RI-Argentina dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Neraca perdagangan RI-Argentina pada periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 1.384.320.700. atau menunjukkan peningkatan sebesar 77,75% dib

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 1,38 miliar (Ekspor sebesar USD 235,64 juta dan Impor sebesar USD 1,14 miliar), meningkat 77,75% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (USD 778,81 juta) dibanding periode yang sama tahun 2010.

Salah satu upaya untuk menyeimbangkan perdagangan antara lain adalah melalui pelaksanaan Promosi Terpadu Indonesia di Buenos Aires tanggal 3-14November 2011. Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah transaksi bisnis berupa penjualan produk dan kontrak bisnis senilai USD 90.000.

Capaian lain yang dapat dicatat adalah penandatanganan MoU Kerja Sama Teknik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Argentina pada kesempatan pertemuan bilateral di Buenos Aires tanggal 24 Agustus 2011.

Di bidang investasi, pada tahun 2010-2011 investasi pengusaha Argentina di Indonesia senilai USD 100.000 sedangkan investasi pengusaha Indonesia di Argentina sampai saat ini belum ada. Sementara itu, jumlah wisatawan dari ketiganegara akreditasi (Argentina, Paraguay dan Uruguay) untuk periode Januari – Juni 2011 mencapai 471 orang.

Foto 99. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Argentina di sela-sela pertemuan ke-5 FEALAC, Buenos Aires, 24 – 25 Agustus 2011

Dalam upaya mempromosikan budaya Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia, telah dilakukan upaya/kegiatan, diantaranya:(a) Pembinaan dan memberikan dukungan terhadap inisiatif positif para misionaris yang berjumlah sekitar 40 orang yang tersebar di berbagai provinsi Argentina; serta (b) Mendorong partisipasi mahasiswa untuk turut serta dalam program Dharmasiswa dan pada tahun ajaran 2011-2012 terdapat delapan peserta yang mayoritas berasal dari Argentina.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Pada kesempatan pertemuan bilateral di Buenos Aires tanggal 24Agustus 2011, Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Perjanjian Bebas Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

Jumlah Warga negara Indonesia di Argentina hingga bulan November 2011 mencapai 475jiwa, yang sebagian besar merupakan pelaut baik yang bekerja pada kapal pesiar maupun kapal penangkap ikan.

Selama tahun 2011, KBRI Buenos Aires telah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah sekitar 500 orang.

Bolivia

Hubungan bilateral RI-Bolivia telah berlangsungdengan baik kendati masih berpeluang ditingkatkan baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.Hubungan diplomatik RI dengan Bolivia dirangkap melalui KBRI Lima.

Di bidang ekonomi, perdagangan kedua negara masih menunjukkan fluktuasi dengan surplus pada pihak Indonesia.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 3,69 juta (Ekspor sebesar USD 3,43 juta dan Impor sebesar USD 261 ribu), meningkat 15,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (USD 3,18 juta).

Chile

Hubungan bilateral Indonesia-Chile telah berlangsung dengan baik sejak tahun 1964. Kerja Sama antara kedua negara di bidang politik,ekonomi maupun sosial budaya menunjukkan kecenderungan meningkat.

Bidang Politik

Pada tanggal 27 Mei 2011 telah dilakukan pertemuan ke-3 Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Chile pada tingkat SOM di Bali, di sela-sela KTM GNB ke-16. Dalam pertemuan tersebut antara lain disepakati revitalisasi kerja sama di bidang perikanan dan kelautan serta upaya tindak lanjut atas studi kelayakan FTA Indonesia-Chile.

100. Menlu RI dan Menlu Chile di sela-sela KTT ke-19 APEC Honolulu, 11 November 2011

Pada tanggal 11 November 2011 telah dilaksanakan Pertemuan Bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Chile di sela-sela KTT APEC 2011 di Honolulu, Hawaii. Dalam kesempatan ini, kedua Menteri membicarakan antara lain kemungkinan kerja sama dalam hal *disaster management*, pembukaan akses pasar melalui FTA dan TPP (*Trans Pacific Partnership*), keinginan Chile untuk berinteraksi dengan ASEAN, kerja sama dalam menanggulangi krisis pangan dan saling memberikan dukungan bagi pencalonan pada organisasi internasional. Di samping itu, Menteri Luar Negeri RI juga menyampaikan undangan kepada Menteri Luar Negeri Chile untuk berkunjung ke Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Salah satu indikator penting mengenai capaian hubungan bilateral Indonesia dan Chile adalah di bidang perdagangan.

Selama 3 tahun terakhir volume perdagangan Indonesia-Chile berfluktuasi pada kisaran USD 400 juta.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 365,32 juta (Ekspor sebesar USD 144,48 juta dan Impor sebesar USD 220,84 juta), meningkat 8,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (USD 335,33 juta).

Foto 101.Forum Komunikasi Bersama ke-3 RI-Chile, Bali, 27 Mei 2011

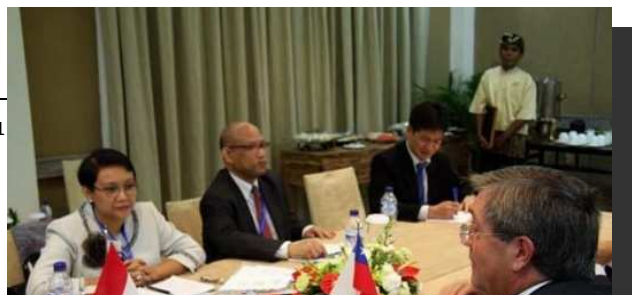

Dalam rangka mengupayakan peningkatan ekspor Indonesia ke Chile, hingga bulan Agustus 2011 KBRI Santiago bersama ITPC Santiago telah melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, *roundtable discussion* dan temu bisnis di Iquique, La Serena, Santiago, Concepción, Valdivia serta Jakarta dan Bandung.

Di bidang sosial budaya, pada tahun 2011 tercatat seorang wartawan Chile dari Majalah Travel Time bernama Nicolás Tocigi Domeyko mengikuti *Journalist Familiarization Trip* dalam kerangka kerja sama FEALAC guna melakukan liputan wisata ke Bali, Tanjung Lesung, Jakarta, Manado dan Lombok. Pada tanggal 4-6 November 2011, KBRI Santiago telah berpartisipasi pada Pameran Internasional Pariwisata dan Perjalanan "VYVA" Chile guna menyebarkan informasi mengenai tujuan-tujuan wisata di Indonesia serta menyebarkan informasi mengenai penawaran beasiswa Dharmasiswa.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Chile hingga bulan November 2011 mencapai 103 orang.

Dominika (Persemakmuran)

Hubungan Indonesia dengan Dominika (Persemakmuran) berada dibawah rangkapan KBRi Caracas dan pada umumnya berupa pemberian dukungan timbal balik terhadap pencalonan maupun kepentingan satu sama lain di berbagai fora internasional.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 880,3 ribu (Ekspor sebesar USD 804, 5 ribu dan Impor sebesar USD 75,9 ribu) atau meningkat 107,62% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 424 ribu), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 728,6 ribu (2011).

Di bidang sosial budaya, tiga pelajar Dominika Persemakmuran telah mendapatkan beasiswa Dharmasiswa dari Pemerintah Indonesia untuk tahun ajaran 2010/2011. Namun hanya satu dari tiga pelajar tersebut memanfaatkan beasiswa dimaksud.

Ekuador

Hubungan diplomatik antara Indonesia-Ekuador menunjukkan peningkatan sejak dibukanya KBRI Quito pada bulan Desember 2010.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan politik Indonesia-Ekuador ditunjukkan antara lain melalui pertemuan bilateral antara kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 26 Mei 2011, disela-sela KTM ke-16 dan HUT ke-50 GNB di Bali. Pada kesempatan tersebut, dibahas mengenai rencana kunjungan Presiden RI ke Ekuador, penyelesaian perjanjian yang masih *pending* serta penjajakan kerja sama riset antara universitas dan lembaga riset kedua negara.

Upaya peningkatan hubungan kerja sama bidang politik juga telah dibahas dalam Forum Konsultasi Bilateral ke-2 Indonesia-Ekuador di Jakarta tanggal 6 Oktober 2011.

Foto 102.Menlu RI dan Menlu Ekuador di Bali, 26 Mei 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Ekuador periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 64,68 juta (Ekspor sebesar USD 61,11 juta dan Impor sebesar USD 3,56 juta) atau meningkat 31,37% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 49,23 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 57,55 juta (2011).

Kedua negara juga telah melaksanakan Sidang ke-2 Komisi Bersama Indonesia-Ekuador, tanggal 6 Oktober 2011 di Jakarta, yang membahas penjajakan kerja sama di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan kekonsuleran.

Kekayaan budaya Indonesia juga mendapatkan apresiasi yang tinggi bagi masyarakat Ekuador. Hal ini ditunjukkan oleh undangan Presiden Ekuador, Rafael Correa kepada Grup Tari Artina Production untuk melakukan pertunjukan tari dan musik di beberapa kota di Ekuador (Quito, Ambato dan Puyo) tanggal 10-19 September 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah warga negara Indonesiadi Ekuador hingga November 2011 sebanyak 25jiwa, mayoritas merupakan rohaniwan.

Grenada

Hubungan Indonesia dengan Grenada dirangkap oleh KBRI Caracas dan pada umumnya berupa pemberian dukungan timbal balik terhadap pencalonan maupun kepentingan satu sama lain di berbagai fora internasional.

Dalam rangka mempererat hubungan bilateral, Dubes RI Caracas telah menghadiri rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Grenada ke-37 pada bulan Februari 2011.

Biji pala merupakan produk ekspor unggulan masing-masing negara yang mendekatkan hubungan perdagangan kedua negara. Indonesia merupakan penghasil pala terbesar pertama sementara Grenada menempati posisi kedua.

Total perdagangan Indonesia-Grenada periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 133,40 ribu (Ekspor sebesar USD 133,40 ribu dan Impor sebesar USD 0). Total perdagangan periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 180,5 ribu). Surplus perdagangan pada tahun 2011 sebesar USD 133,40 ribu.

Guyana

Hubungan bilateral Indonesia dengan Guyana dijalankan melalui KBRI Paramaribo dan selama ini telah berjalan dengan baik. Kedua negara telah senantiasa memberi dukungan timbal balik di berbagai fora internasional.

Total perdagangan Indonesia-Guyana periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 1,05 juta (Ekspor sebesar USD 837,80 ribu dan Impor sebesar USD 217,00 juta) dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 620,8 ribu. Adapun total perdagangan periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 1,16 juta.

Jumlah warga negara Indonesiadi Guyana hingga Oktober 2011 sebanyak 101jiwa, mayoritas merupakan TKI formal di bidang perkebunan.

Jamaika

Hubungan bilateral RI-Jamaika telah berlangsung dengan baik dan hubungan diplomatik dirangkap KBRI Havana.

Kedua negara umumnya saling mendukung kepentingan satu sama lain dalam pencalonan kedua negara di forum-forum internasional.

Total perdagangan Indonesia-Jamaika periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 9,19 juta (Ekspor sebesar USD 8,29 juta dan Impor sebesar USD 900,7 ribu) atau meningkat 51,44% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 6,07 juta),

dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 7,39 juta (2011).

Dalam *farewell call* Dubes RI untuk Republik Kuba, Persemakmuran Bahamas dan Jamaika dengan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika pada tanggal 2-5 Agustus 2011 pihak Jamaika mendukung usulan diselenggarakannya Sidang ke-3 Komisi Bersama kedua negara pada tahun 2012.

Jumlah WNI di Jamaika sampai dengan Oktober 2011 adalah 3 jiwa.

Kolombia

Hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia pada tahun 2011 berjalan dengan baik dan semakin meningkat seiring dengan pembukaan kembali Kedutaan Besar Kolombia di Indonesia pada bulan Agustus 2011.

Hubungan baik RI - Kolombia di bidang politik pada tahun 2011 antara lain tercermin dari pertemuan antara kedua Menlu di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 FEALAC, di Buenos Aires tanggal 24 Agustus 2011 dan intensitas saling kunjung pejabat tinggi: kunjungan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke Kolombia (Januari); kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Kolombia (Mei); dan kunjungan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Kolombia ke Indonesia (Juli).

Dalam pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Menlu Kolombia, Menlu RI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kolombia yang bersedia bekerja sama dalam penangkapan dan pemulangan tersangka kasus korupsi berwarga negara Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Kolombia periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 105,32 juta (Ekspor sebesar USD 84,48 juta dan Impor sebesar USD 20,84) atau meningkat 0,86% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 104,42 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 63,64 juta (2011).

Hubungan kerja sama ekonomi dan sosial budaya antara kedua negara diharapkan semakin meningkat dengan ditandatanganinya MoU pembentukan Komisi Bersama RI – Kolombia di sela-sela KTM ke-16 dan HUT ke-50 GNB di Bali tanggal 26 Mei 2011 oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI dan Wakil Menteri Luar Negeri Kolombia bidang Multilateral.

Dalam upaya meningkatkan kontak dagang secara langsung, KBRI Bogota melakukan berbagai promosi perdagangan, antara lain mengorganisir kunjungan pengusaha Kolombia ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Denpasar (Oktober), melakukan presentasi bisnis di kamar-kamar dagang daerah, serta berpartisipasi pada berbagai pameran dagang di Kolombia.

Sebagai bagian promosi budaya, KBRI Bogota melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain melakukan festival budaya, pameran gastronomi serta mendorong partisipasi mahasiswa untuk turut serta dalam program Dharmasiswa. Selain itu, KBRI Bogota juga memberikan bantuan bagi para korban bencana tanah longsor di daerah Anapoima yang berjarak sekitar 120 km dari Bogota (Januari).

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah warga negara Indonesia di Kolombia sampai November 2011 sebanyak203jiwa.

Kuba

Hubungan bilateral Indonesia dengan Kuba yang telah berlangsung selama 51 tahun semakin menguat dan menunjukkan perkembangan yang positif.

Bidang Politik

Peningkatan hubungan politik antara lain ditunjukkan melalui kunjungan resmi Ketua MPR RI Taufiq Kiemas ke Kuba didampingi Ibu Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3-6 November 2011. Pada kesempatan tersebut Ketua MPR RI telah mengadakan pertemuan antara lain dengan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, dan Ketua Parlemen Kuba, Ricardo Alarcon de Quesada. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas berbagai upaya dalam meningkatkan hubungan

kedua negara termasuk melalui *people-to-people contact.*

Kedua negara juga telah memberikan dukungan terhadap pencalonan masing-masing negara pada organisasi-organisasi internasional.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Kuba periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 12,43 juta (Ekspor sebesar USD 11,24 juta dan Impor sebesar USD 1,19 juta) atau meningkat 98,69% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 6,25 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 10,05 juta (2011).

Meskipun menunjukkan peningkatan namun, aktifitas perdagangan kedua negara masih banyak dilakukan melalui pihak ketiga (a.l. Panama, Meksiko, Spanyol) dengan nilai perdagangan yang masih relatif kecil. Hal tersebut, karena pembiayaan ekspor-impor masih belum dapat difasilitasi secara langsung oleh bank-bank di kedua negara.

Rancangan MoU Pertanian Indonesia-Kuba telah disetujui oleh kedua belah pihak. penandatanganan. MoU tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Kementerian Pertanian RI mengusulkan penandatanganan MoU tersebut pada tahun 2012.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara, telah dilakukan berbagai kegiatan promosi Indonesia di Kuba antara lain; *workshop* batik pada bulan Juli 2011, pameran foto budaya Indonesia pada bulan Agustus 2011, pemutaran film Indonesia pada bulan Agustus 2011.

Letter of Intent (LOI) kerja sama penelitian pengembangan vaksin untuk beberapa jenis penyakit berbahaya yang ditandatangani Menteri Kesehatan kedua negara tahun 2007 telah memberikan kerangka kerja sama di bidang kesehatan. LoI akan ditindaklanjuti dengan MoU bidang kesehatan. Realisasi kerja sama ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Perhimpunan Dokter Peduli Aids (PDPA) dan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Kuba yang telah bekerja sama menyelenggarakan simposium bertema "*Herbal Medicine in Indonesia and Kuba*" di RSCM Jakarta tanggal 1 Desember 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Kuba sampai November 2011 berjumlah 49 jiwa.

Paraguay

Hubungan bilateral RI-Paraguay dirangkap oleh KBRI Buenos Aires.

Hubungan bilateral Indonesia-Paraguay diharapkan akan semakin meningkat dengan pembukaan Kedutaan Besar Paraguay di Indonesia pada awal tahun 2011. Hal ini juga mencerminkan pengakuan Paraguay atas peran penting Indonesia di kawasan maupun pada tingkat global.

Pada pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Paraguay disela-sela KTM FEALAC ke-5 tanggal 24-25 Agustus 2011, Menlu RI menyampaikan undangan kepada Menlu Paraguay untuk melakukan kunjungan ke Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Paraguay periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 28,85 juta (Ekspor sebesar USD 15,33 juta dan Impor sebesar USD 13,52 juta) atau meningkat 51,63% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 19,02 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,81 juta (2011).

Kedua negara juga sedang dalam tahap finalisasi Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik yang akan menjadi persetujuan payung bagi pengembangan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang.

Persemakmuran Bahamas

Hubungan antara Indonesia dengan Persemakmuran Bahamas dirangkap melalui KBRI di Havana, Kuba dan telah berjalan dengan baik.

Bidang Politik

Hubungan baik antara kedua negara tercermin dari pemberian saling dukung dalam pencalonan

masing-masing negara pada berbagai organisasi internasional.

Kedua negara sepakat untuk mengupayakan pembentukan Forum Konsultasi Bilateral sebagai forum untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral.

Jumlah WNI di Persemakmuran Bahamas sampai dengan Oktober 2011 adalah 4 orang .

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Persemakmuran Bahamas periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 1,29 juta (Ekspor sebesar USD 695,5 ribu dan Impor sebesar USD 599, 1 ribu) dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 96,4 ribu. Nilai perdagangan pada periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 2,37 juta).

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Persemakmuran Bahamas sampai dengan Oktober 2011 adalah 4 orang .

Peru

Hubungan bilateral Indonesia-Peru berjalan baik. Dalam berbagi kesempatan Peru memberikan dukungan pada kepentingan Indonesia di berbagai fora internasional.

Bidang Politik

Pelaksanaan hubungan bilateral RI – Peru disamping untuk meningkatkan kehadiran Indonesia di Kawasan Amerika Selatan, juga untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara.Kedua negara juga mengembangkan kerja sama saling dukung atas pencalonan masing-masing pada berbagai organisasi internasional.

Kedua negara telah memiliki mekanisme kerja sama institusional yaitu Forum Konsultasi Bilateral dan Sidang Komisi Bersama.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Peru periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 128,28 juta (Ekspor sebesar USD 97,56 juta dan Impor sebesar USD 30,72 juta), meningkat sebesar 70% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 66,84 juta (2011).

Untuk meningkatkan hubungan ekonomi, Indonesia dan Peru sedang menyelesaikan pembahasan 2 (dua) draft perjanjian kerja sama yaitu Nota Kesepahaman Kerja Sama bidang Kelautan dan Perikanan serta Nota Kesepahaman Kerja Sama bidang Pertanian.

Selain itu, sebagai upaya untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia dan menjembatani kontak antara perusahaan Indonesia dengan para importir Peru, KBRI Lima telah berpartisipasi pada EXPOALIMENTARIA di Lima pada tanggal 28-30 September 2011 dengan menampilkan berbagai produk makanan olahan dan produk-produk agrobisnisasal Indonesia.

Di bidang sosial budaya, KBRI Lima telah melakukan promosi citra Indonesia antara lain melalui seminar mengenai Islam di Indonesia di *Universitas Tecnologia* Peru tanggal 16 Mei 2011, promosi budaya di Universitas Ricardo Palma pada tanggal 18 Oktober 2011, partisipasi pada acara International Bazaar VIII di Lima tanggal 21-23 Oktober 2011, partisipasi pada Pekan Film APEC di Lima tanggal 13 November 2011 dan promosi kuliner Indonesia di Lima tanggal 23-25 November 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Peru hingga bulan Oktober 2011 mencapai 1.195 jiwa, yang sebagian besar merupakan pelaut.

Republik Dominika

Hubungan Indonesia Republik Dominika memasuki era baru pada tahun 2011 dengan disepakatinya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara.

Bidang Politik

Hubungan diplomatik kedua negara diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Republik Dominika pada

tanggal 20 September 2011 disela-sela sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB.

Foto 103.Menlu RI dan Menlu Rep. Dominika pada Peresmian Pembukaan Hubungan Diplomatik Kedua Negara
New York, 20 September 2011

Pelaksanaan hubungan diplomatik Indonesia – Republik Dominika sebelumnya dibawah observasi PTRI New York. Dengan dibukanya hubungan diplomatik tersebut diharapkan terjadi peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya di masa mendatang.

Republik Dominika merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Karibia. Pada periode Januari-Agustus 2011, nilai perdagangan Indonesia dengan Republik Dominika mencapai USD 17,9 juta dengan ekspor Indonesia USD 14,7 juta dan impor USD 3,2 juta.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Republik Dominika merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Karibia.

Total perdagangan Indonesia-Republik Dominika periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 17,91 juta (Ekspor sebesar USD 14,67 juta dan Impor sebesar USD 3,24 juta), meningkat sebesar 50,02% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 11,43 juta (2011).

St. Lucia

Hubungan bilateral RI-St. Lucia yang telah terjalin sejak tahun 1994 dilakukan melalui KBRI di Caracas.

Bidang Politik

Hubungan baik kedua negara tercermin dalam saling dukung pencalonan masing-masing negara pada berbagai organisasi internasional.

Bidang Ekonomi

Total perdagangan Indonesia-St. Lucia periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 312,3 ribu (Ekspor sebesar USD 312,2 ribu dan Impor sebesar USD 100) dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 312,1 ribu. Adapun pada periode yang sama tahun 2010 nilai perdagangan sebesar USD 551,8 ribu.

St. Vincent and the Grenadines

Hubungan Indonesia dengan St. Vincent and the Grenadines yang telah terjalin sejak 1993 dilakukan melalui KBRI di Caracas.

Bidang Politik

Hubungan baik kedua negara tercermin dalam saling dukung pencalonan masing-masing negara pada berbagai organisasi internasional.

Bidang Ekonomi

Total perdagangan Indonesia-St. Vincent and the Grenadines periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 808,4 ribu (Ekspor sebesar USD 344,1 ribu dan Impor sebesar USD 464,3 ribu), meningkat 382% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 167,7 ribu.

Trinidad dan Tobago

Hubungandiplomatik Indonesia dengan Trinidad dan Tobago yang telah terjalin sejak 1973 dilakukan melalui KBRI Caracas.

Bidang Politik

Hubungan baik antara kedua negara telah diwujudkan dalam dukungan yang diberikan untuk pencalonan masing-masing negara pada berbagai organisasi internasional.

Bidang Ekonomi

Trinidad dan Tobago merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesiadi kawasan Karibiasetelah Republik Dominika.

Total perdagangan Indonesia-Trinidad dan Tobago periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 7,42 juta (Ekspor sebesar USD 5,55 juta dan Impor sebesar USD 1,86 juta), dengan surplus dipihak Indonesia sebesar USD 3,69 juta. Adapun nilai perdagangan pada periode yang sama tahun 2010 sebesar USD 33,24 juta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Trinidad dan Tobago diperkirakan lebih dari 1500 jiwa, dimana 95% dari jumlah tersebut merupakan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja pada perusahaan penangkapan ikan.

Uruguay

Hubungan bilateral RI-Uruguayyang dijalin sejak 1965 ditangani melalui KBRI Buenos Aires.

Bidang Politik

Hubungan baik antara kedua negara telah diwujudkan dalam dukungan yang diberikan untuk pencalonan masing-masing negara pada berbagai organisasi internasional.

Menlu RI telah melakukan pertemuan dengan Menlu Uruguay pada tanggal 24 Agustus 2011 di sela-sela KTM FEALAC ke-5 di Buenos Aires. Pada pertemuan tersebut, Menlu Uruguay telah menyampaikan keinginan Presiden Uruguay untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2012.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Uruguay periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 35,53 juta (Ekspor sebesar USD 23,63 juta dan Impor sebesar USD 11,90 juta), meningkat sebesar 69,16% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 21,00 juta (2011).

Di bidang sosial budaya, Indonesia dan Uruguay telah menjalin kerja sama di bidang olahraga, khususnya sepakbola. Sejak tahun 2008, tim nasional junior sepakbola Indonesia telah menjalani pembinaan di Uruguay atas kerja sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Uruguay.

Bidang Kekonsuleraan dan Ketenagakerjaan

Hingga bulan Juni 2011 jumlah WNI di Uruguay diperkirakan sebanyak 40 orang yang sebagian besar merupakan Anak Buah Kapal.

Suriname

Hubungan sejarah dan kebudayaan melalui imigrasi masyarakat Indonesia keturunan Jawa ke Suriname pada tahun 1890 menjadi dasar pijakan yang kuat bagi peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Suriname.

Bidang Politik

Suriname ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pertahanan dengan Indonesia dalam bentuk pertukaran kunjungan pejabat dan pelatihan militer (SESKOAD RI). Hubungan baik kedua negara juga tercermin dari dukungan yang diberikan dalam pencalonan negara masing-masing pada berbagai organisasi internasional.

Untuk meningkatkan hubungan kedua negara, Menlu RI telah mengundang Menlu Suriname untuk berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, Pemerintah Suriname juga mengindikasikan keinginan Presiden Suriname untuk berkunjung ke Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Salah satu indikator penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Suriname adalah bidang perdagangan.

Total perdagangan Indonesia-Suriname periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 5,13 juta (Ekspor sebesar USD 3,11 juta dan Impor sebesar USD 2,09 juta), meningkat sebesar 41,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,08 juta (2011).

Kegiatan yang telah diselenggarakan untuk meningkatkan perdagangan diantaranya adalah *Business Meeting* di Paramaribo (26 April 2011) bekerja sama dengan Kantor *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* di Mexico City, Mexico dan Kamar Dagang dan Industri Suriname (*Kamer van Koophandel en Fabrieken – KKF*). Kegiatan *business meeting* bertujuan untuk melakukan diseminasi informasi mengenai perkembangan ekonomi dan perdagangan di Indonesia serta menjajaki peluang untuk melakukan kontak dagang secara langsung dengan para pengusaha Indonesia. Selain itu, pada tanggal 26 September – 2 Oktober 2011 telah diselenggarakan kegiatan pameran promosi terpadu Indofair ke-11 di Gedung Sana Budaya, Paramaribo. Selain diikuti oleh pengusaha Indonesia, pameran tersebut juga diikuti oleh pengusaha setempat khususnya keturunan Jawa yang menjual berbagai produk Indonesia.

Hubungan di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Suriname juga semakin erat terjalin dengan diselenggarakannya Sidang Komisi Bersama (SKB) antara Indonesia dengan Suriname. Pemerintah kedua negara telah sepakat untuk menyelenggarakan SidangKe-5 Komisi Bersama Indonesia-Suriname pada tanggal 26 September 2011 bertempat di Paramaribo, Suriname. Namun, sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, rencana penyelenggaraan SKB ke-5 Indonesia-Suriname di Paramaribo diusulkan oleh Pemerintah Indonesia untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari kedua pihak melalui saluran diplomatik.

Di bidang sosial budaya, promosi budaya yang telah diselenggarakan diantaranya adalah Pertunjukan Budaya Indonesia dalam rangka peringatan ulang tahun ke-50 paguyuban *Real Java* di Distrik Lelydorp (30 April 2011) dan Promosi Film Indonesia di Distrik Nickerie (4 Juni 2011).

Foto 104. Menlu RI dan Menlu Suriname Penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinasdi sela-sela SMU PBB ke-66, New York, 22 September 2011

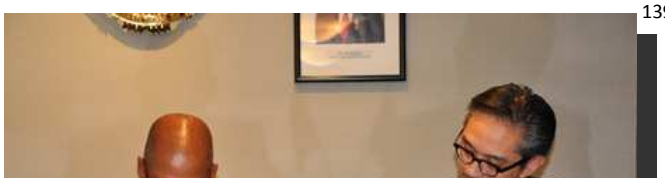

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Suriname telah menandatangani Perjanjian mengenai Bebas Visa bagi para Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas antara Indonesia dengan Suriname. Penandatanganan Perjanjian tersebut dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI DR. R.M. Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Suriname Winston Lackin pada tanggal 22 September 2011 di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Sampai dengan bulan Oktober 2011, jumlah WNI di Suriname tercatat sebanyak 286 orang, sebagian besar merupakan TKI di bidang perikanan dan perkebunan.

Venezuela

Hubungan bilateral Indonesia dengan Venezuela secara umum telah terjalin dengan baik sejak tahun 1959.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pemerintah Indonesia terus mendesak agar Pemerintah Venezuela dapat mengirimkan Duta Besar untuk Indonesia. Sejak tahun 2004 Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta dipimpin oleh KUAI.

Hubungan baik kedua negara tercermin pada Forum Kerja sama Regional yaitu FEALAC dan dukungan yang diberikan bagi pencalonan kedua negara pada berbagai organisasi internasional.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan Indonesia-Venezuela periode Januari-Agustus 2011 sebesar USD 88,68 juta (Ekspor sebesar USD 87,95 juta dan Impor sebesar USD 735,5 ribu), meningkat sebesar 148,47% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 87,21 juta (2011).

Selama tahun 2011, promosi Indonesia di Venezuela antara lain dilakukan melalui partisipasi Indonesia pada Pameran Pariwisata International Venezuela (FITVEN) di pulau Margarita pada tanggal 22-25 Oktober 2011. Promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia ini mendapatkan sambutan yang positif dari kalangan media, profesional maupun masyarakat umum. Promosi budaya Indonesia juga dilakukan melalui perkenalan alat musik tradisional angklung di Sekolah Campo Alegre, Caracas pada tanggal 24 Oktober 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan November 2011, jumlah WNI di Venezuela tercatat sebanyak 50 jiwa.

III.3.2.3 Kawasan Eropa Barat

Pada tahun 2011, hubungan kerja sama Indonesia dengan 30 negara di kawasan Eropa Barat menunjukan peningkatan. Hal ini antara lain ditandai oleh kunjungan pejabat tinggi dari negara Erbar ke Indonesia dan sebaliknya; pertemuan FKB/SKB, konsultasi HAM bilateral, nilai perdagangan yang masih menunjukkan ruang untuk dapat ditingkatkan, maupun angka kunjungan wisatawan yang memperlihatkan kecenderungan meningkat. Hal ini tidak lepas dari upaya promosi Indonesia yang dilakukan perwakilan Indonesia di kawasan Eropa Barat maupun kegiatan diseminasi informasi potensi negara-negara Eropa Barat yang dilaksanakan Ditjen Amerop cq Dit. Eropa Barat.

Menlu RI dan Menlu San Marino, di sela-sela SMU PBB tanggal 26 September 2011, telah menandatangani perjanjian pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Andorra

Hubungan diplomatik RI dengan Andorra dilaksanakan melalui KBRI Paris. Hubungan bilateral RI dengan Andorra berjalan baik yang tercermin dari saling dukung di berbagai forum internasional seperti di PBB.

Bidang Politik

Indonesia dengan Andorra bekerja sama di berbagai forum internasional. Andorra dalam berbagai kesempatan, menunjukkan dukungannya kepada Indonesia, seperti dalam pencalonan Indonesia di berbagai badan internasional antara lain pada UNHCR, INCB, ITU, ILC, dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Hubungan bilateral kedua negara dititikberatkan pada bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, meskipun tidak terdapat hal-hal yang menonjol.Banyak potensi yang dapat digali diantara kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi, pariwisata, dan budaya.

Hubungan perdagangan Indonesia-Andorra mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun khususnya perode 2007-2011. Pada tahun 2008 dan 2010, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan, namun pada tahun 2007 dan 2009, Indonesia mengalami defisit USD 559.900,- (2007) dan USD 132.300,- (2009). Indonesia mengalami surplus sebesar USD 94.800 pada tahun 2008 dan **s**ebesar USD 4,13 juta pada tahun 2010.

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 597,1 ribu (Ekspor sebesar USD 79,9 ribu dan Impor sebesar USD 517,2 ribu), sedangkan pada tahun 2010 volume perdagangan mencapai USD 4,3 juta.

Andorra dalam suatu kesempatan, menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas upaya Indonesia dalam menjaga keanekaragaman budaya, etnis dan agama serta inisiatif Indonesia dalam memajukan *interfaith dialogue*.

Austria

Hubungan RI-Austria sepanjang tahun 2011 semakin membaik, diantaranya sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Presiden Austria, Heinz Fischer ke Indonesia pada tanggal 9-10 November 2010.

Bidang Politik

Pada kunjungan Presiden Austria tersebut, Presiden RI dan Presiden Austria menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan dan perluasankerja sama di bidang *interfaith dialogue*. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pengertian tentang kebudayaan dan tradisi kedua negara.Sejak tahun 2009, Indonesia dan Austria telah melaksanakan *Interfaith and Intercultural Dialogue* sebanyak tiga kali. *Interfaith and Intercultural Dialogue* ketiga telah diselenggarakan pada bulan Juli 2011 di Wina.

Foto 105. Pertemuan Menlu RI dengan Wamenlu Austria di Jakarta, 28 November 2011

Presiden Austria juga mengundang Presiden RI untuk melakukan kunjungan balasan ke Austria. Pada tanggal 28 November 2011, *State Secretary* Kementerian Luar Negeri Austria, Wolfgang Waldner, telah melakukan kunjungan ke Jakarta dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Menlu RI. Dalam kunjungan kehormatan tersebut kembali disampaikan undangan Presiden Austria kepada Presiden RI untuk mengunjungi Austria. Selama kunjungan telah ditandatangani *Implementing Agreement on a Postgraduate Scholarship Program at Austrian Universities* yang merupakan turunan dari kerja sama *Implementing Agreement on a Postgraduate Scholarship Program at Austrian Universities* yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan RI dan Menteri Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Austria pada 17 Februari 2011 di Jakarta.

Foto 106. Dialog Lintas Agama RI-Austria di Salzburg, Austria 6-10 Juni 2011

Selain menangani isu bilateral, KBRI Wina juga menangani beberapa isu multilateral, seperti (IAEA) *International Atomic Energy Agency* dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Dalam penanganan isu multilateral, salah satu pencapaian penting adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Gubernur IAEA periode 2011-2013, mewakili Asia Tenggara dan Pasifik. Keputusan itu diambil dalam Konferensi IAEA pada 22 September 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 267,52 juta, meningkat 29,44% dibanding periode yang sama tahun 2010.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Sampai dengan bulan November 2011, jumlah WNI di Austria tercatat sebanyak 886 jiwa.

Belanda

Hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda selama ini telah terjalin dengan baik. Hal ini tercermin melalui kemitraan strategis Indonesia-Belanda yang didasari pada *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* yang telah diparaf oleh kedua Menteri Luar Negeri pada bulan Januari 2009.

Bidang Politik

Hubungan baik RI - Belanda tercermin dari intensifnya pertemuan kedua Menlu dan menteri-menteri lainnya serta intensifnyasaling kunjung pejabat tinggi dan instansi kedua negarakedua negara selama tahun 2011, antara lain:pertemuan Menlu RI dengan Menlu Belanda di sela-sela KTM ASEM di Gödöllö, Hongaria, 6-7Juni 2011, kunjungan Badan Legislasi DPR (26-29 Januari 2011); Panitia Kerja RUU Hukum Acara Pidana (10-12 Maret 2011); Kunjungan Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan Parlemen Belanda (8-13 Mei 2011); Delegasi KPK (15-18 Mei 2011); Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda (2-7 Juli 2011); Delegasi LEMHANAS (23-28 Oktober 2011); dan Delegasi Mahkamah Agung (28 Oktober – 4 November 2011). Kedua negara juga telah mengadakan Forum Konsultasi Bilateral tanggal 6 Mei 2011 di Bogor yang membahas masalah-masalah bilateral kedua negara.

Dalam rangka menggalang dukungan dari komunitas keturunan Indonesia di Belanda dan memagari upaya disintegrasi bangsa, pada tanggal 16 Juni 2011 telah dilakukan seminar "*The Dynamics of Indonesian Diaspora in the Netherlands*" yang dihadiri oleh tokoh-tokoh diaspora dan aktivis komunitas Indo-Belanda.

Di bidang pertahanan dan keamanan, pada semester pertama tahun 2011 telah direalisasikan kerja sama pendidikan dan pelatihan militer antara lain: *Netherlands Defence Orientation Course* (NDOC); dan latihan gabungan terbatas antara Brigif 17 Kostrad TNI AD dengan Air Mobile Brigade AD Belanda di Arnhem.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Belanda merupakan salah satu mitra kerja sama ekonomi utama Indonesia di Eropa dan merupakan pintu gerbang masuknya produk-produk Indonesia ke Eropa. Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 4,04 miliar, meningkat 29,44% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 2,54 miliar).Sementara itu, nilai investasi Belanda di Indonesia sampai kuartal ketiga tahun 2011 tercatat USD 1,17 miliar.

Indonesia masih ditetapkan di dalam daftar *partner countries* dalam kerja sama pembangunan dengan Belanda. Untuk mendanai kerja sama ini dialokasikan dana sebesar USD 53,34 juta dengan fokus pada *security and legal order, food security, water management*, dan *sexual and reproductive health*. Dalam kunjungan Menteri Kerja Sama Pembangunan, Ben Knappen, pada tanggal 2-7 Juli 2011telah disepakati rencana pembangunan tanggul sepanjang 36 km di Jakarta.

Hingga Juni 2011, tercatat 65.134 warga negara Belanda yang berwisata ke Indonesia. Pada tahun 2010, wisatawan asal Belanda yang datang ke Indonesia tercatat 153.284 orang.

Foto 107Pasar Malam Indonesia di Den Haag, 1-7 April2011

Beberapa kegiatan promosi perdagangan dan pariwisata yang telah dilakukan pada semester pertama 2011 antara lain: partisipasi pada Vakantieburs tanggal 11-16 Januari 2011, Pasar Malam Indonesia pada bulan April 2011 dan *Indonesian Promotion Days*, tanggal 16-17 April 2011.

Di bidang pendidikan, sepanjang tahun 2011 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara beberapa institusi pendidikan Indonesia dan Belanda, yaitu: *Letter of Intent* (LOI) kerja sama antara Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung dengan University of Arts Rotterdam, di Den Haag, 7 April 2011; dan LOI kerja sama*e-learning* antara Stichting OWG/Eduliga dengan Balai Pustaka Nasional, 15 Juni 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Belanda hingga hingga November 2011 mencapai 15976jiwa. Dari jumlah tersebut, diperkirakan lebih dari 9.600 orang merupakan tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal, termasuk diantaranya 3.145 pelaut / anak buah kapal. Sementara itu, jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda tercatat lebih dari 1.500 orang.

Belgia

Hubungan bilateral Indonesia dengan Belgia selama tahun 2011 berlangsung dengan baik. Hal ini antara lain terlihat dari meningkatnya intensitas kunjungan pejabat tinggi dari kedua negara, maupun meningkatnya volume perdagangan bilateral kedua negara.

Bidang Politik

Kedua Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTM ASEM, Gödöllö, Hongaria, 6-7 Juni 2011.

Kunjungan pejabat tinggi kedua negara dalam tahun ini antara lain: Delegasi Parlemen Eropa (20-25 Februari 2011); Delegasi MPR RI (11-13 Mei 2011); Menteri Kelautan dan Perikanan RI (3-5 Mei 2011); Komisioner Perdagangan UE (4-5 Mei 2011), Menhan RI (23-24 Mei 2011), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (27-29 Juni 2011), Menteri Perhubungan RI (29 Juni 2011).

Beberapa kegiatan di bidang politik yang telah dilaksanakan pada semester pertama tahun 2011, diantaranya: *"Seminar on Maritime Security in the Straits of Malacca"* di Brussel, 1 Maret 2011, dan "*Seminar on Indonesia Fight Against Terrorism*" tanggal 29 Juni 2011 di Brussels

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Belgia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 1,32 Miliar (Ekspor USD 952 juta dan Impor sebesar USD 368 juta) atau meningkat 9,96% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 1,2 Miliar), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 584 juta (2011).

Dalam upaya meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-Belgia, mulai Januari s.d. Juni 2011 telah diselenggarakan beberapa kegiatan promosi perdagangan dan investasi, antara lain: *Roundtable Discussion Putting Indonesia on Your Strategic Map: Investment Opportunities in the Southeast Asia's Most Promising Star Performer*" di Brussel, 21 Februari 2011; dan Seminar on *Multilateral Develoment Organisations in Indonesia, Colombia and Haiti: Business Opportunities* di Brussel, 8 Juni 2011.

Sementara itu, dalam rangka memperkenalkan keanekaragaman budaya dan menarik wisatawan dari Belgia, sejak Januari s.d. Juni 2011 telah diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertunjukan Danza Indonesia, Antwerpen, 5 Februari 2011; Lokakarya Gamelan kepada Pejabat Belgia, 10 Februari 2011; Festival Ogoh-ogoh, Pairi Daiza, Brugelette, 11 Juni 2011; Lokakarya Angklung di Floralia Basisschool, Brussel, 23 Juni 2011; *Program Familiarization Trip Vlaanderen Vakantieland, Vlaamse Radio en-Televisieomroep* ke Indonesia, 5-23 Juli 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Belgia hinggaNovember 2011 mencapai 1946 jiwa. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI di negara akreditasi, telah dilakukan kegiatan bantuan dan perlindungan untuk memastikan agar mereka mendapat perlakuan yang baik dan hak-haknya terpenuhi sesuai dengan kontrak. Sementara itu, jumlah mahasiswa Indonesia di Belgia mencapai 93 orang.

Denmark

Dalam kurun waktu tahun 2011, tercatatkunjungan Menteri Pendidikan Nasional pada bulan Mei 2011 dalam kerangka ASEM dan kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulanggan Terrorisme (BNPT) pada bulan Juni 2011 ke Kopenhagen, sebaliknya Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark melakukan kunjungan ke Indonesia tanggal 5-8 Mei 2011 dan bertemu dengan pihak-pihak terkait di Indonesia.

Bidang Politik

Pada kunjungan *Permanent State Secretary* Kemlu Denmark, *Ambassador* Claus Grube, ke Indonesia tanggal 2 Februari 2011 disampaikan kembali undangan Menlu Denmark kepada Menlu RI untuk berkunjung ke Denmark dan menandatangani MoU Konsultasi Bilateral RI-Denmark.

Bidang Ekonomi

Total perdagangan RI-Denmark pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 305 juta (Ekspor USD 175 juta dan Impor sebesar USD 130 juta) atau meningkat 45,48% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD210 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 46 juta (2011).

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Denmark hingga November 2011 mencapai 531 jiwa.

Estonia

Hubungan diplomatik RI- Estonia dilaksanakan melalui KBRI Helsinki. Dalam tahun 2011, telah berlangsung FKB ke-4 RI-Estonia pada tanggal 16 September 2011, yang menandai 20 tahun peringatan pengakuan Indonesia kepada Estonia.

Bidang Politik

Dalam FKB ke-4 RI-Estoniayang dilaksanakan di Tallinnpada tanggal 16 September 2011, antara lain dihasilkan:

- Diindikasikan rencana kunjungan PM Estonia ke Jakarta pada tahun 2012.
- Indonesia mengusulkan adanyaperjanjian kerja sama ekonomi kedua negara guna mengantisipasi kerja sama yang semakin meningkat
- Disepakati untuk menindaklanjuti pembahasan draft perjanjian ekonomi yang diusulkan oleh Indonesia.

Foto 108.Menlu RI dan Menlu Estonia di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 19 September 2011

Peningkatan hubungan bilateral juga dicapai melalui kesepakatan saling dukung pada fora internasional seperti dukungan tertulis Pemerintah Estonia kepada pencalonan kembali Indonesia dalam Dewan HAM PBB periode 2007-2010 dimana secara resiprokal Pemerintah Indonesia mendukung pencalonan Estionia sebagai anggota ECOSOC periode 2009/2011. Kedua Menlu juga telah melakukan pertemuan bilateraldi sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, September 2011. Pada pertemuan ini, Menlu Estonia menyampaikan rencana penunjukan Konsul Kehormatan di Bali pada tahun 2012, mempertimbangkan makin banyaknya turis asal Estonia yang berkunjung ke Bali.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Estonia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 20,7 juta (Ekspor USD 18,6 juta dan Impor sebesar USD 2,1 juta) atau meningkat 41,85% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 14,6 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 10,54 juta (2011).

Foto 109.Forum Komunikasi Bersama RI-Estonia di Tallin, 16 September 2011

Pada kesempatan FKB ke-4 RI-Estonia, kedua negara membahas kerja sama di bidang ekonomi, antara lain, draft perjanjian pending kesepakatan penghindaran pajak berganda (P3B). Estonia juga mengajukan usulan perjanjian penanaman modal asing kepada Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang ekonomi,Indonesia telah menyampaikan usulan draft perjanjian mengenai kerja sama ekonomi RI-Estonia kepada Estonia. Kedua negara sepakat untuk memperkuat upaya peningkatan kerja sama bilateral dan kerja sama untuk membantu mengatasi masalah-masalah regional dan global.

Dalam FKB ke-4 itu, Estonia juga telah menawarkan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta beasiswa *Archimedes* program S-3 untuk mahasiswa Indonesia.

Finlandia

Hubungan bilateral Indonesia dengan Finlandia pada tahun 2011 semakin baik dengan peningkatan kerja sama di bidang energi yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2011. Perjanjian tersebut merupakan awal dari terbentuknya Kemitraan Energi dan Lingkungan RI-Finlandia (*Energy and Environment Partnership*/EEP).

Bidang Politik

Dalam kesepakatan saling dukung di fora internasional, pemerintah Finlandia pada tahun 2011 mendukung secara unilateral pencalonan Indonesia pada *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) Periode 2012-2014 dan juga menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah RI untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014.

Konsultasi Bilateral (FKB) pada tingkat SOM yang dijadwalkan dilaksanakan di Indonesia pada bulan Oktober 2011 disepakati untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun 2012.

Bidang Ekonomi

Total perdagangan RI-Finlandia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 452 juta (Ekspor USD 129 juta dan Impor sebesar USD 323 juta) atau meningkat 36,99% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 330 juta).

Salah satu kerja sama utama di bidang ekonomi pada tahun 2011 ini, Indonesia dan Finlandia telah menandatangani perjanjian Kemitraan Energi dan Lingkungan RI-Finlandia (*Agreement on the Cooperation in the Energy and Environment Partnership between Indonesia and Finland*) di Jakarta, tanggal 14 Februari 2011. Perjanjian itu merupakan implementasi kerja sama bilateral kedua negara di bidang energi dan lingkungan (*Energy and Environment Partnership/EEP*). Dengan penandatanganan dokumen perjanjian ini, Indonesia dan Finlandia segera merealisasikan program kerja sama kemitraan energi dan lingkungan pada tahun 2011 dengan dukungan dana hibah dari Finlandia sebesar 4 juta Euro kepada Indonesia. Hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek *Capacity Building* energi terbarukan, khususnya *biomass* yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun, di dua provinsi terpilih yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembentukan EEP ini merupakan hasil tindaklanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Finlandia ke Indonesia, bulan Februari 2008, dengan penandatangan *Joint Declaration on Climate Change and Sustainable Forest Management*, dan kunjungan kerja Perdana Menteri Finlandia Matti Vanhanen, April 2010, yang menegaskan komitmen untuk membentuk perjanjian kerja sama EEP.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam bidang budaya, Indonesia dan Finlandia belum memiliki persetujuan kebudayaan *(Cultural Cooperation Agreement)* yang mengatur hubungan dan kerja sama sosial, budaya dan penerangan, termasuk di dalamnya kerja sama di bidang pendidikan, seni budaya, sosial-kemasyarakatan, pemuda dan olah raga, media massa, dan kepariwisataan.

Namun demikian, terdapat sejumlah kemajuan hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Finlandia khususnya di bidang pendidikan, meskipun kerja sama tersebut masih terbatas pada kerja sama antar perguruan tinggi. Dalam tahun 2011, terdapat peningkatan angka pertukaran pelajar *(exchange student)* kedua negara. Setidaknya terdapat lebih dari 100 pelajar Finlandia yang menimba ilmu di Indonesia, khususnya di Universitas Udayana, melalui program *Bali International Program on Asian Studies* (BIPAS). Di lain pihak, terdapat 5 pelajar Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kini mengikuti program *forest management* di Universitas Kuopio.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Finlandia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 355 jiwa.

Inggris

Pengembangan hubungan bilateral Indonesia – Inggris didasarkan pada *modern and dynamic partnership*, seperti yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Tony Blair bulan Maret 2006.

Bidang Politik

Kerja sama kedua negara di bidang politik dapat dilihat melalui kegiatan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, antara lain:

a. Pertemuan Presiden RI dengan PM Inggris, David Cameron, dan mantan PM Inggris, Tony Blair, di sela-sela *World Economic Forum* (WEF), Januari 2011;
b. Pertemuan Menlu RI dengan *Minister of State* Inggris, Mr. Jeremy Browne MP di sela-sela *Bali Democracy Forum IV,* Bali, 9 Desember 2011.
c. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Inggris di sela-sela sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB di New York, September 2011;
d. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Inggris di sela-sela *World Economic Forum* (WEF), Januari 2011;
e. Pertemuan Menlu RI dengan Minister of State FCO, Jeremy Browne di sela-sela pertemuan FMM-10 ASEM di Godolla, Hongaria, pada 7 Juni 2011
f. Pertemuan Menlu RI dengan Baroness Warsi, *Cabinet Minister without Portfolio* Inggris, di sela-sela KTM OKI ke-38 di Astana, Kazakhstan, 28-30 Juni 2011.

Foto 110.Pertemuan Menlu RI dengan *Minister of State* Inggris di sela-sela *Bali Democracy Forum* IV, Bali, 9 Desember 2011

g. Pertemuan mantan PM Tony Blair dengan beberapa menteri anggota kabinet saat berkunjung ke Indonesia tanggal 23 Agustus 2011.
h. Pertemuan Menteri Perdagangan Inggris Vince Cable dengan Menteri ESDM Jero Wacik tanggal 1 November 2011.

Foto 111.Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menlu Inggris di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 22 September 2011

Pada pertemuan kedua Menlu di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, telah dibahas berbagai perkembangan kerja sama bilateral dan multilateral. Menlu RI sampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin erat dan baik selama ini. Kerja sama kedua negara dapat terus dikembangkan. Salah satu bidang yang dinilai cukup kuat adalah investasi untuk pembangunan infrastruktur dan perdagangan.

Selain itu, RI telah mendorong penguatan hubungan kerja sama bilateral dan jejaring kerja pada tataran *Parliamentary-to-Parliamentary* diantaranya melalui Kunjungan Komisi IX DPR-RI pada bulan Maret 2011 dan Kunjungan Komite IV DPD RI pada bulan Mei 2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Di bidang perdagangan dan investasi, Inggris tetap merupakan mitra yang penting bagi Indonesia. Total perdagangan RI-Inggris pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 1,92 Miliar (Ekspor USD 1,15 Miliar dan Impor sebesar USD 774,92 juta) atau meningkat 6,7% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 1,80 Miliar), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 376,79 juta (2011).
Pada tahun 2011, Indonesia telah menandatangani perjanjian pertukaran informasi mengenai pajak (*Tax Information Exchange Agreement*) dengan *British Overseas Territories*, yaitu Guernsey, Isle of Man, Bermuda dan Jersey.

Di samping itu, pada tanggal 1 November 2011, di saat kunjungan Menteri *Business, Skill and Innovation* Inggris Vince Cable ke Indonesia, telah ditandatangani suatu TOR *Annual Trade Talks* sekaligus pertemuan perdana *Annual Trade Talks* yang membahas berbagai hal guna mendukung peningkatan perdagangan dan investasi bilateral.

Dalam kerja sama ekonomi, telah dilakukan upaya-upaya untuk mendorong ekspor produk manufaktur dan *furniture*; menarik investor Inggris menanamkan modalnya di Indonesia pada sektor energi; serta melakukan *debt swap* dengan program penurunan emisi di Indonesia.

Nilai realisasi investasi Inggris ke Indonesia tahun 2011 periode Januari-Juni telah meningkat menjadi USD 244,9 juta dengan 104 proyek. Dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, pada tanggal 5-7 April 2011 Duke of York Pangeran Andrew telah melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai *Special Representative for International trade and Investment of the United Kingdom*.Selain itu Menteri Perdagangan RI juga telah melakukan kunjungan ke London pada 29 Juli 2011 sekaligus membuka kegiatan promosi dagang Indonesia di Harrods.

Dalam rangka peningkatan kerja sama ekonomi telah diselenggarakan sejumlah kegiatan promosi, antara lain: Business Luncheon (12-14 Januari 2011); dan Business Forum dan Gala Dinner (19 April 2011).

Dalam bidang kerja sama sosial dan budaya, penguatan *inter faith dialogue* serta kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi prioritas dalam Kemitraan Strategis RI-UK.

Dalam rangka promosi seni dan budaya Indonesia, telah diselenggarakan: Pemutaran film Indonesia (sepanjang 2011); dan Pameran Bali: Dancing for the Gods (14 April 2011 - Januari 2012); Gong Festival 2011: Celebrates Indonesia (Juli 2011); serta partisipasi tim gamelan pada Edinburgh International Festival tanggal 15-20 Agustus 2011.

Pada tanggal 27 Mei 2010 di London telah ditandatangani LoI bantuan *capacity building* bagi penguatan pendaftaran dan pelaporan organisasi kesejahteraan sosial di Indonesia antara Kementerian Sosial RI dan *Charity Commission of England and Wales*.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Inggris hingga November 2011 mencapai kurang lebih 10.221 jiwa.

Irlandia

Hubungan diplomatik RI- Irlandia dilaksanakan melalui KBRI London. Irlandia menyatakan keinginan untuk memprioritaskan pada kerja sama di bidang ekonomi.

Bidang Politik

Guna melembagakan konsultasi bilateral Indonesia – Irlandia, pada bulan September 2011 Indonesia telah mengusulkan suatu *Letter of Intent* pembentukan forum konsultasi bilateral yang dilaksanakan secara periodik dan reguler.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Irlandia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 121 juta (Ekspor USD 50,2 juta dan Impor sebesar USD 71,1 juta) atau meningkat 19,67% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 101, 4 ribu).

Kerja sama ekonomi dengan Irlandia, khususnya pada tingkatan *busines- to-business contact* antara kedua negara telah berlangsung secara intensif. Pada tanggal 3-5 Oktober 2011, Pemerintah Irlandia melalui *Enterprise Ireland* telah mengundang sejumlah pengusaha Indonesia untuk datang ke Dublin untuk bertemu dengan Presiden Irlandia dan melakukan pertemuan *one-on-one* dengan pengusaha-pengusaha Irlandia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Irlandia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 238 jiwa. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI di negara akreditasi, telah dilakukan kegiatan, antara lain : fasilitasi kepulangan ABK yang sakit dan mengalami kecelakaan kerja; penyediaan penampungan sementara serta fasilitasi kepulangan dua orang ABK melarikan diri; *early release* bagi dua orang ABK yang dipenjara di Irlandia akibat penyelundupan obat terlarang; pendampingan TKI yang melarikan diri.

Islandia

Hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat yang ditandai dengan kunjungan kerja pertama kali Presiden Islandia Ólafur Ragnar Grímsson ke Indonesia pada tanggal 24-29 April 2010. Dalam kunjungan itu, Presiden RI dan Presiden Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dan sepakat untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama di bidang energi panas bumi.

Bidang Politik

Kerja sama di bidang politik antara kedua negara yang cukup dominan adalah saling dukung pada organisasi internasional. Dukungan penuh diberikan pemerintah Islandia kepada Pemerintah RI sejak tahun 2008 hingga terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan *International Maritime Organisation* periode 2009-2011 dan anggota *Council Advisory* dan *Postal Operational Council* untuk *Universal Postal Union* periode 2009-2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Islandia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 2,3 juta (ekspor USD 475 ribu dan Impor sebesar USD 1,89 juta). Sedangkan pada periode yang sama tahun 2010 total perdagangan mencapai USD 2,78 juta (ekspor USD 1 juta dan impor sebesar USD 1,8 juta).

Kerja sama yang menjadi menjadi perhatian dan komitmen Indonesia dan Islandia dalam mempererat kerja sama bilateral adalah kerja sama*geothermal* (panas bumi). Hal itu ditegaskan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Islandia Ólafur Ragnar Grímsson dalam pertemuan bilateralnya di Nusa Dua, Bali, tanggal 26 April 2010. Kemajuan Islandia di bidang teknologi panas bumi akan dimanfaatkan oleh Indonesia dalam mengembangkan cadangan energi panas bumi yang dimilikinya antara lain melalui upaya mengundang investor Islandia ke Indonesia. Kunjungan ini adalah yang pertama kali dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara, dan memiliki makna penting dalam memperluas kerja sama bilateral yang telah ada selama ini di bidang panas bumi dan perikanan. Indonesia dan Islandia juga mencatat kemajuan di bidang perikanan dan

energi panas bumi terutama peningkatan kapasitas (*capacity building*) tenaga ahli Indonesia dengan mengikuti *training/course* serta rencana pendidikan S-2 di Islandia.

Pada tahun 2011, kedua negara senantiasa memiliki komitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi panas bumi terutama peningkatan kapasitas tenaga ahli Indonesia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Islandia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 46 jiwa.

Italia

Hubungan diplomatik RI – Italia telah berjalan dengan baik lebih dari enam puluh tahunlamanya. Di level bilateral telah terdapat sejumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani oleh Indonesia dan Italia. Di level multilateral, kedua negara juga beberapa kali menyepakati mekanisme saling dukung. Di bidang ekonomi, tercatat peningkatan volume perdagangan antar kedua negara yang cukup signifikan.

Bidang Politik

Tingginya intensitas saling kunjung antar pejabat tinggi dan anggota parlemen dari kedua negara mencerminkan kerja sama politik kedua negara yang terus berjalan dengan baik. Misalnya, kunjungan Komisi I DPR RI (17-20 April 2011), KASAD TNI (6 Juli 2011), GKSB DPR RI – Parlemen Italia (7 – 13 November 2011), Menteri KUKM (November 2011).

Italia dan Indonesia juga telah melakukan saling dukung atas kepentingan satu sama lain di berbagai organisasi internasional, seperti *International Maritime Organization, International Telecommunication Union,* Dewan HAM PBB, dan UNWOMEN.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Italia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 3,12 miliar (Ekspor USD 2,31 miliar dan Impor sebesar USD 807 juta) atau meningkat 46,13% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2010 (USD 2,13 miliar), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,5 miliar (2011).

Nilai investasi Italia di Indonesia untuk periode Januari-September 2011 mencapai USD 2,34 juta yang meliputi 27 proyek kerja sama.

Dalam rangka promosi seni dan budaya Indonesia, Film "Opera Jawa" karya Garin Nugroho telah ditayangkan dalam Festival l'Isola del Cinema yang ke-17 di Roma. Pada tanggal 4 Oktober 2011 telah diselenggarakan *fashion show* batik karya Oscar Lawalata dan Auguste Soesastro di Milan, sekaligus menggemakan penyelenggaraan *World Batik Summit* di Jakarta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Italia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 1.483 jiwa.

Jerman

Hubungan diplomatik RI-Jerman akan memasuki usia ke-60 tahun pada tahun 2012. Jerman mendukung integritas wilayah NKRI dan menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas wilayah kawasan. Hingga akhir November 2011 tercatat tingginya intensitas saling kunjung pejabat tinggi kedua negara.

Untuk menandai peringatan hubungan diplomatik Indonesia-Jerman yang ke-60 pada tahun 2012, Presiden Republik Federal Jerman, Christian Wulff, melakukan kunjungan ke Indonesia tanggal 30 November - 2 Desember 2011. Dalam pertemuan bilateral kedua Presiden sepakat untuk memprioritaskan kerja sama bilateral di bidang perdagangan, investasi dan pembangunan; kesehatan; pendidikan; riset dan teknologi; serta industri pertahanan. Kesepakatan yang dicapai dalamkunjungan Presiden Jerman ini adalah: i) *Joint Statement on the Establishment of German-Indonesian Advisory Group*; ii) Kerja sama Pendidikan (*Indonesia-Germany Doctoral Scholarship Program*) melalui mekanisme *Debt Swap* ke-VII; dan iii)Kerja sama*Interfaith andIntercultural Dialogue*, berupa pemberian beasiswa bagi 5 (lima) warga negara Jerman untuk

belajar *Islamic Studies* di Indonesia dan bantuan *vocational training* bagi madrasah-madrasah di Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2011, Menteri Luar Negeri RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle, di sela-sela lnternational Afghanistan Conference di Bonn, 5 Desember 2011, guna membahas berbagai agenda bilateral, regional dan internasional. Kedua Menteri Luar Negeri sepakat agar kelima prioritas bidang kerja sama yang telah disepakati oleh kedua Presiden dapat ditindaklanjuti sebelum kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan undangan kepada Menteri Luar Negeri Jerman untuk berkunjung Indonesia pada bulan April atau November 2012. Menlu Jerman menyambut baik undangan Menlu RI dan akan mengupayakan untuk berkunjung ke Indonesia pada bulan April 2012.

Bidang Politik

Di bidang politik, Indonesia memiliki Forum Konsultasi Bilateral (FKB) tingkat SOM RI-Jerman. Forum Konsultasi Bilateral ini dilaksanakan untuk membahas perkembangan kerja sama bilateral kedua negara di segala bidang, serta perkembangan regional dan isu-isu global yang menjadi kepentingan kedua negara.

FKB pertama telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 dan FKB kedua diadakan di Berlin pada tanggal 12 Oktober 2011 yang antara lain membahas persiapan kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia pada tanggal 30 November – 2 Desember 2011.

Dalam bidang pemerintahan, Jerman memberikan bantuan dalam proses perumusan dan pelaksanaan otonomi daerah, *good governance*, pelatihan diplomatik, *capacity building* dalam rangka penguatan lembaga demokrasi, dll.

Dalam upaya penyelesaian pending *draft MoU on Defence Cooperation* antara kedua negara, delegasi dari kedua Kementerian Pertahanan telah mengadakan pertemuan dalam *"Indonesian-German Policy Talks"* di Berlin pada tahun 2010.

Pada bulan Januari 2011, Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman telah menyampaikan usulan perjanjian kerja sama keamanan dalam bentuk draft *Joint Declaration of Intent* antara Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman dengan Kepolisian RI dan *draftJoint Declaration Intent on the Cooperation regarding the Deployment of Armed Law Enforcement Officers on Flights between the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia*. KepolisianRIjuga menyampaikan draft perjanjian kerja sama serupa (MoU) kepada pihak Jerman dan pada saat ini ketiga draft tersebut masih dalam tahap pembahasan awal di masing-masing instansi terkait Pemri (Polri) sebelum dilanjutkan ke pembahasan pada tingkat antar instansi terkait.

Foto 112. Kunjungan PresidenRepublik Federal Jerman, Christian Wulff ke Indonesia, Jakarta, 1 Desember 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Jerman pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 4,58 Miliar (Ekspor USD 2,33 Miliar dan Impor sebesar USD 2,25 miliar) atau meningkat 21,8% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 3,764 Miliar), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 70,158 juta(2011).

Foto 113. Menlu RI dan Menlu Jerman di sela-sela Pertemuan *Bonn Conference on Afghanistan*, Jakarta, 1 Desember 2011

Ekspor Indonesia ke Jerman antara lain adalah minyak kelapa sawit, buah kelapa sawit, alas kaki, kopi, karet alam, tekstil, furniture, biji kakao, kayu lapis, dll. Sedangkan impor Indonesia dari Jerman antara lain adalah perkakas mesin, alat transportasi, *powered aircraft* seperti helikopter, perangkat listrik, mesin proses otomatis, aliran listrik gabungan dan *micro-assemblies*, mesin untuk karet, kendaraan bermotor, alat-alat kedokteran, dll.

Investasi Jerman di Indonesia pada periode Januari-Maret 2011 tercatat senilai USD 134,7 juta dan menempatkan Jerman sebagai investor ke-7 terbesar di Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia. Proyek investasi Jerman di Indonesia masih didominasi sektor-sektor metal dan *machinery industry*, *chemical*, *pharmaceutical industry*, *transport*, *storage*, dan *communication industry*.

Berbagai promosi terus dilakukan di berbagai bidang, antara lain: *Update from the Region: Potentials of North Sulawesi*, Berlin April 2011;Partisipasi dalam *International Tourismus Borse* (ITB), Berlin, Maret 2011; Promosi Produk UKM Tasikmalaya dan Belitung di Koblenz bulan Juni 2011; *Asia Pacific Bayern Forum*, Nurnberg, Juli 2011.

Dalam kerja sama di bidang pembangunan, pada tanggal 7 April 2011 di Jakarta telah diselenggarakan Konsultasi Bilateral Indonesia-Jerman di Bidang Kerja SamaPembangunan untuk me-*review* sejumlah proyek yang telah disepakatipada tahun sebelumnya.Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011 telah dilaksanakan Negosiasi Bilateral RI-Jerman di Jakarta, termasuk membahas rencana *Debt Swapt VII* untuk sektor pendidikan sebesar 9 juta Euro yang akan menghapus hutang Indonesia sebesar 18 juta Euro.

Kerja sama sosial-budaya kedua negara terlihat antara lain dalam bentuk misi budaya dan kesenian Indonesia ke Jerman maupun sebaliknya. Di bidang pariwisata Jerman termasuk pasar yang potensial bagi Indonesia, mengingat wisatawan Jerman umumnya merupakan *high-spending tourist* dengan rata-rata pengeluaran yang mencapai sekitar USD 1,446 dan lama menginap 13 hari. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dalam tahun 2010 tercatat 138.702 hal ini merupakan peningkatan dibanding pada tahun 2009 sebesar 117.216 karena adanya krisis keuangan global. Jumlah wisatawan Jerman menduduki urutan ke-2 setelah Inggris sebagai penyumbang wisatawan mancanegara terbesar asal Eropa.

Dalam kerja sama*interfaith* dan *intercultural dialogue*, Indonesia dan Jerman mempunyai beberapa persamaan dalam membangun dan memandang penting dialog *interfaith* dan *intercultural* dalam membangun saling pengertian dan pemahaman antar agama/budaya sebagai jembatan dialog para pemuka agama. Sebagai hasil konkrit kerja sama di bidang tersebut, Pemerintah RI dan Pemerintah Jerman, dengan melibatkan *stakeholders* terkait (para tokoh lintas agama, akademisi dan masyarakat madani), telah menyelenggarakan *Interfaith and Intercultural Dialogue* Pertama di Yogyakarta pada bulan Juni 2010.*Interfaith and Intercultural Dialogue* Kedua diadakan di Berlin pada tanggal 10-11 Oktober 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga bulanNovember2011, Jumlah WNI yang berada di Jerman adalah sebanyak 17.167orang.

Di bidang keimigrasian, melalui KBRI Berlin, telah dijajagi kemungkinan pelaksanaan program pertukaran siswa antar akdemisi keimigrasian di Indonesia dan Jerman. Selain bertujuan memberikan pengalaman kepada para siswa di akademisi keimigrasian di Indonesia, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan Jerman terhadap sistem keimigrasian Indonesia.

Latvia

Hubungan diplomatik RI dengan Latvia dirangkap oleh KBRI Stockholm. Hubungan bilateral RI dengan kedua negara tersebut berjalan baik yang ditandai dengan kerja sama di bidang sosial dan budaya serta pendidikan. Selain itu, pada tahun 2011 telah dilakukan dua kali pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri.

Bidang Politik

Selama tahun 2011, Menlu RI dan Menlu Latvia telah bertemu sebanyak dua kali.Pada tanggal 7 Juni 2011, Menlu Latvia Mr. Girts Valdis Kristovskis telah bertemu Menlu RI di sela-sela Pertemuan Menlu ASEM di Godollo, Hongaria. Dalam pertemuan itu, telah diidikasikan oleh Menlu Latvia untuk berkunjung ke Indonesia pada paruh pertama tahun 2012. Selain itu, kedua Menteri menekankan pentingnya kerja sama di bidang kebudayaan dan perdagangan untuk senantiasa dikembangkan.

Selain itu, di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, 20 September 2011, Menlu RI juga telah bertemu dengan Menlu Latvia. Pada kesempatan itu, Menlu RI menyambut baik rencana penguatan kolaborasi kalangan bisnis kedua negara dan finalisasi perjanjian perlindungan pajak berganda, perjanjian *air services* dan perjanjian kerja sama kebudayaan, yang akan dilakukan dalam pertemuan FKB pertama RI-Latvia di Riga yang dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2012.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Latvia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 44,54 juta (Ekspor USD 22,213 juta dan Impor sebesar USD 22,326 juta) atau meningkat 393% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 9,023 juta).

Di bidang kebudayaan saat ini tengah diupayakan persetujuan payung bagi kerja sama kebudayaan di antara kedua negara.

Kerja sama konkrit yang telah berjalan adalah antara Direktorat Museum (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI) dan *Museum of Foreign Arts of Latvia* berupa penempatan ruang pamer khusus (*dedicated site)*benda seni dan budaya Indonesia pada museumtersebut serta pemberian hibah barang-barang seni budaya Indonesia pada acara pembukaan *Museum of Foreign Arts of Latvia* di Riga, tanggal 20-21 Agustus 2011.

Foto 114. Pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Latvia di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 20 September 2011

Liechtenstein

Hubungan diplomatik RI-Liechtestein dilaksanakan melalui KBRI Bern. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik yang tercermin dari saling dukung di fora internasional dan peningkatan total perdagangan kedua negara.

Bidang Politik

Di bidang politik, antara lain, Liechtenstein telah mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014.

Bidang Ekonomi

Total perdagangan RI-Liechtenstein pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 70,2 ribu (Ekspor USD 0,9 ribu dan Impor sebesar USD 69,3 ribu).

Hubungan bilateral ekonomi RI – Liechtenstein belum memiliki landasan/pengaturan bersama dan saat ini mulai tampak terlihat adanya peningkatan walaupun masih tergolong sangat kecil.Meskipun merupakan negara dengan pendapatan yang tinggi, yaitu USD 25 ribu, Liechtenstein merupakan pasar yang relatif kecil untuk produk-produk Indonesia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Liechtenstein hingga November 2011 adalah 4 jiwa

Lithuania

Hubungan diplomatik RI-Lithuania dilaksanakan melalui KBRI Kopenhagen.

Bidang Politik

Dalam pertemuan Dirjen Amerop dengan Wamenlu Lithuania di sela-sela KTM ASEM di Budapest tanggal 6 Juni 2011, pihak Lithuania mengangkat isu mengenai kemungkinan kerja sama antara *Organization for Security and Co-operation in Europe*(OSCE) dengan ASEAN.

Bidang Ekonomidan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Lithuania pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 48,8 juta (Ekspor USD 34,07 juta dan Impor sebesar USD 14,73 juta) atau meningkat 31,42% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 37 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 19,339 juta (2011).

Indonesia setiap tahunnya menawarkan program Dharmasiswa kepada siswa Lithuania untuk belajar seni dan budaya di Indonesia.

Luksemburg

Hubungan diplomatik RI-Luksemburg dilaksanakan melalui KBRI Brussels. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik, yang antara lain tercermin dari kunjungan Menteri Luar Negeri Luksemburg, H.E Jean Asselborn ke Indonesia tanggal 25 Mei 2011, maupun dukungan Luksemburg pada pencalonan Indonesia sehingga terpilih kembali sebagai anggota Executive Board UNESCO.

Bidang Politik

Kunjungan Menlu Luksemburg ke Indonesia dilakukan dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di Bali, dimana Luksemburg hadir sebagai *observer.*

Foto 115. Menlu RI dan Menlu Luksemburg
Bali, 25 Mei 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Luksemburg pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 24,74 juta (Ekspor USD 20,846 juta dan Impor sebesar USD 3,89 juta) atau meningkat 18,17% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD20,936 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 16,952 juta (2011).

Dalam kerja sama bidang ekonomi dan investasi, kedua pemerintah kembali memulai putaran ke-3 upaya penyelesaian perundingan Perjanjian Penanaman Modal (P4M) di Solo, 20-21 September 2011. Putaran perundingan P4M RI-Belgia Luxemburg *Economic Union* sebelumnya dilaksanakan tahun 2008.

Malta

Hubungan diplomatik RI - Malta dilaksanakan melalui KBRI Roma. Kondisi geografis yang cukup jauh merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan antar pejabat tinggi kedua negara, meskipun demikian kerja sama di forum multilateral telah berjalan dengan baik.

Bidang Politik

Malta dan Indonesia merupakan negara pihak dalam UNCLOS sehingga keduanya memiliki perhatian khusus kepada isu-isu maritim. Malta memberikan tawaran penggunaan fasilitas *freeport* sebagai hub masuk ke kawasan Mediterania. Kerja sama Malta dan Indonesia di forum multilateral

banyak dilakukan melalui pemberian saling dukung, khususnya di IMO. Malta secara sepihak mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB 2011-2014.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Malta pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 11,653 juta (Ekspor USD 2,648 juta dan Impor sebesar USD 9,001 juta) atau meningkat 280,73% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD3,06 juta).

Intensitas *people-to-people* contact belum banyak, namun setiap tahunnya Malta, melalui *International Maritime Law Institute* (IMLI), memberikan beasiswa S2 kepada PNS Indonesia di bidang Hukum Maritim.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga negara Indonesia di Malta hingga akhir November 2011 tercatat 58 jiwa.

Monako

Hubungan diplomatik RI dengan Monako dilaksanakan melalui KBRI Paris. Hubungan bilateral RI dengan Monako berjalan baik yang ditandai dengan saling dukung di berbagai forum internasional seperti di PBB dan hubungan perdagangan kedua negara.

Total perdagangan RI-Monako pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 1,925 juta (Ekspor USD 1,67 juta dan Impor sebesar USD 0,256 juta) atau meningkat 227% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD0,588 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,406 juta (2011).

Norwegia

Pada tahun 2011, peningkatan hubungan kedua negara terkait erat dengan tindaklanjut Deklarasi Bersama mengenai kerja sama Kemitraan Dinamis Indonesia-Norwegia di abad ke-21 (*Joint Declaration by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway on Cooperation Towards a Dynamic Partnership in the 21st Century*) yang ditandatangani kedua Menlu di Jakarta, 8 November 2010.

Dalam Deklarasi tersebut, kedua negara menekankan pentingnya kerja sama di segala bidang yang berkelanjutan di dalam konteks arsitektur global yang berkembang, tuntutan globalisasi dan tantangan masa depan di dalam arena internasional. Beberapa capaian yang diperoleh pada tahun 2011 adalah terselenggaranya Dialog HAM ke-10 RI-Norwegia, pelaksananaan konsultasi bilateral bidang keamanan, perkembangan tindaklanjut implementasi LoI RI-Norwegia mengenai kerja sama REDD+ dan penanggulangan perubahan iklim, peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dan komitmen kerja sama di bidang energi.

Bidang Politik

Beberapa hal utama yang menjadi perhatian utama kerja sama di bidang politik, antara lain:

a. Peringatan 10 tahun kerja sama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM melalui penyelenggaraan Dialog HAM ke-10 RI-Norwegia, 20-22 Juni 2011.
b. Pertemuan konsultasi bilateral di bidang keamanan dengan kunjungan Dirjen Masalah Kebijakan Keamanan dan High North Norwegia ke Indonesia, 18-21 Januari 2011.

Sebagai tindaklanjut dari kerja sama di bidang politik khususnya pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia dan Norwegia telah melaksanakan Dialog HAM ke-10 di Oslo, Norwegia pada tanggal 20-22 Juni 2011. Agak berbeda dari tahun sebelumnya, Dialog HAM tahun ini sekaligus menandai peringatan sepuluh tahun kerja sama bilateral di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Adapun topik dialog tahun ini yang dibahas ke dalam Kelompok Kerja (Pokja), yaitu: *Military and Police*, *Rights of the Child* dan *Interfaith Dialogue and Culture of Tolerance*. Hal penting yang dihasilkan pada Dialog ini adalah adanya komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk menindaklanjuti usulan dan rekomendasi kerja sama ke arah yang lebih konkrit. Untuk itu disepakati menggunakan mekanisme *midterm review* untuk menunjukkan kemajuan kerja sama. Dalam perkembangannya, Indonesia dan

Norwegia saat ini sedang menjajagi pertemuan *midterm review*/*stock taking meeting* pada Januari 2012.

Foto 116. Menlu RI dan Menlu Norwegia di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 21 September 2011

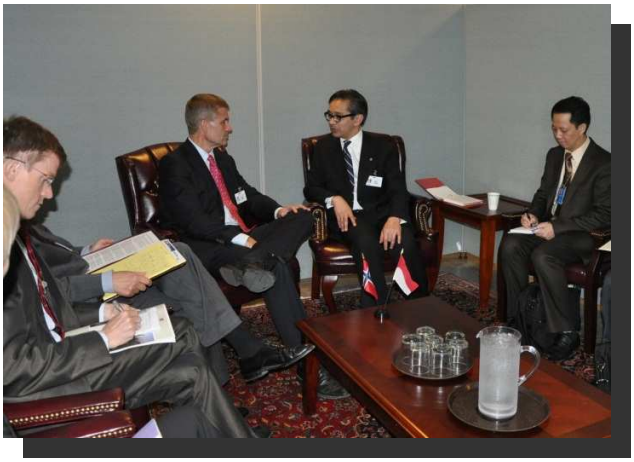

Terkait kerja sama di bidang keamanan internasional, Dirjen Kebijakan Keamanan dan *High North* Norwegia telah mengadakan konsultasi bilateral bidang keamanan di Jakarta, 18-21 Januari 2011 yang antara lain membicarakan isu-isu keamanan global.*State Secretary* Kemlu Norwegia Mr. Espen Barth Eide telah melakukan kunjungan ke Indonesia, pada tanggal 9-12 Oktober 2011. Dalam kunjungan itu, Mr. Eide telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu RI di Jakarta, tanggal 10 Oktober 2011, membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara dan isu keamanan regional dan global termasuk isu Myanmar.

Bidang Ekonomidan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Norwegia pada periode Januari-September tahun 2011 mencapai USD 231,78 juta.

Mengenai implementasi tindaklanjut LoI RI – Norwegia mengenai kerja sama REDD+ yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2010, Indonesia telah melaksanakan beberapa tahapan sesuai dengan LoI antara lain ditetapkannya provinsi Kalimantan Tengah dan Riau sebagai *pilot province*, dan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada tanggal 20 Mei 2011.

Instruksi Presiden tersebut pada dasarnya berisi mengenai penundaan izin baru bagi penggunaan kawasan hutan primer dan lahan gambut yang berlaku selama 2 (dua) tahun.

Beberapa kemajuan yang dilakukan Indonesia adalah : a) pembentukan Satgas REDD+ baru untuk menindaklanjuti tugasnya yang berakhir pada akhir Juni 2011, b) penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas REDD+ mengenai *pilot project* REDD+ di provinsi tersebut, dan c) dikeluarkannya *draft* final Strategi Nasional REDD+ untuk memberi arah bagi solusi komprehensif terhadap penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan.

Selain itu, Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim telah mengadakan kunjungan ke Indonesia, 26-28 September 2011, untuk menindaklanjuti implementasi LoI RI-Norwegia dan berpartisipasi pada Konferensi *Forests Indonesia* di Jakarta, pada tanggal 27 September 2011. Pada kesempatan kunjungan itu, Menteri Solheim mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI untuk membicarakan perkembangan implementasi LoI dan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk meninjau rencana *pilot project* REDD+ RI-Norwegia.

Terkait dengan perkembangan kerja sama REDD+ RI-Norwegia khususnya kegiatan di sela-sela SMU PBB ke-66:

a. Pada tanggal 21 September 2011, Indonesia bekerja sama dengan Norwegia dan UNDP telah menyelenggarakan *event* Tingkat Tinggi mengenai Indonesia dalam melaksanakan program REDD+. Acara dimoderatori oleh *Ambassador Hans Brattskar (Director of International Climate and Forest Initiative Norway)* dan dibuka oleh Menlu RI serta menampilkan *speakers* : A*dministrator UNDP, Ms. Helen Clarks,* Menteri Lingkungan dan

Pembangunan Norwegia, *H.E. Erik Solheim*, dan Ketua UKP4 Dr. Kuntoro Mangkusubroto.

b. Pada tanggal 20 September 2011, UKP4 (Satgas REDD+) dan Administrator UNDP Helen Clark telah menandatangani *MOU on the framework for cooperation with and support for the National REDD+ Programme in the Republic of Indonesia* (terlampir) yang pada pokoknya merupakan kesepakatan bahwa *UN System* akan membantu UKP4 melalui mekanisme yang disebut *United Nations REDD+ Coordination Office in Indonesia* (UNRCOI).

Foto 117. Menlu RI dan *State Secretary* Norwegia, Jakarta, 10 Oktober 2011

Sementara itu di bidang energi, Indonesia dan Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral melalui penyelenggaraan konsultasi bilateral bidang energi (FKB-E) ke-6 yang telah diadakan di Yogyakarta tanggal 6-7 Oktober 2011. Dalam FKB-E telah disepakati pula mekanisme untuk mewujudkan kerja sama konkrit kedua negara dan energi yang menjadi prioritas kerja sama mendatang, antara lain: *hydropower, geothermal dan off-shore wind.*

Di bidang pendidikan, telah ditandatangani perjanjian persahabatan antara Universitas Udayana dan Gateway College, di Oslo, tanggal 21 Juni 2011, sebagai wujud peningkatan kerja sama di antara perguruan tinggi kedua negara.

Kerja Sama pendidikan Indonesia-Norwegia menunjukkan peningkatan yang berarti, khususnya kerja sama pendidikan non-formal. Program pra-universitas di Bali (Indonesia) yang ditawarkan oleh beberapa lembaga pendidikan Norwegia yaitu *Gateway College, Gostudy, Active Education* dan Kulturakademiet meningkat signifikan.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Norwegia hingga akhir November 2011 tercatat 899 jiwa.

Portugal

Sejak pembukaan kembali hubungan diplomatik Indonesia dan Portugal, kerja sama bilateral kedua negara terus menunjukkan peningkatan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakatnya, yang tercermin dari pertemuan kedua Menlu belum lama ini dan hubungan persahabatan antara kedua masyarakat.

Bidang Politik

Hubungan bilateral kedua Negara semakin diperkuat dengan bertemunya Menlu kedua negara RI di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, 20 September 2011. Menlu RI dan Menlu Portugal, H.E Mr. Paulo Portas telah membahas kerja sama kedua negara yang telah terbangun selama ini, baik dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral. Dalam pertemuan tersebut Menlu RI telah mengundang Menlu Portas untuk berkunjung ke Indonesia. Hasil pertemuan yang perlu ditindaklanjuti kedua pihak, utamanya penyelesaian konsep kerja sama bilateral seperti:

a. *Agreement on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports;*

b. *Agreement in the field of education, science and technology, culture, tourism, youth, sports and mass media;*
c. *Agreement on Economic Cooperation;*dan
d. *Agreement on Promotion and Protection on Investment.*

Selain itu juga kedua negara telah membahas mengenai keinginan Timor-Leste menjadi anggota ASEAN dan isu Palestina.

Terkait dengan penyelesaian konsep kerja sama bilateral, telah dilaksanakan perundingan antara delegasi RI dan delegasi Portugal di Lisabon, pada tanggal 16-17 Mei 2011. Konsep perjanjian yang dibahas adalah *Agreement on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports, Agreement in the Field of Education, Science and Technology, Culture, Tourism, Youth, Sports and Mass Media,* dan *Agreement on Economic Cooperation*.

Portugal dan Indonesia juga saling memberikan dukungan terhadap kepentingan satu sama lain di organisasi internasional, antara lain dukungan Portugal dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014, dan ECOSOC 2012-2014.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Portugal pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 115,307 juta (Ekspor USD 75,375 juta dan Impor sebesar USD 39,932 juta) atau meningkat 63,09% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD70,7 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 35,443 juta (2011).

Adapun investasi Portugal ke Indonesia masih relatif kecil. Baru terdapat dua perusahaan Portugal yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu satu perusahaan Portugal yang bergerak di sektor perminyakan dengan nilai sebesar USD 0,5 juta dan sebuah perusahaan Portugal di sektor pariwisata yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai sebesar USD 0,1 juta.

Foto 118. Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Portugal di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, 19 September 2011

Beberapa kegiatan promosi perdagangan dan investasi yang telah dilakukan sejak Januari hingga Juni 2011 seperti misi dagang Portugal ke Indonesia (2-7 Mei 2011) dan *business matching* antara PT. Rutan Indonesia dan Vicort Castelo Branco Portugal yang bergerak di bidang alat-alat pertanian.

Di bidang sosial budaya, pada paruh pertama tahun 2011 telah dilakukan kegiatan promosi berupa dua pagelaran dan workshop gamelan Jawa selama empat bulan (Februari-Mei 2011) yang berhasil menjaring lebih dari 400 peserta. Pada bulan Juni 2011 telah diadakan *Indonesian Culture Days* bekerja sama dengan Universitas do Minho di Braga.

Sejumlah anggota Asosiasi Persahabatan dan Kerja sama Portugal – Indonesia (Associasio Luso – Indonesia para Amizade a Cooperacao – ALIAC) pada tanggal 30 Agustus – 9 September 2011 mengunjungi tempat-tempat bersejarah di indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Portugis. Selain itu, Kapal latih "Sagres" juga berlabuh di Indonesia pada tanggal 26-29 September 2011.

Pada tahun ajaran 2011-2012 tercatat tiga warga Portugal memperoleh beasiswa Dharmasiswa untuk belajar seni dan budaya Indonesia di Yogyakarta dan Bali.

Selain itu, telah ditandatangani MoU Kerja Sama antara LKBN ANTARA dan Kantor Berita Portugal LUSA pada bulan Juli 2011 di Jakarta dan bulan September 2011 di Lisabon.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga bulan November 2011, Jumlah WNI yang berada di Portugal adalah sebanyak 124jiwa.

Beberapa masalah kekonsuleran yang sedang dihadapi maupun telah diselesaikan di Portugal antara lain:

a. Pemberian bantuan kepada ABK yang sakit di atas kapal berbendera Portugal pada bulan Februari 2011;
b. Pengupayaan kompensasi bagi keluarga 3 orang ABK Yana da Quinta di perairan Azores pada bulan Februari 2011; dan
c. Bantuan pemulangan ABK bernama Hartoyo yang meninggal di atas kapal berbendera Portugal pada bulan Maret 2011.
d. Pemberian bantuan hukum dan kekonsuleran bagi 8 ABK WNI yang dituduh menyelundupkan 1,8 ton kokain pada bulan Juli 2011.

San Marino

Hubungan Indonesia – San Marino memasuki babak era baru pada tahun 2011 ini dengan disepakatinya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara.

Pada tanggal 26 September 2011 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-66, kedua Menlu melakukan penandatanganan *Agreement between The Republic of San Marino and Republic of Indonesia on the Establishment of Diplomatic Relations*. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI mengundang Menlu San Marino untuk berkunjung ke Indonesia.

San Marino merupakan negara yang terletak di Italia utara dimana seluruh wilayahnya berbatasan dengan Italia. Direncanakan San Marino akan menjadi wilayah rangkapan KBRI Roma.

Total perdagangan RI-San Marino pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 9,1 ribu.

Foto 119. Menlu RI dan Menlu San Marino pada Peresmian Pembukaan Hubungan Diplomatik Kedua Negara, New York, 26 September 2011

Siprus

Hubungan diplomatik RI – Siprus dilaksanakan melalui KBRI Roma. Kerja sama bilateral kedua negara terus meningkat, khususnya setelah pembukaan Kedutaan Besar Siprus di Jakarta pada tahun 2010.

Bidang Politik

Hubungan bilateral Indonesia dan Siprus mulai mencapai tahapan baru yang ditandai dengan kunjungan kerja Menlu Siprus, H.E. Markos Kyprianou yang pertama kalinya ke Indonesia pada tanggal 28 Februari - 3 Maret 2011. Dalam kunjungan tersebut kedua Menlu menandatangani *MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus on Bilateral Consultation*.

Dalam pernyataan pers bersama, kedua Menlu menyatakan bahwa stabilnya hubungan politik bilateral harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, khususnya untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi kedua negara.

Pada tanggal 2 Maret 2011, Menlu Siprus juga bertemu dengan Presiden RI. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI mendorong peningkatan kerja sama kedua negara khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Melalui kunjungan ini, kedua pihak juga menyepakati agar draft perjanjian yang masih *pending* dapat segera diselesaikan. Draft perjanjian tersebut adalah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Perjanjian Kerja Sama Transportasi Laut, Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

Pertemuan tingkat Menlu kembali dilaksanakan di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, di New York, 20 September 2011. Pada

kesempatan ini, Menlu RI telah bertemu dengan Menlu Siprus yang baru, H.E Mrs. Erato Kozakou-Marcoullis. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI telah menggarisbawahi hubungan bilateral kedua negara yang cukup baik. Hubungan tersebut perlu terus ditingkatkan dan beberapa kesepakatan yang masih *pending* di bidang *visa exemption*, kelautan, turisme dan bidang lain perlu diselesaikan. Menlu RI juga mengundang Menlu Siprus dan pelaku bisnis Siprus untuk berkunjung ke Indonesia. Terkait dengan isu *Turkish Cypriot*, Menlu RI sampaikan bahwa Indonesia senantiasa memegang teguh prinsip kesatuan negara di berbagai forum internasional termasuk di OKI.

Total perdagangan RI-Siprus pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 447,289 juta (Ekspor USD 59,653 juta dan Impor sebesar USD 387,636 juta).

Jumlah WNI di Siprus hingga akhir November 2011 tercatat 76 jiwa.

Foto 120.Penandatanganan MoU *on Bilateral Consultation* antara Menlu RI dan Menlu Siprus di Jakarta, 1 Maret 2011

Slovenia

Hubungan diplomatik RI-Slovenia dirangkap oleh KBRI Wina. Selama ini hubungan kedua negara sangat baik yang tercermin dari kerja sama saling dukung di forum internasional.

Bidang Politik

Kedua negara secara aktif saling memberikan dukungan dalam pencalonan kedua negara di forum multilateral seperti pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM, *International Law Commission* (ILC) dan lainnya.

Di sela-sela pertemuan KTM GNB, Menlu RI dan Menlu Slovenia telah mengadakan pertemuan bilateral pada tanggal 25 Mei 2011 di Bali. Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya-upaya untuk tingkatkan hubungan bilateral kedua negara termasuk di bidang ekonomi.

Foto 121.Pertemuan Bilateral Menlu RI dan Menlu Slovenia, Bali, 25 Mei 2011

Bidang Ekonomi

Total perdagangan RI-Slovenia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 80,598 juta (Ekspor USD 50,006 juta dan Impor sebesar USD 20,591,9 juta) atau meningkat 53,1% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD60,555 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 39,414 juta (2011).

Saat ini impor batubara Slovenia dari Indonesia cukup banyak namun Pemerintah Slovenia telah menegaskan bahwa peningkatan hubungan perdagangan dan investasi antara Slovenia danIndonesia diarahkan pada sektor-sektor potensial lainnya diluar perdagangan batubara (*beyond coal*).

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Slovenia hingga akhir November 2011 tercatat 23 jiwa.

Spanyol

Hubungan bilateral Indonesia dengan Spanyol terus menunjukkan peningkatan di berbagai bidang, baik politik, pertahanan, ekonomi, maupun sosial budaya.

Bidang Politik

Peningkatan kerja sama di bidang politik ditandai dengan adanya saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan pemberian saling dukung atas kepentingan satu sama lain di berbagai organisasi internasional.

Selama tahun 2011, kunjungan pejabat tinggi dari kedua negara antara lain:

a. Misi dagang Spanyol yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Spanyol, Alfredo Bonet, 1-3 Maret 2011;
b. Kunjungan kerja Komisi X DPR RI, tanggal 25-28 April 2011.
c. Kunjungan kerja Kepala BKPM dalam rangka promosi investasi di bidang pembangunan infrastruktur, 15 April 2011;
d. Kunjungan kerja Menteri Pertanian RI, 25-26 April 2011;
e. Kunjungan delegasi Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR RI dalam rangka studi banding ke Catalunya, 2-8 Mei 2011;
f. Kunjungan Studi Strategis Luar Negeri Program Pendidikan Singkat (SSLN-PPSA) Angkatan ke-17 Lemhanas ke Madrid dan Barcelona, 27 Juni -1 Juli 2011; dan
g. Kunjungan Deputi Infrastruktur Bappenas, 13-15 Juni 2011, dsb.

Di bidang pertahanan dan keamanan, pada semester pertama tahun 2011, sejumlah pejabat tinggi TNI seperti Wakasad, Kadis Penerbangan TNI AL, Waasren TNI AU dan Kepala Bais TNI telah melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang industri pertahanan. Dalam kunjungan pada tanggal 15-16 September 2011, Wamenhan RI telah bertemu dengan Deputi Menteri Pertahanan Spanyol untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara, sekaligus meninjau industri pertahanan Spanyol.

Untuk menuntaskan sejumlah kesepakatan kerja sama RI – Spanyol, telah diselenggarakan konsultasi antara Delegasi RI dan Delegasi Spanyol di Madrid, 19-20 September 2011. Dalam konsultasi tersebut draft kesepakatan yang dibahas adalah sebagai berikut:

a. *Draft Agreement on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*
b. *Draft MoU between the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Kingdom of Spain and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on Cooperation and Political Dialogue*
c. *Draft MoU between the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs of the Kingdom of Spain on Cooperation in the Field of Water Resources Development*
d. *Draft MoU between the Ministry of Public Works and Transport of the Kingdom of Spain and the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Transportation*
e. *Draft MoU between the Ministry of Public Works and Transport of the Kingdom of Spain and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia on Road Engineering Development*

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Spanyol pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 2,034 Miliar (Ekspor USD 1,779 miliar dan Impor sebesar USD 0,254miliar) atau meningkat 25,37% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD1,622 miliar), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,525 miliar (2011).

Untuk periode Januari-September 2011, nilai investasi Spanyol mencapai USD 0,48 juta yang meliputi 8 proyek kerja sama

Beberapa kegiatan promosi perdagangan dan investasi yang telah dilakukan adalah promosi investasi daerah Kulon Progo pada bulan April 2011; business luncheon Kepala BKPM dengan pengusaha

Spanyol pada bulan April 2011; *business gathering* Deputi Bappenas dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub pada bulan Juni 2011.

Dalam rangka mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia dan membangkitkan minat warga Spanyol untuk berkunjung ke Indonesia, pada paruh pertama 2011 telah dilaksanakan Pekan Gastronomi Indonesia (17-23 Januari 2011); Pameran Batik Keraton Yogyakarta (10 Februari – 5 Maret 2011); Pengajaran Gamelan dan angklung bagi siswa beberapa sekolah di Madrid (Februari, Maret dan Mei 2011).

Pada tahun ajaran 2011-2012, terdapat 12 warga Spanyol yang menjadi penerima beasiswa Dharmasiswa.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Hingga bulan November 2011, jumlah WNI yang berada di Spanyol adalah sebanyak 1288 jiwa .

Swedia

Hubungan Indonesia dan Swedia sangat baik terutama dengan kunjungan beberapa Menteri dan Ketua Parlemen Swedia ke Indonesia selama tahun 2011. Kunjungan tersebut merupakan cermin dari perhatian utama Swedia terhadap Indonesia yang telah dianggap sebagai salah satu negara prioritas dalam kebijakan luar negerinya sejak tahun 2008.

Bidang Politik

Beberapa hal penting dalam pengembangan kerja sama politik adalah :

a. Kunjungan Ketua Parlemen Swedia ke Indonesia, 25-27 Mei 2011
b. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Swedia di Davos, Swiss, Januari 2011, dan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-66 di New York
c. Penyelenggaraan Dialog HAM ke-4 RI-Swedia di Stockholm, 21-22 Juni 2011

Kunjungan Ketua Parlemen Swedia Per Westerberg ke Indonesia, 25-27 Mei 2011, merupakan kunjungan penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu dari dua negara yang menjadi fokus kunjungan Parlemen Swedia yang hanya berkunjung sekali dalam 4 tahun masa baktinya. Dalam kunjungan itu, Ketua Parlemen Swedia didampingi seluruh Ketua Fraksi Parlemen Swedia.

Foto 122.Pertemuan Bilateral Menlu RI dan Menlu Swedia di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 23 September 2011

Disamping itu, kedua Menlu juga melakukan pertemuan bilateral terakhir adalah di sela-sela SMU PBB ke-66 di New York, tanggal 23 September 2011, setelah sebelumnya melakukan pertemuan bilateral di Davos, Swiss, di sela-sela *World Economic Forum* (WEF). Pokok-pokok yang menjadi perhatian kedua Menlu pada pertemuan di New York antara lain :

- Swedia sedang merancang suatu forum untuk membahas *internet freedom* yang akan mengundang perwakilan dari beberapa negara di Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Fokus penyelenggaraan forum tersebut untuk membahas perlunya *ground rules* di dunia maya utamanya yang berkaitan dengan media sosial.
- Indonesia menekankan bahwa isu media sosial akan menjadi bagian dari pembahasan di *Bali Democracy Forum* (BDF) yang akan diadakan di Bali, 8-9 Desember 2011.

Sebagai tindaklanjut Dialog sebelumnya, Indonesia dan Swedia telah mengadakan Dialog HAM ke-4 RI-Swedia di Stockholm, tanggal 21-22 November 2011. Topik yang dibahas antara lain : *standard minimum rules* terkait kondisi di lembaga pemasyarakatan, toleransi dan koeksistensi,

kebebasan berpendapat dan pemanfaatan internet, RANHAM RI, dan perkembangan *ASEAN Inter governmental Commission on Human Rights* (AICHR). Dialog HAM ini menghasilkan tindak lanjut kerja sama konkrit yaitu: a) pengembangan kapasitas mengenai pelayanan komunikasi masyarakat bagi panitia RANHAM di pusat dan daerah, b) pembahasan lebih lanjut mengenai *alternative sanction* terkait *Standard Minimum Rules* lembaga pemasyarakatan Indonesia, dan c) usulan kunjungan antar jurnalis, *interreligious leaders* dan *think tank* kedua negara untuk berbagi pengalaman di bidang toleransi dan *coexistence* sebelum dialog HAM mendatang.

Dialog HAM merupakan salah satu bentuk kerja sama utama Indonesia dan Swedia di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Swedia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 689,517 juta (Ekspor USD 112,815 juta dan Impor sebesar USD 576,701 juta) atau meningkat 16,81% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD590,298 juta).

Sementara itu, dalam rangka peningkatan hubungan dagang dan investasi, selama paruh pertama tahun 2011, komitmen Swedia ini ditunjukkan dengan kunjungan Menteri Perdagangan Ewa Björling dan Menteri Kesehatan dan Sosial Göran Hägglund serta Ketua Parlemen Swedia Per Westerberg ke Indonesia. Bersamaan dengan kunjungan Menteri Perdagangan Swedia ke Indonesia pada tanggal 6-8 Februari 2011, yang disertai misi dagang, Swedia secara resmi membuka *Swedish Trade Council* yang dimaksudkan untuk merealisasikan promosi perdagangan dan investasi kedua negara. Demikan pula dengan kunjungan Menteri Kesehatan dan Sosial Swedia ke Indonesia pada tanggal 5-7 April 2011, yang turut membawa delegasi bisnis di bidang industri kesehatan.

Selain di tingkat pemerintahan, kalangan bisnis Swedia juga menaruh perhatian besar dengan Indonesia yang tercermin dari kunjungan kelompok investor berpengaruh Swedia yang tergabung dalam *Novare Academy* ke Indonesia tanggal 17-23 Oktober 2011. Novare Academy telah mengadakan pertemuan dengan berbagai kalangan pemerintahan dan swasta di Indonesia.

Indonesia dan Swedia saat ini juga dalam tahap finalisasi MoU mengenai kerja sama pembangunan RI-Swedia dalam kerangka *Selective Cooperation* yang mengutamakan kerja sama didasarkan oleh *Partner Driven Cooperation (PDC).* Kerja sama pembangunan Swedia untuk Indonesia itu berlangsung pada periode 2009-2013.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Swedia hingga akhir November 2011 tercatat 625 jiwa.

Swiss

Hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss telah terjalin dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Indonesia menjadi salah satu *priority country* sebagai mitra strategis Swiss dalam pengembangan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi dan pembangunan.

Bidang Politik

Kerja sama di bidang politik tercermin dari saling kunjung kepala negara dan pejabat tinggi negara dari Indonesia dan Swiss serta pemberian dukungan timbal balik terhadap kepentingan satu sama lain di fora internasional.

Pada paruh pertama tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dua kali berkunjung ke Swiss, yaitu pada 18 Januari 2011, guna menghadiri *World Economic Forum* di Davos dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Swiss, Calmy-Rey, serta bulan Juni 2011 guna menghadiri *100th International Labour Conference* di Jenewa.

Pada akhir Maret - awal April 2011, Assistant State Secretary Swiss, Dubes Beat Nobs, telah berkunjung ke Indonesia guna membahas pembentukan Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Swiss serta bertemu Watapri ASEAN dan Sekjen ASEAN di Jakarta.

Pada tanggal 7 April 2011 di Bern telah diselenggarakan kuliah umum “Indonesia: gender dan politik dalam suatu masyarakat multikultural”

Foto 123Pertemuan Bilateral Presiden RI dan Presiden Swiss, 28 Januari 2011

yang menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro.

Swiss telah mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2007-2010 dan 2011-2014, dan pencalonan Dubes Nugroho Wisnumurti sebagai anggota International Law Commission periode 2007-2011.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Swiss pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 447,289 juta (Ekspor USD 59,65 juta dan Impor sebesar USD 387,64 juta).

Berkaitan dengan kerja sama ekonomi, Swiss selaku Ketua Dewan *European Free Trade Association* (anggota EFTA terdiri dari Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Islandia) pada tahun 2010 lalu, telah meluncurkan dimulainya perundingan kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan negara EFTA (*Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*).Sampai dengan tahun 2011, IE-CEPA telah melakukan tiga kali putaran perundingan yaitu di Jakarta, 31 Januari-2 Februari 2011, Jenewa 6-8 Juni 2011 dan Bali, 1-4 November 2011.

Perundingan IE-CEPA meliputi, antara lain, pokok-pokok perundingan perdagangan di bidang barang dan jasa, investasi, HAKI, kerja sama dan *capacity building,* dan *government procurement*.

Pada tanggal 13-14 Desember 2011, Indonesia dan Swiss mengadakan Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan yang ketiga, di kota Batam. Adapun *output* dari pertemuan kali ini adalah pembahasan isu regulasi sektor farmasi, pajak barang mewah, rencana pembentukan kerja sama di bidang usaha kecil dan menengah (UKM), bidang pariwisata, serta energi dan sumber daya miniral.

Di bidang pendidikan, pada tanggal 3 Mei 2011, telah ditandatangani MOU pertukaran pelajar antara Perguruan Budi Mulia II, Yogyakarta, dan Oberstufenschule Frutingen.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Swiss hingga akhir November 2011 tercata2.265 jiwa yang pada umumnya bekerja sebagai *skilled labour*.

Terhitung mulai tanggal 22 April 2011 Perjanjian Bebas Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas antara Indonesia dan Swiss yang ditandatangani oleh Menlu kedua negara pada tanggal 7 Juli 2010 secara resmi mulai diberlakukan.

Vatikan

Hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan selama ini telah berjalan dengan baik. Kedua negara memiliki kesamaan pandang dalam penanganan isu-isu global yang menjadi perhatian bersama.

Bidang Politik

Indonesia memandang Tahta Suci Vatikan sebagai aktor penting dalam diplomasi mengingat peran Paus sebagai pemimpin agama Katholik yang penganutnya mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Sementara itu, Tahta Suci Vatikan menganggap penting peran Indonesia sebagai negara demokratis dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Mengingat kekhasan yang dimiliki oleh Vatikan, tidak terdapat banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional Indonesia.

Bidang kerja sama yang paling berpeluang untuk dikembangkan adalah bidang sosial budaya dan pendidikan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Vatikan pada semester pertama tahun 2011 antara lain:

a. Pada tanggal 10-11 Mei 2011 telah diselenggarakan seminar dan workshop karawitan.
b. Pada tanggal 16 Mei 2011, Sosiolog Prof. Dr. Fransiska Saveria Sika Ery Seda menjadi narasumber pada seminar yang diadakan oleh Pontifical Council for Justice and Peace dalam rangka memperingati 50 tahun Ensiklik Mater et Magistra.
c. Pada tanggal 23 Mei 2011 delegasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI berkunjung ke Vatikan dalam rangka membahas rencana restorasi replika relief Candi Borobudur yang tersimpan di Museum Etnologi Vatikan.
d. Pada tanggal 14 Juni 2011 telah diselenggarakan konser paduan suara *"The Living Spirit of Catholic in Indonesia"* yang menghadirkan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Data WNI pada KBRI Tahkta Suci Vatikan sampai dengan November2011 tercatat sekitar 1350orang WNI yang terdiri dari staf KBRI dan keluarga, Rohaniwan dan Rohaniwati, dan Ibu Rumah Tangga yang menikah dengan warga setempat. Secara umum tidak terdapat adanya permasalahan yang menyangkut WNI di wilayah akreditasi.

Foto 124.Menlu RI Menerima *Farewell Call* Dubes Vatikan, Mgr. Leopoldo Girreli di Jakarta, 10 Februari 2011

Yunani

Hubungan bilateral kedua negara selama ini berlangsung dengan baik dan dinamis. Yunani mendukung integritas wilayah, proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia.

Bidang Politik

Yunani memandang Indonesia sebagai pilar stabilitas di Asia Tenggara dan sebuah *strategic partner* within ASEAN. Kedua negara juga telah memberikan dukungan secara timbal balik terhadap kepentingan dan posisi satu sama lain di berbagai fora internasional, antara lain saling dukung keanggotaan pada *Human Rights Council* (HRC), saling dukung bagi pencalonan Indonesia dalam Dewan IMO katagori C (2011-2013) dan Yunani dalam *World Herritage Committee of UNESCO* (2011-2015), dukungan Yunani pada Demarche bersama Indonesia-Swiss terkait *Basel Convention*, serta saling dukung pada keanggotaan DK PBB.

Dengan terjadinya krisis hutang yang berkepanjangan di Yunani, diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Eropa yang kemungkinan akan berdampak pada hubungan ekonomi Indonesia dengan Eropa.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Yunani pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 138,821 juta (Ekspor USD 101,735 juta dan Impor sebesar USD

37,085 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 64,65 juta (2011).

Dalam upaya mempromosikan budaya Indonesia dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan Yunani ke Indonesia, telah diselenggarakan beberapa kegiatan promosi, antara lain: Festival Teater Asia, Thessaloniki, 28 Januari - 6 Februari 2011; *Batik and Angklung Diplomacy*, Athena, 5-7 April 2011; Peragaan Batik dan Konser Angklung Interaktif pada *Summer Summer Holidays* 2011, Helexpo Athena, 20-22 Mei 2011, serta Promosi Indonesia pada the *57th Kifissias Flower Festival*, Athena, 28 April-15 Mei 2011, dan *Special Olympics Festival*, Athena, 26 Juni - 3 Juli 2011.

Pada tahun ajaran 2011/2012, terdapat 7 (tujuh) orang peserta asal Yunani yang memperoleh beasiswa non-gelar Dharmasiswa untuk mengikuti kursus bahasa, seni dan kerajinan Indonesia di UNS Solo, Unud Bali, Universitas Sanata Darma Yogyakarta dan STIB LIA Jakarta.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Yunani sampai dengan bulan November2011 tercatat sebanyak 1.080 jiwa (753 jiwa diantaranya bekerja sebagai PLRT yang sebagian besar adalah wanita yang masuk ke Yunani dengan menggunakan visa turis untuk kemudian bekerja sebagai PLRT).

Foto 125.Menlu RI dan Menlu Yunani di sela-sela Sidang SMU ke-66 PBB, New York, 23 September 2011

Selama kurun waktu Januari-Juni 2011 beberapa permasalahan yang telah diselesaikan oleh KBRI Athena antara lain: memberikan bantuan pendampingan terhadap WNI yang terkena kasus *overstay* dan ditahan di penjara imigrasi Petroralli (2 orang); pemulangan jenazah WNI karena sakit (2 orang), karena kecelakaan kerja (1 orang); memfasilitasi pemulangan WNI yang menderita sakit tumor otak (1 orang); menyelesaikan perselisihan 18 ABK dengan perusahaan pelayaran setempat; melakukan kunjungan sosial secara rutin kepada 2 WNI yang tengah menjalani hukuman di penjara wanita, kota Thiba (pada tanggal 16 Juni 2011, satu orang telah dibebaskan).

III.3.2.4 Kawasan Eropa Tengah dan Timur

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur selama tahun 2011 terus mengalami peningkatan dan penguatan. Pada 9 – 12 Oktober 2011 Presiden RI telah menerima kunjungan kenegaraan Presiden Slovakia, H.E. Mr. Ivan Gasparovich. Dalam kunjungan telah disepakati sembilan bidang kerja sama prioritas antar pemerintah serta lima proyek swasta bernilai sekitar USD 1 milyar. Selain itu Presiden RI juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, H.E. Mr. Dmitry Medvedev disela-sela *19thAPEC Economic Leaders' Meeting* di Honolulu, Amerika Serikat, 13 November 2011. Dalam pertemuan antara lain dibahas upaya peningkatan hubungan bilateral RI – Rusia di berbagai bidang.

Di sela-sela Konferensi Gerakan Non-Blok di Bali, 23-27 Mei 2011, Menteri Luar Negeri RI melakukan pertemuan bilateral masing-masing dengan Menteri Luar Negeri Serbia dan Menteri Luar Negeri Bosnia dan Herzegovina, membahas upaya-upaya meningkatkan kerja sama bilateral. Selain itu, pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Amerika dan Eropa juga melakukan pertemuan dengan mitranya, Wakil Menteri Luar Negeri Belarus, Ketua Delegasi Armenia, Duta Besar Armenia di India merangkap Indonesia, serta dengan Deputy Secretary of State Hongaria.

Di sela-sela ASEAN Ministerial Meeting di Bali, 22 Juli 2011 di Bali, Menlu RI dan Menlu Federasi Rusia H.E. Mr. Sergey Lavrov telah mengadakan pertemuan dalam rangka peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara. Pada pertemuan *East Asia Summit* di Bali, 18-19

November 2011, Menlu Rusia hadir mewakili Presiden Rusia.

Tercatat pula pertemuan Menlu RI dengan Menlu Belarus, H.E. Mr. Sergey Martynov, sebanyak dua kali pada 2011, yakni di sela-sela *Additional Commemorative Meeting NAM* di Beograd (September 2011) serta di sela-sela SMU PBB di New York (September 2011). Menlu RI juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Bosnia Herzegovina di sela-sela Bali Democracy Forum (BDF), 9 Desember 2011.

Pada tahun 2011 tercatat sejumlah perjanjian penting bilateral yang ditandatangani, antara lain dengan Rusia (*Air Service Agreement); dengan Serbia (*Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi, Persetujuan Kerja sama Ekonomi, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dan MoU Kerja sama di bidang Pertahanan); dengan Slovakia (MoU Kerja sama Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Kepemudaan; MoU Kerja sama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, MoU di bidang Radio, dan MoU antara BKPM dan SARIO); dan dengan Belarus (Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas). Selain itu sejumlah perjanjian kerja sama juga dinyatakan berlaku, antara lain: dengan Rusia (Perjanjian Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai); dan dengan Ukraina (Kerja sama di bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai).

Hingga tahun 2011, Indonesia telah mengesahkan persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dengan Serbia, Rusia, Slovakia dan Bulgaria. Sedangkan persetujuan bebas visa dengan Belarus, Bosnia dan Herzegovina masih dalam proses pengesahan. Sementara itu Pemerintah RI juga sedang melakukan pembahasan pembentukan persetujuan bebas visa dengan Albania, Republik Ceko, Hongaria dan Polandia.

Di bidang Pendidikan, Pemerintah RI menjadikan pemberian beasiswa Dharmasiswa sebagai salah satu *tools* penting dalam upaya meningkatkan *people-to-people contact*, yang diyakini akan memberikan efek positif terhadap peningkatan kerja sama ekonomi di masa mendatang. Hingga tahun 2011, tercatat 590alumnus beasiswa Dharmasiswa dari negara kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Albania

Antara ndonesia dan Albania terjalin hubungan bilateral yang baik yang berpotensi untuk terus berkembang. Kerja sama kedua negara di fora internasional juga terjalin dengan adanya saling dukung dalam pencalonan masing-masing pada keanggotaan dalam organisasi internasional. Hubungan bilateral RI-Albania ditangani melalui KBRI Sofia.

Salah satu catatan penting dalam hubungan bilateral RI – Albania pada tahun 2011 adalah kunjungan delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Albania pada 24 – 26 Juli 2011. Dengan masih rendahnya intensitas kunjungan antar pejabat kedua negara, kunjungan GKSB DPR RI ke Albania memiliki nilai penting dalam pengembangan kerja sama bilateral di masa mendatang.

Total perdagangan RI-Albania pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 3,267 juta (Ekspor USD 2,957 juta dan Impor sebesar USD 331,6 ribu) atau meningkat 0,7% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 3,24 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 2,6 juta(2011).

Armenia

Hubungan diplomatik RI dengan Armenia yang telah terjalin sejak 1992, sampai saat iniditangani oleh KBRI Kyiv. Indonesia dan Armenia juga bekerja samadi berbagai forum internasional, seperti di PBB.

Pada KTM GNB di Bali, 23-27 Mei 2011, Dirjen Amerika dan Eropa melakukan pertemuan dengan Ketua Delegasi Armenia, yaitu Dubes Armenia untuk India merangkap Indonesia, guna membahas upaya peningkatan hubungan kedua negara,

Total perdagangan RI-Armenia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 5,017 juta (Ekspor USD 5,017 juta) atau meningkat 431 % dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 943 ribu), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 5,017 juta (2011).

Bosnia-Herzegovina

Pembukaan perwakilan diplomatik RI di Sarajevo pada Desember 2010 telah meningkatkan kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina yang telah terjalin sejak tahun 1992.

Bidang Politik

Menteri Luar Negeri RI telah bertemu dengan Menlu Bosnia Herzegovina di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok ke-16 di Bali, 27 Mei 2011. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu menandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas. Kedua Menlu kembali bertemu di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), 9 Desember 2011.

Pada 23-29 Juli 2011, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan ke Parlemen Bosnia-Herzegovina dalam rangka mengajak negara tersebut untuk kembali aktif dalam *Parliamentary Union of the OIC Member States.*

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Bosnia Herzegovina pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 414,4 ribu (Ekspor USD 296 ribu dan Impor sebesar USD 118 ribu) atau meningkat 170% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 153 ribu), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 177 ribu (2011).

Foto 126. Menlu RI dan Menlu Bosnis Hezegovina di sela-sela*Bali Democracy Forum IV*, Bali, 9 Desember 2011

Sebagai salah satu upaya promosi ekonomi, KBRI Sarajevo telah berpartisipasi dalam pameran *furniture* berskala internasional, “Interio 2011”, di Sarajevo.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah WNI di Bosnia Herzegovina hingga November 2011 mencapai kurang lebih 25 jiwa.

Bulgaria

Sepanjang tahun 2011, hubungan bilateral RI dengan Bulgaria tetap berjalan baik dan stabil. Bulgaria menilai Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar di dunia, penting dan berperan aktif serta konstruktif di tingkat regional dan internasional, serta memiliki potensi besar baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Bidang Politik

Intensitas hubungan dan kerja sama juga mencakup hubungan antar parlemen. Dalam kunjungan Komisi VI DPR-RI ke Bulgaria pada 9-13 Mei 2011, delegasi Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan Parlemen Bulgaria untuk bertukar pandangan mengenai pengaturan dan pengelolaan sistem resi gudang di kedua negara dalam rangka persiapan pembuatan perundangan terkait.

Foto 127.Pertunjukan Tari Indonesia pada Hari Jadi Kota Sofia, Sofia, 24 Juli 2011

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Bulgaria pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 53,09

juta (Ekspor USD 32,04 juta dan Impor sebesar USD 21,04 juta) atau meningkat 24% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 42,78 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 10,99 juta (2011).

Sebagai bagian dari upaya promosi potensi ekonomi Indonesia, KBRI Sofia telah melakukan presentasi ekonomi Indonesia di beberapa kota di Bulgaria, seperti Vratza (28 Maret), Vidin (29 Maret), Veliko Turnovo (12 April), Targovishte (21 Juni) dan menyelenggarakan *IndonesianCulinary Day*, di Nesebar, Bulgaria, 3 Juni 2011.

Dalam bidang sosial budaya, telah terjalin kerja sama antara Universitas Indonesia dengan Sofia University. Pada 27 Januari 2011, rektor dari kedua universitas menandatangani *MoU on Academic Exchange* antara kedua universitas.

Bidang Kekonsuleran

Dengan telah berlakunya Persetujuan Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas sejak tahun 2010, telah memudahkan saling kunjung antar pejabat pemerintah termasuk parlemen kedua negara.

Jumlah Warga negara Indonesia di Bulgaria hingga November 2011 mencapai kurang lebih 60 jiwa.

Belarus

Pada tahun 2011, hubungan dan kerja sama RI dengan Belarus semakin meningkat. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya pertemuan pejabat tinggi kedua negara, meningkatnya volume perdagangan bilateral serta dibukanya Kedutaan Besar Belarus di Jakarta, Agustus 2011 (merangkap Malaysia, Singapura, Filipina dan Australia). Sementara itu, kepentingan Indonesia terhadap Belarus ditangani melalui KBRI Moskow.

Foto 128. Menlu RI dan Menlu Belarus di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 27 September 2011

Pada tahun ini, Menlu RI telah melakukan dua kali pertemuan bilateral dengan Menlu Belarus, yaitu di Beograd (September) dan New York (September). Pada pertemuan tersebut antara lain dibahas rencana kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia pada semester pertama tahun 2012.

Pada 14 – 16 September 2011 telah dilaksanakan Sidang Ketiga Komisi Bersama (SKB III) bidang Perdagangan, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Kerja sama Teknik Hasil pertemuan tersebut antara lain penandatanganan Persetujuan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI – Belarus serta jaminan pasokan potasium yang sangat penting bagi kelangsungan industri petrokimia Indonesia.

Total perdagangan RI-Belarus pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 120 juta (Ekspor USD 2,2 juta dan Impor sebesar USD 118 juta) atau meningkat 0,65% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 119 juta).

Ceko

Ceko merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur karena perannya yang cukup penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa Tengah khususnya dan Eropa umumnya setelah menjadi anggota Uni Eropa dan NATO.

Sebaliknya bagi Ceko, Indonesia yang letaknya sangat strategis dengan jumlah penduduk yang besar, memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya, serta merupakan aktor penting di arena global yang memiliki peran aktif pada kerja sama-kerja sama regional seperti ASEAN, APEC dan ASEM, serta pada forum-forum kerja sama di tingkat global.

Bidang Politik

Hubungan dan kerja sama politik RI dengan Ceko berlangsung stabil dan harmonis. Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ceko pada 8 – 12 Mei 2011 guna menjalin hubungan antar parlemen kedua negara dan membahas dukungan yang dapat diberikan dalam memajukan kerja sama bilateral. Selain bertemu dengan mitranya di Majelis Rendah Parlemen Ceko, delegasi juga melakukan pertemuan dengan Senator Ceko urusan Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan sekaligus Walikota Hluboka Nad Vlatavou, serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Ceko.

Sebagai upaya mempererat hubungan antara kedua negara, Presiden Republik Ceko dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 2012.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Ceko merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Nilai perdagangan kedua negara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dan masuk dalam lima besar mitra dagang utama RI di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Total perdagangan RI-Ceko pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 103,95 juta (Ekspor USD 49,74 juta dan Impor sebesar USD 54,21 juta). Pada periode yang sama tahun 2010 total perdagangan kedua negara mencapai USD 119 juta.

Upaya untuk meningkatkan nilai perdagangan, terutama ekspor Indonesia terus difasilitasi oleh KBRI di Praha. Pada 22 Mei 2011, Duta Besar RI – Praha membuka secara resmi pemasaran sepeda produk Indonesia "Polygon" dalam rangkaian kegiatan turnamen tahunan *Ceko Downhill Bike Cup* 2011 di *Moninec Resort*.

Selanjutnya, pada 2 – 5 Oktober 2011, KBRI Praha juga memfasilitasi kunjungan delegasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur serta menjajaki kerja sama pengembangan ekspor hasil perikanan dan promosi ikan hias dengan importir seafood dan ikan hias di Ceko. Hasil penting dari kunjungan tersebut adalah rencana Kementerian Perikanan Ceko dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membentuk kerja sama di bidang perikanan.

Sebagai upaya promosi ekonomi dan budaya Indonesia, KBRI Praha telah mengadakan pertunjukan kain tenun Bali pada September 2011. Selain itu, pada tahun 2011, Indonesia memberikan beasiswa Dharmasiswa kepada 16 mahasiswa Ceko untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di universitas-universitas di Indonesia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Ceko hingga November 2011 mencapai kurang lebih 213 jiwa.

Georgia

Hubungan RI dengan Georgia ditangani oleh KBRI Kyiv dan sejauh ini berjalan baik. Indonesia dengan Georgia juga bekerja sama di berbagai forum internasional, termasuk saling dukung atas pencalonan masing-masing di badan-badan internasional.

Foto 129.Menlu RI dan Menlu Georgia di sela-sela SMU ke-66 PBB, New York, 20 September 2011.

Di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB, September 2011, Menlu RI telah bertemu dengan Menlu Georgia, H.E Mr. Grigol Vashadze. Dalam kesempatan tersebut telah

dibahas berbagai perkembangan kerja sama bilateral dan multilateral serta keinginan Georgia untuk membuka Kedutaan Besar di Jakarta pada tahun 2012.

Totalperdagangan RI-Georgia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 23,6 juta (Ekspor USD 20,4 juta dan Impor sebesar USD 3,2 juta) atau meningkat 9,25% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 21,64 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 17,21 juta (2011).

Indonesia dan Georgia juga telah bekerja sama saling dukung untuk pencalonan di organisasi-organisasi internasional. Hal ini menunjukan komitmen Georgia untuk mempererat hubungan bilateralnya dengan Indonesia.

Hongaria

Hongaria selama ini telah menjadi negara yang memiliki hubungan dekat dan konstruktif dengan Indonesia.

Bidang Politik

Hubungan bilateral pada tahun 2011 mempunyai bobot tersendirimengingat Indonesia mengetuai ASEAN dan Hongaria menjabat Presidensi Uni Eropa untuk periode paruh pertama 2011.

Hubungan di bidang politik ditandai dengan kunjungan Ketua Parlemen Hongaria ke Indonesia, Februari 2011 dan kunjungan Menlu RI ke Hongaria pada Juni 2011 dalam rangka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Asia Europe Meeting (ASEM) ke-10 di Gődőllő, Hongaria.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pada 8 Juni 2011 diadakan Sidang Komisi Bersama (SKB) III Indonesia-Hongaria di Budapest. Pada SKB tersebut, disepakati sektor energi dan perdagangan menjadi prioritas utama. Kedua pihak menegaskan pentingnya teknologi energi yang ramah lingkungan dan sepakat untuk mengembangkan kerja sama energi terbarukan. Untuk itu, Indonesia mengundang investor Hongaria berpartisipasi dalam *open tender* yang terbuka bagi investasi asing, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW.

Total perdagangan RI-Hongaria pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 256,92 juta (Ekspor USD 65,09 juta dan Impor sebesar USD 191,88 juta) atau meningkat 78,56% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 143,91).

Di bidang pariwisata, Indonesia mengundang investor Hongaria untuk mengembangkan industri pariwisata khususnya di daerah tujuan wisata seperti Danau Toba, Danau Maninjau, Raja Ampat dan Muara Jambi.
Pemerintah RI terus aktif mempromosikan khazanah budaya Indonesia kepada masyarakat Hongaria, diantaranya dengan menggelar acara "Smiling Aceh", yaitu pertunjukan tari dan musik Aceh pada 18-22 Juni 2011 yang merupakan wujud ungkapan terimakasih masyarakat Aceh terhadap masyarakat dan pemerintah Hongaria yang telah memberi bantuan kepada korban bencana tsunami Aceh tahun 2004.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Hongaria hingga November 2011 mencapai kurang lebih 162 jiwa.

Foto 130Menlu RI dan Menlu Hongaria di sela-sela KTM ASEN, Hongaria, 9 Juni 2011.

Kroasia

Indonesia membuka perwakilan RI di Zagreb pada akhir tahun 2010.

Bidang Politik

Indonesia berusaha mengoptimalkan potensi kerja sama di fora internasional terkait saling dukung dan pencalonan dalam keanggotaan di organisasi-organisasi internasional. KBRI Zagreb juga memfasilitasi delegasi DPR RI menghadiri *"The 7th Global Forum Parliamentarians on Habitat"* di Zadar, 17 – 20 Mei 2011. Dalam sidang tersebut, Indonesia terpilih sebagai *alternate*sekretaris dalam kepengurusan Dewan Regional Asia.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI- Kroasia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 48,41 juta (Ekspor USD 45,72 juta dan Impor sebesar USD 2,69 juta) atau meningkat 136,56% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 20,46 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 43,02 juta (2011).

Dalam bidang sosial budaya, KBRI Zagreb telah menyelenggarakan "*Indonesian Cultural Night*" pada 27 Juli 2011 dengan menampilkan tari dan musik daerah Indonesia.

Bidang Kekonsuleran

Jumlah Warga Negara Indonesia di Kroasia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 38 jiwa.

Makedonia

Hubungan bilateral antara Indonesia-Makedonia berlangsung baik sejak Indonesia mengakui Makedonia pada 1993. Kedua negara selama ini telah aktif untuk saling memberikan dukungan pada berbagai forum internasional. Hubungan bilateral RI-Makedonia ditangani oleh KBRI Budapest.

Total perdagangan RI-Makedonia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 2,70 juta (Ekspor USD 2,66 juta dan Impor sebesar USD 38 ribu). Pada periode yang sama pada tahun 2010 total perdagangan USD 4,42 juta.

Moldova

Meskipun masih terbatas, selama ini hubungan antara RI dan Moldova terjalin dengan baik dan tidak terdapat perbedaan kepentingan yang dapat mengganggu hubungan antara kedua negara. Hubungan bilateral RI-Moldova ditangani oleh KBRI Bucharest.

Dalam rangka lebih mengenalkan Indonesia, KBRI Bucharest pada tanggal 14 April 2011 bersama dengan Rektor *Universitatea Libera Internationale din Moldova* (ULIM) telah meresmikan *"Aula Indonezia"* di universitas tersebut.

Total perdagangan RI-Moldova pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 312,4 ribu (Ekspor USD 154,2 ribu dan Impor sebesar USD 158,2 ribu) atau meningkat 4,05% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 297,7 ribu).

Foto 131.Pembukaan "Aula Indonezia" di Universitatea Libera Internationala di Moldova , 14 April 2011

Montenegro

Indonesia mengakui kemerdekaan Montenegro dari Serbia pada 24 Juli 2006. Hubungan kedua negara selanjutnya memasuki babak baru dengan diresmikannya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara melalui pernyataan Komunike Bersama Menlu RI dan Menlu Montenegro di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, 21 September 2011. Menlu RI juga telah mengundang Menlu Montenegro untuk berkunjung ke Indonesia.

Foto 132.Menlu RI dan Menlu Montenegro pada Peresmian Pembukaan Hubungan Diplomatik Kedua Negara, New York, 21 September 2011

dilakukan melalui KBRI Beograd.

Polandia

Polandia memainkan peran yang cukup pentingdi kawasan Eropa Tengah dan Timurkarena posisinya sebagai anggota NATO dan Uni Eropa (UE).

Bidang Politik

Padaparuh keduatahun 2011, Polandia menjabat sebagaiPresidensi Uni Eropa, dimana pada tahun tersebut Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN. Pada 18 – 19 Oktober 2011, Polandia menjadi tuan rumah pertemuan pejabat-pejabat tinggi ASEAN dan Uni Eropa (*ASEAN – UE Senior Officials Meeting*). Hubungan politik RI – Polandia tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga dalam konteks hubungan antar kawasan.

Aktivitas kerja sama RI - Polandia juga mencakup bidang pertahanan dan keamanan, termasuk pengadaan alutsista. Kerja sama pertahanan kedepan diarahkan pada kerja sama yang lebih strategis antara lain mencakup alih teknologi dan produksi bersama.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Polandia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 295,92 juta (Ekspor USD 232, 25 juta dan Impor sebesar USD 63,66 juta) atau meningkat 18,14% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 250,49 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 168,58 juta (2011).

Selama periode Januari – Agustus 2011, nilai perdagangan mencapai USD 295,92 juta dengan surplus USD 168,59 juta di pihak Indonesia.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, sepanjang tahun 2011 antara lain:

- Penyelenggaraan *Indonesian – Polish Business Meeting* di Warsawa pada Mei 2011 yang menghasilkan penandatanganan kerja samabisnis di bidang pembangkit listrik tenaga angin dan *remote sensing* untuk menilai kandungan minyak dan gas;
- Penyelenggaraan *Indonesian – Polish Business Meeting* di Indonesia pada 24 – 29 September 2011 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Ekonomi Polandia serta 12 perusahaan Polandia. Hasil yang cukup signifikan adalah penandatanganan *Letter of Intent* Kerja Sama di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Kementerian Ekonomi Polandia pada 26 September 2011;
- Penyelenggaraan *Business Mission* pengusaha Polandia ke Indonesia pada 15 – 24 Oktober 2011 yang diikuti oleh 9 (sembilan) pengusaha Polandia yang bergerak di bidang pertambangan batubara, palm kernel shell,

produk aksesori spa, makanan dan minuman olahan, serta pendidikan.

Di bidang sosial budaya, Indonesia dan Polandia proaktif mengupayakan *interfaith dialogue* dalam rangka membangun kesepahaman dan pengertian lintas agama dan budaya. Pada tanggal 5 Oktober 2011 KBRI Warsawa menyelenggarakan Dialog Lintas Agama dan Budaya RI-Polandia di Krakow, yang dihadiri tokoh agama dari Indonesia dan Polandia.

Dalam meningkatkan hubungan budaya kedua negara, pada 15 Oktober 2011 telah terbentuk Asosiasi Persahabatan Indonesia – Polandia sebagai wadah untuk menaungi kelompok-kelompok pencinta budaya Indonesia, sekaligus sarana efektif untuk mempromosikan citra dan budaya Indonesia kepada masyarakat Polandia.

Program beasiswa Dharmasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia mendapatkan sambutan yang cukup baik di kalangan mahasiswa/pelajar Polandia. Untuk tahun ajaran 2011/2012, Indonesia memberikan beasiswa Dharmasiswa untuk 89 orang.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Polandia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 165 jiwa.

Romania

Hubungan kerja sama Indonesia dan Romania di bidang politik terjalin dengan erat, yang ditandai pengabulan permohonan Romania bagi ekstradisi Nicolae Popa, warga negara Romania, yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Romania. Ekstradisi Nicolae Popa dilaksanakan pada tanggal 21 April 2011.

Indonesia dan Romania juga saling memberikan dukungan atas pencalonan untuk keanggotaan di organisasi-organisasi internasional.

Bidang Politik

Pada tanggal 5 Juli 2011, telah terlaksana Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI - Romania yang ke-4 di Bucharest. Forum ini telah dimanfaatkan kedua pihak untuk meningkatkan hubungan dan bertukar pikiran mengenai isu bilateral maupun multilateral.

Selain itu, tercatat kunjungan dari Indonesia ke Rumania, yakni Ketua Dewan Pers Nasional, anggota DPD RI dan pejabat Mahkamah Agung dalam rangka kerja sama dengan *counterparts* masing-masing.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam FKB ke-4 tersebut, Indonesia dan Romania juga membahas upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Romania setelah berlangsungnya FKB.

Foto 133.Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI - Romania yang ke-4 di Bucharest, 5 Juli 2011

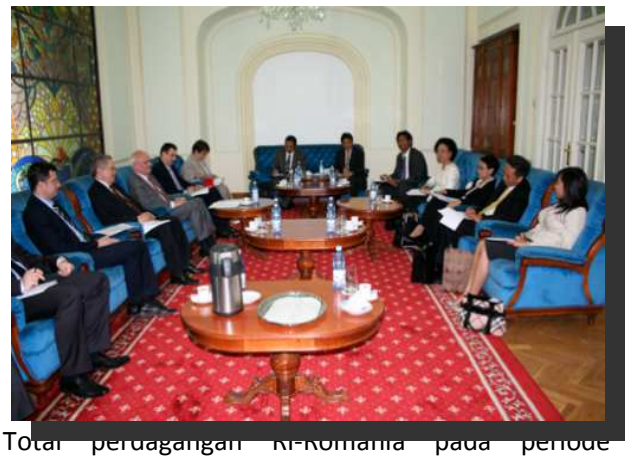

Total perdagangan RI-Romania pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 105,68 juta (Ekspor USD 92,84 juta dan impor sebesar USD 12,83 juta) atau meningkat 60,02% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 66,04 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 80,01 juta (2011).

Sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan Indonesia, pada 27 Mei 2011, KBRI Bucharest telah menyelenggarakan Fashion Show dan Exhibition dengan tema: *"Batik: Cultural Heritage and Fashion Inspiration."*

Di samping itu, pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 12 mahasiswa diberikan beasiswa Dharmasiswa untuk belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Romania hingga November 2011 mencapai kurang lebih 95 jiwa.

Serbia

RI dan Serbia terus memelihara dan meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin sejak eraYugoslavia.

Bidang Politik

Sepanjang tahun 2011, Menlu RI dan Menlu Serbia, H.E. Mr. Vuk Jeremic, telah tiga kali mengadakan pertemuan, yakni di Jakarta dalam rangka kunjungan bilateral (26-28 Februari 2011); di Bali dalam rangka menghadiri KTM GNB ke-16 (25-27 Mei 2011), serta di Beograd dalam rangka perayaan 50 tahun GNB (5 September 2011). Pada pertemuan tanggal 26-28 Februari 2011 ditandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Serbia. Sedangkan dalam pertemuan bilateral di Bali, Mei 2011, kedua Menlu sepakat untuk menyelesaikan dokumen-dokumen kerja sama yang masih dalam proses perundingan.

Pada pertemuan di Beograd, ditandatangani Perserujuan Promosi dan Perlindungan Investasi dan Persetujuan Kerja Sama Ekonomi antara RI dan Serbia. Selama kunjungan di Beograd, Menlu RI juga bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Presiden Serbia.

Di bidang pertahanan, dalam kunjungan Menteri Pertahanan Serbia ke Indonesia, pada tanggal 13 September 2011, telah ditandatangani MoU Kerja samadi bidang Pertahanan.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Total perdagangan RI-Serbia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 766,9 juta (Ekspor USD 765,7 juta dan impor sebesar USD 1,2 juta) atau meningkat 10,5% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 694 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 764,5 juta (2011).

Di bidang sosial budaya, pada 7 – 9 April 2011 telah diselenggarakan *Indonesia – Serbia BilateralInterfaith Dialogue* di Beograd. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, telah ditandatangani MoU kerja sama antar perguruan tinggi kedua negara, yakni UIN Jakarta dengan Universitas Islam Serbia serta UIN Jakarta dengan Universitas Beograd.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Serbia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 87 jiwa.

Foto 134.Menlu RI dan Menlu Serbia memberikan Pernyataan Pers Bersama, Jakarta, 28 Februari 2011

Slovakia

Hubungan bilateral RI dan Slovakia berjalan cukup dinamis sepanjang tahun 2011 dengan titik berat lebih pada kerja sama di bidang ekonomi. Posisi Slovakia di mata Indonesia semakin penting ditandai kerja sama yang erat tidak hanya pada tataran bilateral, namun juga pada tataran multilateral. Slovakia mengakui Indonesia sebagai negara *like minded* dalam berbagai isu politik internasional.

Bidang Politik

Guna mempererat hubungan bilateral, delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI melakukan kunjungan ke Slovakia pada 6 – 12 Juni 2011. Fokus kunjungan delegasi DPR RI ke Slovakia adalah pengembangan kerja sama di bidang energi, olahraga dan kepemudaan. Hasil penting dari kunjungan tersebut adalah tawaran pelatihan tenaga ahli nuklir di Slovakia, *licensing* dan alih

teknologi dalam industri alutsista, serta komitmen Slovakia untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hubungan dan kerja sama bilateral dengan Slovakia mendapat momentum penting melalui kunjungan kenegaraan Presiden Slovakia Ivan Gasparovic ke Indonesia pada 9 -12 Oktober 2011. Salah satu hasil penting dari kunjungan kenegaraan tersebut adalah penetapan prioritas 9 (sembilan) bidang kerja sama bilateral untuk dikembangkan di masa mendatang, meliputi bidang pertanian dan ketahanan pangan, energi terbarukan (pembangkit listrik tenaga panas bumi dan tenaga air), perdagangan dan investasi, perbankan, media massa dan penyiaran, pendidikan tinggi, infrastruktur dan manufaktur, pariwisata, dan kerja sama sosial budaya.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Capaian konkrit kerja sama bilateral di bidang ekonomi, khususnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan (*food security*), adalah penandatanganan MoU kerja sama uji coba penanaman gandum antara Universitas Andalas dan OSIVO di Bratislava pada 31 Maret 2011, yang kemudian didukung dengan kerja sama yang lebih luas melalui penandatanganan MoU Kerja Sama Pendidikan di bidang Penanaman Gandum antara Universitas Andalas dan Universitas Pertanian Nitra (SPU) pada 11 Oktober 2011, yang juga meliputi penelitian, pelatihan dan pertukaran ahli.

Forum Bisnis Indonesia – Slovakia 11 Oktober 2011, yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Slovakia ke Indonesia, menghasilkan penandatanganan 3 (tiga) dokumen kerja sama antar lembaga pemerintah/semi-pemerintah kedua negara, yaitu: MoU Kerja Sama antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Otoritas Pengatur Tenaga Nuklir Slovakia (UIJ), MoU Kerja Sama antara RRI dan Radio Slovak, dan MoU Kerja Sama antara BKPM dan SARIO (*Slovak Investment and Trade Development Agency*).

Foto 135.Pernyataan Pers Bersama Presiden RI dan Presiden Slovakia dalam kunjungan kenegaraan Presiden Slovakia ke Jakarta, 9-11 Oktober 2011

Selain itu, dalam forum bisnis tersebut sektor swasta kedua negara telah menandatangani sebelas proyek kerja sama di bidang pembangunan pembangkit listrik, pertambangan batubara, pabrik semen, pabrik ban, serta pembelian minyak sawit mentah dengan total nilai lebih dari USD 1 milyar.

Total perdagangan RI-Slovakia pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 38,42 juta (ekspor USD 31,81 juta dan impor sebesar USD 6,61 juta), dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 25,2 juta (2011). Pada periode yang sama tahun 2010, total perdagangan kedua negara mencapai USD 56,82 juta.

Di bidang sosial budaya, pada Mei 2011 Pemerintah RI telah mengesahkan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Kepemudaaan antara RI – Slovakia yang ditandatangani pada Maret 2010.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, Indonesia telah berpatisipasi pada *the 13th Annual Milset Expo-Sciences International 2011* (ESI 2011), Bratislava, 19-22 Juli 2011, yang membuahkan hasil kemenangan tiga tim pelajar Indonesia di bidang Matematika, Kimia, dan Lingkungan Hidup. ESI merupakan kompetisi yang telah terlaksana sejak tahun 1987, dan setiap dua

tahun sekali menjaring para peneliti muda yang memiliki keunggulan analisa dan kekreatifan dalam menciptakan proyek yang berkontribusi besar pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global saat ini.

Indonesia juga memberikan beasiswa Dharmasiswa kepada mahasiswa/pelajar Slovakia untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di berbagai universitas di Indonesia. Hingga tahun 2011, mahasiswa/pelajar Slovakia penerima beasiswa Dharmasiswa berjumlah 95 orang.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Slovakia hingga November 2011 mencapai kurang lebih 87 jiwa.

Ukraina

Hubungan bilateral RI – Ukraina ditandai dengan telah berlakunya Persetujuan di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai pada tanggal 15 Maret 2011. Sebagai implementasi dari Persetujuan tersebut, delegasi LAPAN telah melakukan kunjungan ke Ukraina pada tanggal 10 Juli 2011 untuk mempelajari perkembangan teknologi antariksa di Ukraina.

Total perdagangan RI-Ukraina pada periode Januari-Agustus tahun 2011 mencapai USD 882,88 juta (ekspor USD 385,31 juta dan impor sebesar USD 513,54 juta), atau meningkat 36,34% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 659 juta).

Delegasi Misi Dagang Ukraina yang terdiri dari delegasi Provinsi Zhytomyr dan pengusaha telah mengadakan kunjungan ke Indonesia pada 18 - 20 Oktober 2011. Selama di Indonesia, Delegasi Misi Dagang Ukraina menghadiri pameran Trade Expo Indonesia, mengadakan pertemuan dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kadinda Jabar, dan KADIN Indonesia Komite Rusia dan CIS. Hasil kunjungan antara lain ditandatanganinya *Intention Protocol*kerja sama bisnis antara pengusaha Ukraina dan KADIN Indonesia, khususnya rencana sewa lahan seluas 500 hektar dalam jangka waktu 99 tahun untuk penamanan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara delegasi Provinsi Zhytomyr mencapai kesepakatan dengan Provinsi Jawa Barat untuk menjajaki kerja sama Sister Province.

Dalam upaya promosi perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI), telah diselenggarakan Forum Bisnis Indonesia, *Indonesian Food Festival*dan Fashion Show kain tenun ikat dan songket Bali di Kyiv. Promosi makanan khas Indonesia serta tenun ikat dan songket Bali dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan *soft power diplomacy*.

Dalam upaya mempromosikan obyek wisata di Indonesia dan memfasilitasi kontak bisnis pelaku industri pariwisata di Ukraina, KBRI Kyiv telah berpartisipasi pada pameran "*the 18th International Travel Market"* pada tanggal 4-6 Oktober 2011 di Kyiv. Diharapkan dengan promosi dan kontak bisnis tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pebisnis Ukraina ke Indonesia.

Di bidang pendidikan,sebanyak 14 mahasiswa Ukraina mengikuti program Darmasiswa tahun 2011/2012, sementara dari Indonesia tercatat 8 mahasiswa Indonesia mengikuti program AIESEC di berbagai Perguruan Tinggi di Ukraina.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan

Jumlah Warga Negara Indonesia di Ukraina hingga November 2011 mencapai kurang lebih 56 jiwa

KERJA SAMA REGIONAL DAN ANTAR KAWASAN

Sasaran

Sasaran utama partisipasi Indonesia dalam berbagai organisasi dan kerja sama kawasan adalah:

a. Terpeliharanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan yang lebih luas;
b. Mengembangkan arsitektur kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya berdasarkan keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*);
c. Menunjang pembangunan ekonomi nasional;
d. Pengembangan nilai-nilai dan institusi bersama kawasan; serta
e. Mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu-isu transnasional dan global serta isu-isu khusus lain seperti perubahan iklim, energi, penanganan bencana, dan lain-lain.

Kebijakan kawasan yang diterapkan oleh Indonesia ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan menunjang kepentingan Indonesia di bidang keamanan dan pembangunan ekonomi. Kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia berada merupakan prioritas pokok kebijakan kawasan Indonesia dan dikembangkan melalui penguatan kerja sama regional ASEAN. Pada saat yang bersamaan, penguatan kerja sama ASEAN direfleksikan pula melalui pemantapan sentralitas ASEAN dalam perkembangan arsitektur kawasan.

Tema pada Keketuaan Indonesia untuk ASEAN adalah ASEAN *Community in a Global Community of Nations*. Kepemimpinan Indonesia diarahkan pada capaian implementasi Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas ASEAN yang komprehensif. Dengan demikian, tahun 2011 diharapkan dapat menjadi

salah satu tahapan yang signifikan bagi persiapan tinggal landas (*launch pad*) seluruh negara anggota

ASEAN guna mencapai suatu Komunitas ASEAN yang kokoh di tahun 2015.

Kawasan Asia Tenggara sendiri merupakan bagian dari kawasan yang lebih luas yang mencakup kawasan Asia Timur dan Selatan serta Asia Pasifik. Sebagai konsekuensinya, kawasan Asia Tenggara tidak dapat terlepas dari kepentingan kawasan lainnya dan sebaliknya kawasan Asia Tenggara pun memiliki kepentingan terhadap apa yang terjadi di kawasan sekitarnya.

Sebagai bagian dari kawasan Pasifik, Indonesia juga memperdalam kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik melalui *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD) dan *Pacific Islands Forum* (PIF).

Di kawasan Asia Pasifik yang lebih luas—yang telah berkembang menjadi kawasan ekonomi yang sangat dinamis dan menjadi salah satu motor utama perekonomian dunia—diplomasi dan kerja sama ekonomi negara-negara di Lingkar Pasifik dikembangkan melalui forum APEC.

Untuk menjembatani dialog dan kerja sama dengan organisasi-organisasi kawasan lainnya, Indonesia juga berpartisipasi dalam forum-forum antarkawasan seperti *Asia-Europe Meeting* (ASEM) dan *Forum for East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC).

Untuk meningkatkan solidaritas politik dan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya di antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, Indonesia terus melanjutkan kepemimpinannya mendorong kerja sama antara kedua kawasan tersebut melalui *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP).

Diplomasi Indonesia memberikan perhatian besar terhadap berbagai mekanisme kerja sama intra kawasan maupun antar kawasan. Sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik, kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Pasifik merupakan prioritas utama diplomasi kawasan Indonesia.

Dua elemen utama dalam kebijakan Indonesia menyangkut pengembangan arsitektur kawasan Asia Pasifik adalah:

a. Peran sentral ASEAN dimana Komunitas ASEAN yang sedang dibentuk harus menjadi inti dari arsitektur kawasan dimaksud;
b. Arsitektur kawasan dikembangkan berdasarkan konsep *dynamic equilibrium*;

Sejauh ini, ASEAN telah mengembangkan sejumlah mekanisme regional untuk *engagement* negara-negara non-ASEAN di kawasan Asia Pasifik. Mekanisme dimaksud adalah ASEAN+1 dengan mitra wicara, ASEAN+3 dengan negara-negara Asia

Timur Laut, *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS). Berbagai mekanisme ini merupakan *multi-pathways* menuju pembentukan arsitektur kawasan di Asia Pasifik.

Sepanjang tahun ini, Indonesia terus mengupayakan diterimanya pandangan Indonesia mengenai arsitektur kawasan di Asia Pasifik yang bersifat inklusif dan didasarkan pada keseimbangan dinamis di kawasan.

Konsep *dynamic equilibrium* yang dikembangkan Indonesia adalah suatu kondisi di kawasan Asia Pasifik yang ditandai oleh:

- Tidak adanya dominasi suatu kekuatan tertentu di kawasan;
- Pendekatan kerja sama dan persaingan konstruktif yang saling menguntungkan;
- Paradigma *win-win,* dan bukan *zero-sum game,* di mana kemajuan yang dicapai satu pihak merupakan peluang/kesempatan dan bukan ancaman bagi pihak lain; serta
- Paradigma yang menekankan penyelesaian damai terhadap konflik dan senantiasa mengedepankan diplomasi dan dialog daripada penggunaan kekuatan militer.

Penerapan konsep *dynamic equilibrium* antara lain dilakukan melalui proses pengembangan mekanisme kerja sama *East Asia Summit*, yaitu dengan mendorong diterimanya AS dan Rusia sebagai anggota baru EAS secara simultan.

Konsep Indonesia mengenai arsitektur kawasan tersebut di atas secara prinsip telah diterima oleh negara-negara anggota EAS lainnya dan, pada tahun 2011 di mana Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan tuan rumah EAS, secara resmi AS dan Rusia menjadi anggota EAS.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Keketuaan Indonesia di ASEAN diarahkan pada upaya menjadikan tahun 2011 sebagai tahapan yang signifikan bagi persiapan tinggal landas (*launch pad)*bagi seluruh negara anggota ASEAN guna mewujudkan Komunitas ASEAN di tahun 2015. Upaya perwujudan Komunitas ASEAN tersebut dilakukan dengan pendekatan atas tiga pilar Komunitas ASEAN, yakni politik-keamanan, ekonomi serta sosial dan budaya, melalui implementasi *Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015).*

Dalam periode Keketuaan ASEAN 2011, Indonesia telah menetapkan tiga prioritas sebagai berikut:

a. Memastikan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015
b. Memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan
c. Menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi "ASEAN pasca-2015", yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN *Community in a Global Community of Nations*).

KTT ke-18 ASEAN, Jakarta 7-8 Mei 2011

KTT pertama yang diadakan pada masa Keketuaan Indonesia ini diselenggarakan dengan pengaturan baru sehingga pembahasan dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, terfokus dan sesuai dengan *cluster* tiga prioritas Keketuaan Indonesia.

Pembahasan dalam KTT ke-18 ASEAN ini difokuskan pada sepuluh isu utama yang menjadi perhatian kawasan dan dunia, yaitu penyelesaian dan manajemen konflik, demokratisasi Myanmar, ketahanan pangan dan energi, konektivitas ASEAN, kerja sama sub-kawasan, partisipasi masyarakat ASEAN, penanganan bencana alam, arsitektur kawasan, KTT Asia Timur, dan aplikasi Timor-Leste sebagai anggota ASEAN.

Foto 136. Informal ASEAN Foreign Ministers' Meeting, Jakarta, 22 Februari 2011

Kesepuluh isu tersebut, beserta isu-isu lain yang disepakati atau dibahas dalam pertemuan, telah tertuang ke dalam empat dokumen hasil KTT terlampir sebagai berikut:

a. Pernyataan Ketua ASEAN (*Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit);*
b. Pernyataan bersama tentang Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa;
c. Pernyataan bersama Pembentukan Lembaga ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (*ASEANLeaders' Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*); dan
d. Pernyataan bersama untuk Meningkatkan Kerja Sama dalam Menghadapi Perdagangan Manusia di Asia Tenggara (*ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia*).

KTT ke-19 ASEAN, Bali, 17 November 2011

Pembahasan pada KTT ke-19 ASEAN ini difokuskan pada lima isu pokok utama yang telah ditekankan Presiden RI dalam pidato pembukaan yang mencakup: langkah-langkah konkrit guna memperkuat ketiga pilar Komunitas ASEAN; penguatan pertumbuhan ekonomi di kawasan; peran utama yang harus dimainkan dalam menataarsitektur kerja sama kawasan secara lebih efisien dan efektif; pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur; serta penguatan peran ASEAN secara global.

Foto 137. Presiden RI bersama Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN dan Sekjen ASEAN di KTT ke-18 ASEAN, Jakarta,7 Mei 2011

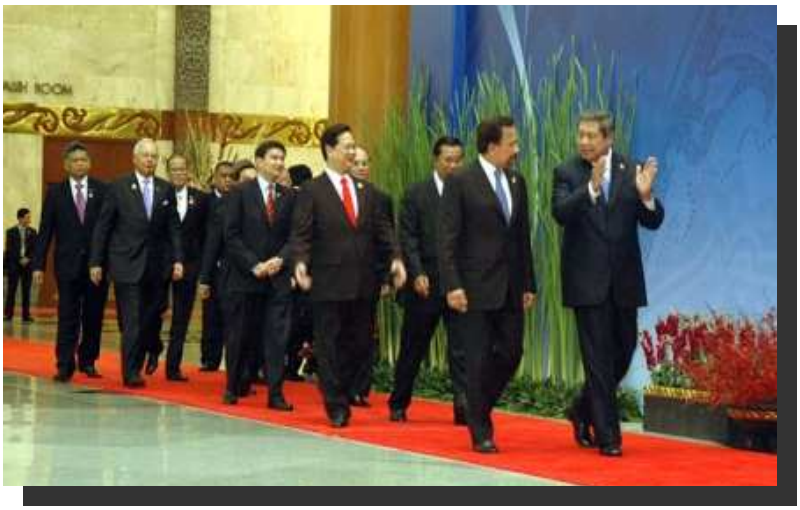

Para pemimpin ASEAN telah menyetujui dan menandatangani Deklarasi Bali mengenai Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-bangsa (*Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations*) atau *Bali Concord III*. Melalui Deklarasi ini, ASEAN menegaskan komitmennya untuk membangun suatu *platform* bersama untuk menangani permasalahan global di berbagai bidang secara lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren.KTT ke-19 ASEAN juga telah berhasil mengesahkan beberapa dokumen lainnya, baik dalam bentuk deklarasi maupun statement, antara lain mengenai kerja sama di bidang penanganan HIV/AIDS, perubahan iklim, pembangunan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, kemitraan ekonomi kawasan yang komprehensif, dan penguatan peran penyandang cacat dalam Komunitas ASEAN.

Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN

Sepanjang tahun 2011, berbagai inisiatif telah digulirkan mendorong implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEANguna mewujudkan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN.

Dalam bidang manajemen dan resolusi konflik, prakarsa Indonesia untuk mendorong terbentuknya sebuah *ASEANInstitute for Peace and Reconciliation* (AIPR) telahmendapat dukungan negara-negara

Foto 138. Menlu RI, Menlu ROK Bersama, dan Menlu RDRK
Pada 23 Juni 2011

Institut ini, diharapkan ASEAN dapat mengembangkan kapasitasnya dalam penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan. Peran dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa kawasan juga telah ditunjukkan melalui peran aktif ASEAN dalam memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Setelah sekitar sepuluh tahun mengalami kevakuman, upaya ASEAN untuk menciptakan suatu kawasan yang bebas senjata nuklir mengalami kemajuan yang sangat penting dengan diselesaikannya negosiasi dan pembahasan Protokol *Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) dengan Negara-negara Pemilik Senjata Nuklir. Sementara itu, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation*) telah berperan penting sebagai acuan hubungan antarnegara di kawasan. TAC juga semakin mendapat pengakuan oleh negara-negara lain di luar kawasan. Pada Juli 2011, Kanada telah mengaksesi Protokol Ketiga TAC, sementara Brazil telah menandatangani Deklarasi Aksesi terhadap TAC di sela-sela KTT ke-19 ASEAN, November 2011.

Di bidang kerja sama maritim, ASEAN telah menyepakati perlunya penguatan kerja sama melalui *ASEAN Maritime Forum* (AMF). ASEAN juga telah menyepakati pentingnya peningkatan kerja sama

maritim dan penanganan kejahatan lintas negara secara komprehensif.

Dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan, ASEAN *Inter-governmental Commission on Human Rights* (AICHR) telah memulai penyusunan rancangan *ASEAN Human Rights Declaration* yang diharapkan dapat disahkan pada tahun 2012.

Kerja sama pertahanan terus ditingkatkan melalui mekanisme *ASEAN Defense Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM Plus. Diantara beberapa inisiatif kerja sama dalam kerangka ini adalah pembentukan *ASEAN Peacekeeping Centres Network* dan *ASEAN Industry Defense Collaboration*.

ASEAN juga telah berhasil menyepakati format standar *ASEAN Security Outlook* (ASO) yang akan dipublikasikan tahun 2012. ASO diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan dan pemahaman terhadap kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Sementara itu, melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC), ASEAN terus memperkuat kerja sama di bidang penanganan kejahatan lintas negara. Dalam bidang pemberantasan terrorisme, sejak Mei 2011 *ASEAN Convention on Counter Terrorism* telah mulai berlaku secara efektif. Pada saat yang sama, ASEAN juga semakin mengintensifkan upaya pembentukan suatu instrumen hukum untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Terkait dengan isu Laut China Selatan, ASEAN telah berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) pada Juli 2011 dan memulai pembahasan mengenai elemen-elemen *regional code of conduct* (COC) di Laut China Selatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian damai isu ini dan memastikan terpeliharanya perdamaian dan stabilitas kawasan.

Foto 139. Upacara Pembukaan KTT ke-19 ASEAN, 17 November 2011

Disamping melalui forum ASEAN, Indonesia juga terus memainkan peran aktif dalam isu ini melalui penyelenggaraan Lokakarya mengenai Laut China

Selatan. Lokakarya ke-21 telah diselenggarakan di Solo, 9-11 November 2011, dimana untuk pertama kalinya Myanmar berpartisipasi sebagai *observer*dan sekaligus melengkapi keterlibatan semua *participating authorities* dari negara anggota ASEAN.

Dalam kerangka ASEAN Regional Forum, ARF telah memiliki *Preventive Diplomacy Work Plan* yang akan meningkatkan kerja sama dari tahap *confidence building measures* ke arah *preventive diplomacy*. Dalam bidang kerja sama penanggulangan bencana, Indonesia bersama Jepang telah menyelenggarakan *ARF Disaster Relief Exercise* (DiREx) *2011* di Manado, Maret 2011.

Penguatan komitmen ASEAN dalam pemajuan prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* ditunjukkanantara lainmelalui penandatanganan *Agreement on the Establishment of ASEAN Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI).

ASEAN juga telah menggulirkan pembahasan mengenai Visa Bersama ASEAN (*ASEAN Common Visa)* untuk *Non-ASEAN Nationals*.

Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN

Realisasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) yang melibatkan dukungan para Mitra Wicara, organisasi internasional dan partisipasi swasta melalui skema *public-private-partnership* (ppp) merupakan salah satu prioritas penting ASEAN. ASEAN *Connectivity* akan memfasilitasi terwujudnya Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Para pemimpin memiliki visi ASEAN yang terhubungkan dengan baik diantara anggota dan dengan negara-negara dari luar ASEAN, dalam bentuk *physical, institutional and people-to-people connectivity*. Indonesia dan Filipina merupakan *lead coordinator* dalam proyek studi kelayakan untuk jaringan *roll-on roll-off* (roro) dan *short-sea-shipping* untuk memperkuat jaringan transportasi laut dan menghubungkan negara kepulauan dengan *mainland.* Dalam hal *ASEANConnectivity*, Indonesia berprinsip bahwa *regional connectivity* hanya dapat efektif apabila didukung oleh *domestic connectivity* yang tangguh. Negara-negara Mitra Wicara seperti China, Jepang dan Amerika Serikat telah menunjukkan minatnya untuk mendukung MPAC.

Indonesia menyadari bahwa disparitas ekonomi di ASEAN merupakan salah satu tantangan terberat di ASEAN dalam mewujudkan suatu Komunitas ASEAN. Oleh karenanya, Indonesia pada tahun ini mengggagas dibentuknya *ASEAN Framework on Equitable Economic Development* (EED). *Framework* ini menegaskan kembali komitmen ASEAN dalam mencapai kesetaraan dalam pembangunan ekonomi, dengan mengedepankan upaya-upaya seperti menjembatani kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, serta membuka ruang partisipasi yang lebih lebar dalam proses integrasi ASEAN.

Mencapai pembangunan ekonomi yang setara merupakan Pilar ke tiga dari empat pilar Komunitas Ekonomi ASEAN. Indonesia akan terus mengupayakan agar inisiatif dan program di bawah Pilar ke tiga ini mendapat perhatian yang lebih besar lagi, dalam rangka pembentukan KEA 2015, maupun dalam rangka pembentukan arsitektur ekonomi di kawasan. Pilar tersebut meliputi penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memperoleh akses yang lebih besar lagi terhadap teknologi, pasar dan modal, dan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).

IAI lebih diperuntukkan bagi negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam) melalui berbagai bantuan teknis, dimana Indonesia merupakan salah satu kontributor.

Sebagai salah satu upaya mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan *rules of law* di kawasan, Indonesia telah berinisiatif mendorong pembentukan ASEAN *Supreme Audit Institutions* (ASEAN SAI). Selain untuk mendorong *good governance*, ASEAN SAI juga akan menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan *capacity building* yang akan mendorong peningkatan kualitas, profesionalisme, dan integritas para auditor publik. Perjanjian pembentukan ASEAN SAI ditandatangani di Bali pada 16 November 2011 oleh para Ketua lembaga audit se-ASEAN. Ketua BPK RI kemudian terpilih menjadi Ketua ASEAN SAI untuk periode 2011-2013.

ASEAN *Leaders* dalam KTT ke-18 ASEAN sepakat untuk menguatkan komitmen mereka dalam memastikan akses masyarakat terhadap bahan pangan dan energi. Berkenaan dengan ketahanan pangan, ASEAN sepakat antara lain untuk memperkuat penelitian dan pengembangan pangan serta untuk membentuk kebijakan yang koordinatif dalam perdagangan pangan di kawasan.

ASEAN+3 juga sepakat untuk mendayagunakan ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) dalam mengatasi rawan pangan akibat bencana dan fluktuasi harga. APTERR telah ditandatangani pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN di Jakarta, 7 Oktober 2011.

Terkait energi, ASEAN *Leaders* pada KTT ke-18 menggarisbawahi pentingnya upaya-upaya dalam mengurangi ketergantungan kawasan terhadap bahan bakar fosil. Dalam kerangka ini, ASEAN menegaskan kembali perlunya pengembangan energi alternatif dan terbarukan. ASEAN juga sepakat untuk mengembangkan akses masyarakat terhadap energi, antara lain melalui pengembangan biomassa di pedesaan dan pelaksanaan *ASEAN Power Grid* (jaringan inter-koneksi listrik antar-negara ASEAN).

AMAF+3 juga menyepakati *ASEAN Plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bioenergy Development* yang berupaya untuk mensinergikan strategi-strategi di bidang ketahanan pangan dan energi. Strategi ini juga mencakup *Strategic Plan of Action on Food and Energy Security* (SPA-FES) 2011-2015. Beberapa agenda konkrit yang dicakup SPA ini antara lain pengembangan biomassa di daerah pedesaan, pengembangan biofuel generasi ke dua secara komersial, serta penguatan konsultasi antara sektor energi dan sektor pangan.

Pada 18 November 2011, ditandatangani *Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Republic of Korea on Forest Cooperation*. Perjanjian ini mencakup hal-hal seperti *sustainable forest management*, penguatan kapasitas kelembagaan dan individu di sektor kehutanan, serta upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perjanjian ini juga memuat rencana pembentukan lembaga *Asian Forest Cooperation Organization*, yang akan mewadahi kerja sama kehutanan di Asia Pasifik.

Dalam mengembangkan konsep *Regional Economic Architecture,* para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengedepankan sentralitas ASEAN.Para pemimpin sepakat mengenai perlunya suatu *template* bagi ASEAN yang berisi prinsip-prinsip dasar ASEAN untuk pengembangan FTA++ dan pendekatan negosiasi FTA secara *region-wide*. Konsepsi ini merupakan *counter-proposal* dari usulan beberapa negara Mitra Wicara mengenai pengembangan *Regional Economic Architecture*, sebagai pengejawantahan dari sentralitas ASEAN. Sehubungan dengan hal tersebut, pada KTT ke-19 ASEAN para pemimpin ASEAN telah menyetujui *ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* yang menugaskan menteri terkait untuk mengimplementasikan prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja dimaksud dalam melakukan kerja sama ekonomidengan mitra wicara.

Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 mensyaratkan adanya partisipasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Keterlibatan masyarakat dalam mendorong proses integrasi di kawasan tersebut dimungkinkan terjadi apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentang ASEAN. Maka dari itu diperlukan upaya diseminasi informasi yang merata tentang perkembangan kerja sama ASEAN kepada seluruh lapisan masyarakat (*stakeholders* dan *shareholders*) secara rutin dan berkelanjutan.

Indonesia antara lain terlibat secara aktif dalam finalisasi *Agreement on the Establishment of the AHA Centre* sebagai landasan hukum berdirinya AHA Centre di Jakarta, Indonesia. Dengan penandatanganan *Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre*)dan peluncuran resmi *AHA Centre* pada saat KTT ke-19 ASEAN di Bali, November 2011, maka ASEAN telah selangkah lebih maju dalam kerja sama penanggulangan bencana. Secara nasional, beroperasinya AHA Centre di tahun 2011 menjadi salah satu pencapaian Indonesia saat menjabat

sebagai Ketua ASEAN. Lebih lanjut, Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai *Global Champion on Disaster Risk Reduction* pada saat *Global Platform on Disaster Risk Reduction* ke-3 di Jenewa, Mei 2011 atas implementasi kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana.

Pada sektor kebudayaan, Indonesia menggagas penyusunan *Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community* yang ditandatangani oleh para Menteri Kebudayaan ASEAN pada KTT ke-19 ASEAN. Deklarasi tersebut merupakan pengejewantahan komitmen negara-negara ASEAN untuk mendukung perwujudan Komunitas ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (*people oriented*) melalui pendekatan kerja sama kebudayaan.

ASEAN juga mencatat kemajuan pada isu *migrant workers* khususnya dalam penyusunan *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* oleh *ACMW Drafting Team* (ACMW-DT) di Filipina, 12-13 September 2011. ACMW-DT berhasil menyepakati *timeline* penyusunan instrumen tersebut dalam tiga fase dengan fokus utama pada upaya untuk mencari *common ground* perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran.

Pada KTT ke-19 ASEAN, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN mengadopsi *ASEAN Declaration of Commitment: Getting to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-related Deaths.* Deklarasi dimaksud mempertegas komitmen ASEAN mengenai pentingnya upaya dalam mencegah dan mengurangi kasus infeksi HIV, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN juga mengadopsi*Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community* dan memproklamirkan*ASEAN Decade of Persons with Disabilities (2011-2020): the Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN.*Keduadokumen tersebut mempertegas komitmen ASEAN untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak-hak politik, penggunaan informasi serta akses atas lingkungan, transportasiyang didasarkan pada kesamaan hak.

Dalam isu lingkungan hidup, para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN mengadopsi*ASEAN Leaders' Statement on Climate Change to the 17th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP17) and the 7th Session of the Conference of Parties serving as the Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (CMP7)* yang menegaskan posisi bersama ASEAN dalam perundingan isu lingkungan hidup di tingkat global.

Terkait isu perempuan, para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN menyetujuipembentukan *ASEAN Ministerial Meeting on Women* (AMMW) sebagai upaya ASEAN untuk meningkatkan kerja sama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan di tingkat regional. ASEAN dan Mitra Wicara

ASEAN-RRT

Kerja sama ASEAN-RRT tahun ini telah mencapai 20 tahun yang diperingati dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 ASEAN-RRT sebagai KTT Peringatan (*Commemorative Summit*) pada tanggal 18 November 2011. Peringatan 20 tahun hubungan ASEAN-RRT ditandai dengan berbagai macam kegiatan dan disahkannya *Joint Statement of the 14th ASEAN-China Summit to commemorate the 20th Anniversary of Dialogue Relations.*

Kemajuan yang cukup menonjol dalam kerja sama ASEAN-RRT tahun 2011 diantaranya tercermin dari disepakatinya *Guidelines for the Implementation of the DOC* di Bali pada Juli 2011, selain kemajuan di bidang lainnya seperti meningkatnya volume perdagangan dan kerja sama fungsional antara ASEAN dan RRT.

Pada KTT ke-14 ASEAN-RRT para Pemimpin ASEAN-RRT menyambut baik disepakatinya *Guidelines for the Implementation of the DOC* di Bali pada Juli 2011 dan mendorong agar *Guidelines DOC* ini dapat diterjemahkan ke dalam proyek-proyek kerja sama yang konkret, serta agar pembahasan mengenai elemen *Code of Conduct*dapat dimulai.

Foto 140. ASEAN – China Commemorative Summit, Bali, 18 November 2011

Pada KTT dimaksud, para Pemimpin juga meresmikan *ASEAN-China Centre* yang akan berfungsi sebagai pusat untuk mempromosikan kerja sama perdagangan, investasi, pendidikan dan pertukaran kebudayaan antara ASEAN dan RRT. Dalam kaitan ini, Indonesia telah meratifikasi MOU Pembentukan *ASEAN-China Centre* melalui Perpres Nomor 75/2011, tanggal 11 Oktober 2011.

PM RRT dalam KTT dimaksud juga menyatakan rencana RRT untuk membuka perwakilan tetapnya untuk ASEAN di Jakarta pada tahun 2012.

ASEAN-Jepang

Salah satu bentuk kerja sama ASEAN-Jepang yang menonjol selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2011 adalah di bidang kerja sama manajemen bencana alam, khususnya setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang dalam bulan Maret 2011. Melalui penyelenggaraan *Special ASEAN-Japan Ministerial Meeting* di Jakarta dalam bulan April 2011, kedua pihak meneguhkan kembali tekad untuk memperkuat kerja sama di bidang penanganan bencana alam. ASEAN dan Jepang juga bekerja sama sebagai *co-chair* dalam kegiatan latihan penanganan bencana ARF DiRex di Manado dalam bulan Maret 2011.

Para Pemimpin ASEAN-Jepang pada KTT ke-14 ASEAN-Jepang di Bali tanggal 18 November 2011 membicarakan berbagai kerja sama seperti *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, Disaster Management, ASEAN Connectivity,People-to-People Contact,* isuMyanmar, dan *Narrowing Development Gap.* Terkait *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*, pertemuan menghimbau agar pembahasan mengenai investasi dan perdagangan jasa dibawah kerangka *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* dapat segera diselesaikan. Disamping itu, diharapkan agar kerangka kerja sama tersebut dapat turut mendukung *Small and Medium Size Enterprises* di negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya, pada KTT ke-14 ASEAN-Jepang pada tanggal 18 November 2011, para Pemimpin ASEAN-Jepang juga mengadopsi *Joint Declaration for Enhancing ASEAN-Japan Strategic Partnership for Prospering Together* (Bali Declaration) dan *ASEAN-Japan Plan of Action 2011-2015.*

Foto 141. ASEAN – Japan Summit, Bali, 18 November 2011

ASEAN-ROK

Kemitraan ASEAN dan *Republic of Korea (ROK)* pada tahun 2011 terjalin dengan erat dan positif. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 ASEAN-Republik Korea di Bali, tanggal 18 November 2011, ROK menyampaikan keinginannya untuk membuka Perwakilan ROK untuk ASEAN di Jakarta serta menunjuk duta besarnya pada tahun 2012. Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai kerja sama di bidang *ASEAN – ROK Free Trade Agreement, ASEAN Connectivity,* keamanan pangan, lingkungan hidup, dan isu keamanan di Semenanjung Korea. Seiring dengan semakin meningkatnya volume perdagangan dan kedatangan wisatawan, para Pemimpin ASEAN-ROK menegaskan kembali tekad untuk mencapai target volume perdagangan dua arah sebesar USD150 milyar pada tahun 2015.

Foto 142. ASEAN – ROK Summit, Bali, 18 November 2011

Pada KTT ke-14 ASEAN-ROK, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani *Agreement Between the Governments of the Member States of the Association of southeast Asian Nations and the Republic of Korea on Forest Cooperation (AFoCo)* yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI pada tanggal 18 November 2011.

ASEAN Plus Three

Dalam kerangka kerja sama *ASEAN Plus Three (APT)* telah dilakukan pertemuan *12th ASEAN Plus Three Foreign Ministers' Meeting* tanggal 21 Juli 2011 yang mengesahkan *Terms of Reference* (TOR) *of the East Asia Vision* (EAVG) *II.* Kelompok Tokoh Terkemuka(*Eminent Persons Group*) telah diberi mandat untuk melakukan pengkajian kerja sama APT dan menyampaikan rekomendasi kepada para *Leaders* pada KTT ke-15 APT di Kamboja tahun 2012 mengenai arah kerja sama APT di masa mendatang. Adapun *Eminent Person* dari Indonesia adalah Bapak Jusuf Wanandi dengan *Alternate Eminent Person* Duta Besar Pitono Purnomo. Pertemuan pertama EAVG II telah dilakukan pada tanggal 20-22 Oktober 2011 di Seoul, Korea Selatan.

Pada KTT ke-14 APT di Bali, 18 November 2011 telah dibahas berbagai kerja sama meliputi kerja sama *politik keamanan, keuangan, disaster management, keamanan pangan, Crisis Management Center, ASEAN Connectivity,* dan *East Asia Vision Group II*. Di bidang kerja sama keuangan, pertemuan menyambut baik operasionalisasi *ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office* (AMRO) mulai tahun 2011 sebagai unit pemantau kinerja ekonomi dan keuangan di kawasan yang salah satu tugasnya adalah *early detection of risks* dan *effective decision-making of the CMIM*. Para Pemimpin juga mengharapkan agar *Asian Bond Market Forum* (ABMF) dan *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) dapat segera dikembangkan guna memperkuat sistem perekonomian kawasan.

Foto 143. ASEAN Plus Three Summit, Bali, 18 Novemb

KTT ke-14 APT menyambut baik penandatanganan Perjanjian *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) pada tanggal 7 Oktober 2011 di Jakarta. Perjanjian ini akan dimanfaatkan untuk menjaga stock beras dalam keadaan darurat dalam kerangka kerja sama *ASEAN Plus Three*. APTERR akan menyediakan mekanisme pasokan pangan (beras) jika terjadi situasi darurat bencana. Cadangan beras APTERR saat ini disepakati sebanyak 787 ribu ton, di mana Indonesia berkomitmen menyediakan12 ribu ton. Diharapkan bahwa mekanisme serupa dapat dikembangkan untuk komoditas pangan lainnya selain beras dalam rangka menjamin ketahanan pangan di kawasan.

Indonesia secara khusus menyampaikan usulannya untuk membentuk suatu *crisis management center* yang bertujuan untuk menanggapi berbagai *emergencies*, seperti bencana alam dan *financial crisis*, di kawasan secara cepat dan efektif dengan mengkoordinasikan dan mendayakan berbagai mekanisme yang telah ada di bawah kerangka kerja sama *ASEAN Plus Three.*

Pertemuan menyepakati untuk merayakan KTT ke-15 *ASEAN Plus Three* tahun 2012 sebagai *Commemorative Summit*. Terkait dengan perayaan tersebut, pada tahun depan akan diselenggarakan berbagai kegiatan, sepertipentas kebudayaan, yang akan menonjolkan *people-to-people contact*.

ASEAN-India

Kerja sama ASEAN-India merupakan salah satu kerja sama yang memiliki potensi sangat besar dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan letak strategis kedua pihak. Dalam kaitan ini, pemimpin ASEAN dan India sepakat untuk lebih meningkatkan hubungan kerja sama ASEAN-India dan menyetujui dibentuknya *ASEAN-India Eminent Persons Group* (AI-EPG) yang diberi mandat untuk mengkaji dan menyampaikan rekomendasi bagi peningkatan hubungan tersebut kepada para Pemimpin pada KTT tahun 2012.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN-India diselenggarakan di Bali tanggal 19 November 2011. Pertemuan mencatat telah berlakunya *ASEAN – India Free Trade Agreement* (AIFTA) *for Trade in Goods* dan sepakat mengenai perlunya penyelesaian *AIFTAfor services and investment* Bulan Maret 2012. Dalam kerja sama pariwisata, pertemuan mencatat rencana finalisasi *MOU on Strengthening Tourism Cooperationbetween ASEAN and India* pada Pertemuan Tingkat Menteri yang direncanakan pada awal 2012 di Indonesia.

PM India pada saat KTT mengumumkan bahwa *ASEAN-India Commemorative Summit* akan diselenggarakan pada tanggal 20-21 Desember 2012. Pertemuan juga mencatat rencana penyelenggaraan *ASEAN-India Car Rally* sebagai salah satu bagian dari kegiatan dimaksud. PM India juga mengusulkan untuk mengirim *Sail Training Ship* "Sudarshini" dalam ekspedisi ke ASEAN.

Foto 144. ASEAN – India Summit, Bali, 19 November 2011

ASEAN-Australia

Kemajuan kerja sama ASEAN-Australia dapat dilihat dari implementasi *ASEAN-Australia Joint Declaration* dan Rencana Aksinya serta *ASEAN-Australia Development Cooperation Programme II* (AADCP II). Bantuan Australia dalam kerangka implementasi kesepakatan-kesepakatan tersebut telah memberikan manfaat yang signifikan bagi integrasi ASEAN, penguatan kapasitas dalam kerangka implementasi AANZFTA dan Sekretariat ASEAN.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Australia pada tanggal 22 Juli 2011 di Bali, para Menlu sepakat mengenai perlunya peningkatan kerja sama dalam bidang *disaster management*, khususnya terkait dengan operasionalisasi *ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (*AHA Center*) dan perluasan kerja sama *disaster management* dalam lingkup *East Asia Summit*.

Dalam kaitan ini, kepada negara-negara anggota ASEAN, Australia telah menyampaikan *Australian non-paper: Disaster Management and Response in the East Asia Summit*. Paper ini yang kemudian disatukan dengan paper Indonesia menjadi paper bersama "*Indonesian-Australian Paper: A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response*" dan telah dicatat oleh para *Leaders* di KTT ke-6 Asia Timur di Bali, 19 November 2011.

Kemajuan kerja sama ASEAN–Australia juga terefleksikan dalam perkembangan *ASEAN-Australia-New ZealandFree Trade Agreement* (AANZFTA). Pada tahun 2011 ini, Indonesia telah melakukan ratifikasi persetujuan dimaksud melalui Perpres Nomor 26 tanggal 6 Mei 2011.

ASEAN-Selandia Baru

Saat ini kerja sama ASEAN-Selandia Baru telah memasuki tahun pertama dari *Plan of Action to*

Implement the Joint Declaration for ASEAN-New Zealand Comprehensive Partnership 2010-2015 yang telah disahkan tahun lalu di Hanoi. Selain itu Selandia Baru juga telah memulai beberapa kegiatan di bawah kerangka *four flagship initiatives* yang ditawarkan pada tahun lalu yaitu *Disaster Risk Management Programme,Agricultural DiplomacyYoung Business Leaders,ASEAN-New Zealand Scholars Program.* Indonesia pada tahun 2011 ini mendapatkan 50 beasiswa dari *ASEAN-New Zealand Scholars Program.*

Foto 145. ASEAN Regional Forum, Bali, 23 juli 2011

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Selandia Baru di Bali tanggal 22 Juli 2011, Selandia Baru menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek-proyek penting ASEAN seperti *ASEAN Connectivity* dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli yang dimiliki untuk membantu pelaksanaan dari proyek tersebut.

Senada dengan Australia, kemajuan kerja sama ASEAN – Selandia Baru juga terefleksikan dalam perkembangan *ASEAN-Australia-New ZealandFree Trade Agreement* (AANZFTA). Pada tahun 2011 ini, Indonesia telah melakukan ratifikasi persetujuan dimaksud melalui Perpres Nomor 26 tanggal 6 Mei 2011.

ASEAN-Rusia

Tahun 2011 merupakan momentum bersejarah bagi kerja sama ASEAN-Rusia, mengingat negara tersebut untuk pertama kalinya menjadi peserta*East Asia Summit* (EAS) dimana Menlu RusiaSergey Viktorovich Lavrov hadir mewakili Presiden Rusia pada KTT EAS di Bali tanggal 17 – 19 November 2011.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Rusia bulan Juli 2011, para Menlu membahas upaya peningkatan kerja sama ASEAN-Rusia, khususnya di bidang ekonomi berdasarkan *Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between the ASEAN and the Russian Federation 2005-2015.* Dalam kaitan ini, para Menlu juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC).*

Para Menlu menghargai telah beroperasinya *ASEAN Centre* di Moscow University (MGIMO), yang telah diresmikan pada tanggal 15 Juni 2010 dan menjadi pusat kegiatankerja sama ASEAN-Rusia, khususnya kegiatan-kegiatan yang mendukung *people-to-people contact.*

Di dalam kesempatan yang sama, Pertemuan telah mengesahkan *Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs of ASEAN and the Russian Federation*

*on the Occasion of the 15th Anniversary of the ASEAN-Russia Dialogue Partnership.*Pertemuan jugasepakat mengenai perlunya mempercepat ratifikasi *Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Member States of ASEAN and the Government of the Russian Federation*.

ASEAN-Uni Eropa

Kerja sama ASEAN-Uni Eropa (UE) pada tahun 2011 tetap difokuskan untuk mendukung perwujudan Komunitas ASEAN 2015. Kerja sama yang menonjol dalam pilar politik-keamanan antara lain kunjungan *ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights* (AIHCR) ke UE dan *Council of Europe* pada bulan Mei 2011 sebagai bentuk dukungan UE atas upaya promosi dan perlindungan HAM di ASEAN; penyelenggaraan *ASEAN-EU Workshop on Preventive Diplomacy and International Peace Mediation* pada bulan Oktober 2011 di Bali. Pada bulan Juli 2011, telah dilaksanakan *ASEAN-EU Post Ministerial Conference* sebagai bagian dari rangkaian 44th AMM/PMC/18th ARF, dimana kedua pihak berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama.

Dalam pilar ekonomi, ASEAN-UE telah menyelesaikan kerangka *Work Plan ofASEAN-EU Programme for Regional Integration Support II* (APRIS II) pada 31 Desember 2010. *Concluding Seminar* untuk mengakhiri kerja sama APRIS II ini secara formal dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2011. Selanjutnya, UE memberikan dukungan kepada ASEAN melalui program baru "ASEAN Regional Integration Support from the EU (ARISE)" atau *the ASEAN Economic Integration Support Programme* dengan rencana anggaran sebesar €15 juta untuk periode 2011-2015. ASEAN-UE juga telah menyelenggarakan pertemuan pertama *ASEAN-EU Business Summit* pada bulan Mei 2011 di Jakarta yang merupakan forum tingkat tinggi untuk para pelaku usaha dan pemerintah untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara negara ASEAN dan Uni Eropa, sekaligus melihat peluang bisnis dan investasi di kedua belah pihak.

Dalam pilar sosial budaya, kerja sama dilakukan di bawah kerangka *Regional EU-ASEAN Dialog Instrument (READI)* yang menaungi kerja sama seluruh dialog sektoral dan isu non-perdagangan. Program READI telah memulai tahapan baru pada tahun 2011.

ASEAN-Amerika Serikat

Tahun 2011 merupakan momentum bersejarah bagi kerja sama ASEAN-Amerika Serikat (AS), mengingat negara tersebut untuk pertama kalinya menjadi peserta *East Asia Summit* (EAS) dengan kehadiran Presiden Barack Obama di Bali tanggal 17 – 19 November 2011. Perkembangan positif ini disambut baik oleh para Pemimpin ASEAN.

Kerja sama ASEAN-AS semakin diperkuat dengan disetujuinya *Plan of Action (PoA) to Implement the*

ASEAN-US Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity (2011-2015) oleh para Menlu dalam *ASEAN-US Ministerial Meeting (PMC+1)* di Bali, 22 Juli 2011 dan telah diadopsi pada Pertemuan ke-3 Pemimpin ASEAN dan AS di Bali, 19 November 2011. *PoA* dimaksud merupakan *blueprint* kerja sama ASEAN-AS, kelanjutan dari *PoA 2006-*

Foto 146. ASEAN – US Summit, Bali, 19 November 2011

*2011*sebagai upaya meningkatkan kemitraan ASEAN-AS ke tingkat yang lebih strategis.

Guna mencapai peningkatan kemitraan yang lebih strategis tersebut, Pertemuan juga telah membentuk Kelompok Tokoh Terkemuka/*Eminent Persons Group* ASEAN-AS. Para tokoh ini diharapkan dapat segera bertemu dan menghasilkan rekomendasi guna dilaporkan ke Pertemuan Pemimpin ASEAN-AS berikutnya.

Pertemuan ke-3 Pemimpin ASEAN dan AS juga berkomitmen memperkuat kerja sama di berbagai aspek antara lain implementasi Rencana Kerja 2012 bidang perdagangan dan investasi, serta kerja sama pendidikan melalui beasiswa dan pelatihan bahasa Inggris untuk ASEAN. Pertemuan membahas pula berbagai isu seperti, Laut Cina Selatan*, non-proliferation of nuclear weapon,* keterlibatan AS di Asia Pasifik, isu Myanmar, dan isu-isu lainnya*.*

Para pemimpin ASEAN menyambut baik komitmen AS dalam *non-proliferation of nuclear weapon*, terutama berkaitan dengan upaya aksesi negara pemilik senjata nuklir ke *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ). Terkait isu Myanmar, para Pemimpin ASEAN dan AS menyatakan apresiasi atas perkembangan positif dalam proses rekonsiliasi di Myanmar. AS juga menyampaikan harapan agar kemajuan tersebut terus berlanjut sampai Myanmar mengambil alih Keketuan ASEAN pada tahun 2014.

ASEAN-Kanada

Tahun 2011 ini Kanada telahmenandatangani *3rd Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). ASEAN dan Kanada juga telah mempersiapkan berbagai kegiatan dalam kerangka memperingati 35 tahun kerja sama dialog ASEAN-Kanada tahun 2012. Pada pertemuan AMM/PMC ke-44 di Bali, Indonesia tanggal 22 Juli 2011, telah diadopsi *List of Activities to Commemorate the 35thAnniversary of ASEAN-Canada Relations* yang telah disusun oleh para *SOM Leaders* pada *pertemuan 8th ASEAN-Canada Dialogue* di Vancouver, Kanada tanggal 2-3 Juni 2011.

Tahun ini ASEAN dan Kanadasepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang energi, khususnya dalam kerangka implementasi *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC)* yang telah diadopsi tahun 2010.

Pada *2nd ASEAN-Senior Economic Officials Meeting* (SEOM 2/42) sesi Konsultasi dengan Kanada tanggal 23-25 Maret 2011 di Singapura, telah disepakati perubahan format ASEAN-Canada TIFA menjadi *Joint Declaration between ASEAN and Canada on Trade and Investment*. *Joint Declaration* tersebut telah di-*endorsed* oleh para Menteri ASEAN pada pertemuan AEM ke-43 bulan Agustus 2011. Namun, adopsi terhadap *Joint Declaration* batal dilaksanakan pada rangkaian pertemuan AEM tersebut meningat tidak ada sesi Konsultasi dengan Menteri Kanada. Adopsi baru dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada disaksikan oleh seluruh Utusan Tetap Negara ASEAN pada tanggal 2 Oktober 2011.

ASEAN-PBB

Kerja sama ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diperkuat dengan disahkannya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between ASEAN and the UN* yang merupakan *"living document"* yang akan menjadi landasan bersama untuk kerja sama ASEAN-PBB yang lebih intensif dan konkret ke depan.

Foto 147. ASEAN – UN Summit, Bali, 19 November 2011

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-4 ASEAN-PBB di Bali, tanggal 19 November 2011, para Pemimpin ASEAN dan Sekjen PBB membahas sejumlah bidang kerja sama yang dapat memberikan hasil konkret bagi ASEAN dan PBB, sebagai berikut:

a. Identifikasi langkah-langkah memperkuat kerja sama ASEAN-PBB di berbagai bidang.
b. Peningkatan kapasitas dan untuk memfasilitasi *peaceful dispute settlement* dan *conflict resolution*.
c. Pengentasan kemiskinan melalui ketersediaan pangan dan tercapainya target-target *Millennium Development Goals* dan *Narrowing Development Gap*.
d. Kegiatan-kegiatan bersama dalam kerangka menyikapi perubahan iklim dengan merealisasikan prioritas-prioritas yang terdapat dalam Bali Road Map.
e. *Exchange of views* terkait perkembangan politik global dan regional di berbagai kawasan termasuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

Di dalam KTT, PBB menyatakan dukungannya terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015, *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC),* pembentukan *AHA Centre* dankeketuaan Myanmar di ASEAN untuk tahun 2014. Sekjen PBB juga menyatakan penghargaannya atas peran aktif Indonesia dalam memfasilitasi upaya penyelesaian damai terhadap sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Untuk mendorong peningkatan kerja sama ASEAN-PBB, KTT menyepakati untuk meningkatkan intensitas hubungan dan keterlibatan antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat PBB.

ASEAN-GCC

Para Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu mitranya dari *Gulf Cooperation Council (GCC)* pertama kali di sela-sela Sidang Umum PBB di New York tahun 1990. Meningkatnya intensitas kerja sama ASEAN-GCC ditandai dengan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak berdasarkan *GCC-ASEAN Joint Vision* pada tahun 2009.

Untuk mempererat kemitraan ASEAN-GCC maka pada *the 2nd ASEAN-Gulf Cooperation CouncilMinisterial Meeting* di Singapura, 31 Mei – 1 Juni 2010, ASEAN-GCC sepakat untuk melaksanakan *Two-year Action Plan 2010-2012*yang mencakup kerja sama di bidang perdagangan dan investasi; ekonomi dan pembangunan; pendidikan, kebudayaan dan informasi; serta mekanisme pelaksanaan *Action Plan.*

Sebagai tindak lanjut dari *Action Plan* tersebut, pada tahun 2011 ini telah dilaksanakan tiga pertemuan *Working Groups* yaitu:

a. Bidang Ketahanan Pangan dan Investasi Pertanian, 3-4 Mei 2011, di Doha, Qatar.
b. Bidang Pariwisata, 21-25 Juni 2011, di Luang Prabang, Laos.
c. Bidang Perdagangan dan Investasi, 1-12 Juli 2011 di Salalah, Oman

Pada pertemuan ASEAN-GCC di New York tanggal 26 September 2011 telah dibahas topik perkembangan kerjasama ASEAN-GCC, isu-isu utama di Timur Tengah, serta isu pembajakan di kawasan *Horn of Africa.*

Hingga saat ini, 5 (lima) negara anggota GCC telah menunjuk Duta Besarnya untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

ASEAN-Pakistan

Pakistan mendapatkan status mitra wicara sektoral pada *26th ASEAN Ministerial Meeting* tanggal 23 Juli 1993. Hubungan kemitraan sektoral ASEAN-Pakistan mulai dilembagakan pada tanggal 5 Februari 1999. Pakistan menjadi anggota ARF ke-24 pada pertemuan ke-11 *ASEAN Regional Forum* (ARF) di Jakarta 2 Juli 2004. Pakistan telah beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk menjadi mitra wicara penuh ASEAN termasuk melalui surat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari yang ditujukan kepada Presiden RI sebagai Ketua ASEAN 2011. Indonesia mendukung peningkatan status kemitraan Pakistan pada ASEAN, namun masih diperlukan dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya sehingga tercapai konsensus.

KTT Asia Timur *(East Asia Summit)*

Pada KTT ke-6 Asia Timur di Bali, tanggal 19 November 2011, untuk pertama kalinya Rusia dan Amerika Serikat ikut berpartisipasi.

Pada pertemuan ini telah disahkan dua deklarasi, yaitu: *(1) Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations,* dan (2)

Foto 148. Sesi Foto pada Gala Dinne KTT ke-6 *East Asia Summit*
Bali, 18 November 2011

Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity.

Deklarasi pertama, yang disebut juga sebagai *"Bali Principles"*, berisi norma-norma dasar dan prinsip-prinsip umum yang diambil dari berbagai dokumen dasar sebelumnya, termasuk Piagam PBB, Traktat Persahabatan dan Kerja sama (TAC) dan pengaturan lainnya antara negara-negarapeserta EAS, yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk hubungan antara negara peserta EAS untuk memajukan dan menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah ini. Deklarasi ini merupakan salah satu pencapaian prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN yang berusaha memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan.

Deklarasi kedua menjadikan *Connectivity* sebagai salah satu area prioritas kerja sama EAS selain 5 area prioritas yang sudah ada *(finance, education, energy, disaster management,* dan *avian flu prevention).*

Selain itu para *Leaders* juga menyepakati "*Indonesian-Australian Paper: A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response*" di KTT ke-6 Asia Timur di Bali, 19 November 2011. *Paper* ini merupakan inisiatif Indonesia dan Australia dalam upaya menangani bencana alam dan tanggap darurat serta mengatasi *bottle neck* yang terjadi pada saat terjadi bencana alam.

Dengan disepakatinya *paper* ini oleh negara-negara partisipan EAS, diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memaksimalkan kerja samayang lebih luas dalam pengelolaan dan penanganan bencana, koordinasi segera setelah terjadinya bencana dan saat kondisi darurat (*emergency rapid response*) termasuk persiapan dan kesiapan sebelum terjadi bencana (*alert early warning system*) melalui mekanisme yang telah ada di ASEAN seperti AHA Centre, ARF-DiREX, AADMER, ACDM, *Emergency Rapid Assessment TeamASEAN (ERAT).* Para *Leaders* sepakat menugaskan para Menlu negara peserta EAS untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti dengan kementerian dan institusi terkait guna mengimplementasikan *joint paper* tersebut.

Kerja Sama Sub-Regional ASEAN: BIMP-EAGA dan IMT-GT

Kerja sama sub-regional Asia Tenggara diantaranya adalah Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Kerja sama ekonomi sub-regional ini akan membantu mendorong integrasi ekonomi ASEAN dan memajukan berbagai bentuk strategi integrasi ASEAN, termasuk AFTA. Selain itu, kerja sama sub-

regional akan membantu penguatan implementasi konektivitas ASEAN secara keseluruhan.

Dalam Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), pengembangan konektivitas di wilayah kerja sama sub-regional mendapat porsi yang besar. Dari 15 proyek prioritas MPAC, dua diantaranya berasal dari proyek-proyek kerja sama BIMP-EAGA dan IMT-GT, yaitu: *West Kalimantan-Sarawak Power Interconnection* dan Melaka Pekan Baru *Power Interconnection*. Selain itu, rencana studi kelayakan mengenai *ASEAN Ro-Ro Network*, yang merupakan salah satu proyek prioritas di MPAC, juga akan melibatkan wilayah sub-regional BIMP-EAGA.

Selain meningkatkan *infrastructure connectivity*, kerja sama sub-regional juga berusaha meningkatkan upaya dalam *soft connectivity*. Di wilayah-wilayah perbatasan BIMP-EAGA, misalnya, telah diselesaikan fasilitas *Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS*), yaitu Mengkelap, Tedungan dan Sg. Tujuh-Miri (Brunei Darussalam dan Malaysia) dan Lubuk Antu dan Biawak (perbatasan Indonesia dan Malaysia) serta Glan, Filipina.

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama dari 21 ekonomi di Lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989. Tujuan utama APEC adalah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, yaitu tahun 2010 bagi ekonomi industri maju dan 2020 bagi ekonomi berkembang, serta pengembangan kapasitas untuk menghadapi perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Tujuan ini disepakati pada Pertemuan Puncak APEC di Bogor tahun 1994, yang dikenal sebagai *Bogor Goals* yang hingga sekarang terus memandu kerja APEC. Selain itu, APEC juga membahas soal-soal *human security* yang berdampak terhadap ekonomi dan perdagangan kawasan, seperti bencana alam, keamanan pangan, keamanan enerji, penyakit menular, terorisme, serta transparansi dan anti-korupsi. APEC juga bersifat unik karena dunia usaha dapat berperanan aktif dalam setiap pertemuan APEC.

Hasil-hasil pokok pertemuan APEC tahun 2011

Dalam rangka mendukung iklim perdagangan dan investasi di Asia Pasifik yang kondusif bagi upaya pembangunan, maka Indonesia selalu aktif dalam diplomasi ekonomi di APEC. Presiden Indonesia selalu mengikuti pertemuan-pertemuan pucak APEC setiap tahun dan menyiapkan pandangan, kepentingan, dan pengalaman Indonesia.

Hasil-hasil pokok rangkaian pertemuan APEC di AS sepanjang tahun 2011 perlu dan dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan sebagai salah satu pelaku utama perdagangan dan tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik.

Hasil pokok Pertemuan Puncak APEC pada tanggal 13 November 2011 dituangkan dalam *Honolulu Declaration*. Keseluruhan *Honolulu Declaration* pada intinya berisikan tiga upaya bersama APEC untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik, yaitu upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan dengan membahas isu-isu perdagangan terkini, meningkatkan fasilitasi perdagangan regional, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah dan lestari bagi lingkungan.

EC telah juga membahas upaya bersama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik di tengah bayang-bayang krisis *Eurozone*. Para Pemimpin 21 Ekonomi APEC juga telah bertukar pikiran mengenai upaya masing-masing untuk memperkuat ekonominya, baik melalui penciptaan lapangan kerja, menempuh langkah-langkah reformasi regulasi dan meningkatan daya saing ekonomi. Pada sesi khusus mengenai pemanfaatan energi secara efisien dan memperkuat keamanan energi, sesuai permintaan Presiden AS selaku Ketua APEC, Presiden RI telah berbagi pengalaman mengenai keberhasilan Indonesia mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan cara konversi minyak tanah ke elpiji, sebagai pelengkap kebijakan untuk terus melakukan diversifikasi energi.

UKM mendapatkan perhatian khusus sepanjang tahun 2011, dengan dibahasnya berbagai upaya konkrit untuk mengatasi hambatan ekspor bagi UKM serta upaya mendorong partisipasi UKM dalam rantai pasokan global. Salah satu kebijakan yang menguntungkan UKM tersebut adalah

kesepakatan untuk memberlakukan *de minimis value* (pembebasan bea dan pajak serta pengurangan persyaratan dokumen masuk bagi pengiriman barang melalui jasa titipan/kurir dan pos bernilai rendah). Nilai *de minimis* tersebut penting bagi perdagangan internasional UKM karena akan membantu mengurangi ongkos pengiriman ke luar negeri bagi pengirim dan penerima paket. Delapan dari 21 ekonomi APEC meningkatkan nilai *de minimis* tersebut menjadi USD 100. Saat ini Indonesia menerapkan *de minimis value* senilai USD 50.

Ketahanan pangan juga mendapatkan perhatian besar dari APEC, dan telah dilakukan pembahasan-pembahasan mendalam tentang cara-cara untuk mengatasi krisis pangan seperti yang kerap terjadi belakangan ini.

Indonesia juga menekankan pentingnya pembahasan mengenai kesiaptanggapan bencana, serta peningkatan kerja sama bidang kelautan *(oceans)* di APEC dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menghadapi perubahan iklim. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri APEC, Menteri Luar Negeri Indonesia secara khusus menyampaikan komitmen bagi penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

Saat ini APEC adalah salah satu forum regional Asia Pasifik terpenting, yang melibatkan pertemuan para Pemimpin, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri lain kawasan Asia Pasifik. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC pada berbagai pertemuan APEC juga merupakan kesempatan untuk melakukan pembahasan-pembahasan masalah bilateral dan regional.

Jumlah penduduk 21 ekonomi APEC mencapai 2,7 milyar, dan APEC menyumbang 54% GDP dunia serta 44% perdagangan dunia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi APEC sejak berdirinya adalah 3,6%, dibanding 2,9% pertumbuhan per tahun di ekonomi-ekonomi non-APEC.

Perdagangan barang APEC dengan dunia meningkat rata-rata 9,1% per tahun sejak 1994, mencapai USD5,6 triliun untuk ekspor dan USD5,8 triliun pada tahun 2007. Perdagangan barang intra-APEC meningkat tiga kali antara 1994 dan *2007.*

Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke kawasan APEC meningkat empat kali lipat antara 1994 dan 2008, tumbuh 13% per tahun, dan mencapai USD791 milyar pada tahun 2008. FDI yang keluar dari ekonomi-ekonomi APEC juga meningkat 13% per tahun, mencapai USD782 milyar tahun 2008.

Tarif rata-rata *most favored nation* (MFN) di APEC turun dari 16,9% tahun 1989 menjadi 6,6% tahun 2008.

APEC mendorong perdagangan dan investasi kawasan melalui sifatnya yang sukarela dan unilateral, sehingga ekonomi-ekonomi APEC secara bersama-sama meningkatkan perdagangan dan investasi.

Bagi Indonesia, APEC membantu mendorong terbukanya pasar ekonomi-ekonomi Asia Pasifik bagi perdagangan Indonesia. Pada tahun 1989, ekspor barang dan jasa Indonesia bernilai USD24.035 juta dan impor USD 21.735 juta, sementara FDI yang masuk Indonesia bernilai USD682 juta (Stats APEC). Pada tahun 2010, ekspor barang dan jasa Indonesia bernilai USD174.748 juta, impor USD164.314 juta (Stats APEC dan FDI yang masuk sekitar USD13 milyar (UNCTAD).

Foto 149. Presiden RI Menyampaikan Pidato dihadapanPengusaha Terkemuka Asia Pasifik di sela-sela KTT ke-19 APEC, Honolulu, 13-14 November 2011

Soal

peranan perempuan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga telah mendapat perhatian besar dari APEC, dan Menteri Luar Negeri memimpin delegasi Indonesia, didampingi Menteri Perdagangan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghadiri *Women and the Economy Summit* tanggal 16 September 2011 di San Francisco. Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri menekankan pentingnya setiap ekonomi melaksanakan kegiatan konkrit guna meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan ekonomi serta melaporkannya pada pertemuan APEC.

Selain hal-hal di atas, Indonesia bersama Amerika Serikat juga telah memprakarsai pembahasan dan mekanisme APEC tentang *illegal logging and associated trade*.

Pada kesempatan menghadiri Pertemuan Puncak APEC di Honolulu tersebut, Presiden RI juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia dan PM Kanada, dan menyampaikan pidato di hadapan pengusaha kawasan Asia Pasifik dalam acara APEC CEO *Summit* tanggal 12 November 2011.

Kegiatan Menteri Luar Negeri terkait APEC adalah:

- *Women and the Economy Summit* di San Francisco, Amerika Serikat, 16 September 2011.
- *APEC Ministerial Meeting*, di Honolulu, Amerika Serikat, 10-11 November 2011.
- *APEC High Level Policy Dialogue on Disaster Resiliency*, di Honolulu, Amerika Serikat, 11 November 2011
- *APEC High Level Policy Dialogue on Open Governance and Economic Growth*, di Honolulu, Amerika Serikat, 11 November 2011
- *Breakfast Meeting* para Menlu APEC untuk membahas arsitektur regional, di Honolulu, Amerika Serikat, 11 November 2011

Di sela-sela rangkaian pertemuan di Honolulu tersebut, Menteri Luar Negeri mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia, Menteri Luar Negeri China, Menteri Luar Negeri Chile, serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

Selain itu, beberapa Pertemuan Tingkat Menteri APEC yang diikuti oleh Indonesia adalah:

- *Ministers Responsible for Trade Meeting* di Big Sky tanggal 19-20 Mei 2011.
- *Ministers Responsible for Trade and Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting* di Big Sky tanggal 20 Mei 2011.

Foto 150. Menlu RI Menjadi Salah Satu Narasumber pada *Women and the Economy Summit* San Fransisco, 13-16 November 2011

- *Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting* di Big Sky tanggal 21 Mei 2011.
- *APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry* di Beijing tanggal 7 September 2011.
- *APEC Transportation and Energy Ministerial Conference* di San Francisco tanggal 13 September 2011.
- *APEC Transportation Ministerial Meeting* di San Francisco tanggal 14 September 2011.
- *APEC Policy Partnership on Women and The Economy* serta *Women and the Economy Summit* di San Francisco tanggal 14-16 September 2011.
- *APEC Finance Ministers Meeting* di Honolulu tanggal 10 November 2011.

Persiapan Indonesia sebagai Ketua dan TuanRumah APEC Tahun 2013

Sebagai bentuk peran aktif dalam memajukan kerja sama di kawasan Asia Pasifik, Indonesia mengajukan

diri dan terpilih menjadi ketua dan tuan rumah APEC pada tahun 2013.

Indonesia akan menjadi tuan rumah dan ketua APEC pada tahun 2013. Kementerian Luar Negeri telah melakukan perencanaan dan berbagai langkah persiapan, guna memastikan kesiapan Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan-tujuan Indonesia di APEC.

Selama semester pertama tahun 2011, Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi di berbagai daerah, dengan cakupan undangan yang meliputi seluruh propinsi Indonesia. Pemerintah telah menentukan bahwa Pertemuan Puncak APEC tahun 2013 akan dilakukan di Bali, namun tuan rumah bagi pertemuan-pertemuan lain sepanjang tahun 2013 belum ditentukan. Kemlu mengharapkan pemerintah daerah akan memanfaatkan tahun tersebut sebagai kesempatan untuk mempromosikan daerahnya, termasuk sebagai tujuan investasi dan pariwisata.

Kemlu juga mendorong kerja sama antara daerah-daerah dalam hal ini. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan sosialisasi dengan dunia usaha.

Kemlu pada saat ini juga tengah merampungkan kerangka peraturan dan rencana anggaran Kemlu bagi seluruh kegiatan tahun 2013 tersebut.

Kemlu telah menyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Pertemuan-Pertemuan APEC 2013. Buku ini ditujukan bagi kementerian sektoral serta pemerintah provinsi/daerah yang akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan APEC 2013, dan berisi antara lain mengenai standar penyelenggaraan pertemuan dan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pacific Islands Forum (PIF)

Indonesia memandang penting hubungannya dengan negara-negara Pasifik Selatan dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan tersebut, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan hubungan dengan semua tetangga Indonesia dan menciptakan kawanan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia dan pembangunan bersama.

Menlu Indonesia berpartisipasi pada pertemuan *PIF Post-Forum Dialogue* ke-23 tanggal 9 September 2011 di Auckland, Selandia Baru. Pertemuan tersebut melibatkan 15 negara anggota PIF (tanpa Fiji) dan 14 negara mitra wicara PIF termasuk Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh World Bank, Asian Development Bank, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertemuan dimaksud membahas dua isu tematik yang menjadi perhatian negara-negara kawasan Pasifik, yaitu: *sustainable economic development* yang terdiri dari tiga sektor kunci yaitu pariwisata, energi dan perikanan, serta *enhancing development cooperation in the Pacific* yang membahas *aid effectiveness* dan *Cairns Compact*.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menyampaikan telah melaksanakan kerja sama peningkatan kapasitas pada sektor pariwisata melalui pelatihan *eco-tourism* yang diselenggarakan pada bulan April 2011 di Yogyakarta. Di bidang konektivitas, Indonesia mengajak negara-negara Pasifik untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan ASEAN. Di bidang perikanan, Indonesia menyatakan siap untuk berbagi pengalaman mengenai kebijakan pengelolaan ikan yang lebih menguntungkan nelayan dan masyarakat pesisir.

Indonesia mencatat bahwa hubungan dan kerja sama dengan kawasan pasifik terus meningkat, termasuk dukungan bagi kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan pembangunan bersama antara Indonesia dan negara kepulauan di Pasifik.

Selain pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri tersebut, Indonesia juga berpartisipasi pada Pertemuan *Pacific Island Countries-Development Partners*, yaitu antara negara-negara PIF dengan mitra pembangunannya. Pertemuan berlangsung tanggal 11-13 Juli 2011 di Nadi, Fiji, dan Indonesia menyampaikaninformasi mengenai program-program yang telah, sedang, dan akan diberikan kepada negara-negara PIF.

Melanesian Spearhead Group (MSG)

Salah satu sub-kawasan utama di Pasifik Selatan adalah Melanesia. Bagi Indonesia, Melanesia bukan hanya kesatuan etnisitas tetapi juga kawasan geografis yang berbatasan

langsung dengan Indonesia, yang penting dari perspektif ekonomi, perhubungan dan konektivitas, serta sosial budaya. Kawasan ini telah mendirikan organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dengan anggota Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Solomon Islands dan FLNKS (*Front de Liberation Nationale Kanak et Socialisté*, organisasi politik etnis Kanak di Kaledonia Baru).

Indonesia menghadiri KTT ke-18 MSG yang diselenggarakan di Suva, Fiji, pada tanggal 31 Maret 2011. Dalam pertemuan tersebut Indonesia dan Timor-Leste diterima sebagai peninjau *(observer)*. Indonesia dan Timor-Leste merupakan negara pertama yang mendapatkan status peninjau pada MSG.

Status tersebut membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan MSG secara keseluruhan maupun dengan anggota-anggotanya. Peningkatan tersebut akan diwujudkan melalui penguatan hubungan ekonomi, perhubungan dan konektivitas, *capacity building*, serta sosial-budaya dan *people-to-people contact.*

Southwest Pacific Dialogue (SWPD)

South West Pacific Dialogue (SWPD) merupakan forum bagi Indonesia, Australia, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor-Leste untuk bertukar pandangan dan informasi atas berbagai isu penting di kawasan.

Pertemuan Tingkat Menteri *South West Pacific Dialogue* diselenggarakan setiap tahun dan Pertemuan ke-9 tahun 2011 diselenggarakan di Bali, 21 Juli 2011, disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN/PMC/ARF/EAS. Pertemuan ini membahas lima isu utama yaitu: *maritime security, humanitarian assistance and disaster relief, counter terrorism, democracy issues*, dan *connectivity*.

Pertemuan menggarisbawahi pentingnya konektivitas antara kawasan Asia Tenggara dengan Pasifik Selatan. Indonesia bermaksud untuk terus memajukan kerja sama konektivitas, termasuk dengan menggambarkan status konektivitas darat, laut dan udara antara kedua kawasan tersebut.

People-to-people contact di antara negara SWPD menjadi bidang kerja sama utama yang difokuskan oleh Indonesia. Melalui kegiatan *cultural and educational cooperation* dan juga *interfaithdialogue*, Indonesia mengembangkan saling pengertian antara masyarakat negara-negara SWPD.

Beberapa kerja sama *people-to-people contact* yang secara rutin ditawarkan oleh Indonesia kepada negara-negara SWPD adalah: Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (*Indonesian Art and Culture Scholarship*); beasiswa Dharmasiswa; beasiswa program kementerian negara berkembang; dan *Diplomatic Training Course for Diplomats*.

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)

Di sela-sela *World Ocean Conference* tahun 2009, Presiden Republik Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin Filipina, Malaysia, Solomon Islands, dan Timor-Leste, yang bersepakat untuk membentuk *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF). Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian kawasan ini, yang menyumbang pada 76% jenis terumbu karang, 37% jenis ikan terumbu karang, 53% jumlah terumbu karang dunia, serta hutan bakau terbesar dunia dan kawasan pembiakan dan pengembangan ikan tuna terbesar di dunia.

Pertemuan Tingkat Menteri ke-3CTI-CFF telah diadakan pada tanggal 28 Oktober 2011 di Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh seluruh menteri dan pejabat tinggi enam negara anggota CTI, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Solomon Islands dan Timor-Leste. Pertemuan juga dihadiri oleh *CTI Partners* yaitu: Australia, Amerika Serikat, *World Wildlife Fund* Indonesia dan Filipina (WWF), *Conservation International* (CI), *the Nature Conservancy* (TNC), *Asian Development Bank* (ADB), *Global Environment Facility* (GEF); serta *CTI Observers,* yaitu: Jepang dan *Coral Triangle Centre* (CTC).

Pertemuan Tingkat Menteri CTI-CFF menghasilkan beberapa keputusan penting, yang utamanya adalah menerima dan menyetujui empat *legal documents* pendirian Sekretariat Regional CTI-CFF yaitu: *Agreement on the Establishment of the Secretariat of CTI-CFF*, *Rules of Procedure, Staff*

Regulations, dan *Financial Regulations.* Dokumen tersebut juga mencakup formula kontribusi dari masing-masing anggota.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut juga diadakan dialog dengan *CTI Partners*, yang kembali menyampaikan komitmen untuk terus mendukung CTI-CFF sebagai mekanisme pemberdayaan dan pemanfaatan lingkungan berkelanjutan sebagaimana komitmen global, termasuk yang diwujudkan melalui *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) tahun 1992.

New Asian African Strategic Partnership (NAASP)

Benua Afrika menempati posisi penting dalam politik luar negeri Indonesia. Selain senantiasa meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika, sarana lain adalah mekanisme *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP).

Agenda utama kerja sama NAASP selama tahun 2011 adalah mengenai arahan masa depan organisasi yang akan ditentukan oleh pelaksanaan KTT ke-2 NAASP, pengembangan kerja sama di delapan bidang fokus, dan implementasi komitmen pembangunan kapasitas Palestina. Bagi NAASP, pelaksanaan KTT ke-2 oleh Afrika Selatan sebagai ketua bersama dari benua Afrika merupakan prioritas utama. Afrika Selatan telah menegaskan kembali niatnya untuk menyelenggarakan KTT dimaksud pada tahun 2012.

Delapan bidang fokus kerja sama dimaksud mencakup *Counter Terrorism; Combating Transnational Organized Crime; Food Security; Energy Security; Small and Medium Enterprises; Tourism; Asian African Development University Network;* serta *Gender Equality and Women Empowerment*. Masing-masing bidang dikembangkan oleh *champion countries* yang berasal dari Asia dan Afrika. Indonesia sendiri adalah *champion country* di bidang penanggulangan terorismebersama-sama dengan Aljazair, dan saat ini tengah menyusun suatu *plan of action* bagi peningkatan kerja sama bidang tersebut.

Dalam mengemban tugas sebagai *Co-Chairs* bersama dengan Afrika Selatan, Indonesia telah berperan aktif mengembangkan NAASP diantaranya melalui pelaksanaan program-program pelatihan di bawah kerangka kerja sama NAASP.

Program pelatihan di bawah kerangka kerja sama NAASP yang telah dilaksanakan oleh Indonesia pada Januari 2011-Juni 2011 adalah:

- *International Training Program on Marine Fisheries for African Countries* pada tanggal 9-14 Mei 2011 dan 23-28 Mei 2011 di Situbondo;
- *International Training Program on Fresh Water Fisheries for African Countries* pada tanggal 23-30 Mei 2011 di Sukabumi.

Adapun jumlah total program yang telah dilaksanakan oleh Indonesia di bawah kerangka kerja sama NAASP dari tahun 2006 – Juni 2011 adalah 26 program.

Afrika merupakan benua yang memiliki aspek stategis bagi kepentingan Indonesia. Dari sisi politik, dukungan suara dari negara-negara Afrika signifikan bagi kepentingan Indonesia terutama dalam Majelis Umum PBB. Sementara itu, dari sisi ekonomi, Afrika

Bandung Spirit Program with Pacific Countries 2011 on Disaster Relief (BSP 2011)

Kementerian Luar Negeri RI, telah menyelenggarakan *BandungSpirit Program with Pacific Countries 2011 on Disaster Relief* (BSP 2011) pada 15-22 Maret 2011 di Manado, Bandung, dan Jakarta. Kegiatan tersebut melibatkan sepuluh peserta dari delapan negara di kawasan Pasifik yaitu: Cook Islands, Fiji, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Timor-Leste, dan Vanuatu.

Pada BSP 2011 ini, tema bidang penanggulangan bencana dan tanggap darurat dipilih mengingat kesamaan geografis dan kerawanan bencana antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Pemilihan tema ini tampak berhasil memberi

Mengenai dukungan NAASP terhadap Palestina, Indonesia telah menggagas *NAASPMinisterial Conference on Capacity Building for Palestine*, di Jakarta, tanggal 14-15 Juli 2008. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, bukan saja secara politis melainkan juga melalui kerja sama teknis berupa pembangunan kapasitas bagi 1000 warga Palestina.

Jumlah keseluruhan program yang telah dilaksanakan oleh Indonesia di bawah program *Capacity Building for Palestine* dari tahun 2008 – Oktober 2011 adalah 47 program pelatihan dan diikuti oleh 235 peserta Palestina dari 52 program yang ditawarkan bagi 321 peserta Palestina.

Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)

Potensi di Samudera Hindia yang perlu dikembangkan masih sangat luas. Disatu sisi, sumber daya yang disediakan Samudera Hindia harus dimanfaatkan bagi pembangunan Indonesia. Di sisi lain, negara-negara di lingkar Samudera Hindia juga memiliki potensi yang belum dimanfaatkan, seperti di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Timu

Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama di Samudera Hindia, termasuk melalui *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC).

Kemlu akan menggunakan pengalamannya di APEC untuk membangun mekanisme kerja sama pembangunan melalui IOR-ARC.

Pertemuan *Council of Ministers* (COM) IOR-ARC ke-11 diadakan tanggal 15 November 2011 di Bengaluru, India dan dihadiri seluruh negara anggota (19 negara), negara mitra dan observer.

Negara-negara IOR-ARC mendiskusikan langkah-langkah yang perlu dilakukan IOR-ARC untuk memperkuat kerja sama di kawasan Samudera Hindia, terutama fasilitasi perdagangan dan investasi, *combating piracy*, pengurangan resiko bencana, perikanan, pendidikan dan riset, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Para Menteri juga menyoroti perlunya IOR-ARC meningkatkan kerja sama menghadapi masalah pembajakan dan perompakan *(piracy)* dari Somalia, yang dipandang sebagai ancaman nyata bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Indonesia mengharapkan agar upaya IOR-ARC pada masalah *piracy* ini akan melengkapi berbagai upaya masyarakat internasional lainnya dan dapat mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang dapat dikembangkan, termasuk dalam hal *capacity building* dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pembahasan juga berkisar mengenai isu *food security, capacity building* serta pertukaran informasi mengenai *best practices* dalam berbagai bidang kerja sama. Para menteri sepakat untuk meningkatkan peran lembaga-lembaga IOR-ARC yang telah terbentuk, yaitu *Maritime Transport Council, Fisheries Support Unit,* serta *Regional Centre for Science and Transfer of Technology*.

Para Menteri sepakat memfokuskan kerja sama IOR-ARC pada enam bidang prioritas, yaitu keamanan dan keselamatan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, pengurangan resiko bencana, kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta promosi pariwisata dan pertukaran budaya.

Pertemuan meresmikan masuknya kembali Seychelles sebagai anggota IOR-ARC yang sempat keluar dari IOR-ARC pada tahun 2003. Pertemuan

juga mengangkat Sekretaris Jenderal IOR-ARC yang baru untuk periode 2012-2014, yaitu Duta Besar C.V. Bhagirath dari India yang menggantikan Duta Besar Morteza Sarmadi dari Iran.

Asia Cooperation Dialogue (ACD)

Diplomasi Indonesia dalam *Asian Cooperation Dialogue* (ACD) melengkapi diplomasi bilateral dan multilateral regional karena forum ini mencakup wilayah Asia secara keseluruhan dan beranggotakan 31 negara. Indonesia memanfaatkan keanggotaannya di ACD untuk menggali potensi besar negara-negara Asia.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-10 ACD di Kuwait pada tanggal 10-11 Oktober 2011, Indonesia mendorong kerja sama bidang ketahanan energi. Hal ini sesuai dengan posisi Indonesia sebagai salah satu *Co-Prime Movers on Energy Security*. Indonesia juga mendorong suatu *Action Plan* diantara negara-negara ACD guna terwujudnya kerja sama ketahanan energi di Asia. Salah satu yang ingin didorong melalui *action plan* tersebut adalah pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dan bahan bakar alternatif.

Forum For East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)

Sejak didirikan secara resmi pada tahun 1999, telah dilaksanakan konferensi tingkat Menteri Luar Negeri negara anggota forum *East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC) sebanyak lima kali, dan yang terakhir di Buenos Aires pada tanggal 24-25 Agustus 2011. KTM ke-5 tersebut dipimpin bersama oleh Menlu RI dan Menlu Argentina sebagai koordinator regional untuk masing-masing kawasan.

Dalam *Retreat Session* tanggal 24 Agustus 2011, Menlu RI yang menjadi ketua sidang menegaskan beberapa hal pokok antara lain: (a) Pembenahan internal dimana FEALAC perlu merevitalisasi *ways and means*, serta mengembangkan *connectivity* melalui peningkatan partisipasi *stakeholders* di luar pemerintahan, seperti dalam *business forum*, dan *People-to-People contact* di bidang edukasi. Dari semua itu hal yang penting adalah adanya *sense of movement* dan bagaimana untuk mencapai *concrete deliverables*. Dalam kaitan ini, Argentina dan Indonesia telah menyiapkan kertas kerja *Revitalization, Enhanced Visibility and Future Direction of FEALAC*, untuk mendukung kinerja FEALAC; (b) Peranan FEALAC pada tingkat global: ada dorongan agar FEALAC sebagai *bi-regional grouping* menjadi lebih relevan dan berperan aktif dalam perubahan tatanan dunia baik di PBB, G20 maupun badan dunia/regional lainnya.

Foto 151. Menteri Luar Negeri RI sebagai Co-chair dalam FEALAC FMM V, Buenos Aires, 24 -25 Agustus 2011

Aires Ministerial Declaration sebagai *outcome document* yang pada pokoknya memuat penguatan mekanisme FEALAC dan pandangan FEALAC mengenai isu-isu regional dan internasional; (b) Kesepakatan pembentukan *Vision Group* untuk membahas strategi dan *future direction* FEALAC; (c) Pengukuhan Honduras dan Suriname sebagai anggota baru FEALAC;

RI dipercayakembaliolehseluruhanggota FEALAC untukmenjadiKoordinator Regional Kawasan Asia Timurperiode 2011 – 2013, pada FEALAC FMM V di Buenos Aires, tanggal 24 – 25 Agustus 2011.

Hasil lain yang cukup penting adalah dipercayakannya kembali Indonesia bersama dengan Kolombia untuk menjadi Koordinator Regional FEALAC periode 2011 – 2013. Karena itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan FMM VI tahun 2013. Terkait FEALAC *Vision Group* yang diharapkan dapat dibentuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimandatkan.

Indonesia telah menunjuk Duta Besar Yuli Mumpuni sebagai wakil Indonesiapada *Vision Group* tersebut.

Sebagai wujud peran aktif dalam FEALAC selama tahun 2011, Indonesia telah melaksanakan beberapa inisiatif antara lain pelaksanaan *The 4thFEALAC Outreach Program* bertema "*Promoting Trade, Tourism, Investment and Education Relations between East Kalimantan Province and FEALAC Member Countries*", bertempat di Balikpapan, Maret 2011 dan *The 5th FEALAC Outreach Program* di Bandung dengan tema "*Preview on Economic and Business in West Java Province*", pada Oktober 2011.

Selain itu, pada 22 – 27 Juli 2011 telah dilaksanakan FEALAC *Journalist Familiarization Trip* bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI ke beberapa daerah antara lain ke Banten, Belitung, Lombok dan Bali. Kegiatan tersebut, yang diikuti oleh tujuh orang wartawan dari negara anggota FEALAC, bertujuan untuk memperkenalkan potensi industri dan investasi pariwisata Indonesia sekaligus membangun *people-to-people contact* dalam kerangka FEALAC.

Asia-Europe Meeting (ASEM)

Sejak pembentukan ASEM (*Asia - Europe Meeting*) tahun 1996 di Bangkok hingga KTT ASEM ke-8 pada 4 – 5 Oktober 2010, di Brussels, Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan ASEM yang terdiri dari tiga pilar : politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Menlu RI pada Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (ASEM FMM 10) di Gődőllő, Hongaria, 6 – 7 Juni 2011, antara lain menyampaikan: (a) perkembangan ASEAN dan kegiatan serta program terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN, (b) perlunya negara-negara mitra ASEM meningkatkan kohesi dan koordinasi di lapangan dalam penanganan bencana, serta (c) kesediaan Indonesia sebagai tuan rumah ASEM *Conference on Counter-Terrorism* bulan Desember 2011 di Yogyakarta dan *The 5th* ASEM *Culture Ministers Meeting* di Yogyakarta tahun 2012.

Atas permintaan negara mitra ASEM, RI menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEM *Counter-terrorism* tanggal 12 – 13 Desember 2011 dengan tema "*Improving Community's Counter-terrorism Initiative*".

Untuk memaksimalkan potensi kerja sama di antara negara anggota ASEM dalam rangka mendukung program MP3EI, telah dilaksanakan ASEM *Partners' Roundtable Discussion on Infrastructure Investment* in Indonesia di Jakarta, pada 22 September 2011. Peserta roundtable tersebut terdiri dari para pemangku kepentingan di bidang energi, transportasi, pekerjaan umum dan pariwisata Indonesia dan negara anggota ASEM. Dalam pembahasan terdapat indikasi keinginan peserta untuk menindaklanjuti dengan penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri ASEM di bidang infrastruktur pada 2013.Indonesia telah menjadi tuan rumah beberapa kegiatan ASEM: (1) ASEM *Occupational Safety and Health* (OSH) *Workshop on National OSH Strategies*, Yogyakarta, 12 – 13 Oktober 2011 yang menyepakati standar keamanan dan kesehatan kerja guna meningkatkan produktivitas dan ekspor, (2) *The 1st Preparatory Senior Official Meeting for the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting*, di Lombok, tanggal 12 – 14 Juli 2011, (3) *Steering Committee Meeting for* ASEM *Language Diversity Forum* di Bali, 28-29 November 2011, dan (4) ASEM *Conference on Counter-terrorism* ke-9 di Yogyakarta, tanggal 12-13 Desember 2011.

Foto 152. Pertemuan Tingkat Menlu ke-10 ASEM , Godollo, Hongaria, 6-7 Juni 2011

KERJA SAMA MULTILATERAL

Sasaran

Pelaksanaan politik luar negeri (polugri) Indonesia dalam kerja sama multilateral ditujukan untuk secara aktif ikut serta mengatasi masalah-masalah global khususnya yang memiliki dampak terhadap kepentingan nasional. Kerja sama multilateral juga ditujukan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah nasional dan regional.

Polugri Indonesia dalam kerja sama multilateral dilakukan melalui peningkatan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerja sama kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan kerja sama internasional di bidang-bidang lainnya yang menjadi kepentingan Indonesia, seperti penanggulangan kejahatan lintas batas negara dan terorisme, peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan, perdagangan, ketahanan pangan dan energi, penanggulangan terhadap tantangan perubahan iklim, serta perlindungan kekayaan budaya milik bangsa Indonesia.

Kerja sama multilateral juga dilakukan untuk mendorong turut terciptanya tata kelola dunia yang adil, seimbang, demokratis, inklusif, serta mendukung kepentingan nasional, termasuk secara aktif memberikan sumbangan bagi upaya reformasi PBB. Lebih lanjut, kerja sama multilateral ditujukan untuk meningkatkan peran dan keterwakilan Indonesia, baik pemerintah maupun individu, dalam keanggotaan/jabatan pada organisasi-organisasi internasional, baik PBB maupun non-PBB.

Pelaksanaan diplomasi multilateral dilakukan melalui partisipasi dalam kelompok kawasan dan berbagai kelompok politik, seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja sama Islam (OKI), G-77 dengan tetap menekankan peran sentral PBB dalam *"global governance".*

Pencapaian kepentingan nasional di fora multilateral juga dilakukan melalui pengembangan kemitraan lintas kawasan dan kelompok politik.

Pelaksanaan diplomasi multilateral dalam satu tahun terakhir telah semakin menegaskan ciri khas Indonesia, antara lain berupa kepemimpinan dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang melalui upaya untuk membangun konsensus, pendekatan kooperatif, menjembatani perbedaan tanpa mengkompromikan kepentingan nasional, menonjolkan *convergence of interests,* konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional, serta memprioritaskan kepentingan negara-negara berkembang secara umum.

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam fora internasional yang memberikan nilai tambah bagi upaya global dalam mengatasi berbagai tantangan telah menaikkan profil Indonesia, yang pada gilirannya menaikan *leverage* Indonesia dalam diplomasi bilateral maupun regional.

V.1 PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA

Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi

Di bidang perlucutan senjata dan non-proliferasi, Indonesia pada tahun 2011 terus memainkan perannya sebagai salah satu negara yang konsisten dalam memajukan perlucutan senjata dan non-proliferasi *(disarmament and non-proliferation),* khususnya senjata pemusnah massal (nuklir, biologi dan kimia), serta isu-isu terkait pengaturan senjata konvensional (arms *control*).

Sejak tahun 1994, Indonesia menjadi Koordinator Kelompok Kerja Negara-Negara Gerakan Non-Blok untuk isu perlucutan senjata. Indonesia terus berperan aktif dalam setiap pertemuan multilateral mengenai perlucutan senjata, baik di forum-forum

PBB maupun forum-forum lainnya, seperti Komite I Majelis Umum PBB di New York yang membahas berbagai isu *International Security and Disarmament; United Nations Disarmament Commission (UNDC)* di New York; dan Konferensi Perlucutan Senjata *(Conference on Disarmament/CD)* di Jenewa. Keketuaan Indonesia pada Pokja GNB tersebut juga terus berlangsung pada berbagai pertemuan *Ad-Hoc* lainnya, baik dalam kerangka kaji ulang dari traktat internasional tertentu *(Review Process)* maupun pertemuan-pertemuan yang membahas berbagai norma internasional baru di bidang perlucutan senjata dan non-proliferasi.

Selain mengkoordinasikan dan merancang posisi bersama negara-negara GNB mengenai isu-isu perlucutan senjata, Indonesia senantiasa menjadi juru runding utama mewakili negara-negara GNB dalam berbagai perundingan dengan kelompok-kelompok lain di luar GNB. Indonesia juga terus melakukan berbagai langkah implementasi nasional berkaitan dengan berbagai traktat/konvensi internasional maupun berbagai kesepakatan regional atau bilateral lainnya di bidang perlucutan senjata dan non-proliferasi yang telah diikuti oleh Indonesia, baik terkait senjata pemusnah massal maupun senjata konvensional.

Berkaitan dengan senjata nuklir, pada tahun 2011, Indonesia turut aktif dalam berbagai proses di dalam maupun di luar kerangka PBB dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai kesepakatan yang telah dicapai di dalam *Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty Review Conference (NPT RevCon)* yang telah berlangsung pada bulan Mei 2010. Indonesia berpendapat bahwa momentum keberhasilan *NPT RevCon 2010* perlu terus dijaga, mengingat *Final Document* yang dihasilkan telah memuat berbagai *action plan* yang disepakati seluruh negara pihak dalam rangka mencapai tujuan NPT, khususnya *general and complete disarmament.* Indonesia selalu menekankan pentingnya prinsip keseimbangan di antara ketiga pilar NPT, yaitu perlucutan senjata, non-proliferasi, serta penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pada tanggal 6 Desember 2011, Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir/*Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT). Ratifikasi ditandai oleh pengesahan RUU tentang CTBT pada Rapat Paripurna DPR RI.

Pengesahan RUU mengenai CTBT ini merupakan amanat konstitusi dan kepentingan nasional Indonesia, serta bukti nyata komitmen Indonesia terhadap upaya terciptanya visi dunia tanpa senjata nuklir.

Dengan ratifikasi CTBT oleh Indonesia, maka jumlah Negara Pihak CTBT saat ini menjadi 156 negara. Dibutuhkan ratifikasi dari delapan negara Annex II lainnya sehingga CTBT dapat berlaku. Delapan negara Annex II yang belum adalah: AS,RRT, India, Pakistan, Korut, Israel, Iran, dan Mesir.

Foto 153.Pidato Menlu RI di Sidang Paripurna DPR RI Pada Saat Ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir/CTBT, Jakarta, 16 Desember 2011

Mengenai isu penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai *(peaceful uses of nuclear energy),* Indonesia selalu menekankan pentingnya seluruh aspek terkait *peaceful uses* tersebut untuk dijalankan secara seimbang, baik dari segi *safeguard*, *safety*, maupun *security*. Indonesia akan terus bekerja sama dengan negara-negara lain terutama dalam konteks *capacity building* di bidang tersebut. Dalam konteks keamanan nuklir *(nuclear security),* Indonesia terus berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tingkat *Sherpa* dan *Sous-Sherpa* mengenai tindak lanjut *Nuclear Security*

Summit (NSS) yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama pada bulan April 2010. Dalam kaitan ini, sejak awal tahun 2011, Indonesia telah ditunjuk menjadi salah satu fasilitator dari topik pembahasan mengenai model *legislation/treaty ratification* terkait *nuclear security.*

Indonesia memberikan perhatian besar pada insiden kerusakan PLTN Fukushima di Jepang pada bulan April 2011 yang menjadikan isu *nuclear safety* mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. Terkait hal ini, Indonesia telah berpartisipasi aktif di dalam *High Level Meeting on Nuclear Safety* yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal *International Atomic Energy Agency (IAEA)* pada tanggal 20-24 Juni 2011, dalam rangka tukar pikiran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat internasional dalam memperkuat aspek keselamatan nuklir *(safety).* Indonesia terus menekankan bahwa isu *nuclear safety* dan *nuclear security* perlu terus ditempatkan dalam konteks yang tepat dan tidak mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari isu lain terkait nuklir yang lebih penting, sebagaimana tercantum di dalam tiga pilar Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir/NPT. Prinsip tersebut juga telah disampaikan pada saat Indonesia berpartisipasi pada pertemuan *High Level Segment on NuclearSafety and Nuclear Security* pada tanggal 22 September 2011 yang diselenggarakan oleh Sekjen PBB.

Berkaitan dengan isu senjata pemusnah massal lainnya, salah satu pertemuan besar terkait isu perlucutan senjata pada tahun 2011 adalah dilangsungkannya Sidang Peninjauan Ulang Konvensi Senjata Biologi *(Biological Weapons Convention Review Conference/BWC RevCon)* pada bulan Desember 2011. Pada pertemuan lima tahunan tersebut, seluruh negara pihak pada BWC melakukan peninjauan mengenai seluruh provisi yang tercantum di dalam BWC terkait dengan berbagai perkembangan saat ini, baik yang terkait dengan aspek *non-proliferation, disarmament* maupun penggunaan berbagai bakteri biologi untuk tujuan yang tidak dilarang oleh konvensi. Di dalam Sidang *Review Conference 2011,* Indonesia menjadi *Chair of the Committee of the Whole* yang merupakan Komite bagi seluruh negara pihak BWC untuk melakukan diskusi substantif mengenai berbagai aspek terkait BWC yang pada akhirnya tercermin pada *outcome document* dari sidang dimaksud.

Khusus mengenai perlucutan senjata non-proliferasi senjata nuklir, Indonesia akan terus mendorong implementasi hasil-hasil dari Sidang *NPT Review Conference 2010.* Tahun 2012 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi isu perlucutan senjata nuklir, dengan dimulainya kembali perputaran *(cycle)* perundingan *review conference* selanjutnya (tahun 2015). Selain itu, *NPT Review Conference 2010* telah memutuskan bahwa seluruh negara anggota NPT mendukung pertemuan tingkat tinggi untuk mendorong penciptaan *Nuclear Weapon Free Zonein the Middle East* pada tahun 2012 yang akan dihadiri oleh seluruh negara di kawasan. Sebagai negara yang selalu menekankan pentingnya terciptanya perdamaian di Timur Tengah, Indonesia menilai bahwa keberhasilan penciptaan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah akan memberikan dampak positif terhadap upaya penciptaan perdamaian dan keamanan di kawasan maupun di dunia internasional.

Pengaturan Senjata Konvensional

Berkaitan dengan pengaturan senjata konvensional, pada prinsipnya, Indonesia mendukung upaya pengaturan senjata konvensional selama hal tersebut tidak mengganggu hak suatu negara untuk untuk menggunakan senjata serta membeli persenjataan yang dibutuhkannya untuk keperluan bela diri *(self defense)* serta untuk menjaga keutuhan integritas teritorialnya. Indonesia senantiasa menjaga hak untuk melakukan pembelian senjata selama hal tersebut dilakukan antar pemerintah *(Government-to-Government)* guna menghindari penyalahgunaan senjata konvensional oleh *non-state actors.*

Salah satu fokus utama dari isu pengaturan senjata konvensional pada tahun 2011 adalah dimulainya proses dialog di antara negara-negara anggota PBB berkaitan dengan Sidang Pendahuluan *(Preparatory Committee Meeting)* dari *United Nations Conference on the Arms Trade Treaty (ATT)* yang berlangsung masing-masing pada bulan Februari

dan Juli 2011 dalam rangka menyiapkan berbagai modalitas terkait dengan konferensi yang akan berlangsung tahun 2012. Melalui ATT tersebut, seluruh anggota PBB diharapkan dapat menyepakati sebuah traktat baru yang akan mengatur secara tegas berbagai isu terkait dengan perdagangan senjata konvensional. Berkaitan dengan ini, mengingat banyak hal yang menjadi concern Indonesia terkait dengan isu perdagangan senjata konvensional, Indonesia terus terlibat aktif di dalam berbagai pertemuan terkait ATT tersebut.

Foto 154. Wakil Tetap Indonesia untuk IAEA pada Konferensi Umum ke-55 IAEA, Wina, Austria, 19 -23 September 2011

Selama tahun 2011, Indonesia telah aktif dalam mengimplementasikan berbagai norma internasional yang telah diikutinya di bidang senjata konvensional, seperti Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti-Personil (Konvensi Ottawa) dan *United Nations Program of Action* mengenai upaya memerangi peredaran senjata ringan dan kaliber kecil (*Small Arms and Light Weapons*). Indonesia juga telah memulai proses ratifikasi Konvensi mengenai bom tandan (*Convention on Cluster Munitions*/CCM) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI pada tahun 2008. Sebagaimana halnya ranjau darat anti-personil, Indonesia menilai bahwa *cluster munitions* juga merupakan senjata yang mengakibatkan dampak kemanusiaan yang besar (*humanitarian consequences*) sehingga patut dilarang penggunaannya.

Peningkatan Peran Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Partisipasi Indonesia di dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB *(Peacekeeping Operations/PKO)* didasari oleh semangat Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea IV, tentang komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen tersebut juga tercerminkan di dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal upaya Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Postur internasional dan diplomasi Indonesia meningkat secara signifikan sejalan dengan partisipasi Indonesia.

Dalam konteks nasional, keterlibatan di dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB bukan saja sebagai bagian dalam menjalankan kewajiban konstitusi, tapi juga sebagai sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran suatu operasi yang dilakukan oleh komunitas internasional melalui PBB. Secara strategis dan ekonomis partisipasi Indonesia tersebut pada gilirannya juga dapat mendorong penggunaan alat-peralatan pada industri-industri strategis Indonesia.

Partisipasi Indonesia dalam PKO yang terdiri dari komponen militer dan polisi, hingga akhir bulan Oktober 2011 adalah sebesar 1.976 personil (29 diantaranya perempuan) atau berada pada peringkat 15 terbesar pengirim pasukan perdamaian PBB *(T/PCCs-Troop/Police Contributing Countries)* yang tersebar di MINUSTAH (177, Haiti), MONUSCO (192, Republik DemokratikKongo), UNAMID (144, Darfur), UNIFIL (1.456, Lebanon), UNMIL (1, Liberia), dan UNMISS (6, Sudan Selatan).

Peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personil, namun juga penambahan *performance unit.* Indonesia telah

mengirimkan korvetnya untuk bergabung dalam *Maritime Task Force (MTF)* UNIFIL yaitu KRI Sultan Iskandar Muda (September 2011). Ini adalah kali ketiga pengiriman KRI setelah KRI Diponegoro (April 2009) dan KRI Kaisiepo (Agustus 2010).

Selain keterlibatan komponen TNI dan Polri, keterlibatan *civilian experts* semakin penting dan sejalan dengan evolusi dan pembahasan mengenai PKO dengan semakin mengemukanya fenomena multidimensional *peacekeeping operations* dan diperlukannya *rapid deployment standards and 'on-call' civilian expertise.*

Sebagai negara terbesar penyumbang kontingen di ASEAN, Pemri juga mendukung peningkatan perhatian ASEAN terhadap peran PKO. Pada tahun ini ASEAN telah menghasilkan *2011 Joint Declaration of the Asean Defence Ministers on Strengthening Defence Cooperation of Asean in The Global Community to Face New Challenges* yang mengadopsi *Concept Paper on the Establishment of ASEAN Peacekeeping Centres Network.* Dokumen ini menegaskan peningkatan kerja sama di antara negara anggota ASEAN, termasuk kerja sama dengan memanfaatkan dan menggunakan *peacekeeping centre* yang saat ini sudah ada untuk melaksanakan perencanaan, pelatihan, dan pertukaran pengalaman PKO dalam pengembangan mekanisme regional pemeliharaan perdamaian dan stabilitas ASEAN.

Sebagai negara penyumbang pasukan dalam PKO, Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan yang membahas isu-isu krusial dalam *peacekeeping* yang semakin bersifat multidimensi. Indonesia juga akan terus mendorong efektifitas PKO yang antara lain dapat dicapai melalui dukungan sumber daya yang memadai sesuai mandat yang diberikan.

Di tingkat nasional, Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam memenuhi permintaan PBB untuk mengirimkan personil di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB, terutama mengingat permintaan PBB yang membutuhkan penggelaran secara cepat. Dalam hal ini, Indonesia sedang mempersiapkan pembentukan *Indonesian Peace and Security Centre* yang merupakan pusat pelatihan untuk empat kegiatan *(4 in 1),* yaitu sebagai *Peacekeeping Centre,* penyiapan *stand by force,* pelatihan *counter terrorism,* dan pelatihan Penanggulangan Bencana Alam.

Penanggulangan Terorisme

Indonesia secara konsisten mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dengan motivasi dan manifestasi apapun, serta menolak upaya pengaitan terorisme dengan ras, agama, atau kelompok etnis tertentu.

Terorisme masih terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat internasional. Negara-negara perlu terus meningkatkan kerja sama, baik di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk mengatasinya. Tantangan yang mengemuka yaitu semakin canggihnya taktik dan modus operandi teroris dalam melaksanakan kejahatannya, serta bagaimana mengatasi masalah terkait *root causes of terrorism* atau kondisi kondusif bagi tumbuhnya terorisme. Indonesia telah beberapa kali menjadi korban serangan teroris, dan senantiasa berupaya menanggulangi kejahatan tersebut.

Dalam langkah-langkah penanggulangan terorisme, Indonesia mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB, dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta melakukan penegakan hukum. Sejak tahun 2001, Indonesia tercatat telah menangkap lebih dari 600 tersangka teroris dan diantaranya telah dibawa ke muka pengadilan, dalam proses investigasi, dijatuhi hukuman, dan dipenjara.

Indonesia memiliki komitmen untuk sepenuhnya mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, utamanya melalui peningkatan kerja sama internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Indonesia memandang penting kerja sama internasional melalui sistem PBB dan mendukung PBB untuk memainkan peranan kunci dalam pemberantasan terorisme internasional yang berlandaskan hukum internasional. Indonesia senantiasa mendukung dan telah memberikan kontribusi bagi upaya-upaya PBB dalam pemberantasan terorisme.

Indonesia telah berperan aktif dalam mendukung PBB dalam rangka implementasi *UN Global Counter Terrorism Strategy*. Indonesia juga telah mengikatkan diri menjadi pihak dalam 7 konvensi

internasional terkait penanggulangan terorisme, dan mengimplementasikan berbagai resolusi PBB terkait penanggulangan terorisme. Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai forum perundingan dan pertemuan di tingkat internasional, termasuk di PBB dan GNB.

Dewasa ini masyarakat internasional telah memberikan penghargaan terhadap komitmen kuat dan upaya-upaya Indonesia, serta terhadap peran kepemimpinan Indonesia dalam mencegah dan memberantas terorisme. Hal ini diantaranya yaitu penunjukan Indonesia sebagai *lead shepherd* isu terorisme di ASEAN dan penunjukan Indonesia menjadi *Co-Chairs South East Asia Working Group Global Counter Terrorism Forum (GCTF)* yang dibentuk bulan September 2011. *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* yang berdiri sejak tahun 2004 juga memainkan peran penting dalam peningkatan *capacity building* di tingkat kawasandan terdapat keinginan sejumlah kalangan untuk menjadikan JCLEC sebagai model bagi negara/kawasan lain untuk membentuk pusat pelatihan serupa.

Di tingkat multilateral, Indonesia telah dipercaya untuk melaksanakan kerja sama teknik dengan badan-badan PBB (seperti *United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*, *UN Counter-Terrorism Implementation Task Force/UNCTITF,*dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate/UNCTED)* dalam rangka penanggulangan terorisme, khususnya di bidang *capacity building,* perbaikan kerangka legislasi nasional,dan implementasi resolusi-resolusi PBB terkait dan kewajiban internasional lainnya. Pada bulan Agustus 2011, Indonesia dan UNODC telah menyepakati kerja sama teknik jangka panjang (periode 2011-2013) di bidang penanggulangan terorisme.

Di tingkat regional, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN telah memiliki *ASEAN Convention on Counter Terrorism*yang mulai berlaku pada bulan Mei 2011. Selain itu, pada saat*ASEAN Summit* di Jakarta, 7-8 Mei 2011 lalu, negara-negara anggota ASEAN juga telah disepakati*Comprehensive Plan on Action on Counter Terrorism* sebagai bentuk komitmen anggota ASEAN dalam upaya pemberantasan terorisme di kawasan.

Kerja sama di tingkat bilateral dan kawasan juga semakin ditingkatkan melalui penandatanganan beberapa perjanjian mengenai pemberantasan terorisme, termasuk dalam bentuk MoU dan perjanjian bilateral serta kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Salah satunya yaitu terkait dengan upaya penguatan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Indonesia melalui*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC/PPATK),* telah menandatangani 43 MoU dengan *Financial Intelligence Units(FIUs)* negara lain.

Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir

Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai Negara Pihak Konvensi Menentang Korupsi/*United Nations against Corruption (UNCAC),* Indonesia telah berperan aktif dalam sejumlah pertemuan yang membahas masalah korupsi baik dalam konteks regional, multilateral maupun pada berbagai forum lainnya.

Selain memperkuat perangkat hukum nasional melalui sejumlah Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi, Indonesia juga telah memiliki Inpres 9/2011 yang diantaranya mendorong adanya implementasi UNCAC di dalam negeri.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk *lead by example* dengan mengajukan diri mengambil bagian dalam mekanisme *review* implementasi UNCAC periode 2010-2011 dengan melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat madani. Dalam proses yang dimulai pada bulan Agustus 2010 sampai akhir 2011 tersebut, Indonesia telah di-*review* oleh pakar dari Inggris dan Uzbekistan mengenai implementasi Bab III tentang kriminalisasi dan Bab IV tentang kerja sama internasional.

Komitmen Indonesia dalam upaya global dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga

ditunjukkan dengan menjadi Wakil Presiden pada Konferensi Negara Pihak UNCAC sesi ke-4 yang telah diselenggarakan di Marrakech, Maroko tanggal 24-28 Oktober 2011. Konferensi tersebut telah menghasilkan sejumlah keputusan penting antara lain mengenai pencegahan korupsi, memperkuat mekanisme review implementasi Konvensi dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pengembalian aset.

Komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi juga diimplentasikan dalam forum kerja sama G20. Pada tahun 2011, Indonesia bersama Perancis menjadi *co-chairs G20 Working Group on Anti-Corruption.* Pokja mengadakan empat kali pertemuan pada tahun 2011 untuk menyusun laporan kepada *G20 leaders* mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara G20 dalam memberantas korupsi, khususnya terkait dengan implementasi *Plan of Action* tentang pemberantasan korupsi yang disepakati di KTT G20 Seoul, Republik Korea, tahun 2010.

Penanganan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang dan *Bali Process*

Indonesia terus berupaya mengatasi persoalan *irregular migration,* khususnya penyelundupan manusia dan perdagangan orang, melalui berbagai mekanisme bilateral, regional maupun multilateral. Pada tingkat regional, *Regional Consultative Process (RCP) on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime,*atau lebih dikenal sebagai *Bali Process,* yang digagas Indonesia pada tahun 2002 terus berjalan di bawah keketuaan bersama Indonesia dan Australia, dalam upaya merumuskan penyelesaian bersama masalah *irregular migration* di kawasan. Aktivitas yang dilakukan dalam kerangka *Bali Process* antara lain meliputi peningkatan kapasitas, pertukaran data, informasi, dan *best practices,* serta kerja sama teknis di bidang keimigrasian.

Pada bulan Maret 2011 Indonesia menjadi tuan rumah *4th Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime (BRMC IV).* Pertemuan tingkat Menteri tersebut menekankan penguatan komitmen negara *Bali Process* dalam penanggulangan permasalahan *irregular migration* di kawasan dan menyepakati dilanjutkannya mekanisme *AdHoc Group.* Selain itu juga disepakati pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan perdagangan orang dengan penekanan pada pendekatan yang berpusat pada perlindungan terhadap korban *(victim-centered approach).*

BRMC IV juga menghasilkan sebuah langkah maju dengan disepakatinya pembentukan sebuah *regional cooperation framework (RCF),* yang sifatnya inklusif namun tidak mengikat, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar-

Foto 155.a Bali regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime (BRMC IV), Bali, 29 – 30 Maret 2011

negara dalam mengurangi *irregular movement* di kawasan. RCF didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu kriminalisasi pelaku kejahatan penyelundupan manusia, mekanisme penetapan status *irregular migrants* yang konsisten, opsi repatriasi dan *resettlement*, pengembalian secara sukarela ke negara asal, dan peningkatan kerja sama pengamanan perbatasan.

Sebagai tindak lanjut BRMC, dilaksanakan pertemuan *Steering Group* dan *Ad Hoc Group* dengan agenda utama pembahasan mengenai operasionalisasi RCF. Kedua pertemuan tersebut menyepakati pembentukan sebuah *Regional Support Office(RSO)* sebagai langkah awal operasionalisasi RCF. Secara umum RSO direkomendasikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. RSO dibentuk untuk memfasilitasi operasionalisasi RCF serta memperkuat kerja sama praktis berkaitan dengan (1) perlindungan pengungsi dan migrasi internasional yang antara lain mencakup penyelundupan manusia dan perdagangan orang; dan (2) manajemen perbatasan dan manajemen migrasi di kawasan Asia Pasifik.
2. RSO akan menjadi *focal point* untuk kegiatan-kegiatan: (1) pertukaran informasi mengenai perlindungan pengungsi dan migrasi internasional; (2) peningkatan kapasitas dan pertukaran *best practices;* (3) pengumpulan sumber daya teknis; dan (4) dukungan logistik, administratif, operasional, dan koordinasi untuk kegiatan-kegiatan bersama.
3. RSO akan beroperasi di bawah arahan dan kendali *Co-Chairs* dan berkonsultasi dengan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan *International Organization for Migration (IOM)*. Petunjuk operasional ditetapkan oleh *Co-Chairs* berkonsultasi dengan *Steering Group.*

Saat ini proses negosiasi pembentukan RSO tengah berjalan. Pada tingkat nasional juga tengah dilakukan koordinasi untuk menentukan bentuk kontribusi Indonesia tehadap RSO.

Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkoba

Indonesia memegang prinsip pendekatan berimbang antara *supply and demand reduction* secara komprehensif dan terintegrasi dalam penanggulangan peredaran obat terlarang pada tataran global. Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai*shared responsibility.* Indonesia senantiasa siap untuk bekerja sama baik pada tataran bilateral, regional, dan multilateral dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Sepanjang tahun 2011, pada tingkat multilateral khususnya pada Komisi Narkoba *(Commission on Narcotic Drugs/CND)* sesi ke-54 dan Pertemuan *Heads of Drug Law EnforcementAgency (HONLEA)* kawasan Asia Pasifik, Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk mengedepankan pembahasan isu-isu yang dipandang penting seperti penanganan obat-obatan sintetik khususnya *amphetamine-type stimulants.*

Di tingkat regional, Indonesia terus menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Chief of National Police (ASEANAPOL),ASEAN Senior Official on Drugs (ASOD),* dan *ASEAN-China Coordinating Operation Response on Dangerous Drugs (ACCORD).* Indonesia juga telah menyerukan kepada negara-negara anggota ARF untuk memperkuat mekanisme kontrol atas prekursor kimia. Secara regional, ASEAN secara progresif mencanangkan *Drug-Free ASEAN 2015* dan secara nasional Indonesia mencanangkan Indonesia Bebas Narkoba 2015, yang secara resmi diresmikan oleh Presiden Indonesia pada Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni 2011.

Kejahatan Lintas Negara

Pemerintah Indonesia terus mempertegas komitmennya untuk ikut serta dalam upaya global mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara terorganisir yang semakin berkembang pada abad ke-21.

Sebagai Negara Pihak pada Konvensi *Transnational Organized Crime (TOC),* Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dengan menjadi salah satu Wakil

Presiden Konferensi Negara Pihak UNCTOC mewakili Kelompok Asia sejak Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2013. Di sepanjang tahun 2011, Indonesia telah berpartisipasi pada berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral untuk mendiskusikan upaya-upaya bersama menghadapi tantangan global non-tradisional yang bentuknya semakin beragam. Kejahatan pencucian uang *(money laundering),* perdagangan gelap benda/cagar budaya, kejahatan lingkungan termasuk pembalakan liar *(illegal logging),* perdagangan gelap tanaman dan satwa liar, dan *cybercrime* merupakan bentuk-bentuk baru kejahatan lintas negara terorganisir yang semakin marak berkembang dan memerlukan komitmen maupun kerja sama internasional yang terpadu dan efektif. Sesuai kepentingan nasional, Indonesia secara konsisten mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap produk kehutanan termasuk satwa liar dan ikan/hasil laut.

Khusus mengenai*cybercrime,* perkembangan teknologi informasi dan internet telah 'melahirkan' berbagai kejahatan baru yang digolongkan sebagai *cybercrime,* seperti *carding* (penggunaan kartu kredit orang lain), *hacking* (penjebolan situs *web*), *internet pornography,* pemalsuan domain, penyadapan email, *cyber-terrorism*, dan sebagainya. Dalam sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana sesi ke-20 bulan April 2011, Indonesia telah menjadi salah satu panelis yang mengedepankan keperluan perlindungan dampak *cybercrime* terhadap anak-anak.

Indonesia dipandang sebagai pemimpin di kawasan Asia dalam konteks implementasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) maupun implementasi Konvensi TOC. Kepemimpinan Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui capaian di dalam negeri dalam mengimplementasikan kedua Konvensi tersebut, namun juga ditunjukkan dengan peran aktif Indonesia sebagai Wakil Presiden pada Biro Konferensi Para Pihak kedua Konvensi. Posisi Indonesia dijabat sampai tahun 2012 dan 2013 dan karena itu peran aktif Indonesia perlu terus dipertahankan.

V.2 PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kerja sama ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup sepanjang tahun 2011 dilatarbelakangi dengan berbagai tantangan yang muncul beberapa tahun sebelumnya, terutama rentannya pemulihan ekonomi akibat tantangan fiskal di negara maju, turunnya kepercayaan pasar atas krisis di *Eurozone*, resiko *hard landing* di *emerging market*, serta *global imbalance* yang tetap tinggi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun pada tahun 2011 dari 4,4% menjadi 4% dan pada tahun 2012 dari 4,5% menjadi 4%.

Konsolidasi fiskal yang telah berjalan di negara-negara maju belum diikuti dengan *private (domestic) demand*. Selain itu, negara-negara maju menghadapi defisit neraca berjalan, tingkat pengangguran dan *sovereign debt* yang tinggi. Sementara tantangan yang dihadapi *emerging markets* mencakup resiko *overheating* dan memburuknya stabilitas sektor keuangan. Di sisi lain, meningkatnya harga komoditi dan energi masih menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi, baik di negara maju dan *emerging economies.*

Di tengah situasi perekonomian global yang masih rentan, Indonesia memandang penting perlunya terus menjaga situasi makro ekonomi yang sehat sehingga memiliki ketahanan tinggi. Selanjutnya, mengingat dampak dari krisis ekonomi di Eropa terhadap Indonesia, melalui G20 Indonesia telah mendorong adanya *immediate solution* terhadap krisis Eropa dan menghindari *status quo* yang menimbulkan ketidakpastian melalui *strong concerted policy action* untuk memulihkan dan menyeimbangkan perekonomian global.

Indonesia terus mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, khususnya *World Bank* dan IMF, guna meningkatkan legitimasi, kredibilitas, efektifitas, dan mencerminkan perubahan konstelasi ekonomi global. Dalam konteks *global governance*, hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pembuatan keputusan dan norma-norma dalam kerangka *Bretton Woods Institutions (BWIs).* Indonesia juga mendorong agar resolusi *International Financial Institutions (IFIs)*

merefleksikan penguatan peran PBB, khususnya ECOSOC, sebagai forum utama pembahasan permasalahan ekonomi dan sosial global dalam *global economic governance*.

Pada sidang sesi substantif ECOSOC di Jenewa, 4 – 28 Juli 2011, negara-negara kembali sepakat akan perlunya reformasi ECOSOC untuk memberikan peran yang lebih besar kepada PBB dalam *global economic governance* dan untuk memobilisasi dana pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan perlunya reformasi dan penguatan tata kelola ekonomi global yang telah ada agar lebih efisien, efektif dan transparan melalui penguatan peran PBB khususnya ECOSOC. Dalam hal ini, diperlukan reformasi mekanisme ECOSOC untuk meningkatkan koherensi dan koordinasi antara kebijakan dan implementasi, serta untuk memperkuat fungsi ECOSOC sebagai koordinator antara berbagai kerangka formal dan informal, dan antara berbagai aktor dalam tata kelola ekonomi global. Indonesia juga mendorong untuk meningkatkan dialog konsultatif regular antara PBB, G20, dan *Bretton Woods institutions* (IMF, *World Bank*, dan WTO), serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara ECOSOC dengan kelompok regional dalam penanganan isu ekonomi global, pencapaian MDGs, dan pembangunan berkelanjutan.

Perdagangan Internasional

Menyadari bahwa perdagangan internasional merupakan *engine* bagi pertumbuhan ekonomi, Indonesia terus berupaya mendorong agar perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) *World Trade Organization* (WTO) dapat segera diselesaikan. Penyelesaian DDA diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia, sambil tetap memperhatikan dimensi pembangunan yang menjadi kepentingan negara berkembang pada umumnya dalam membangun industri dan pertanian dalam negeri.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam proses perundingan intensif yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2010 dengan target dapat diselesaikannya perundingan DDA yang telah berlangsung sejak tahun 2001. Dalam proses tersebut Indonesia tetap memperjuangkan adanya fleksibilitas *(special and differential treatment)* bagi negara berkembang dalam berbagai isu perundingan seperti: pertanian, jasa, produk industri, dan sebagainya.

Khusus dalam perundingan pertanian, selaku koordinator Kelompok G-33, Indonesia terus memperjuangkan diterimanya fleksibilitas *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) bagi negara berkembang. Melalui dua instrumen tersebut, negara berkembang akan memiliki *policy space* untuk membatasi impor dan melindungi petani kecilnya dalam rangka *food security, livelihood security and rural development*.

Target perampungan negosiasi pada akhir tahun 2011 masih sulit dicapai. Perbedaan pandangan yang tajam antara negara maju dan *emerging economies* (khususnya Brazil, China dan India) berkaitan dengan besarnya akses pasar yang harus disumbangkan oleh *emerging economies* tersebut menjadi faktor utama kebuntuan. Dalam kaitan ini, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-8 WTO diadakan tanggal 15-17 Desember 2011 untuk menyusun *roadmap* ke depan perundingan DDA. Indonesia senantiasa mendorong agar perundingan DDA dapat diselesaikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai forum multilateral, seperti G20 dan APEC.

MDGs

Millenium Development Goals (MDGs) bukan saja menjadi bagian dari upaya pembangunan menyeluruh Indonesia namun juga telah menjadi konsideran penting dalam formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, Indonesia terus memainkan peran aktifnya dalam memajukan kerja sama internasional terkait pencapaian MDGs.

Terkait pencapaian MDGs tersebut, kebijakan yang dilaksanakan di tingkat global dan kawasan dilandaskan pada prinsip-prinsip:

1. Aktifitas dan sistem ekonomi global yang *pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-sustainable development;*

2. Penguatan komitmen dunia dalam menghadapi masalah kemiskinan serta kebijakan mendukung pembangunan negara-negara miskin dan berkembang;
3. Mendorong terciptanya *effective global aid architecture* yang mengedepankan *national ownership, alignment with national development strategy and priorities,* dan mampu meningkatkan kapasitas negara penerima;
4. Menciptakan strategi global untuk keberlanjutan pencapaian MDGs setelah 2015 dengan menciptakan pertumbuhan global yang kuat, berimbang dan berkelanjutan dan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

Tantangan hingga pencapaian MDGs 2015 antara lain adanya *gap* pencapaian MDGs dalam negara dan antar negara, dalam kawasan dan antar kawasan serta antar tujuan MDGs, dan berkurangnya sumber pendanaan untuk pembangunan serta berkurangnya lapangan kerja.

Dalam berbagai sidang yang dilakukan dalam kerangka PBB, Indonesia terus mendorong negara-negara untuk tetap fokus pada komitmen pencapaian MDGs antara lain melalui kerja sama peningkatan kapasitas negara berkembang, komitmen negara-negara maju untuk memenuhi Konsensus Monterrey, serta mendorong pendanaan MDGs dengan memanfaatkan mobilisasi sumber-sumber dana publik and *private* melalui berbagai skema *innovative financing for development*.

Indonesia terus memanfaatkan berbagai kerangka multilateral yang ditujukan untuk pencapaian MDGs, terutama MDGs kesehatan yang pencapaiannya paling terbelakang dibanding pencapaian MDGs lainnya. Dengan latar belakang tersebut, Indonesia memaksimalkan proses dalam kerangka *Network of Global Leaders* dan *Foreign Policy and Global Health (FPGH)* untuk memajukan kemitraan global dalam mempercepat pencapaian MDGs dalam bidang kesehatan. Hal ini telah mendorong lahirnya komitmen tertinggi yang pernah dicatat dunia untuk pendanaan MDG 4 dan 5.

Peran aktif politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan pembangunan kesehatan global tercermin dengan jelas dengan ditunjuknya Menteri Luar Negeri RI sebagai anggota *Commission on Information and Accountability for Women's and Children's Health* bersama dengan 25 menteri negara lainnya. Komisi ini dibentuk pada pertemuan *plenary* tingkat tinggi mengenai MDGs di New York, September 2010. Komisi diharapkan dapat mempercepat capaian MDGs tentang kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan akuntabilitas dan respon negara anggota dan mitra internasional secara lebih transparan.

Selaku anggota Komisi, Menteri Luar Negeri RI, pada pertemuan *World Health Assembly (WHA)* bulan Mei 2011, telah menyampaikan masukannya yang dimuat dalam laporan akhir Komisi tersebut, antara lain:

1. Perlunya integrasi peran dan fungsi berbagai institusi dalam mengelola data kesehatan untuk menyediakan informasi yang terbaik bagi penyusunan kebijakan yang tepat terkait kesehatan Ibu dan Anak;
2. Pentingnya peran pendidikan dalam peningkatan kualitas kesehatan;
3. Perlunya kejelasan mengenai siapa anggota *Independent Review Group* serta peran dan fungsinya;
4. Perlunya kerangka waktu yang jelas dalam implementasi *framework* guna mendukung percepatan pencapaian MDGs pada tahun 2015. Indonesia juga mulai membahas target-target paska 2015 yang disesuaikan dengan perubahan tantangan pembangunan, yang bersifat berkesinambungan dengan capaian-capaian MDGs yang telah diraih.

Terkait dengan upaya pencapaian MDG 4 dan 5 yang terkait dengan kesehatan, Sekjen PBB telah mencanangkan Strategi Global untuk Kesehatan Ibu dan Anak *("Every Woman, Every Child").* Indonesia telah dipilih menjadi salah satu model di bidang ini yang ditandai dengan program kunjungan Sekjen PBB di beberapa fasilitas kesehatan ibu dan anak di Palangkaraya dan Denpasar bulan November 2011.

Ketahanan Pangan

Selama tiga tahun terakhir ini terjadi bencana kelaparan di berbagai pelosok dunia akibat ketidaktersediaan pasokan pangan yang cukup. Isu ancaman ketahanan pangan mengemuka dan menjadi salah satu agenda global yang mendapatkan perhatian utama dunia akibat terjadinya pertambahan penduduk dunia secara signifikan, meningkatnya harga bahan pangan, penggunaan lahan pangan sebagai sumber energi baru, penurunan produksi pertanian akibat gangguan perubahan iklim, serta menurunnya kesejahteraan sebagian masyarakat dunia, terutama di negara-negara berkembang.

PBB telah melakukan langkah strategis dengan menyusun *Comprehensive Framework of Action (CFA)* oleh *High Level Task Force on Food Security (HLTF)* di bawah kendali langsung Sekjen PBB. Langkah ini diikuti oleh berbagai inisiatif kerja sama ketahanan pangan pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti G-20, G-8, D-8 dan ASEAN. Puncak dari kegiatan tersebut adalah diselenggarakannya *World Summit on Food Security* pada bulan November 2009 yang menyepakati *Declaration of the World Summit on Food Security*, antara lain mencakup *The Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security* yang pada intinya menetapkan komitmen dan kesepakatan aksi bersama.

Sejak awal bergulirnya pembahasan isu ketahanan pangan global, Indonesia telah memainkan peranan yang cukup penting baik di dalam kerangka PBB maupun di forum multilateral lain. Sebagai anggota G-20, Indonesia memprakarsai penyusunan *Ministerial Declaration on Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture* pada Pertemuan Tingkat Menteri G-20 di bulan Juni 2011. *Action Plan* tersebut bertujuan untuk mencapai 4 (empat) tujuan utama yaitu: (1) meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, (2) melakukan transparansi terkait informasi pasar produk pangan dan pertanian, (3) memperkuat koordinasi pengambilan kebijakan di tingkat internasional, (4) membangun manajemen resiko pada tingkat pemerintahan, pengusaha dan petani, (5) dan memperbaiki kinerja bursa komoditi pertanian sebagai salah satu upaya menahan gejolak harga produk pangan dan pertanian.

Arah diplomasi Indonesia di bidang ketahanan pangan global difokuskan kepada: (1) pencapaian tujuan MDGs sekaligus mendukung Protokol Pangan Nasional yang pada intinya adalah peningkatan investasi di bidang pertanian, penyediaan skema *social safety net* bagi masyarakat paling rentan, pembentukan cadangan pangan global, dan sistem informasi pangan berkelanjutan, (2) penguatan tata kelola global yang antara lain melalui reformasi di tubuh FAO khususnya *Committee on World Food Security* (CFS), (3) pentingnya realisasi komitmen *Official Development Assistance (ODA)* oleh negara donor, khususnya yang disepakati di L'Aquila sebesar USD20 milyar untuk 3 tahun, dan (4) mengingat keterkaitan yang erat antara ketahan pangan dan perubahan iklim, perlu adanya jaminan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim mendapatkan dukungan penuh semua pihak.

Upaya-upaya di tingkat global tersebut juga dilengkapi upaya-upaya memperkuat ketahan pangan di tingkat regional, khususnya dalam kerangka kerja sama ASEAN Plus Three. Dalam kaitan ini negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Plus Three telah menyepakati *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves* (APTERR).

Ketahanan Energi

Menghadapi semakin menipisnya cadangan energi dunia, Indonesia memandang penting untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat internasional dalam upaya untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam kerangka kemitraan dan kerja sama internasional di bidang pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), penggunaan energi alternatif, dan efisiensi energi. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menjadi anggota *International Energy Agency* (IEA) dan *International Renewable Energy Agency* (IRENA). Dan Indonesia bergabung menjadi anggota *International Energy Forum* (IEF) pada pertemuan *Extraordinary IEF*

Ministerial Meeting di Riyadh pada tanggal 22 Februari 2011.

Partisipasi Indonesia juga digiatkan dalam pembahasan energi di forum-forum kerja sama seperti G-20, APEC, ASEAN dan FEALAC.

Pandemi

Indonesia bersama negara-negara sehaluan telah memainkan peran sentral dalam memperjuangkan keputusan WHO mengenai penyelesaian *Pandemic Influenza Preparedness (*PIP*) Framework* dengan disahkannya PIPpada sidang *World Health Assembly* (WHA) ke-64 di Jenewa, 16-24 Mei 2011. Pengesahan ini menjadi bukti keberhasilan inisiatif *Foreign Policy and Global Health* (FPGH), yang tidak hanya berhasil mengubah mekanisme yang ada di WHO, tetapi juga berhasil mengubah cara pandang terkait upaya perjuangan mencapai kesehatan global yang berkeadilan. Dengan PIP diharapkan adanya *mutual trust* di antara negara-negara kunci yang terdiri atas negara berkembang dan negara maju agar *framework* yang dihasilkan dapat mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan kesetaraan, dan terjaminnya penggunaan *Standard Material Transfer Agreement* sebagai dokumen resmi bagi pelaksanaan *virus sharing* di antara *WHO Network*.

Lebih lanjut, semua pihak tidak diperbolehkan mengklaim HAKI dari materi biologis PIP dan bagiannya yang ditransfer dari *WHO Global Influenza Surveillance and Response System (WHO GISRS).*

Di samping itu, guna menjamin ketersediaan obat-obatan dengan harga terjangkau, Indonesia sebagai negara anggota WTO telah menyepakati amandemen Persetujuan *Trade-Related Intellectual Property Rights* (TRIPS) atau *Protocol Amending the TRIPS Agreement*. Amandemen ini memberikan kemudahan kepada negara anggota untuk mengekspor atau mengimpor produk obat-obatan yang dibuat di bawah lisensi wajib (*compulsory licensing*). Untuk itu, Indonesia pada bulan Oktober 2011 telah menyampaikan notifikasi penerimaan Indonesia atas protokol dimaksud.

Perlindungan Warisan Dunia Takbenda

Dalam upaya untuk melindungi aset budaya sebagai kekayaan budaya nasional, Indonesia memaksimalkan keanggotaannya di UNESCO, khususnya di Komite Antar-Pemerintah Warisan Dunia Takbenda *(Intergovernmental Committee on the Intangible Cultural Heritage/ICH)*. Dalam hal ini, Indonesia berhasil mendaftarkan sejumlah warisan budaya nasional untuk mendapatkan pengakuan, seperti batik, angklung, wayang, dan keris. Pada pertemuan ICH di Bali pada tanggal 22-29 November 2011, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan atas tari saman sebagai salah satu warisan budaya dunia takbenda.

Sebagai wujud perhatian Pemerintah Indonesia atas peran UNESCO dalam melindungi keanekaragaman budaya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah hadir dalam Sidang Umum ke-36 UNESCO di Paris dan menyampaikan pidato pada acara *Thematic Debate/Leaders' Forum UNESCO on 10th Years of Commemoration of the Declaration of Cultural Diversity* pada tanggal 2 November 2011.

Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Indonesia berperan aktif dalam pembahasan isu pembangunan berkelanjutan di forum internasional, seperti pada pertemuan *19th Session of the Commission on Sustainable Development* (CSD-19) di New York, 2-13 Mei 2011. Pertemuan ini membahas isu-isu tematik, yaitu *transport, chemicals, waste management, mining*, *sustainable consumption and production* (SCP) dan *cross-cutting issues.*

Dalam rangka persiapan Sidang *United Nations Conference on Sustainable Development*/Rio+20, di Rio de Janeiro, 20-22 Juni 2012, Indonesia berkontribusi dalam pembahasan mengenai isu pembangunan berkelanjutan dan *review* terhadap Agenda 21, *Programme for the Further Implementation of Agenda 21* and *the Johannesburg Plan of Implementation* (JPOI). Konferensi tersebut mempunyai dua tema besar, yaitu: (i) *green economy in the context of*

sustainable development and poverty eradication; dan (ii) *institutional framework for sustainable development.*

Terkait dengan *green economy,* Indonesia mendukung konsep ekonomi hijau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*sustainabledevelopment*) dan menegaskan pentingnya pengembangan konsep ekonomi hijau dengan memajukan prinsip *pro-development*, *pro-job, pro-poor* dan *pro-environment* serta berdasarkan prinsip *sustainability* dan *equity.*

Mengingat tema *institutional framework* belum banyak dibahas apabila dibandingkan dengan isu *green economy*. Indonesia telah berupaya memberikan kontribusi terhadap pembahasan isu kerangka institusi bagi pembangunan berkelanjutan, dengan mengadakan *High-Level Dialogue on the Institutional Framework for Sustainable Development* (HLD-IFSD), di Solo, 19-21 Juli 2011.

HLD-IFSD berhasil merumuskan "*Solo Message*", yang memuat konvergensi pandangan yang muncul pada saat Dialog yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan dan pentingnya untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam implementasi;
2. Integrasi dan koordinasi antara tiga pilar pembangunan berkelanjutan;
3. Adanya organisasi internasional yang dapat meningkatkan proses integrasi tiga pilar pembangunan berkelanjutan;
4. Dukungan lebih lanjut bagi rencana pembangunan berkelanjutan nasional;
5. Penguatan UNEP;
6. Pengkajian kembali pemerintahan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, dan regional; dan

Pendanaan tambahan dan baru untuk mendukung *technology transfer* dan *capacity building*

Perubahan Iklim

Dalam upaya memajukan proses perundingan di bidang perubahan iklim, Indonesia akan senantiasa mendorong berbagai pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan COP-17/CMP-7 *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 28 November – 9 Desember 2011 guna menghasilkan sesuatu yang bermakna (*meaningful outcome*) sesuai mandat Bali *Action Plan* dan Bali *Roadmap* yang mencakup isu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, pendanaan dan *shared vision*.

Delegasi RI telah mengikuti Pertemuan para Pihak (COP) ke-17 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) serta Pertemuan para Pihak untuk Protokol Kyoto (CMP) ke-7 di Durban, Afrika Selatan, tanggal 28 November-9 Desember 2011. Agenda utama pertemuan dimaksud membahas kelanjutan Protokol Kyoto sebagai rejim hukum pengurangan emisi global, penyelesaian mandat *Bali Action Plan*, serta membahas operasionalisasi mekanisme yang disetujui dalam *Cancun Agreement*.

Konferensi telah menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain (i) menyepakati Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto yang akan dimulai 1 Januari 2013 dan berakhir tahun 2017 atau tahun 2020 (tergantung hasil pembahasan tahun depan); (ii) perpanjangan masa kerja AWG-LCA selama satu tahun hingga pertemuan Perubahan Iklim PBB ke-18 (COP-18 UNFCCC), tahun 2012 di Doha, Qatar, untuk menyelesaikan seluruh *agreed outcome* yang dimandatkan dalam *Bali Action Plan*, termasuk tindak lanjut keputusan-keputusan COP 16 dan COP 17; (iii) memutuskan pembentukan *Ad-hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action* (AWG-DPA), untuk membahas modalitas rejim perubahan iklim paska 2020 dalam bentuk *protocol, another legal instrument,* atau *agreed outcome with legal force* di bawah UNFCCC; (iv) Konferensi juga mensyahkan beberapa keputusan penting lainnya yaitu, operasionalisasi pendanaan iklim jangka panjang melalui *Green Climate Fund, Adaptation Committee* serta mekanisme transfer teknologi melalui *Technology Executive Committee dan Climate Technology Center and Network* (CTCN).

Selama tahun 2011, Indonesia ikut aktif menyumbangkan pemikiran untuk mengimplementasikan *Bali Action Plan* dan *Bali Road Map* yang diputuskan pada waktu Konferensi ke-13 UNFCCC di Bali, Desember 2007. Dalam hal ini, Indonesia telah terlibat aktif dalam pertemuan *Adhoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP)* dan *Adhoc Working Group on Longterm Cooperative Action (AWG-LCA)* yang telah dilaksanakan di Bangkok, Bonn, Panama, dan Meksiko, guna membahas substansi berbagai isu yang diangkat pada pertemuan COP-17/CMP-7.

Pada tanggal 28 November - 9 Desember 2011, delegasi RI telah mengikuti Pertemuan para Pihak (COP) ke-17 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) serta Pertemuan para Pihak untuk Protokol Kyoto (CMP) ke-7 di Durban, Afrika Selatan. Pertemuan dimaksud merupakan kelanjutan dari Pertemuan COP-16/CMP-6 UNFCCC Cancun, Meksiko dengan agenda utama membahas operasionalisasi mekanisme yang disetujui dalam Cancun Agreement, penyelesaian mandat Bali Action Plan, serta kelanjutan Protokol Kyoto sebagai rejim hukum pengurangan emisi global.

Konferensi telah menghasilkan Paket Durban (Durban Platform) yang mengadopsi tiga dokumen dan memutuskan pembentukan rezim baru pasca-Protokol Kyoto. Para pihak UNFCCC sepakat untuk melanjutkan Periode Komitmen Protokol Kyoto ke tahap kedua. Rejim selanjutnya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) global akan dibahas mulai COP-18 di Qatar dan dimandatkan untuk dapat selesai pada tahun 2015. Selain itu, Durban telah menghasilkan keputusan tentang operasionalisasi pendanaan iklim jangka panjang melalui *Green Climate Fund*, serta mekanisme transfer teknologi melalui *Technology Executive Committee* dan *Climate Technology Center and Network* (CTC&N).

Pertemuan Durban ini terfokus pada pembahasan rejim perubahan iklim pasca-2012, khususnya komitmen negara-negara maju untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai tindak lanjut periode komitmen pertama Protokol Kyoto. Indonesia bersikap terbuka terhadap pembahasan *legally binding instrument* sebagai *agreed outcome* dari proses AWG-LCA. Indonesia memandang perlu mandat baru yang membahas tidak hanya *legal form* tapi juga *legal substance* dari hasil AWG-LCA, dengan catatan negara maju yang tergabung dalam *Annex 1* Protokol Kyoto bersedia mewujudkan komitmen kedua Protokol Kyoto.

Didasari upaya global untuk mengatasi masalah perubahan iklim, Indonesia telah menandatangani *Manila Declaration on Green Industry* yang dicetuskan oleh UNIDO untuk mendorong terwujudnya industri yang ramah lingkungan. Dalam kerangka ini, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional "Industri Hijau Untuk Masa Depan Yang Ekonomis dan Berkelanjutan" di Yogyakarta pada tanggal 10 November 2011. Seminar ini juga bertujuan untuk membahas optimalisasi peran UNIDO di Indonesia. Kerja sama Indonesia dengan UNIDO tertuang dalam "*UNIDO New Country Programme (NCP) for the Republic of Indonesia 2009-2013*", dengan 10 program pembangunan bernilai USD 26,9 juta.

Keanekaragaman Hayati

Konferensi Para Pihak ke-10 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP 10 CBD) tahun 2010 di Nagoya telah mengadopsi sebuah protokol yang mengatur akses dan pembagian keuntungan (ABS) secara adil dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Protokol yang dikenal dengan nama Protokol Nagoya ini mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak asing harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu - atau dikenal dengan '*Prior Informed Consent*' (PIC) - dari negara pemilik. Selain itu, pemanfaatannya harus berdasarkan kesepakatan kontrak tertulis yang disebut dengan *Mutually Agreed Terms* (MAT).

Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya di Markas Besar PBB, New York, tanggal 11 Mei 2011 dan sedang melakukan persiapan untuk ratifikasi.

Di samping dibahas dalam forum *Convention on Biodiversity* (CBD), masalah perlindungan keanekaragaman hayati juga dilakukan di forum WTO (*Council for TRIPS*) dan WIPO (*Inter-*

Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/IGC-GRTKF). Upaya diplomasi di kedua forum tersebut ditujukan untuk terciptanya rejim hukum internasional yang mengikat dan efektif dalam melindungi keanekaragaman hayati (serta pengetahuan tradisional dan *folklore*) dari penyalahgunaan (*missapropriation*) dan pencurian (*biopiracy*).

Dalam konteks WTO, Indonesia bersama negara berkembang lainnya menyampaikan proposal amandemen Persetujuan TRIPS pada bulan April 2011. Proposal tersebut pada intinya menambahkan klausul *disclosure requirement* (kewajiban untuk mengungkapkan sumber/asal) sumber daya genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional (PT) oleh *applicant* paten yang invensinya menggunakan SDG dan PT.

Dalam kerangka WIPO, Indonesia bersama-sama negara berkembang lainnya berhasil mendorong perpanjangan mandat IGC-GRTKF pada Sidang Majelis Umum WIPO bulan September 2011. Mandat baru tersebut disertai dengan kerangka waktu yang jelas persidangan IGC-GRTKF dengan target keputusan untuk mengadakan *diplomatic conference* untuk finalisasi persetujuan dapat diputuskan pada tahun 2012. Di samping itu, Indonesia juga menyampaikan proposal teks yang merupakan hasil pertemuan *Like Minded Countries* di Bali pada bulan Juni 2011.

Isu Lingkungan Hidup Lainnya

Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Hidup Generasi Muda

Dalam rangka menanamkan kesadaran dan peran aktif pemuda terhadap lingkungan hidup, Indonesia dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) telah menyelenggarakan *Tunza International Youth and Children Conference* 2011 dengan tema *Reshaping Our Future Through A Green Economy and Sustainable Lifestyle* di Bandung, 27 September – 1 Oktober 2011. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 delegasi anak-anak dan pemuda dari 118 negara.

Konferensi menghasilkan *The Voice of Children and Youth*sebagaiDeklarasi Bandung untuk disampaikan pada Pertemuan *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD)*/Rio+20* di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012. Deklarasi tersebut berisikanvisi pemuda dan anak-anak terhadap pembangunan berkelanjutan dan *green economy*; pernyataan komitmen pemuda dan anak-anak untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan; dan seruan bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mewujudkan *green economy* dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Penanggulangan Penggurunan

Dalam kesempatan pertemuan COP 10 *United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)* di Republik Korea pada tanggal 10-21 Oktober 2011, Indonesia telah menyampaikan kebijakan nasional untuk menanggulangi degradasi lahan yang melibatkan masyarakat, antara lain kampanye Indonesia Menanam, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, *One Man One Tree*, dan *One Billion Trees for the World*. Indonesia menggarisbawahi bahwa upaya menyelesaikan masalah degradasi lahan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Perlindungan Lapisan Ozon

Menghadapi semakin menipisnya lapisan ozon yang menjadi perhatian masyarakat internasional, Indonesia memandang penting untuk ikut di dalam upaya-upaya global untuk melindungi lapisan ozon.

Upaya untuk melindungi lapisan ozon tersebut dibahas di dalam forum *Conference of the Parties (COP) to Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer* dan *Meeting of the Parties (MOP) to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer*. Dalam hal ini, Indonesia telah memfasilitasi pembahasan tersebut dengan menjadi tuan rumah pertemuan COP 9 dan MOP 23 di Bali tanggal 21-25 November 2011.

Dalam pertemuan ini, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan antara negara-negara maju dan berkembang dalam transisi ke arah

alternatif terhadap Bahan Perusak Ozon (BPO) yang memiliki potensi pemanasan global rendahmelalui ditetapkannya Deklarasi Bali yang didukung oleh 94 negara.

Pelestarian dan Pemanfaatan Lahan Basah

Dalam rangka upaya pelestarian lahan basah dan upaya menggali manfaat ekonomi lahan basah. Indonesia telah menjadi tuan rumah *Preparatory COP* untuk kawasan regional Asia di Jakarta pada tanggal 14-18 November 2011.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat Ramsar telah menyampaikan sertifikat penetapan Pulau Rambut di Kepulauan Seribu sebagai *Ramsar Site*. Dengan demikian Indonesia telah memiliki 6 *Ramsar Site* yaitu: Pulau Rambut (Jakarta), Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Berbak (Jambi), Wasur (Papua), Sembilang (Sumatera Selatan), dan Rawa Aopa Watumohai (Sulawesi Tenggara).

Pelestarian Kawasan Delta

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *World Delta Summit (WDS)* di Jakarta pada tanggal 21-24 November 2011 dengan tema *the pulse of deltas and the fate of our civilization*. Pertemuan ini didasarkan keprihatinan atas semakin memburuknya ekosistem di kawasan delta, pada sisi lain, jika kawasan delta tersebut dikelola dengan baik akan menyumbang pada pelestarian lingkungan dan menggerakkan potensi ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pertemuan telah merekomendasikan mengenai pentingnya kawasan delta untuk mendapatkan perhatian pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas.

Perlindungan Sumber Daya Hayati, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional

Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) atau *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) adalah rezim baru (*sui generis*) yang mencoba memberikan perlindungan atas kekayaan budaya (berupa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional) dan sumber daya alam (berupa Sumber Daya Genetik) suatu bangsa atau kelompok masyarakat adat dalam konteks hak kekayaan intelektual. Kemunculan rezim ini dilatarbelakangi oleh isu 'ketidakadilan' yang dirasakan kelompok masyarakat adat, *indigenous people* dan juga negara-negara berkembang terhadap eksploitasi dan pemanfaatan GRTKF oleh negara maju secara berlebihan dan tidak adil.

Permasalahan muncul ketika tidak ada satupun instrumen-instrumen hukum internasional yang dapat menyentuh langsung kepada rezim HKI. Hal tersebut menjadi sangat krusial mengingat eksploitasi dan pemanfaatan GRTKF banyak mengarah kepada komersialisasi GRTKF yang umumnya dilindungi oleh rezim HKI (paten, hak cipta dan merek). Di pihak lain, *Convention on Biodiversity* dan Protokol Nagoya memang mengatur mengenai akses dan pembagian hasil atas penggunaan *genetic resources*, namun pengaturan tetap belum dapat menjangkau rezim HKI dimana komersialisasi *genetic resources* paling banyak terjadi. Sementara UNESCO Convention on ICH lebih bersifat normatif dan tetap belum dapat memberikan perlindungan yang cukup.

Isu GRTKF sendiri mulai dibahas dalam World Intellectual Property Rights WIPO sejak dibentuknya *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (**IGC-GRTKF**) pada akhir tahun 2000. Namun demikian, perbedaan yang tajam antara negara maju dan negara berkembang menghambat penyelesaian *text-based negotiation*.

Diplomasi Indonesia

Didasarkan atas kondisi tersebut di atas, serta mengingat keanekaragaman budaya di Indonesia dan posisi Indonesia sebagai negara pemilik sumber daya genetik (SDG) terbesar kedua di dunia setelah Brazil, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan upaya diplomasi aktif untuk memperjuangkan perlindungan GRTKF di forum-forum multilateral tersebut di atas. Indonesia juga aktif menjadi *leading country* dalam forum IGC-GRTKF dengan penyelenggaraan *Like Minded Countries Meeting* (LMCM) 1 pada bulan November 2009 dan LMCM 2 pada bulan Juni 2011 di Bali. Pertemuan LMCM

bertujuan untuk menyamakan posisi negara-negara sepaham (*like-minded*) pada pembahasan isu GRTKF di forum WIPO.

Pertemuan LMCM 2 tersebut juga dimaksudkan untuk mempertahankan momentum kepemimpinan Indonesia dalam perundingan-perundingan GRTKF di fora internasional. LMCM 2 dimaksud dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara sepaham (Algeria, Angola, Bangladesh, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Myanmar, Namibia, Pakistan, Peru, South Africa, Tanzania, Thailand, dan Zimbabwe serta 3 organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah, yaitu *WIPO Secretariat, South Centre* dan *International Centre for Trade and Sustainable Development* (ICTSD).

Pertemuan telah berhasil menyatukan pandangan dan posisi bersama di antara negara-negara *like-minded* dalam rangka menghadapi negosiasi berbasis teks lanjutan pada pertemuan WIPO IGC 19. Telah disepakati pula posisi bersama untuk mendorong IGC-19 WIPO melalui Sidang Majelis Umum WIPO pada bulan September 2011 menyetujui penyelenggaraan *Diplomatic Conference* pada tahun 2013 guna mengesahkan *draft legal texts* perlindungan GRTKF menjadi suatu *international legal instrument(s).* Kesatuan pandangan dan posisi bersama LMCs tersebut tersurat dalam bentuk *Bali Recommendations to Advance the Work of WIPO to Establish an International Legal Instrument(s) on the Effective Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (Folklore)* dan 3 (tiga) rumusan *Draft Text*, masing-masing mengenai *Traditional Knowledge (TK), Traditional Cultural Expressions (TCEs)* atau *Folklore* dan *Genetic Resources (GR*).

Pada pertemuan WIPO IGC-19, dokumen-dokumen tersebut kemudian disepakati negara-negara untuk menjadi *working documents (WIPO/GRTKF/IC/19/8, 8 July 2011)* yang akan digunakan pada pembahasan teks (*text based negotiation*) di sesi IGC berikutnya.

Upaya menjembatani untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya percepatan pembentukan instrumen internasional perlindungan GRTKF melalui penyelenggaraan LMCM 2 oleh Indonesia, dinilai sebagai forum yang tepat dan mendukung diplomasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pemilik GRTKF terbesar di dunia dan berkepentingan untuk mendorong terwujudnya instrumen internasional perlindungan GRTKF yang efektif.

V.3 KERJA SAMA HAM INTERNASIONAL

Indonesia telah berhasil untuk terus meningkatkan profilnya dalam diplomasi multilateral di bidang Hak Asasi Manusia. Selama tahun 2011, Indonesia terus meningkatkan sumbangannya dalam upaya global bagi pemajuan dan perlindungan HAM, serta merefleksikan secara lebih memadai dan lebih bernuansa berbagai perkembangan Hak Asasi Manusia di tanah air dalam posisi Indonesia mengenai berbagai hal yang dibahas di forum multilateral.

Pengakuan masyarakat internasional atas peran Indonesia di forum global mengenai hak asasi manusia tercermin sangat nyata pada saat pemungutan suara untuk keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2011-2014. Indonesia telah memperoleh suara dukungan tertinggi di antara calon-calon yang terpilih lainnya, yaitu 184 suara.

Indonesia telah meningkatkan kerja sama kemitraan dengan berbagai delegasi negara-negara anggota PBB dalam berbagai prakarsa. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan salah satu negara kunci dalam memajukan sejumlah isu antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat secara damai, dan isu hak asasi manusia yang terkait dengan perkembangan media sosial/ internet.

Di lain pihak, Indonesia terus menunjukkan konsistensi dalam memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang di bidang HAM. Isu-isu ini antara lain adalah mengenai perlunya pengutamaan pendekatan dialogis dan kerja sama dalam pemajuan dan perlindungan HAM secara global, pemajuan hak untuk pembangunan, serta mengenai perlunya perhatian yang seimbang bagi pemajuan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan posisinya yang progresif di bidang hak-hak sipil dan politik, serta konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara

berkembang, Indonesia memiliki posisi yang unik untuk memainkan peran menjembatani dalam pembahasan isu-isu HAM yang sulit di forum multilateral. Peran sebagai *bridge builder* ini semakin menonjol antara lain untuk isu mengenai penistaan agama yang terkait dengan kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, Indonesia telah memainkan peran penting dalam melahirkan suatu resolusi yang memiliki nilai praktis yang tinggi dalam upaya memerangi diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama, yaitu melalui resolusi *Combating Intolerance, Negative Stereotyping and Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence and Violence Againts, Persons Bases on Religion or Belief* yang disahkan pada Sidang Sesi ke-16 Dewan HAM, bulan Maret 2011.

Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dalam pembahasan hak asasi manusia di forum multilateral. Selama tahun 2011, Indonesia menjadi sponsor berbagai resolusi di Dewan HAM dan Majelis Umum PBB yang memiliki dampak bagi peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran. Secara khusus Indonesia bersama-sama Filipina memprakarsai resolusi di Majelis Umum mengenai perlindungan tenaga kerja migran wanita.

Indonesia terus meninjau ulang dan melakukan penyesuaian posisi mengenai berbagai isu HAM yang menyangkut situasi di negara-negara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari tahun ke tahun baik di Dewan HAM maupun di Majelis Umum, berdasarkan semangat konstruktif untuk pemajuan dan perlindungan HAM. Pendekatan yang sama juga diterapkan oleh Indonesia dalam menyikapi perkembangan situasi HAM di negara tertentu yang mendapat perhatian khusus baik di Dewan HAM maupun di Majelis umum PBB.

Indonesia juga telah berhasil memainkan peran yang penting dalam pembentukan suatu Komisi HAM yang permanen dan independen dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) bulan Juni 2011. Komisi HAM ini diharapkan dapat menyumbang bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kalangan umat Islam, terutama di negara-negara anggota. Seorang ahli yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia telah terpilih menjadi salah satu dari 18 anggota Komisi HAM OKI tersebut.

Indonesia juga telah membuat kemajuan berarti dalam memperkuat kerangka nasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM, terutama dengan mengintegrasikan norma dan standar internasional dalam sistem nasional.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011. Langkah ratifikasi ini telah meletakkan dasar baru dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif, inklusif dan didasarkan pada prinsip bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek yang dapat secara penuh dan setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersosial dan bernegara.

Indonesia juga telah merampungkan proses persiapan ratifikasi untuk *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak-hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak); *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak-hak Anak

Foto 156.Menlu RI Menerima *UN Special Envoy for Myanmar,* H.E Vijay K. Nambiar di Jakarta

mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata); *Convention on the Protection of the Human Rights of Migrant Workers and Their Families* (Konvensi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Pekerja Migran dan Keluarganya); dan *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Indonesia juga telah membuat kemajuan dalam melaksanakan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia lainnya. Salah satu kewajiban sebagai negara pihak adalah penyampaian laporan periodik terkait implementasi berbagai ketentuan dari instrumen-instrumen HAM tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan kepada badan traktat terkait laporan inisial dan periodik pertama Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan laporan inisial dan Periodik pertama Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sementara itu, Pemri juga tengah mempersiapkan Laporan Periodik ke 4, 5, dan 6 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.

Pelaksanaan diplomasi Indonesia di bidang HAM dan pelaksanaan kewajiban internasional di bidang HAM di Indonesia selalu melibatkan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga independen yang bergerak di bidang hak asasi manusia maupun masyarakat madani.

V.4 PENANGANAN BENCANA ALAM GLOBAL

Indonesia selalu berperan aktif dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penanganan bencana alam dan situasi kemanusiaan. Sebagai negara yang sering mengalami bencana alam dalam berbagai bentuk dan skala, upaya dan kepemimpinan Pemri telah banyak dirujuk oleh komunitas penanggulangan bencana di tingkat internasional. Indonesia menjadi salah satu model sukses penanganan bencana alam, baik di tataran kebijakan pemerintah, maupun di tataran operasional. Apresiasi tinggi atas peran Indonesia tersebut tercermin dalam peran Indonesia sebagai tuan rumah berbagai forum internasional yang telah diselenggarakan antara lain:

1) *International SAR Expo*, Jakarta, 16-19 Februari 2011
2) *ARF Disaster Relief Excercise (ARF Direx) di Manado, April 2011*
3) *International SAR Forum (19-20 Juli 2011) dan INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) Asia Pacific Regional Group Meeting, 21-22 Juli 2011*
4) *5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR), tahun 2012*

Indonesia telah secara aktif ikut serta dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sama global maupun regional untuk penanganan bencana, termasuk mengembangkan kerangka baru yang melibatkan antara lain pelaku usaha/ pihak swasta.

Indonesia selalu berperan aktif dalam kerja sama internasional terkait isu penanganan bencana alam dan situasi kemanusiaan. Pengalaman Indonesia telah menjadi model sukses penangangan bencana alam, baik di tatanan kebijakan maupun operasional. Komitmen dan capaian Indonesia di bidang ini memperoleh pengakuan tertinggi di tingkat internasional dengan pemberian *Global Champion for Disaster Risk Reduction* kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di sela-sela KTT ASEAN-UN pada tanggal 19 November 2011.

Indonesia juga telah dipilih menjadi salah satu *pilot project* dari program *Global Pulse,* yang merupakan suatu inisiatif kantor *Executive Office of the UN Secretary General* guna menindaklanjuti permintaan Presiden RI atas terdapatnya kebutuhan suatu data terpercaya dan *real-time* guna mendukung pengambilan kebijakan, terutama di masa krisis. Finalisasi pengembangan Pulse Lab di Indonesia telah mulai dilakukan pada bulan November 2011 dengan bekerja sama dengan Tim *Global Pulse* PBB.

V.5 LAIN-LAIN

Reformasi PBB

Indonesia terus terlibat aktif dalam upaya reformasi tata kelola dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk meningkatkan efektifitas dan lebih demokratis dalam pengambilan keputusan, serta lebih memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang.

Indonesia terus mendukung upaya revitalisasi Majelis Umum PBB sebagai badan yang universal dan demokratis, memberdayakan ECOSOC sebagai badan utama PBB untuk kerja sama ekonomi, sosial dan budaya, mereformasi Dewan Keamanan agar lebih demokratis dan efektif, serta memperkuat mekanisme PBB di bidang HAM.

Sebagai salah satu organ penting PBB, Dewan Keamanan saat ini dipandang tidak lagi menunjukkan keterwakilan dari negara-negara anggota PBB dan perlu direformasi untuk menjawab berbagai tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang semakin kompleks.

Sepanjang tahun 2011, negara-negara anggota PBB terus melanjutkan upaya reformasi Dewan Keamanan PBB melalui *informal negotiations* di *Informal General Assembly Plenary,* yang difokuskan pada lima isu kunci yaitu kategori keanggotaan; veto; keterwakilan kawasan; jumlah perluasan dan metode kerja; dan hubungan antara SMU PBB dan DK PBB. Pada bulan Maret 2011, Fasilitator Negosiasi telah mengeluarkan teks kompilasi yang berisi usulan dari negara-negara anggota mengenai lima isu kunci termasuk usulan Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi perundingan selanjutnya.

Mengingat kompleksnya pembahasan reformasi DK, saat ini belum terdapat kesepakatan yang dapat menjembatani perbedaan pandangan yang tajam di antara negara-negara anggota. Dalam kaitan ini, beberapa negara kunci telah berupaya mengadakan pertemuan informal guna mengidentifikasi upaya-upaya kompromi yang dapat dilakukan untuk memecah kebuntuan. Indonesia telah diundang dan terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan terbatas tersebut yang diselenggarakan di Roma, Mexico City, dan Tokyo. Selain pertemuan tersebut. Indonesia juga telah diminta oleh Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-65 untuk menjadi anggota *Friends of President on the UN SC Reform di New York*.

Indonesia berpandangan bahwa DK PBB harus semakin representatif, transparan, efektif, dan *accountable.* Untuk itu Indonesia selalu berpartisipasi aktif dan mendorong upaya reformasi DK PBB yang komprehensif. Dalam berbagai pertemuan, Indonesia mendorong pembahasan *intermediate approach* yang dapat menjembatani perbedaan di antara negara-negara anggota. Indonesia juga terus menekankan agar setiap negara dapat menunjukkan fleksibilitas dan merumuskan usulan yang dapat diterima oleh mayoritas negara anggota PBB.

Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam berbagai forum untuk mendorong upaya reformasi DK PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia mendorong pembahasan *intermediate approach* untuk menjadi jalan tengah dan menjadi titik kompromi di antara negara-negara anggota PBB.

Di bidang HAM, Indonesia aktif berpartisipasi dan memberikan sumbangan dalam proses tinjau ulang Dewan HAM yang berlangsung hingga akhir paruh pertama tahun 2011. Indonesia telah ikut memberikan arah pembahasan hingga tercapai kesepakatan untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas berbagai aspek fungsi dan operasional Dewan HAM setelah 5 tahun dibentuk. Secara khusus, Indonesia memberikan perhatian pada peningkatan efektifitas mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) untuk mengkaji dan memberikan forum dialog mengenai kinerja setiap Negara anggota PBB di bidang HAM berdasarkan prinsip kesetaraan dan kerja sama. Indonesia berkepentingan agar Dewan HAM sebagai mekanisme antar pemerintah tetap memberikan ruang bagi konsultasi dan partisipasi para pemangku kepentingan lainnya, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang disepakati sebagai dasar pembentukan Dewan HAM melalui resolusi Majelis Umum 60/251 tahun 2006.

Indonesia terus mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi badan, program dan *fund* PBB melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan operasional (*System Wide Coherence*).

G20

Sebagai anggota G20, Indonesia terus mengedepankan pendekatan konstruktif dalam pembahasan isu di G20, terutama dalam menjaga semangat G20 yang mendorong kemitraan dan berorientasi solusi. Indonesia terus menjaga karakteristik dasar G20 sebagai *the premier forum for international economic cooperation*. Peran Indonesia dalam setiap KTT G20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan dan berimbang.

Peran aktif Indonesia di G20 menjadi penting karena G20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen polugri guna mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.

Prioritas utama dalam forum-forum G20 difokuskan pada beberapa isu prioritas, yaitu:

1. Penanganan krisis keuangan
2. Ketahanan pangan dan energi
3. Agenda Pembangunan

Melalui *Communique* yang dihasilkan *G20 Summit* di Cannes, Perancis, 3-4 November 2011, para pemimpin dunia menegaskan komitmen untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas finansial, mengedepankan *social inclusion* dan menjadikan globalisasi menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan KTT G20 di Cannes tersebut, Presiden RI menyampaikan keyakinan bahwa negara-negara Eropa akan dapat menyelesaikan masalah di *Eurozone*. Selain itu, Presiden RI juga menekankan isu *food security*, investasi sektor pertanian dan juga peningkatan penelitian dan pengembangan yang penting dalam meningkatkan produktifitas. Presiden RI menyampaikan pentingnya *supply* dan *demand* pangan menjadi perhatian global. Kerja sama internasional untuk pencapaian *food security* dalam kerangka G20 juga harus didukung kerja sama yang melibatkan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN.

Dalam penanganan G20 di Indonesia, Kemlu berperan sebagai koordinator penanganan isu-isu non-keuangan. Pada 2011, Indonesia menjadi *co-chair* bersama Perancis untuk Kelompok Kerja Anti-Korupsi yang membahas tindak lanjut *Anti-Corruption Action Plan* untuk memperkuat rejim Anti-Korupsi di bawah payung UNCAC. Bekerja sama dengan OECD, Indonesia juga menyelenggarakan *International Conference on Foreign Bribery in International Business Transactions*di Bali pada Mei 2011, *back-to-back* dengan *Anti-Corruption Working Group*. Indonesia juga menjadi *co-facilitator* dalam Kelompok Kerja Pembangunan untuk pilar *growth with resilience* khususnya isu *social protection*.

Foto 157. Pres... Summit, Cannes, 2-4 November 2011

Forest-11

ndonesia terus memanfaatkan forum kerja sama *Tropical Rainforest Countries/Forest Eleven* (F-11) yang dibentuk atas dasar inisiatif Presiden RI di sela-sela *High Level Event on Climate Change* di New York tanggal 24 September 2007, untuk

meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang efektif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Foto 158.Pertemuan Tingkat Menteri F-11, New York, 22 September 2011

Pada 6-10 Juni 2011, telah diselenggarakan *F-11 Workshop* di Lombok dengan tema *Social Forestry and Its Role in Climate Change Mitigation and Adaptation* yangbertujuan untuk berbagi *best practices, lesson learned,* dan kebijakan negara-negara anggota F-11 terkait konservasi hutan dan perannya dalam mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, di sela-sela SMU PBB di New York, 22 September 2011, telah diselenggarakan pertemuan F-11 pada tingkat menteri.

Dalam rangka mensinergikan dan mengkaji ulang kerja sama di bidang hutan tropis, telah disepakati penyelenggaraan KTT F-11, di sela-sela pertemuan *Rio+20* pada bulan Juni 2012*,* yang sekaligus untuk memperingati lima tahun berdirinya F-11.

Gerakan Non Blok (GNB)

Indonesia berhasil mendapat apresiasi dari berbagai negara yang hadir pada Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non Blok (GNB) di Bali, pada tanggal 23 – 27 Mei 2011. Sebagai salah satu negara perintis berdirinya GNB, Indonesia menyampaikan dorongan peran aktif negara anggota GNB untuk dapat menempatkan GNB secara strategis dalam konteks kekinian, dengan dukungan semangat inklusivitas dan kemitraan yang tinggi sebagai bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan global. Hal ini dilatarbelakangi adanya perubahan *international governance* sehingga GNB dengan keanggotaan 60% dari negara-negara anggota PBB memiliki potensi besar untuk dapat mewakili kepentingan negara berkembang.

Foto 159. Presiden RI dan Menlu RI bersama dengan Delegasi Peserta seusai Upacara Pembukaan KTM ke-16 GNB, Bali, 23-27 Mei 2011

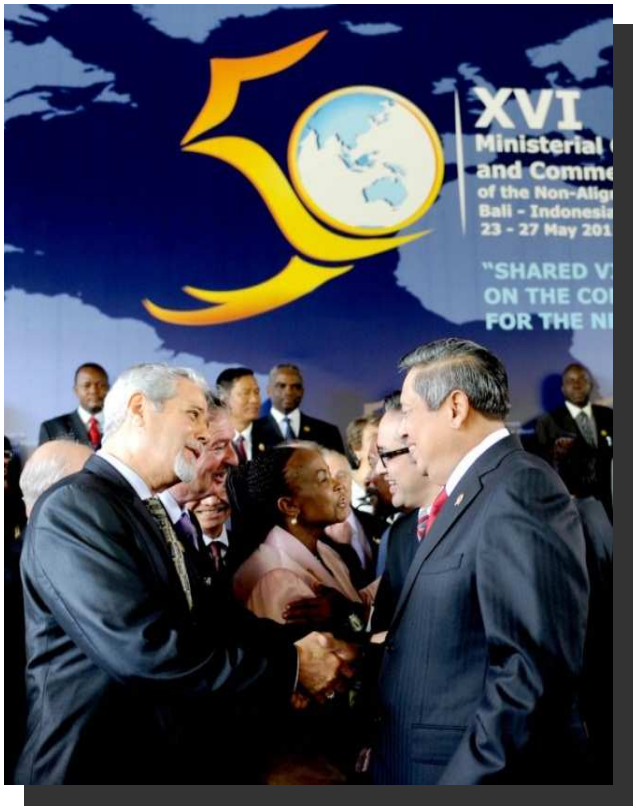

Beberapa hasil-hasil utama KTM ke-16 GNB, adalah:

1. Penegasan kembali relevansi GNB dalam tatanan internasional melalui pengukuhan keanggotaan Azerbaijan dan Fiji;
2. Penguatan komitmen negara-negara anggota GNB terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan menyambut rekonsiliasi faksi-faksi Palestina sebagai langkah maju yang sangat diperlukan dalam penuntasan isu Palestina secara menyeluruh dan adil melalui

pembahasan dan pengesahan Deklarasi mengenai Palestina dan Deklarasi mengenai Tahanan Politik Palestina;

3. Dokumen Final yang melakukan *review* atas implementasi hasil-hasil KTT GNB di Sharm-El-Sheikh, Mesir, dan pemutakhiran sikap dan pandangan negara GNB dalam berbagai isu internasional yang menjadi perhatian bersama;
4. *Bali Commemorative Declaration* atau Deklarasi Peringatan Bali yang memberikan pesan politik terkait peringatan 50 tahun GNB dengan mencanangkan visi GNB ke depan guna menjadi kekuatan bagi perdamaian, keadilan dan kemakmuran; serta
5. Pernyataan tentang Penghapusan Total Senjata Nuklir, yang mendorong terealisasinya konferensi internasional tingkat tinggi untuk mencari cara (*ways and means*) guna menghapus senjata nuklir.

Foto 160. Menlu RI Menyampaikan *Remarks* pada Perayaan ke-50 GNB, Beograd, 5 September 2011

Selain penyelenggaraan konferensi tersebut, guna memaknai momen khusus peringatan 50 tahun GNB pada KTM GNB ini, Indonesia menuangkan perjalanan GNB sejak berdiri pada tahun 1971 hingga kini dalam bentuk pameran perjalanan 50 tahun GNB, serta pemutaran video 50 tahun GNB, yang kemudian akan diabadikan di Museum Konferensi Asia Afrika - Bandung.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia senantiasa berpartisipasi aktif dalam OKI dengan tujuan akhir untuk mendorong proses *good governance* di dunia Islam untuk menjadikan OKI sebagai organisasi yang kredibel, kompeten, dan diakui perannya di dunia internasional, mengingat potensi OKI sebagai kendaraan untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri RI.

Indonesia secara politis terus menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi dalam setiap pertemuan, sebagaimana pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) ke-37 OKI di Dushanbe tahun 2010, KTM ke-38 OKI di Astana tahun 2011, serta pada pertemuan luar biasa tingkat menteri OKI atas isu-isu khusus yang perlu mendapat perhatian segera OKI. Seperti, pada pertemuan khusus OKI guna membahas mengenai kasus Kapal kemanusiaan *Mavi Marmara* pada bulan Juni 2010, kehadiran Menteri Luar Negeri RI dimaksudkan

untuk memperkuat peran OKI dalam menekan Israel melalui berbagai fora dan mendorong adanya investigasi internasional terhadap tindakan Israel. Juga, pada akhir bulan November 2011, Wakil Menteri Luar Negeri RI telah menghadiri pertemuan khusus OKI yang membahas krisis di Suriah.

OKI merupakan suatu forum yang sangat strategis dalam memperjuangkan kepentingan negara anggotanya, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa proses revitalisasi OKI yang tengah berjalan saat ini tetap merupakan hal yang mendesak dalam menghadapi tantangan global. Untuk itu Indonesia senantiasa mendukung inisiatif yang tengah dilakukan guna efisiensi dan efektivitas OKI. Indonesia berpandangan bahwa proses revitalisasi menyeluruh OKI harus membawa manfaat pada:

Foto 161. Konferensi Tingkat Menteri ke-38 OKI, Astana, 28 Juni 2011

1. Implementasi dan langkah-langkah konkrit atas resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh OKI;
2. Peningkatan daya tanggap OKI dalam menjawab tantangan dan isu-isu yang menjadi perhatian umat Islam;
3. Kegiatan-kegiatan nyata organ subsider OKI yang mengacu pada kebutuhan negara-negara anggotanya; dan
4. Peningkatan kerja sama antar negara-negara anggota OKI.

Peran Indonesia yang paling menonjol dalam OKI sebagai Ketua *Organization Islamic CooperationPeace Committee for the Southern Philippines* (PCSP-OIC) adalah dalam rangka memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF). Proses untuk mnegimplementasikan secara penuh*Final Peace Agreement*/Perjanjian Damai 1996 telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kemajuan tersebut dicatat dalam salah satu resolusi yang disahkan pada KTM ke-38 OKI.

Terkait dengan isu Palestina dan konflik Palestina-Israel dewasa ini, Indonesia sangat memberikan perhatian terhadap upaya untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam hal ini, senantiasa Indonesia mendukung OKI untuk secara konsisten mengeluarkan resolusi-resolusi yang terkait isu konflik Palestina-Israel. Disamping itu, dalam membantu rakyat Palestina, Indonesia juga telah memberikan prioritas pada pengembangan *capacity building* bagi rakyat palestina pembangunan sosial, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur dan keuangan untuk periode 2008-2013.

Lebih lanjut, Indonesia adalah anggota dari *Al-Quds (Jerusalem) Committee* bersama dengan 16 negara OKI lainnya (Maroko, Saudi Arabia, Jordania, Irak, Suriah, Palestina, Lebanon, Mauritania, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Iran, Senegal, Niger, dan Guinea). Komite ini bertujuan untuk: (a) menindaklanjuti implementasi resolusi yang dihasilkan OKI dan organisasi internasional lainnnya terkait isu dimaksud; (b) mengimplementasikan semua resolusi yang dihasilkan OKI terkait dengan isu konflik Arab-Israel dalam kaitannya dengan penyelesaian isu Al-Quds.

Pada KTM ke-38 OKI, Indonesia telah disahkan menjadi salah satu anggota Komisioner *Independent Permanent Human Rights Commission* mewakili kawasan Asia bersama dengan 17 negara anggota OKI lainnya. Di samping itu, sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam melindungi dan meningkatkan peran perempuan serta partisipasi wanita dalam segala aspek kehidupan, pada pertemuan yang sama, Indonesia disahkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Perempuan ke-4 OKI, pada tahun 2012. Pertemuan ini sangat strategis untuk Indonesia dapat memajukan agenda pemajuan peran dan perlindungan hak perempuan di OKI.

Dalam kerangka kerja sama ekonomi, Indonesia aktif dalam *World Islamic Economic Forum (WIEF),* yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara muslim dan penciptaan *economic common market*. Forum ini diharapkan dapat mencari terobosan baru di bidang ekonomi dan perdagangan terutama dalam memaksimalkan peran berbagai elemen di negara-negara anggota OKI yang berpenduduk kurang lebih 1,5 milyar jiwa. Kegiatan utama WIEF terutama ditujukan dalam rangka mempererat kerja sama dan meningkatkan persatuan serta solidaritas di bidang sosial dan ekonomi di kalangan bisnis umat Islam sedunia. Forum ini juga diharapkan menjadi penghubung dalam upaya meningkatkan kerja sama dan investasi di kalangan Islam dan non Islam, sekaligus meningkatkan citra Islam. Presiden RI bersama-sama dengan mantan PM Pakistan Shaukat Aziz dan Presiden IDB Dr. Ahmed Mohamed Ali duduk sebagai *Honorary Fellows WIEF Foundation*.

Palestina

Dilatarbelakangi dengan kebuntuan proses damai dan harapan dari pihak Palestina untuk dapat menjadi mitra runding yang sejajar dengan pihak Israel telah mendorong prakarsa Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menyampaikan secara resmi permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB melalui suratnya kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon Pada tanggal 23 September 2011.

Langkah ini telah mendapat dukungan dan sambutan dari sebagian besar negara-negara anggota PBB dan dalam kesempatan SMU PBB ke-66, Menteri Luar Negeri RI telah menyerukan negara-negara sahabat, baik dalam kerangka OKI dan GNB, untuk memberikan dukungan terhadap keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Secara bersamaan, telah terjadi pula proses rekonsiliasi antara dua faksi utama di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas, sebagai hasil dari pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Mesir di Kairo, Mesir pada tanggal 27 April 2011. Pertemuan mencapai kesepakatan damai antara dua faksi termaksud, khususnya mengenai pembentukan pemerintahan persatuan nasional dan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Presiden.

Indonesia secara aktif mendukung keinginan Palestina untuk menjadi anggota PBB. Pada pertemuan KTM GNB di Bali pada tanggal 23-27 Mei 2011, telah disetujui usulan Indonesia agar negara-negara anggota GNB menyusun *roadmap* untuk mendukung keanggotaan Palestina di PBB. Indonesia juga telah mendorong agar negara-negara anggota PBB yang belum memberikan pengakuan terhadap Palestina untuk segera memberikan pengakuannya.

Seiring dengan proses yang diajukan di DK untuk keanggotaan penuh di PBB, pihak Palestina juga menyampaikan aplikasi keanggotaan penuh di UNESCO. *General Conference UNESCO* ke-36 menyetujui masuknya Palestina sebagai anggota penuh UNESCO melalui pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2011 di Paris. Dalam kesempatan ini, Indonesia juga menunjukkan perhatian besar dengan memberikan dukungan atas aplikasi keanggotaan Palestina di UNESCO tersebut.

Permohonan Palestina menjadi anggota PBB tersebut telah mendapatkan perhatian khusus dari seluruh negara anggota PBB pada perdebatan umum SMU PBB ke-66. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, memerlukan proses yang tidak mudah, karena harus mendapatkan dukungan dari seluruh anggota PBB, khususnya dari negara-negara pemegang hak veto di DK PBB.

Sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Piagam PBB, aplikasi Palestina ini telah dibahas dan diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Aplikasi ini gagal mendapatkan dukungan yang dipersyaratkan terutama karena adanya penolakan dari pemegang hak veto di Dewan Keamanan.

Indonesia telah menyatakan bahwa penciptaan perdamaian di Timur Tengah membutuhkan adanya koreksi terhadap ketidakadilan yang telah lama dialami rakyat Palestina. Hal ini hanya dapat dicapai dengan solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara aman dan damai. Untuk itu, Indonesia menekankan perlunya sikap berimbang (imparsial) dari masyarakat internasional, termasuk Kuartet (PBB, Uni Eropa, AS dan Rusia), dan negara-negara donor, dalam membantu penyelesaian masalah Palestina dan mendorong proses perdamaian.

Indonesia tetap memiliki komitmen tinggi untuk mendukung bangsa Palestina, termasuk dengan memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk menyiapkan diri sebagai negara yang merdeka dengan pemerintahan yang berfungsi penuh.

D-8

Indonesia terus melihat pentingnya *Developing-Eight* (D-8) sebagai forum yang didirikan pada tahun 1997 untuk meningkatkan kerja sama pembangunan di antara negara-negara anggota yang terdiri dari delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

Komitmen Indonesia terhadap kerja sama D-8, termasuk sektor swastanya, adalah senantiasa berupaya agar kerja sama ini dapat lebih maju dan membawa manfaat bagi negara-negara anggotanya. Terlebih, sektor swasta diharapkan dapat berperan maksimal sebagai motor penggerak kerja sama D-8 dengan tercapainya kesepakatan yang dibuat pada Pertemuan Dewan Menteri ke-14 pada tanggal 14 Juli 2011 di Abuja, Nigeria mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan kerterlibatan sektor swasta D-8, yaitu:

1. Menyusun *blueprint* mengenai perkembangan sektor swasta D-8;
2. Memberikan kegiatan prioritas kepada UKM dalam kegiatan D-8;
3. Menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi kalangan usaha mengenai potensi bisnis yang ada di masing-masing negara anggota D-8;
4. Mengadakan *business forum/exhibition* sebagai sarana promosi yang menarik minat sektor swasta dan kehadiran pembeli.

G-77 dan China

Kerja sama antar negara berkembang merupakan suatu kekuatan politis yang sangat strategis di dalam arena konstelasi politik internasional. Dalam kerangka pemikiran ini, Indonesia telah ikut memprakarsai dibentuknya G-77 pada tanggal 15 Juni 1964 melalui pengesahan *Joint Declaration* dari 77 anggota negara berkembang, dan terus memanfaatkan forum ini untuk mendukung tercapainya kepentingan-kepentingan Indonesia dan negara berkembang umumnya.

Bagi Indonesia, keberadaan G-77 saat ini dapat memberikan dukungan dalam bentuk *lobbying support* dari 130 negara berkembang anggota G-77 bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia di PBB.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam *Charter of Algiers,* kegiatan G-77 merupakan satu-satunya forum negosiasi terbesar bagi negara-negara berkembang yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum PBB untuk mendorong kerja sama internasional bagi pembangunan.

Kegiatan G-77 ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru pelaksanaan kerja sama Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, akan tetapi juga

dimaksudkan untuk memperluas kerja sama dalam memantapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui Kerja sama Selatan-Selatan.

Saat ini, kegiatan G-77 lebih difokuskan antara lain pada penanganan isu reformasi sistem keuangan dan ekonomi internasional yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang, MDGs, ODA, pembangunan yang berkelanjutan, dan Kerja sama Selatan-Selatan.

Khusus mengenai pembangunan yang berkelanjutan, hal ini menjadi topik bahasan utama pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-35 yang diselenggarakan di sela-sela SMU PBB ke-66 pada tanggal 20 September 2011, guna menghadapi pertemuan KTT Rio+20 tahun 2012 yang akan datang, terutama menyangkut isu krisis ekonomi global, pangan, energi, dan perubahan iklim.

Kerja Sama Selatan-Selatan

Indonesia memandang penting peranan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) untuk membantu meningkatkan pembangunan negara-negara Selatan, khususnya dalam mencapai *international agreed goals,* termasuk MDGs. Gagasan KSS berawal dari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. *Bandung Spirit* yang dihasilkan dari KAA tersebut telah bergema dan berkembang menjadi satu model kerja sama yang mampu mendukung pembangunan di negara-negara Selatan melalui *share of experiences and best practices, exchange knowledge, transfer of technology and skill* dalam mencapai suatu kemandirian bersama *(collective self-resilience)*.

KSS dibangun bukan sebagai substitusi dari *Official Development Agenda (ODA)* negara-negara Utara, namun sebagai komplemen bagi Kerja sama Utara-Selatan, serta kerja sama bilateral dan multilateral lainnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip solidaritas, kemitraan inklusif,kesempatan, dan keuntungan bersama, serta tanpa mencampur, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

KSS terdiri dari Kerja sama Ekonomi antar Negara Berkembang (KENB) dan Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB). Indonesia sejak tahun 1981 telah aktif dalam kegiatan KSS dengan berbagai negara berkembang baik secara bilateral maupun regional. Puluhan ribu peserta dari beberapa negara berkembang di berbagai kawasan telah mengikuti program KSS Indonesia, khususnya program KTNB. Program KTNB Indonesia juga mendapat dukungan dengan pendirian *Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC)* di Jakarta pada tahun 1995. Sejak tahun 2000, NAM CSSTC telah melaksanakan berbagai program kerja sama teknik untuk membantu pembangunan negara-negara Selatan.

Pada saat ini KSS merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia dan tercantum dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sebagai tindak lanjut, sedang disusun Rencana Induk (RI) dan Cetak Biru (CB) untuk pengembangan KSS. Sejauh ini, penyusunan RI dan CB sudah mendekati tahap finalisasi. Di bawah RI ini, implementasi KSS Indonesia dimaksudkan tidak hanya terbatas pada KTNB, tetapi lebih pada KENB yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Colombo Plan

Kerjasama *Colombo Plan (CP)* dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di kawasan Asia Pasifik dengan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Arah kerja sama CP di masa yang akan datang dirumuskan dalam *Colombo Plan Vision 2025* yang disepakati dalam *Consultative Committee Meeting (CCM)* ke-41 di Kuala Lumpur, 21-22 Agustus 2008.

Program utama CP meliputi *Program for Public Administration/Environment; Program for Private Sector Development; Drug Advisory Program;* dan *Long Term Scholaship Program*. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah peserta Indonesia yang mengkuti kegiatan CP terdiri dari 43 peserta (2007), 219 peserta (2008), dan 75 peserta (2009).

Memenuhi permintaan Sekjen CP kepada Indonesia, Delri pada *Consultative Committee Meeting (CCM)* ke-42 di New Delhi, tanggal 9-11 Februari 2010telah

menyatakan kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah CCM ke-43 pada tahun 2012.

Untuk tahun 2010 Indonesia telah memenuhi permintaan Sekjen CP berupa bantuan sukarela sebesar USD 50.000 yang oleh Sekretariat CP diperuntukkan untuk membiayai 2 program di bidang *Public Administration/Environment* dan *Private Sector Development.* Selain itu untuk tahun 2010, Indonesia telah menyelenggarakan 3 program kegiatan untuk peserta dari negara-negara anggota CP yaitu dalam bidang *Woman Empowerment, Poverty Reduction,* dan *Micro Finance.*

Terkait dengan kontribusi, selain kontribusi tahunan sebesar USD 17.400, Indonesia juga telah memberikan iuran dalam kerangka *Drug Advisory Program* sebesar USD 3.500 per tahun. Dengan perkataan lain, bantuan sukarela Indonesia kepada CP khususnya dalam tahun 2010 boleh dikatakan cukup signifikan.Untuk tahun 2011,Indonesia telah memutuskan untuk memberikan kontribusi sukarela sebesar USD 25.000 ditambah dengan pelatihan *Disaster Risk Management* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

V.5.1 Pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional

Pada periode Januari hingga November 2011, Pemerintah RI telah mengikuti sejumlah pencalonan pada berbagai organisasi internasional. Pencalonan Indonesia pada berbagai forum internasional mencerminkan komitmen Indonesia untuk aktif memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional dan kontribusi aktif terhadap penanganan isu-isu global secara konkret.

PencalonanKeanggotaan Baru di tahun 2011

1. Indonesia terpilih sebagai anggota *Human Rights Council* (Dewan HAM) periode 2011-2014;
2. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan FAO periode 2011-2013;
3. Indonesia terpilih sebagai anggota *Executive Council International Oceanographic Commission (IOC)* periode 2011-2013;
4. Indonesia terpilih sebagai *Deputy Member of International Labour Organization (ILO)* periode 2011-2014;
5. Indonesia terpilih sebagai Ketua *Biro Commission on Population and Development* (CPD) untuk tahun 2012;
6. Dr. Antonius Riva Setiawan terpilih sebagai Direktur *Drug Advisory Programme (DAP) Colombo Plan*;
7. Indonesia terpilih sebagai anggota *Technical Management Board International Standardization Organization (TMB-ISO)* periode 2012-2014;
8. Indonesia terpilih sebagai anggota *Board of Governors (BoG) International Atomic Energy Agency (IAEA)* periode 2011-2013;
9. Indonesia terpilih sebagai anggota ECOSOC periode 2012-2014;
10. Indonesia terpilih sebagai anggota *Executive Board (EB) UNESCO* periode 2011-2015;
11. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota *Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) UNESCO* periode 2011-2015;
12. Indonesia terpilih sebagai anggota *Intergovernmental Council for the Information for all Programme (IFAP) UNESCO* periode 2011-2015;
13. Dubes Nugroho Wisnumurti terpilih kembali sebagai anggota *International Law Commission (ILC)* periode 2012-2016;
14. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan *International Maritime Organization (IMO)* periode 2011-2013;
15. Indonesia terpilih sebagai anggota *Programme and Budget Committee (PBC) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)* periode 2012-2013;
16. Dr. Cecep Effendi terpilih sebagai Direktur Jenderal *Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)* periode 2012-2016.

Disamping keanggotaan baru tersebut, Indonesia saat ini sedang menjadi anggota pada berbagai Organisasi Internasional antara lain:

1. Dewan *International Telecommunications Union (ITU)* periode 2010-2014;
2. *Commission on Population and Development* (CPD) untuk tahun 2009 – 2013.
3. *Intergovernmental Committee of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (ICH)* periode 2010-2014;
4. Mr. Rusman Heriawan, Kepala BPS, sebagai anggota *Governing Council Statistical Institute for Asia and the Pacific (GC-SIAP)* periode 2010-2015;
5. *Organizational Committee Peace Building Commission (OC-PBC)* periode 2011-2012.
6. *Executive Board United Nations Children's Fund (UNICEF)* periode 2011-2013;
7. Dr. Agus Pratama Sari sebagai anggota *Executive Board of the Clean Development Mechanism (EB-CDM) UNFCCC* periode 2011-2013.
8. *Executive Board United Nations Entity on the Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWOMEN)* periode 2011-2013;
9. Dewan *International Maritime Organization (IMO)* periode 2011-2013;
10. *Governing Council of the United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT)* periode 2011-2014;
11. *Commission on Sustainable Development (CSD)* periode 2011-2014;
12. Dewan *International Seabed Authority* periode 2011-2014;
13. *Executive Council Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* periode 2011-2013;
14. *Executive Board* UNESCO periode 2011-2015;
15. *Executive Board UNDP/UNFPA* periode 2012-2014;
16. *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* periode 2012-2014.
17. *Commission on Sustainable Development (CSD)* untuk tahun 2011 – 2014.

ISU – ISU KHUSUS

Di samping isu-isu bilateral, regional dan multilateral, terdapat isu-isu yang mendapat perhatian khusus dan bersifat lintas kawasan. Adapun isu-isu tersebut adalah:

a. Bantuan Bencana Alam
b. Diplomasi Publik
c. Perlindungan WNI
d. Kerja sama Teknik
e. Penanganan Perbatasan
f. Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
g. Benah diri
h. Pencapaian Inpres Nomor 14 Tahun 2011 Mengenai Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 Dan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

VI.1 Bantuan Bencana Alam

Indonesia senantiasa menunjukkan kepeduliannya terhadap bencana alam yang melanda berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri merupakan negara yang rawan bencana dan telah menerima berbagai uluran tangan dan ungkapan simpati dan solidaritas masyarakat internasional manakala bencana alam melanda wilayah Indonesia. Dalam kaitan ini, maka Indonesia juga telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada negara-negara yang mengalami bencana alam. Selain itu, dalam konteks kerja sama regional dan internasional, Indonesia bersama dengan negara-negara sahabat terus mengembangkan mekanisme kerja sama penanganan bencana alam.

Indonesia selalu berperan aktif dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penanganan bencana alam dan situasi kemanusiaan. Sebagai negara yang sering mengalami bencana alam dalam berbagai bentuk dan skala, upaya dan kepemimpinan Pemri telah banyak dirujuk oleh komunitas penanggulangan bencana di tingkat internasional. Indonesia menjadi salah satu model sukses penanganan bencana alam, baik di tataran kebijakan pemerintah, maupun di tataran operasional.

Bilateral

Secara bilateral, Indonesia telah memberikan bantuan pada sejumlah negara yang mengalami bencana alam sepanjang tahun 2011, yaitu:

a. Di kawasan Asia Pasifik,
   - Australia (USD 1 juta)
   - Selandia Baru (USD 500 ribu)
   - Filipina (USD 400 ribu)
   - Kamboja (USD 400 ribu)
   - Laos (USD 400 ribu)
   - Myanmar (USD 400 ribu)
   - Thailand (USD 1 juta)
   - Viet Nam (USD 500 ribu)
   - Pakistan (Bantuan obat-obatan)
b. Di kawasan Eropa,
   - Turki (USD 1 juta)

Regional – ASEAN

Indonesia telah menggalang solidaritas kawasan terhadap bencana alam yang melanda Jepang pada bulan Maret 2011, dengan menyelenggarakan *Special ASEAN-Japan Ministerial Meeting,* 9 April 2011 di Jakarta.

Dalam kerangka kerja sama regional, Indonesia aktif mengembangkan mekanisme regional untuk penanganan bencana alam. Hal-hal konkrit yang telah dilakukan Indonesia untuk memperkuat

mekanisme penangnan bencana di tingkat regional, antara lain adalah:

1. Pembentukan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management* (AHA Centre) di Jakarta
2. Sebagai *co-chair*bersama Jepang untuk pelatihan *ARF Disaster Relief Excercise* di Manado, 15-19 Maret 2011
3. Bersama dengan Australia, menyusun *concept paper EAS* mengenai *Disaster Management*.

Global

Apresiasi tinggi atas peran Indonesia tersebut tercermin dalam peran Indonesia sebagai tuan rumah berbagai forum internasional yang telah dan akan diselenggarakan antara lain:

a. *International SAR Expo*, Jakarta, 16-19 Februari 2011
b. *International SAR Forum* (19-20 Juli 2011) dan INSARAG (*International Search and Rescue Advisory Group*) *Asia Pacific Regional Group Meeting*, 21-22 Juli 2011
c. 5th*Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction* (AMCDRR), tahun 2012

Indonesia telah secara aktif ikut serta dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sama global maupun regional untuk penanganan bencana, termasuk mengembangkan kerangka baru yang melibatkan antara lain pelaku usaha/ pihak swasta.

Komitmen, serta capaian Indonesia di bidang penanganan bencana, khususnya pengurangan resiko bencana mendapat apresiasi tertinggi, dengan pemberian pengakuan sebagai *Global Champion for Disaster Risk Reduction* kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengakuan tersebut diumumkan oleh SekretarisJenderal PBB Ban Ki-moon pada pembukaan *3rd Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) tanggal 10 Mei 2011. *Token of recognition* sebagai *Global Champion* dimaksud telah diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada Presiden Republik Indonesia di Bali, pada tanggal 19 November 2011.

VI.2 Diplomasi Publik

Sasaran

Indonesia telah berinisiatif menyelenggarakan *Bali Democracy Forum* (BDF) sejak tahun 2008 yang berprinsip pada upaya-upaya promosi demokrasi di kawasan Asia melalui kerja sama internasional. Tujuan utama BDF adalah memperkuat institusi demokrasi di masing-masing negara peserta BDF. Forum ini ditujukan untuk membahas isu demokrasi, bukan merupakan forum negara-negara demokrasi sehingga forum ini lebih bersifat inklusif.

Menindaklanjuti keberhasilan BDF yang telah diinisiasi oleh Indonesia sejak tahun 2008, Indonesia kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum IV, pada 8-9 Desember 2011 yang dihadiri oleh sejumlah negara peserta dari kawasan Asia dan negara-negara dari kawasan lain serta organisasi internasional sebagai observer. Forum tingkat menteri ini juga dihadiri 6 Kepala Negara/Pemerintahan dan mengusung tema "*Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices*".

Sejak tahun 2004, Pemri c.q. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) telah mengembangkan budaya dialog lintas agama *(Interfaith Dialogue)* sebagai bentuk upaya pro aktif Pemri dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Hal ini dinilai penting untuk menghilangkan kecurigaan dan kesalahpahaman antar agama dan budaya, dan sebaliknya mempromosikan harmoni dan kerja sama. Pemri menilai bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk mengembangkan budaya dialog lintas agama mengingat latar belakangnya yang multikultur.

Kegiatan Diplomasi

Hubungan baik Kemlu dengan berbagai pemangku kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia, merupakan salah satu dasar yang dipergunakan untuk menyelaraskan dan merealisasikan visi dan misi Kemlu demi mencapai tujuan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Foto 162 Penghargaan*the Sri Paduka Dr. Ide Anak Agung Gde Agung National Hero Award for Excellence in Diplomacy* kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, Jakarta, 25 Juli 2011

Dalam kaitan itu, upaya-upaya penguatan politik luar negeri Indonesia patut bersinergi dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat Indonesia sendiri. Atas dasar pemikiran itulah dirancang program-program diplomasi publik berupa *outreach* kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri dengan mempergunakan aset-aset yang ada dan mengusung tema, antara lain, demokrasi, pluralisme masyarakat, moderasi dan toleransi kehidupan beragama, dan ekonomi progresif. Beberapa yang menonjol dari kegiatan diplomasi publik adalah sebagai berikut:

Bali Democracy Forum

Sejak dimulai tahun 2008, penyelenggaraan*Bali Democracy Forum* (BDF) semakin mendapat apresiasi yang tinggi dari negara-negara di Asia maupun kawasan lain. Hal ini antara lain tercermin dari meningkatnya jumlah negara peserta maupun *observer* BDF dari tahun ke tahun. Forum ini juga telah berhasil menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia dan menghasilkan banyak inisiatif kerja sama yang berdampak pada penguatan institusi demokrasi negara-negara di Asia.

Setelah berhasil menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan, seperti diusung pada BDF dengan tema "*Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia*", BDF II dan III lebih fokus membahas keterkaitan demokrasi dengan pembangunan serta peran demokrasi dalam memajukan perdamaian dan stabilitas.

Berbagai inisiatif kerja sama yang telah disepakati pada BDF dilaksanakan oleh *Institute for Peace and Democracy*sebagai *implementing agency.* Pada tahun 2011, sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh IPD antara lain dalam bentuk *Electoral Visit Program, Parliamentary Professional Skills Training Course, Seminars on Democracy dan Panel Discussion.* Dalam pada itu, IPD bekerja sama dengan *National Democratic Institute* (Amerika Serikat)dan *Center for Democratic Institutions* (Australia) menyelenggarakan tiga lokakarya guna berbagi pengalaman dan *lessons learned* dengan menghadirkan peserta dari Mesir, di Jakarta dan Cairo. Adapun tema yang diangkat adalah sebagai berikut:

- *Workshop on Egypt-Indonesia Dialogue on Democratic Transition*

- *Workshop on Building Electoral Democracy in Egypt: Lesson Learned from the Indonesian Experience*
- *Training and Workshop on Empowering the Electoral Management Body of Egypt and Indonesia*

Selain itu, IPD juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam kerangka pengembangan nilai-nilai demokrasi termasuk *Election Visit Programs* di Jepang dan Thailand dan sejumlah lokakarya bekerjasama dengan para *stakeholders* di Mesir dalam rangka konsolidasi demokrasi di Mesir. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip *Bali Democracy Forum* bahwa demokrasi bersifat *home-grown* dan tidak dipaksakan dari luar, inklusif, memperhatikan *grassroots, civil society* dan *rule of law* serta latar belakang bahwa *no one-size-fits-all* karena setiap negara memiliki *unique national circumstances* menyangkut *isu demokrasi* dan *promotion of good governance*.

BDF IV telah diselenggarakan di Bali, pada tanggal 8-9 Desember 2011 dengan mengusung tema "*Enhanching Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices"* dan dua sub-tema yaitu: *The Ability of State to Respond to the Voice of Democracy*; dan *Ensuring Democratic Space for Civil Society Participation*. Pertemuan ini terdiri dari dua sesi interaktif bersub tema *"The Ability of the State to Respond to the Voice of Democracy"* dan "*Ensuring Democratic Space for Civil Society Participation*".

Disamping Presiden RI, BDF IV dihadiri oleh delapan Kepala dan Wakil Kepala Negara/Pemerintahan: Perdana Menteri Bangladesh selaku co-chair, Sultan Brunei, Presiden Sri Lanka, Perdana Menteri Qatar, Perdana Menteri Timor-Leste, Perdana Menteri Mongolia, Wakil Presiden Filipina, dan Deputi Perdana Menteri Turki. Secara keseluruhan, forum ini dihadiri peserta dari 40 negara dan peninjau dari 42 negara. Untuk pelaksanaan ke-5 yang dijadwalkan tanggal 8-9 November 2012, BDF, yang merupakan forum tingkat menteri, akan diselenggarakan pada tingkat KTT.

Adapun hasil-hasil penting yang menjadi kesepakatan dalam BDF IV antara lain: pentingnya BDF dalam perkembangan demokrasi di kawasan; pentingnya negara menjawab tuntutan dan aspirasi rakyat; ketersediaan *'democratic space';*pentingnya koridor demokrasi yang bersifat *homegrown* dan inklusif sesuai dengan kondisi domestik suatu negara; peranan penting media sosial bagi pengembangan demokrasi; dan pentingnya pemerataan hak-hak politik dan ekonomi dalam perkembangan politik suatu negara.

Foto 163.Bali Democracy Forum IV, Bali, 8-9 Desember 2011

Dialog Lintas Agama

Sebagai negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia terus melakukan upaya-upaya

dalam rangka membangun dan memperkuat dialog antarperadaban karena dipercaya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai, terutama di tengah maraknya ancaman seperti terorisme. Dalam kaitan ini, Indonesia senantiasa menekankan pentingnya pemberdayaan kaum moderat *(empowering the moderates)* dan peningkatan kerja sama internasional antarmasyarakat madani Indonesia dengan mitranya di luar negeri.

Dalam kaitan ini, kegiatan Dialog Lintas Agama tetap dijadikan saluran komunikasi yang dinilai efektif antara Pemri (Kemlu) dan kalangan *civil society* seperti ormas keagamaan, ormas pemuda dan mahasiswa, universitas, *think tank*, dan media masa. C*ivil society*terus diberi ruang untuk menyuarakan pandangan dan seruan toleransi dan perdamaian dengan tujuan merubah potensi konflik menjadi kerja sama yang saling menguntungkan.

Kegiatan DLA yang telah dicetuskan Kemlu sejak tahun 2004 terus dikembangkan dan diperluas antara lain juga untuk melawan stereotip negatif tentang Islam yang berkembang di Barat dimana terdapat anggapan bahwa Islam berada dibalik berbagai aksi terorisme.

Kegiatan DLA dilakukan di berbagai tataran baik multilateral *(Alliance of Civilization/AoC dan Non-Alligned Movement/NAM Interfaith Dialogue);* regional (*Asia Pacific Interfaith Dialogue/RIFD dan ASEM Interfaith Dialogue);* serta bilateral dengan 18 negara/organisasi internasional, yaitu Amerika Serikat, Austria, Belanda, Bulgaria, Republik Ceko, Ethiopia, Hongaria, Inggris, Jerman, Kanada, Lebanon, Polandia, Rusia, Serbia, Spanyol, Tahta Suci, Uni Eropa dan Yunani.

Pada tataran regional dan multilateral, Kemlu terus berperan aktif dalam diskursus lintas agama, khususnya dalam forum *ASEM Interfaith Dialogue*, dan *Alliance of Civilization*.

Pada tahun 2011, Kemlu membuka peluang kerja sama antarmasyarakat madani dari 5 negara/organisasi internasional baru, khususnya negara-negara di Barat yang dinilai masih memiliki mispersepsi dan misinterpretasi yang negatif terhadap Islam, seperti Serbia, Yunani, Polandia dan Uni Eropa. Di tahun yang sama, Indonesia juga tetap melakukan dialog dengan negara mitra yaitu Austria, Jerman dan Rusia. Kemlu telah membuka kerja sama pendidikan antaruniversitas dan akademisi dari negara baru seperti Ethiopia, Polandia, Yunani dan Serbia serta terus memperkuat kerja sama yang telah dibangun dengan negara-negara mitra.

Presidential Friends of Indonesia (PFoI)

Dalam melakukan *outreach* diplomasi publik kepada pihak luar negeri, diketahui bahwa Program *Presidential Friends of Indonesia (PFoI)* yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh kepada para peserta yang berlatar belakang Indonesianis, yang memiliki berbagai ketokohan, dan yang berprofesi sebagai akademisi mengenai berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai di Indonesia di berbagai bidang.

Pada tahun ini, Kemlu bekerja sama dengan Kantor Presiden Urusan Hubungan Internasional, telah menyelenggarakan program *PFoI* dari tanggal 14-18 Agustus 2011 di Jakarta dan tanggal 18-21 Agustus di Bali.

Terkait dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, tema besar program *PFoI* tahun ini yaitu *"ASEAN Community in a Global Community of Nations".*

Peserta *PFoI* tahun ini terdiri dari wakil-wakil negara-negara ASEAN dan mitra wicara ASEAN yang berjumlah 22 orang. Mereka berasal dari 17 negara, yaitu delapan negara ASEAN: Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Viet Nam, dan sembilan negara mitra wicara ASEAN: Australia, Amerika Serikat, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru dan Irlandia (mewakili UE).

Duta Belia

Program Duta Belia diadakan dalam rangka menciptakan konstituen diplomasi dari kalangan domestik dan juga sebagai wujud kepedulian Kemlu kepada generasi muda Indonesia.

Program yang berupa kegiatan kursus dan *outreach* ini merupakan salah satu wadah bagi kalangan generasi muda untuk memahami pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Dalam

program ini, para Duta Belia diperkenalkan pada kebijakan luar negeri Indonesia, berbagai permasalahan luar negeri, serta tata cara kerja diplomat Indonesia. Secara khusus, para Duta Belia bertugas mempromosikan Indonesia di dalam dan luar negeri, membantu Kemlu dalam menjelaskan pelaksanaan Polugri dan diplomasi, baik di daerah asal maupun di kota-kota lain, serta membantu Pemerintah Daerah melaksanakan tugas keprotokolan dan promosi citra Indonesia. Dengan program ini diharapkan terdapat suatu upaya peningkatan dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan diplomasi publik.

Program ini telah diadakan sejak tahun 2003 dengan total peserta kini yang sudah lebih dari 500 orang. Peserta program Duta Belia tahun ini (November 2011) merupakan angkatan ke-IX yang terdiri dari 78 peserta (66 orang yang berpartisipasi pada acara Paskibraka, ditambah 12 siswa berprestasi di tingkat daerah). Tema yang diangkat untuk tahun 2011 adalah "*Young Envoys for ASEAN Community"* yang juga dikaitkan dengan upaya mendukung keketuaan Indonesia dalam ASEAN di tahun 2011.

Untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan diplomasi, peserta Duta Belia telah mengunjungi tiga negara ASEAN, yaitu: Filipina, Singapura dan Thailand. Kunjungan di tiga negara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan tema dimaksud.

Untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan diplomasi, peserta Duta Belia telah mengunjungi tiga negara ASEAN, yaitu: Filipina, Singapura dan Thailand. Kunjungan di tiga negara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan tema dimaksud.

Outstanding Students for the World (OSTW)

Outstanding Students for the World (OSTW) merupakan program perdana pada tahun ini dan diselenggarakan dalam rangka mendukung komitmen Kemlu terkait upaya membangun dan memperkuat konstituen diplomasi di kalangan pemuda Indonesia, khususnya siswa berprestasi (*outstanding students*).

Program *Outstanding Students for the World* ini bertujuan antara lain untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berkualitas untuk ikut berperan dalam mendukung kegiatan promosi dan peningkatan citra Indonesia di luar negeri serta mendorong siswa pilihan untuk lebih berprestasi di tingkat global.

Dalam pelaksanaanya, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kemdikbud dan LIPI menyeleksi para siswa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menjadi peserta program *Outstanding Students for the World* tersebut.

Program ini juga di dukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Untuk peningkatan wawasan terhadap berbagai isu global dan praktik diplomasi di tingkat bilateral/multilateral, peserta program *Outstanding Students for the World* telah melakukan kunjungan ke beberapa kota di Amerika Serikat, yaitu Washington DC, New York, Boston, Pittsburgh dan San Francisco.

Peserta *Outstanding Students for the World* 2011 terdiri dari 21 siswa berprestasi khususnya pemenang olimpiade di bidang sains, sosial, robotik, dan peneliti/inventor mudaIndonesia. Mereka berasal dari sembilan propinsi di tanah air (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selama kunjungan ke Amerika Serikat, peserta telah melakukan diskusi interaktif dengan berbagai instansi setempat serta presentasi ilmiahdi beberapa sekolah unggulan dan universitas ternama di Amerika Serikat termasuk di Universitas Harvard. Selain itupeserta *Outstanding Students for the World juga* melakukan dialog interaktifdengan anggota Kongres AS Jim McDermott serta kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap dapat menambah wawasan dan pengetahuan seperti museum, pusat-pusat penelitian, dan perusahaan IT di Lembah Silicon.

Journalists Visit Program (JVP)

Khusus bagi kalangan jurnalis asing, Kemlu telah mengadakan *Journalists Visit Program* (JVP) ke Jakarta, Bangka-Belitung, dan Bali, 16 – 25 Oktober

2011. Berkaitan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN, Kemlu mengundang 9 orang jurnalis asal negara-negara anggota ASEAN. Diharapkan melalui kunjungan langsung, para wartawan tersebut menyaksikan sendiri fakta yang berlangsung sehingga mereka dapat menyajikan pemberitaan yang faktual dan berimbang.

Bilateral Inter-Media Dialogue (BIMD) dan Skype Friends RI-USA

Di bawah skema kemitraan *Joint Declaration on US-Indonesia Comprehensive Partnership*, terdapat W*orking Group on Democracy and Civil Society (WGDCS),* dimana *Bilateral Inter-Media Dialogue (BIMD)* menjadi salah satu kegiatan yang membahas isu-isu terkait *media ethics, accountability* dan *freedom of expression*. Kegiatan yang diikuti oleh 10 peserta yang mewakili berbagai media cetak dan elektronik Indonesia ini dikerja samakan dengan US

Foto 169 Pertemuan Menteri Kedengan *President of Friends of Indonesia* (PFoI), Jakarta 14-18 Agustus 2011

Department of State dan dilaksanakan di Washington D.C. dan New York pada tanggal 28 September – 4 Oktober 2011.

Melalui dialog, berbagipengalamanserta *best practices* ini*,* para praktisi mediadari Indonesiadan Amerika Serikat diharapkan dapat meningkatkan peran dalam memperkuatdemokrasi. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, dirasakan adanya opini positif komunitas media Amerika Serikat terhadap dunia media di Indonesia, baik dalam hal kebebasan pers maupun perkembangan industri media, dengan sedikit sikap skeptisme atas dualisme peran pengusaha pers dan keterlibatan mereka dalam politik.

Bilateral Inter-Media Dialogue (BIMD) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kerangka *Global Inter-Media Dialogue (GIMD),* bersama kegiatan Pengembangan Kapasitas Media Daerah dan *Regional Inter-Media Dialogue (RIMD)*. Dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang menginduk ke program GIMD, Kemlu melihat pentingnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pekerja pers karena kebebasan pers dan demokrasi merupakan bagian penting dari aset politik luar negeri.

Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan Kemlu dibawah skema *Joint Declaration on US-Indonesia Comprehensive Partnership* adalah *Skype Friends* RI-USA. Kegiatan tersebut telah dilaksanan pada tanggal 25 Maret dan 8 Juni 2011 di Jakarta dan Surabaya antara siswa sekolah kedua negara. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya bersama antara Direktorat Diplomasi Publik dan KBRI Washington DC guna meningkatkan *People-to-People Contact* antara generasi muda Indonesia dan Amerika Serikat.

Updates From The Region (UFTR)

Sebagai upaya membantu menjembatani keinginan daerah untuk melakukan promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri, Kemlu telah meluncurkan program *Updates From The Region (UFTR).*Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang pasar dan investasi luar negeri bagi daerah di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI) serta kuliner. Daerah-daerah yang dipromosikan melalui program UFTR ini antara lain Riau, Sulawesi Utara, NTB, dan Provinsi Maluku

yang juga telah memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan "*Sail Banda 2010*".

Selama tahun 2011, telah terselenggara dua program yaitu pada tanggal 23 Maret 2011 dan 26 Juli 2011 dengan Propinsi Gorontalo dengan tema *Exploring Gorontalo: Trade, Tourism, and Investment Opportunities, and Road to World Maize Conference 2012* dan dengan Propinsi Riau dengan tema *Exploring Investment Opportunities in Riau Province.*

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan UFTR di Jakarta, Kemlu bekerja sama dengan instansi teknis terkait dan unsur Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan *Diplomatic Tour* dengan mengundang para duta besar di Jakarta, pebisnis, termasuk organisasi internasional untuk berkunjung ke daerah dan melihat potensi daerah secara langsung.

Pada tahun 2011, Kemlu telah menyelenggarakan dua kegiatan *Diplomatic Tour*, yaitu dengan Pemkot Pekalongan dan Pemda Gorontalo, masing-masing tanggal 3 Oktober 2011, dan tanggal 18 – 20 Oktober 2011.

Pelaksanaan *Diplomatic Tour* ke Pekalongan dirangkaikan dengan Peringatan Hari Batik Nasional yang dibuka oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, sementara untuk *Diplomatic Tour* ke Gorontalo dirangkaikan dengan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-31 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI. Para peserta diundang untuk melihat sentra-sentra bisnis, pusat kerajinan dan objek wisata yang menjadi unggulan daerah dengan harapan terciptanya hasil-hasil konkrit dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI).

VI.3 Perlindungan WNI

Sasaran

Pemberian perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat konstitusi tersebut telah dijabarkan dalam ketentuan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2006.

Dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan tersebut sasaran kegiatan perlindungan WNI dan BHI adalah terjaminnya secara maksimal perlindungan WNI dan BHI di luar negeri melalui pendekatan kepedulian dan keberpihakan.

Pendekatan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kluster strategi utama dalam perlindungan WNI yaitu:

a. Upaya pencegahan;
b. Upaya deteksi dini; dan
c. Upaya perlindungan.

Mengingat masalah perlindungan hanya ditangani ketika terdapat masalah di luar negeri, maka upaya pencegahan khususnya sejak proses rekrutmen TKI dengan prosedur yang benar termasuk pelatihan dan mempersiapkan TKI dimaksud secara maksimal, dan menyampaikan data semua TKI tersebut kepada Perwakilan RI di Luar Negeri. Dalam rangka pencegahan dimaksud, Kemlu berinisiatif melakukan berbagai kerja sama baik dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah. Disamping itu, Kemlu juga secara aktif terlibat langsung dalam memberikan masukan terkait pembenahan kebijakan penempatan TKI seperti dalam Tim Terpadu yang dibentuk oleh Presiden RI berdasarakan Keppres No. 15 tahun 2011, serta inisiatif dalam berbagai perundingan dengan negara tujuan penampatan untuk memastikan adanya perlindungan terhadap TKI.

Sementara itu, dalam upaya deteksi dini, Kemlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam membangun *integrated data base system,* membuka layanan pengaduan 24 jam serta melakukan *reach out* baik yang dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri maupun yang dilakukan oleh Kemlu bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, Pemda termasuk juga para pemangku kepentingan lainnya seperti LSM.

Sedangkan upaya perlindungan yang cepat dan tepat dilakukan di semua Perwakilan dan untuk memperkuat fungsi perlindungan dimaksud, telah dibuat Permenlu No. 4 tahun 2008 untuk

membentuk Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Service)* di 24 Perwakilan RI yang memiliki jumlah WNI/TKI yang sangat signifikan. *Citizen Service* dimaksud bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI dan BHI secara terpadu dengan cepat, tepat, murah, mudah, transparan dan bertanggung jawab.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan WNI khususnya TKI di luar negeri melalui 3 (tiga) kluster tersebut memungkinkan Perwakilan RI memberikan perlindungan maksimal kepada WNI/TKI . Meskipun upaya maksimal terus dilakukan, namun beberapa kendala seperti jangkauan terhadap pekerja domestik di negara setempat, sistem hukum dan budaya negara setempat masih menjadi permasalahan yangharus terus dicarikan solusinya. Ketidaksiapan WNI khususnya TKI untuk bekerja di negara tujuan juga menjadi salah satu penyebab utama permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Jumlah WNI di luar negeri yang tercatat pada

Status Hukum Kasus WNI di Luar Negeri (2011)

Perwakilan RI adalah 3.112.377 orang. Sepanjang tahun 2011 kasus yang dilaporkan dan diterima oleh Perwakilan RI di luar negeri adalah 19.239 kasus dengan rincian 16.821 telah berhasil diselesaikan dan 2.418 masih dalam proses penyelesaian.

Sumber: Perwakilan RI di Luar Negeri yang diolah oleh Kemlu hingga tanggal 1 Desember 2011

Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus dalam Proses	Prosentase
19.239	16.821	2.418	87.43%

Pemulangan WNI Overstayers di Arab Saudi (2011)

No.	Pemulangan	Tanggal	Jumlah
1.	**Januari**		**1.922**
2.	**Februari**		**1.401**
	a. Tahap I	14 Feb 2011	301
	b. Tahap II	18 Feb 201	335
	c. Tahap III	24 Feb 2011	350
	d. Tahap Iva	28 Feb 2011	415
3.	**Maret**		**678**
	a. Tahap IVb	08 Mar 2011	5
	b. Tahap V	09 Mar 2011	305
	c. Tahap VI	19 Mar 2011	368
4.	**April**	22 April 2011	**2.353**
5.	**Oktober- November**		**1.572**
	a. Tahap I	30 Okt 2011	351
	b. Tahap II	31 Okt 2011	356
	c. Tahap III	31 Okt 2011	338
	d. Tahap IV	31 Okt 2011	327
	e. Tahap V	01 Okt 2011	200
	Total		**7.926**

Penanganan WNI di luar negeri juga dilakukan dengan kegiatanpemulangan para WNI yang melanggar peraturan keimigrasian dan tanpa izin tinggal yang sah (*overstayers*) di Arab Saudi. Kegiatan itu dilakukan dengan pesawat terbang dan kapal laut KM Labobar. Pada tahun 2011 pemerintah telah memfasilitasi pemulangan dengan skema repatriasi (atas biaya pemerintah Indonesia) sejumlah 7.926 WNI *overstayers*dengan menggunakan transportasi udara melalui 11 kali tahapan pemulangan dan sekali melalui jalur laut dengan menggunakan KM Labobar.

Kegiatan Diplomasi

Salah satu upaya perlindungan WNI di luar negeri adalah dengan meningkatkan peran dan kinerja unit Pelayanan Warga (*Citizen Services)*yang telah ada di 24 Perwakilan RI di Luar Negeri. Berbagai upaya peningkatan telah dilakukan selama tahun 2011 baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan mekanisme pelayanan.

Selama tahun 2011, implementasi Unit Pelayanan Warga sendiri melibatkan seluruh unsur yang terdapat di Perwakilan RI melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan. Saat ini, ke-24 Perwakilan RI yang memiliki Pelayanan Warga telah dilengkapi dengan Satgas yang tugas pokoknya memastikan pelayanan yang prima bagi WNI.

Dari data statistik sepanjang tahun 2011, prosentase terbesar permasalahan dan kasus yang dialami WNI khususnya TKI, terjadi di Malaysia dan Arab Saudi. Berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan WNI di kedua negara tersebut telah dilakukan antara lain berupapenambahan jumlah dan kualitas staf yang ditempatkan di dua Negara tersebut serta dukungan dana yang memadai. Di samping itu Kementerian Luar Negeri terus berupaya menjajaki terbentuknya MoU sebagaipayung hukum perlindungan WNI di kedua negara tersebut.

Revisi MOU dengan Malaysia yang dinegosiasikan sejak tahun 2009 telah diselesaikan dan ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2011dan disepakati pencabutan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia per 1 Desember 2011 dengan dibentuknya *Joint Task Force* untuk mengawal dan memastikan proses penempatan serta perlindungan sesuai dengan *amandemen* MOU yang memberikan jaminan dan kepastian perlindungan khususnya terhadap TKI. Sedangkan dengan Saudi Arabia, setelah perundingan yang sangat alot dan memakan waktu cukup lama, pada tanggal 29 Mei 2011Pemerintah Saudi menyepakati adanya *letter of intent* untuk merumuskan MOU penempatan tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia dalam waktu 6 bulan. Namun demikian, Pemerintah RI terus melakukan berbagai upaya agar perlindungan TKI dapat dilakukan sesuai dengan harapan kita, untuk itu kebijakan moratorium pengiriman TKI PLRT ke Saudi Arabia akan dijadikan momentum untuk memastikan perlindungan terhadap TKI dapat dicapai.

Upayaperlindungan warga negara Indonesia selama tahun 2011 ini memiliki dinamika yang cukup tinggi. Kemlu beserta instansi terkait pusat maupun Perwakilan RI telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Permasalahan yang menonjol pada tahun 2011 adalah evakuasi WNI, repatriasi dan deportasi, tuntutan hukuman mati, pembebasan sandera WNI dan pemutihan status TKI ilegal di Malaysia.

Pada tahun 2011 sebanyak 16.562 WNI juga telah dipulangkan dari berbagai negara (di luar deportasi) baik melalui evakuasi maupun repatriasi.

Kegiatan evakuasi tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 3.981 orang WNI di negara-negara Timur Tengah yang dilanda krisis politik yaitu Mesir, Tunisia, Libya dan Yaman. Kegiatan evakuasi juga dilaksanakan bagi WNI yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami di Jepang.

Selain itu Pada tahun 2011 sebanyak 26.805 WNI juga telah dipulangkan dari berbagai negara (di luar evakuasi), baik melalui mekanisme repatriasi maupun deportasi.

Evakuasi	Jumlah WNI
Jepang	252
Libya	998
Mesir	2.432
Tunisia	33
Yaman	273
Total	**3.988**

Adapun melalui skema repatriasi telah dipulangkan sebanyak 12.581 orang dengan rincian sebagai berikut:

Repatriasi WNI di Luar Negeri (2011)

No.	Kawasan	Repatriasi
1.	Afrika	255
2.	Amerika	33
3.	Eropa	28
4.	Pasifik dan Australia	25
5.	Asia	3.051
6.	Timur Tengah	9.189
	Total	**12.581**

Selain itu pada tahun 2011 terdapat WNI/TKI yang melanggar keimigrasian di beberapa negara dan dideportasi oleh pemerintah yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

Deportasi WNI di Luar Negeri (2011)

No.	Kawasan	Deportasi
1.	Afrika	3
2.	Amerika	7
3.	Eropa	15
4.	Pasifik dan Australia	146
5.	Asia	3.509
6.	Timur Tengah	10.716
	Total	**14.396**

PembebasanSandera ABK/WNI

Sepanjang tahun 2011 telah terjadi pembajakan enam kapal yang melibatkan ABK WNI sebagai korban penyanderaan, yaitu 1 ABK WNI di kapal berbendera Aljazair MV Blida (dibajak sejak 1 Januari 2011), 20 ABK WNI di kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus (dibajak pada 16 Maret 2011),13 ABK WNI di kapal tanker berbendera Singapura MT Gemini (dibajak sejak 30 April 2011),

Perlindungan ABK di Luar Negeri (2011)

No	Nama Kapal	Bendera Kapal	Jum-lah ABK	Tgl. Pem-bajakan	Tgl. Pembeba-san
1.	Jih Chun Tsai 68	Taiwan	10	1/4/10	19/3/11
2.	Vega 5	Mozambik	3	27/12/10	12/3/11
3	MV Blida	Aljazair	1	1/1/11	03/11/11
4	Samho Jewelry	Korsel	2	15/1/11	21/1/11
5	MV Sinar Kudus	Indonesia	20	16/3/11	1/5/11
6	Hanjin Tianjin	Korsel	6	22/4/11	22/4/11
7	MT Gemini	Singapura	13	30/4/11	30/11/11
8	Chin I Wen	Taiwan	6	4/11/11	6/11/11

Catatan:
- Jumlah ABK WNI disandera perompak Somalia di tahun 2011 : 61 orang
- Jumlah ABK WNI berhasil dibebaskan : 61

2 ABK WNI Kapal berbendera Korea Selatan Samho Jewelry (dibajak sejak 15 januari 2011), 6 ABK WNI di kapal berbendera Korea Selatan Hanjin Tianjin (dibajak sejak 22 April 2011) dan 6 ABK WNI di kapal berbendera Taiwan Chin I Wen (dibajak sejak 4 November 2011). Keenam kapal tersebut yang dibajak pada tahun 2011, semuanya telah berhasil dibebaskan.

Adapun 2 kapal Jih Chun Tsai 68 berbendera Taiwan dan Vega lima berbendera Mozambik yang telah dibajak sejak tahun 2010 dapat dibebaskan pada tahun 2011.

WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Hingga bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 207 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati dan masih menjalani proses hukum. Mereka tersebar di beberapa negara di luar negeri yaitu di Arab Saudi 45 orang, Malaysia 143 orang, China 15 orang, Iran 1 orang, Singapura 2 orang dan Brunei Darussalam 1 orang, dengan keterlibatan dalam berbagai kasus yang antara lain kasus pembunuhan,

narkoba, sihir, kepemilikan senjata api dan tindak asusila perzinahan.

Di luar angka tersebut, sepanjang tahun 2011 terdapat WNI yang terlepas dari hukuman mati, baik bebas murni maupun dengan pengurangan hukuman sebanyak 31 orang dengan rincian Arab Saudi (2 orang bebas murni dan 3 orang bebas menunggu proses deportasi), Malaysia (6 orang bebas murni, dan 8 orang mendapatkan vonis hukuman lebih ringan), Cina (10 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup) dan Iran (2 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup).

Di antara WNI/TKI yang terbebas dari hukuman mati adalah Sdr. Darsem bt Dawud Tawar, TKI asal Subang yang dibebaskan melalui pembayaran uang diyat sebesar Rp. 4,7 milyar oleh Kementerian Luar Negeri.

Adapun rincian data WNI terancam hukuman mati di luar negeri dapat dilihat pada tabel jumlah WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Terhadap seluruh WNI yang terancam hukuman mati tersebut,pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan hukum dan akses kekonsuleran. Pemerintah melalui Perwakilan RI terus mengawal proses hukum dengan tujuan mendapatkan keringanan hukum dan menghindari jatuhnya hukuman mati bagi mereka yang terlibat kriminal. Upaya pemerintah tersebut juga dilakukan dengan pendekatan oleh pejabat tinggi negara mulai dari Presiden, Menteri, dan Kepala Perwakilan RI, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam tahun 2011, tercatat WNI/TKI yang terbebas dari hukuman mati sebanyak 34 orang dengan rincian di Malaysia 12 orang (6 orang bebas murni, 6 orang mendapat vonis hukuman lebih ringan), di Arab Saudi 10 orang (2 orang bebas murni, 3 orang bebas dalam proses deportasi, dan 5 orang telah mendapat pemaafan), di Cina 10 orang telah mendapatkan vonis hukuman seumur hidup, dan di Iran 2 orang telah mendapat vonis hukuman seumur hidup

Di antara WNI/TKI yang terbebas dari hukuman mati adalah Sdr. Darsem bt Dawud Tawar, TKI asal Subang yang dibebaskan melalui pembayaran uang diyat sebesar Rp. 4,7 milyar oleh Kementerian Luar Negeri.

Namun dalam beberapa kasus di beberapa negara, untuk mendapatkan akses kekonsuleran tidaklah mudah karena negara tersebut tidak mengikuti praktek internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus diinfokan kepada kantor perwakilan pemerintahnya. Eksekusi hukuman mati Ruyati bt Satubi merupakan salah satu contoh walaupun sejak awal Perwakilan RI telah mengawal proses hukumnya. Untuk lebih memaksimalkan bantuan advokasi dan litigasi kepada WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, pemerintah sedang mempersiapkan pengacara tetap (*retainer lawyer)* di Malaysia dan Arab Saudi yang akan mengawal proses hukum setiap WNI/TKI yang menghadapi kasus hukum pidana berat.

Foto 165. Presiden RI dan Ibu Ani Yudhoyono menyambut WNI yang dievakuasi dari Mesir

Pembelaan hukum bagi WNIdi luar negeri yang terancam hukuman mati telah menjadi perhatian berbagai kalangan di tanah air termasuk Presiden RI. Dalam rangka merespon Presiden telah

mengeluarkan Keppres No 17 tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan kasus WNI/TKI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati dan Keppres No. 15 tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri. Selanjutnya Satgas dan Tim Terpadu dimaksud bersama dengan Kementerian Luar Negeri bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan.

Selain menangani kasus-kasus tersebut, Perwakilan RI di luar negeri telah berhasil memperjuangkan hak-hak TKI antara lain hak-hak gaji, kompensasi ataupun santunan untuk ahli waris yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri (2011)

No.	Negara	Profil Kasus	Jumlah		Keterangan
1	Arab Saudi	Proses Penyidikan	13 orang	46 orang	• Kasus Pembunuhan: 39 orang • Kasus Perzinahan: 4 orang • Kasus Sihir: 3 orang
		Pengadilan Tingkat Pertama	9 orang		
		Pengadilan Tingkat Banding	9 orang		
		Pengadilan Tingkat Kasasi (*critical*)	5 orang		
		Ta'dzir	3 orang		
		Telah Mendapat Pemaafan	5 orang		
		Telah Diputus Bebas Menunggu Deportasi	3 orang		
2.	Malaysia	Pengadilan Tingkat Pertama	61 orang	143 orang	• Kasus Narkoba: 116 orang • Kasus Pembunuhan: 26 orang • Kasus Kepemilikan Senjata Api: 1 orang
		Pengadilan Tingkat Banding	48 orang		
		Pengadilan Tingkat Kasasi	17 orang		
		Pengajuan Grasi	17 orang		
3.	China	Proses Penyidikan	2 orang	23 orang	• Seluruhnya Merupakan Kasus Narkoba
		Proses Persidangan	2 orang		
		Proses Perubahan Hukuman Mati Ke Hukuman Seumur Hidup	11 orang		
		Menjalani Hukuman Penjara (Telah Mendapat Perubahan Hukuman Mati Menjadi Hukuman Seumur HIdup	8 orang		
4.	Iran	Proses Pengadilan	1 orang	3 orang	• Seluruhnya merupakan kasus narkoba (Kurir)
		Telah Divonis Seumur Hidup	2 orang		
5.	Singapura	*Pre-Trial Conference*	2 orang	2 orang	• Keduanya Merupakan Kasus Pembunuhan
6.	Brunei Darussalam	Proses Penyidikan	1 orang	1 orang	• Merupakan Kasus Pembunuhan
Total WNI Terancam Hukuman Mati				217 orang	

VI.4 Diplomasi Ekonomi

Salah satu prioritas utama kegiatan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mendukung upaya pembangunan nasional. Dalam kaitan ini maka diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri dan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.

Sepanjang tahun 2011, upaya-upaya diplomasi ekonomi Indonesia, telah menunjukan hasil-hasil konkrit. Hal ini tercermin dari peningkatan volume perdagangan dengan negara-negara mitra utama ekonomi Indonesia. Di sisi investasi, sepanjang tahun 2011 juga ditandai dengan meningkatnya komitmen dari berbagai negara untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

Selain upaya-upaya untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dengan negara-negara pasar tradisional, diplomasi ekonomi Indonesia juga difokuskan pada upaya-upaya untuk merintis dan mengembangkan pasar-pasar baru non-tradisional di sejumlah kawasan yang selama ini potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti misalnya di kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Asia Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan lain-lain.

Perwakilan-perwakilan RI di luar negeri juga aktif mempromosikan berbagai kerangka kerja sama ekonomi dnegan negara-negara akreditasi. Hal ini tercermin dari disepakatinya sejumlah kesepakatan/MoU/perjanjian di bidang ekonomi yang memberikan payung bagi pengembangan kerja sama ekonomi Indonesia dengan berbagai negara sahabat, baik yang bersifat antar pemerintah maupun antar swasta.

Total Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra Strategis

No	Negara	Total Nilai Perdagangan (miliar USD)		Perubahan (%)
		Jan-Agu 2010	Jan-Agu 2011	
1	Australia	5.0	6.7	33.2%
2	Jepang	27.0	35.1	29.9%
3	Republik Korea	12.8	18.5	44.8%
4	RRT	22.5	30.6	36.1%
5	India	8.2	12.1	46.9%
6	Afrika Selatan	0.8	1.4	75.9%
7	Amerika Serikat	15.6	18.1	16.3%
8	Brazil	1.8	2.2	24.3%
9	Perancis	1.5	2.0	30.9%
10	Rusia	1.1	1.6	41.9%
11	Turki	0.9	1.3	50.9%

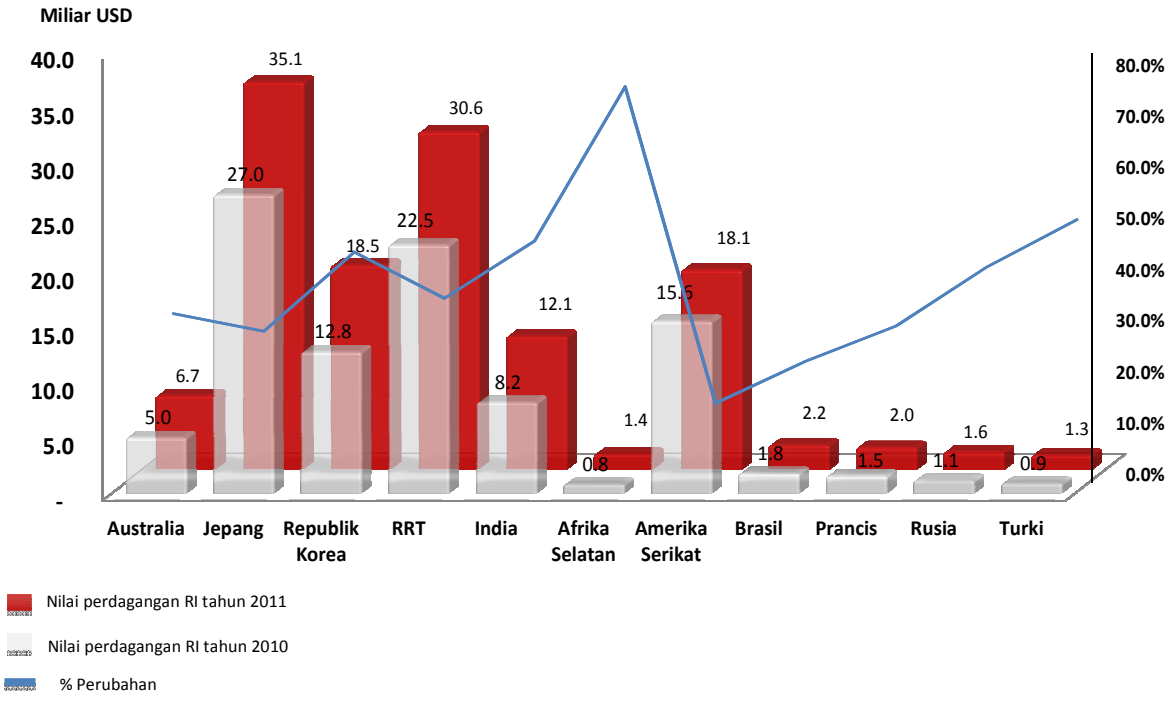

Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan

No.	Negara	Ekspor Nonmigas (miliar USD)		Perubahan
		Jan-Agu 2010	Jan-Agu 2011	(%)
I	**ASEAN**	**19,1**	**24,8**	**29,4%**
1.	Singapura	6,9	8,6	25,6%
2.	Malaysia	5,4	7,0	30,7%
3.	Thailand	3,0	4,2	42,6%
4.	ASEAN lainnya	4,0	4,9	24,3%
II	**Eropa**	**12,2**	**15,7**	**28,7%**
5	Jerman	2,2	2,5	16,9%
6.	Perancis	0,8	1,0	18,0%
7.	Inggris	1,3	1,3	1,5%
8.	Negara Eropa Lainnya	7,9	10,8	37,5%
III	Negara Utama Lainnya	93,3	123	31,2%
9.	Cina	46,6	61,5	31,9%
10.	Jepang	9,3	14,9	60,1%
11.	Amerika Serikat	11,8	13,6	15,8%
12.	Australia	9,7	11,8	22,3%
13.	Korea Selatan	1,6	2,1	29,9%
14.	Australia	5,1	5,7	13,0%
15.	Taiwan	2,3	3,0	33,1%
16.	India	6,9	10,2	48,5%
	Jumlah	155,9	203,9	30,8%

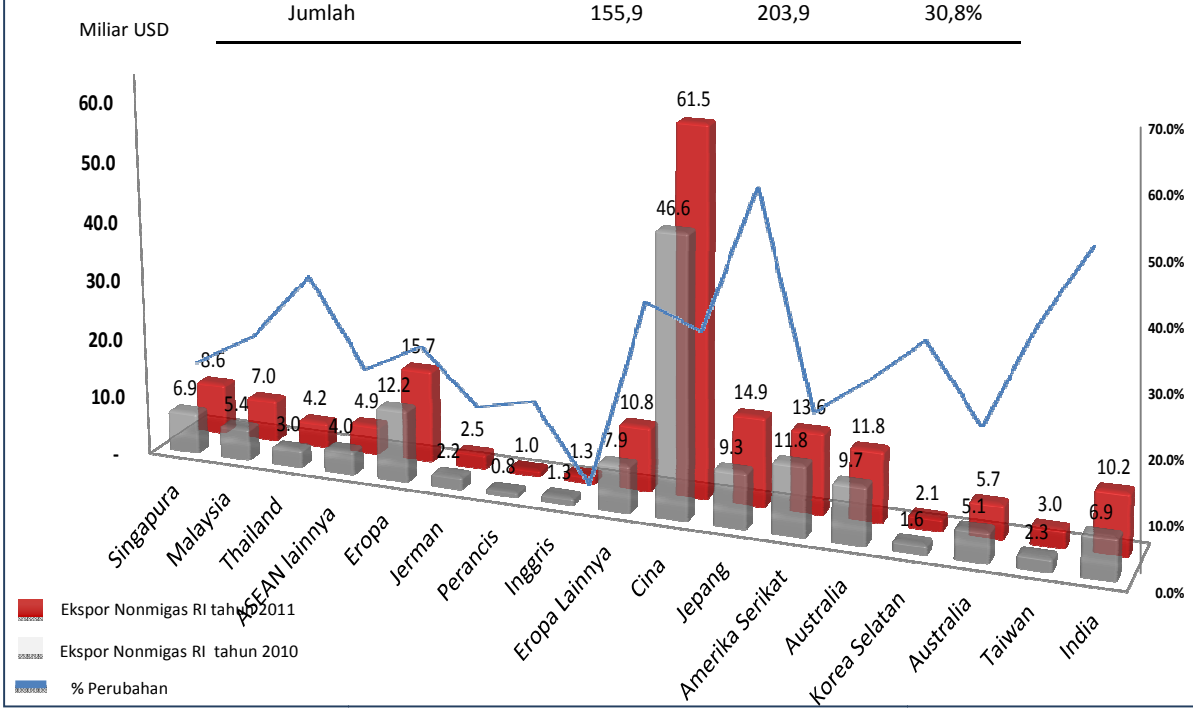

VI.5 Kerja Sama Teknik

Kerja sama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri dan menjadi alat diplomasi yang akan mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional, dan internasional.

Perkembangan kerja sama teknik tidak dapat dilepaskan dari *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) tahun 1978 yang merupakan tonggak lahirnya Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB). KTNB yang merupakan bagian dari kerangka Kerja sama Selatan-Selatan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan di negara-negara berkembang melalui pembangunan kapasitas yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat yang juga berarti mendukung pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs).

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, Timur Tengah, Asia dan Pasifik dijalin pula melalui pemberian bantuan kerja sama teknik khususnya di bawah payung Kerja Sama Selatan-Selatan.

Meningkatnya status Indonesia sebagai negara donor atau lebih tepatnya negara pemberi bantuan pembangunan bukan berarti Indonesia tidak lagi membutuhkan bantuan teknik dari negara maju dan lembaga donor internasional baik dalam bentuk keuangan, tenaga ahli atau narasumber serta peralatan. Sebagai negara berkembang Indonesia tetap memerlukan peningkatan kapasitas untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Masa depan kerja sama teknik Indonesia akan sangat tergantung kepada beberapa hal seperti ketersediaan anggaran, SDM dan kelembagaan. Adanya suatu lembaga yang kuat dan berfungsi penuh sebagai pelaksana kerja sama teknik dan didukung oleh anggaran yang kuat pula, akan menjamin "*sustainability*" program-program kerja sama teknik Indonesia.

Sasaran

Kerja sama teknik juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antar negara. Melalui berbagai kegiatan dalam kerangka kerja sama teknik, diharapkan akan terjadi saling tukar informasi, pengalaman serta menciptakan dasar yang kuat bagi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara peserta. Melalui kerja sama Selatan-Selatan ini negara-negara berkembang diharapkan dapat saling membantu dalam pembangunan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dan mengejar ketertinggalannya, terutama mengingat adanya kecenderungan menurunnya bantuan dari negara-negara maju atau *aid fatique* kepada negara-negara berkembang.

Kegiatan Diplomasi

Berdirinya Direktorat Kerja Sama Teknik di Kemlu sejak tahun 2006, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memberikan bantuan tekniknya bagi sesama negara berkembang di berbagai bidang. Selama periode 2006-Oktober 2011 tercatat 42 program pelatihan telah dilaksanakan oleh Kemlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dengan total peserta 542 orang dari berbagai negara di kawasan Asia, Pasifik, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.

Beberapa bidang spesifik pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Kemlu antara lain:

1. Pengembangan inkubator bisnis untuk pemberdayaan UKM
2. Pengembangan teknologi mikro hidro
3. Pendirian dan pengelolaan institusi *microfinance*
4. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan IT
5. Pengembangan *ecotourism*
6. Adaptasi perubahan iklim
7. Demokratisasi dan *good governance*
8. Rehabilitasi hutan
9. Budidaya udang dan kerapu
10. Pengembangan teknologi pasca panen
11. Mekanisasi dan pengelolaan air untuk pertanian lahan kering

Pada periode 2007-2011, Kemlu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan program pemagangan petani asing di Indonesia yang telah diikuti oleh para petani dari Fiji, Gambia, Senegal, Madagaskar, Kamboja, Myanmar, Mozambik dan Komoros.

Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Yayasan Amal Masyarakat Petani Indonesia (YAMPI), Kemlu juga melaksanakan program pengiriman tenaga ahli pertanian dan petani Indonesia ke Tanzania dan Gambia dalam rangka revitalisasi pusat pelatihan pertanian Indonesia di kedua negara tersebut.

Kemlu juga berperan serta dalam pemberian bantuan traktor tangan dan pompa air ke beberapa negara di kawasan Afrika dan Pasifik.

Sepanjang tahun 2011, Kemlu telah menyelenggarakan sekitar 12 kegiatan dalam bentuk pelatihan dan pemagangan yang melibatkan sebanyak 108 peserta yang berasal dari wilayah Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Pasifik.

1. *International Training Program on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables*, di Jakarta dan Lembang, Indonesia, pada tanggal 7-21 April 2011, diikuti oleh delapan orang peserta dari Bangladesh, Fiji, Laos, Sri Lanka dan Timor-Leste serta 6 peserta dari Indonesia.

2. *Apprenticeship Program for Comorian Farmers in Indonesia*, di Jakarta, Yogyakarta, Kuningan dan Lembang, Indonesia, pada tanggal 3 April-27 Mei 2011, diikuti oleh lima peserta dari Komoros.

3. *Dispatch of Indonesian Agriculture Experts to Tanzania*, pada tanggal 10 Maret-17 Juni 2011, seorang tenaga ahli pertanian dan seorang petani Indonesia berhasil membina 25 petani di Mkindo, Tanzania, dan memberikan pelatihan singkat kepada 300 petani di Zanzibar.

4. *Dispatch of Indonesian Agriculture Experts to Gambia,* pada tanggal 10 September-23 November 2011 melibatkan dua orang tenaga ahli pertanian dan seorang petani Indonesia.

5. *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries*, di Yogyakarta, Indonesia, pada tanggal 25 April-4 Mei 2011, diikuti oleh 12 orang peserta dari Cook Islands, Fiji, Marshall Islands, Niue, PNG, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga dan Vanuatu.

6. *International Workshop on Appropriate Waste Management Technologies*, di Denpasar, Bali, Indonesia, pada tanggal 6-11 Juni 2011, diikuti oleh 15 orang peserta dari India, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Viet Nam serta peserta dari Indonesia.

7. *International Workshop on Multi Disaster Risk Management,* di Banda Aceh, pada tanggal 22-28 Oktober 2011, diikuti oleh 16 orang peserta dari Afghanistan, Fiji, Lao PDR, Samoa, Viet Nam, Sri Lanka, India, Pakistan, Chili, Maladewa, Myanmar dan Indonesia.

8. *Training Program on Business Incubator Management,* di Amman, Jordan, pada tanggal 28 November-1 Desember 2011, diikuti oleh 20 orang peserta dari Palestina.

9. *International Training Program on Public Administrative Reform for Good Governance*, di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 18-24 September 2011, diikuti oleh 18 orang peserta dari Afghanistan, Fiji, Kamboja, Lao PDR, Maladewa, Myanmar, Timor-Leste, Uzbekistan dan Viet Nam serta 4 (empat) peserta dari Indonesia.

10. *International Training Program on Forestry for Timor-Leste: Focusing on Marine Conservation*, di Kupang, NTT, pada tanggal 12-26 Juli 2011, diikuti oleh lima orang peserta dari Timor-Leste.

11. *International Training Program on Forestry for Timor-Leste: Focusing on Forest Inventory*, di Kupang, NTT, pada tanggal 3-17 Oktober 2011 dan diikuti oleh lima orang peserta dari Timor-Leste.

12. *Dispatch of Indonesia Language Teacher and Angklung Instructor to Timor-Leste,* Dili, Timor-Leste, dilaksanakan pada tanggal 22 November-21 Desember 2011.

VI.6 Kerja Sama Internasional Pemberantasan Korupsi

Sasaran

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah membantu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam kaitan ini, mengingat tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan bersifat lintas batas negara, maka Pemerintah RI telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara melalui mekanisme secara bilateral, regional

maupun multilateral dalam rangka ekstradisi dan pemulihan aset (*asset recovery*) melalui bantuan hukum timbal balik masalah pidana (*mutual legal assistance*-MLA) yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Kegiatan Diplomasi

Dalam menggalang kerja sama internasional pemberantasan korupsi, Indonesia selaku negara pihak pada *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), secara konsisten mendorong negara-negara pihak lain untuk bekerja sama dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC, khususnya dalam kepentingan RI terkait upaya pengembalian aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memperluas cakupan kerja sama internasional, mengingat Konvensi tersebut saat ini menjadi acuan bagi negara-negara dalam pemberantasan Korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Upaya tersebut juga dilakukan dalam kerangka kerja sama regional, seperti *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (AMLAT).*

Kemudian dalam kerangka kerja sama bilateral, Indonesia telah menjalin kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi dengan beberapa negara. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Australia, China, Korea Selatan, Hong Kong SAR dan India. Untuk perjanjian ekstradisi, Indonesia telah mengikatkan diri dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong SAR, Korea Selatan, Singapura, China dan India. Adapun, terhadap negara yang belum mempunyai perjanjian bantuan hukum timbal balik maupun ekstradisi, Indonesia melakukan kerja sama berdasarkan hubungan bilateral yang baik dengan negara tersebut dan prinsip *reciprocal*.

Di tingkat nasional, Pemerintah membentuk Tim Terpadu Pencari Tersangka dan Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Tim Terpadu) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan dan diketuai oleh Wakil Jaksa Agung.

Terkait keanggotaan Kemlu dalam Tim Terpadu, sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Kemlu menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. sebagai *chief negotiator* dalam proses perundingan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi dengan yurisdiksi asing;
b. sebagai saluran diplomatik untuk memfasilitasi semua komunikasi dan pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi;
c. penyusunan dan penyampaian permohonan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

Sejumlah kemajuan telah dicapai dalam upaya melacak keberadaan aset-aset yang diduga merupakan hasil korupsi dan upaya-upaya untuk mengekstradisi pelaku-pelaku korupsi di sejumlah negara ke Indonesia.

VI.7 Penanganan Perbatasan

Sasaran

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penetapan hak kedaulatan RI yang dijamin oleh hukum internasional, Kementerian Luar Negeri secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan *Border Diplomacy*. Diplomasi Perbatasan merupakan upaya untuk menetapkan perbatasan dan mengelola kawasan perbatasan melalui kerja sama antar negara atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri RI dan hukum internasional yang berlaku. Kebijakan ini dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan perundingan penetapan dan penegasan batas wilayah negara yang mencakup batas laut dan batas darat RI dengan sejumlah negara tetangga. Adapun batas udara mengikuti yurisdiksi pada batas darat dan batas laut.

Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan pada matra darat, Indonesia berbatasan dengan 3 (tiga) negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini.

Dari negara tersebut di atas, penetapan batas secara tuntas telah dilakukan dengan Papua Nugini, yaitupada matra darat dan laut. Indonesia juga telah menyepakati batas Landas Kontinen (LK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Australia.

Pada matra laut, Indonesia telah menyepakati sebagian segmen batas Laut Wilayah dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia juga sudah menyepakati batas Landas Kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Viet Nam, Australia, dan Papua Nugini. Hingga tahun 2011 telah terdapat 16 (enam belas) perjanjian perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Kegiatan Diplomasi

a. Perundingan batas maritim

Perundingan penetapan batas maritim secara teknis dilakukan melalui forum *Technical Meeting on Maritime Delimitation*/ Pertemuan Teknis Batas Maritim. Tim Teknis Indonesiadikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri dan beranggotakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal), Mabes TNI, Mabes TNI-AL, Dinas Hidrologi dan Oseanografi TNI-AL (Dishidros). Tim Teknis memiliki Dewan Penasehat Delimitasi Batas Maritim Indonesia yang terdiri dari Dr. Nur Hassan Wirajuda, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Duta Besar Nugroho Wisnumurti, Prof. Dr. Etty Agoes, dan Prof. Hikmahanto Juwana.

Perkembangan perundingan penetapan batas maritim:

1) RI-Malaysia:

Sejak tahun 2005, Indonesia dan Malaysia telah melaksanakan 21 kali Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim. Segmen-segmen yang dirundingkan meliputi a) Selat Malaka (Zona Ekonomi Eksklusif), b) Selat Malaka bagian Selatan (Laut Wilayah), c) Selat Singapura (Laut Wilayah), d) Laut Cina Selatan (Laut Wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif), e) Laut Sulawesi (Laut Wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen).

Sepanjangtahun 2011, Indonesia telah melakukan 4 rangkaianPertemuan Teknis Batas Maritim. Pertemuan teknis terakhir yaitu Pertemuan Teknis ke-20 dilakukan di Port Dickson, 16-18 Oktober 2011. Hingga pertemuan teknis terakhir, telah diperoleh kemajuan pembahasan batas maritim khususnya di Laut Sulawesi. Kemajuan pada tingkat teknis tersebut saat ini telah disampaikan secara berkesinambungan kepada pimpinan pemerintahan masing-masing guna mendapat arahan kebijakan dan teknis lebih lanjut. Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim akan semakin ditingkatkan pada tahun mendatang untuk mencapai titik temu penyelesaian penetapan batas maritim kedua negara.

Disamping melakukan Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim, kedua negara sejak tahun 2010 telah menjajaki kemungkinan disusunnya *Standard Operating Procedure/ Rules of Engagement* yang dimaksudkan sebagai *common guideline/* petunjuk bersama bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran di wilayah yang memiliki tumpang tindih klaim kepemilikan. Pembahasan konsep petunjuk bersama tersebut dari pihak Indonesia dikoordinir oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan dari pihak Malaysia dikoordinir oleh oleh Majelis Keselamatan Negara. Pertemuan pembahasan konsep tersebut secara informal dilakukan pada paruh pertama tahun 2011 dan secara formal berlangsung pada bulan Oktober dan November 2011. Kedua negara diharapkan dapat menyepakati draft petunjuk bersama sebelum pertemuan JCBC tahun 2012.

2) RI-Singapura:

Setelah melalui rangkaian perundingan sekitar 7 tahun, Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua

Negara di Bagian Barat Selat Singapura di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009. Perjanjian tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 dan kedua negara telah mempertukarkan instrumen ratifikasi pada tanggal 30 Agustus 2010.

Saat ini batas maritim yang masih harus ditetapkan adalah garis batas Laut Wilayah di bagian Timur Selat Singapura, yaitu: a) Segmen Timur 1 (Batam – Changi) dan b) Segmen Timur 2 (Pedra Branca-Bintan). Segmen Timur 2 akan dibahas setelah diperoleh kejelasan status kepemilikan South Ledge antara Singapura-Malaysia pasca keputusan Mahkamah Internasional tahun 2008.

Kedua negara telah melakukan Pertemuan Teknis Pertama guna membahas penetapan batas Laut Wilayah di segmen Timur 1 (Batam-Changi)di Singapura tanggal 13-14 Juni 2011.

3) RI-Viet Nam:

Indonesia dan Viet Nam telah menandatangani Perjanjian Batas Landas Kontinen (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary*) pada tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2007. Setelah disepakatinyagaris batas Landas Kontinen, Indonesia dan Viet Namtelah melakukan perundingan untuk membahas penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif.

4) RI-Thailand

Indonesia dan Thailand saat ini masih membahas perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Pertemuan Teknis pertama telah dilangsungkan di Jakarta pada bulan Agustus 2003 dan akan dilanjutkan di Thailand pada waktu yang masih perlu disepakati bersama.

5) RI-Filipina

Perundingan batas maritim RI-Filipina telah dilakukan 7 (tujuh) kali sejak tahun 2005 hingga bulan Juli 2007. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan perundingan penetapan batas maritimnya dengan memulai kembali Pertemuan Teknis sebagai tindak lanjut dari komitmen kedua Menteri Luar Negeri yang tertuang dalam *Joint Declaration on Maritime Boundary Delimitation* yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2011.

Sebagai tindak lanjut Deklarasi tersebut, kedua Tim Teknis akan melakukan Pertemuan Teknis guna membahas penetapan batas maritim kedua negara pada 15-17 Desember 2011 di Manila.

6) RI-Palau

Sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, salah satu persoalan yang menjadi prioritas adalah penyelesaian perbatasan maritim (Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif) kedua negara. Kedua negara telah melakukan Pertemuan Teknis pertama di Manila, 22-23 April 2010 dan dilanjutkan dengan Pertemuan Teknis kedua di Koror, 29 November – 1 Desember 2010.

7) RI-India

Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan India yang masih harus dirundingkan adalah penetapan garis batas ZEE. Kedua negara masih mengupayakan kecocokan waktu untuk memulai perundingan ZEE.

8) RI-Timor-Leste

Merujuk pada hasil JMC RI-Timor-Leste tahun 2003, telah disepakati bahwa perundingan batas maritim baru akan dimulai setelah batas darat selesai ditetapkan.

b. Penetapan dan penegasan batas darat

1) RI-Malaysia

Batas darat Indonesia-Malaysia pada dasarnya mengikuti perjanjian penetapan batas antara Belanda dan Inggris di Kalimantan tahun 1891, 1915 dan 1928. Namun kedua negara masih belum berhasil sepenuhnya menyelesaikan survei dan demarkasi di beberapa segmen batas. Perbatasan darat antara kedua negara juga masih menyisakan beberapa *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di sektor Kalimantan Barat-Sarawak dan Kalimantan Timur-Sabah.

Untuk pengelolaan perbatasan dan penyelesaian OBP, Indonesia dan Malaysia membentuk forum *Joint Indonesia Malaysia Boundary Commitee on the Demarcation and Survey of the International Boundary* (JIM). Di forum ini Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri. Forum JIM merupakan muara dari pertemuan teknis kedua negara yang membahas penanganan penegasan batas darat termasuk menjajaki modalitas penyelesaian OBP. Untuk tahun 2011, pertemuan ke-36 JIM berlangsung di Solo, 11-15 Desember 2011.

Selain JIM, kedua negara juga memiliki forum *General Border Committee* (GBC) yang diketuai oleh Menteri Pertahanan. Di bawah GBC terdapat forum *High Level Committee* yang merupakan pelaksana harian dari GBC yang dari pihak RI dikoordinir oleh Panglima TNI. Forum GBC lebih dimaksudkan untuk membahas situasi keamanan termasuk sosial ekonomi di perbatasan kedua negara.

Sesuai hasil pertemuan *Joint Commission on Bilateral Cooperation* (JCBC) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Kuala Lumpur, 10-12 Oktober 2011 dan pertemuan *Annual Consultation* antara Presiden RI dan PM Malaysia di Lombok, 21 Oktober 2011, kedua kepala pemerintahan juga mendorong JIM untuk dapat menyelesaikan demarkasi di perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak dan Kalimantan Timur – Sabah. Disamping itu, telah disepakati pula pembentukan *Working Group on Political, Security and Border Issues* yang salah satu tugasnya akan menghimpun hasil pertemuan JIM dan GBC. *Working Group* direncanakan bertemu sebelum pertemuan JCBC berikutnya.

2) RI-Papua Nugini

Indonesia dan PNG tidak memiliki masalah pending penetapan batas wilayah. Kedua negara mempunyai *forum Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan perbatasan termasuk diantaranya kegiatan pengecekan dan pemeliharaan tugu batas. Sejak pertama kali dibentuk, JBC RI-PNG telah menyelenggarakan 27 kali pertemuan. Pertemuan yang terakhir adalah Pertemuan JBC RI-PNG ke-28 diselenggarakan di Batam pada tanggal 21-25 Juni 2011. Ketua Delri untuk JBC RI-PNG adalah Menteri Dalam Negeri dan Ketua Tim Perunding adalah Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.

3) RI-Timor-Leste

Pada tanggal 8 April 2005 di Dili, Timor-Leste, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Timor-Leste, atas nama Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan Sementara antara Pemerintah RI dan Pemerintah Timor-Leste tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary*).

Sifat sementara atau provisional dari Persetujuan Sementara dimaksud adalah karena masih terdapat 3 (tiga*) unresolved segments* yaitu pada titik Dilumil/Memo, Bijael Sunan-Oben dan Noel Besi/Citrana.

Namun demikian perjanjian tersebut bersifat final, dalam arti bahwa 907 titik-titik koordinat yang telah disepakati tidak akan diubah lagi.

c. Submisi Indonesia kepada PBB terkait Batas Wilayah Indonesia

Pada tanggal 16 Juni 2008, Indonesia juga telah menyampaikan submisi parsial mengenai batas Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut di wilayah bagian barat laut Pulau Sumatera ke *UN Comission in the Limits of the Continental Shelf* (CLCS).

Setelah melakukan serangkaian presentasi, diskusi ilmiah dan perdebatan baik di pertemuan pleno CLCS maupun sub-komite CLCS selama tahun 2010, submisi Indonesia akhirnya dinyatakan dapat diterima dengan dikeluarkannya rekomendasi CLCS dan *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea* No. UN-LET-IDN 002 11 04 2011 pada tanggal 13 April 2011.

Hasil rekomendasi tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Indonesia yang menyetujui luas wilayah RI pada batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut di wilayah bagian barat laut Pulau Sumatera sebesar 4209 km2 (kurang lebih seluas pulau Madura).

VI.8 Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT)/*Genetic Resources and Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF)

Sasaran

Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) atau *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) adalah rezim baru (*sui generis*) yang mencoba memberikan perlindungan atas kekayaan budaya (berupa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional) dan sumber daya alam (berupa Sumber Daya Genetik) suatu bangsa atau kelompok masyarakat adat dalam konteks hak kekayaan intelektual. Kemunculan rezim ini dilatarbelakangi oleh isu 'ketidakadilan' yang dirasakan kelompok masyarakat adat, *indigenous people* dan juga negara-negara berkembang terhadap eksploitasi dan pemanfaatan GRTKF oleh negara maju secara berlebihan dan tidak adil, sementara belum terdapat rezim hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan efektif atas GRTKF. Indonesia memandang penting isu ini karena Indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia setelah Brazil yang memiliki sumber daya genetik.

Isu GRTKF sendiri mulai dibahas dalam *World Intellectual Property Rights*/WIPO sejak dibentuknya *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-GRTKF) pada akhir tahun 2000. Dalam mandat General Assembly/WIPO 2005, IGC–GRTKF ditugaskan untuk melaksanakan *text-based negotiation* guna pembentukan instrumen nasional bagi perlindungan GRTKF, sebelum tahun 2012. Namun demikian, perbedaan yang tajam antara negara maju dan negara berkembang menghambat penyelesaian *text-based negotiation*.

Diplomasi Indonesia

Indonesia telah melaksanakan upaya diplomasi aktif untuk memperjuangkan perlindungan GRTKF di forum-forum multilateral tersebut di atas. Indonesia juga aktif menjadi *leading country* dalam forum IGC-GRTKF dengan penyelenggaraan *Like Minded Countries Meeting* (LMCM) 1 pada bulan November 2009 dan LMCM 2 pada bulan Juni 2011 di Bali. Pertemuan LMCM bertujuan untuk menyamakan posisi negara-negara sepaham (*like-minded*) pada pembahasan isu GRTKF di forum WIPO.

Pertemuan LMCM 2 tersebut berhasil menyatukan pandangan dan posisi bersama di antara negara-negara *like-minded* dalam rangka menghadapi negosiasi berbasis teks lanjutan pada pertemuan WIPO IGC 19. Kesatuan pandangan dan posisi bersama LMCs tersebut tersurat dalam bentuk *Bali Recommendations to Advance the Work of WIPO to Establish an International Legal Instrument(s) on the Effective Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (Folklore)* dan 3 (tiga) rumusan *Draft*

Text, masing-masing mengenai *Traditional Knowledge (TK), Traditional Cultural Expressions (TCEs)* atau *Folklore* dan *Genetic Resources (GR*).

Pada pertemuan WIPO IGC-19, dokumen-dokumen tersebut kemudian disepakati negara-negara untuk menjadi *working documents (WIPO/GRTKF/IC/19/8, 8 July 2011)* yang akan digunakan pada pembahasan teks (*text based negotiation*) di sesi IGC berikutnya.

VI.9 Benah Diri

Sasaran

Keberhasilan pendekatan *all directions foreign policy* Indonesia tidak terlepas dari program penguatan kelembagaan Kemlu semenjak tahun 2001. Hal ini dimulai dengan benah diri yang ditekankan pada upaya melembagakan nilai-nilai kunci (*institutional culture)*guna mewujudkan tertib waktu, tertib administrasi, tertib fisik, serta keamanan personil, gedung, peralatan, dan informasi negara (3T+1A). Nilai-nilai tersebut terkait dengan integritas, kekitaan (*we feeling*), dan kepemilikan (*ownership*). Upaya Benah Diri menjadi peletak dasar dan titik tolak kepesertaan Kemlu dalam program Reformasi Birokrasi Nasional. Kedua upaya tersebut merupakan bagian integral dari proses perubahan di Kemlu yang dilakukan secara berkesinambungan, sistematik dan terukur dan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini juga secara implisit mengakui bahwa proses penguatan kelembagaan Kemlu perlu terus dilakukan di berbagai aspek yang terkait dengan kekhasan kapasitas (*distinctive capacity)* Kemlu (misalnya kekonsuleran).

Pada akhirnya, diharapkan Kemlu menjadi institusi pemerintah yang lebih profesional, akuntabel, transparan serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government)*.

Untuk mewujudkan proses perubahan termaksud, Kementerian Luar Negeri melaksanakan sistem pengendalian intern guna meningkatkan kehandalan pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik negara secara tertib dan akuntabel, serta mematuhi peraturan dan perundang-undangaan yang berlaku. Hasil kerja keras yang telah dilaksanakan selama ini, antara lain adalah peningkatan opini Badan Pengawas Keuangan RI (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri dari disclaimer pada tahun 2009 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010.

Penguatan Kelembagaan Kemlu

Sebagai prasyarat kepesertaan Kemlu dalam program Reformasi Birokrasi Nasional, Kemlu telah mempersiapkan Dokumen Usulan, *Road Map* dan Capaian Reformasi Birokrasi Kemlu. Selain itu, telah dilaksanakan Kegiatan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Dokumen *Job Grading* yang akan menjadi dasar penetapan besaran tunjangan kinerja (remunerasi) Pegawai Kemlu. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada Menpan dan RB akhir tahun 2011.

Program RB Kemlu diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan nyata sehingga Kemlu dapat lebih memenuhi harapan publik melalui terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik secara optimal, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan Kemlu diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dan mendukung suksesnya pelaksanaan program RB Kemlu.

Perkembangan Perbandingan Pegawai Kemlu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(dalam persen)

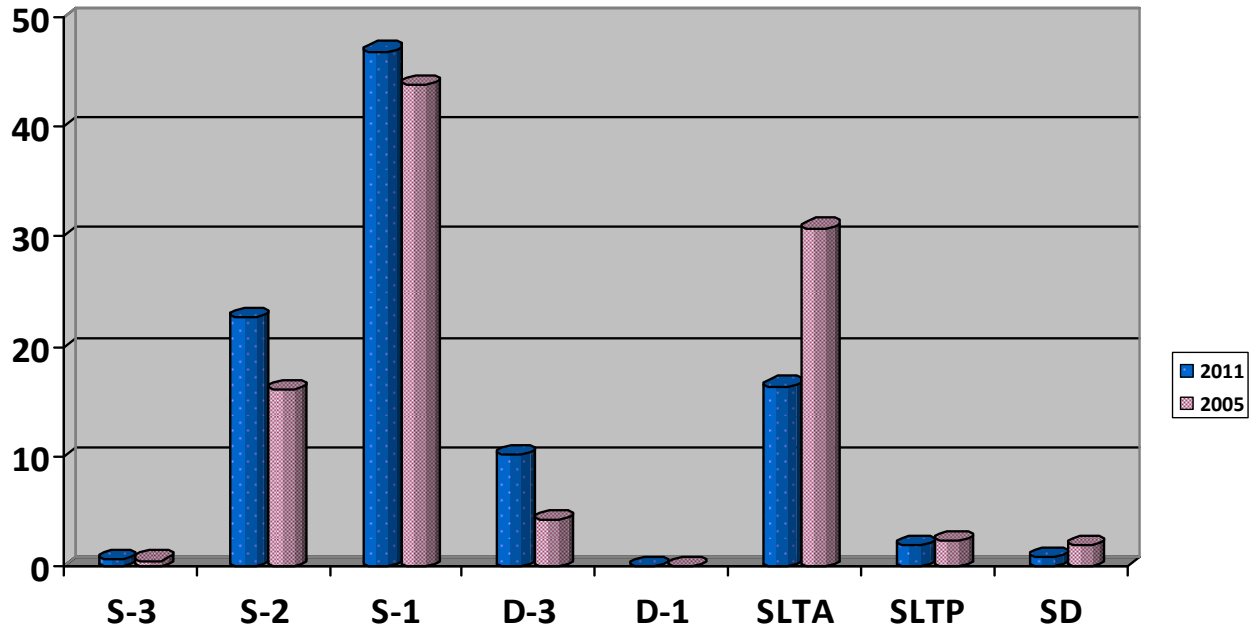

Berkaitan dengan penataan kelembagaan, Menteri Luar Negeri telah menandatangani Permenlu No. 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Permenlu ini disusun sebagai penyempurnaan berkelanjutan dari penataan organisasi Kementerian Luar Negeri yang telah dilaksanakan sejak Program Benah Diri tahun 2001. Penyempurnaan dalam Permenlu ini khususnya difokuskan pada perumusan ulang nomenklatur atau tugas pokok dan fungsi eselon III dan eselon IV pada direktorat regional untuk mempertajam diplomasi ekonomi.

Sementara itu dalam upaya pemantapan kelembagaan di Perwakilan RI, pada tahun 2011 Presiden RI telah menandatangani pembukaan 2 (dua) kantor Perwakilan RI setingkat Konsulat Jenderal melalui:

1. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul (tanggal 1 April 2011).
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal RI di Shanghai, RRT (tanggal 13 September 2011).

Dengan demikian diharapkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dapat dibuka dalam waktu dekat.

Menindaklanjuti persetujuan Presiden RI dan pertimbangan DPR RI untuk pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota PBB yang diusulkan tahun 2010, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-66 bulan September 2011 di New York Menteri Luar Negeri RI telah menandatangani naskah *Joint Communiqué* pembukaan hubungan diplomatik dengan Menteri Luar Negeri dari 8 (delapan) negara yaitu: Republik Dominica (20/9), Montenegro (21/9), Niger (21/9), Antigua dan Barbuda (23/9), El-Salvador (23/9), San Marino (26/9), Sao Tome dan Principe (27/9), dan Mauritania (27/9). Sedangkan penandatangan pembukaan hubungan diplomatik dengan 13 negara lainnya diharapkan dapat terlaksana pada tahun

2012, yaitu dengan negara: Nauru, Kiribati, Malawi, Tuvalu, Guinea-Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Bhutan, Chad, Botswana, Belize, Haiti, Saint Kitts and Nevis, dan Barbados. Pembukaan hubungan diplomatik ini akan semakin memperkuat pengakuan secara *de jure* atas hubungan baik yang selama ini telah terjalin dengan ke-21 negara dimaksud dan khususnya mempermudah upaya Pemerintah RI dalam memberikan bantuan, perlindungan, termasuk pelayanan kekonsuleran kepada WNI yang berada di wilayah negara tersebut.

Salah satu aspek penting dari penguatan lembaga Kemlu adalah upaya memberikan pelayanan prima kepada publik sehingga masyarakat dapat merasakan secara nyata dampak positif benah diri yang dilakukan oleh Kemlu. Dalam hal ini Kemlu telah melakukan penguatan pelayanan warga dengan membentuk 24 sistem pelayanan warga (*citizen service)* di 24 Perwakilan. Perbaikan pelayanan publik juga tercermin dari penerimaan Penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras untuk KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur KJRI Hong Kong, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dan Direktorat Fasilitas Diplomatik dan penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh KBRI Singapura, KBRI KualaLumpur, KJRI Hong Kong , Biro Kepegawaian untuk sistem seleksi CPNS, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk penanganan repatriasi dalam kerangka perlindungan WNI dan Direktorat Fasilitas Diplomatik untuk penerbitan kartu tanda pengenal bagi pejabat Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional di Indonesia. Kemlu juga memperoleh Penghargaan MURI sebagai satu-satunya Instansi Pemerintah yang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk sistem seleksi CPNS dan juga atas konsistensinya melakukan seleksi berbasis kompetensi.

Pembenahan di bidang SDM terus dilakukan. Salah satu sasaran pokok adalah tersedianya SDM sesuai kebutuhan organisasi secara memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Upaya peningkatan profesionalisme pegawai dilakukan secara menyeluruh yang dimulai sejak proses rekrutmen. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri senantiasa menjunjung tinggi komitmen bagi pelaksanaan proses rekrutmen pegawai yang bersih, transparan dan akuntabel. Selanjutnya Kemlu akan terus memperkuat aspek pemberdayaan sumber daya manusianya antara lain melalui pemetaan jalur karir para karyawannya. Pembenahan aspek ini tentunya akan meningkatkan semangat kerja dan peningkatan kinerja karyawan.

Melalui Seleksi Penerimaan CPNS yang terprogram, komposisi pegawai Kementerian Luar Negeri telah mengalami perubahan. Jika pada tahun 2003 perbandingan jumlah Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) dan Non – Pejabat Dinas Luar Negeri (Non-PDLN/Administrasi) adalah 1296 : 2588 (1 : 2), pada tahun 2011 perbandingan tersebut bergeser menjadi 2707 : 896 (3 : 1). Perubahan komposisi ini telah dirasakan sangat membantu pelaksanaan visi dan misi Kementerian Luar Negeri.

Proses penguatan kelembagaan Kemlu ditandai pula dengan trend peningkatan jumlah personil berpendidikan tinggi yang terjadi bersamaan dengan *rightsizing* jumlah pegawai. Selain sebagai efek dari kebijakan Kementerian Luar Negeri yang hanya menjaring tenaga berpendidikan tinggi dalam rekrutmen pegawainya pada kurun waktu terakhir, hal tersebut juga didorong oleh perkembangan jumlah pegaawai Kementerian Luar Negeri yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam masa karirnya. Pada tahun 2011, tercatat sejumlah 2.531 orang atau 70,2% dari pegawai Kemlu memiliki latar pendidikan sarjana atau pasca sarjana.

Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2009 telah menyusun rencana aksi terkait dengan program pengembangan SDM. Rencana aksi tersebut meliputi analisa dan evaluasi jabatan serta pemberian remunerasi; pengukuran analisa beban kerja; penyempurnaan database pegawai; penyusunan kode etik diplomat; penyempurnaan regulasi; penyempurnaan mekanisme kerja dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi; penyempurnaan *assessment* kompetensi individu; penyempurnaan mekanisme rotasi, mutasi dan promosi; serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang peningkatan profesionalisme SDM.

Di bidang manajemen keuangan, guna melakukan pembenahan secara komprehensif mengenai

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan di Pusat dan Perwakilan, Kemlu telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Luar Negeri dengan Kepala BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kemlu dan BPKP telah membentuk tim audit bersama dan mengadakan *in-house training* guna mewujudkan manajemen keuangan yang baik. Selain itu, Kemlu telah menyepakati kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan BPK mengenai pengelolaan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, Kemlu terus memperkuat mekansime ini melalui penerapan *e-procurement* di tahun 2007 dan Unit Pelayanan Pengadaan di tahun 2010 guna merampingkan proses pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan aspek effisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dan transparansi. Upaya perbaikan di bidang ini juga menyentuh perbaikan berbagai fasilitas fisik di Kemlu yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan Kemlu.

Di bidang teknologi informasi, Kemlu sedang dalam tahapan finalisasi rancangan Cetak Biru Teknologi Informatika Kemlu yang akan memberikan kerangka penerapan TI dalam lima tahun ke depan. Penerapan teknologi informatika ini akan memperkuat mekanisme kerja.

Kementerian Luar Negeri membuka layanan Surat Elektronik Pengaduan Masyarakat yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal dengan alamat pengaduan: itjen@kemlu.go.id. Layanan tersebut digunakan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyampaikan informasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Luar Negeri baik di pusat maupun di perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri.

PENUTUP

Sepanjang tahun 2011 masyarakat internasional terus menghadapi berbagai tantangan serius seperti masih belum pulihnya sebagian perekonomian global dari krisis keuangan dan ekonomi, ancaman pandemik global; serta tantangan perubahan iklim. Semuanya ini bersifat multidimensional dan terjadi secara bersamaan.

Gabungan dari tantangan yang bersifat tradisional dan non-tradisional, lama dan baru, merupakan kenyataan yang dihadapi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Karakter lintas-batas dan global dari berbagai tantangan ini mengharuskan diplomasi Indonesia untuk mengedepankan kerja sama internasional baik di tataran bilateral, regional maupun multilateral untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Sejalan dengan semboyan "sejuta sahabat, tanpa musuh", kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2011 secara aktif berupaya meningkatkan ke tataran yang lebih tinggi hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia – Asia Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika. Promosi perdagangan, investasi dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri membawa sumbangan nyata bagi pembangunan nasional. Dalam kaitan ini upaya peningkatan hubungan bilateral terus dilakukan dengan penekanan pada pembentukan ataupun revitalisasi dari mekanisme dialog bilateral dengan berbagai negara sahabat.

Di tataran regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia senantiasa menunjukkan kepemimpinan. Dengan semakin mendekatnya target waktu perwujudan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 mendatang, Indonesia selalu berupaya untuk memastikan agar ASEAN "*on track*" dalam pencapaian tiga pilar komunitas ASEAN.

Diharapkan gagasan mengenai peningkatan dan penguatan peran ASEAN di dunia merupakan kelanjutan alamiah dari proses konsolidasi ASEAN. Ini dapat menjadi tonggak ketiga proses konsolidasi ASEAN melalui kesepakatan ASEAN semacam Bali Concord III.

Pada tataran kawasan yang lebih luas, tahun ini Indonesia kembali menunjukkan "*intellectual leadership*-nya". Hal tersebut tercermin dengan diterimanya pandangan Indonesia dalam perdebatan tentang regional *architecture building*. Secara khusus, pandangan Indonesia dimaksud adalah untuk menciptakan kawasan Asia Pasifik yang lebih stabil, damai dan sejahtera berdasarkan pada "*dynamic equilibrium*" dalam konstelasi hubungan antar negara di kawasan, dimana ASEAN terus memainkan peranan utama. Hal ini terjabarkan antara lain melalui perluasan keanggotaan *East Asia Summit* dengan diterimanya keanggotaan AS dan Rusia secara bersamaan. Sebagaimana telah dirancang sejak awal, partisipasi perdana AS dan Rusia akan dilakukan di bawah keketuaan Indonesia pada tahun 2011.

Sepanjang tahun 2011, Indonesia terus memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateral. Indonesia berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama terus mendorong proses reformasi PBB. PBB, dengan legitimasinya yang bersumber dari keanggotaannya yang bersifat universal, tetap menjadi forum utama penanganan berbagai tantangan dan krisis global.

Indonesia juga terus bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat antar-bangsa. Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai

bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global; sebagai suatu negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan yang ada.

Upaya menjembatani tersebut akan dilakukan tidak saja dalam konteks PBB, tetapi juga di berbagai fora multilateral lainnya di mana Indonesia berperan aktif bagi penanganan sejumlah isu yang dihadapi masyarakat internasional, termasuk dalam forum G20 selaku forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi dunia.

Indonesia juga terus memberikan perhatian terhadap perkembangan di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan proses perdamaian yang ditujukan untuk mewujudkan suatu negara Palestina merdeka.

Politik luar negeri Indonesia juga tidak mengabaikan berbagai tantangan yang terus berlanjut di Afghanistan dan Irak. Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas nasional serta prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI.

Sepanjang tahun 2011 politik luar negeri juga difokuskan untuk mengelola “isu-isu intermestik” –isu dimana perbedaan antara isu-isu internasional dan domestik tidak nampak dengan jelas. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu isu intermestik yang menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Kebijakan mengenai hal ini didasarkan pada prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Untuk itu dalam diplomasi bilateral dengan negara-negara terkait berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya mekanisme atau kerangka hukum bagi perlindungan WNI.

Perhatian khusus juga terus diberikan pada diplomasi perbatasan dalam menjamin keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI.

Ke dalam, proses benah diri Kemlu terus menerus dilaksanakan untuk perbaikan dan penyempurnaan sumber daya manusia maupun sistem yang ada agar tugas-tugas Kemlu dan sasaran-sasaran politik luar negeri dapat terlaksana dan tercapai secara efektif dan efisien.